BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 278.1 /V.01/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Pasal 360 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Tekhnologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi. Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024;
26. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
27. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024;
28. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dlam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu keputusan ini terdiri atas:

a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM;
d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
e. Dinas Perumahan dan Permukiman;
f. Satuan Polisi Pamong Praja;
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
i. Dinas Sosial;
j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
k. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
l. Dinas Ketahanan Pangan;
m. Dinas Lingkungan Hidup;
n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
q. Dinas Perhubungan;
r. Dinas Komunikasi dan Informatika;
s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
u. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
w. Dinas Perikanan;
x. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
y. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
z. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
aa. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
bb. Sekretariat Daerah;
cc. Sekretariat DPRD;
dd. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
ee. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
ff. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
gg. Badan Kepegawaian dan Diklat;
hh. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
ii. Inspektorat;
jj. Kecamatan Natar;
kk. Kecamatan Tanjung Bintang;
ll. Kecamatan Kalianda;
mm. Kecamatan Sidomulyo;
nn. Kecamatan Katibung;
oo. Kecamatan Penengahan;
pp. Kecamatan Palas;

qq. Kecamatan Jati Agung;
rr. Kecamatan Ketapang;
ss. Kecamatan Sragi;
tt. Kecamatan Rajabasa;
uu. Kecamatan Candipuro;
vv. Kecamatan Merbau Mataram;
ww. Kecamatan Bakauheni;
xx. Kecamatan Tanjung Sari;
yy. Kecamatan Way Sulan;
zz. Kecamatan Way Panji; dan
aaa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal **23 Juni** 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 278.1 /V.01/HK/2025
TANGGAL : 23 Juni 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

A. UMUM

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melakukan beberapa kebijakan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 antara lain: (1) adanya perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program-program prioritas Nasional, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan inovasi Daerah; dan (2) tambahan alokasi pada beberapa komponen belanja, baik untuk kebutuhan mendesak dan prioritas untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Daftar Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Dinas Perumahan dan Permukiman;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Dinas Ketahanan Pangan;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
17. Dinas Perhubungan;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika;
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
21. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
23. Dinas Perikanan;
24. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
25. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
26. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
27. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
28. Sekretariat Daerah;
29. Sekretariat DPRD;

30. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
31. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
32. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
33. Badan Kepegawaian dan Diklat;
34. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
35. Inspektorat;
36. Kecamatan Natar;
37. Kecamatan Tanjung Bintang;
38. Kecamatan Kalianda;
39. Kecamatan Sidomulyo;
40. Kecamatan Katibung;
41. Kecamatan Penengahan;
42. Kecamatan Palas;
43. Kecamatan Jati Agung;
44. Kecamatan Ketapang;
45. Kecamatan Sragi;
46. Kecamatan Rajabasa;
47. Kecamatan Candipuro;
48. Kecamatan Merbau Mataram;
49. Kecamatan Bakauheni;
50. Kecamatan Tanjung Sari;
51. Kecamatan Way Sulan;
52. Kecamatan Way Panji; dan
53. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RADITYO EGI PRATAMA







PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (PERUBAHAN RENJA-PD)

INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

https://inspektorat.lampungselatankab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 selesai disusun dan dapat disajikan untuk memberikan gambaran mengenai berbagai kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 mempunyai arti strategis karena merupakan tahun keempat pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Selatan 2022-2026, dengan tema RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 adalah "Pembangunan Inklusif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat".

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Inspektorat pada hakikatnya merupakan perwujudan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang sudah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) yang kami sampaikan tentu masih kurang sempurna dan belum memuaskan semua pihak. Oleh karena itu, saran, kritik dan masukannya sangat kami harapkan sebagai bahan koreksi dan evaluasi kami dalam meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

Kalianda, 01 Juli 2025
Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Hi. ANTON CARMANA, S.E.
Pembina Utama Muda (IV/)
NIP 19670819 199503 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.3.1. Maksud 6
1.3.2. Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu 8
2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2023 dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan 2024 10
2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2023) 24
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 28
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 30
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 35
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 44

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 45

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 45

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 46

3.3. Program dan Kegiatan Proritas 48

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 57

4.1. Rencana Kerja Dan Pendanaan 57

4.2 Sinkronisasi Prioritas Perangkat Daerah Dengan Prioritas Daerah Dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 66

BAB V PENUTUP 80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1. T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Inspektorat sampai dengan Tahun 2023 11

Tabel 2.2.1. T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan 28

Tabel 2.4.1. T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan 38

Tabel 3.3. T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Lampung Selatan 50

Tabel 4.1. T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Lampung Selatan 59

Tabel 4.2.1 Sinkronisasi Prioritas Perangkat Daerah dengan Prioritas Daerah Tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan 66

Tabel 4.2.2 Sinkronisasi Prioritas Perangkat Daerah dengan dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan 73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2

Gambar 1.2. Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD 3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Inspektur, bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kerjasama dan koordinasi dibidang pelaksanaan dan pengendalian pengawasan dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas bidang pengawasan, serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Lampung

Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien dan efektif, yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang SMART, terpadu, dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Telah dipahami secara umum bahwa: *failing to plan is planning to fail*; gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya.

Renja Inspektorat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan Renja Inspektorat adalah sebagai berikut:

1) Persiapan penyusunan Renja Inspektorat;

2) Penyusunan Rancangan Awal Renja Inspektorat berpedoman pada Renstra Inspektorat, evaluasi hasil Renja Inspektorat tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;

3) Penyusunan Rancangan Renja Inspektorat berdasarkan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah Nomor 1 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Recana Kerja Perangkat daerah (Renja-PD) Tahun 2025;

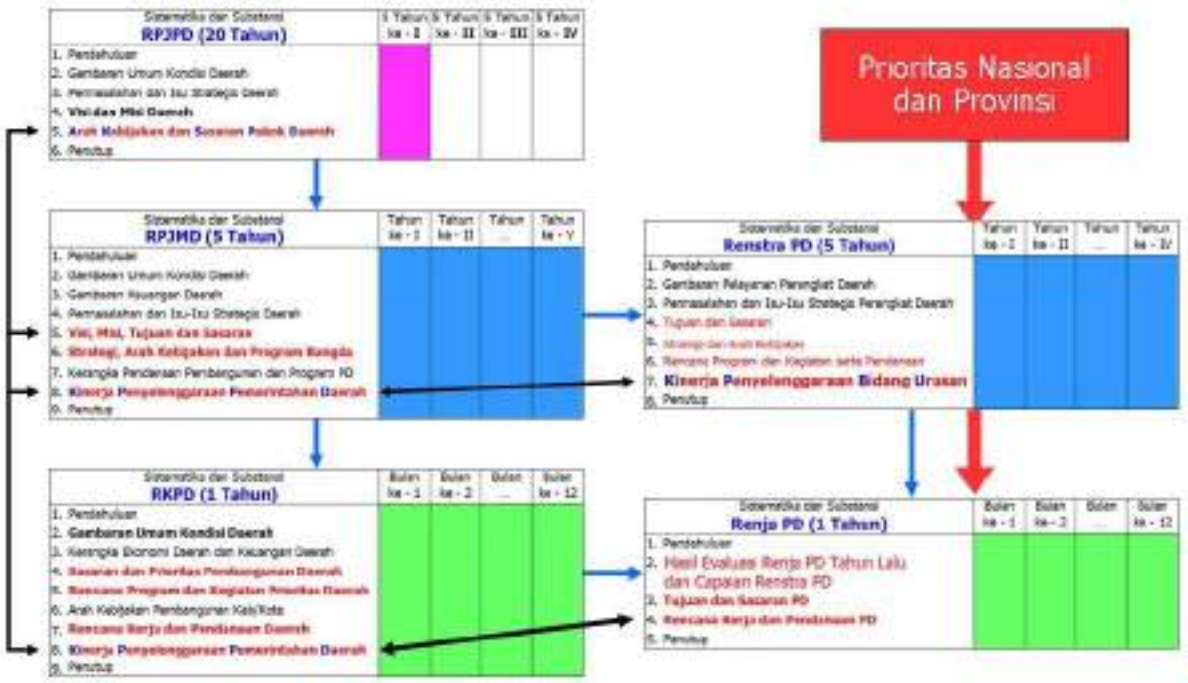
4) Pembahasan Rancangan Renja Inspektorat dalam Forum Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran;

5) Perumusan Rancangan Akhir Renja Inspektorat berdasarkan Perkada tentang RKPD;

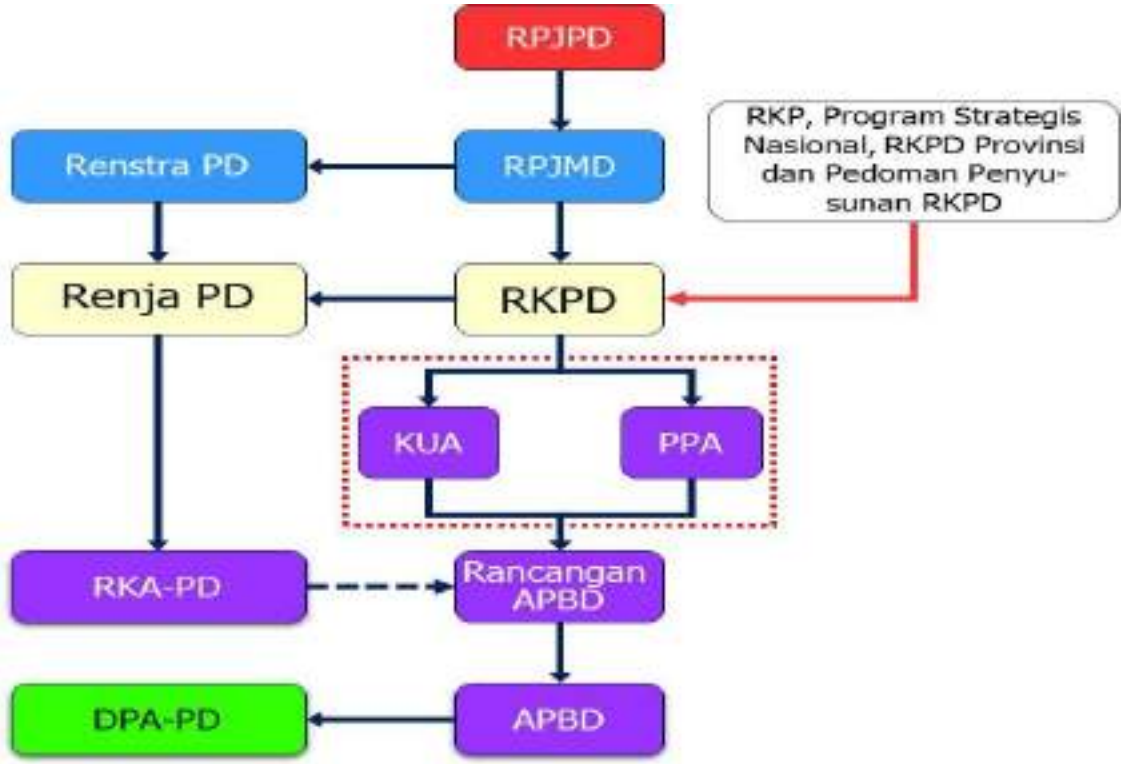
6) Verifikasi Rancangan Akhir Renja Inspektorat untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Keterkaitan Dokumen Renja Inspektorat dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1. Sedangkan tindak lanjut dokumen Renja PD hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2.

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Gambar 1.2. Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD



Sejalan dengan dasar pikir di atas maka Inspektorat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja Inspektorat untuk tahun 2025. Dimana Renja Inspektorat merupakan dokumen rencana pembangunan Inspektorat yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Inspektorat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Yang berlandaskan pada RPJMD Kabuapten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 dan Renstra Inspektorat yang bersinergi dengan Renstra Inspektorat Provinsi Lampung.

Dalam hal ini kegiatan Inspektorat sebagai instansi yang mengurusi bidang pelaksanaan dan pengendalian pengawasan bertujuan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 DASAR HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
4) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dibah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ Tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
12) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 -2024;
13) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025;
14) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
16) Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
17) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 ini adalah menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasionil:

1) Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Inspektorat dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2025;
2) Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengawasan dan laporan kinerja**.**

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, hasil review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran Renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) sesuai dengan bidang urusan Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bagian ini menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun 2023 dan perkiraan capaiannya di tahun 2024 serta capaian Renstra Inspektorat tahun 2024.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan tahun 2023 didapat dari realisasi hasil hasil kinerja tahunan dan realisasi APBD Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.

Rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat, dilaksanakan untuk:

1) Mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2) Mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3) Mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui:

1) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat;
3) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, Inspektorat mendukung pencapaian sasaran prioritas Pembangunan daerah tahun 2024 "*Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi*" dengan indikator "*Indeks Reformasi Birokrasi*", "*Maturitas SPIP*", dan "*Peningkatan Kapabilitas APIP*". Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan keuangan pada urusan pemerintahan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Inspektorat melakukan pengukuran kinerja program/kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran terhadap target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

   Pada tahun 2023 capaian program penyelenggaraan pengawasan dapat di jabarkan pada tabel berikut:

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja Program		% Capaian Program
		Target	Capaian	
Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan di lingkungan inspektorat daerah	100%	101,7%	101,7%

Pencapaian Program penyelenggaraan pengawasan melebihi target kinerja yang ditetapkan dikarenakan target kinerja pengawasan berdasarkan DPA sebanyak 287 pengawasan dengan realisasi pengawasan sebanyak 292 pengawasan sehingga ada kelebihan 5 pengawasan. Hal ini disebabkan adanya penambahan penyelenggaraan pengawasan pada desa dan pengawasan dengan tujuan tertentu di luar Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2023.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

   Pada tahun 2023 capaian program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dapat di jabarkan pada tabel berikut:

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja Program		% Capaian Program
		Target	Capaian	
Meningkatkan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Pengawasan	100%	100%	100%

Pencapaian Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi sesuai dengan target kinerja yang ditentukan dengan capaian 100%. Dimana pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang

pengawasan dan fasilitasi pengawasan dengan target kinerja 3 laporan rekomendasi terealisasi 100%, dan kegiatan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah dengan target 53 laporan perangkat daerah terealisasi 100%.

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2023 dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan 2024

Hasil pelaksanaan Renja Inspektorat tahun 2023 dan perkiraan capaiannya di tahun 2024 adalah:

Tabel 2.1.1. T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Inspektorat sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Lampung Selatan

Nama Perangkat Daerah : INSPEKTORAT

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6	01				INSPEKTORAT DAERAH															
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	80	Poin	80	Poin	80	Poin	80	Poin	100	80	Poin	80	Poin	100
6	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	100	10	Dokumen	30	Dokumen	58,8
6	01	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	6	Dokumen	55
6	01	01	2.01	0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60
6	01	01	2.01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6	01	01	2.01	0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60
6	01	01	2.01	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60
6	01	01	2.01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100	4	Laporan	12	Laporan	60
6	**01**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**195**	**Laporan**	**39**	**Laporan**	**39**	**Laporan**	**39**	**Laporan**	**100**	**39**	**Laporan**	**117**	**Laporan**	**60**
6	01	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59	Orang/bulan	54	Orang/bulan	59	Orang/bulan	59	Orang/bulan	100	59	Orang/bulan	59	Orang/bulan	100
6	01	01	2.02	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100	12	Dokumen	36	Dokumen	60

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6	01	01	2.02	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	3	Laporan	60
6	01	01	2.02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	70	Laporan	14	Laporan	14	Laporan	14	Laporan	100	14	Laporan	42	Laporan	60
6	**01**	**01**	**2.03**		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**15**	**Dokumen**	**3**	**Dokumen**	**3**	**Dokumen**	**3**	**Dokumen**	**100**	**3**	**Dokumen**	**9**	**Dokumen**	**60**
6	01	01	2.03	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60
6	01	01	2.03	0005	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	3	Laporan	60
6	01	01	2.03	0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	3	Laporan	60

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6	**01**	**01**	**2.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**8**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**100**	**%**	**30**	**%**	**30**
6	01	01	2.05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket	0	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	2	Paket	50
6	01	01	2.05	0005	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	2	Dokumen	50
6	01	01	2.05	0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80	Orang	24	Orang		Orang		Orang			Orang	24	Orang	30
6	01	01	2.05	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	679	Orang	0	Orang	60	Orang	60	Orang	100	58	Orang	118	Orang	17
6	01	01	2.05	0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300	Orang	60	Orang	60	Orang	60	Orang	100	58	Orang	178	Orang	59

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6	**01**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**19,5**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**100**	**%**	**60**	**%**	**60**
6	01	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	3	Paket	60
6	01	01	2.06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	1	Paket	2	Paket	2	Paket	100	2	Paket	5	Paket	50
6	01	01	2.06	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	3	Paket	60
6	01	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	3	Paket	60
6	01	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	3	Paket	60
6	01	01	2.06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100	12	Dokumen	36	Dokumen	60
6	01	01	2.06	0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	36	Laporan	60
6	01	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	36	Laporan	60

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6	**01**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**90**	**Unit**	**12**	**Unit**	**19**	**Unit**	**19**	**Unit**	**100**	**34**	**Unit**	**65**	**Unit**	**72,2**
6	01	01	2.07	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit		Unit		Unit		Unit			Unit	0	Unit	
6	01	01	2.07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	80	Unit	12	Unit	17	Unit	17	Unit	100	31	Unit	60	Unit	75
6	01	01	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	0	Unit	2	Unit	2	Unit	100	3	Unit	5	Unit	50
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60**	**Laporan**	**12**	**Laporan**	**12**	**Laporan**	**12**	**Laporan**	**100**	**12**	**Laporan**	**36**	**Laporan**	**60**
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	36	Laporan	60

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**173**	**Unit**	**46**	**Unit**	**52**	**Unit**	**52**	**Unit**	**100**	**53**	**Unit**	**151**	**Unit**	**87**
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	Unit	7	Unit	7	Unit	7	Unit	100	8	Unit	8	Unit	100
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150	Unit	36	Unit	42	Unit	42	Unit	100	42	Unit	120	Unit	80
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	1	Unit	1	Unit	20
6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	1	Unit	1	Unit	20
6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	1	Unit	1	Unit	20

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Inspektorat daerah**	**100**	**%**	**13,4**	**%**	**100**	**%**	**101,72**	**%**	**101,72**	**100**	**%**	**53,8**	**%**	**53,8**
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**1404**	**Laporan**	**173**	**Laporan**	**237**	**Laporan**	**238**	**Laporan**	**100,4**	**325**	**Laporan**	**736**	**Laporan**	**52,4**
6	01	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	265	Laporan	53	Laporan	53	Laporan	53	Laporan	100	53	Laporan	159	Laporan	60,0
6	01	02	2.01	0002	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	525	Laporan	50	Laporan	100	Laporan	98	Laporan	98	115	Laporan	263	Laporan	50,1
6	01	02	2.01	0003	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30	Laporan	6	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	100	9	Laporan	20	Laporan	66,7
6	01	02	2.01	0004	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	50	Laporan	5	Laporan	9	Laporan	9	Laporan	100	11	Laporan	25	Laporan	50,0
6	01	02	2.01	0005	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	500	Laporan	53	Laporan	64	Laporan	67	Laporan	104,7	131	Laporan	251	Laporan	50,2
6	01	02	2.01	0006	Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	10	Kesepakatan	2	Kesepakatan	2	Kesepakatan	2	Kesepakatan	100	2	Kesepakatan	6	Kesepakatan	60,0
6	01	02	2.01	0007	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	24	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100	4	Dokumen	12	Dokumen	50,0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6	**01**	**02**	**2.02**		**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti**	**270**	**Laporan**	**52**	**Laporan**	**54**	**Laporan**	**58**	**Laporan**	**107,4**	**54**	**Laporan**	**164**	**Laporan**	**60,7**
6	01	02	2.02	0001	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	20	Laporan	2	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100	4	Laporan	10	Laporan	50,0
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	250	Laporan	50	Laporan	50	Laporan	54	Laporan	108	50	Laporan	154	Laporan	61,6
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**100**	**%**	**65,3**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**100**	**%**	**60,0**	**%**	**60,0**
6	**01**	**03**	**2.01**		**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Rekomendasi Hasil Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**15**	**Rekomendasi**	**3**	**Rekomendasi**	**3**	**Rekomendasi**	**3**	**Rekomendasi**	**100**	**3**	**Rekomendasi**	**9**	**Rekomendasi**	**60**
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	10	Rekomendasi	2	Rekomendasi	2	Rekomendasi	2	Rekomendasi	100	2	Rekomendasi	6	Rekomendasi	60
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	5	Rekomendasi	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100	1	Rekomendasi	3	Rekomendasi	60

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**100**	**%**	**72,1**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**100**	**%**	**60**	**%**	**60**
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	53	Perangkat Daerah	53	Perangkat Daerah	53	Perangkat Daerah	53	Perangkat Daerah	100	53	Perangkat Daerah	53	Perangkat Daerah	100
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	53	Perangkat Daerah	53	Perangkat Daerah	53	Perangkat Daerah	53	Perangkat Daerah	100	53	Perangkat Daerah	53	Perangkat Daerah	100
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	85	Kegiatan	17	Kegiatan	17	Kegiatan	17	Kegiatan	100	17	Kegiatan	51	Kegiatan	60
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	53	Perangkat Daerah	53	Perangkat Daerah	53	Perangkat Daerah	53	Perangkat Daerah	100	53	Perangkat Daerah	53	Perangkat Daerah	100

Pada tabel 2.1.1 sesuai format tabel T-C.29 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Renja tahun anggaran 2023 realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:
   a. Program yang melebihi target kinerja hasil adalah:
      1) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Indikator Kinerja Program	Kinerja Program		% Capaian Program
	Target	Capaian	
Persentase penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Inspektorat daerah) (%)	100	101,72	101,72

   b. Kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran adalah:
      1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Kegiatan		% Capaian Kegiatan
	Target	Capaian	
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal (laporan)	237	238	100,4

      2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Kegiatan		% Capaian Kegiatan
	Target	Capaian	
Jumlah Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti (laporan)	54	58	107,4

2. Renja tahun anggaran 2023 realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:

a. Program yang memenuhi target kinerja hasil 100% adalah:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Program	Kinerja Program		% Capaian Program
	Target	Capaian	
Indeks Kepuasan Pelayanan (poin)	80	80	100

2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Indikator Kinerja Program	Kinerja Program		% Capaian Program
	Target	Capaian	
Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (%)	100	100	100

b. Kegiatan yang memenuhi target kinerja keluaran 100% adalah:

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Kegiatan		% Capaian Kegiatan
	Target	Capaian	
Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)	10	10	100

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Kegiatan		% Capaian Kegiatan
	Target	Capaian	
Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah (laporan)	39	39	100

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Kegiatan		% Capaian Kegiatan
	Target	Capaian	
Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah (dokumen)	3	3	100

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Kegiatan		% Capaian Kegiatan
	Target	Capaian	
Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	100	100

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Kegiatan		% Capaian Kegiatan
	Target	Capaian	
Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	100	100

6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Kegiatan		% Capaian Kegiatan
	Target	Capaian	
Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah unit)	19	19	100

7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Kegiatan		% Capaian Kegiatan
	Target	Capaian	
Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (laporan)	12	12	100

8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Kegiatan		% Capaian Kegiatan
	Target	Capaian	
Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara (unit)	52	52	100

9) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Kegiatan		% Capaian Kegiatan
	Target	Capaian	
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan (rekomendasi)	3	3	100

10) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Kegiatan		% Capaian Kegiatan
	Target	Capaian	
Jumlah Pendampingan dan Asistensi Perangakat Daerah (perangkat daerah)	53	53	100

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2023)

Capaian hasil pelaksanaan Renstra Inspektorat hingga tahun lalu (tahun 2023) adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.1 di atas pada subbab 2.1.1. dapat di jabarkan bahwa Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Inspektorat tahun 2022 s/d 2023 terhadap target Renstra 2022-2026 sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Program	Kinerja Program		% Capaian Kinerja Program s.d. 2023 terhadap akhir Renstra 2026
	Target Akhir Renstra 2026	Capaian s.d. 2023	
Indeks Kepuasan Pelayanan (poin)	80	80	100

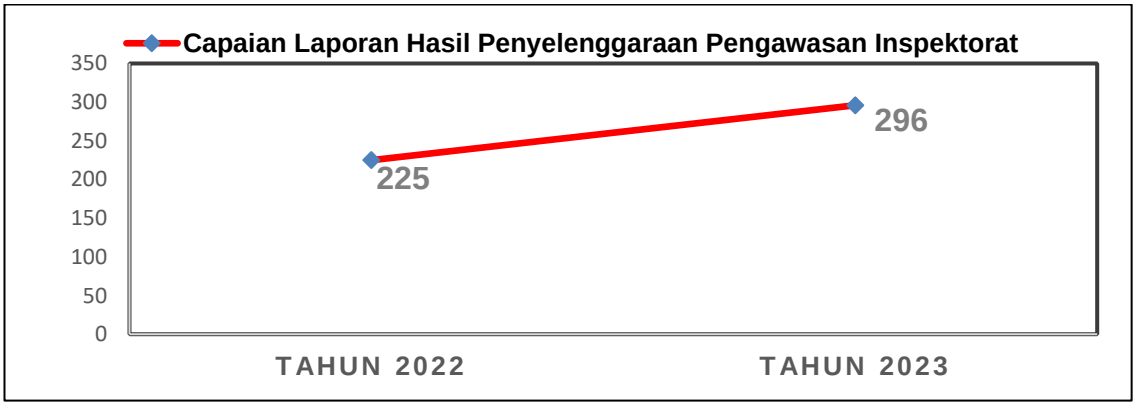
b. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Indikator Kinerja Program	Kinerja Program		% Capaian Kinerja Program s.d. 2023 terhadap akhir Renstra 2026
	Target Akhir Renstra 2026	Capaian s.d. 2023	
Persentase penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Inspektorat daerah (%)	100	31,12	31,12

Target akhir renstra 2022-2026 pada penyelenggaraan pengawasan di lingkungan inspektorat daerah adalah 1.674 laporan hasil pengawasan, hasil tersebut terdiri dari hasil laporan hasil pengawasan internal sebanyak 1.404 laporan dan hasil laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti sebanyak 270 laporan.

Capaian laporan hasil penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Inspektorat daerah selama 2 (dua) tahun 2022 s.d. 2023 telah tercapai sebanyak 521 laporan hasil pengawasan dengan capaian kinerja 31,12%. Hasil tersebut diperoleh dari pengawasan internal sebanyak 411 laporan dan hasil laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti sebanyak 110 laporan hasil pengawasan.

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja Inspektorat dalam penyelenggaraan pengawasan mengalami peningkatan setiap tahunnya yang terjadi pada grafik berikut:



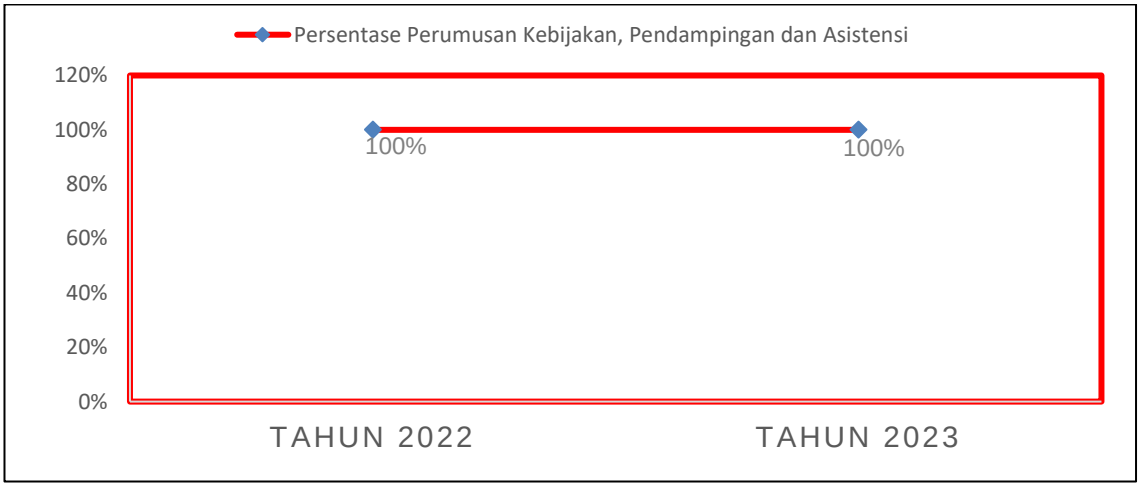
c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Indikator Kinerja Program	Kinerja Program		% Capaian Kinerja Program s.d. 2023 terhadap akhir Renstra 2026
	Target Akhir Renstra 2026	Capaian s.d. 2023	
Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (%)	100	74	74

Target akhir renstra 2022-2026 pada perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terdiri dari hasil jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan sebanyak 15 rekomendasi dan hasil jumlah pendampingan dan asistensi perangakat daerah sebanyak 53 perangkat daerah.

Capaian persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi selama 2 (dua) tahun 2022 s.d. 2023 telah tercapai 74% dengan capaian kinerja 74%. Hasil tersebut diperoleh dari hasil jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan sebanyak 6 rekomendasi dan persentase hasil pendampingan dan asistensi perangakat daerah sebanyak 79,1%.

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja Inspektorat dalam perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi tercapai sesuai target setiap tahunnya yang terjadi pada grafik berikut:



Berdasarkan uraian pembahasan 2.1.1. dan 2.1.2 terkait keberhasilan capaian kinerja Inspektorat terdapat faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya dan melebihi target capain kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan adalah:

1) Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan bahkan sampai melebihi target kinerja yang teleh ditentukan;
2) Dukungan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang menjelaskan bahwa dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat daerah sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan. Dukungan anggaran APBD untuk

program dan kegiatan Inspektorat;

3) Kapabilitas APIP yang berkompeten di Inspektorat sehingga pelaksanaan pengawasan dapat terlaksana sesuai target kinerja Inspektorat;
4) Hubungan kerjasama yang baik terkait pengawasan antara Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan dengan Inspektorat Provinsi Lampung, BPKP dan BPK.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja pelayanan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan IKK (Indikator Kinerja Kunci) Inspektorat hingga tahun berjalan 2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.1. T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan

No	Indikator Kinerja	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Skor Maturitas SPIP		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Persentase Pencapaian kinerja sebesar 100 % dari target yang ditentukan
2	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai di Tindak Lanjuti			85%	85%	100%	100%	85%	85%	100%	100%	Persentase Pencapaian kinerja sebesar 100 % dari target yang ditentukan
3	Persentase Penurunan Jumlah Temuan			85%	85%	100%	100%	85%	85%	100%	100%	Persentase Pencapaian kinerja sebesar 100 % dari target yang ditentukan
4	Persentase Pengaduan yang selesai ditindaklanjuti			85%	85%	100%	100%	85%	85%	100%	100%	Persentase Pencapaian kinerja sebesar 100 % dari target yang ditentukan
5	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP)		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Persentase Pencapaian kinerja sebesar 100 % dari target yang ditentukan

Capaian kinerja secara umum pada tahun 2022 s.d. 2023 telah menunjukan capaian sebagaimana yang diharapkan. Indikator kinerja utama Inspektorat mengalami kecenderungan positif/kenaikan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat mengacu pada indikator yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Pengendalian internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, setiap tahunnya perlu dilakukan

penilaian atas kematangan sistem pengendalian internal atau yang disebut dengan level maturitas SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Penilaian tersebut mencakup tiga komponen, yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Penilaian atas level maturitas SPIP diperoleh dari hasil evaluasi oleh BPKP. Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan upaya untuk mencapai target level 3 maturitas SPIP melalui pelaksanaan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan persentase ketercapaian 100%.

Peningkatan kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah ditargetkan berada pada level 3 untuk tahun 2024. Dengan mewujudkan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif melalui peningkatan kompetensi APIP, Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan salah satu langkah dalam menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif terahadap penerapan Sistem Pengendalian Intern. Level 3 (*Integrated*) untuk kapabilitas APIP menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar. *Outcome* yang dihasilkan adalah APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Rancangan Tema Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan pada RKPD Tahun 2025 adalah "*Pembangunan Inklusif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*". Pembangunan Inklusif adalah pembangunan yang berpedoman pada Pancasila sila ke-3 dan ke-5, yang membuat rakyatnya tidak ada yang merasa tertinggal dalam pemenuhan haknya. Pembangunan inklusif dapat diartikan sebagai proses yang mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi infrastruktur, sosial, politik dan kesehatan.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 terdapat 5 (lima) prioritas yaitu:

a. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial;
b. Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan inovasi dan produktivitas tenaga kerja;
c. Pembangunan kewilayahan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan;
d. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum, ketahanan budaya, dan mitigasi bencana;
e. Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik.

Dari arah kebijakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 maka Inspektorat bertanggungjawab pada prioritas ke 5 (lima) "*Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik*". Inspektorat melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:

1) Peningkatan kinerja Perangkat Daerah, UPTD Puskesmas, SD dan SMP di Kabupaten Lampung Selatan;
2) Pelaksanaan urusan pemerintah pada 256 Desa di Kabupaten Lampung Selatan; dan
3) Implementasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik pada pemerintahan Kabupaten

Lampung Selatan dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

Pada tahun 2024 Inspektorat memiliki permasalahan yang sangat komplek karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitive terhadap aspek pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat mempengaruhi sasaran dan indikator kinerja Inspektorat di tahun 2024 dan tahun 2025 yang akan datang. Isu/permasalahan/tantangan dalam penyelenggaran tugas dan fungsi Inspektorat untuk pencapaian kinerja utama Inspektorat adalah:

1) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran Perangkat Daerah (PD). Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2) Hasil pengawasan APIP tidak segera di tindak lanjuti (TL) oleh obrik;
3) Kapabilitas APIP Inspektorat perlu ditingkatkan;
4) Peningkatan pelayanan Inspektorat atas pengaduan Masyarakat.

Peluang Inspektorat dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi untuk pencapaian kinerja Inspektorat adalah:

1) Dukungan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024. Lampiran E. *Hal Khusus Lainnya,* Halaman 120 yang menjelaskan bahwa:
   Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

   1. Kegiatan pengawasan, yaitu: pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan

kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;

2. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP;
3. Dukungan penyediaan sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton, transportasi dan lain-lain.

Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi:

- Pemerintah Daerah kabupaten/kota:
  a) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;
  b) diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
  c) diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- Alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud, tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat.

2) Dukungan kerjasama yang baik dari Inspektorat Provinsi, BPKP, dan BPK dalam rangka kegiatan pengawasan urusan pemerintahan.
3) Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam kebijakan dan implementasinya pada kegiatan pengawasan urusan pemerintahan semakin besar.
4) Adanya perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) dalam menangani kasus-kasus pengaduan masyarakat dan kasus-kasus yang terindikasi tindak pidana korupsi.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan tahun anggaran 2025 antara lain adalah sebagai berikut :

1) Untuk meningkatkan skor maturitas SPIP dalam rangka pencapaian target maka perlu dilakukan adalah:
   a) Seluruh Perangkat Daerah memperbaiki *cascading* yang dimulai dari sasaran PEMDA, sasaran PD, dan sasaran program/kegiatan.
   b) Menetapkan Peraturan Bupati tentang struktur pengelolaan risiko.
   c) Melakukan identifikasi risiko strategis PEMDA dan risiko strategis PD.
   d) Meningkatkan pengamanan administrasi, fisik, dan hukum atas asset milik PEMDA.
   e) Melakukan pembinaan pada PPTK dan bendahara terkait proses pertanggungjawaban daerah.
   f) Melakukan pembinaan dan pengawasan yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mendorong perangkat daerah untuk berinovasi.
2) Untuk meningkatkan persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai di tindak lanjuti dan persentase penurunan jumlah temuan, dalam rangka pencapaian target maka perlu dilakukan adalah:
   a) Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan BPK.
   b) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada obrik.
   c) Memberikan peringatan teguran secara tertulis dan secara langsung agar dapat segera menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan BPK.
   d) Membuat Peraturan Bupati terkait tindak lanjut hasil pengawasan.
3) Untuk meningkatkan Persentase Pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dalam rangka pencapaian target maka perlu dilakukan adalah:
   a) Membuat sistem aplikasi pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dan terpadu.
   b) Menyediakan ruang layanan pojok konsultasi di Inspektorat.
4) Untuk meningkatkan Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) dalam rangka pencapaian target maka perlu dilakukan adalah:

a) Meningkatkan kompetensi APIP dengan mengikuti diklat dan bimtek minimal 120 jam/tahun per APIP.
b) Meningkatkan sinergi dan kordinasi antara BPKP dengan PEMDA.

Berdasarkan uraian diatas terkait permasalahan, dukungan dan strategi penyelesaian permasalahan Inspektorat dalam pelaksanaan tugas pokok fungsinya diperlukan dukungan anggaran yang sesuai dengan mandatori spending dari Permendagri.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja PD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Kabupaten dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan kabupaten. Program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan perlu dilakukan sinkronisasi dengan Ranwal RKPD sehingga dapat dirumuskan program/kegiatan definitif untuk diajukan menjadi rencana kerja.

Tabel 2.4.1. T-C.31. Review terhadap Perubahan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan

Nama Perangkat Daerah : INSPEKTORAT

Kode					Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisi Kebutuhan						Catatan Penting
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					25.926.068.300	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					25.926.068.200	
6	01				INSPEKTORAT DAERAH					25.926.068.300	INSPEKTORAT DAERAH					25.926.068.200	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Pelayanan	80	Poin	22.114.538.750	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Pelayanan	80	Poin	23.820.646.750	
6	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	Dokumen	87.183.950	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	Dokumen	56.634.650	
6	01	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	43.444.850	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	28.150.150	
6	01	01	2.01	0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	8.922.150	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	4.547.350	
6	01	01	2.01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	7.973.250	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	3.942.450	
6	01	01	2.01	0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	6.590.500	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	6.590.500	
6	01	01	2.01	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	6.186.500	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	3.091.500	
6	01	01	2.01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	14.066.700	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	10.312.700	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisi Kebutuhan						Catatan Penting
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	
6	**01**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**39**	**Laporan**	**11.191.534.200**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**39**	**Laporan**	**11.181.839.100**	
6	01	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58	Orang/bulan	10.841.268.200	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58	Orang/bulan	10.841.268.200	
6	01	01	2.02	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	339.599.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	334.904.500	
6	01	01	2.02	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	5.300.500	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2.423.400	
6	01	01	2.02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14	Laporan	5.366.500	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14	Laporan	3.243.000	
6	**01**	**01**	**2.03**		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**3**	**Dokumen**	**22.199.700**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**3**	**Dokumen**	**11.428.650**	
6	01	01	2.03	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	7.395.900	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	3.170.000	
6	01	01	2.03	0005	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	7.371.600	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	5.071.600	
6	01	01	2.03	0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	7.432.200	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	3.187.050	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisi Kebutuhan						Catatan Penting
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	
6	**01**	**01**	**2.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**1.056.561.050**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**814.512.450**	
6	01	01	2.05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	38.625.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	75.645.000	
6	01	01	2.05	0005	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	9.951.100	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	4.914.350	
6	01	01	2.05	0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58	Orang	722.286.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58	Orang	591.296.000	
6	01	01	2.05	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	58	Orang	48.413.700	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	512	Orang	23.960.500	
6	01	01	2.05	0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	58	Orang	237.285.250	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	58	Orang	118.696.600	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisi Kebutuhan						Catatan Penting
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	
6	**01**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**611.008.350**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**328.884.600**	
6	01	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	5.041.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	5.041.000	
6	01	01	2.06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	176.700.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	90.550.000	
6	01	01	2.06	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	17.704.800	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	17.704.800	
6	01	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	82.813.200	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	42.831.600	
6	01	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	53.093.750	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	25.921.600	
6	01	01	2.06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	18.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	18.000.000	
6	01	01	2.06	0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	19.830.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	9.915.000	
6	01	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	237.825.600	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	118.920.600	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisi Kebutuhan						Catatan Penting
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	
6	**01**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**40**	**Unit**	**641.783.500**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**39**	**Unit**	**265.803.500**	
6	01	01	2.07	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	375.980.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				
6	01	01	2.07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36	Unit	168.515.500	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36	Unit	168.515.500	Penyesuaian jenis belanja
6	01	01	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	97.288.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	97.288.000	Penyesuaian jenis belanja
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**12**	**Laporan**	**261.800.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**12**	**Laporan**	**261.800.000**	
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	261.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	261.800.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisi Kebutuhan						Catatan Penting
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**52**	**Unit**	**8.242.468.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**52**	**Unit**	**10.899.743.800**	
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	45.430.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	45.430.000	Penyesuain output
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	217.780.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	180.760.000	Penyesuain output
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42	Unit	19.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42	Unit	19.000.000	
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	7.910.258.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	10.604.553.800	
6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	25.000.000	
6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	25.000.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisi Kebutuhan						Catatan Penting
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**		**Persentase penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Inspektorat daerah**	**100**	**%**	**2.569.670.450**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**		**Persentase penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Inspektorat daerah**	**100**	**%**	**1.438.304.650**	
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**		**Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**287**	**Laporan**	**2.125.133.950**	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**		**Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**287**	**Laporan**	**1.078.694.400**	
6	01	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	53	Laporan	327.960.100	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	53	Laporan	173.830.550	
6	01	02	2.01	0002	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100	Laporan	489.853.000	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100	Laporan	253.526.750	
6	01	02	2.01	0003	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5	Laporan	217.035.800	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5	Laporan	98.555.600	
6	01	02	2.01	0004	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	17	Laporan	315.348.500	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	17	Laporan	159.238.600	
6	01	02	2.01	0005	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	107	Laporan	563.625.950	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	107	Laporan	287.952.500	Penyesuaian belanja sesuai output kegiatan
6	01	02	2.01	0006	Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	Kesepakatan	9.298.400	Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	Kesepakatan	4.649.400	Penyesuaian belanja sesuai output kegiatan
6	01	02	2.01	0007	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	Dokumen	202.012.200	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	Dokumen	100.941.000	
6	**01**	**02**	**2.02**		**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**		**Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti**	**54**	**Laporan**	**444.536.500**	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**		**Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti**	**54**	**Laporan**	**359.610.250**	
6	01	02	2.02	0001	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4	Laporan	163.986.500	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4	Laporan	159.121.000	
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	50	Laporan	280.550.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	50	Laporan	200.489.250	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisi Kebutuhan						Catatan Penting
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**		**Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**100**	**%**	**1.241.859.100**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**		**Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**100**	**%**	**667.116.800**	
6	**01**	**03**	**2.01**		**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**		**Rekomendasi Hasil Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**3**	**Rekomendasi**	**395.289.650**	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**		**Rekomendasi Hasil Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**3**	**Rekomendasi**	**216.572.100**	
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2	Rekomendasi	142.253.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2	Rekomendasi	44.716.450	
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	253.036.650	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kelurahan Way urang, Kec. Kalianda	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	171.855.650	
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**		**Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**100**	**%**	**846.569.450**	**Pendampingan dan Asistensi**		**Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**100**	**%**	**450.544.700**	
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	53	Perangkat Daerah	80.175.900	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	53	Perangkat Daerah	46.460.600	Penyesuaian rincian belanja
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	53	Perangkat Daerah	320.870.900	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	53	Perangkat Daerah	178.139.150	
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	17	Kegiatan	348.527.550	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	17	Kegiatan	181.564.000	
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	53	Perangkat Daerah	96.995.100	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	53	Perangkat Daerah	44.380.950	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan, penjaringan kebutuhan masyarakat melalui acara Musyawarah pembangunan kecamatan, Pokok pikiran DPRD (E-Pokir DPRD) dari hasil reses DPRD, pertemuan dan sosialisasi, serta melalui surat dan proposal yang dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan **tidak ada**. Sehingga Inspektorat tidak melaksanakan program dan kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024. Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tema "*Mengawal 5 (lima) Arahan Presiden*".

Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja Pemerintah tahun 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Rencana Tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 yaitu "***tahap penguatan fondasi transformasi***". Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diuraikan dalam:

a. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap arah kebijakan dan agenda pembangunan nasional;
b. Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap prioritas nasional; dan
c. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah.

Adapun uraian kegiatan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lmapung Selatan adalah sebagai berikut:

Kegiatan Pengawasan:

1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
2) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
3) Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
4) Asistensi dan Pendampingan.

Sasaran Pengawasan:

1) Pengawasan Umum;
2) Pengawasan Teknis.

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tema Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan pada RKPD Tahun 2025 adalah "***Pembangunan Inklusif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat***". Pembangunan Inklusif adalah pembangunan yang berpedoman pada Pancasila sila ke-3 dan ke-5, yang membuat rakyatnya tidak ada yang merasa tertinggal dalam pemenuhan haknya. Pembangunan inklusif dapat diartikan sebagai proses yang mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi infrastruktur, sosial, politik dan kesehatan.

Dalam mencapai tujuan sesuai tema pembangunan tahun 2025 tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan 5 (lima) prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yang terdiri dari:

1) Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial;
2) Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan inovasi dan produktivitas tenaga kerja;
3) Pembangunan kewilayahan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan;
4) Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum, ketahanan budaya, dan mitigasi bencana;
5) Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik.

Dari arah kebijakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 maka Inspektorat bertanggungjawab pada prioritas ke 5 (lima) "*Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik*". Inspektorat melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:

1) Peningkatan kinerja Perangkat Daerah, UPTD Puskesmas, SD dan SMP di Kabupaten Lampung Selatan;
2) Pelaksanaan urusan pemerintah pada 256 Desa di Kabupaten Lampung Selatan; dan
3) Implementasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik pada pemerintahan Kabupaten

Lampung Selatan dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Target	
							Satuan	2025
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi	Maturitas SPIP (nilai)	Meningkatnya pengendalian internal	Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko	1. Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal LAKIP Pemerintah Daerah; 2. Pengawasan atas kinerja dan keuangan OPD; 3. Peningkatan sistem pengendalian intern Pemerintah; 4. Peningkatan pemeriksaan operasional OPD berdasarkan urutan OPD yang risikonya paling besar; 5. Penerapan dengan pengembangan SPIP oleh OPD; 6. Peningkatan kualitas SPIP dalam penyusunan LK Pemerintah Daerah	Skor Maturitas SPIP	Nilai	4
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan	1. Pengembangan sistem informasi manajemen untuk hasil pemeriksaan berbasis komputer; 2. Pengembangan sistem informasi manajemen untuk pengawasan yang berbasis komputer; 3. Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan SAP; 4. Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan publik yang strategis.	Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan yang selesai ditindak lanjuti	%	100
			Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan masyarakat	Peningkatan kualitas penanganan Pengaduan masyarakat	1. Mengembangkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.	Persentase Pengaduan yang selesai di Tindak lanjuti	%	100
			Meningkatnya Kapabilitas APIP	Peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah	1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan prosedur pemeriksaan; Peningkatan kapabilitas APIP melalui 2. peningkatan leveling Internal Auditor Capability Models (IACM). Pembagian tim pengawas berdasarkan 3. risiko.	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	4

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN PRORITAS

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan adalah Program Strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2025.

Perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun 2025 berdasarkan pada pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dasar pertimbangan penetapan program dan kegiatan prioritas ini adalah untuk:

1) Pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2025;
2) Pencapain IKU Inspektorat sesuai RPJMD dan Renstra 2021 – 2026.
3) Pencapaian IKK urusan perencanaan dan keuangan.

Untuk pencapaian prioritas tersebut Inspektorat pada tahun 2025 akan melaksanakan 3 (*tiga*) program, 12 (*dua belas*) kegiatan, dan 51 (*lima puluh satu*) sub kegiatan. Penyebaran lokasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 pembinaan dan pengawasan Inspektorat pada 53 (*lima puluh tiga*) Perangkat Daerah, 256 (*dua ratus lima puluh enam*) Desa, 2 (*dua*) BUMD di Kabupaten Lampung Selatan dan pelaksanaan penugasan lainnya yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah.

Total pagu indikatif yang menggambarkan rincian dana untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD tahun 2025 untuk Inspektorat sebesar Rp25.926.068.200,00 yang seluruhnya sumber dana dari APBD (DAU)

Tahun 2025. Meskipun secara kebutuhan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024, bahwa pagu anggaran tahun 2025 yang menjadi pagu RKPD belum terpenuhi sesuai kebutuhan Inspektorat dan mandatori spending Permendagri.

Tabel 3.3. T.C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Lampung Selatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat							15.121.059.200,00	25.926.068.200,00	25.926.068.200,00	10.805.009.000,00							26.690.217.150,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							15.121.059.200,00	25.926.068.200,00	25.926.068.200,00	10.805.009.000,00							26.690.217.150,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							15.121.059.200,00	25.926.068.200,00	25.926.068.200,00	10.805.009.000,00							26.690.217.150,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan				80 Poin	80 Poin	12.569.947.500,00	22.114.538.650,00	23.820.646.750,00	11.250.699.250,00					ASN Inspektorat		22.615.331.650,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	87.183.950,00	87.183.950,00	56.634.650,00	-30.549.300,00							111.444.850,00	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	43.444.850,00	43.444.850,00	28.150.150,00	-15.294.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			43.444.850,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	8.922.150,00	8.922.150,00	4.547.350,00	-4.374.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	7.973.250,00	7.973.250,00	3.942.450,00	-4.030.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			13.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	6.590.500,00	6.590.500,00	6.590.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	6.186.500,00	6.186.500,00	3.091.500,00	-3.095.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				4 Laporan	4 Laporan	14.066.700,00	14.066.700,00	10.312.700,00	-3.754.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				39 Laporan	39 Laporan	10.867.013.200,00	**11.191.534.200,00**	11.181.839.100,00	314.825.900,00							11.332.000.000,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	10.556.317.200,00	10.841.268.200,00	10.841.268.200,00	284.951.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				12 Dokumen	12 Dokumen	300.029.000,00	339.599.000,00	334.904.500,00	34.875.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			310.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	5.300.500,00	5.300.500,00	2.423.400,00	-2.877.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*				14 Laporan	14 Laporan	5.366.500,00	5.366.500,00	3.243.000,00	-2.123.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			12.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	22.199.600,00	**22.199.600,00**	**11.428.650,00**	-10.770.950,00							30.000.000,00	
	6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*				1 Dokumen	2 Dokumen	7.395.900,00	7.395.900,00	3.170.000,00	-4.225.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*				1 Laporan	12 Laporan	7.371.600,00	7.371.600,00	5.071.600,00	-2.300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*				1 Laporan	2 Laporan	7.432.100,00	7.432.100,00	3.187.050,00	-4.245.050,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	681.410.250,00	**1.056.561.050,00**	**814.512.450,00**	133.102.200,00							1.280.000.000,00	
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				1 Paket	1 Paket	18.900.000,00	38.625.000,00	75.645.000,00	56.745.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			60.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*				1 Dokumen	1 Dokumen	9.951.100,00	9.951.100,00	4.914.350,00	-5.036.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				58 Orang	58 Orang	556.816.000,00	722.286.000,00	591.296.000,00	34.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			850.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*				512 Orang	512 Orang	42.013.700,00	48.413.700,00	23.960.500,00	-18.053.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				58 Orang	63 Orang	53.729.450,00	237.285.250,00	118.696.600,00	64.967.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	374.511.200,00	**611.008.350,00**	**328.884.600,00**	-45.626.600,00							675.638.800,00	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	5.041.000,00	5.041.000,00	5.041.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	96.800.000,00	176.700.000,00	90.550.000,00	-6.250.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENGHEMATAN BELANJA PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	17.704.800,00	17.704.800,00	17.704.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	62.813.200,00	82.813.200,00	42.831.600,00	-19.981.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			82.813.200,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	53.093.750,00	53.093.750,00	25.921.600,00	-27.172.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			70.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				12 Laporan	12 Laporan	19.830.000,00	19.830.000,00	9.915.000,00	-9.915.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	101.228.450,00	237.825.600,00	118.920.600,00	17.692.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			237.825.600,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah				40 Unit	40 Unit	144.279.300,00	**641.783.500,00**	**265.803.500,00**	121.524.200,00							675.980.000,00	
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				1 Unit	2 Unit	20.980.000,00	375.980.000,00	0,00	-20.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			375.980.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				36 Unit	39 Unit	98.011.300,00	168.515.500,00	168.515.500,00	70.504.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				3 Unit	5 Unit	25.288.000,00	97.288.000,00	97.288.000,00	72.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah				12 Laporan	12 Laporan	121.800.000,00	**261.800.000,00**	**261.800.000,00**	140.000.000,00							261.800.000,00	
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	121.800.000,00	261.800.000,00	261.800.000,00	140.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			261.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang dipelihara				52 Unit	52 Unit	271.550.000,00	**8.242.468.000,00**	**10.899.743.800,00**	10.628.193.800,00							8.248.468.000,00	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	44.530.000,00	45.430.000,00	45.430.000,00	900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			45.430.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				6 Unit	9 Unit	133.020.000,00	217.780.000,00	180.760.000,00	47.740.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			217.780.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				42 Unit	42 Unit	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	7.910.258.000,00	10.604.553.800,00	10.579.553.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.910.258.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Inspektorat daerah**				**100 %**	**100 %**	**1.847.003.050,00**	**2.569.670.450,00**	**1.438.304.650,00**	**-408.698.400,00**					**Perangkat Daerah, Desa dan ASN Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa dan ASN**		**2.780.197.400,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal				287 Laporan	287 Laporan	1.427.666.550,00	**2.125.133.950,00**	**1.078.694.400,00**	-348.972.150,00							2.230.197.400,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah*				53 Laporan	53 Laporan	202.742.500,00	327.960.100,00	173.830.550,00	-28.911.950,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			327.960.100,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah*				100 Laporan	100 Laporan	322.833.000,00	489.853.000,00	253.526.750,00	-69.306.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			489.853.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja*				5 Laporan	5 Laporan	100.188.400,00	217.035.800,00	98.555.600,00	-1.632.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			217.035.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan*				17 Laporan	17 Laporan	140.566.100,00	315.348.500,00	159.238.600,00	18.672.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			315.348.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa*				107 Laporan	107 Laporan	450.025.950,00	563.625.950,00	287.952.500,00	-162.073.450,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	*Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk*				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	9.298.400,00	9.298.400,00	4.649.400,00	-4.649.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP*				4 Dokumen	4 Dokumen	202.012.200,00	202.012.200,00	100.941.000,00	-101.071.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti				54 Laporan	54 Laporan	419.336.500,00	**444.536.500,00**	**359.610.250,00**	-59.726.250,00							550.000.000,00	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	*Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani*				4 Laporan	4 Laporan	163.986.500,00	163.986.500,00	159.121.000,00	-4.865.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*				50 Laporan	50 Laporan	255.350.000,00	280.550.000,00	200.489.250,00	-54.860.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			350.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Pengawasan**				**100 %**	**100 %**	**704.108.650,00**	**1.241.859.100,00**	**667.116.800,00**	**-36.991.850,00**					**Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa dan ASN**		**1.294.688.100,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rekomendasi Hasil Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	101.491.800,00	**395.289.650,00**	**216.572.100,00**	115.080.300,00							395.289.650,00	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun*				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	48.491.800,00	142.253.000,00	44.716.450,00	-3.775.350,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			142.253.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun*				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	53.000.000,00	253.036.650,00	171.855.650,00	118.855.650,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			253.036.650,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah				100 %	100 %	602.616.850,00	**846.569.450,00**	**450.544.700,00**	-152.072.150,00							899.398.450,00	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah*				53 perangkat daerah	53 perangkat daerah	80.175.900,00	80.175.900,00	46.460.600,00	-33.715.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi*				53 perangkat daerah	53 perangkat daerah	201.718.300,00	320.870.900,00	178.139.150,00	-23.579.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Way Urang	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			320.870.900,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*				17 Kegiatan	17 Kegiatan	220.837.550,00	348.527.550,00	181.564.000,00	-39.273.550,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			348.527.550,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas*				53 perangkat daerah	53 perangkat daerah	99.885.100,00	96.995.100,00	44.380.950,00	-55.504.150,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			130.000.000,00	INSPEKTORAT
	JUMLAH								**15.121.059.200,00**	**25.926.068.200,00**	**25.926.068.200,00**	**10.805.009.000,00**							**26.690.217.150,00**	

BAB. IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

4.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perencanaan program yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan menitikberatkan pada pencapaian keberhasilan *output* dan *outcome* dalam bidang pengawasan. Program yang disusun merupakan suatu rangkaian rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan dalam jangka satu tahun. Setiap program kerja terdiri dari beberapa kumpulan kegiatan yang relevan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.

Program Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 - 2026. Program ini disusun melingkupi kumpulan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga visi dan misi dapat terlaksana dan terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan mengimplementasikan program dan kegiatan ke dalam Rencana Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel T- C.33 beserta penjelasan mengenai rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah yang telah tertuang pada Bab 3, Subbab 3.3. beserta target output yang akan di capai. Tabel tersebut berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD Inspektorat dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan.

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2025 adalah sebanyak 3 (*tiga*) program, 12 (*dua belas*) kegiatan, dan 51 (*lima puluh satu*) sub kegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp25.926.068.200,00. Berikut dapat digambarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025 serta Indikator kinerja program dan kegiatan serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 4.1, sebagai berikut:

Tabel 4.1. T.C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Lampung Selatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.0.00.0.00.01.0000	**Inspektorat**							**15.121.059.200,00**	**25.926.068.200,00**	**25.926.068.200,00**	**10.805.009.000,00**							**26.690.217.150,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**15.121.059.200,00**	**25.926.068.200,00**	**25.926.068.200,00**	**10.805.009.000,00**							**26.690.217.150,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**15.121.059.200,00**	**25.926.068.200,00**	**25.926.068.200,00**	**10.805.009.000,00**							**26.690.217.150,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 Poin**	**80 Poin**	**12.569.947.500,00**	**22.114.538.650,00**	**23.820.646.750,00**	**11.250.699.250,00**					**ASN Inspektorat**		**22.615.331.650,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	87.183.950,00	**87.183.950,00**	**56.634.650,00**	-30.549.300,00							111.444.850,00	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	43.444.850,00	43.444.850,00	28.150.150,00	-15.294.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			43.444.850,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	8.922.150,00	8.922.150,00	4.547.350,00	-4.374.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	7.973.250,00	7.973.250,00	3.942.450,00	-4.030.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			13.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	6.590.500,00	6.590.500,00	6.590.500,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	6.186.500,00	6.186.500,00	3.091.500,00	-3.095.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				4 Laporan	4 Laporan	14.066.700,00	14.066.700,00	10.312.700,00	-3.754.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				39 Laporan	39 Laporan	10.867.013.200,00	**11.191.534.200,00**	11.181.839.100,00	314.825.900,00							11.332.000.000,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	10.556.317.200,00	10.841.268.200,00	10.841.268.200,00	284.951.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				12 Dokumen	12 Dokumen	300.029.000,00	339.599.000,00	334.904.500,00	34.875.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			310.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	5.300.500,00	5.300.500,00	2.423.400,00	-2.877.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*				14 Laporan	14 Laporan	5.366.500,00	5.366.500,00	3.243.000,00	-2.123.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			12.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	22.199.600,00	**22.199.600,00**	**11.428.650,00**	-10.770.950,00							30.000.000,00	
	6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*				1 Dokumen	2 Dokumen	7.395.900,00	7.395.900,00	3.170.000,00	-4.225.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*				1 Laporan	12 Laporan	7.371.600,00	7.371.600,00	5.071.600,00	-2.300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*				1 Laporan	2 Laporan	7.432.100,00	7.432.100,00	3.187.050,00	-4.245.050,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	681.410.250,00	**1.056.561.050,00**	**814.512.450,00**	133.102.200,00							1.280.000.000,00	
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				1 Paket	1 Paket	18.900.000,00	38.625.000,00	75.645.000,00	56.745.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			60.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*				1 Dokumen	1 Dokumen	9.951.100,00	9.951.100,00	4.914.350,00	-5.036.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				58 Orang	58 Orang	556.816.000,00	722.286.000,00	591.296.000,00	34.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			850.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*				512 Orang	512 Orang	42.013.700,00	48.413.700,00	23.960.500,00	-18.053.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				58 Orang	63 Orang	53.729.450,00	237.285.250,00	118.696.600,00	64.967.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	374.511.200,00	**611.008.350,00**	**328.884.600,00**	-45.626.600,00							675.638.800,00	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	5.041.000,00	5.041.000,00	5.041.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	96.800.000,00	176.700.000,00	90.550.000,00	-6.250.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENGHEMATAN BELANJA PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	17.704.800,00	17.704.800,00	17.704.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	62.813.200,00	82.813.200,00	42.831.600,00	-19.981.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			82.813.200,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	53.093.750,00	53.093.750,00	25.921.600,00	-27.172.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			70.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				12 Laporan	12 Laporan	19.830.000,00	19.830.000,00	9.915.000,00	-9.915.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	101.228.450,00	237.825.600,00	118.920.600,00	17.692.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			237.825.600,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah				40 Unit	40 Unit	144.279.300,00	**641.783.500,00**	**265.803.500,00**	121.524.200,00							675.980.000,00	
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				1 Unit	2 Unit	20.980.000,00	375.980.000,00	0,00	-20.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			375.980.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				36 Unit	39 Unit	98.011.300,00	168.515.500,00	168.515.500,00	70.504.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				3 Unit	5 Unit	25.288.000,00	97.288.000,00	97.288.000,00	72.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah				12 Laporan	12 Laporan	121.800.000,00	**261.800.000,00**	**261.800.000,00**	140.000.000,00							261.800.000,00	
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	121.800.000,00	261.800.000,00	261.800.000,00	140.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			261.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang dipelihara				52 Unit	52 Unit	271.550.000,00	**8.242.468.000,00**	**10.899.743.800,00**	10.628.193.800,00							8.248.468.000,00	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	44.530.000,00	45.430.000,00	45.430.000,00	900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			45.430.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				6 Unit	9 Unit	133.020.000,00	217.780.000,00	180.760.000,00	47.740.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			217.780.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				42 Unit	42 Unit	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	7.910.258.000,00	10.604.553.800,00	10.579.553.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			7.910.258.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Inspektorat daerah**				**100 %**	**100 %**	**1.847.003.050,00**	**2.569.670.450,00**	**1.438.304.650,00**	**-408.698.400,00**					**Perangkat Daerah, Desa dan ASN Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa dan ASN**		**2.780.197.400,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal				287 Laporan	287 Laporan	1.427.666.550,00	**2.125.133.950,00**	**1.078.694.400,00**	-348.972.150,00							2.230.197.400,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah*				53 Laporan	53 Laporan	202.742.500,00	327.960.100,00	173.830.550,00	-28.911.950,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			327.960.100,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah*				100 Laporan	100 Laporan	322.833.000,00	489.853.000,00	253.526.750,00	-69.306.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			489.853.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja*				5 Laporan	5 Laporan	100.188.400,00	217.035.800,00	98.555.600,00	-1.632.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			217.035.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan*				17 Laporan	17 Laporan	140.566.100,00	315.348.500,00	159.238.600,00	18.672.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			315.348.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa*				107 Laporan	107 Laporan	450.025.950,00	563.625.950,00	287.952.500,00	-162.073.450,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	*Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk*				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	9.298.400,00	9.298.400,00	4.649.400,00	-4.649.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP*				4 Dokumen	4 Dokumen	202.012.200,00	202.012.200,00	100.941.000,00	-101.071.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti				54 Laporan	54 Laporan	419.336.500,00	**444.536.500,00**	**359.610.250,00**	-59.726.250,00							550.000.000,00	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	*Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani*				4 Laporan	4 Laporan	163.986.500,00	163.986.500,00	159.121.000,00	-4.865.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*				50 Laporan	50 Laporan	255.350.000,00	280.550.000,00	200.489.250,00	-54.860.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			350.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Pengawasan**				**100 %**	**100 %**	**704.108.650,00**	**1.241.859.100,00**	**667.116.800,00**	**-36.991.850,00**					**Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa dan ASN**		**1.294.688.100,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rekomendasi Hasil Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	101.491.800,00	**395.289.650,00**	**216.572.100,00**	115.080.300,00							395.289.650,00	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun*				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	48.491.800,00	142.253.000,00	44.716.450,00	-3.775.350,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			142.253.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun*				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	53.000.000,00	253.036.650,00	171.855.650,00	118.855.650,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			253.036.650,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah				100 %	100 %	602.616.850,00	**846.569.450,00**	**450.544.700,00**	-152.072.150,00							899.398.450,00	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah*				53 perangkat daerah	53 perangkat daerah	80.175.900,00	80.175.900,00	46.460.600,00	-33.715.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi*				53 perangkat daerah	53 perangkat daerah	201.718.300,00	320.870.900,00	178.139.150,00	-23.579.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Way Urang	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			320.870.900,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*				17 Kegiatan	17 Kegiatan	220.837.550,00	348.527.550,00	181.564.000,00	-39.273.550,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			348.527.550,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas*				53 perangkat daerah	53 perangkat daerah	99.885.100,00	96.995.100,00	44.380.950,00	-55.504.150,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			130.000.000,00	INSPEKTORAT
	JUMLAH								**15.121.059.200,00**	**25.926.068.200,00**	**25.926.068.200,00**	**10.805.009.000,00**							**26.690.217.150,00**	

4.2. SINKRONISASI PRIORITAS PERANGKAT DAERAH DENGAN PRIORITAS DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.2.1. Sinkronisasi Prioritas Perangkat Daerah dengan Prioritas Daerah Tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan

No	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	43.444.850	
2	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8.922.150	
3	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.973.250	
4	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6.590.500	
5	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6.186.500	
6	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14.066.700	

No	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10.556.317.200	
8	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300.029.000	
9	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.300.500	
10	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.366.500	
11	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.395.900	
12	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.371.600	
13	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.432.100	

No	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18.900.000	
15	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9.951.100	
16	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	556.816.000	
17	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	42.013.700	
18	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	53.729.450	
19	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.041.000	
20	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	96.800.000	
21	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17.704.800	

No	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	62.813.200	
23	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	53.093.750	
24	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18.000.000	
25	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	19.830.000	
26	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	101.228.450	
27	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20.980.000	
28	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	98.011.300	
29	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25.288.000	
30	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	121.800.000	

No	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	44.530.000	
32	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	133.020.000	
33	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	19.000.000	
34	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25.000.000	
35	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25.000.000	
36	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25.000.000	

No	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
37	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	202.742.500	
38	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	322.833.000	
39	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.188.400	
40	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	140.566.100	
41	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	450.025.950	
42	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kerja Sama Pengawasan Internal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9.298.400	
43	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	202.012.200	
44	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	163.986.500	

No	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
45	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	255.350.000	
46	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48.491.800	
47	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	53.000.000	
48	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	80.175.900	
49	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	201.718.300	
50	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	220.837.550	
51	Peningkatan kualitas ASN, kolaboratif regulasi yang efektif serta digitalisasi pelayanan publik	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	99.885.100	

Tabel 4.2.2. Sinkronisasi Prioritas Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Kabupaten Lampung Selatan

No	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	43.444.850	
2	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8.922.150	
3	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.973.250	
4	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6.590.500	
5	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6.186.500	
6	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14.066.700	

No	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10.556.317.200	
8	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300.029.000	
9	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.300.500	
10	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.366.500	
11	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.395.900	
12	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.371.600	
13	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.432.100	

No	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18.900.000	
15	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9.951.100	
16	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	556.816.000	
17	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	42.013.700	
18	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	53.729.450	
19	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.041.000	
20	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	96.800.000	
21	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17.704.800	

No	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	62.813.200	
23	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	53.093.750	
24	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18.000.000	
25	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	19.830.000	
26	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	101.228.450	
27	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20.980.000	
28	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	98.011.300	
29	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25.288.000	
30	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	121.800.000	

No	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	44.530.000	
32	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	133.020.000	
33	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	19.000.000	
34	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25.000.000	
35	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25.000.000	
36	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25.000.000	

No	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
37	Skor Maturitas SPIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	202.742.500	
38	Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan yang selesai ditindak lanjuti	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	322.833.000	
39	Skor Maturitas SPIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.188.400	
40	Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan yang selesai ditindak lanjuti	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	140.566.100	
41	Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan yang selesai ditindak lanjuti	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	450.025.950	
42	Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan yang selesai ditindak lanjuti	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kerja Sama Pengawasan Internal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9.298.400	
43	Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan yang selesai ditindak lanjuti	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	202.012.200	
44	Persentase Pengaduan yang selesai di Tindak lanjuti	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	163.986.500	

No	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
45	Persentase Pengaduan yang selesai di Tindak lanjuti	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	255.350.000	
46	Skor Maturitas SPIP	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48.491.800	
47	Skor Maturitas SPIP	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	53.000.000	
48	Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan yang selesai ditindak lanjuti	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	80.175.900	
49	Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan yang selesai ditindak lanjuti	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	201.718.300	
50	Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan yang selesai ditindak lanjuti	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	220.837.550	
51	Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan yang selesai ditindak lanjuti	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	99.885.100	

BAB V
P E N U T U P

Failing to plan is planning to fail kegagalan kita dalam merencanakan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang *pengawasan* sama dengan merencanakan kegagalan Inspektorat.

Perubahan Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Inspektorat dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2025. Perubahan Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Inspektorat tahun 2025.

Perubahan Renja PD ini harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra Inspektorat dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2025.

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Inspektorat untuk *proving* (membuktikan) kinerja dan untuk *improving* (memperbaiki) kinerja.

Saat penjabaran Perubahan Renja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya.

Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan

upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Pelajaran yang kita dapatkan dari pelaksanaan Perubahan Renja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalitas pencapaian target tahunan Renstra Inspektorat dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2025.

Demikian PerubahanRenja Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu meridhai semua langkah kita. Aamiin … Aamiin YRA.

Kalianda, 01 Juli 2025
Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Hi. ANTON CARMANA, S.E.
Pembina Utama Muda (IV/)
NIP 19670819 199503 1 004

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

2025

RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA-PERUBAHAN)
TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 telah selesai disusun. Perubahan Renja ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan selama satu tahun. Dengan harapan agar program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja lebih terarah dan terukur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja ini disampaikan ucapan terimakasih. Semoga pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Renja ini, dapat mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan.

Kalianda,29 Agustus 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN
SATUAN POL PP
LAMPUNG SELATAN

MATURIDI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670720 199402 1 001

DAFTAR ISI

COVER		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (DUA) TAHUN BERKENAAN	6
	2.1. Evaluasi Renja Triwulan II (Dua)	6
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	18
	2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja	25
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	28
BAB IV	PENUTUP	40

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (RENJA PD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusuan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lampung Selatan Tahun 2025 dengan memperhatikan program prioritas tahun 2025, sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, Mandiri, dan Berakhlak Mulia”.

Tahun Anggaran 2025 adalah tahun ke lima pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan 2021-2026, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah ini, berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ini disusun dengan maksud mewujudkan sinergritas antara perencanaan dan penganggaran serta sebagai penjabaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026, dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2021- 2026.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja (Rencana Kerja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan ini, adalah untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas program dan kegiatan, antara lain :

a. Mewujudkan rencana penegakkan Perda Kabupaten Lampung Selatan dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang sinergis dan terpadu dengan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan.
b. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran Perubahan 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Perubahan Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
- 2.1 Evaluasi Renja Triwulan II (Dua)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II (Dua)

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2025 melaksanakan 2 (dua) Program 10 (sepuluh) Kegiatan 39 (tiga puluh sembilan) sub Kegiatan. Jumlah anggaran kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 sebesar Rp. 19.450.938.500,- (Sembilan belas miliar empat ratus lima puluh juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp.17.656.552.400,- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan Program yang berisi kegiatan rutin Satuan Polisi Pamong Praja meliputi Sub kegiatan:

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 41.253.150,- yang meliputi sub kegiatan :
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 11.987.700,-
   2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp. 5.992.000,-
   3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp. 2.614.100,-
   4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp. 5.296.300,-
   5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp. 2.151.150,-
   6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 13.211.900,-

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 16.070.773.050,- yang meliputi sub kegiatan :
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 5.414.701.000,-
   2) Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN Rp. 10.641.194.000,-
   3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp. 5.090.550,-
   4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp. 9.787.500,-

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 209.706.700,- yang meliputi sub Kegiatan:
   1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp. 175.500.000,-
   2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp. 34.206.700,-

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 300.294.200,- yang meliputi sub kegiatan:
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 20.036.500,-
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 136.239.900,-
   3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 20.176.000,-
   4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 13.751.800,-
   5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 17.032.000,-
   6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp. 18.000.000,-
   7) Fasilitas Kunjungan Tamu Rp. 6.120.000,-
   8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 68.938.000,-

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 580.755.300,- yang

meliputi sub kegiatan:

1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 0,-
2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 515.000.000,-
3) Pengadaan Mebel Rp. 65.755.300,-

6. Kegiatan Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Rp. 120.000.000,- yang meliputi Sub kegiatan :
   1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 120.000.000,-
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 333.770.000,- yang meliputi Sub kegiatan :
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 219.370.000,-
   2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 14.400.000,-
   3) Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 75.000.000,-
   4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp. 25.000.000,-

B. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp. 1.794.386.100,- Berisi kegiatan pengamanan dan pengendalian massa (Dalmas) dan patroli siaga, pembinaan anggota linmas desa, kegiatan berupa penertiban, penyuluhan dan penegakan perda di Kabupaten Lampung Selatan serta PPNS yang meliputi kegiatan :

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp. 1.567.072.450,- yang meliputi sub kegiatan :

1) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kab/Kota Rp. 21.682.400,-
2) Pemberdayaan Perlindungan Masayarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp. 383.306.900,-
3) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Rp. 220.491.550,-
4) Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp. 22.480.900,-
5) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan Rp. 799.494.700,-
6) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp. 119.616.000,-

2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Rp. 153.502.300,- yang meliputi Sub kegiatan :
   1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Rp. 62.199.950,-
   2) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Rp. 28.557.650,-
   3) Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Rp. 62.744.700,-
3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Rp. 73.811.350,- yang meliputi Sub kegiatan:
   1) Pembentukan Sekretariat PPNS Rp. 8.781.300,-
   2) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Rp. 65.030.050,-

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dimaksud, merupakan salah satu instrumen dalam penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai upaya mewujudkan apa yang tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan, yaitu meliputi :

a. Penegakan Perda dan perkada;dan
b. Menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Rekapitulasi hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan 2025, sebagai berikut:

hasil Evaluasi Renja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan Triwulan II tercantum dalam tabel 2.1

EVALUASI HASIL RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2025

No	Sasaran RPJMD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada tahun 2022 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I			II													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10 = 8+9			11=10/7*100		12 = 6+10			13=12/5*100		14
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																												
I	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	80	Point	126.564.921.955	71	Point	50.845.760.937	80	Point	17.656.552.400	-	point	3.143.283.936	-	point	4.762.575.201	-	Point	7.905.859.137	0	45	71	Point	58.751.620.074	0	46	
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65	dok	303.000.000	38	dok	172.865.600	16	dok	41.253.150	7	dok	6.500.000	5	dok	21.312.325	12	dok	27.812.325	75	67	50	dok	200.677.925	76	66	
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	dok	47.500.000	9	dok	27.695.500	4	dok	11.987.700	1	dok	2.470.000	-	dok	8.706.200	1	dok	11.176.200	25	93	10	dok	38.871.700	67	82	
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	5	dok	47.500.000	3	dok	24.901.700	1	dok	5.992.000	1	dok	1.040.000	-	dok	4.306.875	1	dok	5.346.875	100	89	4	dok	30.248.575	20	64	
3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	5	dok	47.500.000	3	dok	24.726.200	1	dok	2.614.100	-	dok	0	-	dok	0	1	dok	0	100	0	4	dok	24.726.200	20	52	
4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	5	dok	47.500.000	3	dok	26.315.800	1	dok	5.296.300	1	dok	1.235.000	-	dok	3.520.850	1	dok	4.755.850	100	89	4	dok	31.071.650	20	65	

No	Sasaran RPJMD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada tahun 2022 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I				II										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10 = 8+9			11=10/7*100		12 = 6+10			13=12/5*100		14
5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	5	dok	47.500.000	3	dok	27.690.550	1	dok	2.151.150	-	dok	0	-	dok	0	-	dok	0	0	0	4	dok	27.690.550	60	58	
6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	30	Lap.	65.500.000	17	Lap	41.535.850	8	Lap	13.211.900	4	Laporan	1.755.000	4	Laporan	4.778.400	8	Lap.	6.533.400	100	49	25	Lap.	48.069.250	83	73	
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**195**	**Dok**	**119.907.033.421**	**116**	**Dok**	**48.558.267.714**	**43**	**Dok**	**16.070.773.050**	**10**	**Dok**	**3.091.539.277**	**10**	**Dok**	**4.649.643.377**	**20**	**Dok**	**7.741.182.654**	**46**	**48**	**136**	**dok**	**56.299.450.368**	**69**	**47**	Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	77	orang/bulan	50.835.665.845	54	orang/bulan	15.954.876.864	52	orang/bulan	5.414.701.000	48	orang/bulan	1.228.874.277	49	orang/bulan	1.537.275.226	49	orang/bulan	2.766.149.503	94	51	49	orang/bulan	18.721.026.367	64	37	
2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	Dok	68.858.137.776	3	Dok	32.542.629.250	12	Dok	10.641.194.000	3	Dok	1.859.995.000	3	Dok	3.108.072.997	6	Dok	4.968.067.997	50	46	9	Dok	37.510.697.247	55	54	
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	Lap.	103.338.000	3	Lap.	25.612.650	1	Lap.	5.090.550	-	Lap.	0	-	Lap.	0	-	Lap.	0	0	0	3	Lap.	25.612.650	60	25	
4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPDdan laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	70	Lap.	109.891.800	50	Lap.	35.148.950	18	Lap.	9.787.500	4	Lap.	2.670.000	4	Lap.	4.295.154	8	Lap.	6.965.154	44	71	58	Lap.	42.114.104	83	38	
3		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**1.566.657.184**	**50**	**%**	**596.062.400**	**100**	**%**	**209.706.700**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**-**	**%**	**0**	**0**	**0**	**50**	**%**	**596.062.400**	**50**	**38**	

No	Sasaran RPJMD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada tahun 2022 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I				II										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10 = 8+9			11=10/7*100		12 = 6+10			13=12/5*100		14
1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9	paket	1.433.218.013	5	paket	596.062.400	1	paket	175.500.000	-	paket	0	-	paket	0	-	paket	**0**	0	0	5	paket	596.062.400	55	42	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	50	orang	133.439.171	-	orang	0	55	orang	34.206.700	-	orang	0	-	orang	0	-	orang	0	0	0	-	orang	0	0	0	
4		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**1.703.695.410**	**234**	%	**651.714.546**	**100**	**%**	**300.294.200**	**13**	**%**	**0**	**5**	**%**	**18.382.900**	**18**	**%**	**18.382.900**	**18**	**6**	**252**	**%**	**670.097.446**	**252**	**39**	Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan	20	paket	30.525.500	8	paket	15.700.600	6	paket	20.036.500	-	paket	0	-	paket	0	-	paket	0	0	0	8	paket	15.700.600	40	51	
2		Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	17	Paket	44.343.520	10	Paket	16.481.800	10	Paket	20.176.000	2	Paket	0	-	Paket	1.942.600	2	Paket	1.942.600	28	9	10	Paket	16.481.800	59	41	
3		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	37	paket	366.306.000	23	paket	253.032.200	2	paket	136.239.900	-	paket	0	-	paket	0	-	paket	0	0	0	25	paket	253.032.200	67	69	
4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	115	paket	159.300.000	81	paket	50.667.400	8	paket	13.751.800	2	paket	0	1	paket	8.220.300	3	paket	8.220.300	37	59	84	paket	58.887.700	73	37	
5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	33	paket	135.791.000	17	paket	35.216.200	8	paket	17.032.000	3	paket	0	-	paket	0	3	paket	0	37	0	20	paket	35.216.200	61	26	
6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60	Dok	99.180.000	36	Dok	54.000.000	12	Dok	18.000.000	3	Dok	0	3	Dok	4.500.000	6	Dok	4.500.000	50	25	42	Dok	58.500.000	70	59	
7		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	86	Lap.	182.587.500	46	Lap.	47.380.000	8	Lap.	6.120.000	-	Lap.	0	-	Lap.	0	-	Lap.	0	0	0	46	Lap.	47.380.000	53	26	
8		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	179	Lap.	685.661.890	78	Lap.	179.236.346	30	Lap.	68.938.000	9	Lap.	0	7	Lap.	3.720.000	16	Lap.	3.720.000	53	5	94	Lap.	182.958.346	52	27	

No	Sasaran RPJMD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada tahun 2022 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I				II											
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10 = 8+9			11=10/7*100		12 = 6+10			13=12/5*100		14
5		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Barang Milik Daerah**	**91**	**Unit**	**174.853.465**	**8**	**Unit**	**61.218.200**	**51**	**unit**	**580.755.300**	**-**	**Unit**	**0**	**-**	**Unit**	**0**	**-**	**Unit**	**0**	**0**	**0**	**8**	**Unit**	**61.218.200**	**8**	**35**	Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel
1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	0	Unit	0	0	Unit	0	0	unit	0	-	unit	0	-	Unit	0	-	Unit	0	0	0	0	Unit	0	0	0	
2		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0	Unit	0	0	Unit	0	1	unit	515.000.000	-	unit	0	-	Unit	0	-	Unit	0	0	0	0	Unit	0	0	0	
3		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	25	Unit	174.853.465	8	Unit	61.218.200	50	unit	65.755.300	-	unit	-	-	unit	0	-	Unit	0	0	0	8	Unit	61.218.200	8	35	
6		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jasa penunjang urusan kantor**	**60**	**Laporan**	**209.040.000**	**36**	**Lap.**	**87.339.303**	**12**	**Lap.**	**120.000.000**	**3**	**Lap.**	**18.306.086**	**3**	**Lap.**	**10.080.910**	**6**	**Lap.**	**28.386.996**	**50**	**24**	**42**	**Lap.**	**115.726.299**	**70**	**55**	
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	60	lap.	209.040.000	36	lap.	87.339.303	12	lap.	120.000.000	3	lap.	18.306.086	3	lap.	10.080.910	6	Lap.	28.386.996	50	24	42	Lap.	115.726.299	70	55	
7		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**146**	**Unit**	**2.700.642.475**	**91**	**Unit**	**718.293.174**	**49**	**unit**	**333.770.000**	**14**	**unit**	**26.938.573**	**15**	**unit**	**63.155.689**	**18**	**Unit**	**90.094.262**	**37**	**28**	**98**	**Unit**	**808.387.436**	**67**	**29**	
1		Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraam Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	17	Unit	1.290.923.395	11	unit	583.341.174	11	unit	219.370.000	11	unit	25.838.573	11	Unit	60.080.910	11	Unit	86.194.262	100	39	11	Unit	669.535.436	65	52	
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	119	Unit	65.935.080	75	unit	34.970.000	34	unit	14.400.000	3	unit	1.100.000	4	UnIt	2.800.000	7	Unit	3.900.000	20	27	82	Unit	38.870.000	69	59	
3		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor fdan bangunan lainnya ygn dipelihara/direhabilitasi	10	unit	1.343.784.000	5	unit	99.982.000	3	unit	75.000.000	-	unit	0	-	UnIt	**0**	-	Unit	0	0	0	5	Unit	99.982.000	50	7	

No	Sasaran RPJMD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada tahun 2022 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I				II										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10 = 8+9			11=10/7*100		12 = 6+10			13=12/5*100		14
4		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0	unit	0	0	unit	0	1	unit	25.000.000	-	unit	0	-	Unit	0	-	Unit	0	0	0	0	Unit	0	0	0	
II	**Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Ketertiban Umum dan Keamanan sosial**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA, PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN/KOTA**	**100**	**%**	**58.173.927.594**	**107**	**%**	**11.485.506.823**	**100**	**%**	**1.794.386.100**	**67**	**%**	**83.250.000**	**67**	**%**	**281.931.675**	**94**	**%**	**365.181.675**	**107**	**20**	**241**	**%**	**11.850.688.498**	**241**	**20**	
1		**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kabupaten Lampung Selatan**	**100**	**%**	**54.095.395.066**	**117**	**%**	**10.816.552.900**	**100**	**%**	**1.567.072.450**	**54**	**%**	**79.620.000**	**54**	**%**	**265.353.675**	**107**	**%**	**344.973.675**	**128**	**22**	**245**	**%**	**11.161.526.575**	**245**	**21**	Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel
1		Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini,pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	2875	laporan	51.095.395.066	1333	laporan	9.723.817.500	455	Lap.	799.494.700	244	Lap.	69.960.000	245	Lap.	216.215.900	489	lap	286.175.900	107	36	1822	Lap	10.009.993.400	63	19	
2		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	20	Dok	300.000.000	13	Dok	31.881.100	1	dok	21.682.400	-	dok	0	-	dok	13.046.800	-	dok	13.046.800	0	60	13	dok	44.927.900	65	15	
3		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	20	Dok	1.500.750.000	4	Dok	394.510.100	2	Dok	383.306.900	-	Dok	4.830.000	-	Dok	13.363.500	-	Dok	18.193.500	0	4	4	Dok	412.703.600	25	27	

No	Sasaran RPJMD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada tahun 2022 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I				II										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10 = 8+9			11=10/7*100		12 = 6+10			13=12/5*100		14
4		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	1240	orang	766.227.897	730	orang	598.737.200	322	orang	220.491.550	-	orang	4.830.000	168	orang	22.727.475	168	orang	27.557.475	52	12	898	orang	626.294.675	72	82	
5		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	0	dokumen	0	0	dokumen	0	2	dokumen	22.480.900	-	dokumen	0	-	dokumen	0	-	dokumen	0	0	0	-	dokumen	0	0	0	
6		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	305	unit	147.350.000	-	unit	0	59	unit	119.616.000	-	unit	0	-	unit	0	-	unit	0	0	0	-	unit	0	0	0-	
7		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	2	Dokumen	38.193.550	**0**	Dokumen	0	**0**	Dokumen	0	-	Dokumen	0	-	Dokumen	0	-	dokumen	0	0	0	-	dokumen	0	0	0	
2		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase Penanganan Perda dan Perkada di Kabupaten Lampung Selatan**	**100**	**%**	**3.201.408.893**	**39**	**%**	**601.536.123**	**100**	**%**	**153.502.300**	**80**	**%**	**5.640.000**	**80**	**%**	**54.560.151**	**160**	**%**	**19.102.500**	**160**	**12**	**199**	**%**	**620.638.623**	**199**	**19**	
1		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	30	lap.	804.493.447	12	lap.	152.693.900	6	lap.	52.199.950	-	lap.	0	-	lap.	0	-	lap.	0	0	0	12	Lap.	152.693.900	40	19	Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel
2		Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksaanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan	225	lap.	1.313.842.388	17	lap.	347.129.523	64	lap.	62.744.700	16	lap.	3.630.000	10	lap.	10.844.400	26	lap.	14.474.400	41	23	45	Lap.	361.603.923	11	27	

No	Sasaran RPJMD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada tahun 2022 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
													I				II										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10 = 8+9			11=10/7*100		12 = 6+10			13=12/5*100		14
			bupati/wali kota																										
3		Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dapat ditanganai sesuai SOP	105	lap.	1.083.073.058	50	lap.	101.712.700	21	lap.	28.557.650	9	lap.	0	3	lap.	4.628.100	12	lap.	4.628.100	57	16	62	Lap.	106.340.800	59	9	
3		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP**	**7**	**orang**	**701.952.188**	**3**	**orang**	**67.417.800**	**2**	**Orang**	**73.811.350**	**4**	**Orang**	**0**	**4**	**Orang**	**1.105.500**	**4**	**Orang**	**1.105.500**	**200**	**1**	**4**	**Orang**	**68.523.300**	**57**	**9**	Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel
1		Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan kepala daerah tentang pembentukan secretariat PPNS	0	dok	0	0	dok	0	1	dok	8.781.300	-	dok	0	-	dok	0	-	dok	0	0	0	-	dok	0	0	0	
2		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang ada di Kabupaten Lampung Selatan	7	Lap.	701.952.188	3	Lap.	67.417.800	2	Lap.	65.030.050	-	Lap.	0	-	Lap.	1.105.500	-	Lap.	1.105.500	0	2	3	Lap.	68.523.300	43	9	
						184.738.849.549			**62.331.267.760**			**19.450.938.500**			**3.226.533.936**			**5.044.506.876**			**8.271.040.812**					**70.602.308.572**			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN																											**107**	**33,40**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																											**ST**	**SR**	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan

Capaian Kinerja pelayanan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan IKK (Indikator Kinerja Kunci) Satuan Polisi Pamong Praja hingga tahun berjalan adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.3.1.Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Trantibumlinmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 Triwulan I-II (Januari-Juni)

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4			-5
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota					56.09%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	41.40%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	400	207	193	51.75%
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	14.69%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					73.43%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4			-5
	1. Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Unit	60	0	60	0.00%
	2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	3. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang	468	190	278	40.60%
	4. Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	Dokumen	1	1	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4			-5
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	0	0	0	100.00 %
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	0	0	0	100.00 %

Tabel 2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN				RASIO CAPAIAN				CATATAN ANALISIS
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025*	2026	2023	2024	2025*	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum *(Perbandingan jumlah kasus tertangani tahun sekarang dengan kasus tahun sekarang)*		1 Poin	1 Poin	1 Poin	1 Poin	1 Poin	1,17 Poin	0,71 Poin*	-	100%	117%	71%	-	Belum terpenuhi karena capaian realisasi tahun 2025 baru berjalan dari bulan januari sampai Juni (semester I)

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN				RASIO CAPAIAN				CATATAN ANALISIS
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025*	2026	2023	2024	2025*	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
2	Persentase Perda dan Perkada memuat sanksi yang ditegakkan *(Perbandingan jumlah perda dan perkada memuat sanksi yang ditegakkan tahun n dengan jumlah perda perkada yang memuat sanksi tahun n)*		100%	100%	100%	100%	100%	77,78 %	80%*	-	100%	77,78 %	80%	-	Belum terpenuhi karena capaian realisasi tahun 2025 baru berjalan dari bulan januari sampai Juni (semester I)
		Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	71%*	-	100%	100%	71%*	-	Belum terpenuhi karena capaian realisasi tahun 2025 baru berjalan dari bulan januari sampai Juni
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	80%	100%	80%*	-	80%	100%	80%*		Belum terpenuhi karena capaian realisasi tahun 2025 baru berjalan dari bulan januari sampai Juni

Berdasarkan Tabel 2.3.1 diatas dapat disimpulkan bahwa capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 triwulan I-II (januari-Juni) sebesar 56,09%. Capaian tersebut terdiri dari 2 (dua) jenis capaian yaitu capaian penerima layanan dasar dengan target 400 orang dan terealisasi sebesar 207 orang (51,75%) sedangkan jumlah warga negara yang belum terlayani sebesar 193 orang.

Kemudian untuk capaian mutu minimal terdiri dari 6 (enam) indikator yaitu indikator standar sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada dengan target 60 unit dan belum terealisasi sehingga realisasinya sebesar 0 unit (0,00%), indikator standar operasional prosedur (SOP) Satpolpp dalam rangka penegakan perda dan perkada dengan target 1 dokumen dan terealisasi sebesar 1 dokumen (100%), indikator standar peningkatan kapasitas anggota satuan polisi pamong praja dan anggota perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada dengan target 468 orang dan terealisasi sebesar 190 orang (40,60%), indikator Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada dengan target 1 dokumen dan terealisasi sebesar 1 dokumen (100%), indikator Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil dengan target 0 orang dan terealisasi sebesar 0 orang (0%) dan indikator Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan dengan target 0 orang dan terealisasi sebesar 0 orang (0%).

Berdasarkan tabel 2.3.2. tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa capaian Indeks kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2025 untuk indeks ketentraman dan ketertiban umum dengan target 1 poin dan teralisasi sebesar 0,71 poin, hal tersebut disebabkan karena realisasi baru berjalan di 1 (satu) semester yaitu bulan januari sampai dengan bulan juni. Untuk persentase Perda dan Perkada memuat sanksi yang ditegakkan dengan target 100% dan terealisasi sebesar 80%, hal tersebut disebabkan karena realisasi baru berjalan di 1 (satu) semester yaitu bulan januari sampai dengan bulan juni.

Tabel 2.3.3 Jumlah Penegakan Perda/Perkada Satuan Polisi Pamong Praja yang memuat Sanksi Tahun 2025 (Januari-Juni)

No	Jumlah Perda & Perbup yang Memuat Sanksi	Uraian Penegakan terhadap Pelanggaran Perda & Perbup yang Memuat Sanksi	Keterangan
1.	Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	• Tertib berjualan, tempat usaha dan usaha tertentu (KBLI belum terbit, berjualan di trotoar) • Tertib jalur hijau, taman, tempat umum dan lingkungan (penertiban baliho kampanye pilpres dan pileg) • Tertib bulan Ramadhan (penertiban tempat hiburan) • Tertib Perparkiran (penertiban kendaraan yang berada di trotoar, bahu jalan dan tempat-tempat yang bukan diperuntukkan sebagai lahan parkir) Bentuk penegakan berupa teguran lisan, surat teguran, surat pernyataan, dan berita acara, bekerja sama dengan instansi terkait	7 (tujuh) pelanggaran perda tersebut
2.	Perda Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan	• Karaoke (berjualan minuman beralkohol yang tidak berizin dan kadar alkohol yang dijual melebihi batas kadar yang ditentukan oleh perda terkait) Bentuk penegakan berupa surat teguran dan bekerja sama dengan instansi terkait	12 (dua belas) pelanggaran perda tersebut
3.	Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi, Tuna Susila dan Perjudian serta Pencegahan Perbuatan Maksiat di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan	• Karaoke (aduan masyarakat terdapat indikasi bisnis prostitusi) • Kost (aduan masyarakat terdapat indikasi bisnis prostitusi) Bentuk penegakan berupa surat teguran dan bekerja sama dengan instansi terkait	10 (sepuluh) pelanggaran perda tersebut

No	Jumlah Perda & Perbup yang Memuat Sanksi	Uraian Penegakan terhadap Pelanggaran Perda & Perbup yang Memuat Sanksi	Keterangan
4.	Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	• Tertib jalur hijau, taman, tempat umum dan lingkungan (penertiban baliho kampanye pilpres dan pileg, penertiban banner/reklame yang tidak memiliki izin) • Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu (KBLI belum terbit, tidak dapat menunjukan kelengkapan izin usaha)	11 (sebelas) pelanggaran perda tersebut

Sumber:rekap laporan bidang penegakan Perundang-undangan daerah,2025.

Selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan pelayanan dasar wajib urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan juga melaksanakan tugas pengamanan oleh Unit Pengamanan dan bantuan dari anggota linmas desa se-Kabupaten Lampung Selatan, dengan rincian objek pengamanan sebagai berikut:

Tabel 2.2.5 Jumlah Kegiatan Pengamanan Trantibum
di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 (Januari-Juni)

No	Objek Pengamanan	Jumlah	Keterangan
1	Pengamanan Aset Daerah	30	Pengamanan terhadap objek vital daerah seperti Kantor Bupati, Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati, Kantor DPRD, Rumah Dinas Ketua DPRD, dll.
2	Pengamanan Lokasi Kunjungan/Tempat Kerja Pejabat Pemerintah Daerah dan Tamu VIP	16	Pengamanan kegiatan Bupati/Wakil Bupati saat kunjungan ke 17 kecamatan se-kab.Lam-Sel, pengamanan kunjungan Menteri, DPR, dan tamu kenegaraan lainnya
3	Pengamanan Upacara dan Acara Penting	24	Pengamanan Pelaksanaan Upacara Bendera setiap hari Senin dan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional
JUMLAH		70	

Sumber:rekap laporan bidang trantibum,2025.

Tabel 2.2.6 Jumlah Anggota Linmas di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan	Jumlah Anggota Linmas
1	Kalianda	29	402
2	Penengahan	22	240
3	Merbau Mataram	15	263
4	Rajabasa	16	144
5	Bakauheni	5	101
6	Way Sulan	8	139
7	Palas	21	261
8	Way Panji	4	59
9	Jati Agung	21	444
10	Candipuro	14	206
11	Sragi	10	143
12	Sidomulyo	16	209
13	Tanjung Sari	8	152
14	Tanjung Bintang	16	273
15	Katibung	12	280
16	Ketapang	17	244
17	Natar	26	404
Jumlah		260	3964

Sumber:rekap laporan bidang linmas,2025.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan mempunyai tugas pokok yaitu Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati Lampung Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya isu-isu strategis yang dihadapi Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan, adalah:

1. Berdasarkan data bidang Sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024, dari jumlah seluruh PNS Satuan polisi pamong praja sebesar 49 orang dan jumlah seluruh Non PNS sebesar 562 orang, persentase personil yang sudah mengikuti diklat dasar sebesar 77,55%

untuk PNS dan 98,75% untuk Non PNS namun persentase untuk personil yang sudah mengikuti pelatihan teknis administrasi seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait operasi ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan operasi penegakan perda dan perkada sebesar 0%, hal tersebut disebabkan karena materi pelatihan teknis yang dilaksanakan sejak Tahun 2021-2024 berorientasi pada pelatihan fisik seperti pelatihan huru hara,pelatihan kesampataan, pelatihan baris-berbaris dan pelatihan pengaturan lalu lintas. dampaknya dalam pelaksanaan tugas di wilayah rawan gangguan trantibum anggota satuan polisi pamong praja belum mampu menganalisis potensi kerawanan wilayah sesuai dengan SOP sehingga untuk melaksanakan penyelesaian gangguan trantibum dan penegakan perda perkada di wilayah kabupaten lampung selatan dengan kompleksitas tinggi, jumlah penduduk besar dan geografis wilayah yang luas belum maksimal.

2. Berdasarkan data sub kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024, jumlah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 4 (empat) orang, khususnya untuk bidang perundang-undangan dari total 4 (empat) orang PNS, yang sudah mengukuti diklat PPNS hanya 1(satu) orang atau 25%.jika merujuk pada Peraturan Kepala Polisi RI Nomor 6 Tahun 2010 tentang manajamen penyidikan oleh PPNS bahwa pengorganisasian personel PPNS atau kebutuhan PPNS disesuaikan dengan situasi penggolongan jenis kasus, semakin sulit kasus maka kebutuhan PPNS wajib lebih dari 5 orang serta berdasarkan data peta gangguan trantibum provinsi lampung bahwa wilayah kabupaten lampung selatan masuk kedalam zona merah atau tinggi sehingga jika di simpulkan antara jumlah PPNS Satuan polisi pamong praja dengan kondisi wilayah kabupaten lampung selatan maka masih terbatas secara jumlah dan perannya untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan serta pemberian sanksi atas pelanggaran perda dan perkada.
3. Kondisi gedung kantor yang belum lengkap sesuai standar minimal seperti belum tersedianya pos jaga, ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan,ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil dan ruang sidang majelis kode etik.
4. Kuantitas dan Kualitas kendaraan operasional masih kurang untuk

menjangkau luas wilayah kabupaten lampung selatan. Berdasarkan data sub sarana dan prasarana satuan polisi pamong praja kebutuhan kendaraan operasional Satuan polisi pamong praja terdiri dari roda enam sebesar 3 unit, mobil patroli 17 unit dan motor patroli 22 unit. Sedangkan kondisi kendaraan operasional yang ada per tahun 2024 sebesar roda enam 1 unit (33,3%), mobil patroli sebesar 2 unit (11,76%) dan motor sebesar 7 unit (31,81%).

5. Belum tersusunnya peta gangguan trantibum dan peta rawan pelanggaran perda dan perkada.
6. Orientasi fungsi yang lebih kepada penyelenggaraan ketertiban sehingga mengabaikan penyelenggaraan fungsi ketentraman, akibatnya penyelenggaraan ketentraman belum dilaksanakan dengan parameter terukur dan instrument baku yang jelas.

BAB III

RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 definisi dari program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk mendukung hal tersebut di atas maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan menetapkan rencana program dan kegiatan sesuai dengan lampiran tabel 3.1.sebagai berikut:

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2025

Unit Organisasi : 1-05.0-00.0-00.03 Satuan Polisi P a m o n g P r a j a
Sub Unit Organisasi : 05.0-00.0-00.03 Satuan Polisi P a m o n g P r a j a

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
	Satuan Polisi Pamong Praja				**22.453.330.500**	**21.853.089.500**	**19.450.938.500**	**-3.002.392.000**							**19.112.854.500**	
1	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**				**22.453.330.500**	**21.853.089.500**	**19.450.938.500**	**-3.002.392.000**							**19.112.854.500**	
1.05	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**				**22.453.330.500**	**21.853.089.500**	**19.450.938.500**	**-3.002.392.000**							**19.112.854.500**	
1.05.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**80 poin**	**80 poin**	**19.276.898.550**	**18.756.680.950**	**17.656.552.400**	**6.545.345.959**						**80 poin**	**16.905.911.300**	
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**16 Dok**	**16 Dok**	**83.079.150**	**83.079.150**	**41.253.150**	**-41.826.000**			**-**	**Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana**	**PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja**	**15 Dok**	**53.690.200**	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dok	17.304.500	17.304.500	11.987.700	-5.316.800	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja	3 Dok	8.727.300	
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	12.000.000	12.000.000	5.992.000	-6.008.000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja	1 Dok	10.298.800	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	9.541.300	9.541.300	2.814.100	-6.927.200	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja	1 Dok	8.046.100	
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	9.542.800	9.542.800	5.296.300	-4.246.500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja	1 Dok	6.753.500	
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	9.690.550	9.690.550	2.151.150	-7.539.400	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja	1 Dok	6.151.800	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Lap.	8 Lap.	25.000.000	25.000.000	13.211.900	-11.788.100	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja	8 Lap.	13.712.700	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**18 Dok**	**43 Dok**	**16.737.932.550**	**16.124.691.550**	**16.070.773.050**	**-667.159.500**			**-**	**Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana**	**PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja**	**43 Dok**	**15.765.953.800**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ bulan	52 Orang/ bulan	6.032.942.000	5.414.701.000	5.414.701.000	-618.241.000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja	49 Orang/bulan	5.071.617.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	12 Dok	10.675.186.000	10.675.186.000	10.641.194.000	-33.992.000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja	12 Dok	10.676.048.400	
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap.	1 Lap.	11.804.550	11.804.550	5.090.550	-6.714.000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja	1 Lap.	7.592.500	
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Lap.	18 Lap.	18.000.000	18.000.000	9.787.500	-8.212.500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja	18 Lap.	10.695.900	
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**471.293.600**	**609.483.000**	**209.706.700**	**-261.586.900**			**-**	**Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana**	**PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja**	**100%**	**199.960.800**	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	1 Paket	420.090.000	544.410.000	175.500.000	-244.590.000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja	1 Paket	199.960.800	
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	53 Orang	55 Orang	51.203.600	65.073.000	34.206.700	-16.996.900	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja	-	0	
1.05.01.2.06	**Administasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**559.498.650**	**528.732.650**	**300.294.200**	**-259.204.450**			**-**	**Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana**	**PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja**	**100%**	**251.063.000**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	20.036.500	20.036.500	20.036.500	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja	6 Paket	4.889.300	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	257.628.900	229.654.900	136.239.900	-121.389.000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja	2 Paket	119.047.200	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	22.686.000	19.992.000	20.176.000	-2.510.000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja	10 Paket	7.829.300	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	8 Paket	29.069.800	29.069.800	13.751.800	-15.316.000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja	8 Paket	13.447.200	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	8 Paket	28.255.450	28.255.450	17.032.000	-11.223.450	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja	8 Paket	13.419.000	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	12 Dok	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja	12 Dok	18.000.000	
1.05.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap.	8 Lap.	12.240.000	12.240.000	6.120.000	-6.120.000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja	3 Lap.	3.825.000	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Lap.	30 Lap.	171.580.000	171.484.000	68.938.000	-102.642.000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja	61 Lap.	70.606.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**80 Unit**	**51 Unit**	**977.724.600**	**977.724.600**	**580.755.300**	**-396.969.300**			**-**	**Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana**	**PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja**	**54 Unit**	**177.153.500**	
1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	355.000.000	355.000.000	0	-355.000.000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja	-	0	
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	515.000.000	515.000.000	515.000.000	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja	-	0	
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	78 Unit	50 Unit	107.724.600	107.724.600	65.755.300	-41.969.300	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja	54 Unit	177.153.500	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**12 Lap.**	**12 Lap.**	**134.400.000**	**120.000.000**	**120.000.000**	**-14.400.000**			**-**	**Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana**	**PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja**	**12 Lap.**	**126.000.000**	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap.	12 Lap.	134.400.000	120.000.000	120.000.000	-14.400.000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja	12 Lap.	126.000.000	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Barang Milik Daerah yang Dipelihara**	**49 Unit**	**49 Unit**	**312.970.000**	**312.970.000**	**333.770.000**	**20.800.000**			**-**	**Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana**	**PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja**	**56 Unit**	**332.090.000**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11 Unit	198.570.000	198.570.000	219.370.000	20.800.000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja	12 Unit	217.690.000	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	34 Unit	14.400.000	14.400.000	14.400.000	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja	34 Unit	14.400.000	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja	2 Unit	50.000.000	
1.05.01.2.09.00011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja	2 Unit	50.000.000	
1.05.02	**Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota**	**100%**	**100%**	**3.176.431.950**	**3.096.408.550**	**1.794.386.100**	**466.008.358**						**100%**	**2.206.943.200**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan**	**100%**	**100%**	**2.372.627.200**	**2.734.612.800**	**1.567.072.450**	**-805.554.750**			**Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana**	**Masyarakat, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi dan TNI Kabupaten Lampung Selatan**	**100%**	**1.962.622.100**	
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman,, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dok	1 Dok	107.166.800	36.116.500	21.682.400	-85.484.400	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Masyarakat, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi dan TNI Kabupaten Lampung Selatan	1 Dok	22.285.400	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dok	2 Dok	540.486.950	545.903.150	383.306.900	-157.180.050	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Masyarakat, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi dan TNI Kabupaten Lampung Selatan	2 Dok	203.369.600	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asaasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	540 Orang	322 Orang	271.624.050	410.209.550	220.491.550	-51.132.500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Masyarakat, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi dan TNI Kabupaten Lampung Selatan	322 Orang	135.129.100	
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dok	2 Dok	45.000.000	46.750.000	22.480.900	-22.519.100	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Masyarakat, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi dan TNI Kabupaten Lampung Selatan	4 Dok	23.809.700	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	8 Lap.	455 Lap.	1.340.333.400	1.576.017.600	799.494.700	-540.838.700	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Masyarakat, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi dan TNI Kabupaten Lampung Selatan	564 Lap.	752.794.400	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	55 Unit	59 Unit	68.016.000	119.616.000	119.616.000	51.600.000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Masyarakat, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi dan TNI Kabupaten Lampung Selatan	453 Unit	825.233.900	
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Selatan**	**100%**	**100%**	**714.455.500**	**270.388.600**	**153.502.300**	**-560.956.200**			**Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana**	**Masyarakat, Aparat Desa dan Kelurahan serta Kecamatan se-Kab. Lampung Selatan**	**100%**	**146.322.700**	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Lap.	6 Lap.	111.769.400	105.503.600	52.199.950	-49.589.450	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Masyarakat, Aparat Desa dan Kelurahan serta Kecamatan se-Kab. Lampung Selatan	4 Lap.	49.536.500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	4 Lap.	21 Lap.	93.954.600	53.667.300	28.557.650	-65.396.950	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Masyarakat, Aparat Desa dan Kelurahan serta Kecamatan se-Kab. Lampung Selatan	34 Lap.	36.746.300	
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Lap.	64 Lap.	508.714.500	111.217.700	62.744.700	-445.969.800	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Masyarakat, Aparat Desa dan Kelurahan serta Kecamatan se-Kab. Lampung Selatan	50 Lap.	60.039.900	
1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah PPNS yang ada di Kabupaten Lampung Selatan**	**2 Orang**	**2 Orang**	**89.346.250**	**91.407.150**	**73.811.350**	**-15.534.900**			**Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana**	**Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan**	**100%**	**97.998.400**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1.05.02.2.03.0002	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 Dok	1 Dok	15.737.000	17.797.900	8.781.300	-6.955.700	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan	1 Lap.	32.968.600	
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 Lap.	2 Lap.	73.609.250	73.609.250	65.030.050	-8.579.200	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana	Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan	2 Lap.	65.029.800	
	Jumlah				**22.453.330.500**	**21.853.089.500**	**19.450.938.500**	**-3.002.392.000**							**19.122.854.500**	

BAB IV
P E N U T U P

Renja (Rencana Kerja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ini, disusun sebagai penjabaran dari Renstra (Rencana Strategi) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026, dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026, dalam rangka mewujudkan ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan ini akan dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf, serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

Demikian Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk dijadikan sebagai implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penegak peraturan daerah, ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat.

Kalianda, 29 Agustus 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



MATURIDI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670720 199402 1 001

LAMPUNG SELATAN MAJU

Bismillah BISA

RENJA



RENCANA KERJA PERUBAHAN 2025

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

KABUATEN LAMPUNG SELATAN

https://disperkim.id/ disperkimkablamsel disperkim_kablamsel

Kata PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, yang selaras dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Renja Perubahan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah.

Penyusunan Renja Perubahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, kondisi aktual, serta kemampuan keuangan daerah, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel.

Akhir kata, diharapkan dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan pelaksanaan pembangunan ke depan.

Kalianda, 7 Agustus 2026

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

AFLAH EFENDI, ST,MT,MH
Pembina Utama muda/IV.c
NIP. 19751019 200003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan..... 6
1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 9

BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Perangkat Daerah 23

BAB V PENUTUP 44

DAFTAR TABEL

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renja Perubahan PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2

Gambar 1.2. Tindak Lanjut Renja Perubahan dalam Penyusunan APBD 3

DAFTAR GAMBAR

Tabel T-C.29 11

Tabel 3.1.1 Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Program Kegiatan 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien dan efektif, yang meliputi Tahapan penyusunan rencana yang SMART, terpadu, dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Telah dipahami secara umum bahwa: failing to plan is planning to fail; gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan.

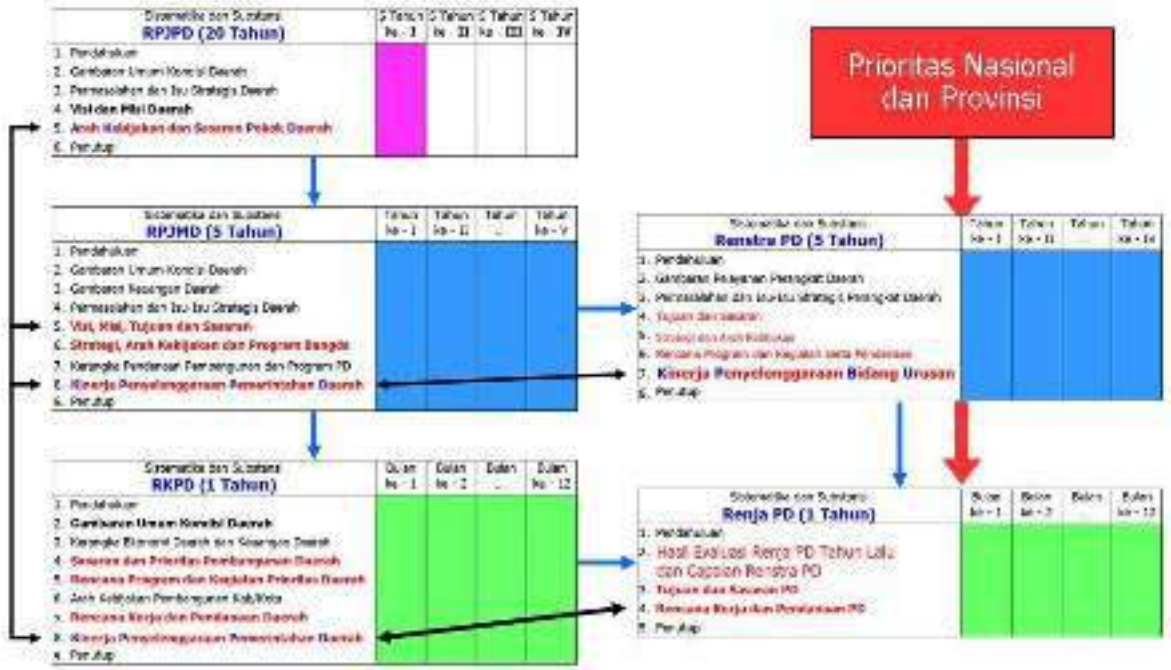
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaapembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah adalah rencana strategis dan Rencana Kerja perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahannya untuk mewujudkan target RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Lihat gambar 1.1.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian

target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Lihat gambar 1.2.

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renja Perubahan PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Renja Perubahan PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan Renja Perubahan PD adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja Perubahan PD,
2. Penyusunan Rancangan Renja Perubahan PD berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil Renja Perubahan PD tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun berjalan,
3. Penyusunan Rancangan Renja Perubahan PD berdasarkan berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah dan Rancangan RKPD,

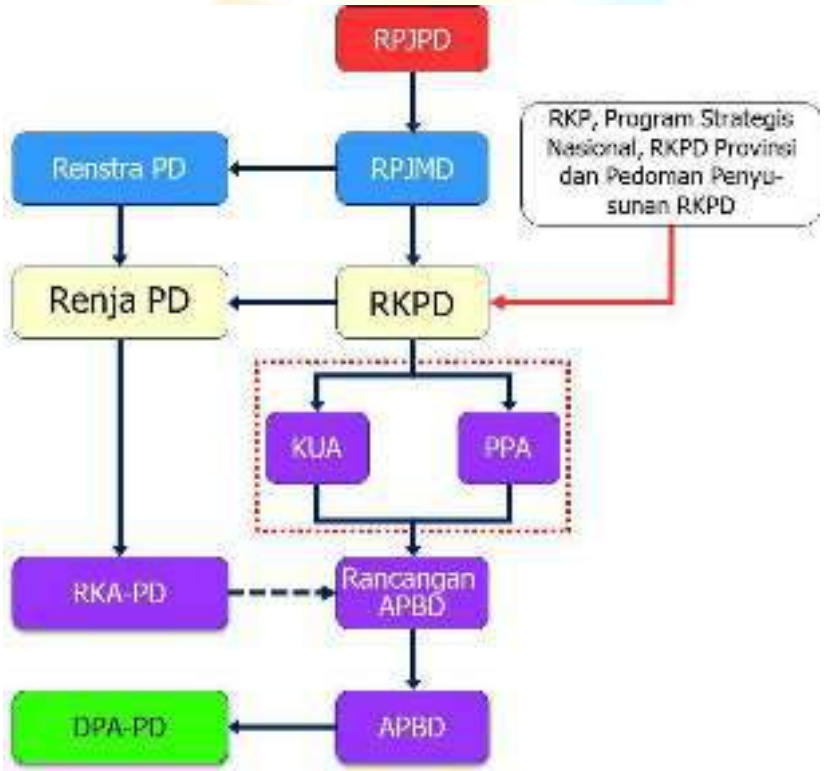
4. Pembahasan Rancangan Renja Perubahan PD dalam Forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perubahan PD berdasarkan Perkada tentang RKPD,

6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perubahan PD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Keterkaitan Dokumen Renja Perubahan PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1. Sedangkan tindak lanjut dokumen Renja Perubahan PD hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2

Gambar 1.2. Tindak Lanjut Renja Perubahan dalam Penyusunan APBD



Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu perangkat daerah yang menjalankan tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan urusan pemerintah dalam tugas pelayanan di bidang perumahann dan permukiman, pengentasan kumuh dan Pertanahan.

Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman 2021 - 2026, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dibah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ Tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 -2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2024;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan 2025 harus selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi tentang :

1. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan;
2. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan;
3. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;

Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian

target kinerja Renstra dan RPJMD Lampung Selatan di tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan

Tujuan dari penyusunan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ini adalah: menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasionil:

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di Tahun 2025 ;
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dan laporan kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN.

   Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

b. BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

   Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan dan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, hasil review

terhadap rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

c. BAB III TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran Renja Perubahan serta program dan kegiatan prioritas yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) sesuai dengan bidang urusan Perangkat Daerah.

d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi Rencana Kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPJMD.

e. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB 2
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DINAS TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAE/RAH TAHUN LALU

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja Perubahan diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perubahan dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Tabel 2.1 merupakan ikhtisar dari Tabel T-C.29 Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang akan menyajikan Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, Sedangkan untuk tahun ini kegiatan masih berjalan dan diupayakan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Dalam Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman.

2.1.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2023 DAN PERKIRAAN CAP AIAN TAHUN 2024

Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, melaksanakan 8 Program, 21 Kegiatan dan 67 Sub Kegiatan untuk mendukung target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025. Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 adalah seperti di tujunjukan pada table 2.1 di bawah .

Dari sisi anggaran, Target Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp28.528.287.700, sedangkan realisasi anggaran tercatat sebesar Rp2.639.333.935. Perbandingan antara target dan realisasi anggaran ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran masih relatif rendah dibandingkan dengan alokasi yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun secara kinerja jumlah kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target, namun pemanfaatan anggaran belum optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penundaan pelaksanaan kegiatan, efisiensi belanja, atau adanya kegiatan yang belum memerlukan dukungan anggaran besar.

Secara keseluruhan, kinerja program dan kegiatan pada Tahun 2025 dapat dinilai cukup baik dari sisi output kegiatan, namun masih diperlukan peningkatan efektivitas dan percepatan realisasi anggaran agar pelaksanaan program dapat berjalan seimbang antara capaian kinerja dan penyerapan anggaran sesuai perencanaan

Tabel 2.1.1
Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan dan Pencapaian Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Lampung Selatan

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2029)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2025)	
						K	Rp.	K	Rp	TARGET RENJA PD TAHUN 2025	TARGET ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI RENJA PD TAHUN 2025	TARGET ANGGARAN TAHUN 2025
04	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**89 poin**	**21,560,070,500**	**85 poin**	**4,855,001,916**	**84 poin**	**4,650,785,550**	**84 poin**	**2,062,795,466**
04	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**40 dok**	**425,979,500**	**11 dok**	**76,284,208**	**11 dok**	**71,237,100**	**3 dok**	**29,054,850**
04	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dok	113,575,500	2 dok	19,472,000	3 dok	21,312,000	dok	8,699,750
04	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dok	64,651,500	1 dok	13,485,250	1 dok	11,300,000	dok	0
04	01	2	01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dok	64,651,500	1 dok	11,946,600	1 dok	11,500,000	dok	0
04	01	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4 dok	21,550,500	1 dok	3,725,300	1 dok	4,000,000	1 dok	4,000,000
04	01	2	01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4 dok	21,550,500	1 dok	3,725,300	1 dok	3,000,000	dok	0
04	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 lap	140,000,000	5 lap	23,929,758	4 lap	20,125,100	2 lap	16,355,100

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2029)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2025)	
						K	Rp.	K	Rp	TARGET RENJA PD TAHUN 2025	TARGET ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI RENJA PD TAHUN 2025	TARGET ANGGARAN TAHUN 2025
04	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 bulan**	**14,184,015,200**	**12 bulan**	**3,616,086,853**	**12 bulan**	**3,681,598,600**	**12 bulan**	**1,840,107,677**
04	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	120 orang / bulan	12,951,294,500	33 orang/ bulan	2,975,612,153	33 orang/ bulan	2,978,646,000	33 orang/ bulan	1,607,156,077
04	01	2	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 dok	961,867,200	12 dok	589,876,500	12 dok	659,645,500	6 dok	215,467,500
04	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dok	64,651,500	1 dok	13,818,800	1 dok	11,414,000	dok	5,279,000
04	01	2	02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dok	21,550,500	1 dok	3,145,000	1 dok	2,500,000	dok	0
04	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 lap	21,550,500	1 lap	5,126,200	1 lap	5,000,000	1 lap	4,994,000
04	01	2	02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	16 dok	43,101,000	4 dok	4,839,400	4 dok	3,828,100	2 dok	3,828,100
04	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72 lap	120,000,000	18 lap	23,668,800	18 lap	20,565,000	18 lap	3,383,000
04	**01**	**2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**24 dok**	**133,613,500**	**6 dok**	**29,190,200**	**6 dok**	**21,452,800**	**6 dok**	**4,244,900**
04	01	2	03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8 dok	17,240,500	2 dok	3,025,300	2 dok	2,000,000	dok	0
04	01	2	03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 dok	17,240,500	1 dok	3,257,500	1 dok	2,000,000	dok	450,000
04	01	2	03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 lap	17,240,500	1 lap	2,779,300	1 lap	2,000,000	lap	0
04	01	2	03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			0	-	0	0		0

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2029)			REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2025)		
						K		Rp.	K		Rp	TARGET RENJA PD TAHUN 2025		TARGET ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI RENJA PD TAHUN 2025		TARGET ANGGARAN TAHUN 2025
04	01	2	03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	lap	17,240,500	1	lap	2,861,800	1	lap	2,930,000		lap	0
04	01	2	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	lap	64,651,500	1	lap	17,266,300	1	lap	12,522,800	1	lap	3,794,900
04	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**310,327,500**	**100**	**%**	**35,835,550**	**100**	**%**	**30,095,250**	**100**	**%**	**8,028,027**
04	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	260	Paket	129,303,000	1	Paket	20,700,000	69	Paket	9,765,000		Paket	0
04	01	2	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	dok	51,721,500	1	dok	7,397,050	1	dok	8,383,250		dok	3,012,777
04	01	2	05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	dok	64,651,500	1	dok	7,738,500	1	dok	11,947,000		dok	5,015,250
04	01	2	05	0004	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4	dok	64,651,500		dok	-		dok	0		dok	0
04	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**2,971,158,500**	**100**	**%**	**780,226,676**	**100**	**%**	**479,361,800**	**100**	**%**	**81,008,192**
04	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16	Paket	32,325,000	4	Paket	6,981,000	4	Paket	3,963,000	1	Paket	1,603,000
04	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20	Paket	600,000,000	8	Paket	147,560,000	6	Paket	149,299,700	0	Paket	0
04	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16	Paket	107,752,500	4	Paket	19,589,700	4	Paket	21,344,800	1	Paket	6,831,956
04	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16	Paket	172,405,000	4	Paket	42,498,100	4	Paket	22,044,300	2	Paket	11,935,328
04	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16	Paket	172,405,000	4	Paket	21,249,400	4	Paket	22,760,000	2	Paket	9,747,000
04	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4	dok	72,000,000	1	dok	18,000,000	1	dok	18,000,000		dok	6,000,000
04	01	2	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	8	Paket	160,000,000	2	Paket	40,000,000	2	Paket	40,000,000		Paket	0
04	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	88	lap	258,607,500	22	lap	119,100,000	20	lap	32,850,000	8	lap	11,340,000
04	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132	lap	900,000,000	36	lap	210,439,476	40	lap	109,804,000	3	lap	22,690,908

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2029)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2025)	
						K	Rp.	K	Rp	TARGET RENJA PD TAHUN 2025	TARGET ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI RENJA PD TAHUN 2025	TARGET ANGGARAN TAHUN 2025
04	01	2	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 dok	495,663,500	1 dok	154,809,000	1 dok	59,296,000	dok	10,860,000
04	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**48 bulan**	**2,352,245,800**	**12 bulan**	**91,949,746**	**12 bulan**	**104,800,000**	**6 bulan**	**40,741,539**
04	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48 lap	474,113,000	12 lap	91,949,746	12 lap	104,800,000	6 lap	40,741,539
04	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor	48 lap	1,878,132,800	0 lap	-	0 lap		0 lap	
04	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**59 unit**	**1,182,730,500**	**59 unit**	**225,428,683**	**57 unit**	**262,240,000**	**57 unit**	**59,610,281**
04	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 unit	654,490,000	4 unit	143,534,928	4 unit	159,490,000	4 unit	57,920,281
04	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-		-		0		
04	01	2	09		Pemeliharaan Mebel	8 unit	17,240,500	8 unit	4,000,000	8 unit	4,000,000	unit	0
04	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42 unit	86,000,000	42 unit	31,095,520	42 unit	20,000,000	1 unit	1,690,000
04	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 unit	225,000,000	3 unit	46,798,235	2 unit	52,500,000	unit	0
04	01	2	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	200,000,000	2 unit	-	1 unit	26,250,000	unit	0

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2029)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2025)	
						K	Rp.	K	Rp	TARGET RENJA PD TAHUN 2025	TARGET ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI RENJA PD TAHUN 2025	TARGET ANGGARAN TAHUN 2025
04	01	2	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-		unit	-	0 unit	0	unit	0
04	**02**				**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**100 %**	**3,628,262,500**	**100 %**	**391,022,050**	**100 %**	**479,066,100**	**100 %**	**200,121,550**
04	**02**	**2**	**01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**100 %**	**143,000,000**	**4 dok**	**29,403,300**	**3 dok**	**20,243,650**	**3 dok**	**6,781,900**
04	02	2	01	0003	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			1 dok	11,862,150	1 dok	7,500,000	dok	575,700
04	02	2	01	0003	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	dok		1 dok	7,513,650	1 dok	7,743,700	dok	1,640,300
04	02	2	01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 dok	43,000,000	1 dok	10,027,500	1 dok	4,999,950	1 dok	4,565,900
04	02	2	01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 dok	100,000,000	0 dok	-	1 dok	0	dok	0
04	**02**	**2**	**02**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**3 lap**	**226,000,000**	**3 Lap**	**50,906,000**	**3 Lap**	**53,517,900**	**Lap**	**-**
04	02	2	02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	75 org	86,000,000	130 orang	20,610,450	35 orang	29,197,700	orang	0
04	02	2	02	0	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	org	-	100 orang	17,887,100	35 orang	12,160,050	orang	0
04	02	2	02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	15 org	100,000,000	0 orang	-		0		0

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2029)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2025)	
						K	Rp.	K	Rp	TARGET RENJA PD TAHUN 2025	TARGET ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI RENJA PD TAHUN 2025	TARGET ANGGARAN TAHUN 2025
04	02	2	02	0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	400 org	40,000,000	100 orang	12,408,450	35 orang	12,160,150	orang	0
04	**02**	**2**	**03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**34 unit/ rumah**	**2,694,262,500**	**12 unit/ rumah**	**264,648,350**	**17 unit rumah**	**374,667,000**	**9 unit rumah**	**192,132,300**
04	02	2	03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	31 Unit /Rumah	2,494,262,500	12 unit rumah	264,648,350	17 unit rumah	374,667,000	9 unit rumah	192,132,300
04	02	2	03	0003	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	3 Unit	100,000,000						
04	02	2	03	0004	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Rumah Tangga	100,000,000	13 rumah tangga	-				
04	**02**	**2**	**04**		**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**4 Dok**	**223,000,000**	**1 Dok**	**16,141,200**	**1 Dok**	**11,924,900**	**1 Dok**	**458,350**
04	02	2	04	0005	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	4 dok	180,000,000	12 rumah tangga	8,205,300	17 rumah tangga	6,999,950	9 rumah tangga	458,350
04	02	2	04	0006	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	112 Rumah Tangga	43,000,000	1 dokumen	7,935,900	1 dokumen	4,924,950	dokumen	-
04	**02**	**2**	**05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**1 unit**	**149,000,000**	**2 unit**	**14,889,000**	**1 unit**	**6,248,050**	**unit**	**-**
04	02	2	05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	4 lap	86,000,000	2 lap	7,085,800	1 lap	2,498,100	lap	-

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2029)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2025)	
						K	Rp.	K	Rp	TARGET RENJA PD TAHUN 2025	TARGET ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI RENJA PD TAHUN 2025	TARGET ANGGARAN TAHUN 2025
04	02	2	05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	4 dok	43,000,000	1 dok	7,803,200	1 dok	3,749,950	dok	-
04	02	2	05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	2 dok	20,000,000						
04	**02**	**2**	**06**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**1 dok**	**193,000,000**	**7 dok**	**15,034,200**	**2 dok**	**12,464,600**	**dok**	**749,000**
04	02	2	06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik			1 dok	7,156,700	1 dok	6,622,000	dok	441,000
04	02	2	06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			2 lap	7,877,500	1 lap	5,842,600	lap	308,000
04	02	2	06	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	4 lap	43,000,000	lap		0 lap	-	0 lap	-
04	02	2	06	0005	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 sistem informasi	150,000,000				-		-
04	**03**				**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**45.4 Ha**	**9,263,641,800**	**0 Ha**	**2,956,118,958**	**6.19 Ha**	**1,527,666,400**	**Ha**	**82,416,969**
04	**03**	**2**	**01**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**3 lap**	**335,000,000**	**6 lap**	**23,832,465**	**1 lap**	**19,756,000**	**lap**	**778,000**
04	03	2	01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	2 lap	155,000,000	lap		1 lap	19,756,000	lap	778,000
04	03	2	01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan	6 lap	180,000,000	1 lap	23,832,465	lap	0	lap	0

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2029)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2025)	
						K	Rp.	K	Rp	TARGET RENJA PD TAHUN 2025	TARGET ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI RENJA PD TAHUN 2025	TARGET ANGGARAN TAHUN 2025
					Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum								
04	**03**	**2**	**02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**10 dok**	**1,526,631,050**	**5 Dok**	**762,965,000**	**1 laporan**	**119,779,900**	**laporan**	**1,320,500**
04	03	2	02	0014	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	8 dok	1,220,000,000	1 dok	407,907,300	1 dok	108,853,500	dok	1,320,500
04	03	2	02	0010	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	0 dok	50,000,000	dok		dok		dok	
04	03	2	02	0011	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	0 Rumah Tangga	50,000,000	Rumah Tangga	-	Rumah Tangga		Rumah Tangga	
04	03	2	02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	2 Kel. masyarkat	120,000,000	1 Kel. masyarkat	24,156,700	1 Kel. masyarkat	10,926,400	Kel. masyarkat	0
04	03	2	02	0013	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	1 dok	26,631,050	0 dok	-	dok		dok	
04	03	2	02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2 -	-	3 dok	330,901,000	dok		dok	
04	03	2	02	0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	90 Rumah Tangga	60,000,000	dok		dok			
04	03	2	02	0010	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			lap		lap		lap	

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2029)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2025)	
						K	Rp.	K	Rp	TARGET RENJA PD TAHUN 2025	TARGET ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI RENJA PD TAHUN 2025	TARGET ANGGARAN TAHUN 2025
04	**03**	**2**	**03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**33 KK**	**7,402,010,750**	**219 KK**	**2,169,321,493**	**11 KK**	**1,388,130,500**	**11 KK**	**80,318,469**
04	03	2	03	0002	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	dok		dok	-	0 dok		0 dok	
04	03	2	03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	132 Uniit Rumah	2,800,000,000	8 unit rumah	167,372,850	11 unit rumah	263,664,200	unit rumah	7,453,225
04	03	2	03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	lap		1 lap	308,737,550	1 lap	9,316,000	lap	3,179,300
04	03	2	03	0010	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	12 Rumah Tangga	164,971,900	Rumah Tangga		Rumah Tangga		Rumah Tangga	
04	03	2	03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	9 unit	387,038,850	unit		unit		unit	
04	03	2	03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Permukiman Kumuh	4 Ha	3,950,000,000	1 Ha	1,670,472,243	1 Ha	1,084,747,400	Ha	60,295,944
04	03	2	03	0014	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh			1 dok	22,738,850	1 dok	30,402,900	dok	9,390,000
04	03	2	03	0014	Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali	1 Ha	100,000,000	Ha		Ha		Ha	
04	**04**	**2**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**1 dok**	**40,079,644,400**	**1 dok**	**5,763,185,350**	**1 dok**	**9,546,307,800**	**1 dok**	**166,465,000**

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2029)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2025)	
						K	Rp.	K	Rp	TARGET RENJA PD TAHUN 2025	TARGET ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI RENJA PD TAHUN 2025	TARGET ANGGARAN TAHUN 2025
04	**04**	**2**	**01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**490 KK**	**40,079,644,400**	**265 KK**	**5,763,185,350**	**446 KK**	**9,546,307,800**	**446 KK**	**166,465,000**
04	04	2	01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1780 Unit Rumah	38,000,000,000	265 unit rumah	5,717,847,700	446 unit rumah	9,531,002,200	unit rumah	166,465,000
04	03	2	01	0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	400 org	2,079,644,400	1 lap	45,337,650	50 orang	15,305,600	orang	0
04	**05**				**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**100 %**	**24,258,732,050**	**100 %**	**6,674,908,419**	**100 %**	**12,147,896,250**	**83 %**	**118,337,350**
04	**05**	**2**	**01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**100 %**	**24,258,732,050**	**100 %**	**6,674,908,419**	**100 %**	**12,147,896,250**	**83 %**	**118,337,350**
04	05	2	01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	8 dok	860,000,000	2 dok	232,094,400	2 dok	121,421,000	dok	4,391,000
04	05	2	01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	4 lap	160,000,000	2 lap	42,475,450	1 lap	17,438,850	lap	0
04	05	2	01	0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	8 KLP	100,000,000	0 KLP	-	2 KLP	8,671,900	KLP	0
04	05	2	01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	4 lap	80,000,000	0 lap		lap		lap	
04	05	2	01	0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	4 lokasi	1,000,000,000	0 lokasi		lokasi		lokasi	
04	05	2	01	0013	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	84 lokasi	22,058,732,050	28 lokasi	6,400,338,569	50 lokasi	12,000,364,500	lokasi	113,946,350
10	**06**				**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**100 %**	**32,255,289**				

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2029)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2025)	
						K	Rp.	K	Rp	TARGET RENJA PD TAHUN 2025	TARGET ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI RENJA PD TAHUN 2025	TARGET ANGGARAN TAHUN 2025
10	**06**	**2**	**01**		**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**			**100 %**	**32,255,289**		-		-
10	06	2	01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Dok		1 dokumen	32,255,289				
10	**04**				**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**100 %**	**232,039,850**	**0 %**	**53,797,600**	**100 %**	**24,442,000**	**100 %**	**1,778,800**
10	**04**	**2**	**01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**9 Dok**	**232,039,850**	**3 Dok**	**53,797,600**	**1 Dok**	**24,442,000**	**1 Dok**	**1,778,800**
10	04	2	01	0001	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota	1 BA	10,000,000			Berita Acara		0 Berita Acara	
10	04	2	01	0004	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 BA	202,039,850	2 berita acara	42,703,400	2 berita acara	24,442,000	2 berita acara	1,778,800
10	04	2	01	005	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dok	20,000,000	1 Dok	11,094,200	Dok		0 Dok	
10	**05**				**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**1 %**	**30,000,000**						
10	**05**	**2**	**01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**30,000,000**						

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2029)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2025)	
						K	Rp.	K	Rp	TARGET RENJA PD TAHUN 2025	TARGET ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI RENJA PD TAHUN 2025	TARGET ANGGARAN TAHUN 2025
10	05	2	01	0007	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Lap	30,000,000						
10	**06**				**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**100 %**	**168,756,350**	**0 %**	**47,929,150**	**100 %**	**18,171,600**	**%**	**1,778,800**
10	**06**	**2**	**01**		**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**17 Kec**	**168,756,350**	**14 Kec**	**47,929,150**	**17 Kec**	**18,171,600**	**Kec**	**1,778,800**
10	06	2	01	0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	1 Dok	10,000,000	Dok		1 Dok	9,857,000	Dok	0
10	06	2	01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4 Dok	73,756,350	1 Dok	22,611,700	1 Dok	8,314,600	Dok	1,778,800
10	06	2	01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Dok	10,000,000						
10	06	2	01	0007	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	1 Lap	10,000,000						
10	06	2	01	0008	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	4 Dok	65,000,000	1 Dok	25,317,450	Dok		Dok	
10	**08**				**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**100 %**	**30,000,000**	**Dok**					
10	**08**	**2**	**01**		**Penyelesaian Masalah Tanah Kosong**	**1 Dok**	**30,000,000**	**Dok**	**-**				

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2029)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2025)	
						K	Rp.	K	Rp	TARGET RENJA PD TAHUN 2025	TARGET ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI RENJA PD TAHUN 2025	TARGET ANGGARAN TAHUN 2025
10	08	2	01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Lap	30,000,000	lapora n					
10	**10**				**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**100 %**	**446,269,150**	**1 Dok**	**115,324,700**	**1 Dok**	**133,952,000**	**Dok**	**5,640,000**
10	**10**	**2**	**01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**1 dok**	**446,269,150**	**1 dok**	**115,324,700**	**1 dok**	**133,952,000**	**dok**	**5,640,000**
10	10	2	01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	4 lap	446,269,150	1 lap	115,324,700	2 lap	133,952,000	lap	5,640,000
JUMLAH							**99,697,416,600**		**20,889,543,432**				

BAB III
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Program Kegiatan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2025 disusun sebagai tindak lanjut atas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025, dinamika kebijakan, serta penyesuaian kemampuan keuangan daerah. Penyesuaian ini berdampak pada perubahan target kinerja dan pagu anggaran pada beberapa program, kegiatan, dan subkegiatan.

Berdasarkan tabel Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan, total pagu indikatif Dinas Perumahan dan Permukiman pada RKPD Tahun 2025 sebesar **Rp17.579.232.500,00**, meningkat pada APBD Tahun 2025 menjadi **Rp28.594.493.500,00**, dan selanjutnya disesuaikan dalam **RKPD Perubahan Tahun 2025 menjadi Rp25.361.243.500,00**. Penyesuaian pagu tersebut dilakukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program prioritas serta optimalisasi capaian kinerja pelayanan dasar.

Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, khususnya **Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**, tetap menjadi fokus utama dengan pagu pada RKPD Perubahan Tahun 2025 sebesar **Rp25.184.677.900,00**. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan, pelayanan, dan pengelolaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Tabel 3.1.1 Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Program Kegiatan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
1	2					3	4	8	9	10	11	12
						Dinas Perumahan dan Permukiman				17.579.232.500,00	28.594.493.500,00	25.361.243.500,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				17.144.232.500,00	28.159.493.500,00	25.184.677.900,00
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				17.144.232.500,00	28.159.493.500,00	25.184.677.900,00
1	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	84 Poin	84 Poin	6.768.949.200,00	6.419.210.200,00	6.208.061.550,00
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	10 Dokumen	88.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	21.312.000,00
	1	04	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	11.300.000,00
	1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	11.500.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
	1	04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	1	04	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
	1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	20.125.100,00
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	5.503.839.000,00	5.254.112.000,00	5.254.112.000,00
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	29 Orang/bulan	4.820.449.000,00	4.535.922.000,00	4.535.922.000,00
	1	04	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	625.890.000,00	660.690.000,00	659.645.500,00
	1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	11.414.000,00
	1	04	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00
	1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	1	04	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	4 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	3.828.100,00
	1	04	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	20.565.000,00
	1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
	1	04	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
	1	04	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
	1	04	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
	1	04	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	2.930.000,00
	1	04	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	12.522.800,00
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Penyelenggaraan administrasi kepegawaian selama 1 thn	100 %	100 %	48.796.500,00	48.796.500,00	48.796.500,00
	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	63 Paket	21.735.000,00	21.735.000,00	9.765.000,00
	1	04	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	11.861.500,00	11.861.500,00	8.383.250,00
	1	04	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	15.200.000,00	15.200.000,00	11.947.000,00
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah selama 1 thn	100 %	100 %	734.823.700,00	634.811.700,00	634.811.700,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	3.963.000,00
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	6 Paket	151.863.700,00	151.863.700,00	149.299.700,00
	1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	21.344.800,00
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	22.044.300,00
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	22.760.000,00
	1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
	1	04	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material						
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
	1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	22 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	32.850.000,00
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan	40 Laporan	224.460.000,00	224.448.000,00	109.804.000,00
	1	04	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	143.000.000,00	43.000.000,00	59.296.000,00
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	104.800.000,00	104.800.000,00	104.800.000,00
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	104.800.000,00	104.800.000,00	104.800.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang dipelihara	46 Unit	47 Unit	257.690.000,00	257.690.000,00	257.690.000,00
	1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	158.690.000,00	158.690.000,00	159.490.000,00
	1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel						
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	42 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	52.500.000,00
	1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	26.250.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
2	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	% masyarakat korban bencana dan relokasi yang memperoleh pelayanan rumah layak huni	100 %	100 %	636.500.000,00	536.500.000,00	454.745.900,00
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	140.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
	1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan						
							Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	115.000.000,00	15.000.000,00	7.743.700,00
	1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani						
							Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	4.999.950,00
	1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00
	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Sosialisasi	1 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	150 Orang	35 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	12.160.050,00
	1	04	02	2.02	0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						
							Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	75 Orang	35 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	4.877.500,00
	1	04	02	2.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan						
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	150 Orang	35 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	12.160.150,00
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana/ relokasi program kab yang tertangani	17 Unit	17 Unit	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	17 Unit Rumah	17 Unit Rumah	385.000.000,00	385.000.000,00	374.667.000,00
	1	04	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
	1	04	02	2.04	0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						
							Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000,00	14.000.000,00	6.999.950,00
	1	04	02	2.04	0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						
							Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	16 Rumah Tangga	17 Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	4.924.950,00
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Pengelolaan Rusun	1 Unit	1 Unit	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
	1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun						
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.498.100,00
	1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						
							Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	3.749.950,00
	1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah SHGB yang diterbitkan	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	1	04	02	2.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000,00	13.000.000,00	6.622.000,00
	1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	5.842.600,00
3	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	59,8 Ha	59,8 Ha	1.527.194.000,00	1.327.194.000,00	1.527.666.400,00
	1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Perizinan Kawasan Permukiman yang sesuai	1 Laporan	1 Laporan	25.154.000,00	25.154.000,00	25.154.000,00
	1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman						
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	1 Laporan	25.154.000,00	25.154.000,00	19.756.000,00
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen penataan kawasan kumuh	2 Dokumen	2 Dokumen	144.947.000,00	144.947.000,00	144.947.000,00
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	120.417.000,00	120.417.000,00	108.853.500,00
	1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh						
							Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	24.530.000,00	24.530.000,00	10.926.400,00
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rumah tangga di kawsan kumuh yang memperoleh rumah layak huni	11 Unit	11 Kepala Keluarga	1.357.093.000,00	1.157.093.000,00	1.157.093.000,00
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	11 Unit Rumah	11 Unit Rumah	271.913.000,00	271.913.000,00	263.664.200,00
	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh						
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	1 Laporan	17.633.000,00	17.633.000,00	9.316.000,00
	1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh						
							Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	33.736.000,00	33.736.000,00	30.402.900,00
	1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	1 Ha	1 Ha	1.033.811.000,00	833.811.000,00	1.084.747.400,00
4	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Laporan Pencegahan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	5.861.375.300,00	9.306.375.300,00	8.926.307.800,00
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga di luar kawasan kumuh yang memperoleh rumah layak huni	265 Kepala Keluarga	415 Kepala Keluarga	5.861.375.300,00	9.306.375.300,00	9.306.375.300,00
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	265 Unit Rumah	415 Unit Rumah	5.832.375.300,00	8.977.375.300,00	8.911.002.200,00
	1	04	04	2.01	0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh						
							Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	100 Orang	50 Orang	29.000.000,00	329.000.000,00	15.305.600,00
5	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang di dukung dengan PSU (%)	100 %	100 %	2.350.214.000,00	10.570.214.000,00	8.067.896.250,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar	100 %	100 %	2.350.214.000,00	10.570.214.000,00	10.570.214.000,00
	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dokumen	2 Dokumen	217.214.000,00	217.214.000,00	121.421.000,00
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian						
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	8 Lokasi	39 Lokasi	2.083.000.000,00	10.303.000.000,00	7.920.364.500,00
	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan						
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	17.438.850,00
	1	04	05	2.01	0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU						
							Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	2 Kelompok	2 Kelompok	15.000.000,00	15.000.000,00	8.671.900,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				435.000.000,00	435.000.000,00	176.565.600,00
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				435.000.000,00	435.000.000,00	176.565.600,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
6	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Kasus sengketa pertanahan (%)	100 %	100 %	50.480.000,00	50.480.000,00	24.442.000,00
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kasus sengkerta tanah yang tertangani	2 Dokumen	2 Dokumen	50.480.000,00	50.480.000,00	50.480.000,00
	2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	50.480.000,00	50.480.000,00	24.442.000,00
7	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase penyelenggaraan Redistribusi Tanah (%)	100 %	100 %	40.000.000,00	40.000.000,00	18.171.600,00
	2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang Menyandingkan Penataan Aset dengan Penataan Akses dalam Kerangka Reforma Agraria	17 Kecamatan	17 Kecamatan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
	2	10	06	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						
							Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	8.224.600,00
	2	10	06	2.01	0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
							Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	9.947.000,00
8	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Penatagunaan tanah	2 Dokumen	1 Dokumen	344.520.000,00	344.520.000,00	133.952.000,00
	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Penggunaan tanah	2 Dokumen	1 Dokumen	344.520.000,00	344.520.000,00	344.520.000,00
	2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah						
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	1 Laporan	344.520.000,00	344.520.000,00	133.952.000,00
									JUMLAH	17.579.232.500,00	28.594.493.500,00	25.361.243.500,00

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
g. Penyediaan Bahan/Material
h. Fasilitasi Kunjungan Tamu
i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
j. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   b. Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c. Pemeliharaan Mebel
   d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
   a. Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
   b. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
   c. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

a. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
b. Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan
c. Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
   a. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
   a. Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
   b. Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
5. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
   a. Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
   b. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
6. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
   a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik
   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

C. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
   a. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
   b. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
3. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh

a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
c. Pelaksanaan Pemugaran Permukiman Kumuh
d. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh

D. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
b. Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh"

E. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

a. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
b. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
c. Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU
d. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

F. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

G. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

1. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

H. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

1. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam satu tahun anggaran, yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021–2026 serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021–2026.

Renja Perubahan ini memuat arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, serta rencana pendanaan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mempertimbangkan dinamika pelaksanaan pembangunan tahun berjalan. Penyusunan Renja Perubahan diharapkan mampu mengoptimalkan pencapaian kinerja perangkat daerah, khususnya dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman, penanganan kawasan kumuh, serta dukungan terhadap pelayanan dasar kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 secara umum telah berjalan dengan cukup baik dari sisi pencapaian output kegiatan. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan dan percepatan realisasi anggaran agar keselarasan antara capaian kinerja dan penyerapan anggaran dapat tercapai secara optimal.

.2 Catatan Penting Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

1. Perlunya peningkatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah serta dengan pemangku kepentingan terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Perlunya penguatan pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan agar target kinerja dan realisasi anggaran dapat dicapai sesuai dengan perencanaan.

3. Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan, maka perlu dilakukan penyesuaian prioritas program dan kegiatan dengan tetap mengacu pada pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari Renja Perubahan ini, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan akan menggunakan dokumen ini sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Selain itu, Renja Perubahan ini juga akan menjadi acuan dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, diharapkan pelaksanaan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selata

RENJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan merupakan dokumen perencanaan untuk masa 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan selama 1 (satu) tahun anggaran yang memuat tujuan, sasaran, dan target capaian kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025, dengan harapan agar program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan lebih terarah dan terukur.

Penyusunannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Peran serta maksimal dari seluruh potensi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka penyusunan rencana kerja perubahan ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggungjawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi dan dapat mendorong peningkatan kinerja.

Dalam penyusunan dokumen ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang sangat kami harapkan.

Kalianda,18 Juli 2025

Kepala Dinas
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Lampung Selatan



BADRUZZAMAN, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690208 199003 1 006

DAFTAR ISI

Halaman Judul ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TRIWULAN II **5**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah 16
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **20**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 20
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 20
3.3. Program dan Kegiatan 27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **42**
BAB V PENUTUP **54**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dengan tetap memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dengan demikian Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Kerja organisasi perangkat daerah sebagai dokumen penerjemah program / kegiatan organisasi perangkat daerah yang ditetapkan dan Renstra OPD sesuai arahan operasional dalam perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD-P);
2. Perubahan rencana kerja organisasi perangkat daerah merupakan acuan untuk memastikan keselarasan rancangan perubahan rencana kerja (Renja-P) terhadap rangcangan perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD-P);
3. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan OPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja OPD Tahun 2025;
4. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan kegiatan, meliputi :
   1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah, dimana anggaran yang ada harus disesuaikan dengan target kinerja dan capaiannya.
   2) Penyesuaian target program/kegiatan akibat adanya perubahan anggaran pada beberapa sub kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagai dasar pelaksanaan program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas dimemperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029;
27. Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2025-2029.
28. Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor…. Tahun 2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA-P) Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 adalah:

1. Memasukkan program/kegiatan/sub kegiatan yang ada di Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) kedalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta koordinasi dengan instansi terkait,

monitoring, analisis dan evaluasi kegiatan, baik secara internal maupun secara eksternal;

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi kegiatan demi mewujudkan efisiensi dan efektifitas perencanaan dan mengalokasikan sumberdaya pembangunan. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang terpadu dengan indikator capaian.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI SAMPAI TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

BAB III MATRIK RENJA PERUBAHAN

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja adalah kegiatan penilaian terhadap rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 yang merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun tahun 2024 dan sebagian telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Beberapa variabel program yang tertuang dalam Renstra yang mempunyai dampak dari kegiatan yang dilaksanakan. Perbandingan ini kemudian diidentifikasikan dan menjadi factor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan program kerja yang telah dilaksakan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II, merupakan informasi tentang sejauhmana kemampuan pelaksanaan program / kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan yang meliputi pagu indikatif dan realisasi anggaran. Secara keseluruhan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

	PROGRAM	ANGGARAN			%
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.354.102.850,-**	**1.646.903.878,-**	**1.707.198.972,-**	**49,10**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**120.554.100,-**	**1.400.000,-**	**119.154.100,-**	**1,16**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98.014.100,-	-	98.014.100,-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.564.900,-	-	6.564.900,-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.755.400,-	-	4.755.400,-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.452.000,-	-	2.452.000,-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.175.000,-	-	2.175.000,-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.592.700,-	1.400.000,-	5.192.700,-	21,24
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.768.650.650,-**	**1.575.741.082,-**	**1.192.909.568,-**	**56,91**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.403.539.500,-	1.422.961.682,-	980.577.818,-	59,20
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	357.120.000,-	149.475.000;-	- 207.645.000,-	41,86
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.045.000,-	3.304.400,-	1.740.600,-	65,50
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.946.150,-	-	2.946.150,-	-
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**274.490.600,-**	**27.451.158,-**	**247.039.442,-**	**10,00**

	PROGRAM	ANGGARAN			%
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,-	2.663.290,-	2.336.710,-	53,27
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.394.000,-	-	126.394.000,-	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.948.600,-	3.605.517,-	6.343.083,-	36,24
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,-	4.207.035,-	15.792.965,-	21,04
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.500.000,-	5.215.316,-	13.284.684,-	28,19
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000,-	6.000.000,-	12.000.000,-	33,33
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.300.000,-	1.410.000,-	7.890.000,-	15,16
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.348.000,-	4.350.000,-	62.998.000,-	6,46
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3.277.500,-**	**-**	**3.277.500,-**	**-**
	Pengadaan Mebel	3.277.500,-	-	3.277.500,-	-
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**109.200.000,-**	**25.831.638,-**	**83.368.362,-**	**23,66**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.200.000,-	25.831.638,-	83.368.362,-	23,66
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**77.930.000,-**	**16.480.000,-**	**61.450.000,-**	**21,15**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.930.000,-	15.480.000,-	31.450.000,-	32,99
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,-	1.000.000,-	5.000.000,-	16,67

	PROGRAM	ANGGARAN			%
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,-	-	25.000.000,-	-
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**926.324.450,-**	**8.050.000,-**	**918.274.450,-**	**0,87**
7	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**876.324.450,-**	**8.050.000,-**	**868.274.450,-**	**0,92**
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	876.324.450,-	8.050.000,-	868.274.450,-	0,92
8	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**50.000.000,-**	**-**	**50.000.000,-**	**-**
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	50.000.000,-	-	50.000.000,-	-
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**425.773.800,-**	**35.263.813,-**	**390.509.987,-**	**8,28**
9	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**128.490.000,-**	**27.453.813,-**	**101.036.187,-**	**21,37**
	Pelayanan antar Kerja	58.490.000,-	-	58.490.000,-	-
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	70.000.000,-	27.453.813,-	42.546.187,-	39,22
10	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**262.283.800,-**	**7.050.000,-**	**255.233.800,-**	**2,69**
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	17.195.000,-	-	17.195.000,-	-
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	32.450.000,-	7.050.000,-	25.400.000,-	21,73
	Job Fair/Bursa Kerja	212.638.800,-	-	212.638.800,-	-
11	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah**	**35.000.000,-**	**760.000,-**	**34.240.000,-**	**2,17**

	PROGRAM	ANGGARAN			%
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	
	Kabupaten/Kota				
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	35.000.000,-	760.000,-	34.240.000,-	2,17
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**1.264.665.650,-**	**423.189.135,-**	**841.476.515,-**	**33,46**
12	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**1.155.625.750,-**	**406.999.135,-**	**748.626.615,-**	**35,22**
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	25.000.000,-	-	25.000.000,-	-
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	1.130.625.750,-	406.999.135,-	723.626.615,-	36,00
13	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**109.039.900,-**	**16.190.000,-**	**92.849.900,-**	**14,85**
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	84.039.900,-	12.815.000,-	71.224.900,-	15,25

	PROGRAM	ANGGARAN			%
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,-	3.375.000,-	21.625.000,-	13,50
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**320.091.600,00**	**25.211.293,00**	**294.880.307,00**	**7,88**
14	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**320.091.600,00**	**25.211.293,00**	**294.880.307,00**	**7,88**
	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	100.000.000,-	15.501.293,-	84.498.707,-	15,50
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	125.771.500,-	9.710.000.-	116.061.500,-	7,72
	Penyuluhan Transmigrasi	25.000.100,-	-	25.000.100,-	-
	Pelatihan Transmigrasi	34.700.000,-	-	34.700.000,-	-
	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	34.620.000,-	-	34.620.000,-	-
	JUMLAH TOTAL	**6.290.958.350,-**	**2.138.618.119,-**	**4.152.340.231,-**	**34,00**
A.	**BELANJA OPERASIONAL**	**2.403.539.500,-**	**325.577.546,-**	**2.077.961.954,-**	**13,55**
B.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**3.757.747.350,-**	**1.813.040.573,-**	**1.944.706.777,-**	**48,24**
C.	**BELANJA MODAL**	**129.671.500,00**	**-**	**129.671.500,00**	-
D.	**BELANJA TAK TERDUGA**	**-**	**-**	**-**	**-**

	PROGRAM	ANGGARAN			%
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	
E.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	JUMLAH TOTAL	6.290.958.350,00	2.138.618.119,00	4.152.340.231,00	34,00

Total anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 sebesar Rp. **6.290.958.350,00,-** Dari total anggaran yang ada, telah terealisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar Rp. **2.138.618.119,00,-** atau sebesar 34 %. Program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 5 Program, 14 Kegiatan, dan 39 Sub Kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut ini adalah kajian terhadap capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel.2.2.1 Pencapaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan Tabel T-C.30

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (tnn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (tnn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	-	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	43%	-	-	-	87,89%	-	-	-	
2	Persentase Pekerja Memiliki Jaminan Ketenagakerjaan	-	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	48%	-	-	-	27,95%	-	-	-	
3	Persentase Pencari Kerja yang belum mendapatkan Pelatihan Keterampilan/ Kompetensi	-	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	12%	-	-	-	14,94%	-	-	-	
4	Persentase Penyelesaian Perselisihan	-	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata	100%	-	-	-	70,59%	-	-	-	

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (tnn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (tnn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Hubungan Industrial yang terselesaikan		kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).									
5	Jumlah KK Transmigran yang diberangkatkan	-		2 KK	-	-	-	2 KK	-	-	-	
6	Persentase peningkatan pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan pada pasar kerja	-		-	3%	3%	3%	-	3%	3%	3%	Pada tahun 2025 IKU Disnakertrans berubah, dikarenakan Sasaran kabupaten bersifat ultimate outcome yang belum dapat dijawab dengan program yang diampu oleh disnakertrans dan memerlukan crosscutting lintas sektorat dengan

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (tnn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (tnn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
												perangkat daerah terkait. Atas pertimbangan tersebut, disnakertrans telah merumuskan sasaran strategis perangkat daerah dengan mempertimbangkan *immediate outcome* / dampak langsung dari pelaksanaan program dan kegiatan yang diampu oleh disnakertrans.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang tenaga kerja, transmigrasi dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
4. pelayanan administratif; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Analisa Isu Strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Isu strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan dirumuskan dengan memetakan faktor-faktor internal maupun eksternal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemetaan faktor internal dilihat berdasarkan kekuatan dan kelemahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan pemetaan faktor eksternal dilihat berdasarkan peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan.

2.3.1 Analisis Lingkungan Internal Disnakertrans

Kekuatan :

1. Adanya peraturan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagai dasar pelaksanaan program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
2. Tersedianya Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi,serta tata kerja perangkat daerah, yang

memberikan kewenangan otonomi daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
3. Tersedianya dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021-2026;
4. Tersedianya Dukungan Anggaran dari dana APBD;
5. Adanya komunikasi dan interaksi yang baik antara atasan dan bawahan secara sinergi;
6. Tersedianya data yang menunjang kegiatan.

Kelemahan :

1. Minimnya sarana dan prasarana;
2. Terbatasnya SDM dalam hal memfasilitasi pelatihan (instruktur);
3. Belum mempunyai BLK (Balai Latihan Kerja);
4. Masih adanya kesenjangan antara penguasaan ilmu pengetahuan dengan teknologi yang berkembang;
5. Belum optimalnya dukungan dana dengan sarana dan prasarana yang memadai;
6. Masih kurangnya tenaga teknis dan fungsional.

2.3.2 Analisis Lingkungan Eksternal

Peluang :

1. Partisipasi Masyarakat yang tinggi
2. Adanya potensi masyarakat untuk berwirausaha
3. Makin dinamisnya perkembangan pelayanan publik (antar kerja) oleh swasta;
4. Kebijakan pusat dan daerah saling mendukung dan menunjang;
5. Forum-forum koordinasi, Workshop dan mediasi yang menjembatani dengan baik antara Disnakertrans Lampung Selatan dengan pelaku, masyarakat, pekerja dan serikat buruh;
6. Makin terbukanya peluang kerjasama dengan daerah lain (adanya perubahan paradigma dalam sistem penyelenggaraan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian);
7. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan kebutuhan pelayanan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Ancaman :

1. Terbatasnya lapangan pekerjaan
2. Tingginya angka pengangguran;
3. Kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas;
4. Masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
5. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja;
6. Kurangnya koordinasi antar lembaga;

7. Masih adanya kasus Pekerja Migran Indonesia yang berangkat tidak sesuai prosedur;
8. Makin kritisnya masyarakat dan tingginya tuntutan terhadap pelayanan.

Berdasarkan pemetaan tersebut di atas maka **isu strategis** pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan mempunyai tantangan yang berat dimasa yang akan datang. Sebagai salah satu institusi yang diharapkan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi secara optimal. Permasalahan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peningkatan partisipasi angkatan kerja;
2. Rendahnya penempatan tenaga kerja;
3. Rendahnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
4. Adanya perselisihan antara pekerja dan perusahaan;
5. Rendahnya tingkat kompetensi tenaga kerja;
6. Terbatasnya jumlah kepala keluarga (KK) yang diberangkatkan bertransmigrasi.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dibutuhkan **strategi kebijakan** yang harus dilaksanakan dengan menerapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
2. Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial
4. Memfasilitasi perpindahan dan penempatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan, diantaranya adalah :

1. Belum tersedianya gedung BLK;
2. Terbatasnya mediator;
3. Masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan angka kecelakaan kerja;
4. Banyaknya kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri yang tidak bisa di isi oleh tenaga kerja Indonesia akibat ketidak sesuaian kompetensi;
5. Masih rendahnya kesempatan dan perluasan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja;
6. Pendidikan dan produktivitas tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
7. Permasalahan ketransmirasian diantaranya terbatasnya kuota pengiriman transmigrasi yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Lampung kepada Kabupaten Lampung selatan, dan baru pada Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat melaksanakan kegiatan dengan mengirim Transmigran sebanyak 2 Kepala Keluarga (KK) ke Kabupaten Mamuju Tengah Propinsi Sulawesi Barat.

Dari kondisi yang digambarkan sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan fokus pada Isu Prioritas Tahun 2025 yaitu:

1. Mengurangi tingkat pengangguran;
2. Peningkatan kualitas SDM untuk sektor formal dan informal melalui pelatihan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja;
3. Perluasan kesempatan kerja;
4. Hubungan Industrial yang harmonis;
5. Meningkatkan kualitas hidup Transmigran didaerah tujuan transmigrasi;
6. Memfasilitasi pengembangan kawasan eks-transmig

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan kedepan. Ada 5 Prioritas Nasional, yaitu:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Infrasutruktur dan Pemerataan Wilayah;
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja;
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup;
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Tema Pembangunan Nasional tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" dengan 7 (tujuh) arah kebijakan, yaitu :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan.
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha.
5. Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.
6. Ekonomi Hijau
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi Misi Kabupaten Lampung Selatan, perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 Tahun ke depan serta penetapan sasaran yang merupakan hasil yang diharapkan dari satu tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari satu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi.

Visi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan merupakan cerminan dari kondisi masa depan Kabupaten Lampung Selatan yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa (lima) tahun. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah maka Visi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan mencerminkan kondisi Kabupaten Lampung Selatan yang ingin dicapai dalam masa jabatan Kepala Daerah selama (lima) tahun. Visi kepala daerah Kabupaten Lampung Selatan terpilih untuk masa jabatan tahun 2025-2029 adalah:

"Mewujudkan Lampung Selatan Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Lebih lanjut penjabaran visi di atas dijabarkan kedalam tujuh misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dengan kata lain sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik dan atau rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan visi, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah, yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi disusun dengan terlebih dahulu mengindentifikasi isu-isu strategis, faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal, berupa variabel kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah, termasuk didalamnya melakukan evaluasi interaksi antar dan antara berbagai faktor tersebut, untuk kemudian menetapkan Misi daerah.

Adapun Misi yang ditetapkan guna mewujudkan Visi yang telah disusun adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab berdasarkan falsafah pancasila

Misi 2 : Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan aman dan damai

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance

Misi 4 : Memajukan dan memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkelanjutan

Misi 5 : Mewujudkan pemerataan pembangunan dengan berkeadilan dan berkelanjutan

Misi 6 : Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju

Misi 7 : Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan berperan aktif dalam pergaulan daerah dan nasional

Misi-misi tersebut adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah, meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang baik, Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Sebagaimana Tupoksi yang dimiliki, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan berperan dalam mendukung Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya dalam mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan yang maju dan sejahtera. Maju disini dapat diartikan dengan peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat yang dapat terwujud dan didukung oleh peningkatan minat investasi dan berusaha, Sedangkan Sejahtera disini dapat diartikan bahwa masyarakat yang terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, kemampuan pendayagunaan segenap sumberdaya alam, ketersediaan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, yang dimanfaatkan dan dikelola secara bijaksana. Untuk itu masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi agar dapat meningkatkan petumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan. Dalam mendukung pencapaian visi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan berperan dalam pelaksanaan **"Misi Ketiga dan Kelima"**.

1. Tujuan

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut diatas tentunya dibutuhkan strategi kebijakan yang harus dilaksanakan dengan menerapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja
b. Meningkatkan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
c. Meningkatkan Pembinaan. Hubwigan Industrial dan syarat-syarat Kerja.
d. Meningkatkan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga kerja.
e. Memfasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi.
f. Meningkatkan kualitas pelayanan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

2. Sasaran

Sasaran Perangkat Daerah merupakan tujuan-tujuan spesifik dan terukur yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun, seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) PD. Sasaran ini merupakan turunan langsung dari tujuan yang lebih tinggi dan umum (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025), yang berfungsi sebagai indikator kunci keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Strategi merupakan serangkaian upaya yang didasarkan pada potensi sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan pembangunan guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Secara konseptual, satu strategi dapat dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Sementara itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan strategi agar lebih lebih sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkelanjutan dalamkurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra.

Adapun Startegi dan Arah Kebijakan yang hendak dicapai Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

Visi: Mewujudkan Lampung Selatan Maju Menuju Indonesia Emas 2045		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 3 : mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance		
Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip Good Governance	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital	meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Misi 5 : Mewujudkan pemerataan pembangunan dengan berkeadilan dan berkelanjutan		
Meningkatnya kesempatan dan produktivitas kerja	Meningkatnya pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	Peningkatan kapasitas dan fasilitasi penempatan bagi calon tenaga kerja

3. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabuputan Lampung Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1) **Peningkatan Kualitas dan Relevansi Pelatihan Kerja:**
   a. Fokus pada pelatihan berbasis kebutuhan industri (*demand-driven training*), dengan melibatkan dunia usaha dalam penyusunan kurikulum.
   b. Pengembangan *green skills* untuk mendukung ekonomi hijau.
   c. Peningkatan kualitas instruktur dan fasilitas pelatihan di BLK.
   d. Inovasi model pelatihan, termasuk pelatihan berbasis kompetensi dan pemanfaatan platform digital.
   e. Pelatihan kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja mandiri.
2) **Peningkatan Efektivitas Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja:**
   a. Optimalisasi sistem informasi pasar kerja (*job portal*).
   b. Peningkatan layanan bimbingan karir dan konseling.
   c. Fasilitasi penempatan tenaga kerja antar daerah dan luar negeri (PMI) dengan perlindungan yang memadai.
   d. Mendorong kemitraan dengan sektor swasta dalam rekrutmen.
   e. Penguatan pengawasan terhadap proses penempatan tenaga kerja.
3) **Pengembangan Program Transmigrasi yang Berkelanjutan:**
   a. Memastikan program transmigrasi selaras dengan RPJMD dan memperhatikan daya dukung lingkungan.
   b. Meminimalkan potensi konflik lahan dan sosial.
   c. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan aksesibilitas di wilayah transmigrasi.
   d. Meningkatkan produktivitas ekonomi dan kemandirian transmigran.
4) **Penciptaan Hubungan Industrial yang Harmonis:**
   a. Meningkatkan pemahaman pekerja dan pengusaha tentang hak dan kewajiban.
   b. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
   c. Memperkuat peran serikat pekerja/serikat buruh.
   d. Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan.
5) **Pengarusutamaan Isu Lingkungan:**
   a. Mengintegrasikan pertimbangan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

b. Mendorong penciptaan *green jobs* dan pengembangan *green skills*.
c. Memastikan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) memperhatikan risiko lingkungan.

6) Peningkatan Koordinasi dan Kemitraan:

a. Memperkuat koordinasi dengan dinas terkait lainnya (misalnya, Dinas Perindustrian, Dinas Pendidikan, Dinas Perizinan).
b. Membangun kemitraan yang kuat dengan dunia usaha, lembaga pelatihan, serikat pekerja, dan organisasi masyarakat sipil.

Arah kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan angkatan kerja yang terampil, kompetitif, dan adaptif terhadap perubahan pasar kerja, serta memastikan perlindungan hak-hak pekerja dan terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	FORMULASI	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas kerja	Meningkatnya pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	Tingkat Produktivitas Tenaga kerja	1,72%	Produktivitas tenaga kerja Tahun n dikurang Produktivitas tenaga kerja n-1 dibagi Produktivitas tenaga kerja n-1dikali 100%	Produktivitas Tenaga Kerja = PDRB dibagi Jumlah tenaga kerja (Data dapat diperoleh dari BPS)
			Persentase peningkatan pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan pada pasar kerja	13%	Jumlah Pencari Kerja terdaftar yang mendapatkan pekerjaan dibagi Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar dikali 100%, dikurangi persentase n-1	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,60%	Jumlah penduduk Angkatan Kerja dibagi Jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) dikali 100%	Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Aspek Daya Saing Daerah
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	27,59%	Jumlah Pekerja Peserta BPJS di bagi Jumlah Pekerja/Buruh di kali 100%	Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

3.3. Program dan Kegiatan

Tabel T-C.33. di bawah ini berisi daftar program dan kegiatan, yaitu Program Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang urusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

Program Pembangunan Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan adalah Program Strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2025.

Dasar pertimbangan penetapan program dan kegiatan prioritas ini adalah:

1. Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
2. Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
3. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja, Pengolahan data dan informasi ;ketenagakerjaan;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Jumlah Program dan Kegiatan Strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2025 berjumlah: 5 Program, 15 Kegiatan, dan 40 Sub Kegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis ini adalah sebelum perubahan sebesar Rp6.290.958.350 dan pada sesudah perubahan menjadi 5.771.889.350. Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel T-C.33. di bawah.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 (Perubahan) dan Parkiran Maju Tahun 2027
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				5,525,758,350	6,290,958,350	5,771,889,350				5,978,140,000	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5,192,959,750	5,970,866,750	5,599,437,650				5,613,140,000	
	2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				5,192,959,750	5,970,866,750	5,599,437,650				5,613,140,000	
1	2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan	-	80.50 Poin	3,214,367,850	3,354,102,850	3,175,170,950				3,738,140,000	
	2 07 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	11 Dokumen	29,620,300	120,554,100	120,554,100				25,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4 Dokumen	7,080,300	98,014,100	49,489,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		5,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6,564,900	6,564,900	3,282,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		4,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
	2	07	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4,755,400	4,755,400	2,378,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		4,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,452,000	2,452,000	1,227,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		3,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,175,000	2,175,000	1,088,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		3,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	6,592,700	6,592,700	3,297,700	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		5,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	-	43 Dokumen	2,782,412,000	2,768,650,650	2,768,650,650				3,211,140,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25/12 Orang /bulan	25/12 Orang/ bulan	2,458,342,000	2,403,539,500	2,403,539,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)		2,858,140,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	316,320,000	357,120,000	356,140,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		345,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3,250,000	5,045,000	3,305,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		3,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	18 Laporan	18 Laporan	4,500,000	2,946,150	691,150	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		4,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
							Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD										
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)	-	100 %	239,570,550	274,490,600	274,490,600				321,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		5,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	91,473,950	126,394,000	69,550,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		150,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	9,948,600	9,948,600	9,948,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		18,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	6 Paket	20,000,000	20,000,000	10,251,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		20,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
																	TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	6 Paket	18,500,000	18,500,000	9,244,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		18,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	12 Dokumen	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		18,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6 Laporan	9,300,000	9,300,000	4,650,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		20,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	26 Laporan	67,348,000	67,348,000	33,680,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		72,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	-	1 Unit	9,435,000	3,277,500	3,277,500				25,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	1. Unit	9,435,000	3,277,500	3,277,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		25,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	-	12 Laporan	74,400,000	109,200,000	109,200,000				75,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	74,400,000	109,200,000	109,200,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		75,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	-	14 Unit	78,930,000	77,930,000	77,930,000				80,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Unit	1 Unit	44,930,000	46,930,000	46,930,000	Kab. Lampung Selatan,	Dana Alokasi		45,000,000	DINAS TENAGA KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
							yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						Kalianda, Way Urang	Umum (DAU)			DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	12 Unit	9,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		10,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		25,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-	51,30 %	623,320,350	926,324,450	926,324,450				700,000,000	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang menjalani pelatihan kerja berbasis kompetensi	-	60 %	573,320,350	876,324,450	876,324,450				650,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi											
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 Orang	139 Orang	573,320,350	876,324,450	876,324,450	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan		650,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
														Penggunaannya Bidang Pendidikan			
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang memiliki perizinan	-	50%	50,000,000	50,000,000	50,000,000				50,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta											
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga	30 Lembaga	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		50,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	-	88,11%	287,998,800	425,773,800	315,758,600				345,000,000	
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	-	4320 orang	53,490,000	128,490,000	128,490,000				55,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	2.	00	Pelayanan antar Kerja											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
				01	02												
							Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	50 Orang	20 Orang	28,490,000	58,490,000	29,727,750	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)		30,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan											
							Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	50 Orang	50 Orang	25,000,000	70,000,000	36,638,250	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)		25,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah orang yang mendapatkan layanan informasi pasar kerja	-	4506 orang	199,508,800	262,283,800	262,283,800				210,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online											
							Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Dokumen	12 Dokumen	17,195,000	17,195,000	16,598,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)		25,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
							Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	100 Orang	4319 Orang	32,450,000	32,450,000	24,686,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)		35,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja											
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	187 Orang	149,863,800	212,638,800	190,607,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)		150,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia	-	1590 orang	35,000,000	35,000,000	35,000,000				80,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)											
							Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	50 Orang	0 Orang	-	-	-	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)		45,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
							Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	40 Orang	40 Orang	35,000,000	35,000,000	17,501,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)		35,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	-	99.561 orang	1,067,272,750	1,264,665,650	1,182,183,650				830,000,000	
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	-	18%	1,002,272,750	1,155,625,750	1,155,625,750				725,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan											
							Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	50 Perusahaan Perusahaan	30 Perusahaan	25,000,000	25,000,000	12,500,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		50,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan											
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	12 Laporan	977,272,750	1,130,625,750	1,115,030,750	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Sawit		675,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	-	80 %	65,000,000	109,039,900	109,039,900				105,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Perselisihan yang Dicegah	30 Perkara	30 Perkara	40,000,000	84,039,900	42,151,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)		65,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	30 Perkara	30 Perkara	25,000,000	25,000,000	12,501,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)		25,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi											
							Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	-	-	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		15,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				332,798,600	320,091,600	172,451,700				365,000,000	
	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				332,798,600	320,091,600	172,451,700				365,000,000	
5	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang diberangkat sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh menteri	-	100 %	332,798,600	320,091,600	172,451,700				365,000,000	
	3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	-	Satuan Pemukiman	332,798,600	320,091,600	320,091,600				365,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	03	2.01	0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi											
							Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	80 Kepala Keluarga	40 Kepala Keluarga	100,000,300	100,000,000	49,402,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		120,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	03	2.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	10 Kepala Keluarga	5 Kepala Keluarga	147,538,000	125,771,500	85,232,650	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		150,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	03	2.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
							Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	25 Kepala Keluarga	30 Kepala Keluarga	25,000,300	25,000,100	12,201,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		30,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	03	2.01	0006	Pelatihan Transmigrasi											
							Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	25 Orang	10 Orang	25,640,000	34,700,000	20,815,950	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		30,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi											
							Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi	1 Lokasi	34,620,000	34,620,000	4,800,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		35,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	JUMLAH									**5,525,758,350**	**6,290,958,350**	**5,771,889,350**				**5,978,140,000**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 definisi dari program adalah Program adalah instrumen penjabaran kebijakan Kementerian dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian.

Dengan pengertian tersebut dan setelah menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah maka untuk mendukung hal tersebut di atas maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan menetapkan 5 Program, 15 Kegiatan, dan 40 Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 dengan nilai total anggaran sebelum perubahan sebesar Rp6.290.958.350,- dan setelah perubahan menjadi 5.771.889.350,-.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	17	19
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				5,525,758,350	6,290,958,350	5,771,889,350				5,978,140,000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5,192,959,750	5,970,866,750	5,599,437,650				5,613,140,000
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				5,192,959,750	5,970,866,750	5,599,437,650				5,613,140,000
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan	-	80.50 Poin	3,214,367,850	3,354,102,850	3,175,170,950				3,738,140,000
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	11 Dokumen	29,620,300	120,554,100	120,554,100			Aparatur Disnakertrans Lampung Selatan	25,500,000
2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4 Dokumen	7,080,300	98,014,100	49,489,100	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		5,000,000
2	07	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6,564,900	6,564,900	3,282,900	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		4,500,000
2	07	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4,755,400	4,755,400	2,378,400	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		4,500,000
2	07	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,452,000	2,452,000	1,227,000	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		3,000,000
2	07	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,175,000	2,175,000	1,088,000	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		3,500,000
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	6,592,700	6,592,700	3,297,700	Kab Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		5,000,000
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	-	43 Dokumen	2,782,412,000	2,768,650,650	2,768,650,650			Aparatur Disnakertrans Lampung Selatan	3,211,140,000
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25/12 Orang/bulan	25/12 Orang/bulan	2,458,342,000	2,403,539,500	2,403,539,500	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)		2,858,140,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
2	07	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	316,320,000	357,120,000	356,140,000	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		345,000,000
2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3,250,000	5,045,000	3,305,100	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		3,500,000
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	4,500,000	2,946,150	691,150	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		4,500,000
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)	-	100 %	239,570,550	274,490,600	274,490,600			Aparatur Disnakertrans Lampung Selatan	321,500,000
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		5,000,000
2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	91,473,950	126,394,000	69,550,900	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		150,000,000
2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	9,948,600	9,948,600	9,948,600	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		18,000,000
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	6 Paket	20,000,000	20,000,000	10,251,000	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		20,000,000
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	6 Paket	18,500,000	18,500,000	9,244,100	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		18,500,000
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	12 Dokumen	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		18,000,000
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6 Laporan	9,300,000	9,300,000	4,650,000	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		20,000,000
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	26 Laporan	67,348,000	67,348,000	33,680,000	Kab Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		72,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	-	1 Unit	9,435,000	3,277,500	3,277,500			Aparatur Disnakertrans Lampung Selatan	25,000,000
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	1. Unit	9,435,000	3,277,500	3,277,500	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		25,000,000
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	-	12 Laporan	74,400,000	109,200,000	109,200,000			Aparatur Disnakertrans Lampung Selatan	75,000,000
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	74,400,000	109,200,000	109,200,000	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		75,000,000
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	-	14 Unit	78,930,000	77,930,000	77,930,000			Aparatur Disnakertrans Lampung Selatan	80,000,000
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	1 Unit	44,930,000	46,930,000	46,930,000	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		45,000,000
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	12 Unit	9,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		10,000,000
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		25,000,000
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-	51,30 %	623,320,350	926,324,450	926,324,450				700,000,000
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang menjalani pelatihan kerja berbasis kompetensi	-	60 %	573,320,350	876,324,450	876,324,450			Pencari Kerja/Masyarakat	650,000,000
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi										
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 Orang	139 Orang	573,320,350	876,324,450	876,324,450	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan		650,000,000
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang memiliki perizinan	-	50%	50,000,000	50,000,000	50,000,000			Lembaga Pelatihan Kerja	50,000,000
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga	30 Lembaga	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		50,000,000
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	-	88,11%	287,998,800	425,773,800	315,758,600				345,000,000
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	-	4319 Orang	53,490,000	128,490,000	128,490,000			Pencari kerja / masyarakat	55,000,000
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja										
						Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	50 Orang	20 Orang	28,490,000	58,490,000	29,727,750	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)		30,000,000
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan										
						Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	50 Orang	50 Orang	25,000,000	70,000,000	36,638,250	Kab Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)		25,000,000
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah orang yang mendapatkan layanan informasi pasar kerja	-	4506 Orang	199,508,800	262,283,800	262,283,800			Pencari Kerja, Masyarakat dan Perusahaan/Instansi	210,000,000
2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online										
						Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Dokumen	12 Dokumen	17,195,000	17,195,000	16,598,000	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)		25,000,000
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
						Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	100 Orang	4319 Orang	32,450,000	32,450,000	24,686,000	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)		35,000,000
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja										
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	187 Orang	149,863,800	212,638,800	190,607,600	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)		150,000,000
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia	-	1590 Orang	35,000,000	35,000,000	35,000,000			Pencari kerja / masyarakat	80,000,000
2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)										
						Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	50 Orang	0 Orang	-	-	-	Kab Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)		45,000,000
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan										
						Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	40 Orang	40 Orang	35,000,000	35,000,000	17,501,000	Kab Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)		35,000,000
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	-	99.561 Orang	1,067,272,750	1,264,665,650	1,182,183,650				830,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	-	18 %	1,002,272,750	1,155,625,750	1,155,625,750			Tenaga Kerja dan Perusahaan	725,000,000
2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan										
						Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	50 Perusahaan Perusahaan	30 Perusahaan	25,000,000	25,000,000	12,500,000	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		50,000,000
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan										
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	12 Laporan	977,272,750	1,130,625,750	1,115,030,750	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Sawit		675,000,000
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	-	80 %	65,000,000	109,039,900	109,039,900			Buruh/Serikat Pekerja/Pengusaha	105,000,000
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
						Jumlah Perselisihan yang Dicegah	30 Perkara	30 Perkara	40,000,000	84,039,900	42,151,900	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)		65,000,000
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
						Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	30 Perkara	30 Perkara	25,000,000	25,000,000	12,501,000	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)		25,000,000
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi										
						Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	-	-	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		15,000,000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				332,798,600	320,091,600	172,451,700				365,000,000
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				332,798,600	320,091,600	172,451,700				365,000,000
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang diberangkat sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh menteri	-	100 %	332,798,600	320,091,600	172,451,700				365,000,000
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	-	1 Satuan Pemukiman	332,798,600	320,091,600	320,091,600			Pemerintah dan Masyarakat	365,000,000
3	32	03	2.01	0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
						Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	80 Kepala Keluarga	40 Kepala Keluarga	100,000,300	100,000,000	49,402,000	Kab Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		120,000,000
3	32	03	2.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
						Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	10 Kepala Keluarga	5 Kepala Keluarga	147,538,000	125,771,500	85,232,650	Kab Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		150,000,000
3	32	03	2.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi										
						Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	25 Kepala Keluarga	30 Kepala Keluarga	25,000,300	25,000,100	12,201,100	Kab Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)		30,000,000
3	32	03	2.01	0006	Pelatihan Transmigrasi										
						Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	25 Orang	10 Orang	25,640,000	34,700,000	20,815,950	Kab Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		30,000,000
3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi										
						Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi	1 Lokasi	34,620,000	34,620,000	4,800,000	Kab Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		35,000,000
								JUMLAH	**5,525,758,350**	**6,290,958,350**	**5,771,889,350**				**5,978,140,000**

BAB V
PENUTUP

Rencana kerja perubahan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berdasarkan rencana kinerja perangkat daerah perubahan (RKPD-P) Kabupaten Lampung Selatan, dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMN, RPJMD, dan RKPD Tahun 2025, dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten, propinsi, dan Nasional.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh pejabat esselon 2, esselon 3, dan esselon 4, serta staf/pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan bersama-sama mempunyai kewajiban sebagai berikut :
   a) Melaksanakan Rencana Kerja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangan.
   b) Menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja, dan DPA.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan.

Kalianda, 18 Juli 2025

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Lampung Selatan

BADRUZZAMAN, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690208 199003 1 006

LAMPIRAN

FORMULASI INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEG	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan**	**Poin**	**Hasil Survey kepuasan pelayanan**	**Survey ke pegawai Disnakertrans**	Triwulan
2	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**Total jumlah dokumen dan laporan pada kegiatan**	**Total Dokumen dari 6 Sub Kegiatan**	Triwulan
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen yang dibuat	Dokumen Renja dan Renja Perubahan	Triwulan
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen yang dibuat	Dokumen RKA	Triwulan
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen yang dibuat	Dokumen RKA Perubahan	Triwulan
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen yang dibuat	Dokumen DPA	Triwulan
7	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Dokumen	Jumlah dokumen yang dibuat	Dokumen DPA Perubahan	Triwulan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEG	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN
	Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah laporan yang dibuat	Dokumen LKjIP, LKPJ, LPPD, dan Evaluasi Renja	Triwulan
9	**Administrasi Keuangan**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**Total Jumlah C dan laporan pada kegiatan (untuk sub kegiatan gaji dihitung 1 dok perbulan)**	**Total Dokumen dari 4 Sub Kegiatan**	Triwulan
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen pembayaran gaji	Triwulan
11	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 dokumen perbulan	Dokumen pembayaran honorarium	Triwulan
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan	Jumlah dokumen yang dibuat	Dokumen laporan keuangan akhir tahun	Triwulan
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah laporan yang dibuat	Dokumen laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/semester	Triwulan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEG	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN
14	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**%**	**Penjumlahan Persentase Penyelenggaraan Administrasi umum, dibagi jumlah sub kegiatan (Persentase rata-rata)**	**Persentase rata-rata jumlah dokumen**	Triwulan
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 paket = belanja perbulan	Dokumen belanja/SPJ	Triwulan
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang dibeli sesuai jumlah rekening belanja	Dokumen belanja/SPJ	Triwulan
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1 paket = belanja perbulan	Dokumen belanja/SPJ	Triwulan
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1 paket = belanja perbulan	Dokumen belanja/SPJ	Triwulan
19	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 paket = belanja perbulan	Dokumen belanja/SPJ	Triwulan
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1 dokumen perbulan	Dokumen belanja/SPJ	Triwulan
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1 laporan = belanja perbulan	Dokumen belanja/SPJ	Triwulan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEG	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Berdasarkan jumlah laporan perjadin	Dokumen belanja/SPJ	Triwulan
23	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Unit**	**Jumlah unit pada kegiatan**	**Barang Pengadaan**	Triwulan
24	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Jumlah unit pengadaan	Barang Pengadaan	Triwulan
25	**Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**Laporan**	**Jumlah laporan pada kegiatan**	**Jumlah laporan dari 1 subkegiatan**	Triwulan
26	Penyediaan jasa dan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Unit	1 laporan perbulan	Pembayaran tagihan Internet, Telepon, Air dan Listrik	Triwulan
27	**Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**unit**	**Total jumlah unit yang dipelihara**	**Pemeliharaan randis, Mesin dan Gedung**	Triwulan
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit yang dipelihara pertahun	Kendaraan Dinas Kadis/Eselon II	Triwulan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEG	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN
	atau Kendaraan Dinas Jabatan					
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah unit yang dipelihara	Pemeliharaan Laptop, Komputer, Pendingin dan Mebel	Triwulan
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit yang dipelihara pertahun	Pemeliharaan gedung	Triwulan
31	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**	**%**	**Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi Jumlah tenaga kerja keseluruhan dikali 100%**	- **Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi** - **Jumlah tenaga kerja**	Triwulan
32	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Persentase tenaga kerja yang menjalani pelatihan kerja berbasis kompetensi**	**%**	**Jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi dikali 100%**	- **Peserta Pelatihan** - **Pendaftar pelatihan**	Triwulan
33	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	Jumlah Peserta pelatihan	Peserta pelatihan yang diadakan Disnakertrans	Triwulan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEG	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN
	berdasarkan Klaster Kompetensi					
34	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Persentase LPK yang memiliki perizinan**	**%**	**Jumlah LPK yang memiliki perizinan dibagi Jumlah LPK/BLK dikali 100%**	- **Jumlah LPK yang memiliki perizinan** - **Jumlah LPK/BLK**	Triwulan
35	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	Jumlah LPK Swasta yang dibina	LPK Swasta di Kabupaten Lampung Selatan	Triwulan
36	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota**	**%**	**Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi Jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100**	- **Pencari kerja yang ditempatkan/sudah bekerja** - **Pencari kerja yang terdaftar melalui ayo kerja (Kartu Kuning) dan Siap kerja (CPMI)**	**Triwulan**
37	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota**	**Orang**	**Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota**	**Pencari kerja yang terdaftar melalui ayo kerja (Kartu Kuning) dan Siap kerja (CPMI)**	Triwulan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEG	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN
38	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Tenaga kerja yang ditempatkan data dari perusahaan AKAD dan AKL	Triwulan
39	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Orang	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	NJO, Komunitas disabilitas dan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja disabilitas	Triwulan
40	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah orang yang mendapatkan layanan informasi pasar kerja**	**Orang**	**Jumlah orang yang mendapatkan layanan informasi pasar kerja**	**Pencari kerja yang terdaftar melalui ayo kerja (Kartu Kuning), Siap kerja (CPMI), dan Pencari kerja yang mengikuti job fair**	Triwulan
41	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	Jumlah Dokumen SPJ	Pemeliharaan Hosting	Triwulan
42	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	Jumlah Penerbitan Kartu Pencari Kerja	Pencari kerja yang terdaftar melalui ayo kerja (Kartu Kuning) dan Siap kerja (CPMI)	Triwulan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEG	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN
43	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Perusahaan peserta Job Fair	Triwulan
44	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia**	**Orang**	**Jumlah CPMI yang terdaftar**	**Aplikasi Siap Kerja**	**Triwulan**
45	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	Jumlah PMI Purna yang mengikuti kegiatan pemberdayaan	PMI Purna yang mengikuti kegiatan pemberdayaan	Triwulan
46	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial**	**Orang**	**Jumlah Pekerja pada perusahaan yang terdaftar BPJS**	**Dari data kepesertaan BPJSTK Lamsel (Non ASN dan Pekerja rentan tidak dimasukkan)**	Triwulan
47	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang**	**Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)**	**%**	**Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dibagi Jumlah Perusahaan dikali 100%**	- **Perusahaan yang menyusun PP dan PKB** - **Jumlah perusahaan di Lamsel**	Triwulan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEG	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN
	Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
48	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan		Perusahaan yang menyusun PKB	Triwulan
49	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan		Laporan pembayaran BPJS	Triwulan
50	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial**	%	Jumlah perselisihan yang dicegah dan diselesaikan dibagi Jumlah perselisihan yang terjadi dikali 100%	- Jumlah perselisihan yang dimediasi - Jumlah perselisihan yang diadukan oleh tenaga kerja/ perusahaan	Triwulan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEG	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN
51	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Pembinaan ke perusahaan	Triwulan
52	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara Perselisihan yang terselesaikan melalui mediasi	Triwulan
53	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase transmigran yang diberangkat sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh menteri**	**%**	**Jumlah transmigran yang diberangkatkan dibagi jumlah transmigran sesuai kuota menteri dibagi 100%**	• **Transmigran yang diberangkatkan** • **Transmigran kuota Kementerian**	Triwulan
54	**Penataan Persebaran Penduduk yang**	**Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya**	**Satuan Pemukiman**	**Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang**	**Sesuai jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS)**	Triwulan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEG	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGUKURAN
	Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			**difasilitasi pembangunannya**		
55	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	KK	Jumlah Verifikasi tanah dan rumah terhadap ekstransmigrasi	Verifikasi tanah dan rumah terhadap ekstransmigrasi	Triwulan
56	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	KK	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Triwulan
57	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	KK	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Triwulan
58	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Triwulan
59	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi Monitoring	Triwulan

RENCANA KERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT-Tuhan Yang Maha Esa dan ungkapan terima kasih kepada semua anggota tim dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RENJA-P-PD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang juga diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dari RENJA-PD inilah pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD) setiap tahunnya. Rancangan RENJA-PD ini pada dasarnya adalah merupakan rencana tahunan bersifat rinci/spesifik dan operasional yang di susun sebagai penjabaran dari RKPD dan RPJMD bersangkutan. RKPD ini selanjutnya dijadikan pula sebagai dasar utama dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025.

RENJA-P-PD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan ini selain sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sekaligus sebagai bahan informasi atas capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung.

Kalianda, 2025

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

Rika Wati, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19790224 199712 2001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **ii**

DAFTAR ISI **iii**

DAFTAR TABEL **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS DALDUK DAN KB TAHUN LALU **8**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Dalduk dan KB 2025 (s/d. TW 2 dan Capaian Renstra Dinas Dalduk dan KB..... 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Dalduk dan KB 27

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Dalduk dan KB 37

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 39

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 51

BAB III TUJUAN PERANGKAT DAERAH **53**

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 53

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Dalduk dan KB 55

3.3 Program dan Kegiatan 58

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **69**

BAB V PENUTUP **84**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan dan Pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s/d Tahun 2024.....	14
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tw 2) Kabupaten Lampung Selatan.....	29
Tabel 2.3	Contraceptive Prevalance Rate (Cpr)Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.....	30
Tabel 2.4	Pencapaian Pembentukan Kelompok Ketahanan Keluarga dan Remaja Serta Kelompok Kesejahteraan Keluarga Tahun 2024.....	31
Tabel 2.5	Pembentukan Dan Penetapan Kampung Kb Kabupaten Lampung Selatan.....	32
Tabel 2.6	Data Petugas Lini Lapangan.....	33
Tabel 2.7	Pencapaian Peserta KB Aktif tahun 2024.....	34
Tabel 2.8	Pencapaian Peserta KB baru di Kabupaten lampung Selatan tahun 2024.....	35
Tabel 2.9	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan.....	40
Tabel 2.10	Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan.....	51
Tabel 2.11	Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan.....	52
Tabel 3.1	Tujuan dan sasaran Dinas Dalduk dan KB sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten lampung Selatan Tahun 2021-2026.....	56
Tabel 3.2	Tujuan dan sasaran Dinas Dalduk dan KB Kabupaten lampung Selatan Tahun 2021-2026.....	57
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Dalduk dan KB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	59
Tabel 4.1	Rencana Kerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.....	73

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

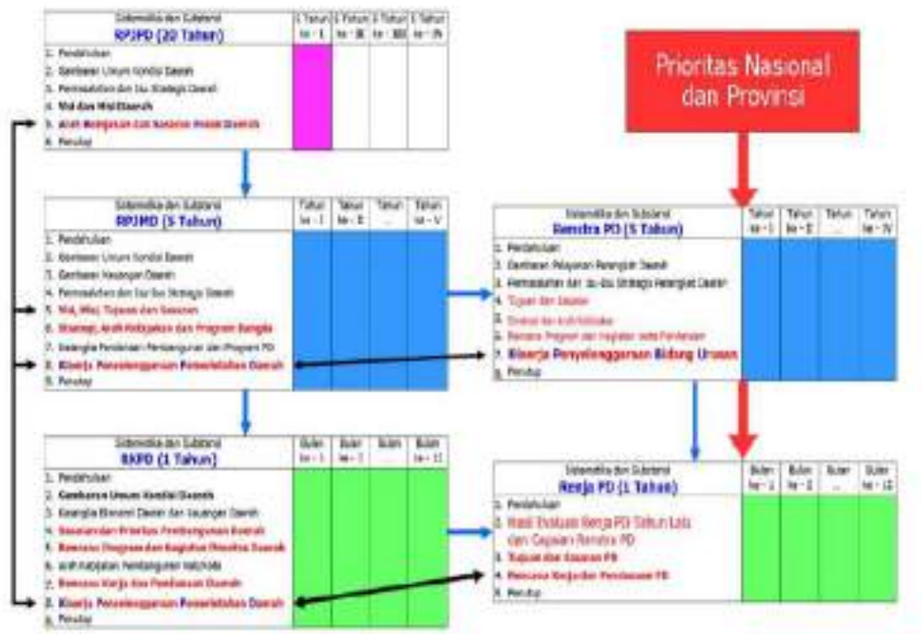
Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, rencana kerja (renja) perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada rencana strategis (renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Dalam rangka penyusunan renja perangkat perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah adalah rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahannya untuk mewujudkan target RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Lihat gambar 1.1.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja

Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Lihat gambar 1.2.

Gambar. 1.1. Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



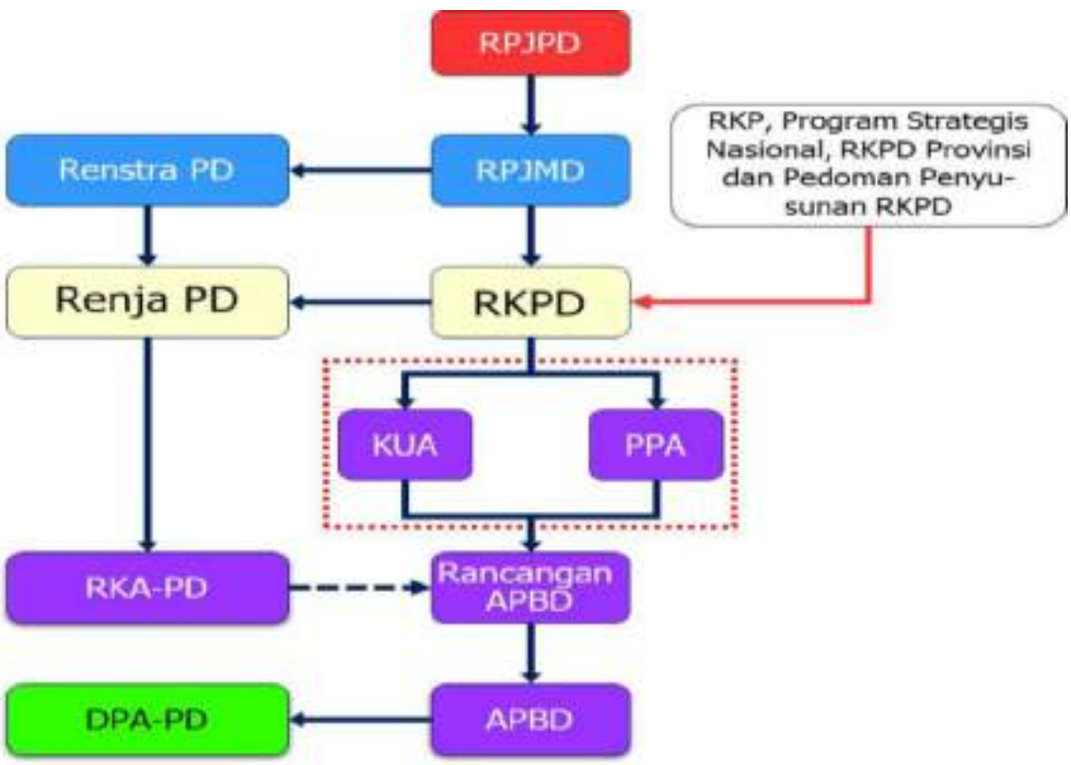
Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja PD,
2. Penyusunan Rancangan Akhir Renja PD berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan,Penyusunan Rancangan Renja PD berdasarkan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Akhir RKPD,
3. Pembahasan Rancangan Renja PD dalam Forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

4. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD,
5. Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah,paling lambat 1(satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1. Sedangkan tindak lanjut dokumen Renja PD hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2.

Gambar 1.2. Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dibah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007:
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04);
6. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pembangunan Jangka Menengah, serta tat cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024:
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ Tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung

Selatan Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3);

14. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 104).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di Tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2. Tujuan

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk memastikan pencapaian target tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dan RPJMD Kabupaten Lampung selatan di Tahun 2025.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas Kinerja di tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan laporan kinerja.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rancangan Rencana Kerja OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan ini disusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (tw 2)
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rentra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TW II (2025)

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Lampung Selatan, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di laksanakan sampai dengan tahun lalu. Pada tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan telah melaksanakan program kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsinya. Adapun realisasi tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2025 melaksanakan 4 program, 13 kegiatan, dan 39 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota

1. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Sub Kegiatan :
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD;

2. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   Sub Kegiatan :
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
   - Koordinsi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD;
   - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
   - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

3. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Sub Kegiatan :
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Sub Kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

5. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Sub Kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan;
   - Pemeliharaan dan Mesin Lainnya;
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pengendalian Penduduk

1. Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas.
   Sub Kegiatan :
   - Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK);
   - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBK;

2. Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daearah Kabupaten/Kota.
   Sub Kegiatan **:**
   - Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Program KKBK di Sektor Lain;
   - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga;
   - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBK.

C. Program Pembinaan Keluarga Berencana

1. Kegiatan : Pelaksanaan advokasi, komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal.
   Sub Kegiatan:
   - Advokasi Program KKBK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja ;
   - Promosi dan KIE Program KKBK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang;
   - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBK;

2. Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).
   Sub Kegiatan :
   - Pembinaan IMP dan Program KKBK di Lini Lapangan oleh PKB/PLK;

- Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
- Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);

3. Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota.
   Sub Kegiatan :
   - Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan;
   - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak;

4. Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
   Sub Kegiatan :
   - Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
   - Pembinaan Terpadu Kampung KB.

D. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

1. Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
   Sub Kegiatan :
   - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS);
   - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKs, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS);

2. Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan.
   Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Operasional Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
- Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan KeluargaKeluarga Bagi Mitra Kerja.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) suatu Perangkat Daerah adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan /program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang sah untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan ini menyajikan dasar Penetapan Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh selama tahun 2024. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impacts). Indikator - indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Jumlah anggaran Dinas Dalduk Dan KB

Tahun 2025 sebesar Rp.17.091.567.870. Jumlah realisasi anggaran Dinas Dalduk dan KB sampai dengan triwulan II tahun 2025. adalah sebesar Rp. 4.393.369,- atau sebesar 25,70%. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD Dinas Dalduk dan KB Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL T-C.29

2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan dan Pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s/d TW II Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Tahun 2026	Realisasi s.d Tahun Lalu (2022 s/d 2024)	Target Kinerja Renja Tahun Berjalan (2025)	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Realisasi TW IV	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025	Keterangan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	Point	85.00	60.00						0.00	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	dok	45	21	14	9	9	0	0	18	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	10	4	4	2	3			5	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dok		3	2	1				1	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dok	5	3	1		1			1	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dok	5	3	1	1				1	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dok	5	3	1					0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	20	5	5	5	5			10	

	Realisasi Kinerja SKPD											
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	dok	210	121	42	10	7	3		20	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bln	46	39	35	3				3	
	Penyediaan Admiistrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dok	60	36	12	1				1	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	5	3	1	1				1	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lap	85	46	17	5	4				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah											
	Penyedian pakaian dinas perangkat Daerah Beserta atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Aibut Kelengkapan	paket			36	36					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan Administrasi umum perangkat daerah (%)**	%	100.00	79.17	100.00	23.06	25.83	0.00		48.89	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	40	6	4					0	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	60	6	2	1				1	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60	9	4	1	3			4	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	60	6	3	1				1	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan PerUndang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dok	60	36	10	3	3			6	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	375	36	12		6			6	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	Lap	60	30	12	3	3	0	0	6	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	60	30	12	3	3			6	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	unit	241	292	162	0	0	0	0	0	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	170	267	151					0	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	70	24	10					0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunannya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	1					0	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Persentase Peserta Keluarga Berencana Aktif**	%	100.00	70.89						0.00	jumlah peserta KB Aktif dibagi Pasangan Usia Subur (PUS) dikalikan 100%
		Jumlah peserta KB aktif (PA)										
		Jumlah pasangan usia subur (PUS)										
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	**Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga**	Dok	5	21						0	
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Lap	5	21	1		1			1	
	Pemanduan dan Sinkronisasi Pemerintah Daerah Prov dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita) (AKL)**	%	65	2.21						0	Tambah formulasi
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))	Dok	0	2	1		1			1	

	Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)											
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Lap	65	14	5	1	1			2	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Cakupan PKB/PLKB yang di dayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk**	%	100.00	18.00						0.00	
		Jumlah organisasi atau kelompok yang dibina										
		Jumlah seluruh kelompok										
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Jumlah Kelompok Kerja KKBPK (Pokja Advokasi Program KKBPK) Tk. Provinsi dan Kab/Kota yang efektif (KKBPK)**	Keg	30	?						0	
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	organisasi	125	3	22		22			22	
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dok	5	4	1		1			1	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Lap	25	7	17		8			8	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berkompeten**	Orang	101	?						0	
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	organisasi	1300	1	4					0	
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Lap	10	3						0	

	Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)											
	Fasilitasi pelaksanaan penyuluh, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBK/Lini lapangan	Jumlah Laporan hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Berencana) Untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	laporan			1						
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	orang	1300	2	260		260			260	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Konstrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah kabupaten/ Kota	**Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR) (%)**	Kali	30	7						0	PA/ PERPUSx 100%
	Pembinaan dan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	orang	1800	6	250					0	
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Lap	10	4	1000	400				400	
	Promosi dan Konseling KB Pasca Bersalin	Promosi dan Konseling KB Pasca Bersalin	orang			300						
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta organisasi kemasyarakatan Tingkat daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan kesetaraan ber-KB	**Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan**	ormas	10	2						0	
	Penguatan Peran serta Organisasi	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan	organisasi	125	2	5					0	

	Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pembinaan Kesertaan Ber-KB										
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Lap	145	3	260	70	80			150	
	PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga**	%	100.00	100.00						0.00	
		Jumlah organisasi atau kelompok yang dibina										
		Jumlah seluruh kelompok										
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Fasilitasi Pengelolaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencakup rakerda dan rapat koordinasi**	dok	10	1	2	0	2			2	
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Lap	5	2	1		1			1	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Lap	5	2	1		1			1	
	Pelaksanaan dan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten kota	Jumlah Ormas Tingkat Daerah Kab/Kota yang Mengikuti Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Kelompok)										

Pelaksanaan dan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalm pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL,PPPKS,PIK-R/ PPPKS-PK)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Lap	5	2	1					0	
Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi mitra kerja	Lap	5	2	1					0	

\

Sesuai hasil penilaian kinerja dengan menggunakan tabel 2.2 dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Pada tahun anggaran 2025 realisasi program memenuhi target semua sesuai dengan yang direncanakan, tetapi untuk kegiatan/sub kegiatan ada yang belum mencapai target. Adapun kegiatan/sub kegiatan yang belum mencapai target yang direncanakan sampai dengan triwulan III dan IV adalah sebagai berikut:

B. Kegiatan/sub kegiatan yang mencapai target kinerja yang direncanakan adalah sebagai berikut: (lebih rinci untuk target dapat dilihat di tabel 2.1)

@Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

C. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja kegiatan/sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Hal ini disebabkan sebagian besar RAK Kegiatan Kegiatan dilaksanakan pada TW III dan IV.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2025, Dinas Dalduk dan KB telah melaksanakan 4 program, 13 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan capaian indikator sebagai berikut:

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan

Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jelas disebutkan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai peraturan perundang-undangan terutama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Adapun lingkup pelayanan urusan wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tersebut terdiri dari:

1. Bidang Keluarga Berencana yang mencakup kebijakan teknis dalam Bidang Pelaksanaan keluarga berencana
2. Bidang Pengendalian Penduduk yang mencakup kebijakan teknis dalam bidang pengendalian penduduk
3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga mencakup kebijakan teknis dalam bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
4. Bidang Penyuluhan dan Penggerakkan mencakup kebijakan teknis dalam bidang penyuluhan dan penggerakan dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dianalisis dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan Nomor 900/ 05/IV.09/2021 Tentang Penetapan indikator kinerja utama pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 18 Januari 2021

Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2024 (dapat dilihat Pada Tabel T-C-30)

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024 Kabupaten Lampung Selatan

Tabel T-C.30

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Persentase laju Pertumbuhan Pendufduk											
2			Cakupan Keluarga Berencana Aktif	69,70	71,00	70,25	70,40	70,26	70,44	73.16	70,89	
3			Total Fertility Rate (TFR/angka kelahiran Total	2,24	2,34	2,21	2,20	2,22	2,20	2.33	2,31	
4			Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan Menikah Usia 15-49	69,51	70,00	70,21	70,35	70,20	70,46	73.16	70,64	

A. Pencapaian *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)*

Pemakaian alat kontrasepsi modern oleh Pasangan Usia Subur memberikan pengaruh yang signifikan dalam penurunan rata-rata angka kelahiran. Pencapaian *Contrceptive Prevalence Rate (TFR)* di Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2024 mengalami kenaikan yaitu 2,31 di bandingkan tahun 2023 yaitu 2,33 atau 100,86 %.

B. Kelompok Ketahanan Keluarga

Adapun kelompok-kelompok ketahanan keluarga dan remaja serta kelompok kesejahteraan keluarga yang telah terbentuk di Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2023 sebagai berikut :

C. Kampung KB

Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) adalah Satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kampung KB yang dibentuk dengan kriteria Desa *Stunting* dan desa sangat tertinggal. Adapun Kampung KB yang telah dibentuk dan ditetapkan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016- 2023 adalah sebanyak 66 (enam puluh enam) Kampung KB. Dengan data sebagai berikut :

NAMA DESA KAMPUNG KB BESERTA TAHUN PEMBENTUKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

NO	KECAMATAN		DESA	TAHUN PEMBENTUKAN	KET
1	SIDOMULYO	30	Sidowaluyo	Nomor : 20/18.01.07.2015/SK/2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
		31	Seloretno	Nomor : 476/08/18.01/.07.2011/2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
		32	Sukamarga	Nomor : 07 Tahun 2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
2	WAY SULAN	33	Talang Way Sulan	Nomor : 140/338/VII.16/VIII/2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
		34	Sumber Agung	Nomor : 141/KEP/045/VII.16.04.2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
		35	Purwodadi	Nomor : 141/018.Kep./16.05/2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
		36	Pamulihan	Nomor : 16 TAHUN 2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
3	PENENGAHAN	37	Pasuruan	Nomor : 141/06/VII.06.01/2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
4	BAKAUHENI	38	Bakauheni	Nomor : 141/43/VII.14.04/I/2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
5	KALIANDA		Kecapi	Nomor : 440/SAK.006/18.01.06.2012/I/2023	SK Kepala Desa Tahun 2023

6	SRAGI	39	Sukapura	Nomor : 141/050/VII.10.04/SK/2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
		40	Margasari	Nomor : 141/025.VII.10.08/2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
		41	Sumber Agung	Nomor : 32/VII.10.05/2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
7	RAJABASA	42	Betung	Nomor : 440/34/VI.11.04/I/2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
		43	Hargo Pancuran	Nomor : 440/SK.034/18.01.06.2007/I/2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
		44	Canggung	Nomor : 474/42/SK.POKJA.KB/VII.11.05/X/2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
		45	Rajabasa	Nomor : 39/VII.11.07/VI/2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
		46	Tejang Pulau sebesi	Nomor : 140/267/VII.11.15/X/2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
		47	Kota Guring	Nomor : 440/SAK.056/VII.11.07/IX/2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
		48	Tanjung Gading	Nomor : 20/18.01.07.2015/SK/2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
8	PALAS	49	Palas Pasemah	Nomor : D/151/VII.07.08/2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
		50	Mekar Mulya	Nomor : D/15/VII.07.17/2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
		51	Rejomulyo	Nomor : D/13/VII.07.06/2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
		52	Sukabakti	Nomor : 188/394/VII.07.02/2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
		53	Bumirestu	Nomor : D/7/VII.07.15/2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
		54	Kalirejo	Nomor : D/057/VII.07.19/2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
		55	Bumiasih	Nomor : D/013/VII.07.16/2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
		56	Bandan Hurip	Nomor : 140/37/VII.07.10/SK/2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
		57	Bali Agung	Nomor : D/27/VII.07.12/2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
		58	Sukamulya	Nomor : 006/021 VII.07.03/2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
		59	Pulau Tengah	Nomor : 140/43/VII.07.11/2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
		60	Tanjung Sari	Nomor : KD/026/SK/VII.07.05.03/2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
		61	Pulau Jaya	Nomor : KD/24/1801102021/2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
9	TANJUNGSARI	62	Malangsari	Nomor : 141/011/VII..15.08-2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
		63	Wonodadi	Nomor : 15 Tahun 2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
		64	Mulyosari	Nomor : 141/048/VII.15.2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
			Purwodadi Dalam	Nomor : 21 Tahun 2023	SK Kepala Desa Tahun 2023
		65	Kertosari	Nomor :	SK Kepala Desa Tahun 2023
		66	Bangun Sari	Nomor :	SK Kepala Desa Tahun 2023

D. Petugas Lini Lapangan KB

Dalam pengelolaan dan pelaksanaan Program Bangga Kencana yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan dengan cara mendayagunakan Petugas Lini Lapangan KB di tingkat Kecamatan dalam hal ini Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) PNS maupun Non PNS serta Kader Institusi Masyarakat Pedesaan/IMP (PPKBD/Sub PPKBD) di tingkat desa dan dusun.

Tahun 2024 terdapat 2.126 orang Petugas Lini Lapangan KB pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 2.6
DATA PETUGAS LINI LAPANGAN 2024

NO	KECAMATAN	PETUGAS LINI LAPANGAN				
		PKB	PLKB PNS	PLKB NON PNS	PPKBD	SUB PPKBD
1	Natar	14	0	1	26	203
2	Jati Agung	12	0	5	21	187
3	Tanjung Bintang	8	2	2	16	135
4	Tanjung Sari	4	0	0	8	50
5	Merbau Mataram	5	0	2	15	123
6	Katibung	6	1	0	12	108
7	Way Sulan	4	0	0	8	37
8	Candipuro	7	2	2	14	113
9	Sidomulyo	4	0	0	16	110
10	Way Panji	2	0	0	4	27
11	Kalianda	11	0	0	29	164
12	Rajabasa	4	3	1	17	52
13	Penengahan	4	3	1	22	114
14	Palas	6	0	0	21	133
15	Sragi	2	2	2	10	49
16	Ketapang	6	2	1	16	86
17	Bakauheni	2	1	0	5	41
	JUMLAH	**101**	**16**	**17**	**260**	**1732**

Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Thauan (RKT) 2023, dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Keberhasilan dalam kinerja bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencanna selama tahun 2023 ditandai dengan adanya beberapa penghargaan yang diterima baik tingkat Kabupaten maupun nasional. Adapun penghargaan yang diterima sebagai berikut:

1. Penghargaan terbaik I kategori pencapaian realisasi anggaran dana alokasi khusus bantuan operasional keluarga berencana 2023;
2. Penghargaan terbaik II kategori pengelolaanSIGA terbaik kabupaten/ kota tingkat Provinsi Lampung tahun 2023;
3. Penghargaan terbaik I pendampingan keluarga beresiko stunting
4. Penghargaan terbaik I pencatatan hasil pemantauan pendampingan keluarga beresiko stunting melalui elsimil;
5. Penghargaan terbaik I pelaksanaan mini lokakarya tingkat kecamatan.

Selain mendapatkan penghargaan, dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan inovasi-inovasi sebagai berikut:

1. Sistem Pelayanan Keluarga Berencana Mobile dan Sistematis (Simpel Keren Abis);
2. Genre SPEAK UP;
3. Catinku SIAP;
4. Gerakan Bangga Kencana Melalui Informasi, Komunikasi, dan Edukasi Online (Gerbang si Komodo);

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
6. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB;
7. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
8. Pelaksanaan Pelayanan KB;
9. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
11. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional

2.3. ISU-ISU PENTING

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan selama tahun 2025 tidak terlepas dari isu-isu strategis yaitu:

1. Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk;

2. Bonus Demografi;
3. *Unmet Need* masih tinggi;
4. *Total Fertility Rate (TFR)* masih tinggi;
5. *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)* modern masih rendah
6. *Age Specific Fertility Rate (ASFR)* masih tinggi
7. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Kampung KB;
9. Stunting
10. *Re-Branding* BKKBN

Berdasarkan isu-isu strategis di atas, permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

1. Masih tinggi rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lampung Selatan;
2. Bervariasinya angka pemakaian kontrasepsi;
3. Masih tinggi dan bervariasinya angka *Unmet Need*;
4. Masih tingginya angka kelahiran;
5. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja dan PUS tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
6. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang perlu di lakukan adalah :

1. Meningkatkan*Contraceptive Prevalence Rate (CPR)* cara modern;
2. Menurunkan kebutuhan ber-KB tidak terlayani (*unmet need*);
3. Menurunkan *Total Fertility Rate (TFR);*
4. Meningkatkan usia perkawinan pertama bagi perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun;
5. Meningkatkan pengetahuan remaja dan PUS tentang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
6. Meningkatkan partisipasi keluarga dalam kegiatan pengasuhan dan pembinaan ketahanan keluarga melalui kelompok kegiatan Tribina;
7. Pemantapan dan pengembangan Kampung KB

8. Pencegahan *Stunting* melalui KIE tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan
9. Sosialisasi tentang *Re-Branding (brand tagline)* BKKBN "Berencana itu Keren"

Langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya solusi adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah / instansi terkait, dunia usaha, tokoh masyarakat dan Mitra Kerja.
2. Meningkatkan upaya sosialisasi dengan sasaran yang lebih luas dan mengusulkam sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengelola Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana dan (BANGGA KENCANA).
4. Meningkatkan Advokasi dan KIE terhadap *steakholders* (pemangku kebijakan) dan mitra-mitra kerja dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana dan (BANGGA KENCANA).
5. Meningkatkan pendayagunaan petugas lini lapangan KB (IMP dan PKB/PLKB) dalam pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana dan (BANGGA KENCANA).

2.4. REVIEW TERHADAP RENCANA AWAL RKPD

Dari rancangan awal RKPD Kabupaten Lampung Selatan, hampir semua kegiatan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan perencanaan bidang Pengendalian Penduduk. Proses perencanaan sudah mengikuti proses perencanaan parsitifatif. Adapun hasil analisis kebutuhan bidang Pengendalian Penduduk tahun 2024 disesuaikan dengan Permendagri 90 tahun 2019 adalah:

1. Seluruh program yang ada dalam renja tahun 2025 sesuai dengan program yang ada dalam RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-

2025.

2. Seluruh program dan kegiatan sudah disesuaikan dengan Permendagri 050-5889 tahun 2021, yang ada di Rancangan Renja tahun 2025.

TABEL T-C.31

Tabel 2.9. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000)**	
xx. 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Lampung Selatan**	**Indeks kepuasaan pelayanan**	**80 POIN**	**5,411,588,500.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Lampung Selatan**	**Indeks kepuasaan pelayanan**	**80 POIN**	**5,411,588,500.00**	
01. 02.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lampung Selatan	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	12 Dokumen	70,961,900.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lampung Selatan	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	12 Dokumen	70,961,900.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang memiliki tujuan, sasaran dan indikator yang baik dan terukur	2 Dokumen	13,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang memiliki tujuan, sasaran dan indikator yang baik dan terukur	2 Dokumen	13,000,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Lampung Selatan	Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Lampung Selatan	Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Lampung Selatan	Dokumen RKA-SKPD Perubahan	1 Dokumen	10,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Lampung Selatan	Dokumen RKA-SKPD Perubahan	1 Dokumen	10,000,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Lampung Selatan	Dokumen DPKA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Lampung Selatan	Dokumen DPKA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Lampung Selatan	Dokumen DPKA-SKPD Perubahan	1 Dokumen	10,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Lampung Selatan	Dokumen DPKA-SKPD Perubahan	1 Dokumen	10,000,000.00	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lampung Selatan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	17,961,900.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lampung Selatan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	17,961,900.00	
02. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lampung Selatan	**Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu**		4,742,017,000.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lampung Selatan	**Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu**		4,742,017,000.00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Selatan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	4 Dokumen	4,038,392,000.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Selatan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	4 Dokumen	4,038,392,000.00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lampung Selatan	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	690,425,000.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lampung Selatan	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	690,425,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lampung Selatan	Dokumen Laporan keuangan SKPD	1 Dokumen	6,600,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lampung Selatan	Dokumen Laporan keuangan SKPD	1 Dokumen	6,600,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Lampung Selatan	Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	17 dokumen	6,600,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	Lampung Selatan	Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	17 dokumen	6,600,000.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lampung Selatan			14,400,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lampung Selatan			14,400,000.00	Swasembada gizi
	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut lengkapnya	Lampung Selatan	Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	36 Paket	14,400,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lampung Selatan	Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	36 Paket	14,400,000.00	Swasembada gizi

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lampung Selatan	**Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu**		231,128,600.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lampung Selatan	**Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu**		231,128,600.00	Swasembada gizi
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lampung Selatan	Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	128,810,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lampung Selatan	Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	128,810,000.00	Swasembada gizi
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lampung Selatan	Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	13,000,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lampung Selatan	Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	13,000,000.00	Swasembada gizi
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lampung Selatan	paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	23,289,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lampung Selatan	paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	23,289,000.00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lampung Selatan	paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 paket	8,400,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lampung Selatan	paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 paket	8,400,000.00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lampung Selatan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	10 dokumen	18,177,600.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lampung Selatan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	10 dokumen	18,177,600.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung Selatan	Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsulatasi SKPD	12 laporan	39,452,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung Selatan	Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsulatasi SKPD	12 laporan	39,452,000.00	
	Penyelengaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	10 dokumen	117,551,000.00	Penyelengaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	10 dokumen	117,551,000.00	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lampung Selatan	Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	117,551,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lampung Selatan	Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	117,551,000.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampung Selatan	Pemeliharaan rutin/berkala, pembayaran Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		235,530,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampung Selatan	Pemeliharaan rutin/berkala, pembayaran Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		235,530,000.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, dan Perizinan Kendaran Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Lampung Selatan	Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	200,130,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, dan Perizinan Kendaran Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Lampung Selatan	Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	200,130,000.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lampung Selatan	Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12 Unit	10,400,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lampung Selatan	Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12 Unit	10,400,000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lampung Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	25,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lampung Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	25,000,000.00	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Lampung Selatan**	**Presentase Laju Pertumbuhan Penduduk**		**222,515,000.00**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Lampung Selatan**	**Presentase Laju Pertumbuhan Penduduk**		**222,515,000.00**	**IKU**

	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas	Lampung Selatan	**Fasilitasi Pengelolaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		105,427,000.00	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas	Lampung Selatan	**Fasilitasi Pengelolaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		105,427,000.00	
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Lampung Selatan	Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	88,572,000.00	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Lampung Selatan	Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	88,572,000.00	
	Pelaksaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Lampung Selatan	Laporan Rapat Pengendalian Program KKBPK	1 kegiatan	16,855,000.00	Pelaksaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Lampung Selatan	Laporan Rapat Pengendalian Program KKBPK	1 kegiatan	16,855,000.00	`Penanggulangan kemiskinan
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Selatan	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		117,088,000.00	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Selatan	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		117,088,000.00	IKU
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Lampung Selatan	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaopran program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	117,088,000	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Lampung Selatan	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaopran program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	117,088,000	

	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Lampung Selatan**	**Persentase Peserta KB Aktif (%)**		**10,174,721,800.00**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Lampung Selatan**	**Persentase Peserta KB Aktif (%)**		**10,174,721,800.00**	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Lampung Selatan		kegiatan	9,657,121,000.00	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Lampung Selatan		kegiatan	9,657,121,000.00	
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Lampung Selatan	Organisasi yang mendapatkan advokasi Program bangga Kencana kepada Stakehorders dan Mitra Kerja	22 Organisasi	634,189,000.00	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Lampung Selatan	Organisasi yang mendapatkan advokasi Program bangga Kencana kepada Stakehorders dan Mitra Kerja	22 Organisasi	634,189,000.00	
	Pengelolaan Oprasional dan Sarana di Balai Penyuluh KKBPK	Lampung Selatan	pengelolaan operasional di balai penyuluhan KKBPK	4 laporan	8,983,332,000.00	Pengelolaan Oprasional dan Sarana di Balai Penyuluh KKBPK	Lampung Selatan	pengelolaan operasional di balai penyuluhan KKBPK	4 laporan	8,983,332,000.00	
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik SertaMedia Luar Ruang	Lampung Selatan	KIE tentang Program KKBK melalui MUPEN dan Audio Visual	1 dokumen	39,600,000.00	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik SertaMedia Luar Ruang	Lampung Selatan	KIE tentang Program KKBK melalui MUPEN dan Audio Visual	1 dokumen	39,600,000.00	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Lampung Selatan	**Tenaga Penyuluh PLKB**		118,447,000.00	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Lampung Selatan	**Tenaga Penyuluh PLKB**		118,447,000.00	

	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Lampung Selatan	Lomba IMP PLKB	4 Organisasi	39,017,000.00	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Lampung Selatan	Lomba IMP PLKB	4 Organisasi	39,017,000.00	
	Fasilitasi Pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan Program bangga kencana untuk petugas Keluarga Berencana/Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Lampung Selatan	Pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan	1 laporan	39,160,000.00	Fasilitasi Pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan Program bangga kencana untuk petugas Keluarga Berencana/Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Lampung Selatan	Pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan	1 laporan	39,160,000.00	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Lampung Selatan	lomba IMP (PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD)	260 orang	40,270,000.00	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Lampung Selatan	lomba IMP (PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD)	260 orang	40,270,000.00	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Selatan	**Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah kabupaten/ Kota**		298,010,000.00	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Selatan	**Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah kabupaten/ Kota**		298,010,000.00	
	Promosi dan Konseling KB Pasca persalinan	Lampung Selatan	Promosi dan Konseling KB Pasca persalinan	425 orang	63,810,000.00	Promosi dan Konseling KB Pasca persalinan	Lampung Selatan	Promosi dan Konseling KB Pasca persalinan	425 orang	63,810,000.00	

	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas KesehatanTermas uknjaringanndan jejaringnya	Lampung Selatan	Promosi dan konseling Kesehatan reproduksi, serta Hak-hak Reproduksi da Fasilitas Kesehatan dan Kelompo kegiatan	410 orang	34,200,000.00	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas KesehatanTermas uknjaringanndan jejaringnya	Lampung Selatan	Promosi dan konseling Kesehatan reproduksi, serta Hak-hak Reproduksi da Fasilitas Kesehatan dan Kelompo kegiatan	410 orang	34,200,000.00	
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Lampung Selatan	sosialisasi kesehatan repreduksi PUS MUPAR	1 laporan	200,000,000.00	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Lampung Selatan	sosialisasi kesehatan repreduksi PUS MUPAR	1 laporan	200,000,000.00	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Lampung Selatan	**Pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan kesetaraan ber-KB**		101,143,800.00	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Lampung Selatan	**Pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan kesetaraan ber-KB**		101,143,800.00	
	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Lampung Selatan	lomba KB Bidan Praktek Swasta, Lomba KB Puskesmas Rawat Inap, Lomba KB Perusahaan, Lomba KB Rumah Sakit dalam pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan Lomba KB Kelompok Pria	5 Organisasi	49,771,800.00	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Lampung Selatan	lomba KB Bidan Praktek Swasta, Lomba KB Puskesmas Rawat Inap, Lomba KB Perusahaan, Lomba KB Rumah Sakit dalam pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan Lomba KB Kelompok Pria	5 Organisasi	49,771,800.00	
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Lampung Selatan	kegiatan kampung KB	29 Laporan	51,372,000.00	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Lampung Selatan	kegiatan kampung KB	29 Laporan	51,372,000.00	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Lampung Selatan**	**Cakupan kelompok kegiatan yg melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga**		**765,617,300.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Lampung Selatan**	**Cakupan kelompok kegiatan yg melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga**		**765,617,300.00**	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Lampung Selatan	**Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		228,087,300.00	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Lampung Selatan	**Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		228,087,300.00	
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Lampung Selatan	sosialisasi dan lomba PIK remaja / mahasiswa tahap tumbuh, tegak, tegar	300 Orang	71,344,000.00	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Lampung Selatan	sosialisasi dan lomba PIK remaja / mahasiswa tahap tumbuh, tegak, tegar	300 Orang	71,344,000.00	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Lampung Selatan	Meningkatkan pendapatan UPPKS	1 Laporan	156,743,300.00	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Lampung Selatan	Meningkatkan pendapatan UPPKS	1 Laporan	156,743,300.00	

	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	Lampung Selatan	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tk. Kab/Kota**		537,530,000.00	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	Lampung Selatan	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tk. Kab/Kota**		537,530,000.00	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Lampung Selatan	kegiatan pembinaan kelompok BKB, BKR,UPPKS, PPKS, KB lestari dan keluarga harmonis	22 Organisasi	320,000,000.00	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Lampung Selatan	kegiatan pembinaan kelompok BKB, BKR,UPPKS, PPKS, KB lestari dan keluarga harmonis	22 Organisasi	320,000,000.00	
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Lampung Selatan	kegiatan harganas	1 Laporan	217,530,000.00	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Lampung Selatan	kegiatan harganas	1 Laporan	217,530,000.00	

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan tahun 2020-2024 BKKBN mengikuti visi misi Presiden Republik Indonesia yaitu :

“ **Terwujudnya Indonesia yang maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.**

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 9 misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indaonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan yang hidup dan berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa

   6.Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintahan dalam kerangka Negara kesatuan

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden 2020-2024 Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan pemetaan atas kesesuaian Program dan Kegiatan Prioritas (termasuk Sasaran Strategis, Outcome, dan Output) seluruh K/L terhadap Janji Presiden yang harus diimplementasikan selama periode 5 (lima) tahun kedepan, serta memberikan arahan agar berbagai Program/Kegiatan Prioritas yang disusun oleh K/L sesuai dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024.

Terkait dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), secara umum BKKBN berkontribusi langsung terhadap upaya pencapaian Janji Presiden dalam hal:

1) Pembangunan Keluarga:

BKKBN tetap dalam lingkup Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, mendukung sepenuhnya upaya pencapaian Janji Presiden terkait "Meningkatkan keterlibatan perempuan/ibu dalam menjaga tumbuh kembang anak serta pendidikan karakter dalam keluarga" dan "Revolusi Mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilainilai luhur bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antar warga". Terutama dalam pengembangan kegiatan prioritas dalam penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini, serta pengembangan kegiatan terkait Revolusi Mental dalam sistem sosial untuk penguatan ketahanan keluarga dan masyarakat.

2) Kependudukan:

Pembangunan Kependudukan terkait langsung dengan Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia dan dalam lingkup Janji Presiden untuk "Memantapkan Reformasi Sistem Kependudukan Nasional". Dalam hal ini BKKBN mendukung sepenuhnya Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2020-2024 dalam Memperkuat Pelaksanaan Perlindungan Sosial, terutama dalam upaya "Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan".

3) Keluarga Berencana (KB):

Program Keluarga Berencana (KB) terkait langsung dengan Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia dan dalam lingkup Janji Presiden untuk "Meningkatkan akses perempuan/ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan kesehatan reproduksi, terutama untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). BKKBN mendukung Arah Kebijakan dan Strategi pada Rancangan RPJMN 2020-2024 dalam upaya "Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi".

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Berdasarkan visi dan misi kepala daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum pada RPJMD 2021-2026, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pada misi ke-2 yaitu "**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial"** mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta hargaharga yang terjangkau. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah "Meningkatkan Indek Pembangunan Keluarga". Dengan indikator sasaran berupa Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS).

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama RPJMD Kabupaten Lampung Selatan. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021-2026, tujuan tersebut dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Mewujudkan keluarga berkualitas.
2. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan SDM yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan

3.1. Tujuan dan sasaran Dinas Dalduk dan Kb sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten lampung Selatan Tahun 2021-2026

No	Visi	Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
									2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan yang Berintegritas, Maju, dan Sejahtera dengan Semangat Gotong Royong	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan Kesehatan yang baik serta kesejahteraan social	Meningkatkan kualitas Hidup masyarakat kabupaten Lampung Selatan	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	0,8	0,7	Menurunnya laju Pertumbuhan Penduduk	Presentase laju pertumbuhan Penduduk (persen)	0,80	0,75	0,75	0,72	0,71	0,70
2.		Mewujudkan kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel	Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Partisipatif, Taat Hukum, Responsif, dan Transparan	Indeks Reformasi Birokrasi (indeks)	69,00	75	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai Sistem Akuntabilitas (skor)	70	71	72	73	74	75

3.2 Tujuan dan sasaran Dinas Dalduk dan Kb Kabupaten lampung Selatan Tahun 2021-2026

Visi	Misi	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2021-2026)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021-2026)	Sasaran OPD	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2021-2026)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2021-2026)
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Terwujudnya masyarakat Lampung Selatan yang berintegritas, maju, dan sejahtera dengan semangat gotong royong	Misi ke dua : Meningkat kan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan serta kesejahter aan sosial	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	Persentase Laju Pertumbu han Penduduk	0,8	0,7	Meningkatnya Cakupan Kesertaan Ber-KB			Cakupan KB Aktif	(Jumlah Peserta KB Aktif (PA)/Jumla h Pasangan Usia subur (PUS)*100%	0,8	0.8	0.75	0.75	1.72	0.71	0.7	0,7
									* Total Fertiliy (TFR) Angka Kelahiran Total)	* TFR = 7ASFRI	2.36	2.36	2.30	2.23	2.17	2.1	2.36	2.36
									*Angka Pemakaian Kontrasepsi /CPR bagi Perempuan Meniikah usia 15-49	*(Jumlah Peserta KB Aktif (PA)/Jumla h Pasangan Usia subur (PUS)*100%	72.08	72.08	72.67	73.25	73.83	74.42	75.00	75,00
	Misi ke lima : Meningkat kan kualitas tata kelola pemerinta han dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel	Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Partisipatif, Taat Hukum, Responsif, dan Transparan				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP)		Nilai Sistem Akuntabilita s (skor)	persepsi per unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai penimbang	70	71	72	73	74	75	70	71

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun 2025 didasarkan pada upaya Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk, pencegahan stunting dan penanggulangan kemiskinan, sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025. pengentasan kerentanan rawan pangan, stunting dan kemiskinan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Lokasi pelaksanaan kegiatan diprioritaskan pada daerah lokasi kasus stunting dan 17 Kecamatan untuk memperluas jangkauan pelayanan KB dan sosialisasi UPPKS.

Total pagu indikatif yang menggambarkan kebutuhan dana APBD murni untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 adalah sebesar Rp. 7,591,110,600 (*Tujuh Milyar Lima Ratus sembilan Puluh Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Rupiah)*. Usulan program yang didanai oleh APBN sebesar Rp. 8,983,332,000 *(Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*)

Dalam Rancangan Renja ini diajukan usulan untuk 39 Sub Kegiatan, 14 kegiatan dan 4 program. Semua sub kegiatan, kegiatan dan program yang diusulkan dalam Rancangan Renja ini telah sesuai dengan Rancangan Akhir Renja. (lampiran SIPD)

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Dalduk dan KB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025
(Tabel T-C.33)

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								Tahun											Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	T+1
2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									Rp18.080.493.020,00	Rp124.445.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.204.938.920,00	Rp17.001.120.970,00	Rp90.446.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.091.567.870,00	Rp1.113.371.050,00)	-6.51	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				Rp18.080.493.020,00	Rp124.445.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.204.938.920,00	Rp17.001.120.970,00	Rp90.446.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.091.567.870,00	Rp1.113.371.050,00)	-6.51	
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				Rp18.080.493.020,00	Rp124.445.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.204.938.920,00	Rp17.001.120.970,00	Rp90.446.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.091.567.870,00	Rp1.113.371.050,00)	-6.51	
2	**14**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp4.889.434.020,00	Rp124.445.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.013.879.920,00	Rp4.530.685.770,00	Rp90.446.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.621.132.670,00	Rp392.747.250,00)	-8.5	
2	**14**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp89.137.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.137.050,00	Rp49.323.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.323.450,00	Rp39.813.600,00)	-80.72	
2	14	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp28.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00	Rp14.000.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000.900,00	Rp13.999.100,00)	-99.99	

2	14	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp13.164.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.164.100,00	Rp11.332.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.332.200,00	Rp1.831.900,00)	-16.17	
2	14	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp5.000.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.750,00	Rp4.999.250,00)	-99.97	
2	14	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp5.001.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.001.500,00	Rp4.998.500,00)	-99.94	
2	14	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp5.001.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.001.900,00	Rp4.998.100,00)	-99.92	
2	14	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp17.972.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.972.950,00	Rp8.986.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.986.200,00	Rp8.986.750,00)	-100.01	

2	14	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp3.510.426.070,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.510.426.070,00	Rp3.259.202.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.259.202.120,00	(Rp251.223.950,00)	-7.71	
2	14	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp811.225.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp811.225.000,00	Rp803.240.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp803.240.900,00	(Rp7.984.100,00)	-0.99	
2	14	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp6.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.600.000,00	Rp6.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.600.000,00	Rp0,00	0	
2	14	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp6.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp6.600.000,00)	(Infinity)	
2	**14**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp15.435.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.435.000,00	Rp15.435.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.435.000,00	Rp0,00	0	
2	14	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapann ya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp15.435.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.435.000,00	Rp15.435.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.435.000,00	Rp0,00	0	

2	**14**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp106.969.900,00	Rp124.445.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp231.415.800,00	Rp69.418.100,00	Rp90.446.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp159.865.000,00	(Rp71.550.800,00)	-44.76	
2	14	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp874.100,00	Rp124.445.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.320.000,00	Rp430.100,00	Rp90.446.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.877.000,00	(Rp34.443.000,00)	-37.9	
2	14	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp13.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.000.000,00	Rp13.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.000.000,00	Rp0,00	0	
2	14	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp27.316.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.316.000,00	Rp13.425.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.425.100,00	(Rp13.890.900,00)	-103.47	
2	14	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan,		Rp8.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.400.000,00	Rp4.797.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.797.100,00	(Rp3.602.900,00)	-75.11	
2	14	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp18.157.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.157.800,00	Rp18.157.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.157.800,00	Rp0,00	0	

2	14	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp39.222.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.222.000,00	Rp19.608.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.608.000,00	(Rp19.614.000,00)	-100.03	
2	**14**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp117.551.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.551.000,00	Rp116.976.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.976.200,00	(Rp574.800,00)	-0.49	
2	14	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp117.551.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.551.000,00	Rp116.976.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.976.200,00	(Rp574.800,00)	-0.49	
2	**14**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp225.490.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp225.490.000,00	Rp210.490.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp210.490.000,00	(Rp15.000.000,00)	-7.13	
2	14	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp190.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.090.000,00	Rp190.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.090.000,00	Rp0,00	0	
2	14	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp10.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.400.000,00	Rp10.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.400.000,00	Rp0,00	0	

2	14	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	(Rp15.000.000,00)	-150	
2	**14**	**2**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**				Rp231.686.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp231.686.900,00	Rp145.036.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp145.036.400,00	(Rp86.650.500,00)	-59.74	
2	**14**	**2**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**				Rp114.598.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.598.900,00	Rp57.064.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.064.150,00	(Rp57.534.750,00)	-100.82	
2	14	2	2.01	20	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp18.594.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.594.900,00	Rp9.232.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.232.300,00	(Rp9.362.600,00)	-101.41	
					Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																
2	14	2	2.01	23	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp96.004.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.004.000,00	Rp47.831.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.831.850,00	(Rp48.172.150,00)	-100.71	
2	**14**	**2**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				Rp117.088.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.088.000,00	Rp87.972.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.972.250,00	(Rp29.115.750,00)	-33.1	

2	14	2	2.02	18	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp117.088.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.088.000,00	Rp87.972.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.972.250,00	(Rp29.115.750,00)	-33.1	
2	**14**	**3**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**				Rp12.039.754.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.039.754.800,00	Rp11.806.526.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.806.526.850,00	(Rp233.227.950,00)	-1.98	
2	**14**	**3**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**				Rp11.382.092.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.382.092.000,00	Rp11.289.150.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.289.150.750,00	(Rp92.941.250,00)	-0.82	
2	14	3	2.01	10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	DAK Non Fisik-BOKKB - Pengawasan Obat dan Makanan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp10.708.303.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.708.303.000,00	Rp10.708.303.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.708.303.000,00	Rp0,00	0	
2	14	3	2.01	12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dana Alokasi Umum (DAU); Penghematan Belanja	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp39.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.600.000,00	Rp201.800.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp201.800.250,00	Rp162.200.250,00	80.38	
2	14	3	2.01	14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp634.189.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp634.189.000,00	Rp379.047.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp379.047.500,00	(Rp255.141.500,00)	-67.31	

2	**14**	**3**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**				Rp118.447.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.447.000,00	Rp63.941.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.941.800,00	(Rp54.505.200,00)	-85.24	
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp40.270.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.270.000,00	Rp24.156.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.156.000,00	(Rp16.114.000,00)	-66.71	
2	14	3	2.02	5	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp39.017.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.017.000,00	Rp18.731.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.731.850,00	(Rp20.285.150,00)	-108.29	
2	14	3	2.02	6	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembanga n Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Pe nyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp39.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.160.000,00	Rp21.053.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.053.950,00	(Rp18.106.050,00)	-86	
2	**14**	**3**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**				Rp352.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp352.100.000,00	Rp359.079.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp359.079.000,00	Rp6.979.000,00	1.94	

2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dana Alokasi Umum (DAU); Penghematan Belanja	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp54.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.200.000,00	Rp173.294.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp173.294.100,00	Rp119.094.100,00	68.72	
2	14	3	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp234.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp234.090.000,00	Rp152.306.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp152.306.000,00	(Rp81.784.000,00)	-53.7	
2	14	3	2.03	16	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp63.810.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.810.000,00	Rp33.478.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.478.900,00	(Rp30.331.100,00)	-90.6	
2	**14**	**3**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**				Rp187.115.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.115.800,00	Rp94.355.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.355.300,00	(Rp92.760.500,00)	-98.31	

2	14	3	2.04	1	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp49.771.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.771.800,00	Rp25.827.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.827.550,00	(Rp23.944.250,00)	-92.71	
2	14	3	2.04	4	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp137.344.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp137.344.000,00	Rp68.527.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.527.750,00	(Rp68.816.250,00)	-100.42	
2	**14**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**				Rp919.617.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp919.617.300,00	Rp518.871.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp518.871.950,00	(Rp400.745.350,00)	-77.23	
2	**14**	**4**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**				Rp282.087.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp282.087.300,00	Rp149.207.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.207.200,00	(Rp132.880.100,00)	-89.06	
2	14	4	2.01	17	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp210.743.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp210.743.300,00	Rp110.231.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.231.000,00	(Rp100.512.300,00)	-91.18	

2	14	4	2.01	19	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp71.344.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.344.000,00	Rp38.976.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.976.200,00	(Rp32.367.800,00)	-83.05	
2	**14**	**4**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**				Rp637.530.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp637.530.000,00	Rp369.664.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp369.664.750,00	(Rp267.865.250,00)	-72.46	
2	14	4	2.02	3	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp320.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp320.000.000,00	Rp117.564.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.564.750,00	(Rp202.435.250,00)	-172.19	

2	14	4	2.02	4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa		Rp317.530.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp317.530.000,00	Rp252.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.100.000,00	(Rp65.430.000,00)	-25.95	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perumusan program dan kegiatan di Bappeda Kabupaten Lampung Selatan didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian visi dan misi kepala daerah (terutama visi ke-5) dan kebutuhan di masa yang akan datang dalam upaya optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan daerah. Rencana kerja Bappeda Tahun 2025 mencakup 4 program yang terdiri dari 12 kegiatan dan 37 sub kegiatan, yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota

1. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Sub Kegiatan :
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD;

2. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   Sub Kegiatan :
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
   - Koordinsi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD;
   - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
   - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

3. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Sub Kegiatan :
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Sub Kegiatan :

   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

5. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Sub Kegiatan :

   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan;
   - Pemeliharaan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pengendalian Penduduk

1. Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas.

   Sub Kegiatan :

   - Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK);
   - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBK;

2. Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daearah Kabupaten/Kota.

   Sub Kegiatan **:**

   - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBK.

C. Program Pembinaan Keluarga Berencana

1. Kegiatan : Pelaksanaan advokasi, komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal.

   Sub Kegiatan:

   - Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja ;
   - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang;
   - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana;

2. Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).

   Sub Kegiatan :

   - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
   - Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB;
   - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB).

3. Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota.

   Sub Kegiatan :

   - Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan;
   - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak;

4. Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

   Sub Kegiatan :

   - Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
   - Pembinaan Terpadu Kampung KB.

D. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

1. Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
   Sub Kegiatan :
   - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA);
   - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKs, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA);

2. Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan.
   Sub Kegiatan :
   - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Operasional Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
   - Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan KeluargaKeluarga Bagi Mitra Kerja.

Tabel 4.1.

RENCANA KERJA PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

CATATAN PENTING

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
								T-1	Sebelum					Setelah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									Rp18.080.493.020,00	Rp124.445.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.204.938.920,00	Rp17.001.120.970,00	Rp90.446.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.091.567.870,00	(Rp1.113.371.050,00)	-6.51	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				Rp18.080.493.020,00	Rp124.445.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.204.938.920,00	Rp17.001.120.970,00	Rp90.446.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.091.567.870,00	(Rp1.113.371.050,00)	-6.51	
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				Rp18.080.493.020,00	Rp124.445.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.204.938.920,00	Rp17.001.120.970,00	Rp90.446.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.091.567.870,00	(Rp1.113.371.050,00)	-6.51	
2	**14**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp4.889.434.020,00	Rp124.445.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.013.879.920,00	Rp4.530.685.770,00	Rp90.446.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.621.132.670,00	(Rp392.747.250,00)	-8.5	
2	**14**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp89.137.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.137.050,00	Rp49.323.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.323.450,00	(Rp39.813.600,00)	-80.72	
2	14	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp28.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00	Rp14.000.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000.900,00	(Rp13.999.100,00)	-99.99	
2	14	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.164.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.164.100,00	Rp11.332.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.332.200,00	(Rp1.831.900,00)	-16.17	
2	14	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp5.000.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.750,00	(Rp4.999.250,00)	-99.97	
2	14	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp5.001.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.001.500,00	(Rp4.998.500,00)	-99.94	

2	14	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp5.001.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.001.900,00	(Rp4.998.100,00)	-99.92	
2	14	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp17.972.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.972.950,00	Rp8.986.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.986.200,00	(Rp8.986.750,00)	-100.01	
2	**14**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp4.334.851.070,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.334.851.070,00	Rp4.069.043.020,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.069.043.020,00	(Rp265.808.050,00)	-6.53	
2	14	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.510.426.070,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.510.426.070,00	Rp3.259.202.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.259.202.120,00	(Rp251.223.950,00)	-7.71	
2	14	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp811.225.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp811.225.000,00	Rp803.240.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp803.240.900,00	(Rp7.984.100,00)	-0.99	
2	14	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp6.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.600.000,00	Rp6.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.600.000,00	Rp0,00	0	
2	14	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp6.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp6.600.000,00)	(Infinity)	
2	**14**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp15.435.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.435.000,00	Rp15.435.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.435.000,00	Rp0,00	0	
2	14	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.435.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.435.000,00	Rp15.435.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.435.000,00	Rp0,00	0	
2	**14**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp106.969.900,00	Rp124.445.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp231.415.800,00	Rp69.418.100,00	Rp90.446.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp159.865.000,00	(Rp71.550.800,00)	-44.76	
2	14	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp874.100,00	Rp124.445.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.320.000,00	Rp430.100,00	Rp90.446.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.877.000,00	(Rp34.443.000,00)	-37.9	

2	14	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.000.000,00	Rp13.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.000.000,00	Rp0,00	0	
2	14	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp27.316.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.316.000,00	Rp13.425.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.425.100,00	(Rp13.890.900,00)	-103.47	
2	14	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.400.000,00	Rp4.797.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.797.100,00	(Rp3.602.900,00)	-75.11	
2	14	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp18.157.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.157.800,00	Rp18.157.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.157.800,00	Rp0,00	0	
2	14	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp39.222.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.222.000,00	Rp19.608.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.608.000,00	(Rp19.614.000,00)	-100.03	
2	**14**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp117.551.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.551.000,00	Rp116.976.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.976.200,00	(Rp574.800,00)	-0.49	
2	14	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp117.551.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.551.000,00	Rp116.976.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.976.200,00	(Rp574.800,00)	-0.49	
2	**14**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp225.490.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp225.490.000,00	Rp210.490.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp210.490.000,00	(Rp15.000.000,00)	-7.13	
2	14	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp190.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.090.000,00	Rp190.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.090.000,00	Rp0,00	0	
2	14	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.400.000,00	Rp10.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.400.000,00	Rp0,00	0	

2	14	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	(Rp15.000.000,00)	-150	
2	**14**	**2**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**				Rp231.686.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp231.686.900,00	Rp145.036.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp145.036.400,00	(Rp86.650.500,00)	-59.74	
2	**14**	**2**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**				Rp114.598.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.598.900,00	Rp57.064.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.064.150,00	(Rp57.534.750,00)	-100.82	
2	14	2	2.01	20	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp18.594.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.594.900,00	Rp9.232.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.232.300,00	(Rp9.362.600,00)	-101.41	
					Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																
2	14	2	2.01	23	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp96.004.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.004.000,00	Rp47.831.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.831.850,00	(Rp48.172.150,00)	-100.71	
2	**14**	**2**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				Rp117.088.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.088.000,00	Rp87.972.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.972.250,00	(Rp29.115.750,00)	-33.1	
2	14	2	2.02	18	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp117.088.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.088.000,00	Rp87.972.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.972.250,00	(Rp29.115.750,00)	-33.1	
2	**14**	**3**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**				Rp12.039.754.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.039.754.800,00	Rp11.806.526.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.806.526.850,00	(Rp233.227.950,00)	-1.98	
2	**14**	**3**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**				Rp11.382.092.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.382.092.000,00	Rp11.289.150.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.289.150.750,00	(Rp92.941.250,00)	-0.82	
2	14	3	2.01	10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.708.303.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.708.303.000,00	Rp10.708.303.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.708.303.000,00	Rp0,00	0	
2	14	3	2.01	12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dana Alokasi Umum (DAU); Penghematan Belanja	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp39.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.600.000,00	Rp201.800.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp201.800.250,00	Rp162.200.250,00	80.38	

2	14	3	2.01	14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp634.189.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp634.189.000,00	Rp379.047.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp379.047.500,00	(Rp255.141.500,00)	-67.31	
2	**14**	**3**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**				Rp118.447.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.447.000,00	Rp63.941.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.941.800,00	(Rp54.505.200,00)	-85.24	
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.270.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.270.000,00	Rp24.156.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.156.000,00	(Rp16.114.000,00)	-66.71	
2	14	3	2.02	5	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp39.017.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.017.000,00	Rp18.731.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.731.850,00	(Rp20.285.150,00)	-108.29	
2	14	3	2.02	6	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp39.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.160.000,00	Rp21.053.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.053.950,00	(Rp18.106.050,00)	-86	
2	**14**	**3**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**				Rp352.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp352.100.000,00	Rp359.079.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp359.079.000,00	Rp6.979.000,00	1.94	
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dana Alokasi Umum (DAU); Penghematan Belanja	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp54.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.200.000,00	Rp173.294.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp173.294.100,00	Rp119.094.100,00	68.72	
2	14	3	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp234.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp234.090.000,00	Rp152.306.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp152.306.000,00	(Rp81.784.000,00)	-53.7	
2	14	3	2.03	16	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp63.810.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.810.000,00	Rp33.478.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.478.900,00	(Rp30.331.100,00)	-90.6	

2	**14**	**3**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**				Rp187.115.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.115.800,00	Rp94.355.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.355.300,00	(Rp92.760.500,00)	-98.31	
2	14	3	2.04	1	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp49.771.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.771.800,00	Rp25.827.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.827.550,00	(Rp23.944.250,00)	-92.71	
2	14	3	2.04	4	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp137.344.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp137.344.000,00	Rp68.527.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.527.750,00	(Rp68.816.250,00)	-100.42	
2	**14**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**				Rp919.617.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp919.617.300,00	Rp518.871.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp518.871.950,00	(Rp400.745.350,00)	-77.23	
2	**14**	**4**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**				Rp282.087.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp282.087.300,00	Rp149.207.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.207.200,00	(Rp132.880.100,00)	-89.06	
2	14	4	2.01	17	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp210.743.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp210.743.300,00	Rp110.231.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.231.000,00	(Rp100.512.300,00)	-91.18	
2	14	4	2.01	19	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp71.344.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.344.000,00	Rp38.976.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.976.200,00	(Rp32.367.800,00)	-83.05	
2	**14**	**4**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**				Rp637.530.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp637.530.000,00	Rp369.664.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp369.664.750,00	(Rp267.865.250,00)	-72.46	

2	14	4	2.02	3	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp320.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp320.000.000,00	Rp117.564.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.564.750,00	(Rp202.435.250,00)	-172.19	
2	14	4	2.02	4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp317.530.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp317.530.000,00	Rp252.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.100.000,00	(Rp65.430.000,00)	-25.95	

Kalianda, 2025

KEPALA DINAS DALDUK DAN KB

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

RIKAWATI.,SSTP.,MM

NIP. 19790224 199712 2 001

BAB V
PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun awal periode Renstra Bappeda Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Bappeda dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 ini menjadi pedoman dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan Tugas dan Fungsi serta sasaran dan target pembangunan yang diamanatkan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan. Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dalam Renstra serta memperhatikan skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Kalianda, 2025

KEPALA DINAS DALDUK DAN KB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

RIKAWATI, S.STP.,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19790224 199712 2 001

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /V.01/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA DINAS PENGENDALAIAN PENDUDUK DAN KELUARAGA BERENCANA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa Rencana Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja PD dan Perubahan Rencana Kerja PD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kereja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Penduduk Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun agenda kerja tim penyusun Renja PD Tahun 2025 dan Perubahan Renja PD Tahun 2024;
2. Menyusun Rancangan Awal Renja PD Tahun 2025;
3. Menyusun Rancangan Renja PD Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2024; dan

4. Menyusun Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2025 dan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Tahun 2024 untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lampung Selatan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, Desember 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;
1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /V.01/HK/2023
TANGGAL : 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA
KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2024

Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung selatan
Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
Anggota	:	1. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk 3. Kepala Bidang Keluarga Berencana 4. Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan 5. Pejabat Fungsional 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 7. Kepala Sub Bagian Keuangan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

2025

RENJA PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERUBAHAN

DLH KAB LAMSEL

lingkunganhidup.lamsel@gmail.com

dlh_lampungselatan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan ini merupakan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup untuk merangkum semua rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun setelah perubahan dari rencana awal. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029, serta dijabarkan lebih rinci terkait pengelolaan lingkungan hidup dalam Rancangan Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan maka disusunlah Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) DLH Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ini.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ini didalamnya mencakup penjabaran Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Tahun 2025. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, terintegrasi, bertahap dan berkelanjutan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Kalianda, Aguatus 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lampung Selatan

Yudhius Irza, S.Hut.,M.M
Pembina
NIP. 19830729 200902 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **ii**

Daftar Isi ..... **iii**

I. PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum..... 3

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.3.1. Maksud……... 4

1.3.2. Tujuan……. 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **6**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu 6

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan ……. 18

2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu……. 27

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 28

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 29

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 32

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 44

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **45**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 45

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 47

3.3. Program dan Kegiatan Prioritas 48

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **59**

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan…….. **59**

4.2 Sinkronisasi Prioritas Perangkat Daerah dengan Prioritas Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Darah…….. **72**

V. PENUTUP **79**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode jangka pendek yaitu untuk satu tahun ke depan setelah Perubahan, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Fungsi Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD Perubahan). RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah terlebih dahulu difokuskan pada pengkajian kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Dalam rangka melaksanakan program pembangunan Kabupaten Lampung Selatan untuk tahun 2025 yang akan datang, yang merupakan program tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lampung Selatan wajib melakukan penyusunan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan dengan mengacu pada Kerangka Arahan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan serta Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029.

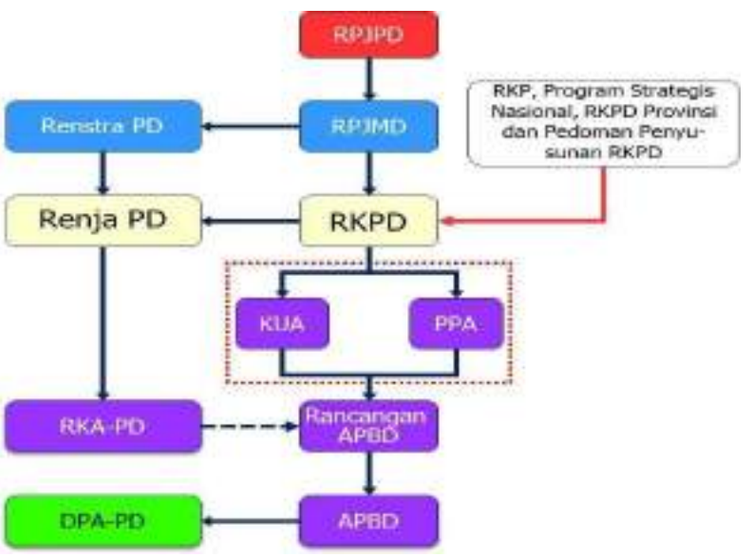


Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ini dilakukan melalui serangkaian tahapan antara lain:

1. Persiapan penyusunan Renja Perubahan PD,
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perubahan PD berpedoman pada Renstra PD, evaluasihasil Renja PD tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan,
3. Penyusunan Rancangan Renja Perubahan PD berdasarkan surat edaran KepalaDaerah tentang penyusunan rancangan RenjaPerubahan Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD Perubahan,
4. Pembahasan Rancangan Renja Perubahan PD dalam Forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perubahan PD berdasarkan Perkada tentang RKPD Perubahan,
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perubahan PD untuk ditetapkan oleh KepalaDaerah, paling lambat 1(satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD Perubahan ditetapkan.

Hasil penyusunan rancangan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ini selanjutnya akan disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Lampung Selatan dan penyusunan KUA-PPAS terkait dengan proses penyusunan RAPBD Perubahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025. Selain itu, rancangan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 juga disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai oleh provinsi dan/atau pemerintah pusat melalui dana APBN dan/atau APBD Provinsi Lampung.



Gambar 1.2 Tindak lanjut Renja dalam Penyusunan APBD

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;

d. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah;

e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang PerangkatDaerah;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dibah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

k. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ Tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;

l. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 -2024;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025;

n. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;

o. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

p. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

q. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 antara lain :

a. Menjadi acuan / dasar dalam merencanakan dan menentukan Langkah-langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.
b. Menyediakan dokumen resmi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2025 yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN.
c. Memuat pengukuran kinerja DLH sebagai pelaksanaan akuntabilitas dan integritas organisasi.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 antara lain :

a. Menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target - target kinerja dan pendanaan indikatif tahun 2025 sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal sesuai Rencana Pembangunan Daerah;

b. Sebagai arah dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada Tahun Anggaran 2025;

d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT D A ERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isupenting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, hasil review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran Renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) sesuai dengan bidang urusan Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tri Wulan II Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan telah melaksanakan 10 (sepuluh) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan. Dari sejumlah program dan kegiatan tersebut, capaian target kinerja dari masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1. Evaluai Renja Triwula II Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renja Tahun Berjalan (2025)	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025	Ket.
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	Poin	80,00			0,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dok	10	5	0	5	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	3	1	0	1	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA0SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	0	0	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA0SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1	0	0	0	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA0SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	1	1	0	1	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renja Tahun Berjalan (2025)	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025	Ket.
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA0SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	1	0	0	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	3	3	0	3	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	Dok	29	7	7	14	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	38	38	38	38	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	12	3	3	6	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	1	0	0	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lap	4	1	1	2	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	Dok	12	3	3	6	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Derah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Lap	12	3	3	6	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi**	%	100,00	100,00		100	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renja Tahun Berjalan (2025)	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025	Ket.
		Kepegawaian Perangkat Daerah						
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	290	290	0	290	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok	12	3	3	6	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	%	100,00	22,64	25,71	48	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	12	3	3	6	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	15	0	3	3	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	12	3	3	6	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	12	3	3	6	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	12	3	3	6	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	12	3	3	6	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	1	0	0	0	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lap	6	2	3	5	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	11	5	4	9	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renja Tahun Berjalan (2025)	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025	Ket.
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	Unit	67	0	3	3	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	0	0	1	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	19	0	3	3	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	Peralatan dan Mesin Kantor	Unit	9	0	0	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	Lap	12	3	3	6	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12	3	3	6	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	Unit	105	75	64	105	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknnya	Unit	1	1	1	2	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	Unit	47	52	52	52	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	53	20	10	30	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	2	1	3	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renja Tahun Berjalan (2025)	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025	Ket.
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	**Tersusunnya Dokumen perencanaan lingkungan Kabupaten/kota**	Dok	1	0	0	0	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Tersusunnya Dokumen Matek RPPLH Tahunan**	Dok	1	0	0	0	
	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	Dok	1	0	0		
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	**Tersedianya Dokumen KLHS**	Dok	1	0	0	0	
	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dok	1	0	0	0	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase Tingkat Penurunan Pencemaran Lingkungan Hidup**	%	100,00			0,00	
		Realisasi IKA					0,00	
		Target IKA					0,00	
		Realisasi IKU					0,00	
		Target IKU					0,00	
		Realisasi IKL					0,00	
		Target IKL					0,00	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan	**Jumlah Laporan Tindakan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilakukan**	Dok	4	0	0	0	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup akan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dok	2	0	0	0	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renja Tahun Berjalan (2025)	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025	Ket.
	terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut							
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dok	1	0	0	0	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Sampel	36	0	0	0	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	**Presentase luas RTH yang dikelola**	%	20,00			0,000	
		Luas RTH yang dikelola					8,14	
		Luas wilayah RTH Kab. Lampung Selatan					0,00	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Laporan Pengelolaan RTH di Kabupaten Lampung Selatan**	Dok	1			0	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	8,14	8,14	8,14		
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**Persentase TPS LB3 usaha/kegiatan yang terverifikasi**	%	60,00			0,00	
		TPS LB3 usaha/kegiatan yang terverifikasi layak					0	
		Target usaha/kegiatan					0	
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang terdaftar mempunyai TPS LB3**	Usaha	40			0	
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan	Lap	1	0	0	0	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renja Tahun Berjalan (2025)	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025	Ket.
	Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3						
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**Presentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap PUU Lingkungan Hidup**	%	65,00			0,00	
		Usaha/kegiatan yang taat terhadap persetujuan lingkungan yang dimiliki					0	
		Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi					0	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang lingkungan hidup**	Usaha	80	20	30	50	
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	badan usaha	80	20	30	50	
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN	**Persentase Sekolah yang menerapkan**	%	100,00			0,00	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renja Tahun Berjalan (2025)	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025	Ket.
	DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Sekolah berbudaya Lingkungan**						
		Hasil survey					0,00	
		Jumlah yang disurvey					0	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat kabupaten**	Dok	1			0	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	1	0	0	0	
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	orang	150	0	0	0	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase tindak Lanjut penanganan Pengaduan LH sesuai Perundang -uandangan**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan**	Kasus	10	8	4	12	
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	pengaduan	10	8	4	30	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase Jumlah sampah yang tertangani**	%	71,00			0,00	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renja Tahun Berjalan (2025)	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025	Ket.
		Jumlah timbulan sampah yang diangkut ke TPA					0	
		Timbulan sampah					0,00	
	Pengelolaan Sampah	**Laporan Pengelolaan Sampah Kabupaten**	Dok	1			0	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	5	0	0	0	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	unit	12	0	0	0	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	**Laporan Lembaga Swasta yang bekerjasama dalam pengelolaan sampah**	Lap	1			0	
	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Lap	1	0	0	0	

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Lampung Selatan tidak Menyusun SPM (Standar Pelayanan Minimal), Sedangkan IKK (Indikator Kinerja Kunci) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH Kab/Kota = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)	60,89	61,41	61,93	62,45	62,97	63,49	63,67	61,99	60,55		
		IKA = Indeks Kualitas Air	52,6	52,7	52,8	52,9	53	53,1	60	55	50,51		
		IKU = Indeks Kualitas Udara	86,38	86,48	86,59	86,69	86,8	86,9	87,37	87,89	84,7		
		IKL = Indeks Kualitas Lahan	27,97	29,98	32	34,01	36,03	38,04	26,13	26,1	33,12		
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	Presentase Penanganan Sampah Kabupaten Lampung Selatan	74%	73%	72%	71%	70%	70%	11,25%	40,8%	41%		
3	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase Terawasinya usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH	45%	50%	60%	65%	70%	75%	65%	62,5%	66,25%)		

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Secara umum isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan RPJMD 2025-2029 dan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Tanah

   Pertumbuhan jumlah penduduk, aktivitas industri, serta peningkatan volume kendaraan bermotor menimbulkan risiko pencemaran air, udara, dan tanah yang semakin tinggi. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas kesehatan masyarakat, mengganggu ekosistem, serta menurunkan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, pengendalian pencemaran menjadi isu strategis utama dalam menjaga kualitas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

2. Pengendalian Kualitas Lingkungan untuk Antisipasi Perubahan Iklim

   Kabupaten Lampung Selatan merupakan wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti peningkatan suhu udara, abrasi pantai, banjir, dan longsor. Upaya pengendalian kualitas lingkungan dan penerapan strategi adaptasi serta mitigasi perubahan iklim menjadi sangat penting untuk meminimalisasi risiko kerugian lingkungan, sosial, dan ekonomi di masa depan.

3. Penataan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

   Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten lampung Selatan sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam urusan persampahan belum sepenuhnya didukung oleh struktur kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang ideal, baik dari sisi kapasitas sumber daya manusia, sumber daya operasional maupun struktur organisasi yang menyebabkan pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah belum berjalan efisien. Selain itu, koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, dan pihak swasta masih belum terbangun secara sistematis, sehingga pengelolaan sampah seringkali bersifat sektoral dan tidak terpadu. Kondisi ini diperparah dengan minimnya anggaran operasional serta belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir, berprinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), dan ramah lingkungan menjadi salah satu isu strategis yang perlu diutamakan.

4. Pengembangan Kawasan Agroeduwisata untuk Mendukung SDGs

   Lampung Selatan memiliki potensi kawasan pegunungan, hutan, dan pertanian yang dapat dikembangkan sebagai agroeduwisata. Pemanfaatan kawasan ini tidak hanya mendukung konservasi lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi melalui pariwisata berbasis edukasi, pertanian berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
   Pengembangan agroeduwisata menjadi isu strategis karena selaras dengan pencapaian

Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan terkait lingkungan, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Untuk menelaah rancangan Perubahan RKPD yaitu membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas dan tingkat kinerja yang dicapai, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan Perubahan RKPD, maka akan disusun dalam bentuk tabulasi sebagai berikut :

Tabel 2.4.1. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan

No	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Perubahan Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
	LINGKUNGAN HIDUP					**14.135.944.250**						**14.064.671.340**	
	PRO GRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	**Kalianda**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**80**	**poin**	**11.118.037.200**	**PRO GRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KO TA**	**Kalianda**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**80**	**poin**	**7.760.756.350**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kalianda**	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10**	**dok**	**120.897.200**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kalianda**	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10**	**dok**	**65.102.900**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kalianda	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memiliki tujuan, sasaran dan indikator yang baik dan terukur**	**3**	**dok**	39.640.500	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kalianda**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memiliki tujuan, sasaran dan indikator yang baik dan terukur**	**3**	**dok**	19.670.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kalianda	**Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**1**	**dok**	17.000.000	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**Kalianda**	**Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**1**	**dok**	7.805.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Perubahan Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kalianda	**Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**1**	**dok**	13.735.000	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**Kalianda**	**Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**1**	**dok**	6.495.500	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kalianda	**Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD**	**1**	**dok**	13.014.000	**Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**	**Kalianda**	**Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD**	**1**	**dok**	9.314.000	
	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD	Kalianda	**Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD**	**1**	**dok**	13.499.600	**Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD**	**Kalianda**	**Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD**	**1**	**dok**	5.807.300	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kalianda	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**3**	dok	24.008.100	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**Kalianda**	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**3**	dok	16.010.600	

No	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Perubahan Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kalianda	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**29**	**dok**	**7.686.475.200**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kalianda**	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**29**	**dok**	**4.522.070.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kalianda	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**38**	**Orang/bulan**	3.855.848.000	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Kalianda**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**38**	**Orang/ bulan**	3.914.718.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kalianda	**Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	**12**	dok	3.781.104.950	**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	**Kalianda**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	**12**	dok	582.573.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kalianda	**Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**1**	dok	16.977.500	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun**	**Kalianda**	**Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**1**	dok	8.416.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kalianda	**Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**	**4**	dok	32.544.750	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**	**Kalianda**	**Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**	**4**	dok	16.362.500	

No	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Perubahan Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kalianda	**Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**12**	**dok**	**14.018.250**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kalianda**	**Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**12**	**dok**	**6.325.750**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kalianda	**Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**12**	dok	14.018.250	**Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah**	**Kalianda**	**Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**12**	dok	6.325.750	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kalianda	**Presentase penyelenggaraan Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**%**	**130.350.150**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kalianda**	**Presentase penyelenggaraan Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**%**	**101.475.600**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kalianda	**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**	**360**	Paket	110.350.000	**Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**	**Kalianda**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**	**290**	Paket	91.450.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kalianda	**Jumalh Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**	**12**	dok	20.000.150	**Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**	Kalianda	**Jumalh Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**	**12**	dok	10.025.600	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kalianda	**Presentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**538.232.900**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kalianda**	**Presentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**363.720.800**	

No	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Perubahan Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kalianda	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**12**	Paket	8.930.000	**Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Kalianda**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**12**	Paket	8.930.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kalianda	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**20**	Paket	114.105.800	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Kalianda**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**15**	Paket	69.306.800	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kalianda	**Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan**	**12**	Paket	44.097.500	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	**Kalianda**	**Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan**	**12**	Paket	44.097.500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kalianda	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**12**	Paket	33.112.000	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Kalianda**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**12**	Paket	17.096.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kalianda	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**12**	Paket	78.667.600	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Kalianda**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**12**	Paket	46.754.500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kalianda	**Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan**	**12**	dok	18.000.000	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**Kalianda**	**Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan**	**12**	dok	30.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kalianda	**Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan**	**1**	Paket	20.000.000	**Penyediaan Bahan/Material**	**Kalianda**	**Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan**	**1**	Paket	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Perubahan Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kalianda	**Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**12**	Laporan	12.600.000	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**Kalianda**	**Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**6**	Laporan	6.300.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem	Kalianda	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**19**	Laporan	208.720.000	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem**	**Kalianda**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**11**	Laporan	121.236.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kalianda	**Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**29**	**Unit**	**739.895.500**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kalianda**	**Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**29**	**Unit**	**721.877.300**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kalianda	**Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**1**	Unit	650.000.000	**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	Kalianda	**Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**1**	Unit	650.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kalianda	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**35**	Unit	42.895.500	**Pengadaan Mebel**	**Kalianda**	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**19**	Unit	24.877.300	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kalianda	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**9**	Unit	47.000.000	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Kalianda**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**9**	Unit	47.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalianda	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12**	**Laporan**	**264.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kalianda**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**12**	**Laporan**	**228.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Perubahan Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif (Rp)**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kalianda	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	**12**	Laporan	264.000.000	**Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik**	**Kalianda**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	**12**	Laporan	228.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalianda	**Pemeliharaan Barang Penunjang UrusanPemerintahan Daerah**	**105**	**Unit**	**1.624.168.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kalianda**	**Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan**	**105**	**Unit**	**1.752.184.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kalianda	**Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**1**	Unit	44.530.000	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**Kalianda**	**Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**1**	Unit	44.530.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kalianda	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya**	**52**	Unit	1.530.138.000	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Kalianda**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya**	**47**	Unit	1.658.154.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kalianda	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**53**	Unit	24.500.000	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya**	**Kalianda**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**53**	Unit	24.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Perubahan Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif (Rp)**	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kalianda	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**4**	Unit	25.000.000	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Kalianda**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**4**	Unit	25.000.000	
	PRO GRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Lampung Selatan	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup**	**1**	dok	**430.000.150**	**PRO GRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Lampung Selatan**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup**	**1**	dok	**389.588.000**	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Lampung Selatan	**Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota**	**1**	**dok**	**200.000.150**	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Lampung Selatan**	**Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota**	**1**	**dok**	**174.662.000**	
	Penetapan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Lampung Selatan	**Dokumen Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota**	**1**	dok	200.000.150	**Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota**	**Lampung Selatan**	**Dokumen Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota**	**1**	dok	174.662.000	
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Lampung Selatan	**Tersediannya Dokumen KLHS**	**1**	**dok**	**230.000.000**	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Lampung Selatan**	**Tersediannya Dokumen KLHS**	**1**	**dok**	**214.926.000**	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Lampung Selatan	**Dokumen Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang**	**1**	dok	230.000.000	**Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang**	**Lampung Selatan**	**Dokumen Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang**	**1**	dok	214.926.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Perubahan Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
	PRO GRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Lampung Selatan	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**100**	%	**1.510.000.000**	**PRO GRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Lampung Selatan**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**100**	%	**1.326.795.000**	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Lampung Selatan	**Laporan Pencegahan Pencematan kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota**	**4**	**dok**	**1.510.000.000**	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Lampung Selatan**	**Laporan Pencegahan Pencematan kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota**	**4**	**dok**	**1.326.795.000**	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Lampung Selatan	**Dokumen hasil pemantauan Kualitas air sungai,tanah, udara dan laut**	**2**	dok	310.000.000	**Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut**	**Lampung Selatan**	**Dokumen hasil pemantauan Kualitas air sungai,tanah, udara dan laut**	**2**	dok	242.114.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Lampung Selatan	**Sosialisasi Kegiatan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim**	**1**	dok	200.000.000	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim**	**Lampung Selatan**	**Sosialisasi Kegiatan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim**	**1**	dok	114.636.000	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	**Kalianda**	**Laporan pegambilan sampel Lingkungan Kabupaten**	**36**	**sampel**	1.000.000.000	**Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup**	**Kalianda**	**Laporan pegambilan sampel Lingkungan Kabupaten**	**36**	**sampel**	970.045.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Perubahan Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Lampung Selatan	**Presentase luas RTH diperkotaan yang dipelihara**	**20**	**%**	**250.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI**	**Lampung Selatan**	**Presentase luas RTH diperkotaan yang dipelihara**	**20**	**%**	**228.200.140**	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Lampung Selatan	**Laporan tingkat Pengelolaan Kehati Kabupaten/kota**	**1**	**dok**	**250.000.000**	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Lampung Selatan**	**Laporan tingkat Pengelolaan Kehati Kabupaten/kota**	**1**	**dok**	**228.200.140**	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lampung Selatan	**Luas pemeliharan Pengelolaan RTH**	**8,1**	**HA**	250.000.000	**Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	**Lampung Selatan**	**Luas pemeliharan Pengelolaan RTH**	**8,1**	**HA**	228.200.140	
	PRO GRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Lampung Selatan	**Presentase Pengendalian B3 dan Limbah B3**	**60**	**%**	**40.000.000**	**PRO GRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Lampung Selatan**	**Presentase Pengendalian B3 dan Limbah B3**	**60**	**%**	**20.035.400**	
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Lampung Selatan	**Jumlah Rekomedasi Yang dikeluarkan terkait tps LB3**	**40**	Usaha	**40.000.000**	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Lampung Selatan**	**Jumlah Rekomedasi Yang dikeluarkan terkait tps LB3**	**40**	Usaha	**20.035.400**	
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Lampung Selatan	**Laporan Verifikasi Lapangan Persyaratan Administrasi dan Teknis TPS LB3**	**1**	Laporan	40.000.000	**Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Lampung Selatan**	**Laporan Verifikasi Lapangan Persyaratan Administrasi dan Teknis TPS LB3**	**1**	Laporan	20.035.400	

No	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Perubahan Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELO LAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Lampung Selatan	**Presentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap PUU Lingkungan Hidup**	**60**	**%**	**80.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELO LAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Lampung Selatan**	**Presentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap PUU Lingkungan Hidup**	**60**	**%**	**56.520.000**	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Selatan	**Laporan pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Usahanya diterbitkan oleh Kabupaten**	**80**	Usaha	**80.000.000**	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Lampung Selatan**	**Laporan pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Usahanya diterbitkan oleh Kabupaten**	**80**	Usaha	**56.520.000**	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Selatan	**Laporan Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Usahanya diterbitkan oleh Kabupaten**	**80**	Usaha	80.000.000	**Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Lampung Selatan**	**Laporan Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Usahanya diterbitkan oleh Kabupaten**	**40**	Usaha	56.520.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Perubahan Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Lampung Selatan	**Presentase Sekolah yang menerapkan Sekolah berbudaya Lingkungan**	**100**	**%**	**120.000.000**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Lampung Selatan**	**Presentase Sekolah yang menerapkan Sekolah berbudaya Lingkungan**	**100**	**%**	**3.310.200.000**	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Selatan	**Laporan Lembaga yang mengikuti Diklat dan Penyuluhan Lingkungan Hidup**	**1**	**dok**	**120.000.000**	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Lampung Selatan**	**Laporan Lembaga yang mengikuti Diklat dan Penyuluhan Lingkungan Hidup**	**1**	**dok**	**3.310.200.000**	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Lampung Selatan	**Jumlah Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup yang dilaksanakan**	**1**	dok	70.000.000	**Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup**	**Lampung Selatan**	**Jumlah Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup yang dilaksanakan**	**1**	dok	3.260.200.000	
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Lampung Selatan	**Terlaksanannya Sosialisasi Pelaksanaan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup**	**150**	orang	50.000.000	**Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup**	**Lampung Selatan**	**Terlaksanannya Sosialisasi Pelaksanaan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup**	**150**	orang	50.000.000	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Lampung Selatan	**Presentase tindak Lanjut penanganan Pengaduan LH sesuai Perundang - uandangan**	**100**	%	**71.000.000**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Lampung Selatan**	**Presentase tindak Lanjut penanganan Pengaduan LH sesuai Perundang - uandangan**	**100**	%	**41.441.500**	

No	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Perubahan Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Lampung Selatan	**Laporan tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat**	**10**	kasus	**71.000.000**	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Lampung Selatan**	**Laporan tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat**	**10**	kasus	**41.441.500**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Lampung Selatan	**Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup**	**10**	pengaduan	71.000.000	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan**	**Lampung Selatan**	**Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup**	**10**	pengaduan	41.441.500	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Lampung Selatan	**Persentase Jumlah sampah yang tertangani**	**70**	%	**516.906.900**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Lampung Selatan**	**Persentase Jumlah sampah yang tertangani**	**70**	%	**931.134.950**	
	Pengelolaan Sampah	Lampung Selatan	**Laporan Pengelolaan Sampah Kabupaten**	**1**	**dok**	**356.906.900**	**Pengelolaan Sampah**	**Lampung Selatan**	**Laporan Pengelolaan Sampah Kabupaten**	**1**	**dok**	**851.179.950**	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Lampung Selatan	**Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat**	**5**	kelompok	69.821.400	**Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan**	**Lampung Selatan**	**Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat**	**2**	kelompok	85.738.500	

No	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Perubahan Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Lampung Selatan	**Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir**	**12**	**Unit**	287.085.500	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota**	**Lampung Selatan**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan**	**12**	**Unit**	765.441.450	
	Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Lampung Selatan	**Laporan Penerbitan Perizinan terkait Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta**	**1**	**dok**	**160.000.000**	**Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta**	**Lampung Selatan**	**Laporan Penerbitan Perizinan terkait Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta**	**1**	**dok**	**79.955.000**	
	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Lampung Selatan	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota**	**1**	**Laporan**	160.000.000	**Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah**	**Lampung Selatan**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota**	**1**	**Laporan**	79.955.000	

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Pokir Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dan Musrenbang Kecamatan, terdapat program/kegiatan yang diusulkan dari kecamatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.5.1. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**		Jumlah sampah yang terkelola dalam penanganan sampah		
	Kegiatan Pengelolaan Sampah		Laporan Pengelolaan Sampah Kabupaten		
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				
	Mesin Pencacah	Desa Jati Indah, Tanjung Bintang		1 Unit	
	Mesin Pencacah	Desa Sukamaju, Way Sulan		1 Unit	
	Mesin Pencacah	Desa Canggung, Raja Basa		1 Unit	
	Mesin Pencacah	Desa Trimomukti, Candi Puro		1 Unit	
	Mesin Pencacah	Desa Tanjung Gading, Raja Basa		1 Unit	

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan Terhadap Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dalam dokumen RPJMN 2025-2029 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*" Visi ini menjadi arah besar pembangunan nasional untuk lima tahun pertama (RPJMN 2025-2029) sekaligus bagian dari upaya jangka panjang mencapai Indonesia Emas 2045, yakni Indonesia yang maju, mandiri, adil dan makmur.Untuk mewujudkan visi di atas, diterapkan **delapan misi strategis** yang dikenal sebagai **Asta Cita**: sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, pengembangan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) termasuk sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, serta kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arah kebijakan nasional terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Indonesia Bebas Sampah 2029: Mendorong reformasi sistem pengelolaan sampah secara nasional dan terintegrasi dengan tema "Menuju Kelola Sampah 100%".

2. Penguatan Daya Dukung Lingkungan: Memperkuat daya tampung lingkungan dengan fokus pada ekosistem kritis seperti gambut dan mangrove, serta mengintegrasikan KLHS dalam dokumen perencanaan pembangunan.

3. Pembangunan Rendah Karbon: Menyelaraskan kebijakan lingkungan dengan agenda *Low Carbon Development* (Pembangunan Rendah Karbon) dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

4. Pengendalian Limbah: Menetapkan standar ketat untuk pembuangan limbah cair dan emisi yang tidak terkontrol.

5. Konservasi dan Bioekonomi: Peningkatan jumlah spesies yang terdata, pengembangan produk bioprospeksi, dan pemulihan ekosistem di kawasan konservasi.

Dalam Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) 2025-2029 difokuskan pada penguatan regulasi adaptif, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta pengendalian perubahan iklim untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau. Ini mencakup perwujudan ekosistem sehat dan peningkatan kepatuhan lingkungan., Sasaran ini tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) KLH/BPLH 2025-2029, Rumusan Sasaran Strategis Utama (2025-2029) antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup: Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) melalui pengelolaan air, udara, dan tutupan lahan yang lebih baik.

2. Penguatan Regulasi dan Kepatuhan: Menguatkan regulasi yang adaptif terhadap risiko lingkungan, serta pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran.

3. Pengendalian Perubahan Iklim: Mendorong pembangunan rendah karbon dan memperkuat adaptasi/mitigasi dampak perubahan iklim.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan: Memastikan pemanfaatan SDA yang bijaksana, mengurangi degradasi ekosistem, dan mendukung SDGs 2030.

5. Peningkatan Kapasitas Lingkungan: Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan menetapkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan dengan mendorong peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

   Sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan”, dengan indikator sasaran, yaitu:

(1) Indeks Kualitas Air;
(2) Indeks Kualitas Udara;
(3) Indeks Kualitas Lahan;
(4) Persentase Penanganan Sampah.

2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.

Sasaran, yang ingin dicapai adalah "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup", dengan indikator sasaran, yaitu:

(1) Indeks Kepuasan Pelayanan

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup

NO	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PD	INDIKATORSASARAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan dengan mendorong peningkatanDaya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas LingkunganHidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan	Indeks KualitasAir (nilai)	53
				Indeks KualitasUdara (nilai)	86,80
				Indeks KualitasLahan (nilai)	36,03
				Persentase Penanganan Persampahan	70 %
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif pada Dinas LingkunganHidup Kabupaten Lampung Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan DinasLingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Pelayanan (nilai)	80

3.3. Program dan Kegiatam

Program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan ditunjukan pada Tabel 3.3.1. di bawah ini berisi daftar program dan kegiatan prioritas, yaitu Program Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang urusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan adalah Program Strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di Tahun 2025.

Dasar pertimbangan penetapan program dan kegiatan prioritas ini adalah:

a. Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan dengan mendorong peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.

Jumlah Program dan Kegiatan Strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan di Tahun 2025 berjumlah 9 (sembilan) program yang tertuang pada 18 (delapan belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) subkegiatan dengan total kebutuhan dana sebelum perubahan sebesar Rp. 14.135.944.250,- (empat belas milyar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan setelah perubahan menjadi Rp. 14.064.671.340 (empat belas milyar enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.3.1. di bawah :

Tabel 3.3.1. Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Derah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17
						Dinas Lingkungan Hidup				12.840.030.250,00	14.135.944.250,00	14.064.671.340,00					15.801.725.985,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.840.030.250,00	14.135.944.250,00	14.064.671.340,00					15.801.725.985,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				12.840.030.250,00	14.135.944.250,00	14.064.671.340,00					15.801.725.985,00	
1	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	80 Poin	80 Poin	10.802.123.200,00	11.118.037.200,00	7.731.046.350,00					13.319.199.730,00	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	126.019.050,00	120.897.200,00	65.102.900,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		110.166.430,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	39.640.500,00	39.640.500,00	19.670.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			21.449.780,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	17.000.000,00	17.000.000,00	7.805.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Daerah - LRA			16.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.999.950,00	13.735.000,00	6.495.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			13.749.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	14.171.800,00	13.014.000,00	9.314.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)			12.099.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	13.499.600,00	13.499.600,00	5.807.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			11.133.870,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	25.707.200,00	24.008.100,00	16.010.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Daerah - LRA			35.233.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	7.396.212.350,00	7.686.475.200,00	4.522.070.000,00			-		8.772.810.035,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42/12 Orang/bulan	42/12 Orang/bulan	3.574.734.000,00	3.855.848.000,00	3.914.718.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan			4.561.600.120,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

														Perjanjian Kerja				
	2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	3.795.343.450,00	3.781.104.950,00	582.573.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			4.186.498.415,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	14.225.000,00	16.977.500,00	8.416.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			15.866.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	11.909.900,00	32.544.750,00	16.362.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			8.845.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.150,00	14.018.250,00	6.325.750,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		23.144.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12.000.150,00	14.018.250,00	6.325.750,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)			23.144.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	111.450.150,00	130.350.150,00	101.475.600,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		116.957.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	290 Paket	290 Paket	91.450.000,00	110.350.000,00	91.450.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			103.757.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.150,00	20.000.150,00	10.025.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			13.200.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)	100 %	100 %	533.678.000,00	538.232.900,00	363.720.800,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		633.389.845,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.383.000,00	8.930.000,00	8.930.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)			20.980.520,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	15 Paket	110.305.800,00	114.105.800,00	69.306.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			153.296.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	44.097.500,00	44.097.500,00	44.097.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			33.459.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	33.112.000,00	33.112.000,00	17.096.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)			36.140.830,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	77.689.700,00	78.667.600,00	46.590.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			79.159.245,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)			19.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Daerah - LRA			22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6 Laporan	12.600.000,00	12.600.000,00	6.300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Daerah - LRA			38.115.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	11 Laporan	209.490.000,00	208.720.000,00	121.236.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)			230.439.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah	67 Unit	67 Unit	739.895.500,00	739.895.500,00	721.877.300,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		1.611.130.620,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)			1.540.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit	19 Unit	42.895.500,00	42.895.500,00	24.877.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			42.165.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)			28.965.420,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	265.200.000,00	264.000.000,00	228.000.000,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		285.670.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	265.200.000,00	264.000.000,00	228.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)			285.670.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	1.617.668.000,00	1.624.168.000,00	1.752.184.000,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		1.765.931.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	44.530.000,00	44.530.000,00	44.530.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Daerah - LRA			48.983.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	57 Unit	1.530.138.000,00	1.530.138.000,00	1.658.154.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)			1.659.748.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	18.000.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Daerah - LRA			29.700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.150,00	430.000.150,00	389.588.000,00					235.000.000,00	
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya Ranperda Dokumen RPPLH Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.150,00	200.000.150,00	174.662.000,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.01	0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.150,00	200.000.150,00	174.662.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Updating KLHS Tata Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	230.000.000,00	214.926.000,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		235.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang	-	1 Dokumen	0,00	230.000.000,00	214.926.000,00	Kab. Lampung Selatan,	Dana Alokasi			235.000.000,00	DINAS LINGKUN

							Kabupaten/Kota yang Disusun						Natar, Semua Kel/Desa	Umum (DAU)				GAN HIDUP
3	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase Peningkatan Nilai IKA, IKU dan IKL dibanding dengan Tahun Lalu	100 %	100 %	760.000.000,00	1.510.000.000,00	1.326.795.000,00					861.000.000,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan IKA, IKU, IKL dan Emisi Gas Rumah Kaca	4 Laporan	4 Laporan	760.000.000,00	1.510.000.000,00	1.326.795.000,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		861.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	310.000.000,00	310.000.000,00	242.114.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Daerah - LRA			341.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	114.636.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Daerah - LRA			220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	1.000.000.000,00	970.045.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase luas RTH yang dikelola	20 %	20 %	250.000.000,00	250.000.000,00	228.200.140,00					275.000.000,00	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan RTH di Kabupaten Lampung Selatan	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	228.200.140,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		275.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8.1 Ha	8.1 Ha	250.000.000,00	250.000.000,00	228.200.140,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Penghematan Belanja Pajak Air Tanah			275.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

5	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Presentase Ketaatan usaha/kegiatan dalam pengelolaan TPS LB3	60 %	60 %	40.000.000,00	40.000.000,00	20.035.400,00					44.000.000,00	
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang melaporkan data timbulan LB3	40 Usaha	40 Usaha	40.000.000,00	40.000.000,00	20.035.400,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		44.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	20.035.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			44.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Presentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap PUU Lingkungan Hidup	65 %	65 %	80.000.000,00	80.000.000,00	56.520.000,00					110.000.000,00	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang lingkungan hidup	80 Perusahaan	80 Perusahaan	80.000.000,00	80.000.000,00	56.520.000,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	80 Badan Usaha	80 Badan Usaha	80.000.000,00	80.000.000,00	56.520.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

7	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Presentase Sekolah yang memenuhi kriteria sekolah adiwiyata tingkat propinsi	100 %	100 %	120.000.000,00	120.000.000,00	3.310.200.000,00					200.000.000,00	
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat kabupaten	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	3.310.200.000,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	3.260.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Air Tanah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	150 Orang	150 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase tindak Lanjut penanganan Pengaduan LH sesuai Perundang - uandangan	100 %	100 %	71.000.000,00	71.000.000,00	41.441.500,00					77.000.000,00	
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	10 Kasus	10 Kasus	71.000.000,00	71.000.000,00	41.441.500,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		77.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10 Pengaduan	10 Pengaduan	71.000.000,00	71.000.000,00	41.441.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			77.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah sampah yang tertangani	71 %	71 %	516.906.900,00	516.906.900,00	931.134.950,00					680.526.255,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Laporan Pengelolaan Sampah Kabupaten	1 Laporan	1 Laporan	356.906.900,00	356.906.900,00	851.179.950,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		480.526.255,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5 Kelompok	5 Kelompok	69.821.400,00	69.821.400,00	85.738.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Daerah - LRA			77.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	12 Unit	12 Unit	287.085.500,00	287.085.500,00	765.441.450,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Daerah - LRA Penghematan Belanja Dana Alokasi Umum (DAU)			403.526.255,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Laporan Lembaga Swasta yang bekerjasama dalam pengelolaan sampah	1 Laporan	1 Laporan	160.000.000,00	160.000.000,00	79.955.000,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.03	0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	160.000.000,00	160.000.000,00	79.955.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	J U M L A H									**12.840.030.250,00**	**14.135.944.250,00**	**14.064.671.340,00**					**15.801.725.985,00**	

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Untuk Tahun 2025, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan, DLH Kab. Lampung Selatan menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara optimal sesuai dengan alokasi anggaran yang diberikan. Program dan Kegiatan yang disusun meliputi program rutin (administrasi kantor) maupun program khusus yang berkaitan dengan lingkup sasaran "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Layak dan Sehat"maupun lingkup sasaran "Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati Secara Berkelanjutan".

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan. Berdasar hal tersebut, untuk Tahun 2025 DLH Kab. Lampung Selatan mengusulkan untuk melaksanakan 9 (sembilan) program yang tertuang pada 18 (tujuh belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) subkegiatan , yaitu sebagai berikut:

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan ditunuukan

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.1. Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

3.1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4.2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.7. Penyediaan Bahan/Material
5.8. Fasilitasi Kunjungan Tamu
5.9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan
6.2. Pengadaan Mebel
6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

1.1. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

2.1. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang

III. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

1.1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
1.2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
1.3. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

IV. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

1.1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

V. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

1. Penyimpanan Sementara Limbah B3

1.1. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

VII. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

1.2. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

VIII. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan

IX. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Pengelolaan Sampah

1.1. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

1.2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

2. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta

2.1. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp.14.135.944.250,- (empat belas milyar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan setelah perubahan menjadi Rp. 14.064.671.340 (empat belas milyar enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah). Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1. di bawah.

Tabel 4.1. Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17
		Dinas Lingkungan Hidup				12.840.030.250,00	14.135.944.250,00	14.064.671.340,00					15.801.725.985,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.840.030.250,00	14.135.944.250,00	14.064.671.340,00					15.801.725.985,00	
	2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				12.840.030.250,00	14.135.944.250,00	14.064.671.340,00					15.801.725.985,00	
1	2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	80 Poin	80 Poin	10.802.123.200,00	11.118.037.200,00	7.731.046.350,00					13.319.199.730,00	
	2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	126.019.050,00	120.897.200,00	65.102.900,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		110.166.430,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	39.640.500,00	39.640.500,00	19.670.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			21.449.780,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	17.000.000,00	17.000.000,00	7.805.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Daerah - LRA			16.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.999.950,00	13.735.000,00	6.495.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			13.749.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	14.171.800,00	13.014.000,00	9.314.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)			12.099.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	13.499.600,00	13.499.600,00	5.807.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			11.133.870,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	25.707.200,00	24.008.100,00	16.010.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Daerah - LRA			35.233.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	7.396.212.350,00	7.686.475.200,00	4.522.070.000,00			-		8.772.810.035,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42/12 Orang/bulan	42/12 Orang/bulan	3.574.734.000,00	3.855.848.000,00	3.914.718.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan			4.561.600.120,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

														Perjanjian Kerja				
	2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	3.795.343.450,00	3.781.104.950,00	582.573.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			4.186.498.415,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	14.225.000,00	16.977.500,00	8.416.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			15.866.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	11.909.900,00	32.544.750,00	16.362.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			8.845.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.150,00	14.018.250,00	6.325.750,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		23.144.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12.000.150,00	14.018.250,00	6.325.750,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)			23.144.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	111.450.150,00	130.350.150,00	101.475.600,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		116.957.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	290 Paket	290 Paket	91.450.000,00	110.350.000,00	91.450.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			103.757.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.150,00	20.000.150,00	10.025.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			13.200.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)	100 %	100 %	533.678.000,00	538.232.900,00	363.720.800,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		633.389.845,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.383.000,00	8.930.000,00	8.930.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)			20.980.520,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	15 Paket	110.305.800,00	114.105.800,00	69.306.800,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			153.296.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	44.097.500,00	44.097.500,00	44.097.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			33.459.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	33.112.000,00	33.112.000,00	17.096.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)			36.140.830,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	77.689.700,00	78.667.600,00	46.590.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			79.159.245,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)			19.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Daerah - LRA			22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6 Laporan	12.600.000,00	12.600.000,00	6.300.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Daerah - LRA			38.115.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	11 Laporan	209.490.000,00	208.720.000,00	121.236.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)			230.439.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah	67 Unit	67 Unit	739.895.500,00	739.895.500,00	721.877.300,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		1.611.130.620,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)			1.540.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit	19 Unit	42.895.500,00	42.895.500,00	24.877.300,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			42.165.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)			28.965.420,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	265.200.000,00	264.000.000,00	228.000.000,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		285.670.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	265.200.000,00	264.000.000,00	228.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)			285.670.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	1.617.668.000,00	1.624.168.000,00	1.752.184.000,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		1.765.931.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	44.530.000,00	44.530.000,00	44.530.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Daerah - LRA			48.983.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	57 Unit	1.530.138.000,00	1.530.138.000,00	1.658.154.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)			1.659.748.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	18.000.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Daerah - LRA			29.700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.150,00	430.000.150,00	389.588.000,00					235.000.000,00	
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya Ranperda Dokumen RPPLH Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.150,00	200.000.150,00	174.662.000,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.01	0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.150,00	200.000.150,00	174.662.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Updating KLHS Tata Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	230.000.000,00	214.926.000,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		235.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang	-	1 Dokumen	0,00	230.000.000,00	214.926.000,00	Kab. Lampung Selatan,	Dana Alokasi			235.000.000,00	DINAS LINGKUN

							Kabupaten/Kota yang Disusun						Natar, Semua Kel/Desa	Umum (DAU)				GAN HIDUP
3	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase Peningkatan Nilai IKA, IKU dan IKL dibanding dengan Tahun Lalu	100 %	100 %	760.000.000,00	1.510.000.000,00	1.326.795.000,00					861.000.000,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan IKA, IKU, IKL dan Emisi Gas Rumah Kaca	4 Laporan	4 Laporan	760.000.000,00	1.510.000.000,00	1.326.795.000,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		861.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	310.000.000,00	310.000.000,00	242.114.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Daerah - LRA			341.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	114.636.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Daerah - LRA			220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	1.000.000.000,00	970.045.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase luas RTH yang dikelola	20 %	20 %	250.000.000,00	250.000.000,00	228.200.140,00					275.000.000,00	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan RTH di Kabupaten Lampung Selatan	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	228.200.140,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		275.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8.1 Ha	8.1 Ha	250.000.000,00	250.000.000,00	228.200.140,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Penghematan Belanja Pajak Air Tanah			275.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

5	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Presentase Ketaatan usaha/kegiatan dalam pengelolaan TPS LB3	60 %	60 %	40.000.000,00	40.000.000,00	20.035.400,00					44.000.000,00	
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang melaporkan data timbulan LB3	40 Usaha	40 Usaha	40.000.000,00	40.000.000,00	20.035.400,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		44.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	20.035.400,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			44.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Presentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap PUU Lingkungan Hidup	65 %	65 %	80.000.000,00	80.000.000,00	56.520.000,00					110.000.000,00	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang lingkungan hidup	80 Perusahaan	80 Perusahaan	80.000.000,00	80.000.000,00	56.520.000,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	80 Badan Usaha	80 Badan Usaha	80.000.000,00	80.000.000,00	56.520.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

7	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Presentase Sekolah yang memenuhi kriteria sekolah adiwiyata tingkat propinsi	100 %	100 %	120.000.000,00	120.000.000,00	3.310.200.000,00					200.000.000,00	
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat kabupaten	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	3.310.200.000,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	3.260.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Air Tanah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	150 Orang	150 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase tindak Lanjut penanganan Pengaduan LH sesuai Perundang - uandangan	100 %	100 %	71.000.000,00	71.000.000,00	41.441.500,00					77.000.000,00	
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	10 Kasus	10 Kasus	71.000.000,00	71.000.000,00	41.441.500,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		77.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10 Pengaduan	10 Pengaduan	71.000.000,00	71.000.000,00	41.441.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pajak Air Tanah			77.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah sampah yang tertangani	71 %	71 %	516.906.900,00	516.906.900,00	931.134.950,00					680.526.255,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Laporan Pengelolaan Sampah Kabupaten	1 Laporan	1 Laporan	356.906.900,00	356.906.900,00	851.179.950,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		480.526.255,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5 Kelompok	5 Kelompok	69.821.400,00	69.821.400,00	85.738.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Daerah - LRA			77.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	12 Unit	12 Unit	287.085.500,00	287.085.500,00	765.441.450,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Retribusi Daerah - LRA Penghematan Belanja Dana Alokasi Umum (DAU)			403.526.255,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Laporan Lembaga Swasta yang bekerjasama dalam pengelolaan sampah	1 Laporan	1 Laporan	160.000.000,00	160.000.000,00	79.955.000,00			Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.03	0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	160.000.000,00	160.000.000,00	79.955.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	J U M L A H									**12.840.030.250,00**	**14.135.944.250,00**	**14.064.671.340,00**					**15.801.725.985,00**	

4.2. Sinkronisasi Prioritas Perangkat Daerah dengan Prioritas Derah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Singkronisasi Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Prioritas Derah dan sinkronisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) ditunjukan pada tabel 4.2.1 dan Tabel 4.2.2., semua program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup mendukung Prioritas Daerah dalam mencapai target RPJMD

Tabel 4.2.1. Sinkronisasi Prioritas Perangkat Daerah dengan Prioritas Daerah Tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Pagu anggaran Sebelum Perubahan	Pagu anggaran Setelah Perubahan	Ket.
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	APBD	200.000.150	174.662.000	
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	APBD	230.000.000	214.926.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	APBD	310.000.000	242.114.000	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	APBD	200.000.000	114.636.000	
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	APBD	1.000.000.000	970.045.000	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	APBD	250.000.000	228.200.140	

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Pagu anggaran Sebelum Perubahan	Pagu anggaran Setelah Perubahan	Ket.
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	APBD	40.000.000	20.035.400	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	APBD	80.000.000	56.520.000	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	APBD	70.000.000	3.260.200.000	
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	APBD	50.000.000	50.000.000	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	APBD	71.000.000	41.441.500	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	APBD	69.821.400	85.738.500	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	APBD	287.085.500	765.441.450	

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Pagu anggaran Sebelum Perubahan	Pagu anggaran Setelah Perubahan	Ket.
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	APBD	160.000.000	79.955.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	APBD	39.640.500	19.670.500	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	APBD	17.000.000	7.805.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	APBD	13.735.000	6.495.500	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	APBD	13.014.000	9.314.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	APBD	13.499.600	5.807.300	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	APBD	24.008.100	16.010.600	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	APBD	3.855.848.000	3.914.718.000	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	APBD	3.781.104.950	582.573.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	APBD	16.977.500	8.416.500	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	APBD	32.544.750	16.362.500	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	APBD	14.018.250	6.325.750	

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Pagu anggaran Sebelum Perubahan	Pagu anggaran Setelah Perubahan	Ket.
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	APBD	110.350.000	91.450.000	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	APBD	20.000.150	10.025.600	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	APBD	8.930.000	8.930.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD	114.105.800	69.306.800	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	APBD	44.097.500	44.097.500	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	APBD	33.112.000	17.096.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	APBD	78.667.600	46.754.500	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	APBD	18.000.000	30.000.000	
		Penyediaan Bahan/Material	APBD	20.000.000	20.000.000	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	APBD	12.600.000	6.300.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	APBD	208.720.000	121.236.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD	650.000.000	650.000.000	
		Pengadaan Mebel	APBD	42.895.500	24.877.300	

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Pagu anggaran Sebelum Perubahan	Pagu anggaran Setelah Perubahan	Ket.
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD	47.000.000	47.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD	264.000.000	228.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	APBD	44.530.000	44.530.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD	1.530.138.000	1.658.154.000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD	24.500.000	24.500.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	APBD	25.000.000	25.000.000	

Tabel 4.2.2. Sinkronisasi Prioritas Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Kabupaten Lampung Selatan

No	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Pagu anggaran Sebelum Perubahan	Pagu anggaran Setelah Perubahan	Ket.
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN	Pencegahan Pencemaran dan/atau	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	APBD	310.000.000	242.114.000	

No	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Pagu anggaran Sebelum Perubahan	Pagu anggaran Setelah Perubahan	Ket.
		DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	APBD	1.000.000.000	970.045.000	
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	APBD	310.000.000	242.114.000	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	APBD	200.000.000	114.636.000	
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	APBD	250.000.000	228.200.140	
	Presentase Penanganan Sampah	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	APBD	40.000.000	20.035.400	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	APBD	69.821.400	85.738.500	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	APBD	287.085.500	765.441.450	
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	APBD	160.000.000	79.955.000	

BAB V.
PENUTUP

Failing to plan is planning to fail; kegagalan kita dalam merencanakan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sama dengan merencanakan kegagalan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.

Renja Perubahan PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di Tahun 2025. Renja Perubahan PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

Renja PD ini harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di Tahun 2025.

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan untuk proving (membuktikan) kinerja dan untuk improving (memperbaiki) kinerja.

Saat penjabaran Renja Perubahan ini ke dalam RKA Perubahan, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA Perubahan yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya.

Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Pelajaran yang kita dapatkan dari pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalitas pencapaian target tahunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian dukungan semua pemangku kepentingan dan tersedianya anggaran yang memadai. Melalui Renja Perubahan ini diharapkan agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan serta seluruh aparat dapat

melaksanakan tugas secara terarah, terintegrasi, bertahap dan berkelanjutan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Demikian Renja tahun ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu meridhai semua langkah kita. Aamiin … Aamiin YRA.

Kalianda, Agustus 2025
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lampung Selatan

Yudhius Irza, S.Hut.,M.M
Pembina
NIP. 19830729 200902 1 001

RENJA
RENCANA KERJA PERUBAHAN



2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jl. Mustafa Kemal No. 27 Kalianda

dukcapil_lamsel dukcapil_lamsel dukcapil_lamsel pake-oli.lampungselatankab.go.id

DAFTARISI

Halaman

DaftarIsi …….

KataPengantar …….

BAB I **PENDAHULUAN** ……..

1.1 Latar Belakang…….....

1.2 LandasanHukum …….....

1.3 MaksuddanTujuan.....…….....

1.3.1 Maksud .....

1.3.2 Tujuan .....

1.4 Sistematika Penulisan .....…….....

BAB II **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**…….....

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Perangkat Daerah Tahun Lalu …….....

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan ……..

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu ……

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah…….....

2.3 Isu-isu Penting PenyelenggaraanTugasdanFungsi Perangkat Daerah …….....

2.4 Review TerhadapRancanganAwal RKPD …….....

2.5 Penelaahan UsulanProgram dan Kegiatan Masyarakat.....

BAB III **TUJUAN DAN SASARAN** …….....

3.1 TelaahanTerhadap Kebijakan Nasional …….....

3.2 TujuandanSasaran Renja Perangkat Daerah …….....

3.5 Program dan Kegiatan Prioritas …….....

BAB IV **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH** .....

BAB V **PENUTUP**…….....

KATAPENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap Bidang dan Seksi serta usulan dari berbagai pihak.

Rencana Kerja Perubahan sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja Perubahan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2025, serta sebagai acuan untuk pembangunan tahap tahun selanjutnya.Terimakasih.

Kalianda, September 2025
Kepala Dinas
KependudukandanPencatatanSipil
KabupatenLampungSelatan

Drs.EDYFIRNANDI,M.Si
PembinaUtamaMuda
NIP. 196612061986021002

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Keterrkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Gambar 1.2 Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD

Daftar Tabel

Tabel	2.1.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Lampung Selatan
Gambar	2.2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan
Gambar	2.4.1	Review tehadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan
Gambar	2.5.1	Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan / masyrakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Siipil Tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan
Gambar	3.3.1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025
Gambar	4.1	Rencana Prgram dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

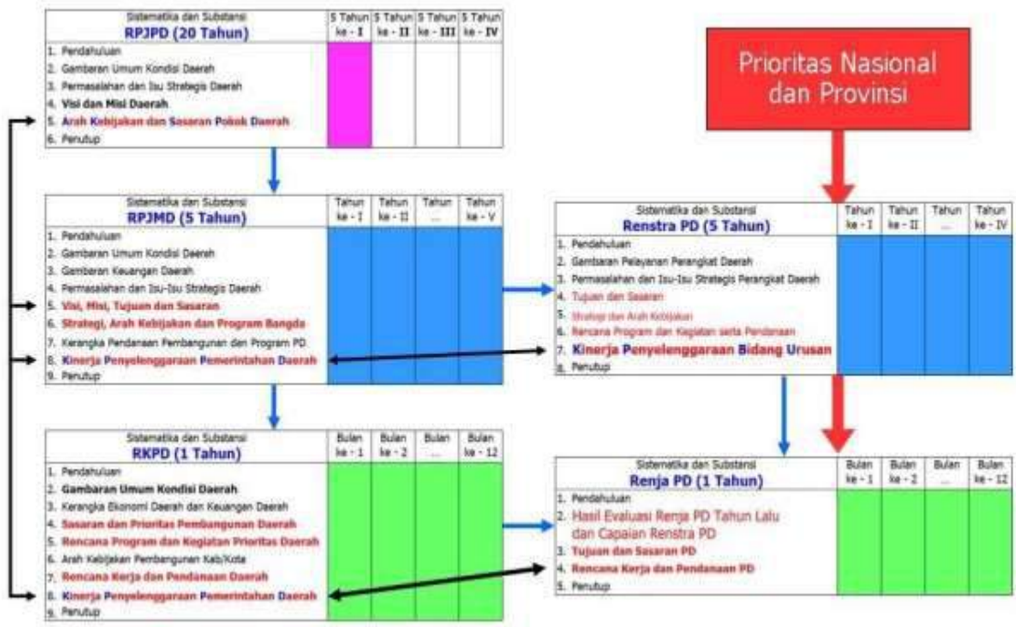
Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat penting dalam system perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangka Daerah berperan penting dalam setiap kinerja suatu Perangkat Daerah dalam memaksimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya..

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dimaksudkan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 - 2026 yang merupakan operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan

Untuk keperluan tersebut maka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dari hasil evaluasi tersebut maka diketahui target pencapaian masing-masing program dan kegiatan. Langkah selanjutnya adalah melakukan perbaikan terhadap pencapaian kinerja yang belum optimal melalui kegiatan-kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berjalan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1

Gambar1.1. Keterkaitan Dokumen Renja PD denganDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

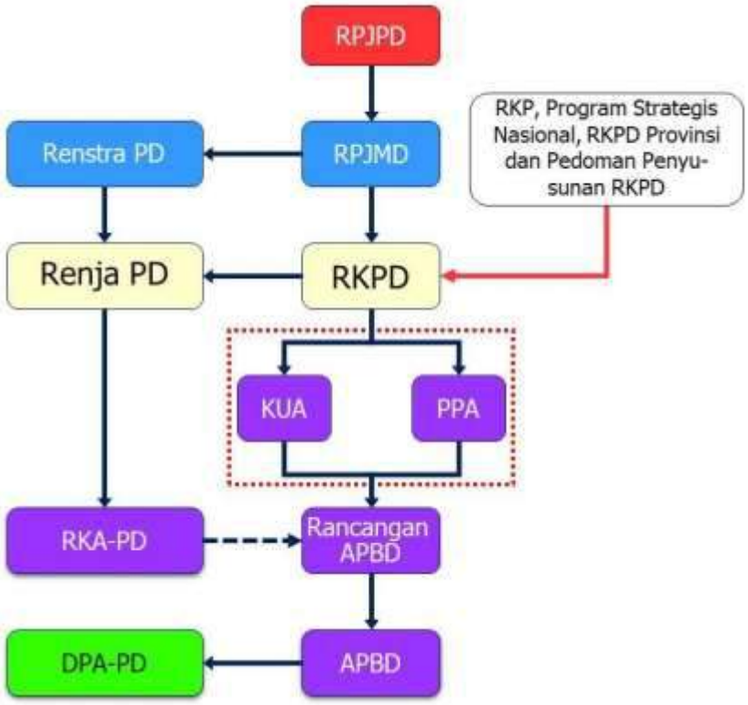


Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja PD,
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD berpedoman pada Renstra PD,evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja PerangkatDaerah tahunberjalan,
3. Penyusunan Rancangan Renja PD berdasarkan berdasarkan surat edaranKepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah danRancangan Awal RKPD,
4. Pembahasan Rancangan Renja PD dalam Forum Perangkat Daerah / lintasPerangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman targetkinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD,
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah,paling lambat 1(satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan

Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan PembangunanDaerah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1. Sedangkan tindak lanjut dokumen Renja PD hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar1.2.

Gambar1.2. Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD



Renja Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 disusun berpedoman kepada Renstra Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025. Dokumen rancangan RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berupa program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah dan/atau lintas perangkat daerah; landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2 LandasanHukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 adalah:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang KeuanganNegara;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
d. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah , sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah;

e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 TentangPerangkat Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dibah dengan Peraturan menteri
   Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata CaraEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
   Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ Tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
m. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMDProvinsi Lampung Tahun 2019 -2024;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04);
o. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatansebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung SelatanNomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor10);

p. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
q. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
r. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3 Maksud danTujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjadi dokumen perencanaan komprehensif sekaligus sebagai pedoman perencanaandan acuan pelaksanaan kegiatan aparatur Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Lampung Selatan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 ini adalah: menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasionil:

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2025;
b. Mewujudkan sinergitas dan menentukan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi prioritas pelaksanaan pelayanan Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
c. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan laporan kinerja.

1.4 SistematikaPenulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaianRenstra Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkatdaerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah,hasil review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulanprogram dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran Renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu Program pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) sesuai dengan bidang urusan Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKATDAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BABII
EVALUASIHASILPELAKSANAANRENJA PERANGKATDAERAHTAHUNLALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dalam menyusun Renja yang berkualitas,diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu yang dikaitkandengan pencapaian Renstra.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasipencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauhmana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dan hambatan /permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 yang berpedoman pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029, dan perkiraan capaiannya di tahun 2023.

2.11. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (tahun 2023) dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (2024).

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 tersaji pada Tabel 2.1.1 berikut:

Tabel 2.1 .1 **Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11=(10/4)*
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**								
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100	10 dokumen	30 dokumen	60,00
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	36 dokumen	60,00
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian	140 org/bln	28 orang	25 orang	25 orang	100	100 %	153 orang/bln	109,29
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100,00
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Barang Milik Daerah	58 unit	6 unit	50 unit	50 unit	100	27 unit	83 unit	143,10
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	200 %	200,00
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	215 unit	34 unit	71 unit	71 unit	100	73 unit	178 unit	82,79

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10 = (7+9)*	*11=(10/4)*
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%) ,**	**99,50**	**98**	**99,40**	**98,34**	**98,93**	**99,5**	**99,5**	**100,00**
						Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	**90**	**81**	**50,00**	**35,15**	**70,30**	**50**	**50**	**55,56**
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan KTP elektronik	350.000 keping	69.837 keping	86.000 keping	73.181 keping	85,09	76.000 keping	219.018 keping	62,58
						Jumlah Perekaman KTP-elektronik	100.000 orang	19.455 orang	25.000 orang	23.446 orang	93,78	25.000 orang	67.901 orang	67,90
						Jumlah Penerbitan KIA	85.000 keping	16.694 keping	12.000 keping	7.278 keping	60,65	10.000 keping	33.972 keping	39,97
						Identitas Kependudukan Digital	195.244 orang	1.563 orang	30.000 orang	31.000 orang	103,33	35.000 orang	67.563 orang	34,60
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Sosialiasi, Komunikasi dan Kerjasama terkait Pendaftaran	66 laporan	6 laporan	2 laporan	2 laporan	100	4 laporan	12 laporan	18,18
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran**	**100**	**99,85**	**98,00**	**99,4**	**101,43**	**99**	**99**	**99,00**
						Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	**85**	**99,57**	**81,35**	**97,09**	**119,35**	**83**	**83**	**97,65**
						Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	**85**	**94,29**	**82,00**	**93,87**	**114,48**	**84**	**84**	**98,82**
						Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian	**88**	**80,00**	**83,00**	**60**	**72,29**	**85**	**85**	**96,59**
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran	175.000 dokumen	35.945 dokumen	50.671 dokumen	44.533 dokumen	87,89	51.178 dokumen	131.656 dokumen	75,23
						Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan	1.025 dokumen	330 dokumen	850 dokumen	333 dokumen	39,18	350 dokumen	1.013 dokumen	98,83
						Jumlah Penerbitan Akta Kematian	17.500 dokumen	8.264 dokumen	8.000 dokumen	5.495 dokumen	68,69	6.500 dokumen	20.259 dokumen	115,77
						Jumlah Penerbitan Akta Perceraian	75 dokumen	12 dokumen	15 dokumen	23 dokumen	153,33	15 dokumen	50 dokumen	67
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Sosialisasi, terkait Pencatatan Sipil	375 laporan	12 laporan	2 laporan	2 laporan	100	4 laporan	18 laporan	4,80
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Penyajian Database Kependudukan**	**83,50**	**75,55**	**80,15**	**75,55**	**94,26**	**81,35**	**81,35**	97,43
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pemanfaatan Database Kependudukan bagi seluruh OPD di Kab Lamsel	90 dokumen	15 dokumen	20 dokumen	9 dokumen	45	20 dokumen	44 dokumen	48,89
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Aministrasi Kependudukan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	68,4	100 %	100	100	100	100	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10 = (7+9)*	*11=(10/4)*
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase Profile Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	375 dokumen	100 dokumen	75 dokumen	75 dokumen	100	100 dokumen	275 buku	73,33

2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (tahun 2023)

Capaian hasil pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga tahun lalu (Tahun 2023) adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.1 di atas pada subbab 2.1.1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu OPD yang memiliki basis kinerja untuk memberikan pelayanankepada masyarakat, Keberhasilan dalam pelaksanaan Renja tentunya akan berdampak langsungpada pelayanan yang diberikan pada masyarakat.

Analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang merupakan indikator sasaran strategisebagaimana tercantum pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2023, dengan menyandingkan data realisasi tahun 2022 sebagaimana tabel 2.1.1. berikut.

Tabel 2.1.1

Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan

No	Indikator Kinerja	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Penerbitan KTP-el			97,50	98,00	98,50	99,00	99,80	98,34	98,50	99,70	Persentase Pencapaian sebesar 100,3% Lebih Besar dari target yang ditentukan
2	Persentase Penerbitan KK			95,00	96,00	97,00	98,00	99,74	97,46	97,00	98,00	Persentase Pencapaian sebesar 102 % Lebih Besar dari target yang ditentukan
3	Persentase Penerbitan KIA		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	80,00	81,00	85,00	88,00	98,20	35,15	85,00	88,00	Persentase Pencapaian sebesar 43 % dari Lebih Kecil target yang ditentukan
4	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran		Kepemilikan akta kelahiran	80,00	81,00	85,00	88,00	99,85	99,74	89,00	90,00	Persentase Pencapaian sebesar 123 % Lebih Besar dari target yang ditentukan
5	Persentase Penerbitan Akta Kematian			81,00	82,00	83,00	84,00	99,57	94,74	100,00	100,00	Persentase Pencapaian sebesar 116 % Lebih Besar dari target yang ditentukan
6	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan			80,75	81,35	82,00	83,00	94,29	98,52	85,00	86,00	Persentase Pencapaian sebesar 121 % Lebih Besar dari target yang ditentukan
7	Persentase Penerbitan Akta Perceraian			82,00	83,00	84,00	85,00	80,00	100,00	84,00	85,00	Persentase Pencapaian sebesar 120% Lebih Besar dari target yang ditentukan
8	Persentase OPD yang melakukan PKS dan Pemanfaatan Data		Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan	75,55	80,15	81,35	82,45	75,00	54,29	81,35	82,45	Persentase Pencapaian sebesar 68% Lebih Kecil dari target yang ditentukan
9	Identitas Kependudukan Digital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	15,88	25,00	35,00	

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

1. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik padaTahun 2023 target nasionalnya adalah 99,4 % realisasi penerbitan yang telah diupayakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung selatan adalah sebesar 98,34 %, hal tersebut dapat disajikan dalam table berikut :

No.	Indikator	Target Nasional			Realisasi		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik	100%	99,33%	99,4	103,73%	100,35%	98,34%

Realisasi penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) tidak memenuhi target dikarenakan keterbatasan Blangko KTP-el dari Dirjen Administrasi Kependudukan serta mulai digencarkan untuk Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan.

2. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Tahun 2023 target nasionalnya adalah 50 % realisasi penerbitan yang telah diupayakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung selatan adalah sebesar 35,15 %, hal tersebut dapat disajikan dalam table berikut :

No.	Indikator	Target Nasional			Realisasi		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak	30%	40%	50%	32,91 %	40,05 %	35,15%

Realisasi penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) tidak memenuhi target dikarenakan masih kurangnya atusias masyarakat dalam pembuatan Kartu Identitas Anak, kebermanfaatan KIA belum dirasakan oleh warga masyarakat.

3. Penerbitan Akta Kelahiran usia 0-18 merupakan salah Program kerja Pemerintah Jokowi-JK dalam Program NAWACITA yaitu menghadirkan Negara yang bekerja, memberikan Pelayanan, perlindungan, rasa aman dan beberapa kebijakan baru telah dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri dalam Bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam Pelaksanaan Program NAWACITA ini pada tahun 2023 Penerbitan Akta Kelahiran mempunyai target nasional sebesar 98,00%. Sedangkan hasil Realisasi penerbitan akta kelahiran usia 0-18 pada tahun 2023 sebesar 99%, secara lengkap target nasional cakupan akta kelahiran usia 0 -18 tahun disajikan pada tabel berikut ini:

No.	Indikator	Target Nasional			Realisasi		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	95%	97%	98%	97%	99 %	99,74%

4. Pemanfaatan Database Kependudukan menjadi perhatian pemerintah pusat, dengan target nasional pada tahun 2023 adalah 15 OPD, adapun realisasi nya adalah :

No.	Indikator	Target Nasional			Realisasi		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Pemanfaatan Database Kependudukan	80%	80%	15 OPD	31,43%	75 %	9 OPD

Realisasi OPD yang dapat memanfaatkan Database Kependudukan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dikarenakan terkendala izin hak akses oleh Dirjen Adminduk serta Pengguna Akses Data diwajibkan melaksanakan ISO 27001 yaitu ISO terkait sistem manajemen keamanan data yang memerlukan anggaran cukup besar.

Pemanfaatan Database yang sudah disetujui oleh Dirjen Kemendagri adalah Pemanfaatan Data dengan OPD, sedangkan pemanfaatan Database dengan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih dalam tahap persetujuan oleh Dirjen Adminduk, pada Tahun 2023 dari target 100 Desa di 17 Kecamatan telah terealisasi sebanyak 76 Desa dari 15 Kecamatan dengan rincian sbb :

NO	KECAMATAN	DESA
1	Way Sulan	Sukamaju
2	Way Sulan	Mekarsari
3	Way Sulan	Karang pucung
4	Way Sulan	Talang way sulan
5	Way Sulan	Sumber agung
6	Way Sulan	Purwodadi
7	Way Sulan	Banjarsari
8	Natar	Sukadamai
9	Natar	Pancasila
10	Natar	Rulung raya
11	Natar	Purwosari
12	Natar	Bandarejo
13	Candipuro	Bumi jaya
14	Candipuro	Sinar pasemah
15	Candipuro	Sidoasri
16	Candipuro	Beringin kencana
17	Candipuro	Karya mulya sari
18	Sidomulyo	Sidodadi
19	Sidomulyo	Sukamarga
20	Sidomulyo	Seloretno
21	Sidomulyo	Sidowaluyo
22	Sidomulyo	Sukamaju
	Sidomulyo	Kota dalam
23	Rajabasa	Banding

NO	KECAMATAN	DESA
24	Rajabasa	Way muli timur
25	Rajabasa	Cugung
26	Rajabasa	Way muli
27	Rajabasa	Canggung
28	Rajabasa	Hargo pancuran
29	Rajabasa	Tejang pulau sebesi
30	Sragi	Kedaung
31	Sragi	Bakti rasa
32	Sragi	Bandar agung
33	Sragi	Mandala sari
34	Sragi	Marga sari
35	Sragi	Marga jasa
36	Sragi	Sumber sari
37	Sragi	Sumber agung
38	Sragi	Kuala sekampung
39	Sragi	Sukapura
40	Ketapang	Berundung
42	Ketapang	Sidoasih
43	Ketapang	Kemukus
44	Ketapang	Sri pendowo
45	Ketapang	Bakauheni
46	Ketapang	Toto harjo
47	Palas	Bumi asih
48	Palas	Bumi daya
49	Palas	Palas pasemah
50	Palas	Pulau jaya
51	Palas	Bumi restu
52	Palas	Bumi asri
53	Palas	Palas aji
54	Palas	Pematang baru
55	Katibung	Babatan
56	Katibung	Trans tanjungan
57	Katibung	Sidomekar
58	Katibung	Tarahan
59	Katibung	Tanjung agung
60	Katibung	Rangai tri tunggal
61	Merbau Mataram	Talang jawa
62	Merbau Mataram	Puji rahayu
63	Merbau Mataram	Panca tunggal
64	Merbau Mataram	Lebung sari
65	Way Panji	Sidoarjo
66	Jati Agung	Sumber jaya
67	Jati Agung	Banjar agung
68	Jati Agung	Jati mulyo
69	Jati Agung	Marga agung
70	Tanjung Sari	Malang sari
71	Tanjung Sari	Purwodadi dalam
72	Tanjung Sari	Wonodadi
73	Tanjung Sari	Mulyosari
74	Tanjung Sari	Sidomukti
75	Penengahan	Kampung baru
76	Tanjung Bintang	Srikaton

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilaksanakan :

Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan Indikator ini adalah :

1. Komitmen semua pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan
2. Terdukungnya Sarana dan Prasarana dalam menunjang kegiatan administrasi kependudukan

3. Adanya dukungan dalam bidang penganggaran dan kebijakan yang memadai dari unsur pimpinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan stakholder lainnya dalam mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan

Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Indikator ini adalah :

1 Pelaksanaan kegiatan bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan;

2 Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi atau belum semua masyarakat paham terkait layanan online yang disediakan Disdukcapil Kab.Lampung Selatan

3 sarana dan prasarana yang belum diupgrade untuk percepatan layanan;

4 Kurang SDM terutama bila ada kegiatan dinas di lapangan/ jemput bola,

5 Kendala sistem (Gangguan jaringan dan koneksi internet, Gangguan teknis Aplikasi SIAK),

6 Beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari yang semula SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat dan focus keamanan data sejak Maret 2022 serta dihapusnya data kependudukan lokal sejak 1 November 2022 di masing masing Dukcapil daerah maka mengakibatkan beberapa kendala dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan dalam pemanfaatan data. Sehingga memperlambat proses pengelolaan data dalam menyusun laporan, pengaksesan maupun pemanfaatan data baik untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan maupun untuk kepentingan penduduk/pemohon.

7 Pengguna Akses Data diwajibkan melaksanakan ISO 27001 yaitu ISO terkait sistem manajemen keamanan data

Untuk menanggulangi kendala tersebut diatas diambil langkah-langkah (solusi):

1. Peningkatan kegiatan Pelayanan Keliling Jemput Bola dan Sosialisasi Administrasi Kependudukan.
2. Melatih SDM agar lebih professional dalam melaksanakan tugas pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan terhadap pemeberian layanan kepada masyarakat (Public Speaking).
3. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yg ada, melakukan perbaikan sarana dan prasarana sehingga dapat dipergunakan sementara waktu sampai dengan dilakukan pengadaan sarana dan prasarana yang baru.
4. Mengembangkan pelayanan PAKe-Oli (Pelayanan Administrasi Kependudukan Online) Pelayanan PAK-JAJA (Pelayanan Administrasi Kependudukan Jarak Jauh), Pelayanan Yanduksatlantas (Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk sakit, lansia dan disabilitas), Pelayanan Goes To School, Pelayanan Pak-Kades (Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa), Pelayanan Jebol Akper Manis (Pelayanan Jemput Bola Akta Perkawinan Gratis)

2.3 Isu-Isu Penting PenyelenggaraanTugasDanFungsi Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Renja Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan unsur pelaksana

Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah.

1. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan antara lain:

1) Permasalahan Internal
   a. Masih belum optimalnya kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk, terutama pada cakupan kepemilikan KTP-El dan kepemlikan KIA.
   b. Masih belum optimalnya kualitas pelayanan Pencatatan Sipil, terutama pada cakupan kepemilikan Akta Kelahiran diatas 18 tahun.
   c. Masih belum optimalnya kualitas pelayanan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan yang ditunjukkan dengan masih rendahnya jumlah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang sudah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan.
   d. Masih belum optimalnya kualitas pelayanan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten yang ditunjukkan dengan masih adanya data penduduk yang belum tervalidasi yang berpengaruh pada tingkat akurasi database kependudukan.
   e. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
   f. Sarana dan prasarana penunjang terkait administrasi dan pelayanan masih belum sepenuhnya memadai.
   g. Belum optimalnya penerapan semua inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
   h. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan sesuai dengan peraturan yang terbaru.

2) Permasalahan Eksternal
   a. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga masih banyak yang melakukan pencatatan dan/atau perubahan data hanya pada saat menjelang dibutuhkan.
   b. Belum maksimalnya kesamaan persepsi dan komitmen bersama antar Perangkat Daerah dalam pemanfaatan data kependudukan.
   c. Belum maksimalnya jaringan telekomunikasi (internet) dalam unsur pelayanan administrasi kependudukan.

2. Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Terhadap Capaian Program Nasional

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik, kinerja pelayanan Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan memberikan dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan capian program nasional.

Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021–2026 menetapkan tujuan "*Membangun tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, taat hokum, renponsif dan transparan*" sasaran strategis berupa "*Meningkatnya kualitas pelayanan publik*", dan indicator sasaran " *Indeks Kepuasan Masyarakat*"meliputi : Kepemilikan KTP-Elektronik, Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak), dan Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil.

1) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah
   Tujuan dan sasaran strategis kinerja pelayanan yang telah ditetapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan tersebut berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terutama pada pencapaian misi kelima, yaitu "*Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan public yang professional, transparan, efektif dan akuntabel*"

2) Dampak terhadap capaian Program Nasional
   Kinerja pelayanan yang telah ditetapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan berdampak terhadap kinerja capaian Program Nasional "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk" dengan indikator:
   a. Persentase cakupan kepemilikan KTP-El;
   b. Persentase cakupan kepemilikan KIA;
   c. Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-18 tahun;
   d. Pemanfaatan data kependudukan;
   e. Persentase Identitas Kependudukan Digital (IKD);

3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

1) Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah:
   a. Penyediaan database kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
   b. Kebutuhan database kependudukan semakin tinggi, sehingga membutuhkan sinkronisasi database kependudukan sebagai data tunggal pelayanan publik dan dapat diterapkan secara nyata dalam semua sektor pelayanan publik;
   c. Peningkatan cakupan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara menyeluruh;
   d. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;

e. Kesadaran hukum di masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga juga sangat berdampak terhadap kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
f. Peningkatan dan optimalisasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/unit kerja terkait.
h. Kendala sistem (Gangguan jaringan dan koneksi internet, Gangguan teknis Aplikasi SIAK),
i. Beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari yang semula SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat dan focus keamanan data sejak Maret 2022 serta dihapusnya data kependudukan lokal sejak 1 November 2022 di masing masing Dukcapil daerah maka mengakibatkan beberapa kendala dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan dalam pemanfaatan data.

   Sehingga memperlambat proses pengelolaan data dalam menyusun laporan, pengaksesan maupun pemanfaatan data baik untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan maupun untuk kepentingan penduduk/pemohon.
j. Pengguna Akses Data diwajibkan melaksanakan ISO 27001 yaitu ISO terkait sistem manajemen keamanan data.

2) Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah:
   a. Tersedianya database kependudukan terpusat (SIAK) yang akurat, terpadu, dan terpercaya dalam rangka memenuhi kebutuhan database kependudukan yang semakin tinggi;
   b. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), KTP-Elektronik, dan database kependudukan secara nyata hampir di semua sector pelayanan publik;
   c. Ketersediaan regulasi yang mengatur tentang administrasi kependudukan, serta regulasi struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang jelas;
   d. Pemanfaatan dokumen administrasi kepedudukan dan pencatatan sipil sebagai salah satu persyaratan dalam pelaksanaan pelayanan publik;
   e. Adanya komitmen daerah dalam bentuk prioritas pembangunan untuk pengambangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mendukung untuk menjawab tantangan pengelolaan system administrasi kependudukan;
   f. Tersedianya berbagai macam inovasi pelayanan yang sudah dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan, hal tersebut hanya perlu melakukan evaluasi dan perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan;
   g. Tersedianya regulasi yang jelas tentang pemanfaatan dan kerja sama data kependudukan;
   h. Adanya Komitmen dari Kepala Dinas dengan pejabat dan personil.

4. Formulasi Isu-Isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, sebagai berikut:

1. Rentang Kendali Pelayanan.
2. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan teknologi IT melalui Pelayanan Online
3. Keterbatasan pemeliharaan Perangkat Operasional Pendukung Pelayanan
4. Beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari yang semula SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat, maka mempengaruhi proses pengelolaan data, pengaksesan maupun pemanfaatan data baik untuk kepentingan pemerintah Kota maupun untuk kepentingan penduduk/pemohon;
5. Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD);
6. Peningkatan kualitas data kependudukan;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan mengusulkan untuk melaksanakan 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan, dan 37 (tiga puluh enam) sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 8.036.008.000 (Delapan milyar tiga puluh enam juta delapan ribu rupiah). Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan mengusulkan penambahan anggaran guna mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Disdukcapil yang masih belum tercapai terkendala terbatasnya anggaran, total pagu indikatif menjadi sebesar Rp. 8.316.570.925 (Delapan milyar tiga ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Renja Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5. (Tabel T-C . 31) Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan

No.	Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program /Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**8.036.008.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**8.316.570.925**	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**		**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**82 Point**	**6.952.203.300**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**82 Point**	**6.933.489.275**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**14 Dokumen**	**51.040.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**13 Dokumen**	**45.638.700**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.909.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.095.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.594.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.095.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.550.800	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.095.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.095.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.560.700	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	14.660.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10.525.500	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	7.498.500	

No.	Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Program /Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Administrasi Kkeuangan**	**12**	**Dokumen**	**5.974.875.850**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Administrasi Kkeuangan**	**12**	**Dokumen**	**5.717.153.775**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	orang/bulan	3.534.840.350	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	orang/bulan	2.979.248.975	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	2.429.971.500	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	2.732.958.700	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	5.032.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	2.428.100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera	17	Laporan	5.032.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	17	Laporan	2.518.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Administrasi Kepegawaian**	**100**	**%**	**28.892.500**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Administrasi Kepegawaian**	**0**	**%**	**-**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90	paket	28.892.500	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	paket	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Administrasi Umum**	**100**	**%**	**429.001.750**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Administrasi Umum**	**100**	**%**	**729.739.600**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	3.814.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	3.814.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	paket	232.225.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	paket	634.707.400	

No.	Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program /Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 paket	7.011.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	7.011.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	27.128.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	9.656.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	21.638.750	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	10.836.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 dokumen	18.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	18.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 laporan	30.758.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	2.945.600	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kalianda Kab. Lampung Selatan, Bandar Lampung, DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	73.410.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kalianda Kab. Lampung Selatan, Bandar Lampung, DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	37.604.500	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 dokumen	15.016.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	5.165.100	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Barang Milik Daerah**	**100 %**	**46.063.200**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Barang Milik Daerah**	**100 %**	**6.427.200**	
	Pengadaan Mebel	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 unit	46.063.200	Pengadaan Mebel	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	6.427.200	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		**Jasa Penunjang urusan kantor**	**100 %**	**126.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**		**Jasa Penunjang urusan kantor**	**100 %**	**144.000.000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	126.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	144.000.000	

No.	Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program /Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**100 unit**	**296.330.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**67 unit**	**290.530.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	43.730.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	43.930.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	190.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	193.600.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	93 unit	37.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 unit	28.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	25.000.000	
II.	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		**Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk**	**99 %**	**740.820.200**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		**Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk**	**99 %**	**1.098.194.950**	
	Pelayanan		Jumlah Penerbitan KTP Jumlah Perekaman KTP- Jumlah Penerbitan KIA Identitas Kependudukan Digital	86000 Keping 25000 Orang 25000 Keping 35000 Orang	**513.072.000**	**Pelayanan Pendaftaran**		Jumlah Penerbitan KTP Jumlah Perekaman KTP- Jumlah Penerbitan KIA Identitas Kependudukan Digital	86000 Keping 25000 Orang 25000 Keping 35000 Orang	**939.271.250**	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	8 laporan	513.072.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 laporan	939.271.250	
	Penataan Pendaftaran Penduduk		**Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran**	**100 %**	**207.748.200**	**Penataan Pendaftaran Penduduk**		**Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran**	**100 %**	**148.846.000**	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	8 Dokumen	207.748.200	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran	Kalianda Kab. Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	8 Dokumen	148.846.000	

No.	Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program /Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		**Jumlah Sosialiasi, Komunikasi dan Kerjasama terkait Pendaftaran Penduduk**	**3 laporan**	**20.000.000**	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**		**Jumlah Sosialiasi, Komunikasi dan Kerjasama terkait Pendaftaran Penduduk**	**3 laporan**	**10.077.700**	
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Lampung Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	3 laporan	20.000.000	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Lampung Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	2 laporan	10.077.700	
III.	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		**Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil**	**99 %**	**125.836.500**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		**Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil**	**99 %**	**71.598.500**	
	Pelayanan Pencatatan Sipil		**Penerbitan Akta Kelahiran** **Penerbitan Akta Perkawinan** **Penerbitan Akta Kematian** **Penerbitan Akta Perceraian**	**51689 dokumen** **350 dokumen** **6000 dokumen** **15 dokumen**	**105.836.500**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**		**Penerbitan Akta Kelahiran** **Penerbitan Akta Perkawinan** **Penerbitan Akta Kematian** **Penerbitan Akta Perceraian**	**25000 dokumen** **350 dokumen** **6000 dokumen** **15 dokumen**	**62.124.600**	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Lampung Selatan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6 layanan	80.630.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Lampung Selatan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5 layanan	48.624.600	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	3 dokumen	25.206.500	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 dokumen	13.500.000	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		**Jumlah Sosialiasi, Komunikasi dan Kerjasama terkaiT Pencatatan Sipil**	**100 %**	**20.000.000**	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**		**Jumlah Sosialiasi, Komunikasi dan Kerjasama terkaiT Pencatatan Sipil**	**100 %**	**9.473.900**	
	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Lampung Selatan	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	3 Laporan	20.000.000	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Lampung Selatan	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	2 Laporan	9.473.900	
IV.	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI**		**Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan penyajian Database Kependudukan**	**100 %**	**192.159.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI**		**Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan penyajian Database Kependudukan**	**100 %**	**200.793.200**	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan		**Pemanfaatan Database Kependudukan bagi seluruh**	**15 OPD**	**53.171.000**	**Pengumpulan Data Kependudukan dan**		**Pemanfaatan Database Kependudukan bagi seluruh**	**15 OPD**	**40.162.000**	
	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	15 dokumen	53.171.000	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	15 dokumen	40.162.000	

No.	Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program /Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Pengelolaan		**Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi**	**100 %**	**138.988.000**	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi**		**Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi**	**100 %**	**160.631.200**	
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 laporan	68.368.000	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 laporan	106.952.700	
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan		Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	3 laporan	70.620.000	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	3 laporan	53.678.500	
V.	**PROGRAM PENGELOLAAN**		**Profile Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**100 %**	**24.989.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN**		**Profile Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**100 %**	**12.495.000**	
	Penyusunan Profil Kependudukan		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**100 dokumen**	**24.989.000**	**Penyusunan Profil Kependudukan**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**50 buku**	**12.495.000**	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	100 dokumen	24.989.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 dokumen	12.495.000	
JUMLAH					**8.036.008.000**	**JUMLAH**				**8.316.570.925**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah tersebut kemudian diperoleh aspirasi program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan. Pada Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan, tidak ada usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan selaku Perangkat Daerah, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan hanya bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Selatan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		NIHIL			

BABIII
TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*.

Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Kemudian prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan hasil telaahan Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, terdapat penjelasan yang terkait dengan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan, yaitu poin ketiga, “Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing”, dengan uraian manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, yang salah satunya melalui penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:

1. Percepatan cakupan administrasi kependudukan;
2. Integrasi sistem administrasi kependudukan;
3. Pendampingan dan layanan terpadu; dan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 poin D.4. Hal Khusus Lainnya nomor 6 (enam) juga menyebutkan hal yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan, yaitu dalam rangka mendukung peningkatan kualitas layanan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain:

1. Dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya paling sedikit:
   a. Kartu Keluarga (KK);
   b. KTP Elektronik (KTP-el);
   c. Akta Kelahiran;
   d. Akta Perkawinan;
   e. Akta Kematian; dan
   f. Surat Keterangan Pindah.
2. Penertbitan dokumen kependudukan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota;
3. Batas waktu penyelesaian dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota menyediakan fasilitas untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan;
5. Fasilitas peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan paling sedikit:
   a. menyediakan layanan nomor telepon pengaduan (call center);
   b. menyediakan nomor telepon pengaduan;
6. Bupati/Wali Kota wajib memfasilitasi peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan.

Selain memperhatikan kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Disdukcapil Kabupaten Llampung Selatan juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan tema, prioritas, dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025–2029 yang disusun dengan memperhatikan visi, misi, dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025–2029. Visi Kabupaten Lampung Selatan periode 2025-2029 adalah "**Mewujudkan Lampung Selatan Maju Menuju Indonesia Emas 2045**", dimana visi tersebut didukung melalui 7 (tujuh) misi.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menjabarkan masing-masing misi ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil telaahan misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025–2029, yang terkait dengan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

Misi ke 3 (Tiga)	:	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance
Tujuan yang akan dicapai yaitu	:	Tata Kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance.
Dan sasaran yang ingin dicapai yaitu	:	Peningkatan tata Kelola pemerintahan berbasis digital

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatann Tahun 2025–2029 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025–2029. Guna menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran Renja Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025- 2029. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025- 2029 yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 yaitu:

Tujuan	:	Terwujudnya layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien
Indikator tujuan	:	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan
Sasaran 1	:	Meningkatnya Kualitas layanan Kepenuddukan dan Pencatatan Sipil secara Digital dengan kategori Sangat Baik
Indikator Sasaran 1	:	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sasaran 2	:	Meningkatnya Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan Berbasis Teknologi
Indikator Sasaran 2	:	Pemanfaatan Data Kependudukan
Strategi 1	:	1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menyederhanakan, mempercepat, dan memperluas akses layanan administrasi kependudukan secara digital; 2. Mendorong inovasi layanan publik yang adaptif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Strategi 2	:	1. Meningkatkan keterbukaan informasi layanan melalui publikasi Standar Pelayanan Publik dan kinerja secara berkala; 2. Mengembangkan sistem pengaduan masyarakat yang mudah diakses, cepat ditindaklanjuti, dan terintegrasi.
Strategi 3	:	1. Meningkatkan jangkauan pelayanan melalui program pelayanan keliling dan kunjungan langsung ke masyarakat, khususnya kelompok rentan dan daerah yang sulit dijangkau;

2. Menguatkan kolaborasi dengan kecamatan, kelurahan, dan stakeholder terkait untuk memastikan layanan administrasi kependudukan hadir di setiap lapisan masyarakat

Strategi 4 :
1. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang aksesibel dan ramah bagi penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya
2. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi hak-hak kependudukan bagi penyandang disabilitas untuk memastikan kesetaraan akses terhadap layanan

Strategi 5 :
1. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan, sertifikasi, dan penguatan etika pelayanan public
2. Mengembangkan tata kelola pelayanan yang berbasis data akurat dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan

Arah kebijakan :
1. **Digitalisasi dan inovasi pelayanan publik**. Kebijakan tersebut dalam rangka pencapaian sasaran peningkatan kualitas layanan berbasis digital dan data;
2. **Peningkatan transparansi dan pengaduan masyarakat**. Kebijakan tersebut dalam rangka pencapaian sasaran peningkatan pemanfaatan sarana pengaduan dan keterbukaan informasi pelayanan.
3. **Pelayanan pro aktif dan jemput bola**. Kebijakan tersebut dalam rangka pencapaian sasaran peningkatan capaian pelayanan proaktif dan jemput bola dan peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
4. **Pelayanan inklusif dan ramah disabilitas**. Kebijakan tersebut dalam rangka pencapaian sasaran peningkatan aksesibilitas layanan bagi kelompok rentan;
5. P**eningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM)**. Kebijakan tersebut dalam rangka pencapaian sasaran peningkatan kualitas dan Kinerjaparatur pelayanan.

Inovasi-inovasi pelayanan : 1. Pelayanan Keliling Jemput Bola (JEBOL PAKDE)
2. Pelayanan PAK-CAMAT (Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan
3. Pelayanan PAKe-Oli (Pelayanan Administrasi Kependudukan Online)
4. Pelayanan Tim 86 (Tim Reaksi Cepat)
5. Pelayanan PAK-JAJA (Pelayanan Administrasi Kependudukan Jarak Jauh)
6. Pelayanan TAMU (Tatap Muka)
7. Pelayanan Terpadu
8. Pelayanan Kemitraan
9. Pelayanan Yanduksatlantas (Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk sakit, lansia dan disabilitas)
10. Pelayanan Goes To School
11. Pelayanan Pak-Kades (Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa)
12. Pelayanan Jebol Akper Manis (Pelayanan Jemput Bola Akta Perkawinan Gratis)

3.3. Program dan Kegiatan

1. Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Petimbangan terhadap Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 "Mewujudkan tata Kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance",

Guna mendukung Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 tersebut, maka Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan 5 (lima) program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

2. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Secara garis besar, rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 8.316.570.925 (Delapan milyar tiga ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah), yang sumber

pendanaannya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung SelatanTahun Anggaran 2025.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirumuskan dalam Renja Disdukcapil Kabupaten Lampung SelatanTahun 2025 dilaksanakan oleh sekretariat dan bidang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat, menjalankan tugas pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui 1 (satu) program 6 (enam) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan :

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, menjalankan tugas penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Identitas Penduduk, Pindah Datang Penduduk, dan Pendataan Penduduk, melalui 1 (satu) program 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan :

3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, menjalankan tugas penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pencatatan Kelahiran, Perkawinan dan Perceraian, Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian, melalui 1 (satu) program 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.

4. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, menjalankan tugas penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kerja Sama, Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, dan Inovasi Pelayanan, melalui 1 (program) 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan:

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, menjalankan tugas dan fungsi penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Pengolahan Data dan Penyajian Data, Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi, melalui 2 (dua) program 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan:

3. Penjelasan Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tidak Sesuai dengan Rancangan Awal RKPD

Dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan mengusulkan untuk melaksanakan 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan, dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 8.036.008.000 (Delapan milyar tiga puluh enam juta delapan ribu rupiah). Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan mengusulkan penambahan anggaran guna mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Disdukcapil yang masih belum tercapai terkendala terbatasnya anggaran, total pagu indikatif menjadi sebesar Rp. 8.316.570.925 (Delapan milyar tiga ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah) untuk melaksanakan 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam), merupakan Hasil analisis kebutuhan Renja Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

Rumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 (T-C.33) Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
							Lokasi Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**8.316.570.925**				**8.539.296.650**
2	**12**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**		**A (88,75/3,55) point**	**6.933.489.275**			**A (89,505/3,58) point**	**7.154.213.700**
2	**12**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**11 dokumen**	**45.638.700**			**11 dokumen**	**47.877.000**
2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	3 dokumen	10.909.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 dokumen	10.909.000
2	12	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	1 dokumen	3.594.200	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 dokumen	4.594.200
2	12	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	1 dokumen	3.550.800	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 dokumen	4.550.800
2	12	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	1 dokumen	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 dokumen	5.000.000
2	12	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	1 dokumen	4.560.700	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 dokumen	5.000.000
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	4 laporan	10.525.500	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 laporan	10.210.200
2	12	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	2 laporan	7.498.500	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 laporan	7.612.800

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026		
							Lokasi Kegiatan	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	
2	**12**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**		**19**	**dok/laporan**	**5.717.153.775**			**31**	**dok/laporan**	**5.944.152.400**
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	24	orang/bulan	2.979.248.975	Dana Alokasi Umum (DAU)		25	orang/bulan	3.202.247.600
2	12	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	12	Dokumen	2.732.958.700	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	Dokumen	2.732.958.700
2	12	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	2	Laporan	2.428.100	Dana Alokasi Umum (DAU)		2	Laporan	4.428.100
2	12	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	17	Laporan	2.518.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		17	Laporan	4.518.000
2	**12**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100**	**%**	**-**			**100**	**%**	**23.812.500**
2	12	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	1	paket	-	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	paket	23.812.500
2	**12**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**		**100**	**%**	**729.739.600**			**100**	**%**	**733.424.600**
2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	1	paket	3.814.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	paket	634.707.400
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3	paket	634.707.400	Dana Alokasi Umum (DAU)		3	paket	7.500.000
2	12	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	1	paket	7.011.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	paket	7.010.000
2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	4	paket	9.656.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		4	paket	9.656.000
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	1	paket	10.836.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	paket	10.836.000
2	12	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	12	dokumen	18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		15	dokumen	18.000.000
2	12	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	1	laporan	2.945.600	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	laporan	2.945.600
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3	laporan	37.604.500	Dana Alokasi Umum (DAU)		3	laporan	37.604.500
2	12	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	dokumen	5.165.100	Dana Alokasi Umum (DAU)		100	dokumen	5.165.100

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026		
							Lokasi Kegiatan	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	
2	**12**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**		**1**	**unit**	**6.427.200**			**1**	**unit**	**6.427.200**
2	12	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	1	Unit	6.427.200	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	Unit	6.427.200
2	**12**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**		**12**	**laporan**	**144.000.000**			**12**	**laporan**	**126.000.000**
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	12	laporan	144.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	laporan	122.400.000
2	**12**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**		**67**	**unit**	**290.530.000**			**67**	**unit**	**272.520.000**
2	12	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	1	unit	43.930.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	unit	41.170.000
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	5	unit	193.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		5	unit	178.350.000
2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60	unit	28.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		60	unit	28.000.000
2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	1	unit	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	unit	25.000.000
2	**12**	**2**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan**		**60**	**%**	**1.098.194.950**			**65**	**%**	**1.031.848.950**
						Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)		**30**	**%**				**55**	**%**	
						Persentase Identitas Kependudukan Digital (IKD)		**30**	**%**				**40**	**%**	
						Persentase Perekaman KTP elektronik		**99,9**	**%**				**99,9**	**%**	
2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk					939.271.250				%	939.271.250
2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	- Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	laporan	939.271.250	Dana Alokasi Umum (DAU)		7	laporan	939.271.250
2	12	2	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk			8	dokumen	148.846.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		8	dokumen	82.500.000
2	12	2	2.02	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	8	dokumen	148.846.000			2	dokumen	82.500.000
2	12	2	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			2	laporan	10.077.700	Dana Alokasi Umum (DAU)		2	laporan	10.077.700
2	12	2	2.03	5	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	laporan	10.077.700			2	laporan	10.077.700

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026		
							Lokasi Kegiatan	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	
2	**12**	**3**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**		**99,88**	**%**	**71.598.500**			**99,9**	**%**	**87.348.000**
						Kepemilikan Akta Kelahiran		**99,5**	**%**				**99,6**	**%**	
						Kepemilikan Akta Perkawinan		**100**	**%**				**100**	**%**	
						Kepemilikan Akta Kematian		**100**	**%**				**100**	**%**	
						Kepemilikan Akta Pereraian		**100**	**%**				**100**	**%**	
2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Pengangkatan Anak		5	dokumen	62.124.600			5	dokumen	77.874.100
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	- Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6	layanan	48.624.600	Dana Alokasi Umum (DAU)		6	layanan	63.624.600
2	12	3	2.01	5	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	1	dokumen	13.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	dokumen	14.249.500
2	12	3	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil		2	laporan	9.473.900			2	laporan	9.473.900
2	12	3	2.02	8	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	- Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	laporan	9.473.900	Dana Alokasi Umum (DAU)		2	laporan	9.473.900
2	**12**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Informasi Kependudukan yang Dlmanfaatkan (Persentase)**		**63,63**	**%**	**200.793.200**			**68,41**	**%**	**235.886.000**
2	12	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		15	dokumen	40.162.000			15	dokumen	72.000.000
2	12	4	2.01	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	- Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15	dokumen	40.162.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		15	dokumen	72.000.000
2	**12**	**4**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**2**	**laporan**	**160.631.200**			**2**	**laporan**	**163.886.000**
						Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)		**3**	**laporan**				**3**	**laporan**	
2	12	4	2.03	3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	laporan	106.952.700	Dana Alokasi Umum (DAU)		3	laporan	110.000.000
2	12	4	2.03	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	- Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3	laporan	53.678.500	Dana Alokasi Umum (DAU)		3	laporan	53.886.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026		
							Lokasi Kegiatan	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	
2	**12**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)**		**100**	**%**	**12.495.000**			**100**	**%**	**30.000.000**
2	12	5	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan		100	buku	12.495.000			100	buku	20.000.000
2	12	5	2.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	1	dokumen	-	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	dokumen	20.000.000
2	12	5	2.01	2	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	1	dokumen	12.495.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	dokumen	10.000.000

Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Selatan

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai Melampaui	Permasalahan	Faktor-Faktor Keberhasilan
1	Persentase Penerbitan KTP-el	Belum tercapai	Keterbatasan Blangko KTPel dari Dirjen Adminduk	
2	Persentase Penerbitan KK	Melampaui		Database Kependudukan yang Valid
3	Persentase Penerbitan KIA	Belum tercapai	Belum dirasakan kebermanfaatan KIA oleh masyarakat sehingga antusias pembuatan KIA masih kurang	
4	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	Melampaui	-	Kebermanfaatan Akta Kelahiran sangat besar (untuk keperluan sekolah, kesehatan dll) sehingga antusias pembuat Akta Kelahiran selalu meningkat
5	Persentase Penerbitan Akta Kematian	Melampaui	-	Kebermanfaatan Akta Kematian sangat besar (untuk keperluan mengurus waris dll) sehingga antusias pembuat Akta Kematian meningkat
6	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	Melampaui	-	Progres pelayanan Akta Nikah ditempat direspon baik oleh masyarakat, sehingga meningkatkan jumlah pelaporan Akta Perkawinan
7	Persentase Penerbitan Akta Perceraian	Melampaui	-	Dokumen Akta Perceraian diperlukan untuk pengurusan
8	Persentase OPD yang melakukan PKS dan Pemanfaatan Data	Belum tercapai	Proses Persetujuan PKS oleh pusat memerlukan waktu yang lama	
			Pengguna Akses Data diwajibkan melaksanakan ISO 27001 yaitu ISO terkait sistem manajemen keamanan data	
9	Identitas Kependudukan Digital	Belum tercapai	Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan Anggaran Perubahan rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Renja Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 8.316.570.925 (Delapan milyar tiga ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah)

.

Seluruh kebutuhan dana pagu indikatif program, kegiatan, dan sub kegiatan Renja Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 sumber pendanaannya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025. Keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Renja Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 diukur dengan target capaian kinerja sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025–2029, baik secara capaian kinerja maupun realisasi anggaran.

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirumuskan dalam Renja Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dilaksanakan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang lokasi pelaksanannya dilaksanakan di luar wilayah Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Kelompok sasaran kegiatan dalam Renja Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ditujukan kepada internal Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan, instansi pemerintah, instansi swasta, dan sektor informal yang terkait dengan kinerja pelayanan Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan, serta seluruh penduduk Kabupaten Lampung Selatan sebagai wujud pelayanan publik yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Rumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Renja Perubahan Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 secara rinci adalah :

Jumlah seluruh Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan adalah :

Jumlah Program : 5 Program
Jumlah Kegiatan : 14 Kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan : 36 Sub Kegiatan

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d) Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD
e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD
f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP
g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

3. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e) Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Undang-undang
g) Fasilitasi Kunjungan Tamu
h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
i) Penataan Arsip Dinamis pada SKPD

4. **Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

   Sub Kegiatan :

   a) Pengadaan Mebel

5. **Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

   Sub Kegiatan :

   a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

6. **Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

   Sub Kegiatan :

   a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pendaftaran Penduduk

1. **Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

   Sub Kegiatan :

   a). Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

2. **Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk**

   Sub Kegiatan :

   a). Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan

2. **Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**

   Sub Kegiatan :

   a). Sosialisasi Pendaftaran Penduduk

C. Program Pencatatan Sipil

1. **Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil**

   Sub Kegiatan :

   a). Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
   b). Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan

2. **Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**

   Sub Kegiatan :

   a). Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. **Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**

   Sub Kegiatan :

   a). Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

2. **Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

   Sub Kegiatan :

   a). Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

   b). Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

1. **Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan**

   Sub Kegiatan :

   a). Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

Total Kebutuhan Dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.316.570.925 (Delapan milyar tiga ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah)

.

IV.2 SINKRONISASI PRIORITAS PERANGKAT DAERAH DENGAN PRIORITAS DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.2.1 Sinkronisasi Prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dengan Prioritas Daerah Tahun 2025 Kabupaten Lampun Selatan

No.	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	APBD	939.271.250,00	
			Penataan Pendaftaran Penduduk	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	APBD	148.846.000,00	
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	APBD	10.077.700,00	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipi	APBD	48.624.600,00	
				Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	APBD	13.500.000,00	
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipi	APBD	9.473.900,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	APBD	40.162.000,00	
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	APBD	106.952.700,00	
				Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	APBD	53.678.500,00	

No.	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	umber Dan	Pagu Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	APBD	12.495.000,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	APBD	10.909.000,00	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	APBD	3.594.200,00	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	APBD	3.550.800,00	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	APBD	5.000.000,00	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	APBD	4.560.700,00	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	APBD	10.525.500,00	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	APBD	7.498.500,00	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	APBD	2.979.248.975,00	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	APBD	2.732.958.700,00	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	APBD	2.428.100,00	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	APBD	2.518.000,00	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	APBD	3.814.000,00	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD	634.707.400,00	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	APBD	7.011.000,00	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	APBD	9.656.000,00	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	APBD	10.836.000,00	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	APBD	18.000.000,00	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	APBD	2.945.600,00	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	APBD	37.604.500,00	
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKP	APBD	5.165.100,00	

No.	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	APBD	6.427.200,00	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD	144.000.000,00	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	APBD	43.930.000,00	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD	193.600.000,00	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD	28.000.000,00	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APBD	25.000.000,00	
JUMLAH						**8.316.570.925,00**	

Tabel 4.2.1 **Sinkronisasi Prioritas Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan**

No.	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	APBD	939.271.250,00	
1 2 3	Persentase Penerbitan KTPel Persentase Penerbitan KK Persentase Penerbitan KIA		Penataan Pendaftaran Penduduk	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	APBD	148.846.000,00	
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	APBD	10.077.700,00	
4 5 6 7	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Persentase Penerbitan Akta Kematian Persentase Penerbitan Akta Perkawinan Persentase Penerbitan	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipi	APBD	48.624.600,00	
				Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	APBD	13.500.000,00	
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipi	APBD	9.473.900,00	
8	Persentase OPD yang melakukan PKS dan Pemanfaatan Data	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	APBD	40.162.000,00	
9	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) (poin)		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	APBD	106.952.700,00	
				Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	APBD	65.945.500,00	
JUMLAH						**1.382.853.650,00**	

BAB V
PENUTUP

5.1 Penutup

Renja Perubahan Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun berpedoman kepada RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025–2029 dan Renstra Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025–2029.

Renja Perubahan Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 disusun dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029. Hal-hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam Renja Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan semua indikator kinerja dalam rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

1. Evaluasi rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang meliputi kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, lokasi pelaksanaan, kelompok sasaran, sumber pendanaan, dan kebutuhan dana/pagu indikatif dilaksanakan sesuai dengan situasi, kondisi, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta menyesuaikan dengan kebijakan dan peraturan terbaru;
2. Fokus utama pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dilaksanakan secara menyeluruh, baik dari jajaran tertinggi hingga jajaran terendah dengan optimalisasi sumber daya yang dimiliki dalam rangka peningkatan capaian kinerja, bukan sekedar menitikberatkan pada realisasi/penyerapan anggaran;
3. Pengolahan dan pengelolaan data kinerja yang bersifat pasti, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga evaluasi kinerja dan penyusunan perencanaan yang berkelanjutan menjadi lebih terukur dan tepat sasaran;
4. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama internal, lintas instansi pemerintah, instansi swasta, maupun sektor informal yang terkait dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangka peningkatan kinerja.

5.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam rangka menjamin pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Renja Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, perlu memperhatikan kaidah-kaidah sebagai
berikut:

1. Renja Perubahan Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dilaksanakan oleh seluruh jajaran Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Renja Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dilaksanakan secara tertib, obyektif, dan disampaikan dalam bentuk laporan tertulis kepada Kepala Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan secara periodik dan berkesinambungan guna mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029;

3. Renja Perubaha Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
4. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan/atau daerah selama pelaksanaan Renja Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, perubahan rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terjadi akan dimuat dalam Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Lampung Selatan Tahun 2025 sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti oleh Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2025 antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan secara menyeluruh terkait Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil;
2. Peningkatan kualitas pelayanan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dengan cara meningkatkan kerja sama dengan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, baik kerja sama pemanfaatan data maupun penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan;
3. Peningkatan kualitas pelayanan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten dengan metode olah data secara khusus oleh Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan data, baik untuk kebutuhan penyusunan Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain, maupun untuk kebutuhan permintaan data oleh instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
4. Peningkatan dan optimalisasi inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan cara evaluasi dan monitoring secara menyeluruh dalam rangka pengembangan dan penguatan inovasi yang sudah ada, meliputi:
    1) Pelayanan Keliling Jemput Bola (JEBOL PAKDE)
    2) Pelayanan PAK-CAMAT (Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan
    3) Pelayanan PAKe-Oli (Pelayanan Administrasi Kependudukan Online)
    4) Pelayanan Tim 86 (Tim Reaksi Cepat)
    5) Pelayanan PAK-JAJA (Pelayanan Administrasi Kependudukan Jarak Jauh)
    6) Pelayanan TAMU (Tatap Muka)
    7) Pelayanan Terpadu
    8) Pelayanan Kemitraan
    9) Pelayanan Yanduksatlantas (Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk sakit, lansia dan disabilitas)
    10) Pelayanan Goes To School
    11) Pelayanan Pak-Kades (Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa)
    12) Pelayanan Jebol Akper Manis ?(Pelayanan Jemput Bola Akta Perkawinan Gratis)
5. Mendukung tercapainya Agenda Pembangunan Nasional terkait penguatan tata kelola kependudukan, meliputi:
    a. Percepatan cakupan kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    b. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan cara penerapan Standar Pelayanan yang sesuai dengan peraturan yang terbaru;

c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota menyediakan fasilitas untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan, paling sedikit:
   1) menyediakan layanan nomor telepon pengaduan (call center);
   2) menyediakan nomor telepon pengaduan;
   3) setiap hari mengumumkan semua dokumen yang sudah diterbitkan melalui situs web/papan pengumuman; dan

6. Mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025–2029, dengan strategi transformasi pelayanan publik, melalui:
   a. Pengembangan inovasi dalam pelayanan publik, melalui teknologi informasi;
   b. Peningkatan akses masyarakat dalam layanan publik dan penguatan pelayanan terpadu, yang di dalamnya termasuk mall pelayanan publik; dan
   c. Penguatan ekosistem inovasi daerah.
   d. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Dokumen Administrasi Kependudukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja;
   e. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi kependudukan, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
   f. Mendukung tercapainya Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dengan disusunnya Renja Perubaha Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ini, diharapkan dapat mewujudkan rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang konsisten, terkait, dan berkesinambungan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Renja Perubahan Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 juga diharapkan menjadi acuan, pedoman, dan tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Lampung Selatan dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025–2029 dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025–2029.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja Perubahan Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih membutuhkan kritik dan saran untuk dapat membantu perbaikan di masa mendatang.

Kalianda, September 2025

KEPALADINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNGSELATAN

Drs.EDY FIRNANDI,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196612061986021002

RENCANA KERJA PERUBAHAN

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TA. 2025

perhubunganlamsel@gmail.com
www.perhubungan.lampungselatan.go.id
@dishub_lampung.selatan
dishublamsel6395

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan teknis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan. Isi dari Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam penyusunannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang terkait untuk menghasilkan untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Peran serta maksimal dari seluruh potensi stake holder Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya Rencana Kerja ini dapat mendorong peningkatan kinerja.

Renja Perubahan ini disusun dengan harapan penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya sektor transportasi dapat berlangsung dengan tertib, lancar dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan bersama.

Kalianda, 16 Juli 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

HARRIZON, SE, MM
Pembina Tk. 1
Nip. 19710915 199503 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 3

1.4 Sistematika Penulisan..... 4

BAB II. HASIL EVALUASI TRIWULAN II TAHUN BERJALAN..... 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan..... 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan..... 11

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan..... 13

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 16

BAB V. PENUTUP..... 20

Lampiran :

Form Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan TA. 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan Organisasi Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Renstra Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian Renja Organisasi Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

a. Rancangan Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (P-RKPD);
b. Rancangan Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah merupakan acuan Organisasi Perangkat Daerah untuk memastikan keselarasan rancangan perubahan Renja terhadap rancangan P-RKPD tahun 2025;
c. Rancangan Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025;
d. Rancangan Perubahan Renja perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan kegiatan, yaitu adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah dimana anggaran yang ada harus disesuaikan dengan target kinerja dan capaiannya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 -2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 104);
17. Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No. Tahun 2022 tentang Penunjukan Tim Penyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2024;
18. Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, yaitu :

a. Sebagai acuan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2025 yang akan diajukan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) 2025;
b. Sebagai tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pada setiap tahun anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perhubungan;

Adapun tujuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 adalah:

a. Memasukan program dan kegiatan yang ada di Perubahan Rencana Kerja (P-RKPD) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD-P Tahun 2025;
b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi kegiatan demi mewujudkan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pengalokasian sumber daya pembangunan.
d. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang terpadu dengan indikator capaian serta memberikan arah secara tegas bagi kepentingan pelayanan bidang Perhubungan khususnya khususnya dalam rangka menciptakan transportasi yang selamat dan nyaman sesuai arahan dari Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) yang teraplikasi dalam Dokumen Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten Lampung Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

BAB IV PENUTUP

BAB I

HASIL EVALUASI TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan adalah kegiatan penilaian terhadap rencana kerja tahun 2025 yang merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun tahun 2025 dan Sebagian telah dilaksanakan pada triwulan II tahun 2025 terhadap beberapa variabel program yang tertuang didalam renstra (Output) serta hasil (Outcome) yang mempunyai dampak (impact) dari kegiatan yang dilaksanakan. Perbandingan ini kemudian diidentifikasi faktor faktor yang berpengaruh terhadap kegagalan atau keberhasilan dari pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 sampai dengan triwulan II dapat diperoleh informasi tentang sejauh mana kemampuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan dalam Renja yang meliputi pagu indikatif dan realisasi anggaran, capaian kinerja keluaran kegiatan, capaian kinerja pendanaan, serta rata-rata capaian keluaran. Secara keseluruhan realisasi kinerja sampai dengan triwulan II dapat diuraikan sebagai berikut :

Pada tahun 2025 sampai dengan bulan Mei triwulan II, terdiri dari 3 program, 15 Kegiatan dan 37 Sub kegiatan, dengan pagu indikatif adalah sebesar Rp. 31.523.576.080,- dengan realisasi keuangan Rp. 13.862.963.374,- atau sebesar 43,98% dan kinerja % dengan uraian sebagai berikut :

A. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari 1 jenis penerimaanya itu :

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI s.d TW II (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	275.000.000	89.400.000	32,51%
JUMLAH		275.000.000	89.400.000	32,51%

B. Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi
2. Belanja Modal

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI s.d Juni Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Belanja Operasi	30.158.475.080	13.529.401.603	44,85%
2.	Belanja Modal	1.360.001.000	333.561.771	24,53%
	JUMLAH	**31.518.476.080**	**13.862.963.374**	**43,98%**

Adapun capaian kegiatan dapat dijelaskan seperti dibawah ini :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program ini terdiri dari 7 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan anggaran Rp. 7.386.244.580,- Realisasi keuangan sebesar Rp. 3.288.279.005,- atau sebesar 45.73 % dan kinerja sebesar % yaitu:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 6 sub Kegiatan dengan anggaran Rp. 73.000.000,- realisasi keuangan Rp. 23.270.250,(31,88%) dan realisasi kinerja 63,64%;

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 4 sub Kegiatan dengan anggaran Rp. 5.489.479.680,- realisasi keuangan Rp. 2.736.775.933,- (49,85%) dan realisasi kinerja 100%;

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 1 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 127.200.000,- realisasi keuangan Rp. 0,- dan realisasi kinerja 0%;

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 8 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 432.580.900,- realisasi keuangan Rp. 65.139.200,- (15,06%) dan realisasi kinerja 64,55%;

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 1 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 108.450.000,- realisasi keuangan Rp.

0,- (0%) dan realisasi kinerja 0%;

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 1 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 284.400.000,- realisasi keuangan Rp. 42.610.642,- (14,98%) dan realisasi kinerja 50%;

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 4 Sub Kegiatan dengan anggaran Rp. 866.034.000 realisasi keuangan Rp. 364.161.052,- (42,05%) dan realisasi kinerja 24,71%.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Program ini terdiri dari 7 kegiatan dan 11 Sub Kegiatan dengan anggaran Rp. 24.059.331.500,- Realisasi keuangan sebesar Rp. 7.174.626.592,- atau sebesar 67,47% dan kinerja sebesar 50% yaitu:

a. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, terdiri dari 2 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 22.340.100.000,- realisasi keuangan Rp. 6.836.407.592,- (33,87%) dan realisasi kinerja sebesar 37,72%;

b. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor , terdiri dari 3 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 272.131.500,- realisasi keuangan Rp. 0,- (0%) dan realisasi kinerja 0%;

c. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, terdiri dari 2 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 1.150.100.000,- realisasi keuangan Rp. 301.769.000,- (26,24%) dan realisasi kinerja 40,51%;

d. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota terdiri dari 1 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 35.000.000,- realisasi keuangan Rp. 6.000.000,- (17,14%) dan realisasi kinerja 30%.

e. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan

terdiri dari 1 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 40.000.000,- realisasi keuangan Rp.0,- (0%) dan realisasi kinerja 0%.

f. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota terdiri dari 1 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 188.000.000,- realisasi keuangan Rp. 30.450.000,- (16,20%) dan realisasi kinerja 19,31%.

g. Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang melayani trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 34.000.000,- realisasi keuangan Rp. 0,- (0%) dan realisasi kinerja 0%.

3. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan anggaran Rp. 78.000.000,- Realisasi keuangan sebesar Rp. 15.066.450,- atau sebesar 19,32% dan kinerja sebesar 100% yaitu:

a. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal terdir dari 1 sub kegiatan dengan anggaran 78.000.000,- Realisasi keuangan sebesar Rp. 15.066.450,- atau sebesar 19,32 % dan kinerja sebesar 100%.

Tabel Evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 Triwulan II terlampir

Tabel 2.1

Target dan capaian Renja Dinas tahun 2025 Triwulan II

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Layanan Dinas Perhubungan	80	Poin	80	100%
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	VC Ratio	0,45	Poin	0,32	128,89
		Rasio Konektivitas Kabupaten	0,92	Poin	0,84	91,30%
		Persentase kendaraan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	60	%	15,44	25,73%
		Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten yang tersedia	45%	%	90,07%	200,15%
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Level Keselamatan Transportasi Pelayaran	100	%	100	100%

Dari tabel 2.1 Target dan Capaian Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 triwulan II dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Dinas Perhubungan, target 80 poin, berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam penyelenggaraan layanan kepengurusan izin trayek mendapatkan poin rata-rata 80.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), terdapat beberapa indikator kinerja, yaitu :
    a. V/C Ratio, yaitu Rasio Volume kendaraan per Kapasitas Jalan di Ruas Jalan Kabupaten Lampung Selatan, diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,32 dari 267 ruas jalan kabupaten yang disurvei. Dari target 0,45, maka capaiannya adalah sebesar 128,89%.
    b. Rasio Konektivitas Kabupaten, diperoleh dari jumlah trayek yang dilayani dikali jumlah bobot trayek dibagi jumlah kebutuhan trayek Kabupaten. Jumlah trayek yang dilayani di Kabupaten Lampung Selatan diketahui sebanyak 11 lintasan trayek dibagi jumlah kebutuhan trayek sebanyak 13 trayek dikali 100, yaitu 0,84poin.
    c. Persentase kendaraan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, yaitu berdasarkan laporan jumlah kendaraan yang mendapatkan rekomendasi untuk numpang uji di wilayah yang layanan Uji Berkalanya telah terakreditasi dan selanjutnya lulus uji laik kendaraan berjumlah 1.219 kendaraan dari jumlah kendaraan wajib uji yaitu 7.893 kendaraan (15,44%). Dari target yang ditetapkan sebesar 60%, maka capaian yang diperoleh sebesar 15,44%.
    d. Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan dalam kondisi baik. Capaian indikator kinerja ini masih sebesar 90,07%. Dari target 45%. sampai akhir TW II (Juni 2025), belum terdapat realisasi Belanja Pengadaan Perlengkapan Jalan sehingga capaian kinerja masih sama dengan kondisi di akhir tahun 2025.

3. Program Pengelolaan Pelayaran, dengan indikator Level Keselamatan Transportasi Pelayaran, target 100%, hingga saat ini belum ditemui adanya kejadian kecelakaan transportasi pelayaran di wilayah perairan lokal Kabupaten Lampung Selatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan

Berikut ini adalah kajian terhadap capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan indikator kinerja utama yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 060/02.b/IV.14/2025 tanggal 6 Januari 2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan.

Indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan adalah "Angka Kecelakaan Transportasi" dimana perhitungannya diperoleh dari Jumlah angka kecelakaan transportasi diawal periode RPJMD dikurangi 5% sampai dengan akhir periode RPJMD.

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2021	2022	2024	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1.	Angka Kecelakaan Transportasi (kejadian)			280	266	302	240	228	217	295	302	253	240	303	Kondisi angka Kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lampung Selatan triwulan II (Juni 2025)
2.	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C		√	75	75	75	75	75	75	75,76	75,76	75,76	75,76	75,76	Dari 33 umlah fasilitas penyelenggaraan terminal yang ada, hanya 25 yang sesuai dengan SPM penyelenggaraan Terminal sesuai dengan Permenhub no. 40 Tahun 2015
3.	Terlaksananya pelayanan uji berkala		√	20	20	20	20	20	20	14,46	17,97	20	20	25,73	Jumlah kendaraan lulus uji (1.219 kendaraan) dari jumlah kendaraan wajib uji (7.893kendaraan)
4.	Rasio Konentivitas Kabupaten /Kota		√	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	Jumlah lintasan trayek yang tersedia (10 dibagi jumlah kebutuhan trayek angkutan pedesaan Kabupaten (13 lintasan trayek) dikali 100

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2022, maka tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan adalah:

"***Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku***".

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
2. Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan;
4. Pelayanan administratif; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Beberapa Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yaitu :

1. Terbatasnya data yang valid dan berkualitas, khususnya mengenai Jumlah kebutuhan Fasilitas Kelengkapan Jalan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari 17 kecamatan, dimana ketersediaan rambu lalu lintas di ruas jalan Kabupaten yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan masih sangat minim;
2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta penempatannya yang belum sesuai dengan bidang keahlian;
3. Terbatasnya peralatan pendukung layanan Uji Kendaraan bermotor dimana layanan ini sangat berperan penting dalam meningkatkan keselamatan pengguna jalan, khususnya bagi angkutan umum dan barang ;

4. Implementasi Peraturan yang berimbas pada tidak optimalnya pelayanan angkutan umum sebagai alat transportasi massal, dimana Berdasarkan PM 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan pada pasal 79 bahwa perizinan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang/barang dapat diberikan pada perusahaan angkutan umum yang berbadan hukum sehingga jumlah angkutan umum yang ada jumlahnya terus menurun.
5. Penurunan Jumlah angkutan umum menyebabkan tidak optimalnya fungsi Terminal yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.

Permasalahan tersebut diatas berdampak langsung pada pencapaian visi misi Bupati Lampung Selatan sebagai Kepala Daerah, khususnya permasalahan pada poin 4 (empat), dimana sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 yaitu "Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas" dengan indikator sasaran "Indeks angka kecelakaan lalu lintas" kemungkinan tidak dapat terpenuhi targetnya. Sampai dengan akhir tahun masa RPJMD memiliki target 22%. Pada tahun 2023, Capaian Indeks Kecelakaan Lalu Lintas di wilayah Kabupaten Lampung Selatan adalah 27,93%. Sampai dengan akhir tahun masa RPJMD memiliki target. Pada tahun 2025, Capaian Indeks Kecelakaan Lalu Lintas di wilayah Kabupaten Lampung Selatan adalah 27,93%.

Selain Permasalahan tersebut diatas, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan antara lain :

1. Adanya tuntutan perencanaan di Bidang Perhubungan yang berkualitas;
2. Belum terlaksananya mekanisme layanan Pengujian Kendaraan bermotor yang terakreditasi dan terintegrasi dengan Kementerian Perhubungan dalam rangka mewujudkan layanan kinerja yang akuntabel dan transparan serta mengutamakan keselamatan masyarakat;
3. Pemenuhan Aparatur/petugas lalu lintas handal yang mendukung tugas dan fungsi utama dalam kegiatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas di lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Lampung Selatan melalui pelatihan teknis khusus baris berbaris dan pengaturan lalu lintas di jalan.

Untuk mengantisipasi permasalahan dan tantangan, Dinas Perhubungan memiliki peluang-peluang sebagi berikut :

1. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan;
2. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat berupa pemberian bantuan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Jalan pada Tahun 2021;
3. Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi dan *stakeholders* terhadap pengadaan kegiatan prioritas pada bidang Perhubungan.

Berikut ini merupakan rekomendasi dan catatan yang strategis untuk kemudian ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yang akan direncanakan pada tahun 2025, yaitu :

1. Menyesuaikan target Indiator Kinerja Utama Dinas Perhubungan dengan dasar perhitungan adalah realisasi angka kejadian kecelakan transportasi tahun 2022. Sebelumnya target pada tahun 2024 adalah sebanyak 253 kejadian, diubah menjadi 287 kejadian.
2. Upaya Pemenuhan persyaratan akreditasi layanan uji kendaraan bermotor yaitu dengan penerapan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor berupa bukti lulus uji elektronik yang terdiri dari Smart Card, Stiker dan Hologram serta pengadaan Aplikasi SIM PKB yang terintegrasi dengan Smart Card tersebut;
3. Pemenuhan terhadap kebutuhan fasilitas keselamatan dan kelengkapan jalan di ruas jalan Kabupaten di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan, Perubahan RKPD Tahun 2025 ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka anggaran dalam APBD-P 2025 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu perlu dilakukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota lainnya serta Dinas Perhubungan Provinsi, maupun antar Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan dengan masyarakat pengguna layanan jasa perhubungan. Upaya lain yang dilakukan adalah memantapkan proses perencanaan penganggaran yang baik dan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan selaras dengan rencana strategis Dinas Perhubungan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan yang berlaku.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses kegiatan yang dilaksanakan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan serta terciptanya pelaksanaan program kegiatan yang efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Pada penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, Dinas Perhubungan merencanakan 3 program dan 15 kegiatan dan 37 Sub Kegiatan sebagai berikut :

I. Program PenunjangUrusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan :

   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan :

   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan :

   1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan :

   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7) Penyediaan Bahan Material
8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Pengadaan Mebel
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Sub Kegiatan :
   1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Sub Kegiatan :
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Kegiatan :

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan :
   1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
   2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
   1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
   2) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
   3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan :

1) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
2) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

4. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
   1) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
5. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
   1) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
6. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan :
   1) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
7. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan :
   1) Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

III. Program Pengelolaan Pelayaran

Kegiatan :

1. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

   Sub Kegiatan :
   1) Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

Rekapitulasi Perubahan rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 terlampir

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 yang telah disusun merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Renja Perubahan tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan P-RKPD Kabupaten Lampug Selatan Tahun 2025, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2025. Dengan demikian ada keselarasan antara tema dan Prioritas Provinsi dengan tema dan Prioritas Nasional.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Pejabat dan staf Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan secara bersama- sama mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk:
   a. Melaksanakan Renja-PD Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

Akhir kata kami menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini masih banyak ketidaksempurnaan, oleh karena untuk menyempurnakan penyusunan program kegiatan tahun berikutnya, maka kami sangat mengharapkan segenap masukan dan sumbang saran yang konstruktif demi penyempurnaan dan semoga Rencana Kerja Perubahan ini bermanfaat dalam menunjang program kegiatan Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

Kalianda, 16 Juli 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Harrizon, SE., MM
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 19710915 199503 1 003

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025

REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Dinas Perhubungan																			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp. 30.158.475.080	Rp. 1.360.001.000			Rp. 31.518.476.080	Rp. 29.320.604.080	Rp. 1.303.281.000			Rp. 30.623.885.080	Rp. 52.966.922.404,00
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				Rp. 30.158.475.080	Rp. 1.360.001.000			Rp. 31.518.476.080	Rp. 29.320.604.080	Rp. 1.303.281.000			Rp. 30.623.885.080	Rp. 52.966.922.404,00
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 7.185.384.580	Rp. 195.760.000			Rp. 7.381.144.580	Rp. 6.993.326.080	Rp. 139.040.000			Rp. 7.132.366.080	Rp. 28.383.922.404,00
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 73.000.000				Rp. 73.000.000	Rp. 51.943.000				Rp. 51.943.000	Rp. 81.500.000,00
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk		Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 11.156.000				Rp. 11.156.000	Rp. 17.000.000,00
2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk		Rp. 7.000.000				Rp. 7.000.000	Rp. 4.856.000				Rp. 4.856.000	Rp. 8.000.000,00
2	15	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk		Rp. 7.000.000				Rp. 7.000.000	Rp. 4.736.000				Rp. 4.736.000	Rp. 8.000.000,00
2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk		Rp. 7.000.000				Rp. 7.000.000	Rp. 6.731.000				Rp. 6.731.000	Rp. 8.500.000,00
2	15	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk		Rp. 7.000.000				Rp. 7.000.000	Rp. 4.464.000				Rp. 4.464.000	Rp. 8.000.000,00
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk		Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 32.000.000,00
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 5.489.479.680				Rp. 5.489.479.680	Rp. 5.452.074.930				Rp. 5.452.074.930	Rp. 5.784.223.404,00
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk		Rp. 3.823.423.230				Rp. 3.823.423.230	Rp. 3.823.423.230				Rp. 3.823.423.230	Rp. 4.000.000.000,00
2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk		Rp. 1.646.056.450				Rp. 1.646.056.450	Rp. 1.614.153.700				Rp. 1.614.153.700	Rp. 1.759.223.404,00
2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 7.204.000				Rp. 7.204.000	Rp. 13.000.000,00
2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 7.294.000				Rp. 7.294.000	Rp. 12.000.000,00
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 127.200.000				Rp. 127.200.000	Rp. 87.200.000				Rp. 87.200.000	Rp. 100.000.000,00
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk		Rp. 127.200.000				Rp. 127.200.000	Rp. 87.200.000				Rp. 87.200.000	Rp. 100.000.000,00
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 345.270.900	Rp. 87.310.000			Rp. 432.580.900	Rp. 246.574.150	Rp. 55.060.000			Rp. 301.634.150	Rp. 493.456.000,00
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk		Rp. 11.750.000				Rp. 11.750.000	Rp. 11.750.000				Rp. 11.750.000	Rp. 16.000.000,00
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk			Rp. 87.310.000			Rp. 87.310.000		Rp. 55.060.000			Rp. 55.060.000	Rp. 103.000.000,00
2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk		Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 17.000.000,00
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk		Rp. 45.000.000				Rp. 45.000.000	Rp. 23.076.600				Rp. 23.076.600	Rp. 47.000.000,00
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk		Rp. 83.731.900				Rp. 83.731.900	Rp. 67.968.550				Rp. 67.968.550	Rp. 90.456.000,00
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk		Rp. 18.000.000				Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000				Rp. 18.000.000	Rp. 20.000.000,00
2	15	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk		Rp. 41.989.000				Rp. 41.989.000	Rp. 41.989.000				Rp. 41.989.000	Rp. 45.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 129.800.000				Rp. 129.800.000	Rp. 68.790.000				Rp. 68.790.000	Rp. 155.000.000,00
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Rp. 108.450.000			Rp. 108.450.000		Rp. 83.980.000			Rp. 83.980.000	Rp. 48.000.000,00
2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk			Rp. 108.450.000			Rp. 108.450.000		Rp. 83.980.000			Rp. 83.980.000	Rp. 48.000.000,00
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 284.400.000				Rp. 284.400.000	Rp. 284.400.000				Rp. 284.400.000	Rp. 21.000.000.000,00
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk		Rp. 284.400.000				Rp. 284.400.000	Rp. 284.400.000				Rp. 284.400.000	Rp. 21.000.000.000,00
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 866.034.000				Rp. 866.034.000	Rp. 871.134.000				Rp. 871.134.000	Rp. 876.743.000,00
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk		Rp. 43.930.000				Rp. 43.930.000	Rp. 44.930.000				Rp. 44.930.000	Rp. 45.340.000,00
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk		Rp. 737.104.000				Rp. 737.104.000	Rp. 741.204.000				Rp. 741.204.000	Rp. 740.403.000,00
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 13.000.000,00
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk		Rp. 75.000.000				Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000				Rp. 75.000.000	Rp. 78.000.000,00
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				Rp. 22.895.090.500	Rp. 1.164.241.000			Rp. 24.059.331.500	Rp. 22.297.906.000	Rp. 1.164.241.000			Rp. 23.462.147.000	Rp. 24.503.000.000,00
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				Rp. 21.175.859.000	Rp. 1.164.241.000			Rp. 22.340.100.000	Rp. 21.187.190.000	Rp. 1.164.241.000			Rp. 22.351.431.000	Rp. 22.300.000.000,00
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU) - PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	- Kab. Lampung Selatan, Natar, Pemanggilan - Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Serdang - Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Munjuk Sampurna - Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Jati Mulyo - Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Kelawi		Rp. 312.914.000	Rp. 1.164.241.000			Rp. 1.477.155.000	Rp. 306.458.000	Rp. 1.164.241.000			Rp. 1.470.699.000	Rp. 1.300.000.000,00
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	- PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	- Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.862.945.000				Rp. 20.862.945.000	Rp. 20.880.732.000				Rp. 20.880.732.000	Rp. 21.000.000.000,00
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				Rp. 272.131.500				Rp. 272.131.500	Rp. 183.197.500				Rp. 183.197.500	Rp. 402.000.000,00
2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Retribusi Daerah - LRA	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Munjuk Sampurna		Rp. 34.780.000				Rp. 34.780.000	Rp. 30.280.000				Rp. 30.280.000	Rp. 29.000.000,00
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Retribusi Daerah - LRA	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Munjuk Sampurna		Rp. 168.574.000				Rp. 168.574.000	Rp. 84.140.000				Rp. 84.140.000	Rp. 250.000.000,00
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Retribusi Daerah - LRA - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Munjuk Sampurna		Rp. 68.777.500				Rp. 68.777.500	Rp. 68.777.500				Rp. 68.777.500	Rp. 123.000.000,00
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				Rp. 1.150.100.000				Rp. 1.150.100.000	Rp. 827.570.500				Rp. 827.570.500	Rp. 1.477.000.000,00
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.110.100.000				Rp. 1.110.100.000	Rp. 807.778.600				Rp. 807.778.600	Rp. 1.435.000.000,00
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk - Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Merak Belatung		Rp. 40.000.000				Rp. 40.000.000	Rp. 19.791.900				Rp. 19.791.900	Rp. 42.000.000,00
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				Rp. 35.000.000				Rp. 35.000.000	Rp. 17.500.000				Rp. 17.500.000	Rp. 37.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	- Retribusi Daerah - LRA - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 35.000.000				Rp. 35.000.000	Rp. 17.500.000				Rp. 17.500.000	Rp. 37.000.000,00
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				Rp. 40.000.000				Rp. 40.000.000	Rp. 23.947.000				Rp. 23.947.000	Rp. 42.000.000,00
2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk		Rp. 40.000.000				Rp. 40.000.000	Rp. 23.947.000				Rp. 23.947.000	Rp. 42.000.000,00
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 188.000.000				Rp. 188.000.000	Rp. 41.501.000				Rp. 41.501.000	Rp. 210.000.000,00
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Natar, Candi Mas - Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Lematang - Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjungan - Kab. Lampung Selatan, Katibung, Rangai Tri Tunggal - Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Rejomulyo - Kab. Lampung Selatan, Sragi, Bandar Agung		Rp. 188.000.000				Rp. 188.000.000	Rp. 41.501.000				Rp. 41.501.000	Rp. 210.000.000,00
2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 34.000.000				Rp. 34.000.000	Rp. 17.000.000				Rp. 17.000.000	Rp. 35.000.000,00
2	15	02	2.16	0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena - Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Seloretno - Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Bakauheni		Rp. 34.000.000				Rp. 34.000.000	Rp. 17.000.000				Rp. 17.000.000	Rp. 35.000.000,00
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				Rp. 78.000.000				Rp. 78.000.000	Rp. 29.372.000				Rp. 29.372.000	Rp. 80.000.000,00
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				Rp. 78.000.000				Rp. 78.000.000	Rp. 29.372.000				Rp. 29.372.000	Rp. 80.000.000,00
2	15	03	2.12	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Tejang Pulau Sebesi		Rp. 78.000.000				Rp. 78.000.000	Rp. 29.372.000				Rp. 29.372.000	Rp. 80.000.000,00
Jumlah									**Rp. 30.158.475.080**	**Rp. 1.360.001.000**			**Rp. 31.518.476.080**	**Rp. 29.320.604.080**	**Rp. 1.303.281.000**			**Rp. 30.623.885.080**	**Rp. 52.966.922.404,00**

Kab. Lampung Selatan, ...
Kepala Dinas Perhubungan

Harrizon S.E., M.M.
NIP. 197109151995031003

RENJA PERUBAHAN

Tahun 2025

Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Lampung Selatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan adalah dokumen perencanaan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode Jangka Pendek satu tahun kedepan . Fungsi Renja PD Perubahan adalah sebagia acuan dalam penyelenggaraan tugas Pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam Pembangunan Daerah . Renja PD Perubahan memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan berpedoman pada Renstra Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan demikian Renja PD Perubahan pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Rensta PD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) . Pelaksanaan Renja PD Perubahan dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capain kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan Kinerja.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dilaksanakan melalui serangkai kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu , meliputi evaluasi pencapaian Target Program dan Kegiatan, analisis Kinerja pelayanan Dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dan Penelaahan Kebijakan Nasional.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu PD yang menjalankan tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan urusan pemerintah dalam tugas pelayanan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta pembinaan dan pelaksanaan tugas dibbidang Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan , Pengedalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penata Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan ;
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Kementrian Dalam Negeri Nomor 050-03708 Tahun 2020 Tentang hasil Verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomemklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamapung selatan Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026;
23. Surat Edaran Bupati Lampung Selatan nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Pemerintan nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
27. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2018 tentang perizinan usaha simpan pinjam Koperasi.
28. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi.
29. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bagi usaha Mikro dan Kecil.
30. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19 / PER / M. KUKM / VI / 2015 tentang penyelenggaraan rapat anggota Koperasi.
31. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 / PER / M. KUKM / VI / 2016 tentang pendataan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 selaras dengan maksud dan tujuan Renstra yaitu penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan yang berisi tentang :

a. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan.
b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan.

c. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 adalah menjabarkan rencana Program dan Kegiatan serta menetapkan target – target kinerja dan Pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja optimal serta sebagai arah dan acuan :

a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
b. Menyusun Penilaian KinerjaTahunan
c. Untyk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan , penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setipa Tahun Anggaran.
d. Untk menjamin tercapainya penggunaan sumber Daya secara efektif dan efisien berkeadilan dan berkelanjutan
e. Untuk menjamin terciptanya integritas , sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang – Bidang pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan , serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini berisi penjelasan tentang analisis Gambaran pelayanan Dinas dan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan

target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten lampung Selatan tahun 2025. Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 meliputi 7 Program, 12 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.486.038.513 (Empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga belas rupiah).

NO	Program	Anggaran	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.773.345.913,-	45,35 %
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	46.860.500,-	1,45 %
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	727.572.750,-	1,97 %
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	101.113.900,-	19,78 %
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	41.465.950,-	0 %
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	261.817.000,-	1,73 %
7	Program Pengembangan UMKM	533.862.500,-	4,61 %
	Jumlah	4.486.038.513,-	29,46 %

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d. Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD
f. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD
g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 12.213.400,- (37,61%)

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sampai dengan dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 1.181.067.703,- (50,27 %)

1.3 Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya
b. Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II belum terealisasi

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

g. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan /Material

h. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

i. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 30.470.900,- 15,78 %)

1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

a. Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya air dan listrik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sampai dengan Triwulan II telah terealisasi telah terealisasi sebesa Rp. 15.917.804,- (21,22 %)

1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sampai dengan Triwulan II terealisasi sebesar Rp. 18.099.000 (15,97 %)

II. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

2.1 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan,Kesehatan,Kemandirian,Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp. 680.000,- (1,45 %) .

III. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

3.1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (50 Unit Usaha).

b. Sub Kegiatan Penilaian kesehatan koperasi meliputi Tata kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan, dan permodalan (25 Unit Usaha)

Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II terealisasi sebesar Rp. 14.307.200 (1,97 %)

IV. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN

4.1 Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan dan Perkoperasian serta Kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi

Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II terealisasi sebesar Rp. 20.003.900,- (19,78 %)

V. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

5.1 Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaann nya dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas,Nilai tambah,Akses Pasar,Akses Pembiayaan,Penguatan Kelembagaan,Penataan Manajemen,Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaann nya dalam Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II belum terealisasi.

VI. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)

6.1 Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan,Kemitraan,Kemudahan Perjanjian,Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

a. Sub Kegiatan Pendataan Pemberdayaan melalui Usaha Mikro

b. Sub Kegiatan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan,Kemitraan,Kemudahan Perjanjian,Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 4.523.600,- (1,73 %)

VII. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

7.1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil

a. Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan , Pemasaran , Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi

Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 24.614.150,- (4,61 %)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas

Pelayanan utam yang menjadi tugas poko dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan adalah melayani di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Capaian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 800/002.b/IV.16/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU-PD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan meliputi :

- Persentase Peningkatan Koperasi aktif
- Persentase Peningkatan jumlah UMKM

Tabel 2.2.1 **Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Presentase Peningkatan Koperasi aktif		Meningkatkan koperasi yang berkualitas	59,2%	60,8%	62,4%	64%	41,19 %	59,60 %	62,4%	64%	
2	Persentase Peningkatan jumlah UMKM		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	6,23%	6,98%	7,73%	8,48%	6,88%	8,18%	7,73%	8,48%	

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten lampung Selatan Nomor 7 tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 26 tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Tugas pokok Dinas Koperasi usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Adapun fungsi dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Lampung Selatan adalah :

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
d. Pelayanan Administratif.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Ada beberapa isu penting yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DinasKoperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan :

a. Lemahnya pengelolaan data akibat terbatasnya sumber daya baik aparatur maupun sarana prasarana yang tersedia, berdampak pada ketersediaan data yang di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak akurat/valid, maka dalam pengelolaan data dapat melalui Online Data System (ODS) agar data yang didapat akurat sehingga mendorong peningkatan kualitas koperasi.

b. Masih minimnya Pelatihan dan bimbingan bagi pelaku usaha dan anggota koperasi guna meningkatkan kualitas SDM masyarakat. Dinas Koperasi , Usaha, Kecil dan Menengah perlu mengadaan Pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kualitas SDM.

c. Kurangnya Peningkatan mutu dan kualitas produksi UMKM atau standar mutu produk agar dapat bersaing di pasar global.

d. Penguatan basis produk Koperasi dan UKM dengan menggali potensi

sumberdaya lokal yang produktif, ramah lingkungan dan berkelanjutan serta membangun relasi dengan pihak-pihak lain yang dapat mendukung ketersediaan bahan baku yang berkualitas dengan harga yang kompetitif sehingga dapat bersaing di pasar global.

e. Masih minimnya Fasilitasi promosi dan pemasaran UMKM.

f. Fasilitas Promosi dan Pemasaran UMKM dapat dilakukan melalui perluasan akses

g. pasar bagi produk UMKM baik melalui online maupun offline.

h. Rendahnya Peningkatan monitoring dan evaluasi di bidang Koperasi dan UKM.

i. Monitoring dan evaluasi di bidang Koperasi dan UKM agar ditingkatkan untuk menghindari terjadinya koperasi dan UKM tidak berjalan / tidak aktif.

j. Banyaknya Koperasi tidak aktif sehingga perlu adanya penghapusan koperasi dan sangat berpengaruh pada IKU di Bidang Koperasi.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 definisi dari program adalaah Penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegatan dengan menggunakan sumber daya disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan di Tahun 2025 meliputi 7 Program, 12 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.486.038.513 (empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga tiga belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator program ini adalah Indeks Kepuasan Pelayanan, dengan target sebesar 80 point

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target berupa Dokumen Perencanaan dan Pelaporan sebanyak 11 dokumen.

   Sub Kegiatan pada kegiatan ini terdiri dari :

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, outputnya berupa dokumen Perencanaan sebanyak 3 dokumen;
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, outputnya berupa dokumen RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen;
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, outputnya berupa dokumen perubahan RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen;
   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, outputnya berupa dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen;
   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, outputnya berupa dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen;

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, outputnya berupa laporan kinerja sebanyak 4 laporan terdiri dari LPPD,LKJip,LKPJ dan Laporan Evaluasi Renja.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, target berupa Persentase penyelenggaran administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu 100%.
   Sub Kegiatan pada kegiatan ini terdiri dari :
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, outputnya berupa jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, outputnya berupa jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN sebanyak 12 dokumen ;
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, outputnya berupa dokumen laporan keuangan SKPD sebanyak 1 Laporan;
   d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, outputnya berupa dokumen laporan realisasi keuangan bulanan/triwulanan dan semesteran sebanyak 4 Laporan.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, target outputnya berupa persentase penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat daerah sebesar 100%.
   Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu;
   a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya , outputnya berupa 40 stel pakaian batik seragam sebanyak 20 Meter;
   b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi sebanyak 2 Orang.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, target outputnya berupa persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah sebesar 100%.
   Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, output berupa 5 jenis alat listrik dan komponen listrik kantor 12 Bulan ;
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, output berupa pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 6 unit;
   c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, ouput berupa peralatan rumah tangga sebanyak 6 Paket;
   d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, output berupa bahan logistik kantor sebanyak 10 Paket;

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, output berupa bahan cetak dan penggandaan sebanyak 6 Paket ;
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan, output berupa bahan bacaan dan perundang-undangan selama 10 Dokumen;
g. Penyediaan Bahan/Material, output berupa bahan/material yang disediakan sebanyak 1 paket;
h. Fasilitasi Kunjungan Tamu, outputnya laporan fasilitasi kunjungan tamu sebanyak 6 laporan;
i. Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, output berupa perjalanan dinas keluar dan kedalam daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi sebanyak 15 Laporan .

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, target outputnya berupa pembayaran rekening listrik, air dan telepon untuk 12 bulan.
   Sub Kegiatan ini adalah :
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, target output berupa rekening telepon, air dan listrik untuk 12 Laporan.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target outputnya berupa pemeliharaan barang milik daerah sebanyak 22 unit.
   Sub Kegiatan terdiri dari :
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan output berupa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebanyak 2 unit;
   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, output berupa jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara sebanyak 18 unit;
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, outputnya berupa rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor sebanyak 2 unit.

II. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Indikator kinerja program ini adalah Persentase Koperasi yang patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan target capaian adalah 100%.

Kegiatan yang akan dilakukan pada program ini yaitu:

1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
   Sub Kegiatan terdiri dari :

a. Penguatan tata Kelola Kelembagaan Koperasi target capaian sebanyak 50 Unit Usaha.

III. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Indikator kinerja program ini adalah Persentase USP/KSP oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya target capaiannya 100%.

Kegiatan yang akan dilakukan pada program ini yaitu:

1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

   Sub Kegiatan terdiri dari :

   a. Pelaksanaan penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan output Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan target capaian 50 Unit Usaha.
   b. Penilaian kesehatan koperasi meliputi tata Kelola, Profil resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan target capaian 25 Unit Usaha.

IV. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Indikator kinerja program ini adalah Persentase SDM Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan target capaian 100%.

Kegiatan yang akan dilakukan pada program ini yaitu:

1. Pendidikan dan Latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

   Sub Kegiatan untuk kegiatan ini adalah:

   a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi dengan output Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian target capaian 240 Orang .

V. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Indikator kinerja program ini adalah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan target capaian 100%.

Kegiatan yang akan dilakukan pada program ini yaitu:

1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

   Sub Kegiatan untuk kegiatan ini adalah:

   a. Pemberdayaan peningkatan produktivitas,nilai tambah,akses pasar,akses pembiayaan,penguatan kelembagaan,penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota dengan output

berupa Temu usaha kemitraan Koperasi dengan LPDB atau lembaga lainnya dalam rangka peningkatan produktivitas dan akses pembiayaan dan target capaian 45 Unit Usaha.

VI. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Indikator kinerja program ini adalah Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan dan target capaian 100%.

Kegiatan yang akan dilakukan pada program ini yaitu:

1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

   Sub Kegiatan terdiri dari :

   a. Pemberdayaan melalui kemitraan Usaha Mikro dengan output berupa Penyusunan dan Pemuktahiran data UMKM dan pendataan KUR dengan target capaian 90 Unit Usaha.
   b. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Pengembangan Usaha Mikr o, dengan output berupa Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro dengan target capaian 200 Unit Usaha.

VII. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Indikator Kinerja Program ini adalah Jumlah UMKM yang berkembang melalui Pelatihan,Bimtek, Sosialisasi dan Bantuan Hibah dengan target capaian 25 UMKM.

Kegiatan yang akan dilakukan pada program ini yaitu:

1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil.

   Sub Kegiatan untuk kegiatan ini yaitu:

   a. Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Tehnologi dengan output berupa jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan melalui pelatihan,bimtek,sosialisai dan bantuan hibah dengan target capaian 70 UMKM.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi Usaha Keciul dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 yang didalamnya mencakup penjabaran Program dan kegiatan yang merupakan pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan Pembangunan.

Rencana Kerja Perubahan ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian dukungan semua pihak dan tersediaanya anggaran yang memadai. Melalui Renja Perubahan ini diharapkan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan dapat melaksanakan tugas secara terarah , terintegritas, bertahap dan berkelanjutan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Kalianda, 15 Juli 2025
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM

ARYANTONI, S.Sos.,MM
NIP. 19720924 199303 1 002

RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH
(RENJA P-PD) TAHUN 2025



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat- Nya, sehingga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung SelatanTahun 2025. Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan pada hakekatnya merupakan miniatur kehidupan, hal ini dapat dikatakan demikian karena didalam aktifitas kepemudaan dan keolahragaan terdapat aspek-aspek yang berkaitan dengan tujuan, perjuangan, kerjasama, persaingan, komunikasi dan integrasi, kekuatan fisik dan daya tahan mental, kebersamaan, sikap responsif, pengambilan keputusan, kejujuran dan sportifitas.

Semua aspek tersebut diatas merupakan aspek-aspek yang berada dalam diri manusia baik secara individu maupun secara bermasyarakat. Ikut aktif dalam kepemudaan dan keolahragaan berarti melatih diri untuk meningkatkan kualitas berbagai aspek yang diperlukan untuk dapat eksis ditengah-tengah masyarakat yang semakin dinamis..

Sehubungan hal tersebut, diperlukan strategi jangka panjang dan jangka menengah yang tepat untuk mensinergikan berbagai peluang dan tantangan dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan. Program pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang terencana dan terprogram secara baik dan berkelanjutan akan menentukan tingkat keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Dukungan elemen-elemen yang berkenaan dengan kepemudaan dan keolahragaan juga sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian prestasi dan pelaksanaan kegiatan untuk mendapatkan hasil yang optimal Dengan tersusunnya Renja Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ini, diharapkan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Lampung Selatandapat berjalan dan berhasil guna.

DAFTAR ISI

Halaman

COVER i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.3.1 Maksud 5

1.3.2 Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Tahun Lalu 7

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan 7

2.1.2 Capaian Renstra OPD Tahun Lalu 14

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15

2.3 Isu-Isu Strategis 23

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 26

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 34

BAB III TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH 35

3.1 Tujuan Terhadap Kebijakan Nasional 35

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 38

3.3 Program dan Kegiatan 38

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 43

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan 43

4.2 Singkronisasi Prioritas Perangkat Daerah 52

BAB V PENUTUP 56

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Lampung Selatan 9

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan 15

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan 27

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan / Masyarakat di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan 34

Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 39

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan 44

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

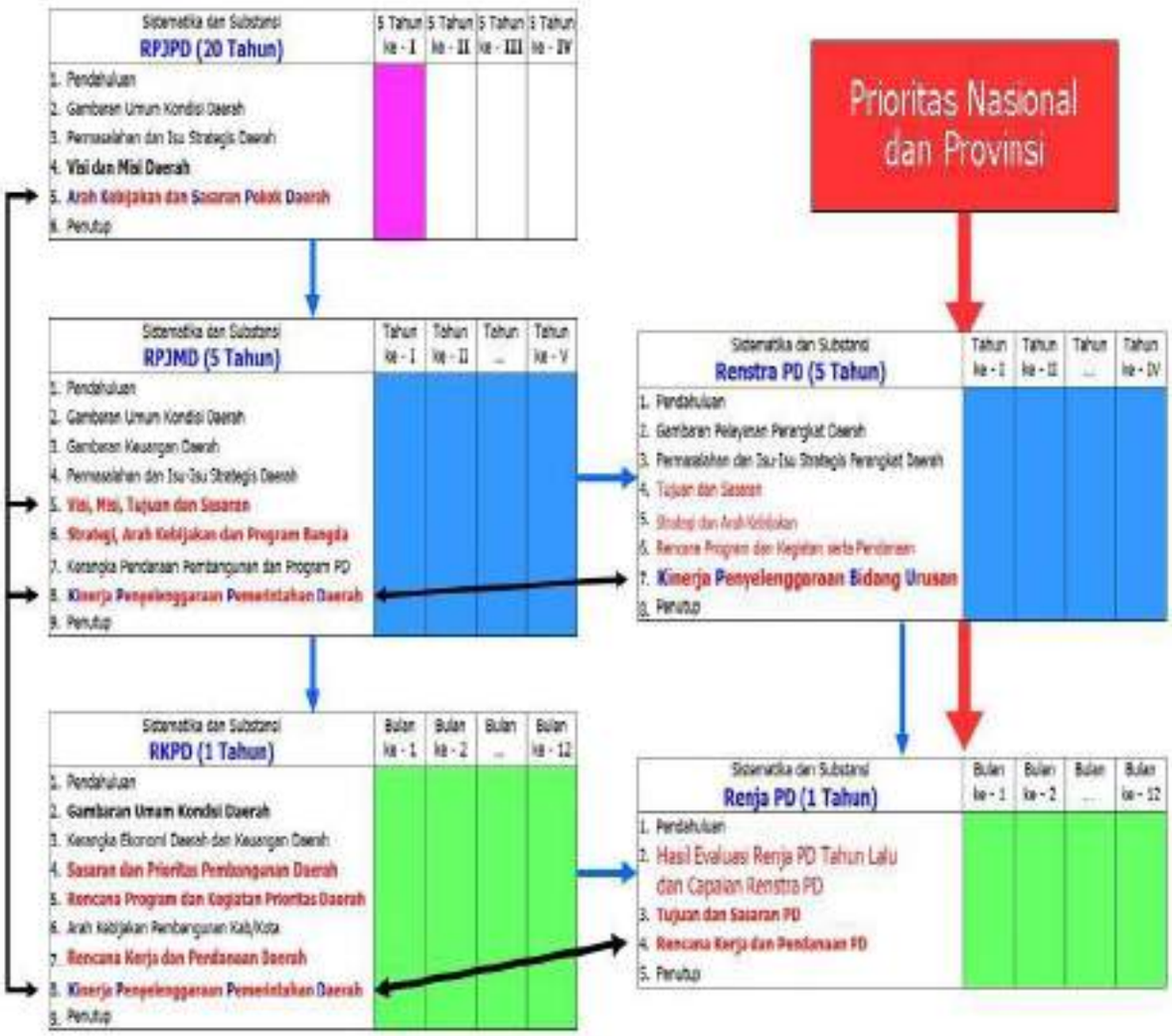
Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA P PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju. Renja PD disusun dengan mengacu pada rancangan rencana kerja perangkat daerah, Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Juga untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rencana kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

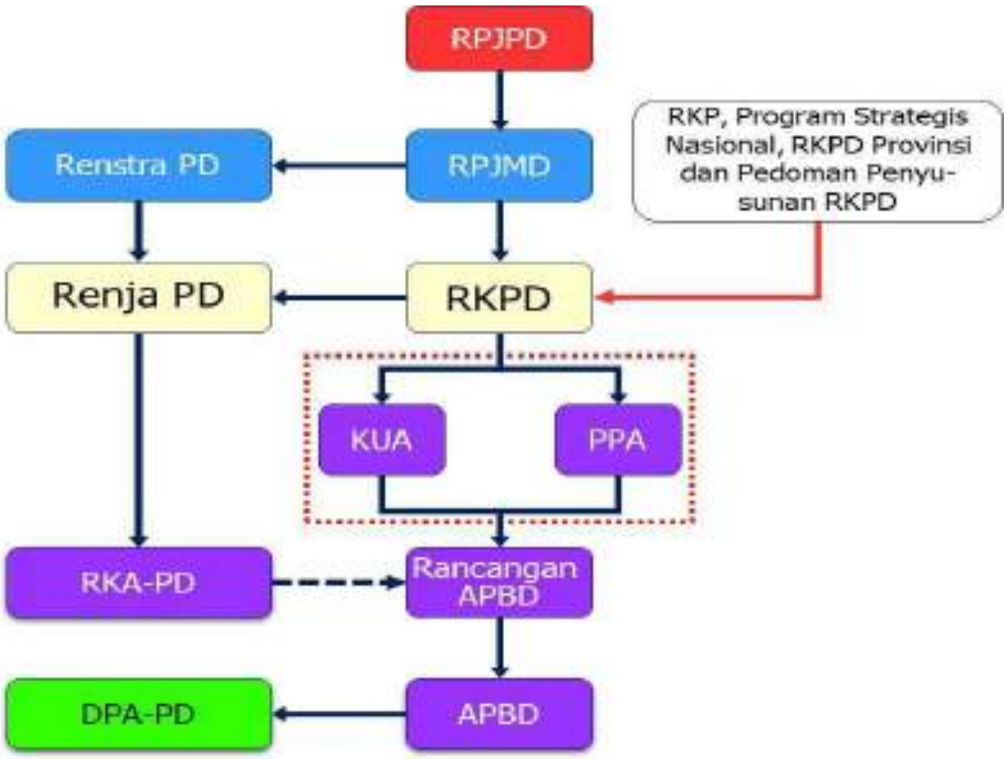
1. Persiapan penyusunan Renja PD;
2. Penyusunan rancangan Renja PD;
3. Pelaksanaan forum OPD; dan
4. Penetapan Renja Perubahan.

Renja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) 2021 - 2026 pelaksanaan Renstra tahun kelima. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan itu sendiri, merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lampung Selatantahun 2021 - 2026. Penyusunan Renja OPD Tahun
2024 dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan program / kegiatan tahunan yang merupakan pelaksanaan Renstra yang telah ditetapkan, dengan tujuan agar pelaksanaan perencanaan Program / Kegiatan yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan baik sehingga pelaksanaannya dapat terarah, efektif, efisien tepat waktu, tepat sasaran dan tepat administrasi yang pada akhirnya akan dapat mendukung keberhasilan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kepemudaan dan Olahraga yang telah ditentukan yaitu terwujudnya pemuda dan olahraga yang produktif, prestatif dan inovatif menuju **VISI ; *Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan yang Berintegritas, Maju dan Sejahtera dengan Semangat Gotong Royong.***

Secara garis besar hubungan Renja Perubahan OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan dengan dokumen lainnya merupakan hubungan yang sifatnya saling mengacu, menjabarkan dan sebagai pedoman perencanaan lainnya. Keterkaitan Renja OPD dengan Renstra OPD, RPJM, Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Kabupaten/Kota secara garis besar hubungan tersebut dapat dilihat seperti pada bagan berikut ini:



Gambar 1.1 Bagan Keterkaitan Renja-SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya



Gambar 1.2 Bagan Keterkaitan Renja-SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya

RENJA Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025. Sedangkan RKA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kabupaten Lampung Selatan. Oleh karena itu RENJA merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Perubahan Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembanggunan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dibah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-6889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ Tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 -2024;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja Perubahan PD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 adalah untuk mengoptimalakan pencapaian terget kinerja Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan 2025 adalah: menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasionil :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Lampung Selatan untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ;
b. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pemuda dan olahraga dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan Renja OPD

Sistimatika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatansebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, hasil review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran Renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) sesuai dengan bidang urusan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat
Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bagian ini menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2023 dan perkiraan capaiannya di tahun 2024 serta capaian Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2021-2026.

Tabel yang akan digunakan menjelaskan kedua hal tersebut adalah tabel 2.1 yang memuat rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan tahun 2024 Kabupeten Lampung Selatan. Tabel 2.1 tersebut ditempatkan pada subbab 2.1.1.

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Prakiraan Capaian Tahun Berjalan

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2023 didasarkan pada pencapaian output (keluaran) dari masing-masing kegiatan yang selanjutnya digunakan untuk melihat pencapaian sasaran program. Hasil evaluasi program dan kegiatan tahun 2023 yang bersumber dana dari APBD Kabupaten memperlihatkan bahwa pencapaian kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh DISPORA memperoleh hasil yang sangat memuaskan, Besarnya Pagu Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 7.113.162.850** (Tujuh milyar Seratus Tiga Belas Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut:

- **Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 89.250.000 (per 31 Desember 2023)**
- **Belanja Operasi Rp 7.113.162.850**
- **Belanja Tidak Langsung Rp 3.345.918.500**
  - Belanja Pegawai Rp.2.495.918.500
  - Belanja Hibah Rp. 850.000.000
- **Belanja Langsung Rp 3.767.244.350**
  - Belanja Barang dan Jasa Rp.3.737.477.350
  - Belanja Modal Rp. 29.767.000

Belanja Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. **7.113.162.850** dan realisasinya mencapai sebesar Rp **7.046.313.193** atau 99,1% Secara rinci Belanja Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp. **3.767.244.350** dan realisasinya tercapaisebesar Rp.**3.761.044.250** atau 99,84 %.
2. Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp. **3.345.918.500** dan realisasinyaercapai sebesar Rp. **3.285.268.943** atau 98,19 %

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	19					**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga**									
02	19					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan								
02	19	01	2	01	01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	50 Dok	10 Dok	10 Dok	30 Dok	100%	10 Dok	10 Dok	60%
02	19	01	2	01	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dok	2 Dok	2 Dok	6 Dok	100%	2 Dok	2 Dok	60%
02	19	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dok	1 Dok	1 Dok	3 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	60%
02	19	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dok	1 Dok	1 Dok	3 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	60%
02	19	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dok	1 Dok	1 Dok	3 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	60%

02	19	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dok	1 Dok	1 Dok	3 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	60%
02	19	01	2	01		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Dok	4 Dok	4 Dok	12 Dok	100%	4 Dok	4 Dok	60%
02	19	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
02	19	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	36 Orang/Bulan	95%	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	60%
02	19	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dok	12 Dok	36 Dok	99%	12 Dok	12 Dok	60%
02	19	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	60%
02	19	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	54 Laporan	100%	18 Laporan	18 Laporan	60%
02	19	01	2	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**								
02	19	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	3 Paket	3 Paket	9 Paket	98%	3 Paket	3 Paket	60%
02	19	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**								
02	19	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	JumlahPaket KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	10 Paket	10 Paket	30 Paket	100%	10 Paket	10 Paket	60%
02	19	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Unit	2 Unit	2 Unit	6 Unit	100%	-	-	60%

02	19	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	95 Paket	19 Paket	19 Paket	57 Paket	100%	19 Paket	19 Paket	60%
02	19	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	215 Paket	43 Paket	43 Paket	129 Paket	100%	43 Paket	43 Paket	60%
02	19	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	3 Paket	3 Paket	9 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	60%
02	19	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	35 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	21 Dokumen	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	60%
02	19	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	33 Laporan	100%	11 Laporan	11 Laporan	60%
02	19	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	72 Laporan	98%	24 Laporan	24 Laporan	60%
02	19	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
02	19	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	20 Unit	20 Unit	60 Unit	99%	18 Unit	18 Unit	60%
02	19	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan								
02	19	01	2	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bulan**								
02	19	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36 Laporan	97%	12 Laporan	12 Laporan	60%
02	19	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Besaran dan satuan tergantung OPD**								
02	19	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	2 Unit	2 Unit	6 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	60%
02	19	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	4 Unit	4 Unit	12 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	60%

02	19	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5Unit	1 Unit	1 Unit	3 Unit		1 Unit	1 Unit	60%
02	19	c	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	20 Unit	20 Unit	60 Unit	100%	20 Unit	20 Unit	60%
02	19	02	2			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Pemuda berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional (Paskibra, Pemuda Pelopor dan Wirausaha)**								
02	19	02	2	01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader (Rapat/Koordinasi)**								
02	19	02	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	150 Orang	30 Orang	30 Orang	90 Orang	100%	30 Orang	30 Orang	60%
02	19	02	2	01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	20 Orang	20 Orang	60 Orang	100%	20 Orang	20 Orang	60%
02	19	02	2	01	05	Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	_	1	1		1 Dokumen	1 Dokumen	20%
02	19	02	2	01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	170 Orang	28 Orang	28 Orang	84 Orang	100%	28 Orang	28 Orang	32.94%
02	**19**	**03**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Cakupan pembinaan olahraga (%)**								

02	19	03	2	01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah (Rapat/Koordinasi)**								
02	19	03	2	01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	150 Unit	30 Unit	30 Unit	90 Unit	100%	30 Unit	30 Unit	60%
02	**19**	**03**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Atlet Daerah yang dibina (Orang)**								
02	19	03	2	02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	25 Dokumen	10	10	30		5 Dokumen	5 Dokumen	60%
02	**19**	**03**	**2**	**04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina dan dikembangkan (Organisasi)**								
02	19	03	2	04	01	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	10 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	6 Organisasi	100%	2 Organisasi	2 Organisasi	60%
02	19	03	2	05		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Penyelenggaraan Festival dan Olahraga Rekreasi (Event)**								
02	19	03	2	05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	60%
02	19	03	2	05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	40 Gedung	8 Gedung	8 Gedung	24 Gedung		8 Gedung	8 Gedung	60%

2.1.2 Capaian Renstra OPD Tahun Lalu

Pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 dilakukan dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan kebijakan / program / kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan.

Pelaksanaan Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dalam Rencana Kerja Tahunan untuk Tahun 2023 terdiri dari 4 (Empat) Program antara lain :

1. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.*
2. *Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.*
3. *Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan*
4. *Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan*

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan, efektifitas kinerja pada tingkat 98,19% termasuk pada kategori *sangat baik*

Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya kinerja Program / Kegiatan terhadap target capaian program Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga selanjutnya adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya. Apabila pelaksanaan Renja OPD tahun yang lalu mempunyai kinerja yang kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja untuk diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelunya.

:

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan SPM (Standar Pelayanan Minimal) IKU dan IKK (Indikator Kinerja Kunci) Dinas Kepemudaan dan Olahraga hingga tahun berjalan 2024 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.2 di bawah ini.

No	Indikator	Target Renstra		Realisasi Capaian	
		2022	2023	2022	2023
1	Cabang Olahraga yang berprestasi pada event Nasional (jenis)	5 (Jenis)	6 (Jenis)	7 (Jenis)	6 (Jenis)

Target kinerja Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga secara umum dapat dilihat dari table di atas pada tahun 2022 lalu dinas kepemudaan mempunyai target 5 (lima) cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional dengan realisasi 7 (Tujuh) cabang olahraga tingkat nasinal dengan persentase 140% sedangkan tahun 2023 ini mempunyai target 6 (enam) cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional dengan realisasi 6 (enam) cabang olahraga tingkat nasinal dengan persentase 100%.

Berdasarkan data diatas prestasi olahraga di tahun 2023 ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu , namun secara target dapat terpenuhi 100 %

Keberhasilan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam hal mencapai Target Indikator Kinerja Utama ditunjang dengan adanya Kerjasama Antar Stakeholder dan Organisasi yang ada dikabupaten Lampung Selatan.

Serta adanya peningkatan dalam Anggaran yang untuk menunjang Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga.

Bentuk Kerjasama yang dilakukan dengan Organisasi Kepemudaan adalah dengan cara memberikan Pasilitas untuk melakukan kegiatan Pembinaan Kepemudaan, dan Kerjasama yang dilakukan dalam Hal olahraga yaitu dengan bekerjasama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten lampung Selatan dan melibatkan Komite Olahraga Kecamatan (KOK) untuk menjaring Atlet yang berprestasi.Kegiatan yang dilakukan untuk Menjaring Atlet adalah dengan melaksanakan Program Kegiatan Kejuaraan / lomba ditingkat Pelajar.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Lampung Selatan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Indikator Kinerja Kunci											
	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan			60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	
	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan			2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	
	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda			28 Orang	28 Orang	28 Orang	28 Orang	28 Orang	28 Orang	28 Orang	28 Orang	
	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan			–	–	–	–	–	–	–	–	
	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan			40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	
	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah			3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	

Tabel 2.2.1

DATA DAN NAMA ATLET BERPRESTASI
CABANG OLAHRAGA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2023

1. CABANG OLAHRAGA : BULUTANGKIS

NO	NAMA	PRESTASI TINGKAT PROVINSI			PRESTASI TINGKAT NASIONAL			ALAMAT/ ASAL SEKOLAH	KET./ KEGIATAN
		EMAS	PRK	PRG	EMAS	PRK	PRG		
1	**KAFI RADITYA PANDIKA**				**1**			**SITARA NATAR**	**Porseni NU Tingkat Nasioanl di Solo**
2	Aysel Faiha Kavi			1				NATAR	SEMADAF 2023, di Lap. UIN Raden Intan , tgl 4-6 Maret 2023
3	Rifqi Adnan Adhandi	1						NATAR	SEMADAF 2023, di Lap. UIN Raden Intan , tgl 4-6 Maret 2023
4	Raka Riyan Pratama	1						NATAR	SEMADAF 2023, di Lap. UIN Raden Intan , tgl 4-6 Maret 2023
5	Aysel Faiha Kavi	1						NATAR	SEMADAF 2023, di Lap. UIN Raden Intan , tgl 4-6 Maret 2023
6	Rafif Alghifari		1					NATAR	SEMADAF 2023, di Lap. UIN Raden Intan , tgl 4-6 Maret 2023
7	YOGA ADI PRATAMA		1					SMK SWADHIPA 2 NATAR	KEJUARAAN DAERAH PIALA GUBERNUR (27-28 MEI 2023)

2. CABANG OLAHRAGA : WUSHU

NO	NAMA	PRESTASI TINGKAT PROVINSI			PRESTASI TINGKAT NASIONAL			ALAMAT/ ASAL SEKOLAH	KET./ KEGIATAN
		EMAS	PRK	PRG	EMAS	PRK	PRG		
1	DIMAS BAGASKORO	2			1			SMAN 10 BANDAR LAMPUNG	1 MENDALI EMAS FORNAS JAWA BARAT (4-5 JULI 2023) 2 MENDALI EMAS KEJURDA PIALA GUBERNUR (27-28 MEI 2023)
2	ABID NAILUN NABHAN	1	1					SDIT HARAPAN BANGSA	KEJUARAAN DAERAH PIALA GUBERNUR (27-28 MEI 2023)
3	MIKAIL FARRAS RAGAH ZUBIR	1	1					SDIT HARAPAN BANGSA	KEJUARAAN DAERAH PIALA GUBERNUR (27-28 MEI 2023)

4	ANNISA PRAMESWARI	1		1				SMPN 1 NATAR	KEJUARAAN DAERAH PIALA GUBERNUR (27-28 MEI 2023)
5	M. FAUZAN AL ZAKI		2					SDIT HARAPAN BANGSA	KEJUARAAN DAERAH PIALA GUBERNUR (27-28 MEI 2023)
6	AGUNG WIBOWO		1					UNIV. MALAHAYATI	KEJUARAAN DAERAH PIALA GUBERNUR (27-28 MEI 2023)
7	ARIF SEPTIAN			1				UIN RADEN INTAN LAMPUNG	KEJUARAAN DAERAH PIALA GUBERNUR (27-28 MEI 2023)
8	AHMAD FATIH ALFARIZY			1				SDIT HARAPAN BANGSA	KEJUARAAN DAERAH PIALA GUBERNUR (27-28 MEI 2023)
9	RIDITA AYU PRAWITASARI			1				SDN 1 SIDOHARJO	KEJUARAAN DAERAH PIALA GUBERNUR (27-28 MEI 2023)
10	MUHAMMAD ZIKRI PRATAMA			1				SMKN 2 BANDAR LAMPUNG	KEJUARAAN DAERAH PIALA GUBERNUR (27-28 MEI 2023)
11	TIARA FERONIKA			1				MA HIDAYATUL MUBTADIIN	KEJUARAAN DAERAH PIALA GUBERNUR (27-28 MEI 2023)
12	MAELA ELGA FADILAH			1				SMA NEGERI 1 NATAR	KEJUARAAN DAERAH PIALA GUBERNUR (27-28 MEI 2023)
13	YOGA ADI PRATAMA		1					SMK SWADHIPA 2 NATAR	KEJUARAAN DAERAH PIALA GUBERNUR (27-28 MEI 2023)

3. CABANG OLAHRAGA : RENANG

NO	NAMA	PRESTASI TINGKAT PROVINSI			PRESTASI TINGKAT NASIONAL			ALAMAT/ ASAL SEKOLAH	KET./ KEGIATAN
		EMAS	PRK	PRG	EMAS	PRK	PRG		
1	Farez Rakata Pinuluh					1	2	SMAN 1 Tanjung Bintang	Kejur Walikota Cap Se Sumatra 2023
2	Fadgham Azka Atalasyah					1	2	SMPN 2 Merbau Mataram	Kejur Walikota Cap Se Sumatra 2023
3	Kanza Khalilla Raisyah				1	2	1	SMPN 1 Tanjung Bintang	Kejur Walikota Cap Se Sumatra 2023
4	Retno Ayu Salindri					1	1	SMAN 1 Tanjung Bintang	Kejur Walikota Cap Se Sumatra 2023

5	Sofy Alfira Ramadhani						1	SMAN 1 Tanjung Bintang	Kejur Walikota Cap Se Sumatra 2023

4. CABANG OLAHRAGA : PANJAT TEBING

NO	NAMA	PRESTASI TINGKAT PROVINSI			PRESTASI TINGKAT NASIONAL			ALAMAT/ ASAL SEKOLAH	KET./ KEGIATAN
		EMAS	PRK	PRG	EMAS	PRK	PRG		
1	JAKA SAPUTRA				1			Bumi Sari , Natar	Kejuaraan Mapala Orienteering and Climbing Competion Nasional 2023, Malahayati Tgl 09 -14 Okt 2023
2	DELLA AGUSTIN				1			Tejo Martani Branti Raya Natar	
3	DINA AGUSTIN				1			Tejo Martani Branti Raya Natar	
4	NINDI LARASATI						1	Tejo Martani Branti Raya Natar	

5. CABANG OLAHRAGA : KARATE

NO	NAMA	PRESTASI TINGKAT PROVINSI			PRESTASI TINGKAT NASIONAL			ALAMAT/ ASAL SEKOLAH	KET./ KEGIATAN
		EMAS	PRK	PRG	EMAS	PRK	PRG		
1	SELLY SEPTIANI					1		Karang Anyar Jati Agung	KEJURNAS KARATE KEPALA STAF ANGKATAN LAUT (KASAL) CUP 2 Jakarta, 14 Januari 2023
2	SHIN AHMAD QODRI				1			Jati Agung	Kejuaraan KKI Open Sumatera Championship I 2023 piala Pangdam II Sriwijaya, Jambi 20-22 Januari 2023

3	PUTRI OKTAVIA				1				
4	M. MULYA MUSTOFA					1		ASRAMA KODIM 0421 L/S Siswa SMPN1 Kld	
5	SHIN AHMAD QODRI				1			Jati Agung	Kejurnas Banyuwangi National Karate Open Championship II, GOR Tawang Alun Banyuwangi Jatim, 21-25 Juni 2023
6	SELLY SEPTIANI						1	Karang Anyar Jati Agung	Kejurnas Banyuwangi National Karate Open Championship II, GOR Tawang Alun Banyuwangi Jatim, 21-25 Juni 2023
7	CAROLINA NARESWARI LOMA				1				UPI KARATE CUP IV 2023 NATIONAL OPEN TOURNAMEN & FESTIVAL , BANDUNG, 28-29 OKT 2023
8	REVANDO TOFIK HIDAYAT				1				
9	RAZED SAZRIM					1			
10	M. RAFI AR RASYID						1		
11	ADITYA IQBAL						1		
12	GITA SARAH					1			
13	SHIN AHMAD QODRI						1	Jati Agung	
14	AURELIA PUTRI SALSABILA						1		
15	ARLIA RAINY FABRISIA						1		
16	NOVALDO SYAHPUTRA						1		

6. **CABANG OLAHRAGA : TAEKWONDO**

NO	NAMA	PRESTASI TINGKAT PROVINSI			PRESTASI TINGKAT NASIONAL			ALAMAT/ ASAL SEKOLAH	KET./ KEGIATAN
		EMAS	PRK	PRG	EMAS	PRK	PRG		
1	ARFAN HAFID ABDILAH				1				Kejuaraan Nasional Everest Kemenpora CUP, GOR POPKI Cibubur Tgl 14 s/d 17 Desember 2023
2	MAHER AIKO GUMELAR				1				
3	MUHAMAD AIKO DINENDJAD				1				
4	CONCHITA OURI KIRANA				1				
5	LADYA AZEONA ROSES				1				
6	NAYLA FAHRA HANAYA				1				
7	NASYA WANDIRA FAUZI				1				
8	FELCIA NUR HAFIZAH					1			
9	NADIA RATNA DEWI					1			
10	MALIKA DWINI PUTRI				1				
11	ZAHIRA FAIRUZ				1				
12	LINTANG ARHAN P.				1				
13	RIKA TRI ASTUTI				1				
14	ALUNA PUTRI FELCIA				1				
15	AFGAN GAMA HATTA R.				1				
16	ASRAF ALKABY				1				
17	JENETA NAYLA					1			
18	RIDHO PRATAMA					1			
19	AUREL NAYAKA					1			
20	SENJA VELISTA					1			
21	SERLI MAYA INDAH SARI				1				

22	RAFIQ ILHAM				1				
23	NAJLA SYAKIRA ELISYA				1				
24	YEYEN LESTARI				1				
25	TASYA ABELIA				1				
26	MARITA CINTA BELA				1				
27	ISMA MAWAR DYAN KAMILA				1				
28	AUREL REPUBIANTI				1				
29	AZKA RAMADHAN					1			
30	FAQIH AL-GHAZALI HUTAGALING					1			
31	BILQIS NOBLE SATRIA					1			
32	VIAN RONALDO					1			
33	GITA TRI CAHYA					1			

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga pengendalian pertanahan dan tata ruang dalam pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalami UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2021-2026) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kepemudaan dan OlahragaKabupaten Lampung Selatan dan telaahan terhadap Renstra Kementerian, Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi, maka dapat teridentifikasi isu isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan di bidang kepemudaan dan keolahragaan kepadamasyarakat;
2. Belum optimalnya pembinaan OKP dan kepemudaan sejauh ini Baru beberapa Kelompok Pemuda antaralain : pemuda di kecamatan kalianda, Penengahan,Jatiagung Candipuro.
3. Kurang tertanamnya jiwa wirausaha dan aksesbilitas usaha dikalangan pemuda;
4. Beberapa Prestasi olahraga belummaksimal antara Lain :Sepak Bola, Bola Volly, Atletik, Tinju, Pencaksilat, dll.
5. Budaya Olahraga di masyarakat Perlu ditingkatkan.
6. Masih kurangnya fasilitas olahraga indoor milik pemerintah dan swasta.
7. Kurangnya fasilitas ruang terbuka untuk kegiatan pemuda dan olahraga

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora Kabupaten Lampung SelatanPerumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora.

Permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora sebagaimana tabel diatas, yaitu :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dispora Kabupaten Lampung Selatan:

1) **Urusan Pemuda,** pelayanan kepemudaan belum optimal mengingat banyaknya jumlah pemuda dengan berbagai permasalahan pemuda di Kabupaten Lampung selatan belum dapat tertangani secara optimal. Hal ini disebabkan :

- Terbatasanya jumlah kegiatan bila dibandingkan dengan jumlah pemuda dan luasnya cakupan wilayah pembinaan yang tersebar di 17 Kecamatan
- Kegiatan kepemudaan belum dirasakan menyentuh kepada pemuda di kecamatan/desa
- Kelangkaan prasarana Gedung Kepemudaan membuat aktivitas pemuda belum terakomodir melalui kegiatan/kreativitas pembinaan dalam ruang
- Prestasi Pemuda Kabupaten Lampung selatan masih kurang khususnya pada keikutsertaan kegiatan pemuda tingkat provinsi dan nasional.

2) **Urusan Keolahragaan,**

Pelayanan keolahragaan dari tahun 2021 terus mengalami peningkatan, tetapi masih didominasi kegiatan penyelenggaraan-penyelenggaraan/event olahraga. Pada kegiatan mengikuti kejuaraan tingkat provinsi beberapa kegiatan telah dapat diikuti oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan dengan cukup berprestasi.

2. **Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan.**

Keterbatasan kebijakan pelayanan Pemuda di Kabupaten Lampung Selatan karena ada beberapa kegiatan terutama pada *Pelatihan Kewirausahaan* yang juga berkaitan dengan program/Kegiatan OPD lainnya seperti Disnakertrans dan juga Disperindakop, sama halnya dengan kegiatan *Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda* berkaitan juga dengan program yang ada pada BNN.

Secara struktur organisasi, saat ini DISPORA telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang disyaratkan. Setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan dalam menyusun perencanaan program kegiatan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ditahun berikutnya diharapkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab.Lampung Selatan bisa

meningkatkan kapasitas baik dari kecepatan, ketepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana pada Program di Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

3. **Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan.**

a. Tantangan :

- Jumlah pemuda yang meningkaat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan
- Luasnya wilayah pembinaan pemuda
- Penanganan Pemuda belum tertangani secara optimal
- Tingkat pengguna narkoba dikalangan pemuda maupun remaja harus didukung dengan data di masing-masing kecamatan dan juga BNN.
- Masih kurangnya atlet berprestasi
- Kurangnya fasilitas olahraga indor milik pemerintah dan swasta
- Kurangnya fasilitas ruang terbuka untuk kegiatan pemuda dan olahraga
- Kurangnya data yang diperoleh terkait jumlah orang/atlit ataupun persentase pada Program/kegiatan.
- Kurangnya wadah bagi pemuda dalam hal melatih dan membentuk pemuda mandiri.

b. Peluang :

a. Luasan wilayah Kabupaten Lampung Selatan
b. Adanya induk organisasi kepemudaan KNPI Kabupaten Lampung Selatan
e. Banyaknya jumlah usia muda /pelajar
f. Adanya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
g. Adanya Organisasi Olahraga, KONI Kabupaten Lampung Selatan
a. Adanya partisifasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan prasarana olahraga.
b. Adanya partisipasi masyarakat, insan olahraga dalam pengembangan minat, bakat dan prestasi olahraga di Kabupaten Lampung Selatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 pada prinsipnya berjalan sebagaimana mestinya apa yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabuapten Lampung Selatan Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Lampung Selatan

RANCANGAN AWAL RKPD					RANCANGAN AKHIR KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan/SubKegiatan	**Lokasi**	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Pagu**	**Program/Kegiatan/SubKegiatan**	**Lokasi**	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Pagu**
				6.872.103.100					7.352.049.850
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Pelayanan		3.708.132.100	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Indeks Kepuasan Pelayanan		3.517.378.850
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen**	-	93.050.500	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen**	-	56.091.650
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	25.879.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	13.636.150
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13.879.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.897.200
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12.988.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.061.700
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12.789.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.981.100

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	15.515.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	15.515.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	2.923.027.000	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			-	2.912.317.500
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/Bulan	2.366.570.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/Bulan	2.366.570.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	536.457.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	532.380.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	3.367.500
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3 Paket	50.102.000	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			3 Paket	50.102.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	50.102.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	50.102.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	158.975.000	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			-	99.708.900
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	JumlahPaket KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	JumlahPaket KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10.000.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	10.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43 Paket	30.448.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43 Paket	20.555.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	6.228.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	18.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	18.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	12.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	6.942.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	48.527.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	22.592.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	15.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	5.390.900
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	190.307.600	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			-	120.901.600
Pengadaan Mebel	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		19.427.600	Pengadaan Mebel	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		27.632.600
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		170.880.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		93.269.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 Laporan	105.200.000	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			12 Laporan	90.817.200
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.617.200

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	85.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	85.200.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	187.470.000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-	187.440.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	122.470.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	75.940.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	16.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	45.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			-	337.566.000	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			-	778.266.000
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			-	302.566.000	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**			-	743.266.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	40 Orang	97.495.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	40 Orang	97.495.000

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	50 Orang	62.071.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	50 Orang	62.071.000
Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	40 Orang	93.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	40 Orang	533.700.000
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**35.000.000**	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**35.000.000**
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	40 Orang	35.000.000	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	40 Orang	35.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**				2.956.405.000
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			18 Unit	2.726.405.000	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			18 Unit	333.475.000
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	18 Unit	183.475.000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	18 Unit	333.475.000
				183.475.000					
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	184.450.000	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			-	184.450.000

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	184.450.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	184.450.000
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			-	172.250.000	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**			-	172.250.000
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	10 Orang	150.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	10 Orang	150.000.000
pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	22.250.000	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	22.250.000
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			2 Organisasi	1.100.000.000	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**			2 Organisasi	900.000.000
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Organisasi	1.100.000.000	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Organisasi	900.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			-	1.086.230.000	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**			-	1.366.230.000
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	4 Dokumen	296.230.000	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	4 Dokumen	296.230.000
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	8 Gedung	790.000.000	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	8 Gedung	1.070.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			-	100.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			-	100.000.000

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			-	100.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			-	100.000.000
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	15.000.000	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	15.000.000
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	70.000.000	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	70.000.000
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	15.000.000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	15.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat melalui mekanisme musrenbang tingkat kecamatan dan POKIR Dewan Kabupaten Lampung Selatan

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Hasil Musrenbang Tahun2025 Kabupaten Lampung Selatan

NO	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	4		3	5	6

Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan POKIR Tahun2025 Kabupaten Lampung Selatan

NO	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	4	3	5	6
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jln. Tribrata No 1 Wayurang Gedung tenis Indoor Kalianda Lampung Selatan	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	800.000.000,-	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Tema Pembangunan Nasional adalah *Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan* dengan 8 Program Prioritas Nasional yaitu :

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ;
2. Peningkatan Kualitas SDM melalui Kesehatan dan Pendidikan ;
3. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha ;
4. Revitalisasi Industry dan Penguatan Riset Terapan ;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi ;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Air Bersih dan Sanitasi ;
7. Pembangunan Ibukota Nusantara.

Program Prioritas yang sesuai dengan tupoksi dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Program *2.) Peningkatan Kualitas SDM melalui Kesehatan dan Pendidikan.*

dengan Arah Kebijakan Pembanguna Daerah sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dengan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yaitu Penguatan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dengan tujuan mengembangkan budaya olahraga dalam rangka mendukung gerakan masyarakat hidup sehat dikeluarga, satuan pendidikan dan masyarakat melalui :
   - Pengembangan Olahraga Pendidikan
   - Pengembangan Olahraga Rekreasi
   - Pengembangan Olahraga Tradisional dan layanan khusus

2. Pembangunan Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dengan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yaitu Olahraga Prestasi dengan tujuan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional melalui :
   - Penataan sentra keolahragaan dan kompetensi olahraga berbasis cabang olahraga olimpiade
   - Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar nasional
   - Penyediaan sarana dan prasarana olahraga sesuai standar Internasional
3. Pembangunan Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dengan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yaitu Kualitas Pemuda dengan tujuan menguatkan kapasitas kelembagaan dan system koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan ynag terintegrasi dan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dengan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yaitu Karakter dan Ideologi Pancasila dengan tujuan peningkatan pembinaan karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan ideologi Pancasila melalui gerakan Pramuka, wawasan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

5. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dengan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yaitu Pencegahan perilaku beresiko pemuda dengan tujuan peningkatan koordinasi strategis lintas sector dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dikalangan pemuda.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan mendukung Prioritas Nasional ketiga, yaitu "*Meningkatkan Kualiatas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing menbangun karakter bangsa*" sedangkan Misi Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung selatan Adalah "*Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial,*" dengan program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut;

a. Program Pengembangan Kapasitas Dayasaing Kepemudaan

b. Program Pengembangan Kapasitas Dayasaing Keolahragaan

c. Program Pengembangan Keramukaan

Dalam Menyelaraskan Kebijakan-kebijakan pemuda dan olahraga di daerah dalam pelaksanaan kegiatan Dispora mengacu dari keibijakan di tingkat nasional, hal ini diharapkan kegiatan yang dilaksanakan secara nasional

Rencana kerja bagi setiap OPD dibuat dengan tujuan untu mencapai kinerja dalam upaya mencapai Visi dan Misi melalui perencanaan yang diharapkan dapat dapat mencapai output kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Denganrencana kerja yang disusun oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan dalam implementasinya diharapkan dapat dilakukan suatu pengawasan dan evaluasi kinerja sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terukur dan berhasil sesuai dengan yang telah direncanakan.

Pelaksanaan tupoksi setiap OPD tidak dapat dipisahkan dengan isu isu strategis yang berkembang di tingkat nasional dan provinsi. Pembangunan nasional yang dilaksanakan adalah bersifat komprehensif dan sinergis, yaitu memiliki arti bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Sejalan dengan implementasi otonomi daerah maka setiap pemerintah daerah merupakan ujung tombak pembangunan nasional. Semua urusan yang telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah dibagi habis dalam setiap OPD sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Isu-isu strategis yang merupakan fenomena nyata yang wajib dicermati dan diidentifikasi dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan OPD yang melaksanakan urusan bidang Kepemudaan dan olahraga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung selatan adalah :

1. Meningkatkan pelayanan di bidang kepemudaan dan keolahragaan kepadamasyarakat;
2. Menambah pembinaan OKP dan kepemudaan sejauh ini Baru beberapa Kelompok Pemuda antaralain : pemuda di kecamatan kalianda, Penengahan,Jatiagung Candipuro.
3. Menambah Pelatihan dan bantuan untuk wirausaha dan aksesbilitas usaha dikalangan pemuda;
4. Meningkatkan Prestasi olahraga belummaksimal antara Lain :Sepak Bola, Bola Volly, Atletik, Tinju, Pencaksilat, dll.
5. Meningkatkan Olahraga di masyarakat.
6. Menambah fasilitas olahraga indoor milik pemerintah dan swasta.
7. Menambah fasilitas ruang terbuka untuk kegiatan pemuda dan olahraga

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.3 di bawah ini. Tabel di bawah berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan .

Jumlah seluruh program dan kegiatan teknis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga di tahun 2025 adalah sebanyak:

- Program ada : 3
- Kegiatan ada : 8
-Sub Kegiatan ada : 15

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp **4.421.021.000**. Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada **Tabel 3.3**. di bawah.

Tabel . 3.3

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju 2026
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
												Tolak Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
02 19 02 2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			**Pemuda berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional (Paskibra, Pemuda Pelopor dan Wirausaha)**		65%	-		717.666.000					336.044.500
02 19 02 2 01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**			**Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader (Rapat/Koordinasi)**		9 Kegiatan	-		700.766.000			9 Kegiatan		297.544.500
02 19 02 2 01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Persentase Pemuda Berprestasi Hasil Binaan	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	65%	40 Orang	1 Kali	491.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan		102.300.000
02 19 02 2 01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Persentase Pemuda Berprestasi Hasil Binaan	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	65%	50 Orang	1 Kali	62.071.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan		55.000.000

02	19	02	2	01	05	Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda Berprestasi Hasil Binaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	65%	1 Dokumen	1 Kali	97.495.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen		85.244.500
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Persentase Pemuda Berprestasi Hasil Binaan	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	65%	40 Orang	1 Kali	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Orang		55.000.000
02	19	02	2	02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								16.700.172					38.500.000
02	19	02	2	02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda Berprestasi Hasil Binaan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	65%	40 Orang	1 Kali	16.700.172	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Orang		38.500.000
02	**19**	**03**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			**Cakupan pembinaan olahraga (%)**		85%			3.594.355.000			90%		2.125.618.000
02	19	03	2	01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah (Rapat/Koordinasi)**		10 Paket	18 Unit		333.475.000			10 Paket		356.840.000

02	19	03	2	01	03	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Persentase Jumlah Saraprasana Olahraga	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	50%	18 Unit	100%	333.475.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Unit		356.840.000
02	**19**	**03**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**Jumlah Atlet Daerah yang dibina (Orang)**		7 Cabang	-		184.450.000			7 Cabang		192.500.000
02	19	03	2	02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase prestasi pada kejuaraan tingkat Daerah	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	50%	1 Dokumen	100%	184.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen		192.500.000
02	19	03	2	03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**			**Jumlah Atlet Daerah yang dibina (Orang)**		16 orang	-		172.250.000			16 orang		187.000.000
03	20	04	3	03	03	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Persentase Jumlah Pembinaan Pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	50%	10 Orang	100%	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang		165.000.000
06	23	07	6	03	05	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Persentase Jumlah Pembinaan Pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	50%	1 Dokumen	100%	22.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen		22.000.000
02	**19**	**03**	**2**	**04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**			**Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina dan dikembangkan (Organisasi)**		0,5	2 Organisasi		900.000.000			2 Kegiatan		660.000.000
02	19	03	2	04	01	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Persentase Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way	50%	2 Organisasi	100%	900.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kegiatan		660.000.000

									Urang								
02	19	03	2	05		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**			**Penyelenggaraan Festival dan Olahraga Rekreasi (Event)**		5 Kegiatan	-		2.004.180.000			5 Kegiatan		729.278.000
02	19	03	2	05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Persentase Jumlah Pengembangan Olahraga rekreasi	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	50%	4 Dokumen	100%	1.070.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Kegiatan		399.278.000
02	19	03	2	05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Persentase Jumlah Pengembangan Olahraga rekreasi	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	50%	8 Gedung	100%	934.180.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Gedung		330.000.000
02	**19**	**04**	**2**			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			**Persentase Anggota Kepramukaan yang Aktif (%)**		85%	-		100.000.000			90%		165.000.000
02	19	04	2	01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			**Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan (Event)**		85%	-		100.000.000			90%		165.000.000
03	20	05	2	01	01	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Anggota Kepramukaan yang Aktif	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	85%	1 Organisasi	100%	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Organisasi		33.000.000
06	23	08	2	01	01	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Anggota Kepramukaan yang Aktif	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	85%	1 Laporan	100%	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan		88.000.000
09	26	11	2	01	01	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Persentase Anggota Kepramukaan yang Aktif	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	85%	1 Organisasi	100%	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Organisasi		44.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Pada Subbab ini terdapat Tabel 4.1. Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel T-C.33 ditambah penjelasan mengenai rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah yang telah tertuang pada Bab 3, Subbab 3.3. beserta target output yang akan di capai. Tabel tersebut berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD pendanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan.

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pada Anggaran Perubahan di tahun 2025 adalah sebanyak:

- Program ada : 4
- Kegiatan ada : 15
-Sub Kegiatan ada : 43

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp **7.806.901.637** Nilai total " ***Tujuh Milyar Delapn Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*** " untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan).

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
																	Tolak Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
														7.806.901.637					6.050.451.800
02	19					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			Indeks Kepuasan Pelayanan		80 Poin			3.394.880.637,			80%		3.295.690.800
02	19	01	2	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**Jumlah Dokumen**		80 Poin	-		56.091.650			10 Dokumen		87.011.100
02	19	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	80 Poin	2 Dokumen	10 Dokumen	13.636.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20.000.000
02	19	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	80 Poin	1 Dokumen	10 Dokumen	4.897.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13.879.000
02	19	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	80 Poin	1 Dokumen	10 Dokumen	5.061.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12.988.000
02	19	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	80 Poin	1 Dokumen	10 Dokumen	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000

02	19	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	80 Poin	1 Dokumen	10 Dokumen	4.981.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12.789.000
02	19	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	80 Poin	4 Laporan	10 Dokumen	15.515.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	15.355.100
02	19	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					100%	-		2.840.154.287			90%		2.578.782.700
02	19	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	80 Poin	21 Orang/Bulan	12 Dokumen	2.294.406.787	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/Bulan	1.980.672.000
02	19	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	80 Poin	12 Dokumen	12 Dokumen	532.380.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	567.600.000
02	19	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	80 Poin	1 Laporan	12 Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.510.700
02	19	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	80 Poin	18 Laporan	12 Dokumen	3.367.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	20.000.000

02	19	01	2	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**100%**		100%	3 Paket		25.767.000					50.091.000
02	19	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	80 Poin	3 Paket	100%	25.767.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	50.091.000
02	19	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**100%**		90%	-		97.598.900			90%		168.527.000
02	19	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Pelayanan	JumlahPaket KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	80 Poin	10 Paket	90%	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		JumlahPaket KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	15.000.000
02	19	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	80 Poin	19 Paket	90%	12.920.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	15.000.000
02	19	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	80 Poin	43 Paket	90%	20.555.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43 Paket	30.000.000
02	19	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	80 Poin	3 Paket	90%	6.198.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	15.000.000
02	19	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	80 Poin	7 Dokumen	90%	13.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	18.000.000
02	19	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	80 Poin	11 Laporan	90%	6.942.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	12.000.000

02	19	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	80 Poin	24 Laporan	90%	22.592.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	48.527.000
02	19	01	2	06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	80 Poin	12 Dokumen	90%	5.390.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	15.000.000
02	19	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					25 Unit	-		120.901.600					165.539.000
02	19	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Barang Milik Daerah	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	80 Poin		90%	27.632.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		35.392.000
02	19	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barang Milik Daerah	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	80 Poin		90%	93.269.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		130.147.000
02	19	01	2	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Bulan**		12 Bulan	12 Laporan		84.817.200			12 Bulan		104.800.000
02	19	01	2	08	01	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Penunjang Urusan Kantor		80 Poin	12 Laporan	90%	5.617.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000
02	19	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jasa Penunjang Urusan Kantor	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	80 Poin	12 Laporan	90%	79.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	84.800.000
02	19	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Besaran dan satuan tergantung OPD**		100%	-		169.550.000			100%		140.940.000

02	19	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	barang milik daerah yang di pelihara	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	80 Poin	3 Unit	90%	83.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit		39.870.000
02	19	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Oprasioanl Lapangan	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Oprasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	barang milik daerah yang di pelihara	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	80 Poin	1 Unit	90%				1 Unit		36.070.000
02	19	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	barang milik daerah yang di pelihara	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	80 Poin	24 Unit	90%	16.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Unit		15.000.000
02	19	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	barang milik daerah yang di pelihara	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	80 Poin	1 Unit	90%	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit		25.000.000
02	19	c	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	barang milik daerah yang di pelihara	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	80 Poin	1 Unit	90%	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit		25.000.000
02	19	02	2			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			**Pemuda berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional (Paskibra, Pemuda Pelopor dan Wirausaha)**		65%	-		717.666.000					324.161.000
02	19	02	2	01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**			**Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader (Rapat/Koordinasi)**		9 Kegiatan	-		700.766.000			9 Kegiatan		289.161.000

02	19	02	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Persentase Pemuda Berprestasi Hasil Binaan	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	65%	40 Orang	1 Kali	491.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan		93.000.000
02	19	02	2	01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Persentase Pemuda Berprestasi Hasil Binaan	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	65%	50 Orang	1 Kali	62.071.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan		62.071.000
02	19	02	2	01	05	Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda Berprestasi Hasil Binaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	65%	1 Dokumen	1 Kali	97.495.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen		84.090.000
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Persentase Pemuda Berprestasi Hasil Binaan	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	65%	40 Orang	1 Kali	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Orang		50.000.000
02	19	02	2	02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								16.700.172					35.000.000
02	19	02	2	02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda Berprestasi Hasil Binaan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	65%	40 Orang	1 Kali	16.700.172	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Orang		35.000.000
02	**19**	**03**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			**Cakupan pembinaan olahraga (%)**		85%			3.594.355.000			90%		2.305.600.000
02	19	03	2	01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang**		10 Paket	18 Unit		333.475.000			10 Paket		165.600.000

						menjadi Kewenangan Daerah (Rapat/Koordinasi)											
02	19	03	2	01	03	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Persentase Jumlah Saraprasana Olahraga	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	50%	18 Unit	100%	333.475.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Unit		165.600.000
02	**19**	**03**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**Jumlah Atlet Daerah yang dibina (Orang)**		7 Cabang	-		184.450.000			7 Cabang		185.000.000
02	19	03	2	02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase prestasi pada kejuaraan tingkat Daerah	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	50%	1 Dokumen	100%	184.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen		185.000.000
02	19	03	2	03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**			**Jumlah Atlet Daerah yang dibina (Orang)**		16 orang	-		172.250.000			16 orang		175.000.000
03	20	04	3	03	03	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Persentase Jumlah Pembinaan Pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	50%	10 Orang	100%	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang		150.000.000
06	23	07	6	03	05	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Persentase Jumlah Pembinaan Pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	50%	1 Dokumen	100%	22.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen		25.000.000
02	**19**	**03**	**2**	**04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**			**Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina dan dikembangkan (Organisasi)**		0,5	2 Organisasi		900.000.000			2 Kegiatan		850.000.000

02	19	03	2	04	01	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Persentase Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	50%	2 Organisasi	100%	900.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kegiatan		850.000.000
02	19	03	2	05		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**			**Penyelenggaraan Festival dan Olahraga Rekreasi (Event)**		5 Kegiatan	-		2.004.180.000			5 Kegiatan		930.000.000
02	19	03	2	05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Persentase Jumlah Pengembangan Olahraga rekreasi	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	50%	4 Dokumen	100%	1.070.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Kegiatan		350.000.000
02	19	03	2	05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Persentase Jumlah Pengembangan Olahraga rekreasi	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	50%	8 Gedung	100%	934.180.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Gedung		580.000.000
02	**19**	**04**	**2**			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			**Persentase Anggota Kepramukaan yang Aktif (%)**		85%	-		100.000.000			90%		125.000.000
02	19	04	2	01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			**Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan (Event)**		85%	-		100.000.000			90%		125.000.000
03	20	05	2	01	01	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Anggota Kepramukaan yang Aktif	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	85%	1 Organisasi	100%	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Organisasi		25.000.000
06	23	08	2	01	01	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Anggota Kepramukaan yang Aktif	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	85%	1 Laporan	100%	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan		50.000.000
09	26	11	2	01	01	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Persentase Anggota Kepramukaan yang Aktif	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	85%	1 Organisasi	100%	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Organisasi		50.000.000

4.2 Singkronisasi Prioritas Perangkat Daerah Dengan Prioritas Daerah Dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Dispora Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah mendukung pada sisi prioritas Peningkatan Pemuda Wirausaha dan Prestasi olahraga dengan indikator sebagaimana table 4.2.1 dan Tabel 4.2.2 dibawah ini :

Tabel 4.2.1 Sinkronisasi Prioritas Perangkat Daerah dengan Prioritas Daerah Tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan

No	Prioritas	program	Kegiatan	Subkegiatan	Sumber Dana	Anggaran	Keterangan
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	APBD	491.200.000	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	APBD	62.071.000	
				Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	APBD	97.495.000	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	APBD	50.000.000	
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	APBD	16.700.172	

2		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	APBD	333.475.000	
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	APBD	184.450.000	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan PengembanganAtlet Berprestasi kabupaten/Kota	APBD	150.000.000	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan data dan Informadi Sektoral Olahraga	APBD	22.250.000	
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	APBD	900.000.000	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	APBD	1.070.000.000	
				Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	APBD	934.180.000	
3		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Peningkatan Kapasitas Organisaso Kepramukaan Tingkat Daerah	APBD	15.000.000	
				Partisipasi dan Keitutsertaan Dalam Kegiatan kepramukaan	APBD	70.000.000	
				Partisipasi dan Keitutsertaan Dalam Kegiatan kepramukaan	APBD	15.000.000	

Tabel 4.2.2 Sinkronisasi Prioritas Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan

No	Prioritas	program	Kegiatan	Subkegiatan	Sumber Dana	Anggaran	Keterangan
2	Cabang Olahraga yang berprestasi tingkat Nasional	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	APBD	324.400.000	
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	APBD	175.000.000	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan PengembanganAtlet Berprestasi kabupaten/Kota	APBD	150.000.000	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan data dan Informadi Sektoral Olahraga	APBD	20.000.000	
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	APBD	600.000.000	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	APBD	362.980.000	
				Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	APBD	300.000.000	

BAB V

PENUTUP

Failing to plan is planning to fail; kegagalan kita dalam merencanakan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga sama dengan merencanakan kegagalan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2025. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2025.

Renja PD ini harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2025.

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, **prosedur standar** pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk *proving* (membuktikan) kinerja dan untuk *improving* (memperbaiki) kinerja.

Saat penjabaran Renja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan **perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan**. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya.

Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Pelajaran yang kita dapatkan dari pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalitas pencapaian target tahunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2025.

Demikian Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu meridhai semua langkah kita. Aamiin … Aamiin YRA.

Kalianda, 01 September 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

YESPI CORY, SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710219 199203 1 001

DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2025






TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun Anggaran 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan selesai disusun.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk periode satu tahun, yang dapat dijadikan acuan dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran. Renja Perubahan dibuat dengan mengacu pada Rancangan Perubahan RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) dan berpedoman pada Renstra (Rencana Strategis).

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui sejauh mana Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan telah menjalankan kewenangan kegiatannya sesuai dengan target dan sasaran yang ingin dicapai serta dapat memberi kontribusi terhadap Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Selatan dan dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

Kepada semua pihak yang telah banyak memberi masukan dan sumbangan pemikiran diucapkan terima kasih atas selesainya dokumen Rencana Kerja Perubahan (RENJA perubahan) ini. Semoga Rencana Kerja ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Perikanan di Kabupaten Lampung Selatan.

Kalianda, 14 Juni 2025
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Lampung Selatan

[illegible], S.Pi., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740702 200003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 6
1.3. Maksud dan Tujuan 9
1.3.1 Maksud 9
1.3.2 Tujuan 9
1.4. Sistematika Penulisan 10

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN **12**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 ... 12
2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan 18
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 29

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **30**
3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan 30

BAB IV PENUTUP **47**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2

Gambar 1.2. Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD..... 4

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan triwulan I Tahun 2025..... 19

Tabel 1.2. Rencana Kerja Perubahan Dinas Perikanan 2025..... 32

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

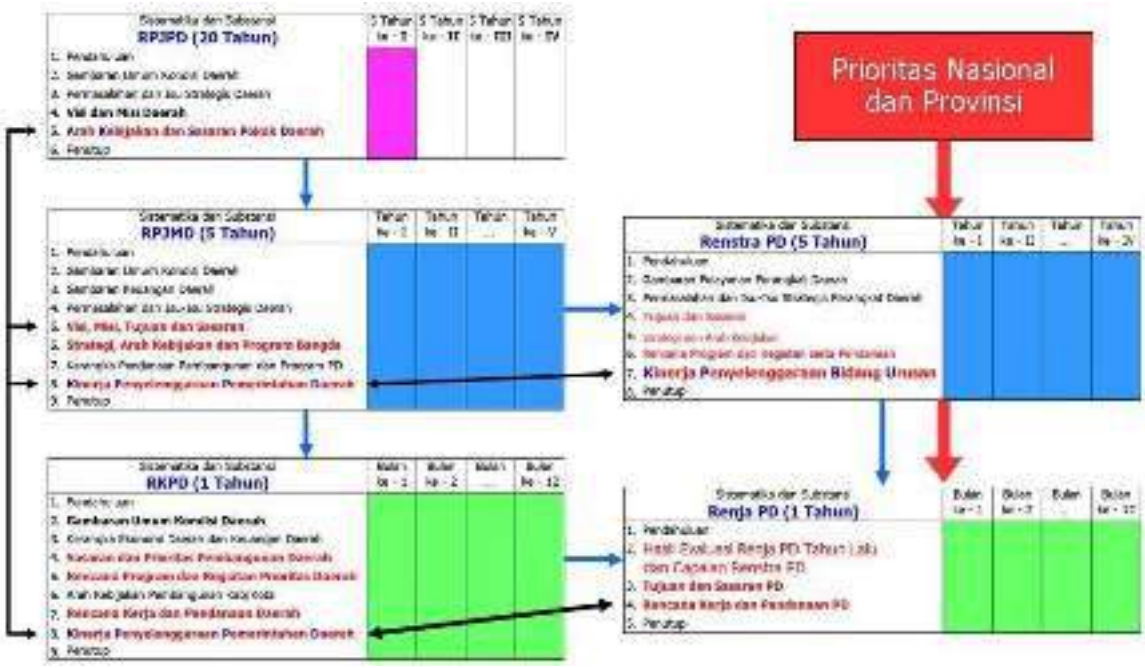
Pembangunan perikanan di Kabupaten Lampung Selatan dilandaskan atas potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, pemanfaatan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana serta sarana pendukung produksi. Faktor pendukung produksi juga meliputi peraturan perundang-undangan yang kondusif yang sesuai dengan kewenangan urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten/Kota.

Pembangunan perikanan di Kabupaten Lampung Selatan juga merupakan upaya pemberian berbagai alternatif pilihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sekaligus sebagai upaya peningkatan kualitas manusia pada masyarakat pembudidaya ikan, nelayan, keluarga stunting dan keluarga miskin di Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan basis komoditas unggulan yang kompetitif berlandaskan kemampuan daerah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Apabila peluang dan prospek yang terbuka dapat dimanfaatkan dengan sebaik- baiknya dan permasalahan yang dihadapi dapat diatasi secara bertahap maka bukan suatu pilihan yang salah, jika sektor perikanan dijadikan andalan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan saat ini dan dimasa yang akan datang.

Untuk mengakomodir kegiatan pembangunan perikanan dan kelautan tersebut, diperlukan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, yang dalam perjalanannya dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan yang dilaksanakan pada waktu tahun berjalan, pelaksanaan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan lima tahun (Renstra), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/unit kerja melalui berbagai kegiatan tahunan.

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Keterkaitan Dokumen Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dapat terlihat dari gambar 1.1. diatas, sedangkan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang bersifat indikatif. Penyusunan Perubahan Renja dilakukan pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan Perubahan RKPD.

Dinas Perikanan sebagai lembaga pemerintah diberi mandat untuk mengemban tugas dan tanggung jawab pembinaan, pelayanan kepada masyarakat dimana di tuntut untuk menyusun Perencanaan strategis yang akuntabel. Hal ini sejalan dengan harapan masyarakat kepada aparatur pemerintah untuk merespon atas mandat yang di berikan dalam rangka pencapaian misi pembangunan.

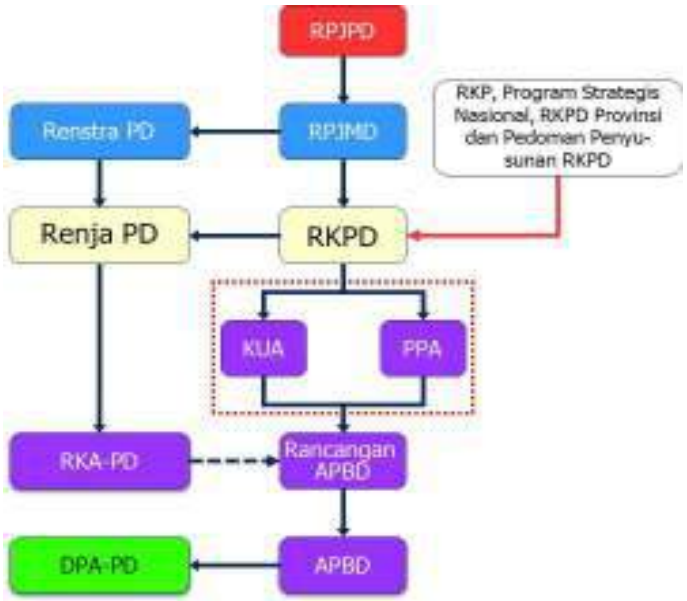
Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2025 diselenggarakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2025 untuk selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan 2025. Rencana Kerja Perubahan Dinas Perikanan Tahun 2025 berisi usulan ataupun masukan yang disusun secara kolektif, partisipasif dan melibatkan semua unsur dalam unit kerja.

Dengan diselenggarakannya Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2025 yang proses penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang

dilaksanakan secara berjenjang agar apa yang direncanakan akan menjadi milik bersama dan didukung oleh semua pihak sehingga hasilnya dapat mencapai optimasi yang dikehendaki. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dilakukan untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebagai Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Gambar 1.2. Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD



Rancangan Renja Dinas Perikanan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja Perubahan Dinas Perikanan,
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perubahan Dinas Perikanan berpedoman pada Renstra Dinas Perikanan, evaluasi hasil Renja Dinas Perikanan tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan,
3. Penyusunan Rancangan Renja Perubahan Dinas Perikanan berdasarkan berdasarkan surat Pj. Sekretaris Daerah tentang penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
4. Pembahasan Rancangan Renja Perubahan Dinas Perikanan dalam Forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran,
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perubahan Dinas Perikanan
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perubahan Dinas Perikanan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Sejalan dengan dasar pikir di atas maka Dinas Perikanan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan untuk Tahun 2025.

Yaitu perubahan Renja Dinas Perikanan yang merupakan dokumen rencana pembangunan Dinas Perikanan berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Perikanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Lampung selatan Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Perikanan yang bersinergi dengan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, dalam hal Dinas Perikanan sebagai instansi yang mengurusi bidang Perikanan, untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang dalam prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud di atas untuk tahun 2025 melalui SIPD *(Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)* mengacu pada ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 00.7.2.4/1338/V.01/2025 Tanggal 28 April 2025 perihal Sosialisasi Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD Tahun 2025-2029 dan Perubahan Renja PD Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud diadakan perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Renja Perubahan dilakukan untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan, penambahan dan pengurangan pagu indikatif, penambahan dan pengurangan kelompok sasaran dan perubahan lokasi, perubahan dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan yang sangat dibutuhkan.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan disusun sebagai penjabaran dari RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan urusan pilihan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dibidang kelautan dan perikanan.

1.3.2. Tujuan

Renja Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan adalah dokumen Perencanaan pembangunan bidang perikanan dalam periode satu tahun, ditetapkan dengan tujuan :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja perubahan dan anggaran perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Lampung selatan untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Perikanan dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2025;.
2. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025, analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan, serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPJMD.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025

Bab ini menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Rancangan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 sampai dengan triwulan I. Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan, dilaksanakan untuk :

1. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan triwulan I
2. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan triwulan I
3. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan I

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan sampai dengan Triwulan I
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hal diatas, Dinas Perikanan berperan strategis dalam pembangunan perikanan Kabupaten Lampung Selatan yang bertujuan "*Meningkatkan Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB*" dengan sasaran "*Meningkatnya pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan*" untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perikanan melakukan strategi "*Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan*" melalui program dan kegiatan yang berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pengukuran kinerja program/kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran terhadap Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan melalui tahapan sebagai berikut :

1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pada tahun 2025 sampai dengan triwulan I (bulan Januari – Maret 2025), capaian program pengelolaan perikanan tangkap dapat di jabarkan pada tabel berikut :

Sasaran Strategis Program	**Indikator Kinerja Program**	**Kinerja Program (Ton)**		**% Capaian Program**
		Target	**Capaian**	
Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (Ton)	34.009,02	8.347,32	24,54

Capaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2025 sampai dengan bulan Maret 2025 yaitu sebesar 8.347,32 ton dan jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yakni sebesar 34.009,02 ton maka capaian produksi perikanan tangkap sampai dengan bulan Maret adalah sebesar 24,54%.

Belum tercapainya produksi perikanan tangkap dari target tahun 2025 antara lain disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Pelaksanaan Kegiatan perikanan tangkap baru berjalan selama 3 bulan atau dalam masa triwulan pertama
2. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap belum optimal karena struktur armada penangkapan ikan masih didominasi skala kecil dan tradisional ;
3. Masih rendahnya kapasitas nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan;
4. Fasilitas sarana dan prasarana di TPI yang mulai rusak dan belum dilakukan perbaikan.

Meskipun realisasi target kinerja tahun 2025 di triwulan I belum tercapai, tetapi pada tahun 2025 ini Dinas Perikanan mengupayakan peningkatan produksi perikanan tangkap dengan berbagai stimulan bantuan untuk masyarakat nelayan diantaranya :

1. Perbaikan sarana TPI yaitu rehabilitasi bangunan pada TPI Kuala Jaya Kecamatan Sragi
2. Pembangunan tambat labuh perahu di Kawasan Minangrua Bakauheni
3. Hibah bantuan langsung pada kelompok nelayan berupa cool box, life jacket, alat tangkap jarring gill net, dan alat tangkap rawai dasar untuk nelayan yang diharapkan dapat membantu meningkatkan produksi perikanan tangkap.

4. Bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam melakukan tindakan tegas terhadap kapal-kapal yang melanggar *IUU fishing* dan menyebabkan jalur migrasi ikan yang selama ini tertahan dapat diakses oleh nelayan lokal, sehingga menumbuhkan *fishing ground* baru atau peningkatan jumlah tangkapan di *fishing ground* yang lama.

2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Pada Triwulan I tahun 2025 (bulan Januari – Maret 2025), capaian program pengelolaan perikanan budidaya dapat di jabarkan pada tabel berikut :

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja Program (Ton)		% Capaian Program
		Target	Capaian	
Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (Ton)	34.002,27	7.121,83	20,95

Jika dilihat dari tabel diatas, perkembangan produksi perikanan budidaya sampai dengan triwulan I yaitu bulan Januari s.d Maret 2025 ini baru mencapai sebesar 20,95 % atau sebesar 7.121,83 Ton. Walaupun capaian masih sebesar 20,95 %, hal ini jika dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2024, terjadi kenaikan produksi perikanan budidaya.

Pencapaian volume produksi perikanan budidaya secara keseluruhan untuk semua komoditas utama didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Pengembangan teknologi budidaya secara intensifikasi dengan bioflok dan dengan adanya usaha pembinaan pakan mandiri sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi;

2) Pengembangan teknologi dan inovasi budidaya udang dengan budidaya skala rumah tangga, budidaya dengan penggunaan kincir hemat dan budidaya udang dengan salinitas rendah yang dapat meningkatkan produksi udang.
3) meningkatnya kapasitas Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dalam menyediakan benih yang unggul;
4) bantuan pemerintah berupa sarana dan prasarana budidaya ikan baik melalui APBD Kabupaten maupun Provinsi dapat meningkatkan jumlah produksi perikanan
5) Nilai ekonomis komoditas ikan yang cukup tinggi seperti ikan lele, nila, gurame, kerapu, dan udang yang pemasarannya masih cukup terbuka.

3) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Pada triwulan I tahun 2025 capaian Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dapat di jabarkan pada tabel berikut :

Sasaran Strategis Program	**Indikator Kinerja Program**	**Kinerja Program (Dokumen)**		**% Capaian Program**
		Target	**Capaian**	
Meningkatnya presentase pengawasan usaha perikanan	Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (lokasi)	90	13	14,44

Pencapaian pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan pada triwulan I ini masih jauh dari target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan proses kegiatan baru sampai pada bulan Maret.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, bidang pengawasan mengawasi seluruh usaha perikanan baik perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan apakah sudah sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip yang telah diatur oleh pemerintah dan tidak terjadi pelanggaran pada usaha perikanannya. Pengawasan dapat berupa pemeriksaan sarana prasarana yang dimiliki pelaku usaha perikanan, administrasi dan kelengkapan dokumen perizinan usaha.

4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pada tahun 2025 Triwulan I, capaian Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dapat di jabarkan pada tabel berikut :

Sasaran Strategis Program	**Indikator Kinerja Program**	**Kinerja Program**		**% Capaian Program**
		Target	**Capaian**	
Peningkatan hasil pengolahan perikanan	Produksi hasil pengolahan dan pemasaran perikanan (ton)	1.547,12	403,19	26,06

Pencapaian volume produksi pengolahan perikanan pada triwulan I ini masih sebesar 26,06 % hal ini dikarenakan sebagai berikut :

1) Pengembangan diversifikasi dan penguatan branding produk hasil perikanan masih berjalan
2) bantuan pemerintah berupa bedah UMKM UPI, peralatan pengolahan, *chestfreezer* masih sedikit jumlahnya;
3) kegiatan pengembangan produk perikanan masih berjalan.

2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan

Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan triwulan I sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 1.1. Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022 s/d 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**80,00 Poin**	**26.648.022.000**	**77,00 Poin**	**14.116.244.782**	**80,00 Poin**	**5.336.919.150**	**0,00 Poin**	**965.318.059**	**0,00%**	**56,60%**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**51 Dok**	**348.460.000**	**30 Dok**	**178.027.141**	**11 Dok**	**84.310.450**	**2 Dok**	**7.399.000**	**62,75%**	**53,21%**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dok	92.407.000	6 Dok	44.082.100	3 Dok	30.000.000	1 Dok	3.679.000	63,64%	51,69%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dok	93.066.000	3 Dok	43.783.541	1 Dok	18.687.900	0 Dok	0	60,00%	47,05%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dok	27.258.000	3 Dok	15.771.200	1 Dok	5.285.150	0 Dok	0	60,00%	57,86%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dok	28.632.000	3 Dok	16.831.800	1 Dok	6.214.300	0 Dok	0	60,00%	58,79%
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dok	28.410.000	3 Dok	15.854.200	1 Dok	5.285.700	0 Dok	0	60,00%	55,80%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Lap	78.687.000	12 Lap	41.704.300	4 Lap	18.837.400	1 Lap	3.720.000	65,00%	57,73%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022 s/d 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100,00 %**	**244.235.000**	**100,00 %**	**76.859.400**	**100,00 %**	**34.390.900**	**0,00 %**	**0**	**0,00%**	**31,47%**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	474 Paket	124.327.000	261 Paket	48.805.000	85 Paket	22.950.000	0 Paket	0	55,06%	39,26%
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16 Dok	64.652.000	2 Dok	18.054.400	1 Dok	11.440.900	0 Dok	0	12,50%	27,93%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	55.256.000	2 Orang	10.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	20,00%	18,10%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100,00 %**	**1.643.819.000**	**100,00 %**	**709.023.230**	**100,00 %**	**408.061.850**	**7,95 %**	**7.136.500**	**7,95%**	**43,57%**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	33.206.000	16 Paket	18.965.000	11 Paket	16.147.000	0 Paket	0	26,67%	57,11%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90 Paket	440.351.000	29 Paket	167.284.100	11 Paket	139.328.000	0 Paket	0	32,22%	37,99%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket	53.486.000	53 Paket	25.437.600	20 Paket	17.372.000	3 Paket	1.886.500	93,33%	51,09%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	111.692.000	17 Paket	49.978.800	7 Paket	20.224.000	0 Paket	0	28,33%	44,75%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022 s/d 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	143.526.000	19 Paket	50.654.500	6 Paket	21.221.850	0 Paket	0	31,67%	35,29%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.200 Dok	99.461.000	720 Dok	54.000.000	240 Dok	18.000.000	60 Dok	3.000.000	65,00%	57,31%
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	229.040.000	4 Paket	56.225.000	2 Paket	41.200.000	0 Paket	0	40,00%	24,55%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Lap	93.438.000	30 Lap	38.915.000	11 Lap	17.745.000	2 Lap	1.350.000	53,33%	43,09%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Lap	439.619.000	81 Lap	247.563.230	30 Lap	116.824.000	4 Lap	900.000	70,83%	56,52%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**23 Unit**	**98.603.000**	**42 Unit**	**44.727.000**	**22 Unit**	**54.830.000**	**0 Unit**	**0**	**182,61%**	**45,36%**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23 Unit	98.603.000	42 Unit	44.727.000	22 Unit	54.830.000	0 Unit	0	182,61%	45,36%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**60 Lap**	**596.768.000**	**36 Lap**	**387.688.300**	**12 Lap**	**163.800.000**	**3 Lap**	**19.073.192**	**65,00%**	**68,16%**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Lap	596.768.000	36 Lap	387.688.300	12 Lap	163.800.000	3 Lap	19.073.192	65,00%	68,16%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022 s/d 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**262 Unit**	**1.255.755.000**	**162 Unit**	**865.411.096**	**60 Unit**	**379.340.000**	**31 Unit**	**54.133.387**	**73,66%**	**73,23%**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	607.875.000	8 Unit	188.687.200	1 Unit	43.930.000	1 Unit	9.295.003	100,00%	32,57%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	135 Unit	399.227.000	80 Unit	547.923.896	28 Unit	287.910.000	0 Unit	44.088.384	59,26%	148,29%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124 Unit	55.256.000	69 Unit	28.800.000	29 Unit	12.500.000	2 Unit	750.000	57,26%	53,48%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	138.141.000	2 Unit	75.000.000	1 Unit	25.000.000	0 Unit	0	100,00%	54,29%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	55.256.000	3 Unit	25.000.000	1 Unit	10.000.000	0 Unit	0	100,00%	45,24%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022 s/d 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.	Terwujudnya pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan mandiri	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi perikanan tangkap**	**34.689,20 Ton**	**12.952.010.000**	**32.708,21 Ton**	**8.124.672.695**	**34009,02 Ton**	**1.341.239.950**	**8.347,32 Ton**	**3.259.000**	**24,06%**	**62,75%**
		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**60 Unit**	**10.332.711.000**	**122 Unit**	**2.187.742.057**	**84 Unit**	**120.663.550**	**0 Unit**	**3.259.000**	**203,33%**	**21,20%**
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dok	106.047.000	5 Dok	48.005.850	2 Dok	49.086.950	0 Dok	0	100,00%	45,27%
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	30 unit	5.240.028.000	1 unit	1.488.485.100	0 unit	0	0 unit	0	3,33%	28,41%
		Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	60 Unit	4.986.636.000	68 Unit	651.251.107	84 Unit	71.576.600	0 Unit	0	113,33%	13,06%
		Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Nelayan Kecil dalam Daerah yang diberdayakan**	**535 orang**	**436.692.000**	**502 orang**	**5.653.563.271**	**80 orang**	**1.206.356.400**	**0 orang**	**0**	**93,83%**	**1294,63%**
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	171.907.000	490 Orang	5.620.083.771	80 Orang	1.206.356.400	0 Orang	0	490,00%	3269,26%
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	435 Kelompok	264.785.000	12 Kelompok	33.479.500	0 Kelompok	0	0 Kelompok	0	2,76%	12,64%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022 s/d 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	**Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikelola**	**5 Lokasi**	**2.182.607.000**	**4 Lokasi**	**283.367.367**	**2 Lokasi**	**14.220.000**	**0 Lokasi**	**0**	**80,00%**	**12,98%**
		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5 layanan	2.182.607.000	4 layanan	283.367.367	2 layanan	14.220.000	0 layanan	0	80,00%	12,98%
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Produksi perikanan Budidaya**	**34.682 Ton**	**21.487.600.000**	**33.990 Ton**	**9.538.532.527**	**34.002,27 Ton**	**1.558.595.650**	**7.121,83 Ton**	**10.318.000**	**20,53%**	**44,44%**
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**275 Rekomendasi**	**555.652.000**	**177 Rekomendasi**	**208.057.750**	**0 Rekomendasi**	**0**	**0 Rekomendasi**	**0**	**64,36%**	**37,44%**
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	275 Rekomendasi	124.416.000	177 Rekomendasi	60.121.600	0 Rekomendasi	0	0 Rekomendasi	0	64,36%	48,32%
		Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	275 Rekomendasi	431.236.000	177 Rekomendasi	147.936.150	0 Rekomendasi	0	0 Rekomendasi	0	64,36%	34,31%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022 s/d 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil	**Terlaksananya pemberdayaan pembudidaya ikan kecil**	**600 Kelompok**	**393.546.000**	**113 Kelompok**	**1.382.948.049**	**27 Kelompok**	**789.362.950**	**0 Kelompok**	**5.118.000**	**18,83%**	**352,71%**
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	0 Kelompok	0	14 Kelompok	1.191.882.949	17 Kelompok	704.362.950	0 Kelompok	5.118.000	0,00%	0,00%
		Pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelengaraan pendidkan dan pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	600 Kelompok	393.546.000	99 Kelompok	191.065.100	10 Kelompok	85.000.000	0 Kelompok	0	16,50%	48,55%
		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah	**Jumlah rekomedasi penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**125 Rekomendasi**	**205.718.000**	**80 Rekomendasi**	**135.165.750**	**25 Rekomendasi**	**62.587.850**	**5 Rekomendasi**	**0**	**68,00%**	**65,70%**
		Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Rekomendasi	205.718.000	80 Rekomendasi	135.165.750	25 Rekomendasi	62.587.850	5 Rekomendasi	0	68,00%	65,70%
		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Terlaksananya pengelolaan pembudidayaan ikan**	**85 Lokasi**	**20.332.684.000**	**51 Lokasi**	**7.812.360.978**	**17 Lokasi**	**706.644.850**	**0 Lokasi**	**5.200.000**	**60,00%**	**38,45%**
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dok	20.000.000	2 Dok	8.724.100	1 Dok	6.600.800	0 Dok	0	100,00%	43,62%
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit	1.161.212.000	10 Unit	1.221.577.853	1 Unit	241.602.850	0 Unit	0	50,00%	105,20%
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	110 Unit	5.938.372.000	70 Unit	3.494.185.412	5 Unit	223.024.200	0 Unit	0	63,64%	58,84%
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	24 Dok	361.297.000	104 Dok	179.299.222	30 Dok	74.472.450	0 Dok	0	433,33%	49,63%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022 s/d 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	15 Ha	11.002.765.000	3 Ha	2.659.156.982	1 Ha	160.944.550	0 Ha	5.200.000	20,00%	24,22%
		Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	25 Orang	1.849.038.000	76 Orang	249.417.409	0 Orang	0	0 Orang	0	304,00%	13,49%
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan**	**275 Lokasi**	**165.769.000**	**215 Lokasi**	**151.982.912**	**90 Lokasi**	**223.277.000**	**13 Lokasi**	**4.979.900**	**82,91%**	**94,69%**
		Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	**Terawasinya kelengkapan dokumen izin usaha perikanan tangkap dan budidaya**	**275 Dok**	**165.769.000**	**215 Dok**	**151.982.912**	**90 Dok**	**223.277.000**	**13 Dok**	**4.979.900**	**82,91%**	**94,69%**
		Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	275 Pelaku usaha	165.769.000	215 Pelaku usaha	151.982.912	55 Pelaku usaha	126.715.150	8 Pelaku usaha	300.000	81,09%	91,86%
		Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	28 Pelaku usaha	64.652.000	0 Pelaku usaha	0	35 Pelaku usaha	96.561.850	5 Pelaku usaha	4.679.900	17,86%	7,24%
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Produksi hasil pengolahan dan pemasaran perikanan**	**1.578 Ton**	**4.888.400.000**	**1.527 Ton**	**3.794.255.092**	**1547,12 Ton**	**479.710.400**	**403 Ton**	**5.017.900**	**25,55%**	**77,72%**
		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	**Jumlah Dokumen Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil yang diterbitkan**	**12 Dok**	**64.652.000**	**7 Dok**	**4.193.100**	**1 Dok**	**9.258.300**	**0 Dok**	**1.942.900**	**58,33%**	**9,49%**
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	12 Dok	64.652.000	1 Dok	4.193.100	1 Dok	9.258.300	0 Dok	1.942.900	8,33%	9,49%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022 s/d 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**275 Unit Usaha**	**684.719.000**	**105 Unit Usaha**	**152.517.510**	**80 Unit Usaha**	**29.878.500**	**0 Unit Usaha**	**0**	**38,18%**	**22,27%**
		Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	400 Unit Usaha	684.719.000	105 Unit Usaha	152.517.510	80 Unit Usaha	29.878.500	0 Unit Usaha	0	26,25%	22,27%
		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**10 Pelaku usaha**	**4.139.029.000**	**16 Pelaku usaha**	**3.637.544.482**	**12 Pelaku usaha**	**440.573.600**	**0 Pelaku usaha**	**3.075.000**	**160,00%**	**87,96%**
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.500 Ton	426.235.000	1.527 Ton	243.538.100	1.547,1 Ton	173.791.700	403 Ton	0	16,13%	57,14%
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	10 Pelaku Usaha	3.712.794.000	16 Pelaku Usaha	3.394.006.382	12 Pelaku Usaha	266.781.900	0 Pelaku Usaha	3.075.000	160,00%	91,50%
TOTAL ANGGARAN SEMUA PROGRAM									**8.939.742.150**		**988.892.859**		
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	30,61%	67,24%
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	SR	SD

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian dari seluruh program kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan Triwulan I (Bulan Maret) Tahun 2025 **sebesar Rp. 988.892.859** (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah) dari Target Kinerja Anggaran sebesar Rp. 8.939.742.150 (Delapan Milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) atau sebesar 11,06 % dengan predikat Sangat Rendah (SR). sedangkan realisasi kinerja Dinas Perikanan sampai dengan bulan Maret sebesar 30,61 % dengan predikat Sangat Rendah (SR) juga.

Kriteria penilaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

1. Beberapa kegiatan masih dalam proses E katalog
2. Pelaksanaan kegiatan hibah Masyarakat masih dalam proses identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan
3. Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada triwulan III dan IV
4. Pelaksanaan kegiatan masih dalam tahap persiapan yaitu koordinasi dan proses pendataan

Untuk mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan dan dicantumkan dalam perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Fasilitasi sarana prasarana perikanan
2. Pelatihan dan pendampingan terhadap pembudidaya ikan
3. Promosi produk perikanan melalui kegiatan pasar murah dan pameran produk perikanan

4. Pelatihan Pengolahan hasil perikanan dan pasca panen
5. Penguatan kelembagaan
6. Percepatan penyerapan dan pelaksanaan anggaran

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun isu-isu strategis yang dirumuskan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya permodalan dibidang usaha perikanan sehingga produksi dan produktifitas yang diharapkan masih belum optimal
2. Perlu peningkatan mutu benih ikan yang beredar di masyarakat sehingga dapat meningkatkan produksi ikan
3. Sarana dan prasarana Nelayan dan TPI perlu mendapat perhatian dikarenakan banyak yang sudah rusak dan perlu perbaikan
4. Perbaikan sarana prasarana jalan produksi tambak untuk peningkatan produksi udang
5. Penanggulangan berbagai penyakit pada udang yang perlu menjadi perhatian bersama, sebab Lampung Selatan merupakan salah satu lumbung udang nasional

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan

Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Perikanan Kabupaten Lampung selatan Tahun 2025 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.2 di bawah ini. Tabel ini berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD Dinas Perikanan dan RPJMD Kabupaten Lampung selatan.

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan di tahun 2025 adalah sebanyak 5 (*lima*) Program, 19 (*Sembilan belas*) kegiatan, dan 49 (*empat puluh sembilan*) Sub Kegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar **Rp. 8.939.742.150** (Delapan milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah). Nilai ini merupakan nilai awal rencana kerja Dinas Perikanan Tahun 2025.

Berdasarkan Instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor : 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, maka Kabupaten Lampung Selatan menerapkan efisiensi sesuai dengan peraturan diatas.

Oleh karena hal tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan juga melakukan efisiensi belanja dengan nilai total untuk setiap sumber pendanaan tertuang pada Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan Dinas Perikanan Tahun 2025) serta alasan perubahan disajikan pada tabel dibawah ini :

RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
									Target 2025				Pagu Indikatif Tahun 2025			
									Semula		Menjadi		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								**8.939.742.150**	**8.380.210.150**	**(559.532.000)**	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**8.939.742.150**	**8.380.210.150**	**(559.532.000)**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**80 Poin**		**80 Poin**		**5.336.919.150**	**5.108.882.900**	**(228.036.250)**	
3	**25**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**11 Dokumen**		**11 Dokumen**		**84.310.450**	**43.609.450**	**(40.701.000)**	
3	25	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3	Dokumen	3	Dokumen	30.000.000	18.240.000	**(11.760.000)**	Terdapat Pengurangan belanja ATK, Kertas, Bahan Komputer, lembur dan SPPD Sebesar Rp. 11.760.000 untuk efisiensi belanja
3	25	01	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	Dokumen	1	Dokumen	18.687.900	9.334.900	**(9.353.000)**	Pengurangan belanja ATK, Kertas, Bahan Komputer dan lembur senilai Rp. 9.353.000 untuk efisiensi belanja
3	25	01	2,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	Dokumen	1	Dokumen	5.285.150	2.661.150	**(2.624.000)**	Pengurangan Belanja ATK, Kertas, Bahan Komputer dan lembur sebesar Rp. 2.624.000 untuk efisiensi Belanja
3	25	01	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	Dokumen	1	Dokumen	6.214.300	2.011.300	**(4.203.000)**	Pengurangan belanja ATK, Kertas dan Bahan Komputer sebesar Rp. 4.203.000 untuk efisiensi Belanja
3	25	01	2,01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	Dokumen	1	Dokumen	5.285.700	1.803.700	**(3.482.000)**	Pengurangan belanja pada ATK, Kertas, Bahan Komputer dan Lembur sebesar Rp. 3.482.000 untuk efisiensi belanja

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
									Target 2025				Pagu Indikatif Tahun 2025			
									Semula		Menjadi		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
3	25	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4	Laporan	4	Laporan	18.837.400	9.558.400	**(9.279.000)**	Pengurangan belanja ATK, Kertas, Bahan Komputer, lembur dan sppd dalam sebesar Rp. 9.279.000 untuk efisiensi belanja
3	**25**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan**	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**39**	**Dokumen**	**39**	**Dokumen**	**4.196.287.500**	**4.177.014.500**	**(19.273.000)**	
3	25	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	37	Orang/bulan	37	Orang/bulan	3.323.243.850	3.323.243.850	-	
3	25	01	2,02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	12	Dokumen	12	Dokumen	849.576.950	836.195.950	**(13.381.000)**	Pengurangan belanja ATK, Kertas, Bahan Komputer dan Lembur sebesar Rp. 9.541.000; Penataan Honorarium PPTK Bidang PUP Sebesar Rp. 7.050.000 (Jan-mei) yang tidak di cairkan dan penyesuaian Honorarium PPTK Bidang
															-	menjadi belanja Kertas, Bahan Komputer dan FC sebesar Rp. 3.210.000 dan belanja SPPD dalam pada sub Kegiatan Penyelenggaran Rapat Konsultasi SKPD sebesar Rp. 3.840.000 untuk efisiensi belanja
3	25	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	Laporan	1	Laporan	8.990.000	7.207.000	**(1.783.000)**	Pengurangan Belanja Atk sebesar Rp. 1.783.000 untuk efisiensi belanja dikarenakan belanja lainnya telah terealisasi pada bulan sebelumnya
3	25	01	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	14	Laporan	14	Laporan	14.476.700	10.367.700	**(4.109.000)**	Pengurangan Belanja ATK, Kertas dan Lembur sebesar Rp. 4.109.000 untuk efisiensi belanja

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
									Target 2025				Pagu Indikatif Tahun 2025	
									Semula		Menjadi		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
3	**25**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**3 Dokumen**		**3 Dokumen**		**15.898.450**	**8.127.700**	**(7.770.750)**	
3	25	01	2,03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	Dokumen	1	Dokumen	5.721.500	3.260.750	**(2.460.750)**	Pengurangan belanja ATK, Kertas, Bahan Komputer, lembur dan sppd dalam sebesar Rp. 2.460.750 untuk efisiensi belanja
3	25	01	2,03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	Laporan	1	Laporan	5.109.350	3.069.350	**(2.040.000)**	Pengurangan pada belanja lembur sebesar Rp. 2.040.000 untuk efiseinsi belanja
3	25	01	2,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	Laporan	1	Laporan	5.067.600	1.797.600	**(3.270.000)**	Pengurangan pada belanja ATK, Kertas, Komputer, Lembur dan SPPD dalam untuk efisiensi belanja
3	**25**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian**	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**100 %**		**100 %**		**34.390.900**	**17.466.900**	**(16.924.000)**	
3	25	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	85	Paket	43	Paket	22.950.000	11.610.000	**(11.340.000)**	Pengurangan belanja pakaian dinas sebanyak 42 Pcs sebesar Rp. 11.340.000 untuk efisiensi belanja
3	25	01	2,05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	Dokumen	1	Dokumen	11.440.900	5.856.900	**(5.584.000)**	Pengurangan belanja ATK, Kertas, Bahan Komputer dan SPPD Dalam Daerah senilai 5.584.000 untuk efisiensi belanja

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Pagu Indikatif Tahun 2025		Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
									Target 2025							
									Semula		Menjadi		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
3	**25**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum**	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**100**	**%**	**100**	**%**	**408.061.850**	**286.109.350**	**(121.952.500)**	
3	25	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	11	Paket	11	Paket	16.147.000	15.865.000	**(282.000)**	Pengurangan belanja komponen Baterai sebesar Rp. 282.000 untuk efisiensi belanja
3	25	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	11	Paket	11	Paket	139.328.000	103.918.000	**(35.410.000)**	Pengurangan belanja PC, Scanner, Printer, mixer audio dan standing mic sebesar Rp. 35.410.000 untuk efisiensi belanja
3	25	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	20	Paket	20	Paket	17.372.000	17.372.000	-	
3	25	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7	Paket	7	Paket	20.224.000	9.181.200	**(11.042.800)**	terdapat pengurangan belanja sebesar Rp. 11.042.800 untuk efisiensi belanja
3	25	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6	Paket	6	Paket	21.221.850	9.453.150	**(11.768.700)**	Terdapat pengurangan belanja barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp. 11.768.700 untuk efisiensi belanja

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
									Target 2025				Pagu Indikatif Tahun 2025			
									Semula		Menjadi		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
3	25	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	240	Dokumen	240	Dokumen	18.000.000	18.000.000	-	
3	25	01	2,06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2	Paket	2	Paket	41.200.000	41.200.000	-	
3	25	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	11	Laporan	6	Laporan	17.745.000	8.870.000	**(8.875.000)**	Pengurangan belanja fasilitasi kunjungan tamu dari 11 kali menjadi 6 kali sebesar Rp. 8.875.000 untuk efisiensi belanja
3	25	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	30	Laporan	15	Laporan	116.824.000	62.250.000	**(54.574.000)**	Pengurangan belanja SPPD Dalam dan Luar sebesar Rp. 54.574.000 untuk efisiensi kegiatan
3	**25**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Barang Milik Daerah**	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**22**	**Unit**	**11**	**Unit**	**54.830.000**	**27.415.000**	**(27.415.000)**	
3	25	01	2,07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	22	Unit	11	Unit	54.830.000	27.415.000	**(27.415.000)**	Pengurangan Belanja Kursi Susun dari 22 Unit menjadi 11 Unit sebesar Rp. 27.415.000 untuk efisiensi belanja
3	**25**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**12**	**Laporan**	**12**	**Laporan**	**163.800.000**	**163.800.000**	-	
3	25	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	12	Laporan	12	Laporan	163.800.000	163.800.000	-	
3	**25**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**56**	**Unit**	**56**	**Unit**	**379.340.000**	**385.340.000**	**6.000.000**	
3	25	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	Unit	1	Unit	43.930.000	43.930.000	-	

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
									Target 2025				Pagu Indikatif Tahun 2025			
									Semula		Menjadi		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
3	25	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	24	Unit	24	Unit	287.910.000	293.910.000	**6.000.000**	Penambahan pembayaran Pajak dan Pengurusan BPKB Mobil yang hilang
3	25	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	29	Unit	29	Unit	12.500.000	12.500.000	-	
3	25	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	Unit	1	Unit	25.000.000	25.000.000	-	
3	25	01	2,09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	Unit	1	Unit	10.000.000	10.000.000	-	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi perikanan tangkap**			**34.009,02**	**Ton**	**34.009,02**	**Ton**	**1.341.239.950**	**1.292.048.200**	**(49.191.750)**	
3	**25**	**03**	**2,01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Kecamatan Kalianda, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Sidomulyo dan kecamatan Sragi	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**84**	**Unit**	**84**	**Unit**	**120.663.550**	**79.637.050**	**(41.026.500)**	
3	25	03	2,01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2	dokumen	2	dokumen	49.086.950	20.334.950	**(28.752.000)**	Pengurangan belanja ATK, Kertas, Bahan Komputer, Lembur dan SPPD Sebesar Rp. 28.752.000 untuk efisiensi belanja

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
									Target 2025				Pagu Indikatif Tahun 2025			
									Semula		Menjadi		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
3	25	03	2,01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Kecamatan Ketapang, Kecamatan Sidomulyo dan kecamatan Sragi	Dana Alokasi Umum (DAU)	84	Unit	84	Unit	71.576.600	59.302.100	**(12.274.500)**	Pengurangan belanja ATK, Kertas, SPPD luar dan SPPD Dalam sebesar Rp. 12.274.500 untuk efisiensi belanja
3	**25**	**03**	**2,02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Nelayan Kecil dalam Daerah yang diberdayakan**	**Kecamatan Sragi, Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Ketapang**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**80**	**orang**	**80**	**orang**	**1.206.356.400**	**1.206.356.400**	**-**	
3	25	03	2,02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Kecamatan Sragi, Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Ketapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	80	Orang	80	Orang	1.206.356.400	1.203.844.150	**(2.512.250)**	Terdapat pengurangan belanja sebesar Rp. 2.512.250 untuk efisiensi belanja
3	**25**	**03**	**2,03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Jumlah Tempat Pelelangan Ikan/TPI yang dikelola**	**Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Ketapang**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**2**	**Lokasi**	**2**	**Lokasi**	**14.220.000**	**8.567.000**	**(5.653.000)**	
3	25	03	2,03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Ketapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2	layanan	2	layanan	14.220.000	8.567.000	**(5.653.000)**	Pengurangan pada belanja Bahan Komputer, makan minum aktivitas lapangan dan sppd dalam kota sebesar Rp. 5.653.000 untuk efisiensi belanja

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
									Target 2025		Pagu Indikatif Tahun 2025			
									Semula	Menjadi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi perikanan Budidaya**	**Kecamatan Tj. Sari, Waysulan, Merbau mataram, katibung, rajabasa, jati agung, natar, way panji, kalianda, tj. Bintang, sidomulyo, penengahan, bakauheni dan palas**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**34.002,27 Ton**	**34.002,27 Ton**	**1.558.595.650**	**1.452.909.050**	**(105.686.600)**	
3	**25**	**04**	**2,02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Terlaksananya pemberdayaan pembudidya ikan kecil**	**Kecamatan Tj. Sari, Waysulan, Merbau mataram, katibung, rajabasa, jati agung, natar, way panji, kalianda, tj. Bintang, sidomulyo, penengahan, bakauheni dan palas**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**27 Kelompok**	**27 Kelompok**	**789.362.950**	**783.759.250**	**(5.603.700)**	
3	25	04	2,02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kecamatan Tj. Sari, Waysulan, Merbau mataram, katibung, rajabasa, jati agung, natar, way panji, kalianda, tj. Bintang, sidomulyo, penengahan, bakauheni dan	Dana Alokasi Umum (DAU)	17 kelompok	17 kelompok	704.362.950	704.362.950	-	Tidak dapat direfocusing/ diefisiensi karena sudah terealisasi
3	25	04	2,02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Sidomulyo	Dana Alokasi Umum (DAU)	10 kelompok	10 kelompok	85.000.000	79.396.300	**(5.603.700)**	Terdapat pengurangan belanja sebesar Rp. 5.603.700 untuk efisiensi belanja

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
									Target 2025				Pagu Indikatif Tahun 2025	
									Semula		Menjadi		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
3	**25**	**04**	**2,03**		**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**25 Rekomendasi**		**25 Rekomendasi**		**62.587.850**	**27.480.250**	**(35.107.600)**	
3	25	04	2,03	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	25	Rekomendasi	25	Rekomendasi	62.587.850	27.480.250	**(35.107.600)**	Terdapat pengurangan belanja ATK, Kertas, komputer, narsum, sppd sebesar Rp. 35.107.600 untuk efisiensi Belanja
3	**25**	**04**	**2,04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Terlaksananya pengelolaan pembudidayaan ikan**	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**17**	**Lokasi**	**17**	**Lokasi**	**706.644.850**	**641.669.550**	**(64.975.300)**	
3	25	04	2,04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	Dokumen	1	Dokumen	6.600.800	2.795.800	**(3.805.000)**	Terdapat pengurangan belanja ATK, Kertas, Komputer dan sppd sebesar Rp. 3.805.000 untuk efisiensi Belanja
3	25	04	2,04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Natar, Kecamatan Sragi, Kecamatan Penengahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	Unit	1	Unit	241.602.850	239.285.450	**(2.317.400)**	Terdapat pengurangan belanja ATK, Kertas, Komputer Pembudidayaan sppd sebesar Rp. 2.317.400 untuk efisiensi belanja
3	25	04	2,04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Palas	Dana Alokasi Umum (DAU)	30	Dokumen	30	Dokumen	74.472.450	55.335.050	**(19.137.400)**	Terdapat pengurangan belanja sebesar Rp. 19.137.400 untuk efisiensi belanja
3	25	04	2,04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Sragi, Kecamatan Palas dan Kecamatan Jati Agung	Dana Alokasi Umum (DAU)	5	Unit	5	Unit	223.024.200	221.332.200	**(1.692.000)**	Terdapat pengurangan belanja sebesar Rp. 1.692.000 untuk efisiensi belanja

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
									Target 2025				Pagu Indikatif Tahun 2025			
									Semula		Menjadi		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
3	25	04	2,04	0002	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	Dokumen	1	Dokumen	160.944.550	122.921.050	**(38.023.500)**	Pengurangan belanja pada kertas, komputer, sppd makan minum sebesar Rp. 38.023.500 untuk efisiensi belanja
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan**	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**90**	**Dokumen**	**65**	**Dokumen**	**223.277.000**	**156.121.300**	**(67.155.700)**	
3	**25**	**05**	**2,01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**Terawasinya kelengkapan dokumen izin usaha perikanan tangkap dan budidaya**	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**90**	**Dokumen**	**65**	**Dokumen**	**223.277.000**	**156.121.300**	**(67.155.700)**	
3	25	05	2,01	0004	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pengawasan Usaha pembudidayaan ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	55	Dokumen	40	Dokumen	126.715.150	96.818.600	**(29.896.550)**	Terdapat pengurangan belanja pada ATK, Komputer, narsum, mamin aktv lapangan sppd dalam kegiatan pengawasan sehingga output juga menjadi berkurang untuk efisiensi belanja
3	25	05	2,01	0007	Pengawasan Usaha Penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan penangkapan ikan dan /atau pengangkutan ikan sesuai kewenangan Kabupaten/Kota	7 Kecamatan Pesisir Kabupaten Lampung Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	35	Dokumen	25	Dokumen	96.561.850	59.302.700	**(37.259.150)**	Terdapat pengurangan belanja pada ATK, Komputer, narsum, mamin aktv lapangan sppd dalam kegiatan pengawasan sehingga output juga menjadi berkurang untuk efisiensi belanja

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Pagu Indikatif Tahun 2025		Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
									Target 2025							
									Semula		Menjadi		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Produksi hasil pengolahan dan pemasaran perikanan**	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**1.547,12**	**Ton**	**1.547,12**	**Ton**	**479.710.400**	**370.248.700**	**(109.461.700)**	
3	**25**	**06**	**2,01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah Dokumen Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil yang diterbitkan**	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**1**	**dokumen**	**1**	**dokumen**	**9.258.300**	**6.937.800**	**(2.320.500)**	
3	25	06	2,01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	dokumen	1	dokumen	9.258.300	6.937.800	**(2.320.500)**	Pengurangan belanja Atk dan sppd sesbesar Rp. 2.320.500 untuk efisiensi belanja
3	**25**	**06**	**2,02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah unit usaha yang mendapatkan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**80**	**Unit Usaha**	**50**	**Unit Usaha**	**29.878.500**	**13.693.400**	**(16.185.100)**	
3	25	06	2,02	0002	Pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai Skala usaha dan skala Resiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan skala resiko	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum (DAU)	80	Unit Usaha	50	Unit Usaha	29.878.500	13.693.400	**(16.185.100)**	Pengurangan belanja pada ATK, Mamin aktv lapangan dan sppd sebesar Rp. 16.185.100 untuk efisiensi belanja

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
									Target 2025				Pagu Indikatif Tahun 2025			
									Semula		Menjadi		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
3	**25**	**06**	**2,03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kecamatan jati agung, kecamatan kalianda, kecamatan ketapang, kecamatan sragi**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**12**	**Pelaku usaha**	**12**	**Pelaku usaha**	**440.573.600**	**349.617.500**	**(90.956.100)**	
3	25	06	2,03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan jati agung, kecamatan kalianda, kecamatan ketapang, kecamatan sragi	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.547,12	Ton	1.547,12	Ton	173.791.700	122.015.100	**(51.776.600)**	Pengurangan belanja ATK, Mamin, narsum dan sppd sebesar Rp. 51.776.600 Untuk efisiensi belanja
3	25	06	2,03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kecamatan katibung, kecamatan natar, kecamatan jati agung dan kecamatan kalianda	Dana Alokasi Umum (DAU)	12	Pelaku Usaha	12	Pelaku Usaha	266.781.900	227.602.400	**(39.179.500)**	Pengurangan belanja ATK, Mamin, narsum dan sppd sebesar Rp. 39.179.500 dan penataan belanja Keperluan lomba masak ikan tingkat provinsi yang batal diadakan sebesar Rp. 9.136.400 menjadi belanja makan minum dan hadiah Lomba masak ikan tingkat Kabupaten
													8.939.742.150	**8.380.210.150**	**(559.532.000)**	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan **alasan perubahan** anggaran sebagai berikut :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
   - Pada program ini terdapat pengurangan/ efisiensi anggaran sebesar Rp. 228.036.250 dimana semula anggaran sebesar Rp. 5.336.919.150 menjadi Rp. 5.108.882.900. Pengurangan ini dilakukan dalam rangka pemenuhan instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja perangkat daerah. Pada program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota efisiensi anggaran meliputi pengurangan belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Kertas, belanja bahan yang berkaitan dengan komputer, makan minum rapat, perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah. Hal ini berlaku hampir disemua sub kegiatan, meskipun begitu tidak mengurangi target kinerja didalamnya kecuali Pengadaan Pakaian dinas yang semula sebanyak 85 paket menjadi 43 paket, belanja mebel semula 22 unit menjadi 11 unit.
   - Pada sub kegiatan Pelaksanaan tugas ASN terdapat honorarium PPTK Bidang Pemberdayaan usaha Perikanan 5 bulan yang tidak direalisasikan, ditata menjadi belanja Alat tulis kantor yang terkena efisiensi anggaran.
   - Terdapat penambahan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, untuk pembayaran penggantian BPKB mobil yang hilang.

2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Pada program pengelolaan perikanan tangkap terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 49.191.750 dengan anggaran semula Rp. 1.341.239.950 menjadi Rp. 1.292.048.200. Efisiensi belanja terdiri dari Alat Tulis Kantor, Belanja Kertas, belanja bahan yang berkaitan dengan computer, makan minum aktivitas lapangan, dan perjalanan dinas dalam kota.

3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

- Pada program pengelolaan perikanan budidaya terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 105.686.600 dengan anggaran semula sebesar Rp. 1.558.595.650 menjadi Rp. 1.452.909.050 karena efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran terdiri dari belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Kertas, belanja bahan yang berkaitan dengan computer, makan minum aktivitas lapangan, belanja narasumber moderator dkk, perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah, paket meeting dalam kota.
- Pada sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota selain terdapat efisiensi anggaran operasional alat tulis kantor dan lain-lain, terdapat juga pengurangan belanja budikdamber untuk Masyarakat/ keluarga beresiko stunting. Hal ini dilakukan dikarenakan belanja operasional kegiatan perikanan budidaya sangat minim untuk mendukung kegiatan hibah yang banyak jumlahnya.

4. PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan terdapat pengurangan/ efisiensi anggaran sebesar Rp. 67.155.700 semula anggaran sebesar Rp. 223.277.000 menjadi Rp. 156.121.300. Efisiensi anggaran terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja bahan yang berkaitan dengan komputer,

belanja kertas, belanja makan minum aktivitas lapangan, belanja narasumber moderator dkk, perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dan paket meeting dalam kota.

5. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

- Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan terdapat pengurangan/ efisiensi anggaran sebesar Rp. 109.461.700 dari semula sebesar Rp. 479.710.400 menjadi Rp. 370.248.700. Efisiensi ini terdiri dari belanja operasional diantaranya belanja alat tulis kantor, belanja kertas, belanja bahan yang berkaitan dengan computer, belanja makan minum aktivitas lapangan, belanja honorarium narasumber moderator dkk, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah serta paket meeting dalam kota.
- Pada sub kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota terdapat penataan belanja lomba masak ikan Tingkat Provinsi. Dimana kegiatan lomba masak ikan Tingkat provinsi ini batal diadakan dikarenakan terkena refocusing/ efisiensi anggaran juga, sehingga anggaran di kabupaten menyesuaikan dan ditata kedalam lomba masak Tingkat kabupaten yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan agustus mendatang.

Dari pemaparan diatas, alasan perubahan anggaran pada tahun 2025 dapat disimpulkan yaitu pengurangan anggaran pada sub kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk efisiensi dan efektivitas anggaran dan kegiatan

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan ini dilakukan karena adanya instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa belanja operasional perangkat daerah seperti alat tulis kantor dan lain-lain serta pergeseran kegiatan dan anggaran yang lebih prioritas dan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD dan merupakan perubahan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya target dan sasaran pembangunan perikanan.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA perubahan) Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ini juga sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu dapat berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perikanan.

RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Perikanan Kabupaten sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, eksekutif, legislatif, dunia usaha, kelompok kepentingan maupun kelompok masyarakat lainnya selain itu juga konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai program yang telah dirumuskan dalam Renja maupun pada Renstra Dinas Perikanan.

Diharapkan Renja Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan salah satu dokumen pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah mampu mengarahkan kebijakan dan program yang pencapaiannya sesuai target *Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perikanan* 2025, serta kinerja yang telah ditetapkan dan untuk mewujudkannya diperlukan dukungan dan peran serta/partisipasi masyarakat dari semua stakeholder dan atau semua pihak yang berkepentingan. Diharapkan hasil pembangunan dapat merata di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat serta mampu meningkatkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas yang mantap.

Selanjutnya, langkah-langkah antisipasif dan korektif akan ditempuh di masa datang guna perbaikan dan menyiasati tingkat pencapaian yang lebih baik dalam penyusunan renja SKPD. Penggalangan aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan penyusunan Renja SKPD akan dilakukan lebih akurat sehingga di tahun anggaran selanjutnya semua program/kegiatan yang direncanakan Dinas Perikanan dapat terlaksana sesuai rencana, tepat sasaran bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Demikian, Renja Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ini disusun, diharapkan penyelenggaraan program/ kegiatan dinas perikanan dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien.

Kalianda, 14 Juni 2024
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Lampung Selatan

Ir. Jemariko, S.Pi., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740702 200003 1 002

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2025



DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Pembangunan peternakan merupakan salah satu subsektor pertanian yang menjadi perhatian dalam dokumen tersebut, karena potensi pengembangan peternakan di Kabupaten Lampung Selatan sangat besar. Selain itu pengembangan peternakan dikenal sebagai sektor pertanian yang sangat strategis untuk penanggulangan kemiskinan dan penyediaan kesempatan kerja.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ditujukan untuk menjadi acuan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Lampung Selatan.

Untuk mempercepat keberhasilan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan diharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder dalam implementasi program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Rancangan Awal Renja ini. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi positif di dalam penyusunan Rancangan Awal Renja ini disampaikan terima kasih. Akhirnya semoga dokumen Rancangan Awal Renja ini bermanfaat

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR …… i
DAFTAR ISI …….. ii
DAFTAR TABEL …….. iii

BAB I PENDAHULUAN…… 1
1.1. Latar Belakang .....……...……..... 1
1.2. Landasan Hukum…..……...……. 2
1.3. Maksud dan Tujuan …..…..…….…….…….. 3
1.4. Sistematika Penulisan …...…….…….……. 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN LALU…… 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2021 dan Capaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan..……..…….……. 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.. 23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ……..…….…….. 26
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD……..
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat……...

BAB III TUJUAN PERANGKAT DAERAH…… 32
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional …… 32
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ……...… 33
3.3. Program dan Kegiatan ……...……... 34

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERA 61

BAB V PENUTUP……. 68

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan dan Pencapaian RENSTRA Dinas Peternakan da Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan s/d tahun 2026 di Kabupaten Lampung Selatan ……. 11

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan ……..... 27

Tabel 2.3 Target Kinerja pada Tahun 2025 ……. 28

Tabel 2.4 Review Terhadap RKPD Dinas Peternakan dan kesehatan hewan kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ……. .. 39

Tabel 3.2 Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan dari Usulan Musrenbang dan Pokir Tahun 2024……..…… 57

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 …… 62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Ranwal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Ranwal Renja PD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ranwal Renja merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025 .

Ranwal Renja PD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja PD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2025 .

Mengingat arti strategis dokumen Ranwal Renja PD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagai mana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan dalam menyusun Ranwal Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ Tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 -2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 104.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Ranwal Rencana Kerja (Renja) ini diantaranya adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024, review pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnyal Rencana Kerja PD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah untuk memasukan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025 .

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 meliputi :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Lalu

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Lalu

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 didapat dari realisasi hasil kinerja tahunan yang bersumber dari APBD.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki tujuan "Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Berlandaskan Pada Struktur Perekonomian Yang Kokoh" dengan sasaran strategis "Meningkatnya Populasi dan Produksi Ternak".

Di dalam Undang-undang no.41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan disebutkan bahwa Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Pada dasarnya kesmavet merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk:

1. Pengendalian dan penanggulangan zoonosis
2. Penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan
3. Penjaminan higiene dan sanitasi
4. Pengembangan kedokteran perbandingan

5. Penanganan bencana.

Di Indonesia produk pangan asal hewan, dalam hal ini daging ruminansia dan daging unggas harus memenuhi persyaratan ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal), dengan penerapan sebagai berikut:

1. HALAL, yaitu tidak bertentangan dengan syariat islam:
   a. Penyembelihan hewan yang dipersyaratkan halal, harus dilaksanakan secara halal.
   b. Sebelum, selama dan sesudah penyembelihan, produk hewan tersebut tidak mengandung atau bersentuhan dengan barang atau zat yang diharamkan oleh agama Islam
2. AMAN, yaitu tidak mengandung bahaya yang dapat mengganggu atau membahayakan kesehatan manusia, antara lain:
   a. Bahaya fisik (debu, abu, bulu, rambut, rumput, serpihan kayu, kaca, plastik, atau logam, dll)
   b. Bahaya biologi (virus, bakteri, parasit, jamur)
   c. Bahaya kimia (pestisida, logam berat, racun, antibiotika, hormon, desinfektan, dll)
3. UTUH, murni atau wholesome yaitu tidak dikurangi atau tidak ditambah sesuatu zat apapun.
4. SEHAT, yaitu berpenampilan baik, tidak menyimpang, etis, dapat diterima oleh masyarakat, layak dikonsumsi dan mengandung zat-zat gizi dalam jumlah cukup.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Indikator Kinerja Utama yang digunakan adalah Populasi Sapi, Kambing, Ayam Ras Pedaging, Ayam Ras Petelur, Produksi Telur dan Produksi Telur. Adapun capaian indikator tersebut mampu melebih dari target yang telah ditentukan. Program dan Kegiatan pembangunan yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   f. Penyediaan Bahan/Material
   g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
   a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
2. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
   a. Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
3. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
   a. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
   b. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

III. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

1. Pengembangan Prasarana Pertanian
   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
2. Pembangunan Prasarana Pertanian
   a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

IV. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
   a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
   a. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
   a. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

V. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
   a. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
2. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
   a. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan

VI. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Hasil review target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan tersebut tercantum pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan dan Pencapaian RENSTRA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan s/d tahun 2024 di Kabupaten Lampung Selatan

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) / KEGIATAN (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Peternakan Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2043		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Peternakan tahun 2042)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Peternakan s/d 2045	
											Target Renja Peternakan tahun 2023	Realisasi Renja Peternakan tahun 2034	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1					2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Per Urusan Penunjang Administrasi SKPD (IKM)	80	Poin	75	poin	80	75	97.5	80	0	0,00
03	27	01	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	9	Dok	5	Dok	9	5	95.00 %	9	0	0,00
03	27	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang memiliki tujuan, sasaran dan indikator yang baik dan terukur	2	Dok	1	Dok	2	1	44.44 %	2	0	0,00
03	27	01	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	1	Dok	1	1	40.00 %	1	0	0,00
03	27	01	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD Perubahan	1	%	1	Dok	1	1	60.00 %	1	0	0,00

03	27	01	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA-SKPD	1	Dok	1	Dok	1	1	60.00 %	1	0	0,00
03	27	01	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPA-SKPD Perubahan	1	Dok	1	Dok	1	1	80.00 %	1	0	0,00
03	27	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Lap	1	Lap	3	1	60.00 %	3	0	0,00
03	02	01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	12	Dok	8	Dok	12	8	40.00 %	12	0	0,00
03	02	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12	Orang/bulan	62	Orang/bulan	12	62	60.74 %	12	0	0,00
03	02	01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dok	3	Dok	12	3	100.00%	12	0	0,00
03	02	01	02	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan	12	Lap	1	Lap	12	1	60.00 %	12	0	0,00
03	02	01	02	04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Lap	1	Lap	12	1	80.00 %	12	0	0,00
03	27	01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian	100	%	0.00	%	100	0.00	60.00 %	100	0	0,00
03	27	01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Belanja Pakaian Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90	Paket		Paket	90		0.00 %	90	0	0,00
03	27	01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum	100	%	30.56	%	100	30.56	25.00 %	100	0	0,00
0	2	0	0	0	Penyediaan Komponen	Pengadaan Peralatan	20	Paket	1	Paket	20	1	98.15	20	0	0,00

3	7	1	6	2	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	dan Perlengkapan Kantor							%			
03	27	01	06	03	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Rumah Tangga	20	Paket	1	Paket	20	1	2.22 %	20	0	0,00
03	27	01	06	04	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan Logistik Kantor	60	Paket	3	Paket	60	3	13.33 %	60	0	0,00
03	27	01	06	05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cetak dan Penggandaan	60	Paket	3	Paket	60	3	7.50 %	60	0	0,00
03	27	01	06	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20	Paket	3	Paket	20	3	8.57 %	20	0	0,00
03	27	01	06	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan/Material kantor	12	Dok	30	Dok	12	30	25.56 %	12	0	0,00
03	27	01	06	08	Penyediaan Bahan/Material	Fasilitasi Kunjungan Tamu kantor	14	Paket	0	Paket	14	0	168.33%	14	0	0,00
03	27	01	06	09	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	Lap	3	Lap	80	3	4.84 %	80	0	0,00
03	27	01	08		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40	Lap	5	Lap	40	5	8.42 %	40	0	0,00
03	27	01	08	02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rekening Telepon, Internet, Air & Listrik Kantor	12	Lap	3	Lap	12	3	22.99 %	12	0	0,00
03	27	01	09		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	12	Lap	3	Lap	12	3	60.00 %	12	0	0,00
03	27	01	09	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50	unit	50	unit	50	50	60.00 %	50	0	0,00
03	27	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Pemeliharaan rutin/berkala, pembayaran Pajak, dan Perizinan Kendaraan	6	unit	6	unit	6	6	45.45 %	6	0	0,00

					Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Operasional atau Lapangan										
03	27	01	09	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23	unit	23	unit	23	23	0.00 %	23	0	0,00
03	27	01	09	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	20	unit	20	unit	20	20	0.00 %	20	0	0,00
03	27	02			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang tersedia (%)	1	unit	1	unit	1	1	60.00 %	1	0	0,00
03	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Kegiatan)	100.00	%	25.00	%	100.00	25.00	100.00%	100.00	0	0,00
03	27	02	01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Bimtek Pengolahan Bidang Peternakan (Kegiatan)	2	Lap	1	Lap	2	1	8.00 %	2	0	0,00
03	27	02	01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak (Pengawasan)	4	Lap	1	Lap	4	1	12.00 %	4	0	0,00
03	27	02	05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Surat Keterangan Layak Bibit (Lembar)	220	ekor	20	ekor	220	20	110.00%	220	0	0,00

03	27	02	05	03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Persentase Pengadaan Benih/Bibit Ternak dan Sarana Pengolahan Pakan (%)	230	Lap	0	Lap	230	0	19.75 %	230	0	0,00
03	27	02	06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Ternak Yg Didistribusikan Ke Masyarakat	100	ekor	0	ekor	100	0	0.00 %	100	0	0,00
03	27	02	06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Kelompok Pengolahan Pakan Ternak	1,825	ekor	0	ekor	1,825	0	28.22 %	1,825	0	0,00
03	27	02	06	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia (%)	100	ton	25	ton	100	25	202.00%	100	0	0,00
03	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penyusunan Pengembangan Prasarana Pertanian	100.00	%	20.00	%	100.00	20.00	90.00 %	100.00	0	0,00
03	27	03	01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyusunan data statistik peternakan	1	Dok	0	Dok	1	0	0.00 %	1	0	0,00
03	27	03	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun dan di rehabilitasi (Unit)	1	Lap	0	Lap	1	0	0.00 %	1	0	0,00
03	27	03	02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Irigasi Air Tanah Yang Dibangun	61	unit	0	unit	61	0	11.15 %	61	0	0,00
03	27	03	02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Embung Yang Dibangun	0	unit	0	unit	0	0	2.40 %	0	0	0,00

03	27	03	02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Jalan Produksi Yang Dibangung	0	unit	0	unit	0	0	0.00 %	0	0	0,00
03	27	03	02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan atau Rehab Puskeswan	3	unit	7	unit	3	7	92.86 %	3	0	0,00
03	27	03	02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Persentase Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (%)	5	unit	7	unit	5	7	270.00%	5	0	0,00
03	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penanganan Penyakit Hewan Menular	77.00	%	25.00	%	77.00	25.00	108.97%	77.00	0	0,00
03	27	04	01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Vaksinasi Rabies	72.00	%	0.00	%	72.00	0.00	0.00 %	72.00	0	0,00
03	27	04	01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Peningkatan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Gangguan Reproduksi	0	Lap	0	Lap	0	0	0.24 %	0	0	0,00
03	27	04	03		Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Zoonosis	Jumlah Ternak yang Diobati	17	orang	17	orang	17	17	0.00 %	17	0	0,00
03	27	04	03	02	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha yang ber-NKV	100.00	%	0.00	%	100.00	0.00	0.00 %	100.00	0	0,00

03	27	04	04		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Kegiatan Produk Hewan	12	Lap	3	Lap	12	3	0.19 %	12	0	0,00
03	27	04	04	02	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase PenerbitanTanda Daftar Izin Usaha Pertanian yang sesuai dengan peruntukannya (%)	17	kegiatan		kegiatan	17		12.50 %	17	0	0,00
03	27	04	04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase PenerbitanTanda Daftar Izin Usaha Pertanian yang sesuai dengan peruntukannya (%)	12	Lap	2	Lap	12	2	34.12 %	12	0	0,00
03	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Dokumen Asuransi Usaha Ternak	90.00	%	22.22	%	90.00	22.22	80.25 %	90.00	0	0,00
03	27	06	01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Produksi Benih Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, RPH yang diterbitkan (Dokumen)	12	Dok	4	Dok	12	4	0.17 %	12	0	0,00
03	27	06	01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Pertemuan Pelaku Usaha (Kegiatan)	12	Dok	4	Dok	12	4	0.17 %	12	0	0,00
03	27	06	02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan (%)	6	Dok	4	Dok	6	4	73.33 %	6	0	0,00
03	27	06	02	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (Penyuluhan)	6	Lap	4	Lap	6	4	73.33 %	6	0	0,00

03	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Lembaga yang membuat Dokumen Programa (Lembaga)	90	%	22.22	%	90.00	22.22	86.42 %	90.00	0	0,00
03	27	07	01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Lembaga yang membuat Dokumen RDK dan RDKK (Lembaga)	32	Kali	8	Kali	32	8	26.13 %	32	0	0,00
03	27	07	01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Lembaga yang membuat Dokumen RDK dan RDKK (Lembaga)	12	unit	5	unit	12	5	30.00 %	12	0	0,00
03	27	07	01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Lembaga yang membuat Dokumen RDK dan RDKK (Lembaga)	12	unit	5	unit	12	5	40.00 %	12	0	0,00
03	27	07	01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Lembaga yang membuat Dokumen RDK dan RDKK (Lembaga)	1	unit	1	unit	1	1	10.00 %	1	0	0,00

Dari tabel 2.2 sesuai format tabel T-C.29 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Pada tahun anggaran 2024 realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah

Berdasarkan tabel Meningkatnya kualitas pelayanan Publik Rata-rata capaian kinerja program sebesar *95*%. Ketercapaian tersebut dipengaruhi program berupa program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimana ketercapaiannya tidak sesuai target yaitu hanya **75 poin** indeks kepuasan pelayanan kesekertariatan, sedangkan target yang ditetapkan pada Renja sebesar 80 poin. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil survey indeks kepuasan pelayanan kesekertariatan berdasarkan Permenpan Nomor 14 tahun 2017 hanya menunjukkan hasil perhitungan sebesar 77 poin. Pelayanan kebersihan kantor menjadi nilai terendah dalam survey tersebut.

Indikator sasaran Meningkatnya populasi dan produksi ternak Telah terealisasi program dengan rata-rata capaian kinerja sebesar *84* %. ketercapaian kinerja pada sasaran 2 ini dipengaruhi pula dari aktivitas Program program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Kegiatan ini melampaui target yang ditetapkan di tahun 2024 yaitu sebanyak 7 unit yang di bangun.

B. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program yang memenuhi target kinerja hasil :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
4. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
5. PROGRAM PERIZINAN PERTANIAN
6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Kegiatan yang memenuhi target kinerja keluaran :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
- Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
- Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
- Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
- Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

- Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
- Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

C. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target/kinerja keluaran yang direncanakan

Kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja hasil :

1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
2. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Target Kinerja Hasil :

a. Jumlah Dosis Vaksin Rabies Target 1000 dosis realisasi 1800 dosis (180%)
b. Jumlah Ternak Yang Diobati Target 2000, realisasi 4.247 (237%)

D. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Efisiensi Anggaran

E. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Tidak tercapainya target kinerja Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Produksi Benih Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, RPH yang diterbitkan (Dokumen) dikarenakan eminat masyarakat maupun stakeholder untuk berusaha dibidang peternakan agak sedikit menurun.

F. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- Melakukan perbaikan dalam proses perencanaan anggaran program dan kegiatan

- Meningkatkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan teknis seperti pengobatan masal dan pengadaan ternak
- Meningkatkan pengetahuan akan pentingnya pembangunan dibidang peternakan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan

Berikut ini adalah kajian terhadap capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan indikator kinerja utama yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 500.7.1/061/IV.24/2024 tanggal 8 Januari 2024 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU-PD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Selatan. Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan meliputi :

1. Populasi Sapi Potong
2. Populasi Kambing
3. Populasi Ayam Ras Petelur
4. Populasi Ayam Ras Pedaging
5. Produksi Daging Sapi
6. Produksi Telur

Tabel.2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan

NO	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Proyeksi 2025
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	Populasi Sapi Potong	116.706	116.731	118.646	146.323	120.644	150.930	160.034	152.112	170.112	155.408	175.001	121.016	179.911
2	Populasi Kambing	356.149	356.704	356.149	361.559	356.863	362.298	366.126	364.016	372.204	379.508	375.111	112.072	378.368
3	Populasi Ayam Ras Petelur	2.383.650	2.731.960	2.384.150	2.722.984	2.385.150	2.649.646	2.700.000	1.543.780	2.750.000	2.511.060	2.775.000	2.600.010	2.800.000
4	Populasi Ayam Ras Pedaging	16.651.651	16.670.802	16.984.684	15.827.148	17.324.378	13.618.172	14.000.000	12.145.320	15.000.000	16.109.345	15.500.000	16.245.809	16.000.000
5	Produksi Daging Sapi (Kg)	975.551	1.004.969	989.051	1.281.876	1.002.761	1.344.782	1.150.000	757.565	1.200.000	1.646.444	1.200.000	296,716	1.250.000
6	Produksi Telur (Kg)	20.335.169	21.034.766	20.345.834	21.100.234	20.345.834	20.725.208	20.800.000	16.420.700	20.900.000	21.567.351	20.950.000	19.475.084	21.000.000

Sesuai dengan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021-2026, target kinerja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Populasi Sapi Potong	175.001	121.016	69,15
2	Populasi Kambing	375.111	112.072	29,87
3	Populasi Ayam Ras Petelur	2.775.000	2.600.010	93,69
4	Populasi Ayam Ras Pedaging	15.500.000	16.245.809	104,81
5	Produksi Daging Sapi (Kg)	1.200.000	296,716	24,8
6	Produksi Telur (Kg)	20.950.000	19.475.084	92,96

***Per 1 desember 2024**

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2024 berada pada rata-rata 69.21% dengan predikat skala ordinal Sangat Berhasil (A). Populasi Sapi Potong pada tahun 2024 belum dapat mencapai target yang ditetapkan, Belum tercapainya target populasi di tahun 2024 antara lain dipengaruhi oleh besarnya angka pemotongan dan angka pengeluaran sapi keluar daerah. Populasi ayam ras pedaging mengalami pencapaian lebih dari target yaitu 104,81%. hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang melakukan usaha budidaya di pedesaan. Untuk menjaga agar populasi dan produksi unggas, termasuk ayam ras pedaging, tetap mencukupi kebutuhan masyarakat, Ditjen PKH melakukan Restrukturisasi Perunggasan melalui pengembangan usaha budidaya ternak unggas di pedesaan (Village Poultry Farming), penataan pemeliharaan unggas di pemukiman, dan pembinaan kemitraan ayam ras. Dengan banyaknya peternak yang terlibat pada usaha peternakan, diharapkan kondisi tersebut dapat mempercepat pertumbuhan populasi

disamping menumbuhkan ekonomi kerakyatan terutama di pedesaan. Usaha peternakan juga akan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi hulu dalam penyediaan input produksi dan ekonomi hilir dalam kegiatan distribusi, pemasaran, pengolahan hasil dan jasa keuangan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan

Dalam rangka meningkatkat populasi dan produksi ternak perlu dilakukan identifikasi secara mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi di lapangan. Identifikasi terhadap berbagai jenis permasalahan yang dihadapi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan dilakukan dengan cermat. Hasil identifikasi akan sangat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam 5 tahun ke depan. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Lampung Selatan meliputi bidang produksi, bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Permasalahan yang dihadapi pada pembangunan peternakan dan kesehatan hewan mencakup beberapa hal sebagai berikut :

1. Berkurangnya lahan untuk dunia usaha peternakan akibat semakin meningkatnya jumlah penduduk sehingga menyebabkan persaingan
2. Perlunya penetapan sentra pengembangan komoditas unggulan daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah
3. Serangan wabah penyakit ternak yang dapat terjadi sewaktu-waktu dapat berakibat buruk pada produksi ternak dan mengancam populasi ternak.
4. Peningkatan populasi ternak baik ruminansia dan unggas untuk terus menjamin ketersediaan produksi pangan hewani

Perlu peningkatan prasarana dan sarana pendukung dalam peningkatan produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan, antara lain luasan hijauan pakan ternak. Isu-isu

strategis yang akan ditangani oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

1. **Kontribusi sektor peternakan terhadap produksi dan produktivitas ternak belum maksimal**

Perkembangan produktivitas beberapa komoditas peternakan selama 5 (lima) Tahun terakhir sangat lamban. Komoditas perternakan dimana pelaku pemeliharaan ternak (produsen) sebagian besar didominasi oleh peternak kecil dengan keterampilan beternak yang masih rendah (penguasaan teknologi dan informasi peternakan yang kurang). Sistem pemeliharaan didominasi oleh ekstensif maupun semi intensif dan hanya sebagian kecil yang intensif, menyebabkan produktivitas tidak optimal. Kualitas bibit ternak menunjukkan gejala penurunan, yang disebabkan oleh seleksi dan penyingkiran (*culling*) ternak belum dilaksanakan secara efektif dan para peternak lebih memilih menjual ternak yang berkualitas terbaik karena harganya lebih tinggi.

2. **Terbatasnya fasilitas pembiayaan usaha peternakan yang dihadapi peternak**

Modal adalah unsur utama dalam pengembangan komoditas pangan dan peternakan. Sampai saat ini peternak masih kesulitan untuk akses terhadap permodalan ini, meskipun pemerintah sudah banyak mengeluarkan skim kredit untuk bidang peternakan. Kesulitan ini disamping disebabkan terbatasnya informasi, RENSTRA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan kemampuan manajerial dan pengetahuan peternak, juga karena keengganan peternak berurusan dengan pihak perbankan serta banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dimana mereka tidak mampu memenuhinya.

3. **Kurang optimalnya kelembagaan peternak dalam penguatan, pendampingan dan kerjasama kemitraan**

Belum optimalnya fungsi kelembagaan, rendahnya dukungan institusi lain yang terkait dalam mendukung pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Kelompok

tani yang tercatat cukup banyak, namun belum berperan nyata sebagai lembaga kerjasama dalam bidang produksi/ budidaya, pengolahan maupun pemasaran hasil ternak. **Kurang optimalnya penerapan dan pengembangan tentang inovasi teknologi (pembibitan, pakan, budidaya dan pengolahan hasil).**

Kondisi industri hilir peternakan masih sangat terbatas, padahal nilai tambah pada produk olahan ini sangatlah besar, industri hilir peternakan baru berkembang pada skala kecil di tingkat rumah tangga. Untuk itu, perlu dukungan dari kegiatan budidaya peternakan dan kesehatan ternak (sektor hulu). Pemeliharaan ternak di kabupaten Lampung Selatan yang sebagian besar hanya sebagai usaha sambilan dan dipelihara secara non intensif/semi intensif sehingga tidak memberikan pendapatan yang optimal.

4. Tingginya Ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

Upaya menekan penyakit ternak di Kabupaten Lampung Selatan, sampai saat ini masih merupakan persoalan yang masih dihadapi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Upaya pencegahan dengan vaksinasi, pemberantasan (eliminasi), pengawasan lalu lintas, sosialisasi dan koordinasi dilakukan untuk menekan penyebaran penyakit terrnak, namun kasus penyakit ternak masih saja terjadi.

5. Ketersediaan vaksin dan obat – obatan ternak yang belum memadai

Penanganan keberhasilan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner terkendala karena ketersediaan vaksin dan obat – obatan ternak yang belum memadai. Hal ini dikarenakan minimnya anggaran untuk membeli vaksin dan obat – obatan ternak dengan demikian dapat menyebabkan kurang optimalnya pelayanan peternakan.

6. Kurang optimalnya pemasaran hasil ternak

Terbatasnya perencanaan pemasaran hasil secara periodik, menyebabkan peran hasil penjualan ternak dalam ekonomi keluarga masih bersifat mengatasi kebutuhan mendesak. Hal lainnya adalah belum terintegrasinya usaha peternakan dari hulu sampai hilir sehingga mengakibatkan kurang efisiennya mata rantai tataniaga peternakan. Fasilitas transportasi yang kurang memadai menyebabkan penyusutan bobot badan dan kecelakaan/kematian ternak selama dalam proses pengangkutan. Fasilitasi ternak dalam bidang transportasi juga menjadi komponen penting dalam pencapaian kesejahteraan hewan yang lebih baik.

7. Belum optimalnya pemanfaatan Rumah Potong Hewan oleh para pelaku usaha

Faktor salah satunya belum memadainya fasilitas untuk memotong sapi impor seperti *Brahman Cross*. Tulang punggung penyediaan daging sapi biasanya bersumber dari Peternak kecil atau peternakan rakyat. Peternak kecil biasanya cenderung memilih untuk menjual dalam bentuk hewan hidup dari pada menjual dalam bentuk olahan. Belum lagi biaya yang harus mereka keluarkan untuk mengangkut ternak yang akan dipotong membuat para peternak akhirnya memilih jalan untuk memotong ternak sendiri dari pada harus membawanya ke Rumah Potong Hewan.

2.4 Review Terhadap RKPD

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025 mengacu pada Permendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Reviu yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembanguan daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Selatan untuk menyelaraskan target kinerja dengan analisis

kebutuhan pemecahan masalah yang menjadi skala prioritas dari pelayanan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2025. Review terhadap RKPD yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Tidak terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada penetapan program, kegiatan serta sub kegiatan.

Tabel 2.4 Review Terhadap RKPD Dinas Peternakan dan kesehatan hewan kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analis Kebutuhan						catatan penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		kebutuhan dana (Rp)	
b	c	d	e		f	g	h	i	j		k	l
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					16,791,549,000.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					12,048,158,625.00	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang tersedia	%	100	1,378,981,300.00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang tersedia	%	100	1,943,081,100.00	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Lap	2	22,696,650.00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Lap	2	22,696,650.00	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Lap	4	22,696,650.00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Lap	4	22,696,650.00	
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah		Jumlah benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	ekor	220	14,185,700.00	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah		Jumlah benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	ekor	220	64,185,550.00	

Kabupaten/Kota						Kabupaten/Kota						
Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	Lap	230	14,185,700.00	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	Lap	230	64,185,550.00	
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	ekor	100	1,342,098,950.00	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	ekor	100	1,856,198,900.00	
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	ekor	1825	94,908,500.00	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	ekor	1825	94,908,500.00	
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan,	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	ton	100	1,247,190,450.00	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan,	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	ton	100	1,761,290,400.00	

	Semua Kel/Desa						Semua Kel/Desa					
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia	%	100	4,945,462,200.00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia	%	100	1,631,362,425.00	
Pengembangan Prasarana Pertanian		Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dok	1	8,170,700.00	Pengembangan Prasarana Pertanian		Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dok	1	8,170,700.00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Lap	1	8,170,700.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Lap	1	8,170,700.00	
Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun dan di rehabilitasi	unit	61	4,937,291,500.00	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun dan di rehabilitasi	unit	61	1,623,191,725.00	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	3	2,100,000,000.00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	3	460,000,000.00	

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	5	2,837,291,500.00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	5	1,163,191,725.00	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (%)	%	77	2,544,186,550.00	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (%)	%	77	507,286,150.00	
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penanganan Penyakit Hewan Menular	%	72	71,903,050.00	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penanganan Penyakit Hewan Menular	%	72	71,903,050.00	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kader zoonosis	orang	17	71,903,050.00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kader zoonosis	orang	17	71,903,050.00	
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Gangguan Reproduksi	%	100	2,397,786,400.00	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Gangguan Reproduksi	%	100	360,886,000.00	

Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Lap	12	2,397,786,400.00	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Lap	12	360,886,000.00	
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah unit usaha yang ber-NKV	kegiatan	17	74,497,100.00	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah unit usaha yang ber-NKV	kegiatan	17	74,497,100.00	
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Lap	12	74,497,100.00	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Lap	12	74,497,100.00	
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase Penerbitan Tanda Daftar Izin Usaha Pertanian yang sesuai dengan peruntukannya	%	90	63,527,700.00	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase Penerbitan Tanda Daftar Izin Usaha Pertanian yang sesuai dengan peruntukannya	%	90	113,527,700.00	
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Izin Usaha Pertanian dalam daerah yang diterbitkan	Dok	12	34,645,200.00	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Izin Usaha Pertanian dalam daerah yang diterbitkan	Dok	12	34,645,200.00	
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecam	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dok	12	34,645,200.00	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecam	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dok	12	34,645,200.00	

	atan, Semua Kel/Desa						atan, Semua Kel/Desa					
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Produksi Benih Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, RPH yang diterbitkan	Dok	6	28,882,500.00	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Produksi Benih Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, RPH yang diterbitkan	Dok	6	78,882,500.00	
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	Lap	6	28,882,500.00	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	Lap	6	78,882,500.00	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan	%	90	90,424,250.00	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan	%	90	90,424,250.00	
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kali	32	90,424,250.00	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kali	32	90,424,250.00	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	12	43,992,000.00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	12	43,992,000.00	

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	12	20,709,250.00	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	12	20,709,250.00	
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	unit	0	25,723,000.00	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	unit	0	25,723,000.00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Pelayanan	unit	0	7,768,967,000.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Pelayanan	Poin	80	7,762,477,000.00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	11	56,758,450.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	11	56,758,450.00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	1	17,273,550.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	1	17,273,550.00	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	2	12,437,350.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	2	12,437,350.00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1	8,936,850.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1	8,936,850.00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	2	4,548,800.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	2	4,548,800.00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	2	4,922,300.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	2	4,922,300.00	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	3	8,639,600.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	3	8,639,600.00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dok	28	7,141,502,450.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dok	28	7,135,012,450.00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	62	6,383,834,100.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	62	6,330,544,100.00	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	12	743,677,500.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	12	790,477,500.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/De	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	2	7,863,700.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/De	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	2	7,863,700.00	

	sa						sa					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lap	2	6,127,150.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lap	2	6,127,150.00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	%	100	215,596,100.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	%	100	215,596,100.00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2,201,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2,201,000.00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/De	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	44,937,700.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/De	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	44,937,700.00	

	sa						sa					
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	9,996,650.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	9,996,650.00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	19,972,900.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	19,972,900.00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	15,349,550.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	15,349,550.00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	120	18,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	120	18,000,000.00	

	Kel/Desa						Kel/Desa					
Penyediaan Bahan/Material	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	3	8,117,300.00	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	3	8,117,300.00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lap	12	36,225,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lap	12	36,225,000.00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	20	60,796,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	20	60,796,000.00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Lap	12	123,600,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Lap	12	123,600,000.00	

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12	123,600,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12	123,600,000.00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	unit	50	231,510,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	unit	50	231,510,000.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	6	43,130,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	6	43,130,000.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	23	156,380,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	23	156,380,000.00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan,	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	20	7,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan,	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	20	7,000,000.00	

	Semua Kel/Desa						Semua Kel/Desa					
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	25,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	25,000,000.00	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan umum Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI adalah sebagai berikut :

1. Menjamin ketersedian mutu benih dan bibit ternak
2. Meningkatkan populasi dan produktivitas ternak
3. Meningkatkan produksi pakan ternak
4. Meningkatkan status kesehatan hewan
5. Menjamin produk hewan yang ASUH dan berdaya saing
6. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Arah kebijakan umum tersebut di atas dilaksanakan melalui 6 rangkaian strategis. Rumusan strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI adalah sebagai berikut :

1. Memperlancar arus produk peternakan melalui peningkatan efisiensi distribusi
2. Meningkatkan daya saing produk peternakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal
3. Memperkuat regulasi untuk mendorong peran peternak dalam negeri sehingga menjadi mandiri
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar sektor terkait serta networking antar daerah
5. Meningkatkan promosi produk peternakan untuk ekspor
6. Memperkuat kelembagaan peternakan di semua lapisan dan otoritas veteriner.

3.2. **Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan Yang Berintegritas, Maju dan Sejahtera Dengan Semangat Gotong Royong”

Penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Lampung Selatan merupakan tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Dengan adanya sumberdaya yang dimiliki, kinerja yang sudah dicapai, peluang dan tantangan yang dihadapi serta visi dan misi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2021-2026 maka ada keyakinan besar pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2016-2021 dapat berjalan baik. Adapun Misi Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial:
3. Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan
4. Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah;.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayan publlik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel

Sesuai dengan Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 maka ditetapkan tujuan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh
2. Meningkatkan kualitas kelola pemerintahan dan pelayanan public yang professional, trasnparan, efektif dan akuntabel

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Peternakan Kabupaten dan Kesehatan Hewan Lampung Selatan antara lain :

1. Meningkatnya Populasi dan Produksi Ternak

Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan yaitu :

1. Populasi Sapi
2. Populasi Kambing
3. Populasi Ayam Ras Petelur
4. Populasi Ayam Ras Pedaging
5. Produksi Daging Sapi
6. Produksi Telur

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   g. Penyediaan Bahan/Material
   h. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
   a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
   a. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
3. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
   a. Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
4. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
   a. Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
5. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
   a. Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
6. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
   a. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
   b. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

III. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

1. Pengembangan Prasarana Pertanian
   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
2. Pembangunan Prasarana Pertanian
   a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
   b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
   c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
   d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
   e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

3. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
    a. Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

IV. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
    a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
    a. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
    a. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
    b. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
    c. Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

V. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
    a. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
2. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
    a. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan

VI. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
    a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
    b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
    c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
    d. Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
    e. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

Tabel 3.1 Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan dari Usulan Musrenbang dan Pokir Tahun 2024

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja	Volume	Alamat Lengkap	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana (APBN/ APBD)
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER/							
KEGIATAN PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH KESEHATAN HEWAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KAB/KOTA							
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis							
1	- Pembelian Vaksin Rabies pada HPR (Hewan Penular Rabies)	2000 dosis			17 kecamatan	Rp34,000,000	apbd
2	- Pertemuan Kader Zoonosis	1 paket			17 kecamatan	Rp3,200,000	apbd
3	- Operasional Petugas Vaksinasi Rabies	1000 dosis			17 kecamatan	Rp30,000,000	apbd
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER/							
KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KAB/KOTA							
Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner							
4	- Pertemuan Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Hewan	10 paket			17 kecamatan	Rp57,750,000	apbd
5	- Pengadaan Obat-obatan Pelayanan Kesehatan Hewan	1 paket			17 kecamatan	Rp. 193.852.300,	APBD
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							
Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner							

Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan							
6	- Pembagian Paket Kampanye Gizi, terdiri dari	230 paket			17 kecamatan	Rp19,170,500	apbd
	Nugget 500 gram 115 bungkus						
	Telur Bebek Asin 920 buah,						
	Susu UHT 230 liter						
	Tas Goodie Bag 230 buah						
7	- Pertemuan Sosialisasi Penyembelihan Hewan Kurban	1 paket			17 kecamatan	Rp5,100,000	apbd
8	- Pemeriksaan Hewan kurban	65 orang			17 kecamatan	Rp9,750,000	apbd
9	- Cetak kartu SEHAT pada hewan kurban	5375 lbr			17 kecamatan	Rp8,000,000	apbd
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain							
Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain							
10	Pertemuan BUTIK PENTING (Buddaya Itik Penanganan Stunting)	30 keluarga	Jln. Mustafa Kemal No. 39 Kalianda	Way Urang	Kalianda	30,000,000.00	APBD
11	Bimbingan Teknis Kelompok Tani Penerima Hibah Ternak TA 2024	140 orang	Jln. Mustafa Kemal No. 39 Kalianda	Way Urang	Kalianda	17,450,000.00	APBD
12	Pengadaan Ayam Petelur (15 Kelompok)						
	KT. Tani Sri Rejeki	100 ekor		Desa Bandanhurip,	Kec. Palas	11.000.000	APBD
	KWT. USAHA MAJU	100 ekor		Betung	Rajabasa		APBD

						11.000.000	
	KT. Kota Banjar	100 ekor		Bandar Agung	sragi	11.000.000	APBD
	KT. Asri Makmur	100 ekor		jati baru	Tanjung Bintang	11.000.000	APBD
	KWT. CEMPAKA PUTIH	100 ekor		Bumi Jaya	Candipuro	11.000.000	APBD
	KT. TANI MUKTI	100 ekor		batuliman	Candipuro	11.000.000	APBD
	KT. Karya Maju	100 ekor		sidodadi asri	Jati Agung	11.000.000	APBD
	KWT. SINAR JAYA	100 ekor		sumber jaya	Jati Agung	11.000.000	APBD
	KT. SIDO MAKMUR	100 ekor		sidomukti	Tanjung Sari	11.000.000	APBD
	KT. SRI REZEKI II	100 ekor		sidomakmur	Jati Agung	11.000.000	APBD
	KT. Karya Makmur III	100 ekor		talang jawa	way panji	11.000.000	APBD
	KT. Maju Jaya	100 ekor		Desa Sidowaluyo	Merbau Mataram	11.000.000	APBD
	KT. Bina Karya	100 ekor		Desa Bandar Agung	sragi	11.000.00	APBD

						0	
	KT. CINTA DAMAI II	100 ekor		penengahan	PENENGAHAN	11.000.000	APBD
	KT. Maju Sejahtera	100 ekor		Desa Mulyosari	Tanjung Sari	11.000.000	APBD
13	Pengadaan Kandang Ayam (15 Kelompok)						
	KT. Tani Sri Rejeki	13 Set		Desa Bandanhurip,	Kec. Palas	3,900,000	APBD
	KWT. USAHA MAJU	13 Set		Betung	Rajabasa	3,900,000	APBD
	KT. Kota Banjar	13 Set		Bandar Agung	sragi	3,900,000	APBD
	KT. Asri Makmur	13 Set		jati baru	Tanjung Bintang	3,900,000	APBD
	KWT. CEMPAKA PUTIH	13 Set		Bumi Jaya	Candipuro	3,900,000	APBD
	KT. TANI MUKTI	13 Set		batuliman	Candipuro	3,900,000	APBD
	KT. Karya Maju	13 Set		sidodadi asri	Jati Agung	3,900,000	APBD
	KWT. SINAR JAYA	13 Set		sumber jaya	Jati Agung	3,900,000	APBD
	KT. SIDO MAKMUR	13 Set		sidomukti	Tanjung Sari	3,900,000	APBD
	KT. SRI REZEKI II	13 Set		sidomakmur	Jati Agung	3,900,000	APBD
	KT. Karya Makmur III	13 Set		talang jawa	way panji	3,900,000	APBD
	KT. Maju Jaya	13 Set		Desa Sidowaluyo	Merbau Mataram	3,900,000	APBD
	KT. Bina Karya	13 Set		Desa Bandar Agung	sragi	3,900,000	APBD
	KT. CINTA DAMAI II	13 Set		penengahan	PENENGAHAN	3,900,000	APBD

	KT. Maju Sejahtera	13 Set		Desa Mulyosari	Tanjung Sari	3,900,000	APBD
14	Pengadaan Talang Pakan (15 Kelompok)					1,300,000	
	KT. Tani Sri Rejeki	13 Set		Desa Bandanhurip,	Kec. Palas	1,300,000	APBD
	KWT. USAHA MAJU	13 Set		Betung	Rajabasa	1,300,000	APBD
	KT. Kota Banjar	13 Set		Bandar Agung	sragi	1,300,000	APBD
	KT. Asri Makmur	13 Set		jati baru	Tanjung Bintang	1,300,000	APBD
	KWT. CEMPAKA PUTIH	13 Set		Bumi Jaya	Candipuro	1,300,000	APBD
	KT. TANI MUKTI	13 Set		batuliman	Candipuro	1,300,000	APBD
	KT. Karya Maju	13 Set		sidodadi asri	Jati Agung	1,300,000	APBD
	KWT. SINAR JAYA	13 Set		sumber jaya	Jati Agung	1,300,000	APBD
	KT. SIDO MAKMUR	13 Set		sidomukti	Tanjung Sari	1,300,000	APBD
	KT. SRI REZEKI II	13 Set		sidomakmur	Jati Agung	1,300,000	APBD
	KT. Karya Makmur III	13 Set		talang jawa	way panji	1,300,000	APBD
	KT. Maju Jaya	13 Set		Desa Sidowaluyo	Merbau Mataram	1,300,000	APBD
	KT. Bina Karya	13 Set		Desa Bandar Agung	sragi	1,300,000	APBD
	KT. CINTA DAMAI II	13 Set		penengahan	PENENGAHAN	1,300,000	APBD
	KT. Maju Sejahtera	13 Set		Desa Mulyosari	Tanjung Sari		APBD
15	Pengadaan Talang Minum (15 Kelompok)						
	KT. Tani Sri Rejeki	13 Set		Desa	Kec. Palas	975,000	APBD

				Bandanhurip ,			
	KWT. USAHA MAJU	13 Set		Betung	Rajabasa	975,000	APBD
	KT. Kota Banjar	13 Set		Bandar Agung	sragi	975,000	APBD
	KT. Asri Makmur	13 Set		jati baru	Tanjung Bintang	975,000	APBD
	KWT. CEMPAKA PUTIH	13 Set		Bumi Jaya	Candipuro	975,000	APBD
	KT. TANI MUKTI	13 Set		batuliman	Candipuro	975,000	APBD
	KT. Karya Maju	13 Set		sidodadi asri	Jati Agung	975,000	APBD
	KWT. SINAR JAYA	13 Set		sumber jaya	Jati Agung	975,000	APBD
	KT. SIDO MAKMUR	13 Set		sidomukti	Tanjung Sari	975,000	APBD
	KT. SRI REZEKI II	13 Set		sidomakmur	Jati Agung	975,000	APBD
	KT. Karya Makmur III	13 Set		talang jawa	way panji	975,000	APBD
	KT. Maju Jaya	13 Set		Desa Sidowaluyo	Merbau Mataram	975,000	APBD
	KT. Bina Karya	13 Set		Desa Bandar Agung	sragi	975,000	APBD
	KT. CINTA DAMAI II	13 Set		penengahan	PENENGAHAN	975,000	APBD
	KT. Maju Sejahtera	13 Set		Desa Mulyosari	Tanjung Sari	975,000	APBD
16	Pengadaan Kambing (11 Kelompok)						
	KT. JARE MURSAPA	10 ekor		way sari	natar	22,400,000	APBD
	KT. SIDO SUBUR 2	10 ekor		ketapang	ketapang	22,400,000	APBD
	KT. LEBUNG UNING	10 ekor		legundi	ketapang		APBD

						22,400,000	
	KT. KEMBANG SEJURA	10 ekor		legundi	ketapang	22,400,000	APBD
	KT. MITRA JAYA [	10 ekor		legundi	ketapang	22,400,000	APBD
	KT. LEBAK MAJU [	10 ekor		ruguk	ketapang	22,400,000	APBD
	KT. TANI MAKMUR	10 ekor		ruguk	ketapang	22,400,000	APBD
	KT. SUBUR JAYA	10 ekor		bangun rejo	ketapang	22,400,000	APBD
	KT. Sido Muncul	10 ekor		panca tunggal	Merbau Mataram	22,400,000	APBD
	KT. SURUNG PATi	10 ekor		sukaratu	Kalianda	22,400,000	APBD
	KT. KONCO TANI			bali nuraga	way panji	22,400,000	APBD
17	Pengadaan Sapi PO Betina (12 kelompok)						
	KT. Bintang Sejahtera	5 ekor		Desa Titiwangi	Candipuro	62,500,000	APBD

	KT. SEGAR I [	5 ekor		margacatur	kalianda	62,500,000	APBD
	KT. MULYO REJO	5 ekor		rejomulyo	tanjung bintang	62,500,000	APBD
	KT. BERKAH TAN	5 ekor		kalisari	natar	62,500,000	APBD
	KT. MEKAR WANGI	5 ekor		kedaung	sragi	62,500,000	APBD
	KT. DEWI SRI	5 ekor		marga agung	Jati Agung	62,500,000	APBD
	KT. TUNAS GALIH	5 ekor		banjar sari	Way Sulan	62,500,000	APBD
	KT. Makmur	5 ekor		malang sari	Tanjung Sari	62,500,000	APBD
	KT. RIZKY MAKMUR	5 ekor		rulung sari	natar	62,500,000	APBD
	KT. KARYA TANI	5 ekor		marga kaya	Jati Agung	62,500,000	APBD
	KT. TANI MAJU	5 ekor		taman sari	ketapang	62,500,000	APBD
	KT. BERKAH JAYA	5 ekor		sidorejo	Sidomulyo	62,500,000	APBD

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian							
Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya							
18	Sumur Bor Peternakan	1 Paket		Sidorejo	Sidomulyo	150,000,000.00	APBD
		1 Paket		Jati Baru	Tanjung Bintang	150,000,000.00	APBD
		1 Paket		Sumber Agung	Way Sulan	150,000,000.00	APBD
		1 Paket		Karang Anyar	Jati Agung	150,000,000.00	APBD
19	Pengadaan Chopper (Pencacah Rumput)	17 Unit			kcamatan	29,000,000.00	APBD
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							
kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain							
sub kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain							
20	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak	1 Paket			Candipuro, Palas	9,028,000.00	APBD
PROGRAM PENYULUH PERTANIAN							
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian							
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh paertanian							
21	Bimtek pengolahan Pakan	1 paket	dusun sumber jaya	karang sari	ketapang	10,000,000.00	APBD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 definisi dari program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dengan pengertian tersebut dan setelah menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan jangka menengah 2021-2026 maka untuk mendukung hal tersebut diatas maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan menetapkan rencana program dan kegiatan sebagaimana terlampir dalam tabel berikut :

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu (Rp)
g	h	i	j		k
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					12,048,158,625.00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang tersedia	%	100	1,943,081,100.00
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Lap	2	22,696,650.00
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Lap	4	22,696,650.00
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	ekor	220	64,185,550.00
Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	Lap	230	64,185,550.00
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	ekor	100	1,856,198,900.00

Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	ekor	1825	94,908,500.00
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	ton	100	1,761,290,400.00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia	%	100	1,631,362,425.00
Pengembangan Prasarana Pertanian		Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dok	1	8,170,700.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Lap	1	8,170,700.00
Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun dan di rehabilitasi	unit	61	1,623,191,725.00
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	3	460,000,000.00
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	5	1,163,191,725.00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (%)	%	77	507,286,150.00

VETERINER					
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penanganan Penyakit Hewan Menular	%	72	71,903,050.00
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kader zoonosis	orang	17	71,903,050.00
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Gangguan Reproduksi	%	100	360,886,000.00
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Lap	12	360,886,000.00
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah unit usaha yang ber-NKV	kegiatan	17	74,497,100.00
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Lap	12	74,497,100.00
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase Penerbitan Tanda Daftar Izin Usaha Pertanian yang sesuai dengan peruntukannya	%	90	113,527,700.00
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Izin Usaha Pertanian dalam daerah yang diterbitkan	Dok	12	34,645,200.00

Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dok	12	34,645,200.00
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Produksi Benih Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, RPH yang diterbitkan	Dok	6	78,882,500.00
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	Lap	6	78,882,500.00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan	%	90	90,424,250.00
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kali	32	90,424,250.00
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	12	43,992,000.00
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	12	20,709,250.00
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	unit	0	25,723,000.00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Pelayanan	Poin	80	7,762,477,000.00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	11	56,758,450.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	1	17,273,550.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	2	12,437,350.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1	8,936,850.00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	2	4,548,800.00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	2	4,922,300.00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	3	8,639,600.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dok	28	7,135,012,450.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	62	6,330,544,100.00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	12	790,477,500.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	2	7,863,700.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lap	2	6,127,150.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	%	100	215,596,100.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2,201,000.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	44,937,700.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	9,996,650.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	19,972,900.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	15,349,550.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	120	18,000,000.00
Penyediaan Bahan/Material	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	3	8,117,300.00

Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lap	12	36,225,000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	20	60,796,000.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Lap	12	123,600,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12	123,600,000.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	unit	50	231,510,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	6	43,130,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	23	156,380,000.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	20	7,000,000.00

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	25,000,000.00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi PD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama PD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan maupun dengan PD yang membidangi fungsi lain.

Kalianda, 15 Juli 2025
Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Ir. RINI ARIASIH, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700528 199503 2 002

SOUTH LAMPUNG
Spirit of Krakatoa

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2025



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jl. Soekarno Hatta Way Urang, Kalianda - Lampung Selatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmad, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ini merupakan tahapan penting dalam melaksanakan Rencana Stratejik (RENSTRA) yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan RENSTRA juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan memuat Pendahuluan, Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, Rencana Kerja dan Pendanaan serta Penutup.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Kalianda, 15 Juli 2025
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Lampung Selatan

HENDRA JAYA, S.Sos.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680427 198903 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	.....	i
Daftar Isi	.....	ii
Daftar Tabel.	.....	iii
Bab I Pendahuluan ...	.....	1
1.1. Latar Belakang	.....	1
1.2. Landasan Hukum	.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	.....	3
1.4. Sistematika Penulisan	.....	4
Bab II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan	.....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II	.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	.....	20
Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	.....	24
Bab IV Penutup	.....	31

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan 10

Tabel 3.1 Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis PD (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja Perubahan pada perangkat daerah terdiri atas beberapa tahapan antara lain yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal perubahan, penyusunan rancangan perubahan, perumusan rancangan akhir perubahan, dan penetapan perubahan Renja. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perubahan dengan berpedoman pada Evaluasi hasil Renja Triwulan II waktu berkenaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap PD wajib menyusun Renja Awal maupun Renja Perubahan sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perubahan ini disusun berdasarkan hasil evaluasi Renja Triwulan II waktu berkenaan untuk memastikan tujuan organisasi dalam indikator kinerja utama dapat tercapai dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengarui pada pelaksanaan rencana kerja di tahun berjalan ini.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adanya perubahan pada kegiatan maupun anggaran antara lain adalah faktor pendanaan, efektivitas pelaksanaan kegiatan, cakupan ketercapaian setiap sub kegiatan serta faktor lain yang tidak dapat diduga di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan.

I.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan disusun berlandaskan pada:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026;
- Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan adalah sebagai penyempurnaan dan penyesuaian atas pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA P-OPD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 adalah :

1. Mengevaluasi Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian sampai dengan Triwulan II pada tahun berkenaan.

2. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan.
3. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistimatika penulisan dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta sistematikan penulisan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025

Bab II : Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD pada Triwulan II tahun berkenaan Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renja Awal OPD berdasarkan realisasi program, kegiatan dan Sub Kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun berjalan

Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan perubahan pada tahun 2025, indikator kinerja program/kegiatan, target capaian kinerja, kebutuhan dana/pagu tahun 2025 yang disajikan secara matrik.

Bab IV : Penutup

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

BAB II

HASIL RENCANA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II

Evaluasi bertujuan untuk menemukan penjelasan- penjelasan atas *outcome* yang diobservasi dan memahami logika-logika di dalam intervensi publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain dengan baik, sering diidentifikasikan sebagai salah satu bentuk dari evaluasi.

Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II baik yang memenuhi target dan tidak memenuhi target atau bahkan melebihi target kinerja serta faktor- faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja dan tentunya kebijakan/rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut.

Realisasi pelaksanaan APBD hingga Triwulan II anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 9.775.495.256 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 3.514.892.946 atau sebesar 35,96%. terdiri dari 7 program, 14 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dengan persentase realisasi anggaran dapat diuraikan masing-masing sebagai berikut :

I. **PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN,** terdapat 1 kegiatan dengan indikator kinerja sebagai berikut :
   1. Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar 43,59 %
   2. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar 23,74 %

II. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, terdapat 24 kegiatan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi keuangan sebesar 72,87 %
2. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan realisasi keuangan sebesar 0,00%
3. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar 0,00%.
4. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan realisasi keuangan sebesar 73,33%
5. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar 0,00%.
6. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar 0,00%
7. Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar 53,64%
8. Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan realisasi keuangan sebesar 40,45 %
9. Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar 0,00%.
10. Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar 0,00%.
11. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar 0,00%.
12. Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksanaan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar 0,00%.
13. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar 0,00%.
14. Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan realisasi keuangan sebesar 0,00%.
15. Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar 0,00%.

16. Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar 98,88%.
17. Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar 23,43%.
18. Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar 52,71%.
19. Terlaksanakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar 47,26%.
20. Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar 100,00%.
21. Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar 77,87%.
22. Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar 38,15%.
23. Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar 33,33%.
24. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi keuangan sebesar 0,00%.
25. Terlaksananya Pengadaan Mebel dengan realisasi keuangan sebesar 0,00%.
26. Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Selama dengan realisasi keuangan sebesar 0.00%.
27. Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar 26,17%
28. Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar 51,93%
29. Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar 40,44%
30. Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar 0,00%
31. Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi keuangan sebesar 0,00%.

III. **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN,** terdapat 4 kegiatan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Tersedianya Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar 0,00%
2. Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar 64,25%
3. Tersedianya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar 0,00%
4. Terlaksananya Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar 0,00%.

IV. **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING,** terdapat 4 kegiatan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi anggaran sebesar 30,46%.
2. Tersedianya Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Dinas Perdagangan danPerindustrian) dengan realisasi anggaran sebesar 56,44%.

V. **PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN,** terdapat 2 kegiatan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan Realisasi anggaran sebesar 13,14%.
2. Terlaksananya Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal dengan Realisasi anggaran sebesar 25,57%.

VI. **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI,** terdapat 2 kegiatan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan Realisasi anggaran sebesar 0,00%.
2. Terlaksananya Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota dengan Realisasi anggaran sebesar 0,00%.

VII. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI, terdapat 3 sub kegiatan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan Realisasi anggaran sebesar 5,43%.
2. Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan Realisasi anggaran sebesar 5,54%.
3. Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan Realisasi anggaran sebesar 0,00%.

Secara ringkas realisasi pelaksanaan APBD Tahun 2025 hingga triwulan II dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

TABEL 2.1. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	
					I		II			
1	2	3	4		5		6		7	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**Persentase pengolahan energi baru terbarukan (%)**	**100,00 %**	**82.464.900**	**0,00 %**	**14.789.800**	**0,00 %**	**8.339.000**	**100,00 %**	**23.128.800**
		Potensi energi baru terbarukan yang telah dikelola								
		Potensi energi baru terbarukan yang ada								
	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam daerah Kabupaten/Kota	**Laporan hasil pengawasan**	**2 Dok**	**82.464.900**	**0 Dok**	**14.789.800**	**0 Dok**	**8.339.000**	**2 Dok**	**23.128.800**
	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0 Dok	0	0 Dok	0	0 Dok	0	0 Dok	0
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Lap	17.894.800	0 Lap	3.379.800	0 Lap	4.421.000	1 Lap	7.800.800

	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Lap	64.570.100	0 Lap	11.410.000	0 Lap	3.918.000	1 Lap	15.328.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0
2.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**80,00 point**	**6.089.254.406**	**0,00 point**	**1.435.344.505**	**0,00 point**	**1.495.194.791**	**96,00 point**	**2.930.539.296**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12 Dok**	**67.484.000**	**1 Dok**	**13.585.200**	**1 Dok**	**13.192.150**	**12 Dok**	**26.777.350**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	21.579.050	1 Dok	13.585.200	1 Dok	2.140.000	3 Dok	15.725.200
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1.680.000	0 Dok	0	0 Dok	0	1 Dok	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1.650.000	0 Dok	0	0 Dok	0	1 Dok	0
	Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	15.072.150	0 Dok	0	0 Dok	11.052.150	1 Dok	11.052.150

	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	10.633.500	0	Dok	0	0	Dok	0	1	Dok	0
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Lap	16.869.300	0	Lap	0	0	Lap	0	5	Lap	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**67**	**Dok**	**5.310.913.206**	**15**	**Dok**	**1.305.194.530**	**15**	**Dok**	**1.391.654.105**	**103**	**Dok**	**2.696.848.635**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Org/Bln	4.314.109.756	12	Org/Bln	1.132.907.030	12	Org/Bln	1.181.166.605	12	Org/Bln	2.314.073.635
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dok	946.194.450	3	Dok	172.287.500	3	Dok	210.487.500	12	Dok	382.775.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dok	15.372.000	0	Dok	0	0	Dok	0	12	Dok	0
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dok	10.647.000	0	Dok	0	0	Dok	0	12	Dok	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	6.015.500	0	Lap	0	0	Lap	0	1	Lap	0
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksanaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dok	6.421.500	0	Dok	0	0	Dok	0	1	Dok	0

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Lap	12.153.000	0 Lap	0	0 Lap	0	17 Lap	0
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**14 Dok**	**10.122.500**	**0 Dok**	**0**	**0 Dok**	**0**	**14 Dok**	**0**
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	2.499.500	0 Dok	0	0 Dok	0	1 Dok	0
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Lap	5.123.500	0 Lap	0	0 Lap	0	12 Lap	0
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	2.499.500	0 Lap	0	0 Lap	0	1 Lap	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**0,00 %**	**0**	**0,00 %**	**0**	**0,00 %**	**0**	**0,00 %**	**0**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	46 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100,00 %**	**115.994.700**	**18,75 %**	**37.321.800**	**18,75 %**	**12.006.000**	**100,00 %**	**49.327.800**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.802.000	3 Paket	3.000.000	3 Paket	0	12 Paket	3.000.000

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	7.588.000	3	Paket	4.000.000	3 Paket	0	12 Paket	4.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	10.579.000	3	Paket	5.000.000	3 Paket	0	12 Paket	5.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	10.527.800	3	Paket	2.821.800	3 Paket	7.706.000	12 Paket	10.527.800
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	15.410.900	3	Paket	12.000.000	3 Paket	0	12 Paket	12.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dok	27.000.000	3	Dok	6.000.000	3 Dok	4.300.000	12 Dok	10.300.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Lap	13.500.000	0	Lap	4.500.000	0 Lap	0	1 Lap	4.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Lap	18.587.000	0	Lap	0	0 Lap	0	1 Lap	0
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**6**	**Unit**	**67.510.000**	**0**	**Unit**	**0**	**0 Unit**	**0**	**6 Unit**	**0**
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	15.000.000	0	Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	52.510.000	0	Unit	0	0 Unit	0	5 Unit	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**1**	**Lap**	**212.400.000**	**0**	**Lap**	**27.459.975**	**0 Lap**	**28.122.536**	**1 Lap**	**55.582.511**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Lap	212.400.000	0	Lap	27.459.975	0 Lap	28.122.536	1 Lap	55.582.511

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**24 unit**	**304.830.000**	**8 unit**	**51.783.000**	**0 unit**	**50.220.000**	**24 unit**	**102.003.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	45.430.000	1 unit	14.033.000	0 unit	9.558.000	1 unit	23.591.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	193.900.000	7 unit	37.750.000	0 unit	40.662.000	7 unit	78.412.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14 unit	15.500.000	0 unit	0	0 unit	0	14 unit	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	2 unit	50.000.000	0 unit	0	0 unit	0	2 unit	0
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang layak dikelola (%)**	**80,00 %**	**655.851.600**	**0,00 %**	**17.460.000**	**0,00 %**	**129.130.000**	**76,00 %**	**146.590.000**
		Sarana distribusi perdagangan yang layak dikelola	**2,00**							
		Jumlah sarana distribusi perdagangan yang ada	**0,00**							
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan**	**12 unit**	**611.931.600**	**0 unit**	**17.460.000**	**0 unit**	**129.130.000**	**86 unit**	**146.590.000**
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 unit	383.777.400	0 unit	0	0 unit	0	2 unit	0
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10 unit	228.154.200	0 unit	17.460.000	0 unit	129.130.000	10 unit	146.590.000

	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**Pembinaan dan Bimbingan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat**	**5 Dok**	**43.920.000**	**0 Dok**	**0**	**0 Dok**	**0**	**5 Dok**	**0**
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dok	41.199.700	0 Dok	0	0 Dok	0	4 Dok	0
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dok	2.720.300	0 Dok	0	0 Dok	0	1 Dok	0
3.	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Pelaksanaan operasi pasar dan kegiatan lain untuk stabilitas harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**80,00 %**	**621.664.100**	**0,00 %**	**106.356.800**	**0,00 %**	**229.712.500**	**100,00 %**	**336.069.300**
		Jumlah pelaksanaan opersi pasar								
		Operasi pasar dalam 1 tahun								
	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Operasi Pasar dan pasar murah Untuk mengendalikan Harga, Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**2 Lap**	**621.664.100**	**0 Lap**	**106.356.800**	**0 Lap**	**229.712.500**	**18 Lap**	**336.069.300**

	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1	Lap	56.959.650	0	Lap	13.120.000	0	Lap	4.230.000	1	Lap	17.350.000
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Lap	564.704.450	0	Lap	93.236.800	0	Lap	225.482.500	17	Lap	318.719.300
4.	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Kawasan peruntukan sentra IKM yang dikembangkan penyerepan tenaga kerja IKM dan fasilitasi dan promosi pameran**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0**
		Jumlah IKM yang dibina												
		Jumlah IKM yang ada												
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Event di dekranasda selama 1 tahun**	**0**	**Event**	**0**	**0**	**Event**	**0**	**0**	**Event**	**0**	**0**	**Event**	**0**
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	0	Pelaku Usaha	0	0	Pelaku Usaha	0	0	Pelaku Usaha	0	0	Pelaku Usaha	0
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	0	Pelaku Usaha	0	0	Pelaku Usaha	0	0	Pelaku Usaha	0	0	Pelaku Usaha	0

	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Persentase pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan barang yg beredar dipasar**	**80,00 %**	**163.995.650**	**0,00 %**	**4.230.000**	**0,00 %**	**25.550.000**	**56,10 %**	**29.780.000**
		Jumlah pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan UTTP dan BDKT								
		Jumlah potensi UTTP dan BDKT yang ada								
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	**Penyuluhan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang**	**5 Dok**	**163.995.650**	**0 Dok**	**4.230.000**	**0 Dok**	**25.550.000**	**0 Dok**	**29.780.000**
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	50 Unit	97.750.000	0 Unit	0	0 Unit	12.840.000	50 Unit	12.840.000
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	150 Orang	66.245.650	0 Orang	4.230.000	0 Orang	12.710.000	150 Orang	16.940.000
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (%)**	**100,00 %**	**1.050.891.200**	**0,00 %**	**0**	**0,00 %**	**0**	**97,52 %**	**0**
		Jumlah promosi IKM yang dilaksanakan								
		Jumlah promosi dalam 1 tahun								
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**20 Event**	**1.050.891.200**	**0 Event**	**0**	**0 Event**	**0**	**0 Event**	**0**
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	17 UMKM	954.165.400	0 UMKM	0	0 UMKM	0	17 UMKM	0

	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	200 UMKM	96.725.800	0 UMKM	0	0 UMKM	0	200 UMKM	0
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0
5.	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan**	**100,00 %**	**1.111.373.400**	**0,00 %**	**24.127.550**	**0,00 %**	**24.658.000**	**250,24 %**	**48.785.550**
		Jumlah Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan								
		Jumlah seluruh Kawasan Industri (KI)								
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri**	**3 Dok**	**1.111.373.400**	**0 Dok**	**24.127.550**	**0 Dok**	**24.658.000**	**0 Dok**	**48.785.550**
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dok	366.497.150	0 Dok	18.397.550	0 Dok	1.520.000	1 Dok	19.917.550
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dok	521.434.250	0 Dok	5.730.000	0 Dok	23.138.000	1 Dok	28.868.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dok	223.442.000	0 Dok	0	0 Dok	0	1 Dok	0
TOTAL ANGGARAN SEMUA PROGRAM				**9.775.495.256**		**1.602.308.655**		**1.912.584.291**		**3.514.892.946**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Adapun analisis kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung adalah menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang pelayanan Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Lampung Selatan yang dapat diuraikan pada masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

J. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN, terdapat 1 kegiatan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.800.000,-
2. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.328.000,-

II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 24 kegiatan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.725.200,-
2. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-
3. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.0,-
4. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.052.150,-
5. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-
6. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-
7. Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.314.073.635,-
8. Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 382.775.000,-

9. Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-
10. Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-
11. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-
12. Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksanaan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.0,-
13. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-
14. Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-
15. Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-
16. Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-
17. Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.000.000,-
18. Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.000.000,-
19. Terlaksanakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.000.000,-
20. Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.527.800,-
21. Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.000.000,-
22. Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.300.000,-

23. Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.500.000,-
24. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-
25. Terlaksananya Pengadaan Mebel dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-
26. Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Selama dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-
27. Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 55.582.511,-
28. Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 23.591.000,-
29. Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 78.412.000,-
30. Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perdagangan danPerindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-
31. Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-

III. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN, terdapat 4 kegiatan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Tersedianya Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-
2. Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 146.590.000,-
3. Tersedianya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-
4. Terlaksananya Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-

IV. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING, terdapat 4 kegiatan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.350.000,-
2. Tersedianya Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Dinas Perdagangan danPerindustrian) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 318.719.300,-

V. PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, terdapat 2 kegiatan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 12.840.000,-
2. Terlaksananya Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 16.940.000,-

VI. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI, terdapat 2 kegiatan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 0,-
2. Terlaksananya Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 0,-

VII. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI, terdapat 3 sub kegiatan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 19.917.550,-
2. Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 28.868.000,-
3. Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 0,-

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 mencakup 7 program dan terdiri dari 14 kegiatan dan 46 sub kegiatan. Rumusan rencana kerja program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 dan sumber dana APBD Kabupaten secara detail sebagai berikut:

TABEL 3.1. RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun N										Tahun + 1
								Sebelum					Sesudah					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Dinas Perdagangan dan Perindustrian																		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			Rp. 9.923.197.056	Rp. 303.325.000			Rp. 10.226.522.056	Rp. 9.359.095.256	Rp. 84.060.000			Rp. 9.443.155.256	Rp. 11.063.710.000,00
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			Rp. 131.193.800	Rp. 4.950.000			Rp. 136.143.800	Rp. 77.514.900	Rp. 4.950.000			Rp. 82.464.900	Rp. 200.000.000,00
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			Rp. 131.193.800	Rp. 4.950.000			Rp. 136.143.800	Rp. 77.514.900	Rp. 4.950.000			Rp. 82.464.900	Rp. 200.000.000,00
3	29	05	2,01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 131.193.800	Rp. 4.950.000			Rp. 136.143.800	Rp. 77.514.900	Rp. 4.950.000			Rp. 82.464.900	Rp. 200.000.000,00
3	29	05	2,01	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Retribusi Daerah - LRA	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 36.218.800				Rp. 36.218.800	Rp. 17.894.800				Rp. 17.894.800	Rp. 100.000.000,00
3	29	05	2,01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Retribusi Daerah - LRA	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 94.975.000	Rp. 4.950.000			Rp. 99.925.000	Rp. 59.620.100	Rp. 4.950.000			Rp. 64.570.100	Rp. 100.000.000,00
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			Rp. 8.358.634.256	Rp. 298.375.000			Rp. 8.657.009.256	Rp. 8.170.206.956	Rp. 79.110.000			Rp. 8.249.316.956	Rp. 9.239.710.000,00
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp. 6.195.764.056	Rp. 261.775.000			Rp. 6.457.539.056	Rp. 6.007.898.406	Rp. 67.510.000			Rp. 6.075.408.406	Rp. 6.768.210.000,00

3	30	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp. 103.274.600				Rp. 103.274.600	Rp. 67.484.000				Rp. 67.484.000	Rp. 120.500.000,00
3	30	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 24.804.050				Rp. 24.804.050	Rp. 21.579.050				Rp. 21.579.050	Rp. 20.000.000,00
3	30	01	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 12.070.000				Rp. 12.070.000	Rp. 1.680.000				Rp. 1.680.000	Rp. 20.000.000,00
3	30	01	2,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 15.500.000				Rp. 15.500.000	Rp. 1.650.000				Rp. 1.650.000	Rp. 20.000.000,00
3	30	01	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 15.072.150				Rp. 15.072.150	Rp. 15.072.150				Rp. 15.072.150	Rp. 20.000.000,00
3	30	01	2,01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 17.500.400				Rp. 17.500.400	Rp. 10.633.500				Rp. 10.633.500	Rp. 20.500.000,00
3	30	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 18.328.000				Rp. 18.328.000	Rp. 16.869.300				Rp. 16.869.300	Rp. 20.000.000,00
3	30	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp. 5.370.045.656				Rp. 5.370.045.656	Rp. 5.297.067.206				Rp. 5.297.067.206	Rp. 6.035.500.000,00
3	30	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 4.300.263.756				Rp. 4.300.263.756	Rp. 4.300.263.756				Rp. 4.300.263.756	Rp. 5.000.000.000,00
3	30	01	2,02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 972.281.900				Rp. 972.281.900	Rp. 946.194.450				Rp. 946.194.450	Rp. 925.000.000,00
3	30	01	2,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 28.500.000				Rp. 28.500.000	Rp. 15.372.000				Rp. 15.372.000	Rp. 30.000.000,00
3	30	01	2,02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 20.500.000				Rp. 20.500.000	Rp. 10.647.000				Rp. 10.647.000	Rp. 25.500.000,00
3	30	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 12.500.000				Rp. 12.500.000	Rp. 6.015.500				Rp. 6.015.500	Rp. 15.000.000,00
3	30	01	2,02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 12.500.000				Rp. 12.500.000	Rp. 6.421.500				Rp. 6.421.500	Rp. 15.000.000,00

3	30	01	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 23.500.000				Rp. 23.500.000	Rp. 12.153.000				Rp. 12.153.000	Rp. 25.000.000,00
3	30	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 10.122.500				Rp. 10.122.500	Rp. 28.000.000,00
3	30	01	2,03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 2.499.500				Rp. 2.499.500	Rp. 10.000.000,00
3	30	01	2,03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 5.123.500				Rp. 5.123.500	Rp. 10.000.000,00
3	30	01	2,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 2.499.500				Rp. 2.499.500	Rp. 8.000.000,00
3	30	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp. 16.470.000				Rp. 16.470.000	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 20.000.000,00
3	30	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 16.470.000				Rp. 16.470.000	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 20.000.000,00
3	30	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 178.743.800				Rp. 178.743.800	Rp. 115.994.700				Rp. 115.994.700	Rp. 181.500.000,00
3	30	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 12.802.000				Rp. 12.802.000	Rp. 12.802.000				Rp. 12.802.000	
3	30	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 15.274.000				Rp. 15.274.000	Rp. 7.588.000				Rp. 7.588.000	Rp. 17.500.000,00
3	30	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 10.579.000				Rp. 10.579.000	Rp. 10.579.000				Rp. 10.579.000	Rp. 10.000.000,00
3	30	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 10.527.800				Rp. 10.527.800	Rp. 10.527.800				Rp. 10.527.800	Rp. 10.000.000,00
3	30	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 28.000.000				Rp. 28.000.000	Rp. 15.410.900				Rp. 15.410.900	Rp. 40.000.000,00
3	30	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 27.000.000				Rp. 27.000.000	Rp. 27.000.000				Rp. 27.000.000	Rp. 18.000.000,00
3	30	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 27.000.000				Rp. 27.000.000	Rp. 13.500.000				Rp. 13.500.000	Rp. 30.000.000,00

3	30	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 47.561.000				Rp. 47.561.000	Rp. 18.587.000				Rp. 18.587.000	Rp. 56.000.000,00
3	30	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 261.775.000			Rp. 261.775.000		Rp. 67.510.000			Rp. 67.510.000	Rp. 35.000.000,00
3	30	01	2,07	0005	Pengadaan Mebel	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda		Rp. 15.000.000			Rp. 15.000.000		Rp. 15.000.000			Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000,00
3	30	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda		Rp. 246.775.000			Rp. 246.775.000		Rp. 52.510.000			Rp. 52.510.000	Rp. 20.000.000,00
3	30	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 212.400.000				Rp. 212.400.000	Rp. 212.400.000				Rp. 212.400.000	Rp. 12.360.000,00
3	30	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 212.400.000				Rp. 212.400.000	Rp. 212.400.000				Rp. 212.400.000	Rp. 12.360.000,00
3	30	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 294.830.000				Rp. 294.830.000	Rp. 304.830.000				Rp. 304.830.000	Rp. 335.350.000,00
3	30	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 45.430.000				Rp. 45.430.000	Rp. 45.430.000				Rp. 45.430.000	Rp. 40.770.000,00
3	30	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 183.900.000				Rp. 183.900.000	Rp. 193.900.000				Rp. 193.900.000	Rp. 182.880.000,00
3	30	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 15.500.000				Rp. 15.500.000	Rp. 15.500.000				Rp. 15.500.000	Rp. 11.700.000,00
3	30	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 100.000.000,00
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Rp. 575.470.800	Rp. 25.000.000			Rp. 600.470.800	Rp. 655.851.600	Rp. 0			Rp. 655.851.600	Rp. 671.500.000,00
3	30	03	2,01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Rp. 477.250.000	Rp. 25.000.000			Rp. 502.250.000	Rp. 611.931.600	Rp. 0			Rp. 611.931.600	Rp. 570.000.000,00

3	30	03	2,01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	- Penghematan Belanja - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 217.854.800	Rp. 25.000.000			Rp. 242.854.800	Rp. 383.777.400	Rp. 0			Rp. 383.777.400	Rp. 400.000.000,00
3	30	03	2,01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 259.395.200				Rp. 259.395.200	Rp. 228.154.200				Rp. 228.154.200	Rp. 170.000.000,00
3	30	03	2,02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			Rp. 98.220.800				Rp. 98.220.800	Rp. 43.920.000				Rp. 43.920.000	Rp. 101.500.000,00
3	30	03	2,02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 81.499.500				Rp. 81.499.500	Rp. 41.199.700				Rp. 41.199.700	Rp. 81.500.000,00
3	30	03	2,02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 16.721.300				Rp. 16.721.300	Rp. 2.720.300				Rp. 2.720.300	Rp. 20.000.000,00
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			Rp. 306.495.850				Rp. 306.495.850	Rp. 621.664.100				Rp. 621.664.100	Rp. 350.000.000,00
3	30	04	2,02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			Rp. 306.495.850				Rp. 306.495.850	Rp. 621.664.100				Rp. 621.664.100	Rp. 350.000.000,00
3	30	04	2,02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 66.999.550				Rp. 66.999.550	Rp. 56.959.650				Rp. 56.959.650	Rp. 100.000.000,00
3	30	04	2,02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 239.496.300				Rp. 239.496.300	Rp. 564.704.450				Rp. 564.704.450	Rp. 250.000.000,00
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			Rp. 272.446.900	Rp. 11.600.000			Rp. 284.046.900	Rp. 152.395.650	Rp. 11.600.000			Rp. 163.995.650	Rp. 350.000.000,00
3	30	06	2,01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			Rp. 272.446.900	Rp. 11.600.000			Rp. 284.046.900	Rp. 152.395.650	Rp. 11.600.000			Rp. 163.995.650	Rp. 350.000.000,00
3	30	06	2,01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 157.400.000	Rp. 11.600.000			Rp. 169.000.000	Rp. 86.150.000	Rp. 11.600.000			Rp. 97.750.000	Rp. 250.000.000,00

3	30	06	2,01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 115.046.900				Rp. 115.046.900	Rp. 66.245.650				Rp. 66.245.650	Rp. 100.000.000,00
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			Rp. 1.008.456.650				Rp. 1.008.456.650	Rp. 732.397.200				Rp. 732.397.200	Rp. 1.100.000.000,00
3	30	07	2,01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			Rp. 1.008.456.650				Rp. 1.008.456.650	Rp. 732.397.200				Rp. 732.397.200	Rp. 1.100.000.000,00
3	30	07	2,01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 669.035.400				Rp. 669.035.400	Rp. 635.671.400				Rp. 635.671.400	Rp. 750.000.000,00
3	30	07	2,01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 339.421.250				Rp. 339.421.250	Rp. 96.725.800				Rp. 96.725.800	Rp. 350.000.000,00
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			Rp. 1.433.369.000				Rp. 1.433.369.000	Rp. 1.111.373.400				Rp. 1.111.373.400	Rp. 1.624.000.000,00
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Rp. 1.433.369.000				Rp. 1.433.369.000	Rp. 1.111.373.400				Rp. 1.111.373.400	Rp. 1.624.000.000,00
3	31	02	2,01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			Rp. 1.433.369.000				Rp. 1.433.369.000	Rp. 1.111.373.400				Rp. 1.111.373.400	Rp. 1.624.000.000,00
3	31	02	2,01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	- Retribusi Daerah - LRA	- Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Rp. 483.607.200				Rp. 483.607.200	Rp. 366.497.150				Rp. 366.497.150	Rp. 650.000.000,00
3	31	02	2,01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	- Retribusi Daerah - LRA	- Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 699.761.800				Rp. 699.761.800	Rp. 521.434.250				Rp. 521.434.250	Rp. 700.000.000,00
3	31	02	2,01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- Retribusi Daerah - LRA - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 250.000.000				Rp. 250.000.000	Rp. 223.442.000				Rp. 223.442.000	Rp. 274.000.000,00
Jumlah								**Rp. 9.923.197.056**	**Rp. 303.325.000**			**Rp. 10.226.522.056**	**Rp. 9.359.095.256**	**Rp. 84.060.000**			**Rp. 9.443.155.256**	**Rp. 11.063.710.000**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2025 yang tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD. Secara kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

RENCANA KERJA

PERUBAHAN

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lampung Selatan



2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dapat disusun sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun berjalan.

Renja Perubahan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan serta penyesuaian terhadap kebutuhan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan kemampuan pendanaan. Dokumen ini menjadi bagian penting dalam menjaga keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah, RKPD, KUA-PPAS dan RKA Perubahan.

Data realisasi kinerja dan realisasi anggaran DPMPPTSP sampai dengan Triwulan II serta angka final perubahan APBD Tahun 2025 belum seluruhnya tersedia dalam bahan yang diberikan. Oleh karena itu, bagian yang memerlukan data tersebut diberi ruang verifikasi/pengisian dan tidak diisi dengan angka yang tidak bersumber dari dokumen resmi DPMPPTSP.

Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Kalianda, Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

RIO GISMARA, S.H.
Pembina
NIP. 19850320 201001 1 011

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Renja menjadi pedoman operasional tahunan dalam pencapaian target Renstra dan RKPD.

Renja Perubahan disusun sebagai instrumen penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan pembangunan pada tahun berjalan. Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II, perkembangan pelaksanaan kegiatan, kebutuhan pelayanan, perubahan kebijakan, ketersediaan pendanaan serta faktor lain yang mempengaruhi pencapaian target kinerja.

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan mempunyai peran dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

Sebagai catatan penting, data evaluasi Triwulan II DPMPPTSP dan pagu perubahan APBD-P 2025 belum terdapat secara lengkap pada bahan yang diberikan. Oleh karena itu, dokumen ini disusun sebagai dokumen kerja yang siap difinalisasi setelah data realisasi Triwulan II dan angka final perubahan tersedia.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026;

12. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan DPMPPTSP Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 adalah menyempurnakan dan menyesuaikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II serta perkembangan kebutuhan dan kemampuan pendanaan.

- mengevaluasi pelaksanaan Renja DPMPPTSP sampai dengan Triwulan II Tahun 2025;
- mengidentifikasi program/kegiatan/sub kegiatan yang perlu disesuaikan berdasarkan perkembangan pelaksanaan;
- menyesuaikan target kinerja dan kebutuhan pendanaan agar lebih realistis dan mendukung pencapaian sasaran Renstra; dan
- menjadi bahan penyusunan KUA-PPAS Perubahan dan RKA Perubahan DPMPPTSP Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025, memuat evaluasi pelaksanaan Renja, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, serta permasalahan dan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, memuat arah kebijakan dan prioritas perubahan serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan.

BAB IV PENUTUP, memuat catatan penting pelaksanaan dan kaidah pelaksanaan Renja Perubahan.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II digunakan untuk mengetahui tingkat kemajuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, faktor penyebab ketercapaian atau ketidaktercapaian target, serta kebutuhan penyesuaian pada Renja Perubahan.

Tabel Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2025

Kode	Program	Satuan	Pagu Renja 2025 (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi Kinerja TW II
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Poin	7.414.268.688	1.704.465.373	22,99	Realisasi pada Triwulan IV
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	%	592.120.400	5.091.300	0,86	Realisasi pada Triwulan IV
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	%	509.753.800	1.410.000	0,28	Realisasi pada Triwulan IV
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	%	339.070.500	49.924.300	14,72	Realisasi pada Triwulan IV
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN	%	475.627.000	66.321.495	13,94	Realisasi pada Triwulan IV

Kode	Program	Satuan	Pagu Renja 2025 (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi Kinerja TW II
	MODAL					
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	%	60.575.500	-	-	Realisasi pada Triwulan IV

Catatan: nilai pagu di atas merupakan data dasar dari Evaluasi Renja DPMPPTSP Tahun 2025 yang tersedia. Angka realisasi dan persentase Triwulan II harus diisi berdasarkan data resmi DPMPPTSP.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Renja DPMPPTSP Tahun 2025 memuat pelayanan yang berkaitan dengan penanaman modal dan perizinan, termasuk pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, layanan konsultasi, pemantauan dan evaluasi pelayanan, promosi penanaman modal, pengendalian kegiatan usaha, serta pengelolaan data dan informasi. Analisis kinerja pada Renja Perubahan perlu menghubungkan target tahunan dengan capaian sampai Triwulan II.

- pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko;
- pelayanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko;
- pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko;
- promosi penanaman modal daerah;
- penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha;
- bimbingan teknis kepada pelaku usaha;
- pengawasan penanaman modal; dan
- pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan.

2.3 Permasalahan dan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan struktur program dan kegiatan pada Renja 2025, isu yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perubahan antara lain penyesuaian kebutuhan pelayanan, efektivitas pelaksanaan kegiatan, ketersediaan anggaran, pemenuhan target pelayanan perizinan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha, serta kualitas dan keterpaduan data penanaman modal. Penetapan masalah prioritas dan tindak lanjut final harus disesuaikan dengan hasil evaluasi Triwulan II DPMPPTSP.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Perubahan

Arah perubahan Renja DPMPPTSP Tahun 2025 difokuskan pada penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sampai Triwulan II, kebutuhan pelayanan masyarakat dan pelaku usaha, pencapaian target kinerja Renstra, serta kemampuan pendanaan daerah. Penyesuaian tidak mengubah tugas dan fungsi utama perangkat daerah, tetapi diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian target.

a. menjaga keberlanjutan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
b. memperkuat pelayanan berbasis sistem perizinan berusaha berbasis risiko;
c. meningkatkan dukungan terhadap promosi dan pengembangan iklim investasi;
d. memperkuat pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
e. meningkatkan kualitas pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
f. menyesuaikan alokasi pendanaan dengan kebutuhan riil dan tingkat pelaksanaan sampai Triwulan II.

3.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana kerja perubahan tetap mengacu pada nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja DPMPPTSP Tahun 2025. Matriks berikut menggunakan data dasar yang terdapat pada bahan Renja 2025 dan menyediakan kolom khusus untuk memasukkan pagu perubahan 2025 setelah RKA Perubahan/APBD Perubahan ditetapkan.

3.3 Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan

Catatan: sumber angka pagu Renja 2025 dan prakiraan maju 2026 pada matriks di atas berasal dari bahan Renja DPMPPTSP Tahun 2025 yang tersedia. Kolom Pagu Perubahan 2025 sengaja dibuat sebagai kolom verifikasi/pengisian agar tidak mengada-adakan angka APBD Perubahan yang belum terdapat dalam bahan.

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu				9.427.396.179,00	9.453.904.179,00	9.049.631.929,00	-377.764.250,00							9.611.835.005,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.427.396.179,00	9.453.904.179,00	9.049.631.929,00	-377.764.250,00							9.611.835.005,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				9.427.396.179,00	9.453.904.179,00	9.049.631.929,00	-377.764.250,00							9.611.835.005,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	82 % 82 Poin	82 % 82 Poin	7.795.414.979,00	7.821.922.979,00	7.374.004.729,00	-421.410.250,00					Aparatur DPMPPTSP Lamsel		8.024.247.255,00	

	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	66.816.550,00	66.816.550,00	48.170.100,00	-18.646.450,00							48.329.500,00	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	31.140.000,00	33.580.000,00	20.800.000,00	-10.340.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.254.950,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	8.467.900,00	7.247.900,00	3.111.700,00	-5.356.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.467.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	8.422.900,00	7.202.900,00	5.472.650,00	-2.950.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			8.422.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	4.693.750,00	4.693.750,00	4.693.750,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			3.216.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	4.618.000,00	4.618.000,00	4.618.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			3.493.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	3 Laporan	3 Laporan	9.474.000,00	9.474.000,00	9.474.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			9.474.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42 Dokumen	42 Dokumen	4.080.397.450,00	4.111.901.441,00	4.108.494.241,00	28.096.791,00							4.262.999.788,00	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.744.376.000,00	2.736.084.041,00	2.736.084.041,00	-8.291.959,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.928.449.338,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	12 Dokumen	12 Dokumen	1.324.537.450,00	1.364.333.400,00	1.364.333.400,00	39.795.950,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.324.537.450,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	6.796.800,00	6.796.800,00	6.796.800,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			6.796.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	17 Laporan	17 Laporan	4.687.200,00	4.687.200,00	1.280.000,00	-3.407.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			3.216.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.265.762.550,00	1.261.892.550,00	835.227.950,00	-430.534.600,00							1.155.645.350,00	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	30.685.700,00	30.685.700,00	30.685.700,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.685.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	8 Paket	8 Paket	919.067.500,00	919.067.500,00	570.127.500,00	-348.940.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan			826.385.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU

													Publik					PINTU
	2.18.01.2.06.00.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	89.432.900,00	89.432.900,00	89.432.900,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			87.037.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.00.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	68.590.100,00	68.590.100,00	45.227.500,00	-23.362.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			68.570.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.00.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	40.252.350,00	41.152.350,00	32.400.350,00	-7.852.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			40.252.350,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.00.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi			18.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

													Pelayanan Publik				SATU PINTU
	2.18.01.2.06.00.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	11 Laporan	11 Laporan	35.802.000,00	35.802.000,00	17.397.000,00	-18.405.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.690.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.00.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	20 Laporan	20 Laporan	63.932.000,00	59.162.000,00	31.957.000,00	-31.975.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			54.024.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	1.631.400.000,00	1.631.400.000,00	1.631.400.000,00	0,00							1.892.400.000,00	
	2.18.01.2.08.00.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	1.631.400.000,00	1.631.400.000,00	1.631.400.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			1.892.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang terpelihara	149 Unit	149 Unit	751.038.429,00	749.912.438,00	750.712.438,00	-325.991,00							664.872.617,00	
	2.18.01.2.09.00.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	1 Unit	43.630.000,00	43.630.000,00	44.430.000,00	800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			43.630.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.00.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	8 Unit	8 Unit	207.460.000,00	207.260.000,00	207.260.000,00	-200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			207.460.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.00.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	138 Unit	138 Unit	133.285.600,00	132.385.600,00	132.385.600,00	-900.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			133.297.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	2 Unit	366.662.829,00	366.636.838,00	366.636.838,00	-25.991,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			280.484.717,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan investasi berskala nasional**	**10 %**	**10 %**	**67.422.600,00**	**67.422.600,00**	**592.120.400,00**	**524.697.800,00**					**Pelaku Usaha dan Investor**		**67.422.600,00**	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	67.422.600,00	67.422.600,00	592.120.400,00	524.697.800,00							67.422.600,00	
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	67.422.600,00	67.422.600,00	592.120.400,00	524.697.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			67.422.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

												koperasi.					
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Jumlah Investor di Kabupaten Lampung Selatan**	**10 %**	**10 %**	**270.361.200,00**	**270.361.200,00**	**209.753.800,00**	**-60.607.400,00**					**Pelaku Usaha dan Investor**		**270.361.200,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal	2 Event	2 Event	270.361.200,00	270.361.200,00	209.753.800,00	-60.607.400,00							270.361.200,00	

	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota*	2 Dokumen	2 Dokumen	270.361.200,00	270.361.200,00	209.753.800,00	-60.607.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			270.361.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan di Loket Pelayanan DPMPPTSP kabupaten Lampung Selatan**	**88 %**	**88 %**	**478.645.500,00**	**478.645.500,00**	**337.550.500,00**	**-141.095.000,00**					**Pelaku Usaha**		**434.250.500,00**	

	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Penanaman Modal (orang/perusahaan)	350 Pelaku Usaha	350 Pelaku Usaha	478.645.500,00	478.645.500,00	337.550.500,00	-141.095.000,00							434.250.500,00	
	2.18.04.2.01.00005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	*Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	92.812.800,00	92.812.800,00	58.096.800,00	-34.716.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			52.417.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*	350 Pelaku Usaha	350 Pelaku Usaha	325.888.600,00	325.888.600,00	234.624.600,00	-91.264.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			325.888.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	16.051.650,00	16.051.650,00	12.026.650,00	-4.025.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			16.051.650,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha*	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	43.892.450,00	43.892.450,00	32.802.450,00	-11.090.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			39.892.450,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Dokumen perizinan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Lampung Selatan**	**73 %**	**73 %**	**745.982.500,00**	**745.982.500,00**	**475.627.000,00**	**-270.355.500,00**					**Pelaku Usaha dan Investor**		**745.983.800,00**	

	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Koordinasi/Rapat)	17 Kecamatan	17 Kecamatan	745.982.500,00	745.982.500,00	475.627.000,00	-270.355.500,00							745.983.800,00	
	2.18.05.2.01.00004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	*Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya*	50 Kegiatan Usaha.	50 Kegiatan Usaha.	58.515.000,00	58.515.000,00	29.095.800,00	-29.419.200,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			58.515.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*	220 Pelaku Usaha	220 Pelaku Usaha	214.555.800,00	214.555.800,00	136.629.000,00	-77.926.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			214.556.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha*	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	472.911.700,00	472.911.700,00	309.902.200,00	-163.009.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			472.912.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Penyediaan Data dan Informasi Perizinan yang akurat**	**80 %**	**80 %**	**69.569.400,00**	**69.569.400,00**	**60.575.500,00**	**-8.993.900,00**					**Pelaku Usaha dan Investor**		**69.569.650,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data perizinan dan non perizinan dalam aplikasi penunjang pelayanan yang terintegrasi	3500 Perizinan/ Non	3500 Perizinan/ Non	69.569.400,00	69.569.400,00	60.575.500,00	-8.993.900,00							69.569.650,00	

	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan*	1 Dokumen	1 Dokumen	69.569.400,00	69.569.400,00	60.575.500,00	-8.993.900,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			69.569.650,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H					**9.427.396.179,00**	**9.453.904.179,00**	**9.049.631.929,00**	**-377.764.250,00**							**9.611.835.005,00**	

BAB IV
PENUTUP

Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan untuk menyesuaikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II serta perkembangan kebutuhan pelayanan dan pendanaan.

Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyempurnaan rencana kerja dan penganggaran perubahan, dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah, RKPD, KUA-PPAS Perubahan dan RKA Perubahan.

Pelaksanaan Renja Perubahan perlu dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Apabila ketersediaan anggaran tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan, pelaksanaan diarahkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah sesuai dengan prioritas dan kemampuan pendanaan.

Sebagai tindak lanjut finalisasi dokumen, data realisasi kinerja dan realisasi anggaran Triwulan II, hasil evaluasi permasalahan, serta pagu perubahan APBD Tahun 2025 perlu dimasukkan dan diselaraskan dengan RKA Perubahan/SIPD sebelum dokumen ditetapkan.

RENJA PERUBAHAN
BAPPEDA TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

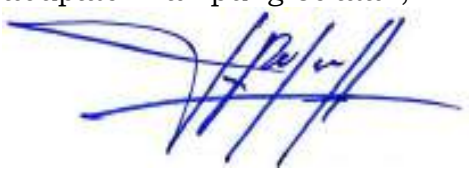
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 disusun untuk memberikan gambaran tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama, sehingga tersusunnya Rencana Kerja ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Tahun 2025 ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu saran / pendapat atau kritik yang membangun sangat kami harapkan sehingga ke depan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ini dapat lebih sempurna lagi.

Kalianda, 18 Juli 2025
Kepala Bappeda
Kabupaten Lampung Selatan,



Ir. Aryan Saruhian, S.P., M.E., IPU.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750111 200003 1 008

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
BAB I Pendahuluan		1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I		5
BAB III Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah		40
BAB IV Penutup		57

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I 25
Tabel 2.2. Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 49

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja Perubahan) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam sebuah dokumen resmi, Renja Perubahan Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja Perubahan ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja Perubahan Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah, orientasi mengenai Perangkat Daerah dan Renja Perubahan Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang

harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi existing Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah tahap penetapan rancangan akhir. Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perubahan Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah :

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah;
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
14) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031;
15) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045;
16) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 – 2029;
17) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2025 dan dengan tujuan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tujuan :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2025.
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Lampung Selatan secara sistematis dan terorganisir.
3. Dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Bappeda Kabupaten Lampung Selatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian salah satu ketugasannya adalah mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan maupun dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappeda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi:

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terukur;
2. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berbasis kinerja;
3. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal maupun horizontal yakni antar Perangkat Daerah;
4. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
5. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi pembangunan;
6. Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi inovasi daerah.

Upaya Bappeda dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

a. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
b. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
c. Terselenggaranya Forum Konsultasi Publik;
d. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
e. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi di tingkat kabupaten oleh Bappeda dengan Perangkat Daerah terkait.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus di awali dalam pelaksanaanya dengan Dokumen Renja Bappeda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai dengan Triwulan I dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program / Kegiatan / Sub Kegiatanya, mengidentifikasi realisasi pencapian target kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta hambatan – hambatan yang dihadapi.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Lampung Selatan ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang di sesuaikan dengan Rencana Kerja Tahun 2025. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sebagai dokumen jangka menegah. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I mengacu pada hasil Laporan Kinerja (LAKIP) Bappeda Kabupaten Lampung Selatan dan Realisasi APBD sampai dengan Triwulan I.

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) kegiatan dan 33 Sub Kegiatan. Program ini mempunyai tolok Indeks Kepuasan Pelayanan untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di mana target yang ingin dicapai adalah 82.

   Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan I adalah sebesar Rp. 1.953.558.415,00 dari target sebesar Rp. 10.097.113.800,00 (7,43%). Kemajuan fisik sampai dengan triwulan I adalah sebesar 86 %. Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu :

      a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 32.725.000,- menjadi Rp 16.350.000,-.
      b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 27.832.000,- menjadi Rp 13.910.000,-.

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan III. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 30.691.000,- menjadi Rp 15.205.000,-.

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 25.838.000,- menjadi Rp 12.486.000,-.

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan III. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 30.451.000,- menjadi Rp 15.206.000,-.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan III. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 32.463.000,- menjadi Rp 15.975.000,-.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 42 orang dari target fisik sebesar 42 orang. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 1.543.242.754,- atau sebesar 23,11 % dari target sebesar Rp. 6.678.236.000,-. Realisasi fisik tercapai 100 % sedangkan realisasi keuangan rendah. Hal ini disebabkan karena pembayaran gaji dan tunjangan tersebut menyesuaikan dengan ploting dari BPKAD. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran menurun menjadi Rp. 6.516.816.000,-.

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 3 bulan dari target fisik sebesar 12 bulan. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 237.612.500,00,- atau sebesar 18,19 % dari target sebesar Rp. 1.306.618.000,00,-. Realisasi fisik tercapai 25 % sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena pembayaran gaji dan tunjangan tersebut menyesuaikan dengan ploting dari BPKAD. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran bertambah sebesar Rp. 1.371.529.500,-.

c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 30.000.000,- menjadi Rp 13.361.000,-.

d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 30.000.000,- menjadi Rp 13.361.000,-.

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I

karena kegiatan baru akan dilaksanakan pada Triwulan IV (akhir tahun). Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 30.000.000,- menjadi Rp 13.754.000,-.

f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0 % dari target fisik sebesar 1 laporan. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 5.600.000,- atau sebesar 18,67 % dari target sebesar Rp. 30.000.000,-. Realisasi fisik belum tercapai sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 menurun menjadi Rp 14.823.000,-.

g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 1 dokumen. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 1.566.300,- atau sebesar 5,22 % dari target sebesar Rp. 30.000.000,-. Realisasi fisik belum tercapai sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran menurun menjadi Rp 14.987.500,-.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

   Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

   a. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 10.839.000,- menjadi Rp 5.363.000,-.

   b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 15.100.000,- menjadi Rp 7.537.750,-.

c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 14.200.000,- menjadi Rp 7.049.250,-.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 1 laporan dari target fisik sebesar 2 laporan. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 20.790.000,- atau sebesar 51,53 % dari target sebesar Rp. 40.348.000,-. Realisasi fisik tercapai 50 % sedangkan realisasi keuangan cukup baik. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran menurun menjadi Rp. 20.790.000,-.

b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 40.753.000,- menjadi Rp 30.242.000,-.

c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 25.744.000,- menjadi Rp 12.734.500,-.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terdiri dari 9 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 1 paket dari target fisik sebesar 4 paket. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I

adalah sebesar Rp. 1.973.000,- atau sebesar 7,38% dari target sebesar Rp. 26.728.000,-. Realisasi fisik tercapai 25 % sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 1 paket dari target fisik sebesar 2 paket. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 22.069.000,- atau sebesar 7,81 % dari target sebesar Rp. 282.590.000,-. Realisasi fisik tercapai 50 % sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran menurun menjadi Rp. 196.162.000,-.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 3 paket dari target fisik sebesar 12 paket. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 1.860.000,- atau sebesar 8,43 % dari target sebesar Rp. 22.062.000,- Realisasi fisik tercapai 25 % sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan.

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 3 paket dari target fisik sebesar 12 paket. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 5.443.100,- atau sebesar 12,15 % dari target sebesar Rp. 44.804.000,- Realisasi fisik tercapai 25 % sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran menurun menjadi Rp. 20.885.000,-.

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0 paket dari target fisik sebesar 2 paket. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 1.920.000,- atau sebesar 16,67 % dari target sebesar Rp. 75.256.800,- Realisasi fisik belum tercapai sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada

Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 88.256.800,- menjadi Rp 43.825.000,-.

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 2 paket dari target fisik sebesar 10 paket. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 3.000.000,- atau sebesar 16,67 % dari target sebesar Rp. 18.000.000,- Realisasi fisik yang tercapai 20% sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan.

g. Penyediaan Bahan/Material

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 54.872.000,- menjadi Rp 48.436.000,-.

h. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 54.600.000,- menjadi Rp 22.275.000,-.

i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 2 laporan dari target fisik sebesar 12 laporan. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 24.376.289,- atau sebesar 10,15 % dari target sebesar Rp. 240.174.000,- Realisasi fisik yang tercapai 16,67% sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran menurun menjadi Rp. 159.618.000,-.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

a. Pengadaan Mebel

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami kenaikan dari Rp 86.579.000,- menjadi Rp 112.339.000,-.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 3 laporan dari target fisik sebesar 12 laporan. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 44.285.787,- atau sebesar 17,66 % dari target sebesar Rp. 250.800.000,-. Realisasi fisik tercapai 25 % sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 1 unit dari target fisik sebesar 12 unit. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 35.819.685,- atau sebesar 13,56 % dari target sebesar Rp. 264.130.000,-. Realisasi fisik tercapai 8 % sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan.

   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 6 unit dari target fisik sebesar 46 unit. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 4.000.000,- atau sebesar 10,53 % dari target sebesar Rp. 38.000.000,-. Realisasi fisik tercapai 13 % sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan.

   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami kenaikan dari Rp 75.000.000,- menjadi Rp 210.000.000,-.

II. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 11 sub kegiatan. Ada 3 tolok ukur dari program ini yaitu : Persentase keterlibatan publik/ hasil Musrenbang, teknokratik, politik, *top-down* dan *bottom-up* yang diakomodir dalam dokumen rancangan akhir perencanaan daerah dengan target 75%, Persentase ketersediaan dan keterisian data SIPD dengan target 53 PD, dan yang terakhir Persentase Perangkat Daerah yang capaian realisasi kinerja RKPD-nya kategori tinggi dengan target 53 PD.

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 265.171.600,00,- dari target sebesar Rp. 1.814.999.900,00,- (14,61 %). Kemajuan fisik sampai dengan triwulan I adalah sebesar 0 %.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

   Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu :

   a. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0 dokumen dari target fisik sebesar 2 dokumen. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 6.750.000,- atau sebesar 4,82 % dari target sebesar Rp. 140.000.000,-. Realisasi fisik belum tercapai sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan menjadi Rp 115.184.000,-.

   b. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 60.000.000,- menjadi Rp 27.259.600,-.

   c. Pelaksanaan Konsultasi Publik

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0 berita acara dari target fisik sebesar 1 berita acara. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 22.431.000,- atau sebesar 29,91 % dari target sebesar Rp. 75.000.000,-. Realisasi fisik tercapai % sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan menjadi Rp 52.411.400,-.

d. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 40.000.000,- menjadi Rp 25.127.500,-.

e. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0 berita acara dari target fisik sebesar 1 berita acara. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 176.152.600,- atau sebesar 48,93 % dari target sebesar Rp. 360.000.000,-. Realisasi fisik belum tercapai sedangkan realisasi keuangan rendah. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan menjadi Rp 275.673.200,-.

f. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 17 kecamatan dari target fisik sebesar 17 kecamatan. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 38.332.000,- atau sebesar 30,67 % dari target sebesar Rp. 125.000.000,-. Realisasi fisik tercapai 100 % sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan menjadi Rp 54.361.300,-.

g. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 1 dokumen dari target fisik sebesar 2 dokumen. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 10.896.000,- atau sebesar 2

% dari target sebesar Rp. 400.000.000,-. Realisasi fisik tercapai 50 % sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami kenaikan menjadi Rp 474.274.000,-.

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

   a. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0 dokumen dari target fisik sebesar 1 dokumen. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 10.610.000,- atau sebesar 10,61% dari target sebesar Rp. 99.999.900,-. Realisasi fisik belum tercapai sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan menjadi Rp 51.227.600,-.

   b. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 100.000.000,- menjadi Rp 50.187.400,-.

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

   a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 110.000.000,- menjadi Rp 46.034.900,-.

   b. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 170.000.000,- menjadi Rp 108.835.200,-.

III. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan. Ada 3 tolok ukur dari program ini yaitu : Persentase renstra dan renja PD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sosial dengan target 36 PD, Persentase renstra dan renja SKPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan target 15 PD, dan Persentase renstra dan renja PD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan target 7 PD. Kemajuan fisik sampai dengan triwulan I adalah sebesar 100%. Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan I adalah sebesar Rp. 56.447.300,- dari target sebesar Rp. 2.547.608.300,- (98,24%).

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

   Terdiri dari 8 Sub Kegiatan yaitu :

   a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 1 dokumen dari target fisik sebesar 25 dokumen. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 2.440.450,- atau sebesar 6,72 % dari target sebesar Rp. 36.299.900,-. Realisasi fisik tercapai 4% sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan menjadi Rp 15.199.900,-.

   b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I

karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 34.999.950,- menjadi Rp 10.636.000,-.

c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 29.999.850,- menjadi Rp 14.524.000,-.

d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0 laporan dari target fisik sebesar 2 laporan. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 7.800.000,- atau sebesar 2,40 % dari target sebesar Rp. 329.214.300,-. Realisasi fisik belum tercapai sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami kenaikan menjadi Rp 386.080.100,-.

e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 2 dokumen dari target fisik sebesar 11 dokumen. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 4.096.700,- atau sebesar 11,49 % dari target sebesar Rp. 35.660.000,-. Realisasi fisik tercapai 18 % sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan menjadi Rp 25.141.000,-.

f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 2 laporan dari target fisik sebesar 11 laporan. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 3.624.500,- atau sebesar 10,35 % dari target sebesar Rp. 35.000.000,-. Realisasi fisik tercapai 18 % sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini

didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan menjadi Rp 15.968.000,-.

g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0 dokumen dari target fisik sebesar 11 dokumen. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 1.975.000,- atau sebesar 6,58 % dari target sebesar Rp. 29.999.900,-. Realisasi fisik belum tercapai sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan menjadi Rp 14.225.000,-.

h. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 1 laporan dari target fisik sebesar 5 laporan. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 15.920.000,- atau sebesar 2,61 % dari target sebesar Rp. 608.847.150,-. Realisasi fisik tercapai 20 % sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan menjadi Rp 584.901.000,-.

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

   Terdiri dari 8 Sub Kegiatan yaitu :

   a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 1 dokumen dari target fisik sebesar 4 dokumen. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 4.834.600,- atau sebesar 5,30 % dari target sebesar Rp. 91.260.650,-. Realisasi fisik tercapai 25 % sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan menjadi Rp 43.240.500,-.

   b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 3 laporan dari target fisik sebesar 6 laporan. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 1.980.000,- atau sebesar 5,27 % dari target sebesar Rp. 37.541.600,-. Realisasi fisik tercapai 50 % sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan menjadi Rp 16.460.200,-.

c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 31.722.800,- menjadi Rp 18.473.300,-.

d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0 dokumen dari target fisik sebesar 1 dokumen. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 1.980.000,- atau sebesar 1,24 % dari target sebesar Rp. 159.303.600,-. Realisasi fisik belum tercapai sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan menjadi Rp 89.506.850,-.

e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 2 dokumen dari target fisik sebesar 4 dokumen. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 1.980.000,- atau sebesar 2,53 % dari target sebesar Rp. 78.151.200,-. Realisasi fisik tercapai 50 % sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan menjadi Rp 38.904.600,-.

f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 2 laporan dari target fisik sebesar 4 laporan. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 1.980.000,- atau sebesar 5,27 % dari target sebesar Rp. 37.541.600,-. Realisasi fisik tercapai 50 % sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan menjadi Rp 30.622.500,-.

g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0 laporan dari target fisik sebesar 4 laporan. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 3.851.500,- atau sebesar 13,83 % dari target sebesar Rp. 37.374.700,-. Realisasi fisik belum tercapai sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan menjadi Rp 15.670.000,-.

h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0 laporan dari target fisik sebesar 2 laporan. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 1.210.000,- atau sebesar 1,02 % dari target sebesar Rp. 117.992.150,-. Realisasi fisik belum tercapai sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan menjadi Rp 88.802.800,-.

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

   Terdiri dari 8 Sub Kegiatan yaitu :

   a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 130.274.000,- menjadi Rp 41.885.000,-.

b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 38.396.900,- menjadi Rp 17.068.700,-.

c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 48.322.350,- menjadi Rp 18.908.500,-.

d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami kenaikan dari Rp 120.424.750,- menjadi Rp 140.667.100,-.

e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 85.598.500,- menjadi Rp 31.671.700,-.

f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 42.760.700,- menjadi Rp 13.540.900,-.

g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 65.621.850,- menjadi Rp 29.680.600,-.

h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran mengalami penurunan dari Rp 52.699.800,- menjadi Rp 25.476.200,-.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab
							Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW 1 Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025						
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	90 poin	53.422.808.095	86 poin	27.639.101.085	80 poin	9.629.991.800	-	1.953.356.126	-	20%					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40 dok	1.368.401.525	26 dok	456.083.900	10 dok	180.000.000	6 dok	-	60%	-					
A	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dok	283.455.750	6 dok	88.722.400	2 dok	32.725.000	1 dok	-	50%	-					
B	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	5 dok	274.227.290	3 dok	81.337.700	1 dok	27.832.000	1 dok	-	100%	-					
C	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	5 dok	266.026.540	3 dok	82.571.450	1 dok	30.691.000	-	-	-	-					
D	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	5 dok	181.248.315	3 dok	55.996.900	1 dok	25.838.000	1 dok	-	100%	-					

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab
							Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW 1 Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025						
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
E	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	5 dok	181.248.315	3 dok	76.099.900	1 dok	30.451.000	-	-	-	-					
F	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 lap	182.195.315	8 lap	71.355.550	4 lap	32.463.000	3 lap	-	75%	-					
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	290 dok	43.973.234.170	138 dok	23.530.807.602	31 dok	8.127.534.000	6 dok	1.788.021.554	19%	22%					
A	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 org/bln	37.050.248.350	111 org/bln	19.482.782.002	42 org/bln	6.678.236.000	42 org/bln	1.543.242.754	100%	23%					
B	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 dok	5.816.049.570	36 dok	3.624.083.400	12 dok	1.306.618.000	3 dok	237.612.500	25%	18%					
C	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25 dok	237.472.500	3 dok	87.752.750	1 dok	27.560.000	-	-	-	-					
D	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20 dok	237.472.500	5 dok	87.668.850	3 dok	27.560.000	-	-	-	-					

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab
							Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW 1 Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025						
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
E	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 lap	204.328.750	3 lap	84.378.850	1 lap	27.560.000	-	-	-	-					
F	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	30 dok	217.562.500	3 dok	70.260.900	1 dok	30.000.000	-	5.600.000	-	19%					
G	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	90 lap	210.100.000	52 lap	93.880.850	1 lap	30.000.000	-	1.566.300	-	5%					
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	75 dok	325.365.400	34 dok	102.769.150	15 dok	40.139.000	-	-	-	-					
A	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10 lap	111.211.950	6 lap	28.000.400	2 lap	10.839.000	-	-	-	-					
B	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 lap	109.616.500	25 lap	40.660.500	12 lap	15.100.000	-	-	-	-					

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab
							Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW 1 Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025						
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
C	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 lap	104.536.950	3 lap	34.108.250	1 lap	14.200.000	-	-	-	-					
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	650.600.990	100%	161.182.150	100%	106.845.000	16,67%	20.790.000	16,67%	19%					
A	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	406 paket	290.731.860	6 paket	54.100.000	2 paket	40.348.000	1 paket	20.790.000	50%	52%					
B	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 dok	109.240.500	6 dok	46.960.750	1 dok	40.753.000	-	-	-	-					
C	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20 dok	129.952.050	5 dok	53.521.400	1 dok	25.744.000	-	-	-	-					
D	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 org	120.676.580	2 org	6.600.000	-	-	-	-	-	-					
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	100%	3.442.759.370	113,89%	1.788.655.165	100%	809.086.800	17,96%	60.439.100	17,96%	7%					
A	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	45 paket	153.665.050	15 paket	99.658.000	4 paket	26.728.000	1 paket	1.973.000	25%	7%					

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab
							Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW 1 Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025						
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
B	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65 paket	953.942.520	6 paket	274.370.000	2 paket	282.590.000	1 paket	22.069.000	50%	8%					
C	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	115 paket	144.924.300	11 paket	76.806.000	12 paket	22.062.000	3 paket	1.860.000	20%	8%					
D	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	235 paket	290.699.480	12 paket	151.719.100	12 paket	44.804.000	3 paket	5.443.100	20%	12%					
E	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 paket	214.963.520	11 paket	209.638.500	2 paket	75.256.800	-	1.920.000	-	3%					
F	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	60 dok	96.743.000	35 dok	54.000.000	10 dok	18.000.000	2 dok	3.000.000	20%	17%					
G	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	10 paket	388.547.800	4 paket	85.712.000	2 paket	54.872.000	-	-	-	-					
H	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	190 Lap	369.523.100	100 Lap	83.775.000	24 Lap	44.600.000	-	-	-	-					
I	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	595 lap	829.750.600	250 lap	752.976.565	12 lap	240.174.000	2 lap	24.174.000	17%	10%					
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	250 unit	140.500.000	10 unit	76.000.000	48 unit	120.579.000	-	-	-	-					

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab
							Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW 1 Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025						
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	250 unit	140.500.000	10 unit	76.000.000	48 unit	120.579.000	-	-	-	-					
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 lap	1.517.898.340	36 lap	544.170.636	12 lap	250.800.000	3 lap	44.285.787	20%	18%					
A	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 lap	1.517.898.340	36 lap	544.170.636	12 lap	250.800.000	3 lap	44.285.787	20%	18%					
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	330 unit	2.004.048.300	103 unit	979.432.482	59 unit	462.130.000	7 unit	39.819.685	12%	9%					
A	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 unit	1.412.130.500	34 unit	687.995.330	12 unit	264.130.000	1 unit	35.819.685	8%	14%					
B	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	255 unit	142.831.550	65 unit	94.000.000	46 unit	38.000.000	6 unit	4.000.000	13%	11%					
C	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	10 unit	374.086.250	4 unit	197.437.152	1 unit	160.000.000	-	-	-	-					
D	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
E	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-					

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab
							Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW 1 Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025						
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang tesedia	100%	9.701.871.700	100%	4.547.995.130	100%	1.814.999.900	-	265.171.600	-	15%					
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase keterlibatan publik / hasil musrenbang, teknokratik, politik, *top-down* dan *bottom-up* yang diakomodir dalam dokumen rancangan akhir perencanaan daerah	100%	6.339.229.000	85,71%	3.199.320.471	100%	1.345.000.000	-	254.561.600	-	19%					
A	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD / RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik	9 dok	1.027.175.000	6 dok	836.273.000	2 dok	140.000.000	-	6.750.000	-	5%					
B	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	12 dok	579.757.000	6 dok	199.282.796	3 dok	60.000.000	-	-	-	-					
C	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	7 Berita Acara	335.810.000	3 Berita Acara	137.905.350	1 Berita Acara	75.000.000	-	22.431.000	-	30%					
D	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	7 Berita Acara	337.880.000	3 Berita Acara	127.685.150	1 Berita Acara	40.000.000	-	-	-	-					
E	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota	7 Berita Acara	1.710.000.000	4 Berita Acara	818.814.650	1 Berita Acara	360.000.000	-	176.152.600	-	49%					
F	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	40 Usulan	748.607.000	51 Usulan	351.589.000	17 Usulan	125.000.000	17 Usulan	38.332.000	100%	31%					

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab
							Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW 1 Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025						
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
G	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan (RPJPD / RPJMD/ RKPD)	12 dok	1.600.000.000	10 dok	727.770.525	2 dok	545.000.000	1 dok	10.896.000	50%	2%					
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dan keterisian data SIPD	100%	900.642.700	100%	461.639.750	100%	199.999.900	-	10.610.000	-	5%					
A	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5 dok	444.136.300	347 dok	245.124.730	1 dok	99.999.900	-	10.610.000	-	11%					
B	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	20 org	456.506.400	23 org	216.515.020	43 org	100.000.000	-	-	-	-					
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang capaian realisasi kinerja RKPD-nya kategori tinggi	100%	2.462.000.000	100%	887.034.909	100%	270.000.000	-	-	-	-					
A	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	25 lap	647.000.000	12 lap	201.969.850	5 lap	100.000.000	-	-	-	-					

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab
							Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW 1 Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025						
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
B	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	25 lap	1.815.000.000	12 lap	685.065.059	5 lap	170.000.000	-	-	-	-					
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Renstra dan Renja SKPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD	100%	10.211.026.440	80%	4.194.844.862	100%	2.547.608.300	67,92%	56.447.300	67,92%	2%					
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase renstra dan renja SKPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sosial	100%	4.251.754.500	97%	1.896.263.782	100%	1.397.621.050	-	35.856.650	-	3%					
A	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	130 dok	213.678.000	17 dok	75.447.900	25 dok	29.689.900	1 dok	2.440.450	4%	8%					
B	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	130 lap	213.678.000	110 lap	68.843.950	25 lap	35.554.950	-	-	-	-					

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab
							Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW 1 Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025						
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
C	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	130 lap	213.678.000	14 lap	63.813.750	25 lap	22.519.850	-	-	-	-					
D	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD / RPJMD pada Bidang Pemerintahan	10 lap	915.765.000	6 lap	621.719.200	2 lap	518.288.400	-	7.800.000	-	2%					
E	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55 dok	213.678.500	9 dok	78.391.700	11 dok	36.993.950	2 dok	4.096.700	18%	11%					
F	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	55 lap	213.678.500	109 lap	68.310.900	11 lap	40.111.000	2 lap	3.624.500	18%	9%					

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab
							Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW 1 Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025						
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
G	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	55 lap	213.678.500	93 lap	66.254.900	11 lap	21.839.900	-	1.975.000	-	9%					
H	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD / RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	25 lap	2.053.920.000	15 lap	853.481.482	5 lap	692.623.100	1 lap	15.920.000	20%	2%					
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase renstra dan renja SKPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	3.082.648.485	80%	1.305.928.583	100%	590.888.400	-	20.590.650	-	3%					
A	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20 dok	198.050.000	13 dok	183.822.850	4 dok	86.300.650	1 dok	4.834.600	25%	6%					

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab
							Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW 1 Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025						
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
B	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20 lap	198.050.000	17 lap	88.914.900	6 lap	37.541.600	3 lap	1.980.000	50%	5%					
C	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20 lap	276.904.750	12 lap	96.306.000	6 lap	31.392.800	1 lap	2.933.200	17%	9%					
D	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD / RPJMD pada Bidang Perekonomian	10 lap	1.146.769.720	7 lap	346.708.020	1 lap	149.553.600	-	4.306.350	-	3%					
E	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	10 dok	172.597.950	9 dok	143.829.600	4 dok	74.753.200	2 dok	1.475.000	50%	2%					

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab
							Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW 1 Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025						
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
F	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	20 lap	198.000.000	11 lap	65.914.200	4 lap	37.541.700	2 lap	3.851.500	50%	10%					
G	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	20 lap	198.000.000	12 lap	92.234.300	4 lap	27.854.700	-	1.210.000	-	4%					
H	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD / RPJMD pada Bidang SDA	10 lap	694.276.065	6 lap	288.198.713	2 lap	145.950.150	-	-	-	-					
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase renstra dan Renja Perubahan SKPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	2.876.623.455	80%	992.652.497	100%	559.098.850	-	-	-	-					
A	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 dok	431.494.850	6 dok	210.029.500	2 dok	89.134.600	-	-	-	-					

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab
							Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW 1 Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025						
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
B	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	15 lap	225.528.800	9 lap	74.357.216	3 lap	32.121.900	-	-	-	-					
C	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	15 lap	259.878.735	13 lap	116.486.197	3 lap	39.217.350	-	-	-	-					
D	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD / RPJMD pada Bidang Infrastruktur	15 lap	891.756.750	8 lap	165.875.400	3 lap	185.490.650	-	-	-	-					
E	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 dok	339.443.250	4 dok	109.397.633	2 dok	66.371.500	-	-	-	-					
F	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	15 lap	230.131.400	11 lap	91.786.300	3 lap	31.591.200	-	-	-	-					

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab
							Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW 1 Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025						
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan															
G	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	15 lap	210.726.420	14 lap	107.091.830	3 lap	64.046.850	-	-	-	-					
H	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD / RPJMD pada Bidang Kewilayahan	15 lap	287.663.250	9 lap	117.628.421	3 lap	51.124.800	-	-	-	-					

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara keseluruhan pagu indikatif Bappeda naik dari APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 yang semula sebesar Rp. 14.459.722.000,- pada Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2025 turun menjadi Rp. 12.800.306.050,- ada penurunan sebesar Rp. 1.659.415.950,-.

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami kenaikan ataupun penurunan pagu indikatif adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini semula anggaran murni tahun 2025 sebesar Rp. 10.097.113.800,- dan pada Perubahan Renja 2025 turun menjadi Rp. 9.668.975.800,-. Ada penurunan pagu anggaran sebesar Rp. 428.138.000,-.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran murni sebesar Rp. 180.000.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 84.508.000,- atau turun sebesar Rp. 95.492.000,-.

   Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu :

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

      Anggaran murni sebesar Rp. 32.725.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 16.350.000,-.

   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

      Anggaran murni sebesar Rp. 27.832.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 13.910.000,-.

   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

      Anggaran murni sebesar Rp. 30.691.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 15.205.000,-.

   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

      Anggaran murni sebesar Rp. 25.838.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 12.486.000,-.

   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Anggaran murni sebesar Rp. 30.451.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 15.206.000,-.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran murni sebesar Rp. 32.463.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 15.975.000,-.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 8.127.534.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp. 7.958.632.000,- atau turun sebesar Rp. 168.902.000,-.

Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran murni sebesar Rp. 6.678.236.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 6.516.816.000,-.

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Anggaran murni sebesar Rp. 1.306.618.000,- pada Perubahan Renja anggaran naik yaitu sebesar Rp. 1.371.529.500,-.

c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Anggaran murni sebesar Rp. 27.560.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 13.361.000,-.

d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Anggaran murni sebesar Rp. 27.560.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 13.361.000,-.

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Anggaran murni sebesar Rp. 27.560.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 13.754.000,-.

f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Anggaran murni sebesar Rp. 30.000.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 14.823.000,-.

g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

Anggaran murni sebesar Rp. 30.000.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 14.987.500,-.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 40.139.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 19.950.000,-.

Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

a. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran murni sebesar Rp. 10.839.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 5.363.000,-.

b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Anggaran murni sebesar Rp. 15.100.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 7.537.750,-.

c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Anggaran murni sebesar Rp. 14.200.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 7.049.250,-.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 106.845.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 63.766.500,-.

Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Anggaran murni sebesar Rp. 40.348.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 20.790.000,-.

b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Anggaran murni sebesar Rp. 40.753.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 30.242.000,-.

c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Anggaran murni sebesar Rp. 25.744.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 12.734.500,-.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 809.086.800,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 666.850.300,-.

Terdiri dari 9 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran murni sebesar Rp. 26.728.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 26.728.000,-.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran murni sebesar Rp. 282.590.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 196.162.000,-.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Anggaran murni sebesar Rp. 22.062.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 22.062.000,-.

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Anggaran murni sebesar Rp. 44.804.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 20.885.000,-.

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Anggaran murni sebesar Rp. 75.256.800,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 42.994.300,-.

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Anggaran murni sebesar Rp. 18.000.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 18.000.000,-.

g. Penyediaan Bahan/Material

Anggaran murni sebesar Rp. 54.872.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 48.436.000,-.

h. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Anggaran murni sebesar Rp. 44.600.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 22.275.000,-.

i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran murni sebesar Rp. 240.174.000,- pada Perubahan Renja anggaran naik yaitu sebesar Rp. 269.308.000,-.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 120.579.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 112.339.000,-.

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

a. Pengadaan Mebel

Anggaran murni sebesar Rp. 120.579.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 112.339.000,-.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 250.800.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 250.800.000,-.

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran murni sebesar Rp. 250.800.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 250.800.000,-.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 462.130.000,- pada Perubahan Renja anggaran naik yaitu sebesar Rp. 512.130.000,-.

Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran murni sebesar Rp. 264.130.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 264.130.000,-.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran murni sebesar Rp. 38.000.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 38.000.000,-.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Anggaran murni sebesar Rp. 160.000.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 160.000.000,-.

II. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini semula anggaran murni tahun 2025 sebesar Rp. 1.814.999.900,- dan pada perubahan Renja 2025 turun menjadi Rp. 1.260.575.800,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 554.424.100,-.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Anggaran murni sebesar Rp. 1.345.000.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 1.004.290.700,-.

Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu :

a. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 140.000.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 115.184.000,-.

b. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

Anggaran murni sebesar Rp. 60.000.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 27.259.600,-.

c. Pelaksanaan Konsultasi Publik

Anggaran murni sebesar Rp. 75.000.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 52.411.400,-.

d. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 40.000.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 25.127.500,-.

e. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Anggaran murni sebesar Rp. 360.000.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 275.673.200,-.

f. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

Anggaran murni sebesar Rp. 125.000.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 54.361.300,-.

g. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran murni sebesar Rp. 545.000.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 454.273.700,-.

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

   Anggaran murni sebesar Rp. 199.999.900 ,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 101.415.000,-.

   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

   a. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

      Anggaran murni sebesar Rp. 99.999.900,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 51.227.600,-.

   b. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

      Anggaran murni sebesar Rp. 100.000.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 50.187.400,-.

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

   Anggaran murni sebesar Rp. 270.000.000,- pada Perubahan Renja anggaran naik yaitu sebesar Rp. 154.870.100,-.

   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

   a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

      Anggaran murni sebesar Rp. 100.000.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 46.034.900,-.

   b. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

      Anggaran murni sebesar Rp. 170.000.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 108.835.200,-.

III. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini semula anggaran murni tahun 2025 sebesar Rp. 2.547.608.300,- dan pada perubahan Renja 2025 turun menjadi Rp. 1.870.754.450,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 676.853.850,-

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

   Anggaran murni sebesar Rp. 1.397.621.050,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 1.050.175.000,-.

   Terdiri dari 8 Sub Kegiatan yaitu :

   a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

      Anggaran murni sebesar Rp. 29.689.900,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 15.199.900,-.

   b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Anggaran murni sebesar Rp. 35.554.950,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 10.636.000,-.

c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
   Anggaran murni sebesar Rp. 22.519.850,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 14.524.000,-.
d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
   Anggaran murni sebesar Rp. 518.288.400,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 369.580.100,-.
e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
   Anggaran murni sebesar Rp. 36.993.950,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 25.141.000,-.
f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
   Anggaran murni sebesar Rp. 40.111.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 15.968.000,-.
g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
   Anggaran murni sebesar Rp. 21.839.900,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 14.225.000,-.
h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
   Anggaran murni sebesar Rp. 692.623.100,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 584.901.000,-.

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
   Anggaran murni sebesar Rp. 590.888.400,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 501.680.750,-.
   Terdiri dari 8 Sub Kegiatan yaitu :

   a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
      Anggaran murni sebesar Rp. 86.300.650,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 43.240.500,-.
   b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
      Anggaran murni sebesar Rp. 37.541.600,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 16.460.200,-.

c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
   Anggaran murni sebesar Rp. 31.392.800,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 18.473.300,-.
d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
   Anggaran murni sebesar Rp. 149.553.600,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 249.506.850,-.
e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
   Anggaran murni sebesar Rp. 74.753.200,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 38.904.600,-.
f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
   Anggaran murni sebesar Rp. 37.541.700,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 30.622.500,-.
g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
   Anggaran murni sebesar Rp. 27.854.700,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 15.670.000 ,-.
h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
   Anggaran murni sebesar Rp. 145.950.150,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 88.802.800,-.

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
   Anggaran murni sebesar Rp. 559.098.850,- pada Perubahan Renja anggaran naik yaitu sebesar Rp. 318.898.700,-.
   Terdiri dari 8 Sub Kegiatan yaitu :
   a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
      Anggaran murni sebesar Rp. 89.134.600,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 41.885.000,-.
   b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
      Anggaran murni sebesar Rp. 32.121.900,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 17.068.700 ,-.
   c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
      Anggaran murni sebesar Rp. 39.217.350,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 18.908.500,-.

d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

   Anggaran murni sebesar Rp. 185.490.650,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 140.667.100,-.

e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

   Anggaran murni sebesar Rp. 66.371.500,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 31.671.700,-.

f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

   Anggaran murni sebesar Rp. 31.591.200,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 13.540.900,-.

g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

   Anggaran murni sebesar Rp. 64.046.850,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 29.680.600,-.

h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

   Anggaran murni sebesar Rp. 51.124.800,- pada Perubahan Renja anggaran turun yaitu sebesar Rp. 25.476.200,-.

Secara rinci, uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif pada Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lampung Selatan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025. Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Badan Perencaaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Kalianda , 18 Juli 2025
Kepala Bappeda
Kabupaten Lampung Selatan,



Ir. Aryan Saruhian, S.P., M.E., IPU.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750111 200003 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jalan Mustafa Kemal No. 26
Kalianda Lampung Selatan
Telepon. (0727) 322012

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.3.1. Maksud 5

1.3.2. Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu 7

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan..... 9

2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu..... 15

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 15

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 17

2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... 17

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 25

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan..... 25

4.2.Sinkronisasi Prioritas Perangkat Daerah dengan Prioritas Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah..... 27

BAB IV. PENUTUP 37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah sampai dengan Tahun 2024 Kabupaten Lampung Selatan..... 10

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan 16

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan 19

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Sealatan Tahun 2025 28

Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Lampung Selatan 30

Tabel. 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Lampung Selatan..... 40

Tabel 4.2. Sinkronisasi Prioritas Perangkat Daerah dengan Prioritas Daerah Tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan 47

Tabel 4.3 Sinkronisasi Prioritas Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan 49

BAB I.
PENDAHULUAN

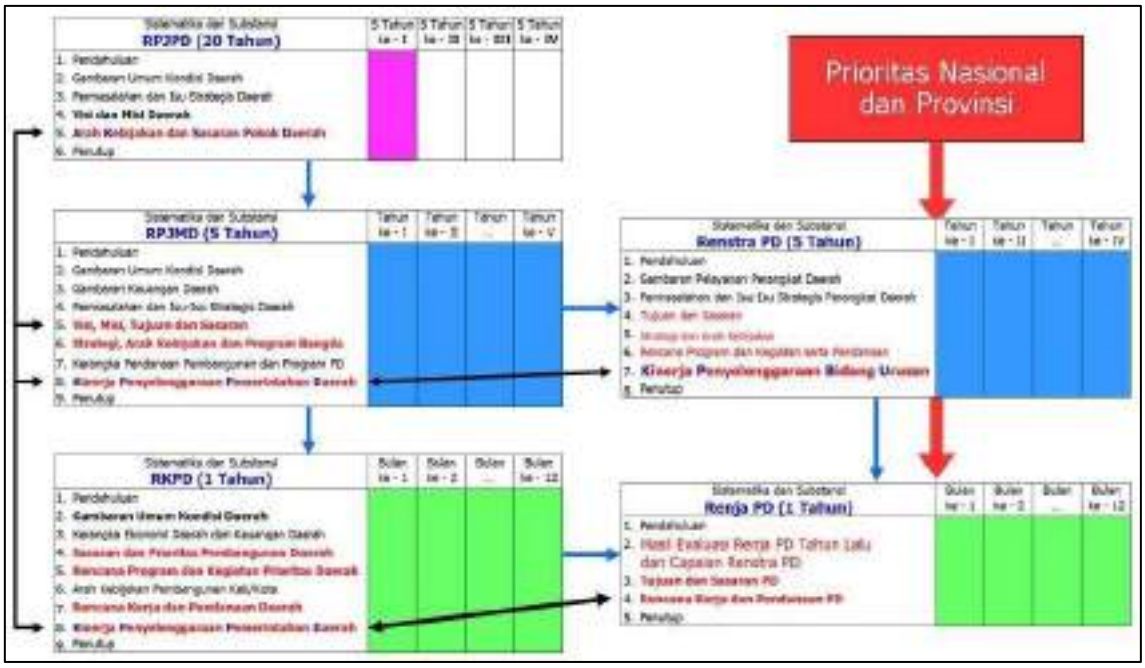
1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien dan efektif, yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang SMART, terpadu, dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Telah dipahami secara umum bahwa: *failing to plan is planning to fail*; gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah adalah rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahannya untuk mewujudkan target RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Lihat gambar 1.1.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional.Lihat gambar 1.2.

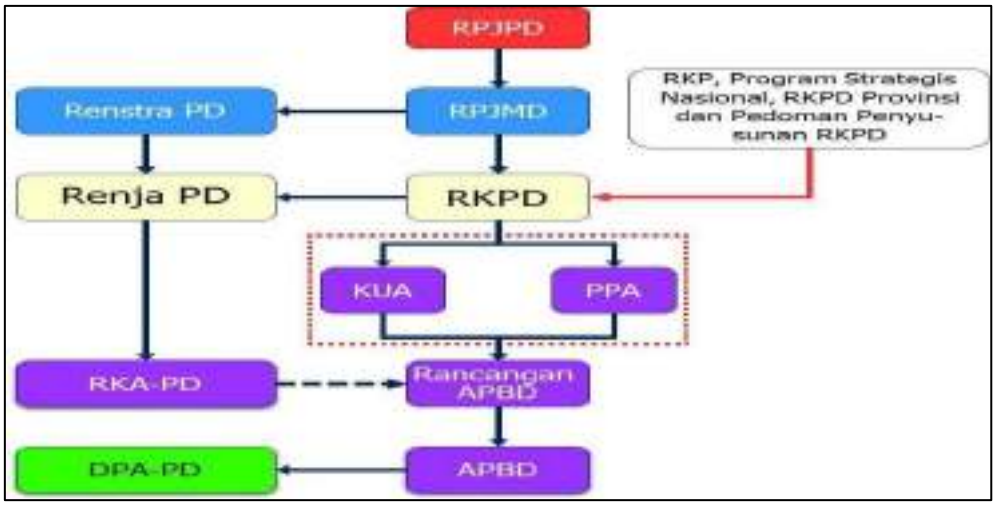


Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja PD,
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahunberjalan,
3. Penyusunan Rancangan Renja PD berdasarkan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD,
4. Pembahasan Rancangan Renja PD dalam Forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD,
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah,paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1. Sedangkan tindak lanjut dokumen Renja PD hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2.



Gambar 1.2. Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
d. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dibah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-6889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
k. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ Tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
l. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 -2024;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
o. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
p. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
q. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
r. Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ini adalah: menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasionil:

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2025.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan daerah dan laporan kinerja

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu- isupenting penyelenggaraan tugas dan fungsi

perangkat daerah, hasil review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran Renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) sesuai dengan bidang urusan Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II.
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan pada urusan pemerintahan. Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2022 melaksanakan 2 Program, 12 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan:
   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
      a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
      e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
   b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
   c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
   d. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
   d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   a. Pengadaan Mebel
   b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan Kegiatan :

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, dengan Sub Kegiatan :
   a. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
   b. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
   c. Pengeloaan Data Kelitbangan dan Peraturan
2. Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan Sub Kegiatan :
   a. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
   b. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
   c. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
   d. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan
   e. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan 2024.

Hasil Pelaksanaan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2023 dan perkiraan capaiannya di tahun 2024 adalah seperti yang di tunjukan pada tabel 2.1.1. di bawah ini.

Tabel 2.1.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah sampai dengan Tahun 2024 Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah sampai dengan Tahun 2024 Kabupaten Lampung Selatan

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA-SKPD
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2025

Seluruh nilai pada kolom Rp dikalikan 1.000

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
						I		II		III		IV							
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
				K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K%	Rp%		
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**6.032.780**		**7.831.236**		**10.025.951**						17.857.187	**40,05**	**29,6**		
	5.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.510.172**		**7.652.006**		**9.253.724**						16.905.729	**51,49**	**48,16**	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
		Tata Kelola Pemerintah Daerah Bidang Penelitian dan Pengembangan	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80		0		0						0		0			
	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			29.012		73.740		122.842						196.582	44,44	67,76		
		Tersedianya dokumen yang ditargetkan dalam satu tahun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		2						2		66,67			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0						0		0			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		1						1		100			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0						0		0			

		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0					0		0			
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		4		0					4		100			
5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			11.070		16.265		86.882						103.147	66,67	93,18		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		2					2		66,67			
5.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			3.596		-		-						-	0	0		
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0					0		0			
5.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			3.596		-		35.960						35.960	100	100		
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		1					1		100			

Seluruh nilai pada kolom Rp dikalikan 1.000

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K%	Rp%		
		5.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.500		-		-						-	0	0		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0						0		0			
		5.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			2.500		-		-						-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0						0		0			
		5.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5.750		57.475		-						57.475	100	99,96		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		4		0						4		100			
		5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.739.421		6.451.277		7.344.812						13.796.089	90	50,36		
			Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25		25		25						25		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		3		3						6		50			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		0		12						12		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0						1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2		0		2						2		100			
		5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.341.574		5.823.692		6.294.237						12.117.929	100	51,75		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25		25		25						25		100			
		5.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			375.915		577.600		881.400						1.459.000	50	38,81		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		3		3						6		50			
		5.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			11.532		-		115.220						115.220	100	99,91		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		0		12						12		100			

Seluruh nilai pada kolom Rp dikalikan 1.000

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K%	Rp%		
		5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5.000		49.985		-						49.985	100	99,97		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0						1		100			
		5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			5.400		-		53.955						53.955	100	99,92		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2		0		2						2		100			
		5.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			8.262		-		61.890						61.890	50	74,91		
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2		0		0						0		0			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4		0		4						4		100			
		5.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1.762		-		-						-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2		0		0						0		0			
		5.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			6.500		-		61.890						61.890	100	95,22		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4		0		4						4		100			
		5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10.675		-		100.535						100.535	100	94,18		
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3		0		3						3		100			
		5.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			10.675		-		100.535						100.535	100	94,18		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3		0		3						3		100			
		5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			312.898		796.446		686.270						1.482.716	52,38	47,39		
			Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		1		1						2		100			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2		0		2						2		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		1						1		33,33			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		1		0						1		33,33			

Seluruh nilai pada kolom Rp dikalikan 1.000

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K%	Rp%		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		3		3						6		50			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		0		0						0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8		2		2						4		50			
		5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.380		31.900		21.900						53.800	100	100		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		1		1						2		100			
		5.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			6.632		36.952		29.370						66.322	100	100		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2		0		2						2		100			
		5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			88.088		261.890		2.000						263.890	33,33	29,96		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		1						1		33,33			
		5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			34.883		192.300		-						192.300	33,33	55,13		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		1		0						1		33,33			
		5.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			9.000		12.300		12.300						24.600	50	27,33		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		3		3						6		50			
		5.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			5.000		-		10.500						10.500	0	21		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		0		0						0		0			
		5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			163.914		261.104		610.200						871.304	50	53,16		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8		2		2						4		50			
		5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			72.124		-		-						-	0	0		
			Tersedianya Barang Milik Daerah yang di targetkan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	13		0		0						0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0						0		0			
		5.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			21.087		-		-						-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	13		0		0						0		0			
		5.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			51.037		-		-						-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0						0		0			
		5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			108.000		165.972		154.738						320.710	50	29,7		

Seluruh nilai pada kolom Rp dikalikan 1.000

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K%	Rp%		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		3						6		50			
		5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			108.000		165.972		154.738						320.710	50	29,7		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		3						6		50			
		5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			229.780		164.571		782.637						947.207	27,08	41,22		
			Tersedianya barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		0						0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		0		3						3		75			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	37		0		0						0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		1						1		33,33			
		5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			44.530		52.000		178.262						230.262	0	51,71		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		0						0		0			
		5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			89.280		112.571		323.478						436.048	75	48,84		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		0		3						3		75			
		5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			16.500		-		-						-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	37		0		0						0		0			
		5.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			79.470		-		280.897						280.897	33,33	35,35		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		1						1		33,33			
		5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**2.522.609**		**179.230**		**772.228**						951.458	**0**	**3,77**	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Persentase Produk Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan (%)			0		0						0		0			
				Persentase terpenuhinya aspek kuantitas dalam kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah (%)	75												0			

Seluruh nilai pada kolom Rp dikalikan 1.000

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K%	Rp%		
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			2.032.852		124.660		456.125						580.785	0	2,86		
			Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	6		0		0						0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)	4		0		0						0		0			
				Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	1		0		0						0		0			
		5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			1.117.160		85.940		255.411						341.351	0	3,06		
			Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	6		0		0						0		0			
		5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi			886.476		38.720		178.679						217.399	0	2,45		
			Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)	4		0		0						0		0			
		5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan			29.217		-		22.035						22.035	0	7,54		
			Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	1		0		0						0		0			
		5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			3.820		-		-						-	0	0		
			Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1		0		0						0		0			
		5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			3.820		-		-						-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1		0		0						0		0			
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			485.937		54.570		316.103						370.673	0	7,63		
			Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1		0		0						0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	1		0		0						0		0			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
						I		II		III		IV							
1	2 3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
				K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K%	Rp%		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1		0		0						0		0			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	7		0		0						0		0			
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			31.551		-		25.769						25.769	0	8,17		
		Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1		0		0						0		0			
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			254.802		54.570		268.015						322.585	0	12,66		
		Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	1		0		0						0		0			
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			10.235		-		22.319						22.319	0	21,81		
		Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1		0		0						0		0			
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			189.348		-		-						-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	7		0		0						0		0			
	JUMLAH				**6.032.780**		**783.124**		**1.002.595**						**1.785.719**				
	Rata-rata capaian kinerja (%)															**40,05**	**29,6**		**SUB KEGIATAN**
	Predikat kinerja															**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
	Rata-rata capaian kinerja (%)															**0**			**PROGRAM**
	Predikat kinerja															**Sangat Rendah**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA-SKPD berikutnya	:	

Terdapat 2 (dua) program yang terdapat pada Badan Riset dan Inovasi Daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Seluruh program telah terealisasi sesuai dengan target pada tahun 2023. Faktor pendukung keberhasilan tercapainya target kinerja pada program, kegiatan, dan subkegiatan antara lain:

1) Pelaksanaan kegiatan telah dilakukan sesuai dengan tahapan dan jadwal perencanaan dan penganggaran
2) Komitmen pimpinan kepala PD beserta pejabat struktural untuk melaksanakan kegiatan kelitbangan sesuai dengan target yang telah ditentukan.
3) Melakukan koordinasi dan diskusi intensif dengan PD Provinsi dan Kab/Kota terkait dengan kegiatan litbang yang dibutuhkan.
4) Pengembangan budaya/kultur iptek dan inovasi melalui pendekatan multi sektor, pendidikan, dukungan teknologi dan informasi, adanya kompetisi dan penghargaan, serta penguatan ekosistem system inovasi daerah.

2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023

Capaian hasil pelaksanaan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah hingga tahun 2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.1 di atas pada subbab 2.1.1.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja pelayanan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan IKK (Indikator Kinerja Kunci) Badan Riset dan Inovasi Daerah hingga tahun berjalan 2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)
1.	Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan (%)	-	Rekomendasi Kebijakan	45%	50%	75%	80%	43%	100%	70%	75%	
2.	Indeks Inovasi Daerah (indeks)	-	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat inovatif	

Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan sebesar 100 persen dimana target sesuai renstra sebesar 45 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2023 indikator kinerja pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan telah mencapai target. Pada Tahun 2023, kajian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan sebanyak 6 (enam) kajian, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kajian/Analisis/Penelitian	Tahun	Keterangan
1	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan	2023	Termanfaatkan
2	Kajian Roadmap Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Lampung Selatan	2023	Termanfaatkan
3	Kajian Pengembangan Pariwisata Pantai Teluk Nipah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan	2023	Termanfaatkan
4	Kajian Pengembangan Pariwisata Way Belerang di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan	2023	Termanfaatkan
5	Kajian Keekonomian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Lahan Agrowisata Kalianda Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	2023	Termanfaatkan
6	Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023-2026	2023	Termanfaatkan

Berdasarkan 6 (enam) kajian tersebut, seluruh kajian yang termanfaatkan dan akan dijadikan dasar perumusan kebijakan. Selain itu, Indikator kinerja Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023 telah melebihi target yang diharapkan dimana Kabupaten Lampung Selatan memproleh predikat Kabupaten ***Sangat Inovatif*** dengan menempati peringkat ***28 dari 415 Kabupaten Se-Indonesia*** dengan nilai Indeks Inovasi Daerah sebesar 62,06.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Badan Riset dan Inovasi Daerah memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah memberikan pelayanan dalam proses fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan daerah, pembinaan dan pelaksanaan

tugas di bidang penelitian dan pengembangan daerah maka Badan Riset dan Inovasi Daerah memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis penelitian dan pengembangan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Riset dan Inovasi Daerah harus didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan pendidikan tinggi. Berdasarkan capaian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah, maka harapan Badan Riset dan Inovasi Daerah selaku perangkat daerah penyusun rekomendasi kebijakan/*Policy Brief* Bidang Penelitian dan Pengembangan kedepannya dapat termanfaatkan hingga mencapai 100 persen kajian yang telah dilaksanakan sehingga sesuai dengan kebutuhan permasalahan daerah. Selain itu, Indeks Inovasi Daerah terus digalakkan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk mencapai dan mempertahankan Kabupaten Lampung Selatan menjadi Kabupaten yang Sangat inovatif. Isu-isu strategis yang terdapat pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan antara lain:

1. Perlu dukungan fasilitasi terkait pembinaan untuk mewujudkan peningkatan Indeks Inovasi Daerah agar lebih di tingkatkan lagi serta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah dapat menjalin kerjasama yang baik dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah;
2. Persentase Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2022 yang dijadikan Rekomendasi Kebijakan Bupati 67%, oleh karena itu kualitas Kajian harus lebih baik dan bermanfaat dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam bidang Penelitian dan Pengembangan
3. Kualitas SDM, tidak adanya Fungsional Peneliti, sehingga tidak semua kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah serta kajian dilakukan secara mandiri oleh peneliti Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja PD Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan PD. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD

dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan

Nama Perangkat Daerah : Badan Riset dan Inovasi Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Lampung Selatan	Indeks Kepuasan Pelayanan		**5.760.000.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Lampung Selatan	Indeks Kepuasan Pelayanan		**4.127.549.000**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Lampung Selatan	**Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11 Dokumen**	**100.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Lampung Selatan	**Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11 Dokumen**	**34.819.400**	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	9.948.400	
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Lampung Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Lampung Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.974.200	
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.974.200	
d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Lampung Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Lampung Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.974.200	
e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.974.200	
f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lampung Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	6 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lampung Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	6 Laporan	4.974.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Lampung Selatan	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bulan**	**4.350.000.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Lampung Selatan	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bulan**	**2.858.574.950**	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.600.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.409.526.250	
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	650.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	420.729.600	
c	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	20.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	4.974.200	
d	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	4.974.200	
e	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lampung Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lampung Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.422.300	
f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lampung Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lampung Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	4.974.200	
g	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4.974.200	
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Lampung Selatan	**Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**80.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Lampung Selatan	**Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**19.896.800**	
a	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan	Lampung Selatan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan	Lampung Selatan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.974.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Barang Milik Daerah SKPD					Barang Milik Daerah SKPD					
b	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	20.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.974.200	
c	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lampung Selatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lampung Selatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.974.200	
d	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lampung Selatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lampung Selatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.974.200	
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Lampung Selatan	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Bulan**	**90.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Lampung Selatan	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Bulan**	**46.232.100**	
a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Lampung Selatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	50.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Lampung Selatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	27.800.000	
b	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	20.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	9.509.700	
c	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	20.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	8.922.400	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Lampung Selatan	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**Bulan**	**700.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Lampung Selatan	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**Bulan**	**722.995.750**	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lampung Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lampung Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.357.600	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lampung Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lampung Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	46.117.000	
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lampung Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lampung Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.172.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lampung Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	120.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lampung Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	115.450.900	
e	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lampung Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	130.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lampung Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	132.190.950	
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9.000.000	
g	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lampung Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lampung Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	26.890.000	
h	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	300.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	369.816.400	
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Lampung Selatan	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**5 Unit**	**100.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Lampung Selatan	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**5 Unit**	**91.720.000**	
a	Pengadaan Mebel	Lampung Selatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	50.000.000	Pengadaan Mebel	Lampung Selatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	59.900.000	
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lampung Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lampung Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	31.820.000	
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Lampung Selatan	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**12 Laporan**	**120.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Lampung Selatan	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**12 Laporan**	**103.000.000**	
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lampung Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lampung Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	103.000.000	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Lampung Selatan	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**44 Unit**	**220.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Lampung Selatan	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**44 Unit**	**250.310.000**	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lampung Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lampung Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.530.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lampung Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lampung Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	89.280.000	
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lampung Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lampung Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	16.500.000	
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lampung Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lampung Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	
II	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Lampung Selatan	**Persentase terpenuhinya aspek kuantitas dalam kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah**		**3.175.000.000**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Lampung Selatan	**Persentase terpenuhinya aspek kuantitas dalam kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah**		**3.198.104.000**	
1	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Lampung Selatan	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**5 Laporan**	**2.250.000.000**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Lampung Selatan	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**5 Laporan**	**2.099.133.600**	
a	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Lampung Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	1.500.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Lampung Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	1.412.066.800	
b	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Lampung Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	600.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Lampung Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	587.066.800	
c	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola	1 Laporan	150.000.000	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola	1 Laporan	100.000.000	
2	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Lampung Selatan	**Uji Coba dan Penerapan Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Laporan**	**925.000.000**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Lampung Selatan	**Uji Coba dan Penerapan Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Laporan**	**1.098.970.400**	
a	Penelitian, Pengembangan, dan	Lampung Selatan	Jumlah dokumen hasil Penelitian,	Laporan	200.000.000	Penelitian, Pengembangan, dan	Lampung Selatan	Jumlah dokumen hasil Penelitian,	Laporan	320.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			
b	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Lampung Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	200.000.000	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Lampung Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	175.000.000	
c	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Lampung Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	25.000.000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Lampung Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	14.769.600	
d	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Lampung Selatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	200.000.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Lampung Selatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	309.200.800	
e	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Lampung Selatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	300.000.000	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Lampung Selatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	280.000.000	
	JUMLAH				**8.935.000.000**	**JUMLAH**				**7.325.653.000**	

BAB III.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Perumusan program dan kegiatan di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya kebutuhan di masa yang akan datang dalam upaya optimalisasi penelitian dan pengembangan daerah. Rencana kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 mencakup ***2 program*** dan terdiri dari ***10 kegiatan*** dan ***43 Sub Kegiatan*** dengan anggaran sebesar ***Rp7.325.653.000 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).***

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan ;
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan ;
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
      - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

   c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan ;

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan ;
   - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan ;
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan ;
   - Pengadaan Mebel
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan;
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan ;

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah:

1) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan Sub Kegiatan ;
   - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
   - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
   - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

2) Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan Sub Kegiatan ;
   - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
   - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
   - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
   - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
   - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Rumusan rencana kerja program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 untuk sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi Lampung dan APBN secara detail sebagai berikut:

Seluruh nilai pada kolom Rp dikalikan 1.000

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Lampung Selatan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu (Rp)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
Badan Riset dan Inovasi Daerah								**7.325.653.000**				**8.380.000.000**
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								**7.325.653.000**				**8.380.000.000**
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								**7.325.653.000**				**8.380.000.000**
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								**3.198.104.000**				**3.475.000.000**
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								**2.099.133.600**				**2.250.000.000**
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase terpenuhinya aspek kuantitas dalam kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 %	2 Laporan	4 Laporan	1.412.066.800	DAU SG PENDIDIKAN		2 Laporan	1.500.000.000
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Persentase terpenuhinya aspek kuantitas dalam kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 %	1 Laporan	4 Laporan	587.066.800	DAU SG PENDIDIKAN		1 Laporan	600.000.000
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase terpenuhinya aspek kuantitas dalam kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola	Laporan Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 %	1 Laporan	4 Laporan	100.000.000	DAU SG PENDIDIKAN		1 Laporan	150.000.000
Pengembangan Inovasi dan Teknologi								**1.098.970.400**				**1.225.000.000**
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Uji Coba dan Penerapan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Inovatif Indeks	1 Dokumen	6 Laporan	320.000.000	DAU SG PENDIDIKAN		1 Dokumen	350.000.000
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Uji Coba dan Penerapan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Inovatif Indeks	1 Laporan	6 Laporan	175.000.000	DAU SG PENDIDIKAN		1 Laporan	200.000.000
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Uji Coba dan Penerapan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Inovatif Indeks	1 Laporan	6 Laporan	14.769.600	BPHTB		1 Laporan	25.000.000
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Uji Coba dan Penerapan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Inovatif Indeks	2 Laporan	6 Laporan	309.200.800	DTU-DAU		2 Laporan	350.000.000
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Uji Coba dan Penerapan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Inovatif Indeks	1 Laporan	6 Laporan	280.000.000	DAU SG PENDIDIKAN		1 Laporan	300.000.000
							TOTAL	**7.325.653.000**				**8.380.000.000**

Seluruh nilai pada kolom Rp dikalikan 1.000

Tabel 3.2 RKPD PERUBAHAN Tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.0.00.0.00.01.0000	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**							**5.656.716.600,00**	**8.746.940.600,00**	**5.688.424.050,00**	**31.707.450,00**							**7.420.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**5.656.716.600,00**	**8.746.940.600,00**	**5.688.424.050,00**	**31.707.450,00**							**7.420.000.000,00**	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**5.656.716.600,00**	**8.746.940.600,00**	**5.688.424.050,00**	**31.707.450,00**							**7.420.000.000,00**	
1.	**5.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**				**80 Poin**	**80 Poin**	**3.657.628.250,00**	**4.047.852.250,00**	**3.615.815.500,00**	**-41.812.750,00**					**Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan**		**4.770.000.000,00**	
	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	50.000.000,00	37.520.200,00	29.012.200,00	-20.987.800,00							100.000.000,00	
	5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	16.770.200,00	11.070.200,00	-8.929.800,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	3.596.000,00	-1.404.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	3.596.000,00	-1.404.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	-4.250.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	2.761.563.850,00	2.866.319.850,00	2.866.319.850,00	104.756.000,00							3.490.000.000,00	

Seluruh nilai pada kolom Rp dikalikan 1.000

	5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.391.793.850,00	2.447.217.850,00	2.447.217.850,00	55.424.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			3.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Seluruh nilai pada kolom Rp dikalikan 1.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				12 Dokumen	12 Dokumen	344.370.000,00	397.170.000,00	397.170.000,00	52.800.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			450.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	11.532.000,00	11.532.000,00	-3.468.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*				2 Laporan	2 Laporan	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,00	9.000.000,00	8.262.000,00	-6.738.000,00							30.000.000,00	
	5.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*				1 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	2.500.000,00	1.762.000,00	-3.238.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	-3.500.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	41.310.000,00	36.714.500,00	10.674.500,00	-30.635.500,00							60.000.000,00	
	5.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				2 Paket	0 Paket	26.040.000,00	26.040.000,00	0,00	-26.040.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			40.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*				3 Dokumen	3 Dokumen	15.270.000,00	10.674.500,00	10.674.500,00	-4.595.500,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Seluruh nilai pada kolom Rp dikalikan 1.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	343.783.400,00	665.846.900,00	297.642.700,00	-46.140.700,00							650.000.000,00	
	5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	5.380.000,00	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	6.632.200,00	13.264.400,00	6.632.200,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			25.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				6 Paket	3 Paket	79.777.200,00	171.883.400,00	73.750.900,00	-6.026.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			120.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				6 Paket	3 Paket	47.530.000,00	125.205.100,00	33.965.600,00	-13.564.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			130.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				1 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			40.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	8 Laporan	187.464.000,00	336.114.000,00	163.914.000,00	-23.550.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			300.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah				29 Unit	18 Unit	143.661.000,00	126.911.000,00	72.124.000,00	-71.537.000,00							100.000.000,00	
	5.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				22 Unit	13 Unit	70.225.000,00	53.475.000,00	21.087.000,00	-49.138.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Seluruh nilai pada kolom Rp dikalikan 1.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				7 Unit	5 Unit	73.436.000,00	73.436.000,00	51.037.000,00	-22.399.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Laporan	12 Laporan	102.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00							120.000.000,00	
	5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	102.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			120.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara				43 Unit	44 Unit	200.310.000,00	203.539.800,00	229.780.250,00	29.470.250,00							220.000.000,00	
	5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	44.530.000,00	44.530.000,00	44.530.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				3 Unit	4 Unit	89.280.000,00	89.280.000,00	89.280.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			100.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				37 Unit	37 Unit	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			20.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				2 Unit	3 Unit	50.000.000,00	53.229.800,00	79.470.250,00	29.470.250,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase terpenuhinya aspek kuantitas dalam kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah**				**75 %**	**75 %**	**1.999.088.350,00**	**4.699.088.350,00**	**2.072.608.550,00**	**73.520.200,00**					**Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan**		**2.650.000.000,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				5 Laporan	5 Laporan	973.117.950,00	3.213.117.950,00	1.582.851.750,00	609.733.800,00							1.450.000.000,00	
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum*				3 Laporan	2 Laporan	742.066.800,00	1.892.066.800,00	487.159.500,00	-254.907.300,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			1.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Seluruh nilai pada kolom Rp dikalikan 1.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi*				1 Laporan	4 Laporan	160.000.000,00	1.243.401.150,00	1.066.475.750,00	906.475.750,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			300.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	*Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik*				1 Laporan	1 Laporan	71.051.150,00	77.650.000,00	29.216.500,00	-41.834.650,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			150.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				-	1 Dokumen	350.000.000,00	210.000.000,00	3.820.000,00	-346.180.000,00							350.000.000,00	
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup*				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	210.000.000,00	3.820.000,00	-346.180.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			350.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Uji Coba dan Penerapan Pengembangan Inovasi dan Teknologi				5 Laporan	10 Laporan	675.970.400,00	1.275.970.400,00	485.936.800,00	-190.033.600,00							850.000.000,00	
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	190.073.000,00	461.406.000,00	31.551.400,00	-158.521.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			350.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif*				2 Laporan	1 Laporan	169.602.400,00	403.755.400,00	143.651.000,00	-25.951.400,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			150.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan*				1 Laporan	1 Laporan	36.295.000,00	36.295.000,00	26.057.400,00	-10.237.600,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			50.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual*				1 Laporan	7 Laporan	280.000.000,00	374.514.000,00	284.677.000,00	4.677.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			300.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	J U M L A H								**5.656.716.600,00**	**8.746.940.600,00**	**5.688.424.050,00**	**31.707.450,00**							**7.420.000.000,00**	

3.1 Sinkronisasi Prioritas Perangkat Daerah dengan Prioritas Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan Prioritas Badan Riset dan Inovasi Daerah sebanyak 1 Program dan 2 Kegaiatan dengan total anggaran sebesar Program Prioritas sebesar Rp3.198.104.000 ***(Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Ribu Rupiah)*** pada tahun anggaran 2025. Dasar pertimbangan penetapan Program/Kegaiatan prioritas adalah memperhatikan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 yang lebih ditekankan pada penguatan ekosistem riset dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan dan mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU).

Adapun rincian Program/Kegiatan/Subkegiatan sebagai adalah sebagai berikut:

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah:

1) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan Sub Kegiatan ;
   a. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
   b. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
   c. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
2) Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan Sub Kegiatan ;
   a. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
   b. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
   c. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
   d. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
   e. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Tabel 3.2. Sinkronisasi Prioritas Perangkat Daerah dengan Prioritas Daerah Tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan

No	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Reformasi Birokrasi	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Dana Alokasi Umum (DAU) SG Pendidikan	1.412.066.800	
				Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Keuangan Dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Dana Alokasi Umum (DAU) SG Pendidikan	587.066.800	
				Pengelolaan Data Kelitbangan Dan Peraturan	Dana Alokasi Umum (DAU) SG Pendidikan	100.000.000	
			Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, Dan Perekayasaan Di Bidang Teknologi Dan Inovasi	Dana Alokasi Umum (DAU) SG Pendidikan	320.000.000	
				Uji Coba Dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi Dan Invensi Di Bidang Difusi Inovasi Dan Penerapan Teknologi	Dana Alokasi Umum (DAU) SG Pendidikan	175.000.000	
				Diseminasi Jenis, Prosedur Dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum	14.769.600	
				Sosialisasi Dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum	309.200.800	
				Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Dana Alokasi Umum (DAU) SG Pendidikan	280.000.000	

Tabel 3.3. Sinkronisasi Prioritas Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan

No	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan (%)	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Dana Alokasi Umum (DAU) SG Pendidikan	1.412.066.800	
				Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Keuangan Dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Dana Alokasi Umum (DAU) SG Pendidikan	587.066.800	
				Pengelolaan Data Kelitbangan Dan Peraturan	Dana Alokasi Umum (DAU) SG Pendidikan	100.000.000	
2	Indeks Inovasi Daerah (indeks)	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, Dan Perekayasaan Di Bidang Teknologi Dan Inovasi	Dana Alokasi Umum (DAU) SG Pendidikan	320.000.000	
				Uji Coba Dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi Dan Invensi Di Bidang Difusi Inovasi Dan Penerapan Teknologi	Dana Alokasi Umum (DAU) SG Pendidikan	175.000.000	
				Diseminasi Jenis, Prosedur Dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum	14.769.600	
				Sosialisasi Dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum	309.200.800	
				Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Dana Alokasi Umum (DAU) SG Pendidikan	280.000.000	

BAB IV
PENUTUP

Failing to plan is planning to fail; kegagalan kita dalam merencanakan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan sama dengan merencanakan kegagalan Badan Riset dan Inovasi Daerah .

Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2025 Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025.

Renja PD ini harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2025.

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Sealatan dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk *proving* (membuktikan) kinerja dan untuk *improving* (memperbaiki) kinerja.

Saat penjabaran Renja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya.

Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Pelajaran yang kita dapatkan dari pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalitas pencapaian target tahunan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2025.

Demikian Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu meridhai semua langkah kita. Aamiin … Aamiin YRA.

Kalianda, 14 Juli 2025
Kepala Badan Riset Dan Inovasi Daerah

MUHAMMAD YUSUP, S.STP.,M.M.
NIP. 198402112003121001

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dankegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan **J**angka Menengah Daerah (RP**J**MD) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah. Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja Perubahan yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Kalianda, 23 Juni 2025
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Drs. WAHIDIN AMIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19741215 199503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**
BAB I PENDAHULUAN **7**
1.1 Latar Belakang 7
1.2 Landasan Hukum 11
1.3 Maksud Dan Tujuan 13
1.3.1 Maksud 13
1.3.2 Tujuan 13
1.4 Sistematika Penulisan 14
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II **16**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Triwulan II 16
2.1.1.Analisa Akuntabilitas Keuangan 17
2.1.2 Analisa Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 28
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 32
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD selaku PDmaupun SKPKD 38
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH **53**
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 53
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PerubahanPerangkat Daerah 54
3.3 Program Dan Kegiatan 57
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **63**
BAB V PENUTUP **77**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Renja Perubahan PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 9
Gambar 1.2 Tindak Lanjut Renja Perubahan dalam Penyusunan APBD 11

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra BPKAD Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 19

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Utama BPKAD Kabupaten Lampung Selatan 32

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Program BPKAD Kabupaten Lampung Selatan 34

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Lampung Selatan 37

Tabel 2.4 Review Terhadap Renja Tahun 2025 BPKAD Kabupaten Lampung Selatan 41

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Sesuai Dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2025 56

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 64

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, parsitipatif dan *top down/bottom up*.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Menteri Dalam Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yaitu untuk menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan,pemberian kode, dan daftar penamaan menuju "*single codebase*" yang akan digunakan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Untuk itu telah diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan

Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan. Informasi dimaksud digunakan untuk:

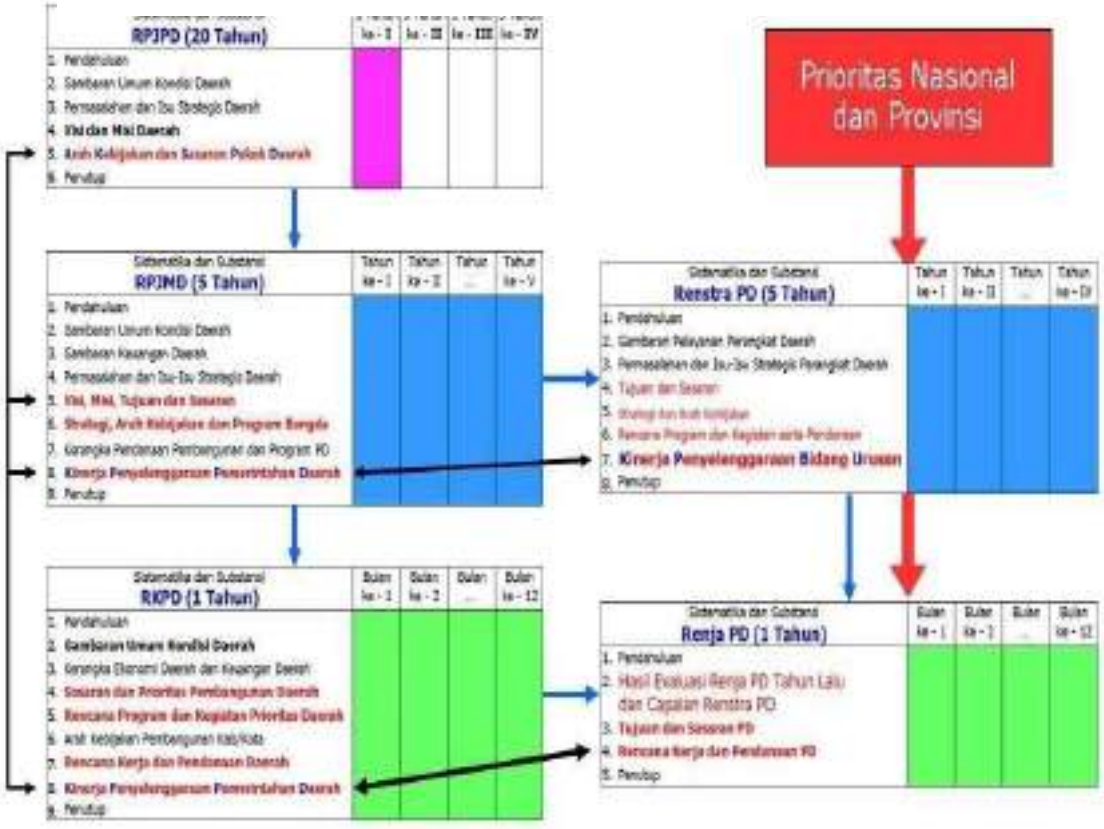
a. membantu kepala daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
b. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
c. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah;
d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
f. mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan
g. melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah adalah rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

kebijakan daerah yang bersifat spesifik, yaitu di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah demi mewujudkan target RPJMD Kabupaten lampung Selatan, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Lihat gambar 1.1.

Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Lihat gambar 1.2.

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Renja Perubahan PD dengan DokumenPerencanaan Pembangunan Daerah

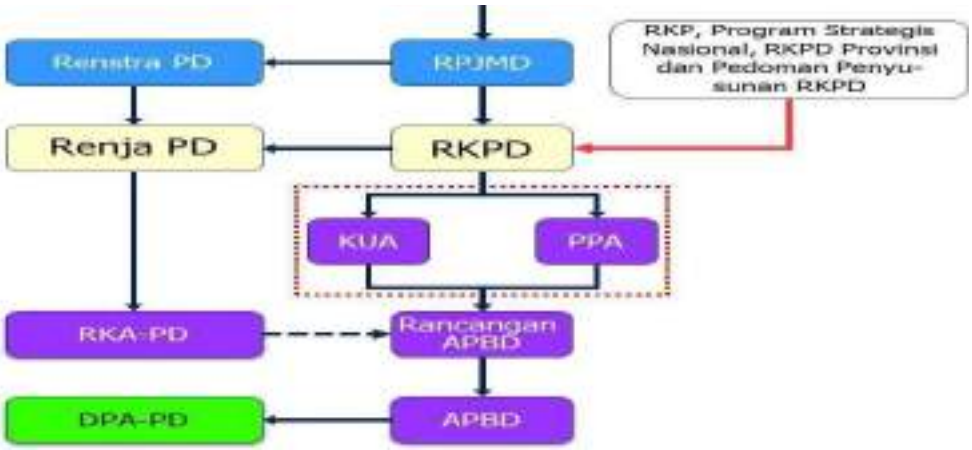


Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja Perubahan,
2. Penyusunan Renja Perubahan berpedoman pada Renstra dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Triwulan II.
3. Penyusunan Rancangan Renja Perubahan berdasarkan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Renja Perubahan,
4. Pembahasan Rancangan Renja Perubahan dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perubahan berdasarkan Perkada tentang RKPD Perubahan,

Sedangkan tindak lanjut dokumen Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2.

Gambar 1.2 Tindak Lanjut Renja Perubahan dalam Penyusunan APBD



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
k. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ Tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
l. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMDProvinsi Lampung Tahun 2019-2025;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;

o. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
p. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
q. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan memberikan koridor dalam perumusan pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang. Dalam rangka mendukung visi dan misi ke 5 (lima) Bupati Lampung Selatan serta dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran tahun sebelumnya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 ini adalah:

a. menjabarkan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) Tahun 2025:
b. sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung

Selatan Tahun 2025;

c. meningkatkan akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah dan Laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan hukum

1.3 Maksud dan Tujuan, dan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT D AERAH TRIWULAN II

Bab ini memuat :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Triwulan II

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PerubahanPerangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Di samping itu Rencana Kerja ini juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan di tahun sebelumnya. Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Renstra Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025-2029 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai upaya mendukung visi dan misi Bupati Lampung Selatan. Pelaksaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ini serta dapat mejadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Selatan.

Demikian Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 ini. Diharapkan Rencana Kerja ini dapat menjadi dokumen perencanaan tahunan yang bisa menjadi pedoman bagi seluruh

penyelenggara tugas pokok dan fungsi Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik, transparan, bersih, akuntabel, efektif, dan profesional.

Kalianda, 23 Juni 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



Drs. WAHIDIN AMIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19741215 199503 1 003

RENCANA KERJA PERUBAHAN

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TAHUN 2025



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan 3

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 ..... **5**

BAB III TUJUAN DAN SASARAN **15**

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD 15

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **18**

BAB V PENUTUP **42**

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah periode tahun 2021-2026, dimana sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu Satuan Kerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2016 yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka tugas pokok Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupeten Lampung Selatan memiliki tugas

pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pendapatan daerah. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati ;
2. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah
4. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta BPHTB;
5. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pajak daerah lainnya;
6. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pajak daerah lainnya;
7. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap dana perimbangan dan lain – lain pendapatan daerah;
8. Pemberian dan pengendalian untit pelaksana teknis;
9. Pengelola urusan kesekretariatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Jabatan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris membawahi :
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
    c. Sub Bagian Keuangan dan Asset
3. Bidang Pengembangan dan Penetapan, membawahi :
    a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pengembangan

b. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan
c. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian

4. Bidang PBB P2 dan BPHTB, membawahi :
   a. Sub Bidang PBB P2
   b. Sub Bidang BPHTB dan
   c. Sub Bidang Pelayanan dan Pengolahan Data
5. Bidang Penagihan, membawahi :
   a. Sub Bidang Penagihan
   b. Sub Bidang Keberatan dan Banding
   c. Sub Bidang Pembinaan dan Penyuluhan
6. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi :
   a. Sub Bidang Pembukuan
   b. Sub Bidang Pelaporan Pajak dan Retribusi
   c. Sub Bidang Informasi data dan Dokumentasi
7. Unit Pelaksana Teknis; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

I.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 merupakan penjabaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam tahun anggaran 2025. Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 memberikan gambaran tentang tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja dan pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 antara lain adalah :

1. Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025.
2. Untuk meningkatkan sinergitas dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendapatan daerah.
3. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga merupakan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta dasar perencanaan program dan kegiatan mendatang sehingga dapat terlaksana lebih efektif, dan efisien.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber – sumber penerimaan khususnya dari sektor pajak.

Adapun target dan realisasi Triwulan II Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Target dan Realisasi Pendapatan

NO	JENIS PAJAK	TARGET (RP)	REALISASI TW II (RP)	%
1	Pajak Reklame	2.650.000.000	1.157.749.411	43,69
2	Pajak Air Tanah	9.100.000.000,00	646.354.064	36,93
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.250.000.000,00	1.565.533.780	26,09
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.500.000.000,00	38.887.653.230	59,83
5	Bea Perolehan Hak Tanah dan	76.800.000.000,00	13.133.648.422	35,50

NO	JENIS PAJAK	TARGET (RP)	REALISASI TW II (RP)	%
	Bangunan			
6	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	2.750.000.000,00	40.478.540.025	44,19
7	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000.000,00	17.158.173.469	85,79
8	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.000.000.000,00	14.213.583.780	129,41
	JUMLAH	**234.983.010.366**	**127.241.236.181**	**54,15**

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak daerah pada Triwulan II sebesar Rp. 127.241.236.181 atau 54,15% dari target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak daerah pada Triwulan II tahun 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan realisasi Triwulan II tahun 2024 sebesar 46,26%. Hal ini dapat terjadi salah satu faktornya karena adanya sumber pendapatan pajak daerah yang baru dikelola di Tahun 2025 yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam optimalisasi penerimaan daerah antara lain perubahan perekonomian yang naik turun secara cepat sebagai salah satu faktor yang mengganggu sektor penerimaan dalam hal ini kemampuan bayar wajib pajak, rendahnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah, serta meningkatnya tuntutan masyarakat untuk pelayanan perpajakan yang cepat, mudah dan dapat dijangkau. Selain itu adanya efisiensi anggaran pada belanja makan minum juga mempengaruhi penerimaan dari sektor PBJT – Jasa Boga. Isu kenaikan listrik di awal tahun 2025 yang dilanjutkan dengan pemberian diskon listrik 50% juga mempengaruh penurunan penerimaan pajak daerah dari sektor PBJT – Tenaga Listrik. Dengan adanya permasalahan tersebut memberikan dampak melambatnya optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah.

Dari sisi Belanja daerah, adapun target dan realisasi belanja sampai dengan Triwulan II Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Target dan Realisasi Belanja

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	30.862.912.167,00	9.073.257.663,00	29,40
2	Belanja Modal	1.593.163.600,00	187.570.000,00	11,77

Dengan rincian belanja langsung sebagai berikut :

Tabel 2.3. Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II

Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025

Perangkat Daerah: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d TW II Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KEUANGAN				**32.456.075.767**		**9.507.817.113**		**29,29%**	
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**0,00 Poin**	**26.591.510.417**	**0,00 Poin**	**7.151.834.711**	**0,00%**	**26,90%**	**BPPRD**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11 Dok**	**188.990.200**	**4 Dok**	**63.607.900**	**36,36%**	**33,66%**	**BPPRD**
	Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	32.343.700	2 Dok	28.657.650	66,67%	88,60%	BPPRD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	31.955.250	1 Dok	25.850.250	100,00%	80,90%	BPPRD

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d TW II Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	35.305.950	0 Dok	0	0,00%	0,00%	BPPRD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	27.782.750	1 Dok	9.100.000	100,00%	32,75%	BPPRD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	29.463.450	0 Dok	0	0,00%	0,00%	BPPRD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	32.139.100	0 Lap	0	0,00%	0,00%	BPPRD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**12 Dok**	**23.533.204.917**	**11 Dok**	**6.296.916.922**	**91,67%**	**26,76%**	**BPPRD**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/Bln	19.053.887.113	69 Orang/Bln	5.256.769.352	100,00%	27,59%	BPPRD

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d TW II Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	4.383.774.404	6 Dok	972.035.900	50,00%	22,17%	BPPRD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	25.520.500	1 Lap	25.414.420	100,00%	99,58%	BPPRD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Lap	70.022.900	8 Lap	42.697.250	47,06%	60,98%	BPPRD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**48.870.000**	**0,00 %**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**BPPRD**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	181 Paket	48.870.000	0 Paket	0	0,00%	0,00%	BPPRD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100 %**	**495.294.200**	**37,70 %**	**125.702.950**	**37,70%**	**25,38%**	**BPPRD**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d TW II Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.672.000	1 Paket	15.564.150	25,00%	99,31%	BPPRD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 Paket	40.356.900	4 Paket	22.934.300	15,38%	56,83%	BPPRD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33 Paket	103.166.600	16 Paket	34.160.150	48,48%	33,11%	BPPRD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	180.703.700	12 Paket	32.619.350	50,00%	18,05%	BPPRD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	18.000.000	6 Dok	9.000.000	50,00%	50,00%	BPPRD
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	32 Lap	24.975.000	16 Lap	10.665.000	50,00%	42,70%	BPPRD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Lap	112.420.000	21 Lap	760.000	25,00%	0,68%	BPPRD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**12 Lap**	**321.600.000**	**6 Lap**	**141.811.532**	**50,00%**	**44,10%**	**BPPRD**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d TW II Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	321.600.000	6 Lap	141.811.532	50,00%	44,10%	BPPRD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**62 Unit**	**1.593.163.600**	**28 Unit**	**375.140.000**	**45,16%**	**23,55%**	**BPPRD**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan	2 Unit	945.000.000	0 Unit	0	0,00%	0,00%	BPPRD
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	5.860.000	0 Unit	0	0,00%	0,00%	BPPRD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	57 Unit	642.303.600	28 Unit	375.140.000	49,12%	58,41%	BPPRD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**80 unit**	**410.387.500**	**35 unit**	**148.655.407**	**43,75%**	**36,22%**	**BPPRD**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	44.930.000	0 unit	19.839.949	0,00%	44,16%	BPPRD

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d TW II Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	279.267.500	10 unit	105.115.458	50,00%	37,64%	BPPRD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 unit	61.190.000	24 unit	13.700.000	41,38%	22,39%	BPPRD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	25.000.000	1 unit	10.000.000	100,00%	40,00%	BPPRD
2.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Proporsi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**57,00 %**	**5.864.565.350**	**0,00 %**	**2.355.982.402**	**0,00%**	**40,17%**	**BPPRD**
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	**Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah**	**13,50 %**	**5.864.565.350**	**0,00 %**	**2.355.982.402**	**0,00%**	**40,17%**	**BPPRD**
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dok	1.262.303.400	1 Dok	1.177.941.100	100,00%	93,32%	BPPRD
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dok	127.973.500	1 Dok	11.049.299	100,00%	8,63%	BPPRD
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Lap	336.720.500	2 Lap	118.838.900	100,00%	35,29%	BPPRD

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d TW II Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	16 Unit	592.700.200	8 Unit	247.837.900	50,00%	41,82%	BPPRD
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	6 Lap	542.734.600	3 Lap	122.864.850	50,00%	22,64%	BPPRD
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Lap	80.471.150	2 Lap	33.185.100	66,67%	41,24%	BPPRD
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	6 Obyek Pajak	1.128.568.200	3 Obyek Pajak	380.291.100	50,00%	33,70%	BPPRD
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	8 Dok	827.633.500	4 Dok	39.558.380	50,00%	4,78%	BPPRD
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	8 Layanan	50.790.300	4 Layanan	22.490.000	50,00%	44,28%	BPPRD
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	8 Dok	114.849.200	4 Dok	28.864.750	50,00%	25,13%	BPPRD

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d TW II Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	7 Jenis pajak	367.662.700	4 Jenis pajak	111.615.400	57,14%	30,36%	BPPRD
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	7 Dok	17.460.150	0 Dok	0	0,00%	0,00%	BPPRD
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	7 Dok	319.381.200	3 Dok	54.342.323	42,86%	17,01%	BPPRD
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Lap	64.150.000	0 Lap	0	0,00%	0,00%	BPPRD
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Lap	31.166.750	1 Lap	7.103.300	100,00%	22,79%	BPPRD

Berdasarkan Tabel 2.3 maka dapat dianalisis bahwa dari target kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada RKPD Tahun 2025 dan telah dijabarkan pada DPA Tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II capaian kinerja belum tercapai sesuai target. Hal ini terjadi dikarenakan adanya penyesuaian ulang target sebagai dampak dari efisiensi anggaran.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing – masing misi. Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan adalah:

“Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Partisipatif, Taat Hukum, Responsif, dan Transparan”

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam pengelolaan pajak daerah, sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah

“Meningkatnya kemandirian fiskal daerah”

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sesuai Dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026

NO	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL RPJMD	KONDISI AKHIR RPJMD	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
									2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan yang Berintegritas, Maju dan Sejahtera dengan Semangat Gotong Royong	Misi Kelima : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayan publlik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel	Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Partisipatif, Taat Hukum, Responsif, dan Transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	12,56%	13,50%	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan	12,75%	12,79%	13%	13,20%	13,50%	13,50%

Tabel 3.2 Indikator Sasaran Perangkat Daerah Sesuai Dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						KONDISI AKHIR RENSTRA PD
										2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Mewujudkan kemandirian keuangan daerah dan Tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan profesional dalam Pengelolan pendapatan asli daerah	Persentase potensi pendapatan daerah meningkat	12,56%	13,50%	Meningkatnya potensi pendapatan daerah	Meningkatnya Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah	Meningkat-kan Potensi Pendapatan Daerah	Persentase potensi pendapatan daerah meningkat	Jumlah potensi pendapatan th (n) - Jumlah potensi pendapatan th (n-1)/Jumlah potensi pendapatan th (n-1)*100%	12,75%	12,79%	13%	13,20%	13,50%	13,50%	13,50%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Tahun berjalan 2025 Rencana Kerja (Renja) awal yang telah tertuang di dalam DPA Perangkat Daerah khususnya pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terdapat beberapa kegiatan yang diperlukan untuk dilakukan perubahan karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan disaat kegiatan berjalan. Dengan kondisi tersebut Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menyampaikan beberapa perubahan anggaran baik yang terjadi pergeseran antar belanja maupun kebutuhan kekurangan anggaran untuk kegiatan yang mendukung rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan.

TABEL 4.1. PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah /(Berkurang)
								Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							
5	**02**				**KEUANGAN**				**32.456.075.767**		**31.237.973.338**	**(1.218.102.429)**
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**Lampung Selatan**	**80 Poin**	**26.591.510.417**	**80 Poin**	**26.515.851.588**	**(121.032.829)**
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah**	**Kalianda**	**11 Dokumen**	**188.990.200**	**11 Dokumen**	**136.441.900**	**(52.548.300)**
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kalianda	3 Dokumen	32.343.700	3 Dokumen	28.693.700	(3.650.000)

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah /(Berkurang)
								Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kalianda	1 Dokumen	31.955.250	1 Dokumen	25.875.250	(6.080.000)
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kalianda	1 Dokumen	35.305.950	1 Dokumen	18.375.850	(16.930.100)
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kalianda	1 Dokumen	27.782.750	1 Dokumen	21.169.200	(6.613.550)

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah /(Berkurang)
								Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Kalianda	1 Dokumen	29.463.450	1 Dokumen	13.540.300	(15.923.150)
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kalianda	4 Laporan	32.139.100	4 Laporan	28.787.600	(3.351.500)
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu**	**Lampung Selatan**	**19 Dokumen yang ditargetkan dalam satu tahun**	**23.533.204.917**	**12 Dokumen**	**24.918.746.088**	**1.340.167.171**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah /(Berkurang)
								Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Selatan	69 orang/ bulan	19.053.887.113	69 orang/bulan	19.758.856.702	704.969.589
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lampung Selatan	12 Dokumen	4.383.774.404	12 Dokumen	5.064.345.986	680.571.582
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lampung Selatan	1 Laporan	25.520.500	1 Laporan	25.520.500	-

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah /(Berkurang)
								Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Lampung Selatan	17 laporan	70.022.900	17 Laporan	70.022.900	-
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Lampung Selatan**	**Persentase penyelenggaraan Administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)**	**48.870.000**	**-**	**-**	**(48.870.000)**
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Lampung Selatan	200 paket	48.870.000	-	-	(48.870.000)

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah /(Berkurang)
								Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**barang, jasa, peralatan, dan perlengkapan penunjang pelayanan administrasi perkantoran**	**Lampung Selatan**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**495.294.200**	**12 Bulan**	**232.919.900**	**(262.374.300)**
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Lampung Selatan	5 Paket	15.672.000	4 Paket	15.672.000	-
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Lampung Selatan	16 Paket	40.356.900	26 Paket	40.356.900	-
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Lampung Selatan	30 Paket	103.166.600	7 Paket	43.494.100	(59.672.500)

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah /(Berkurang)
								Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Lampung Selatan	14 Paket	180.703.700	2 Paket	46.431.900	(134.271.800)
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Lampung Selatan	12 Dokumen	18.000.000	12 Dokumen	18.000.000	-
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lampung Selatan	30 Laporan	24.975.000	16 Laporan	12.465.000	(12.510.000)
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung Selatan	50 Laporan	112.420.000	40 Laporan	56.500.000	(55.920.000)
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (unit)**	**Lampung Selatan**	**63 Unit**	**1.593.163.600**	**62 Unit**	**484.756.200**	**(1.108.407.400)**
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Lampung Selatan	1 Unit	945.000.000	0 Unit	-	(945.000.000)

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah /(Berkurang)
								Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Lampung Selatan	49 Unit	5.860.000	2 Unit	2.060.000	(3.800.000)
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Lampung Selatan	30 Unit	642.303.600	39 unit	482.696.200	(159.607.400)
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**Lampung Selatan**	**3 Laporan**	**321.600.000**	**12 Bulan**	**321.600.000**	**-**
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lampung Selatan	12 Laporan	321.600.000	12 Laporan	321.600.000	-

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah /(Berkurang)
								Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (unit) dan Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur**	**Lampung Selatan**	**86 Unit**	**421.387.500**	**80 Unit**	**421.387.500**	**11.000.000**
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Lampung Selatan	1 Unit	44.930.000	1 unit	44.930.000	-
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Lampung Selatan	25 Unit	279.267.500	20 unit	279.267.500	-

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah /(Berkurang)
								Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Lampung Selatan	47 Unit	61.190.000	59 unit	72.190.000	11.000.000
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Lampung Selatan	1 Unit	25.000.000	1 unit	25.000.000	-
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Proporsi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Lampung Selatan**	**13,50%**	**5.864.585.350**	**57%**	**4.722.121.750**	**(1.201.842.700)**
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah**		**13,50%**	**5.864.585.350**	**0,15**	**4.722.121.750**	**(1.201.842.700)**
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Lampung Selatan	1 Dokumen	1.262.303.400	1 dokumen	1.223.573.650	(38.729.750)

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah /(Berkurang)
								Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Lampung Selatan	1 Dokumen	127.973.500	1 dokumen	122.551.800	(5.421.700)
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kalianda	4 laporan	336.720.500	2 Laporan	260.519.100	(76.201.400)
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Lampung Selatan	2 Unit	592.700.200	16 Unit	574.325.600	(18.374.600)
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kalianda	6 laporan	542.734.600	3 Laporan	227.996.000	(314.738.600)

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah /(Berkurang)
								Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	17 Kecamatan	3 laporan	80.471.150	3 Laporan	40.164.550	(40.306.600)
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Lampung Selatan	50 Objek Pajak	1.128.568.200	3 objek pajak	663.324.600	(465.243.600)
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Lampung Selatan	11 Dokumen	827.633.500	8 dokumen	847.300.400	19.666.900
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Lampung Selatan	10 Layanan	50.790.300	8 Layanan	41.038.300	(9.752.000)
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Lampung Selatan	8 Dokumen	114.849.200	8 dokumen	57.389.450	(57.459.750)

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah /(Berkurang)
								Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Lampung Selatan	7 dokumen	367.662.700	7 Dokumen	432.354.600	64.691.900
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Lampung Selatan	7 Dokumen	17.460.150	7 Dokumen	8.729.850	(8.730.300)
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Lampung Selatan	7 dokumen	319.381.200	7 Dokumen	107.106.000	(212.275.200)
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Lampung Selatan	7 dokumen	64.150.000	1 dokumen	25.182.000	(38.968.000)
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Lampung Selatan	1 Laporan	31.166.750	1 Laporan	90.565.850	59.399.100
JUMLAH									**32.456.075.767**		**31.237.973.338**	**(1.263.476.429)**

Dari Tabel 4.1. Diatas bahwa terdapat perubahan anggaran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Adapun Perubahan Rencana Kerja tersebut terdapat pada program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.2. Perubahan Rencana Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025

Kabupaten Lampung Selatan

No					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah /(Berkurang)	Penjelasan
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
5	**02**				**KEUANGAN**	**32.456.075.767**	**31.237.973.338**	**(1.218.102.429)**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**26.591.510.417**	**26.515.851.588**	**(121.032.829)**	
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**188.990.200**	**136.441.900**	**(52.548.300)**	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.343.700	28.693.700	(3.650.000)	Terkena Efisiensi
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	31.955.250	25.875.250	(6.080.000)	Terkena Efisiensi
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	35.305.950	18.375.850	(16.930.100)	Terkena Efisiensi

No					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah /(Berkurang)	Penjelasan
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	27.782.750	21.169.200	(6.613.550)	Terkena Efisiensi
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	29.463.450	13.540.300	(15.923.150)	Terkena Efisiensi
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.139.100	28.787.600	(3.351.500)	Terkena Efisiensi
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**23.533.204.917**	**24.918.746.088**	**1.340.167.171**	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.053.887.113	19.758.856.702	704.969.589	Penambahan untuk belanja insentif ASN dan insentif KDH/WKDH, karena target pajak daerah bertambah di RAPBDP
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.383.774.404	5.064.345.986	680.571.582	• Penambahan untuk belanja jasa tenaga administrasi sebanyak 8 orang • Penambahan untuk belanja insentif non ASN karena target pajak daerah bertambah di RAPBDP dan

No					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah /(Berkurang)	Penjelasan
									• Penambahan untuk belanja jasa tenaga kebersihan dan keamanan yang kurang di APBD 2025
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.520.500	25.520.500	-	
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKP	70.022.900	70.022.900	-	
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**48.870.000**	**-**	**(48.870.000)**	
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	48.870.000	-	(48.870.000)	Terkena Efisiensi
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**495.294.200**	**232.919.900**	**(262.374.300)**	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	15.672.000	15.672.000	-	

No					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah /(Berkurang)	Penjelasan
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.356.900	40.356.900	-	
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.166.600	43.494.100	(59.672.500)	Terkena Efisiensi
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	180.703.700	46.431.900	(134.271.800)	Terkena Efisiensi
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	18.000.000	-	
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.975.000	12.465.000	(12.510.000)	Terkena Efisiensi
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.420.000	56.500.000	(55.920.000)	Terkena Efisiensi
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.593.163.600**	**484.756.200**	**(1.108.407.400)**	
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	945.000.000	-	(945.000.000)	Terkena Efisiensi
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	5.860.000	2.060.000	(3.800.000)	Terkena Efisiensi

No					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah /(Berkurang)	Penjelasan
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	642.303.600	482.696.200	(159.607.400)	Terkena Efisiensi
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**321.600.000**	**321.600.000**	**-**	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	321.600.000	321.600.000	-	
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**421.387.500**	**421.387.500**	**11.000.000**	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.930.000	44.930.000	-	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	279.267.500	279.267.500	-	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.190.000	72.190.000	11.000.000	Penambahan untuk belanja pemeliharaan aset tidak

No					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah /(Berkurang)	Penjelasan
									berwujud: Sistem Pajak Online, *Secure Socket Layer* (SSL)
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	-	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**5.864.585.350**	**4.722.121.750**	**(1.201.842.700)**	
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**5.864.585.350**	**4.722.121.750**	**(1.201.842.700)**	
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1.262.303.400	1.223.573.650	(38.729.750)	Terkena Efisiensi
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	127.973.500	122.551.800	(5.421.700)	Terkena Efisiensi
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	336.720.500	260.519.100	(76.201.400)	Terkena Efisiensi
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	592.700.200	574.325.600	(18.374.600)	Terkena Efisiensi
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	542.734.600	227.996.000	(314.738.600)	Terkena Efisiensi

No					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah /(Berkurang)	Penjelasan
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	80.471.150	40.164.550	(40.306.600)	Terkena Efisiensi
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.128.568.200	663.324.600	(465.243.600)	Terkena Efisiensi
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	827.633.500	847.300.400	19.666.900	Penambahan belanja jasa tenaga administrasi sebanyak 8 orang
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	50.790.300	41.038.300	(9.752.000)	Terkena Efisiensi
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	114.849.200	57.389.450	(57.459.750)	Terkena Efisiensi
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	367.662.700	432.354.600	64.691.900	Penambahan belanja jasa tenaga ahli Kejaksaan Negeri semula selama 8 bulan menjadi 12 bulan
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	17.460.150	8.729.850	(8.730.300)	Terkena Efisiensi

No					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah /(Berkurang)	Penjelasan
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	319.381.200	107.106.000	(212.275.200)	Terkena Efisiensi
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	64.150.000	25.182.000	(38.968.000)	Terkena Efisiensi
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	31.166.750	90.565.850	59.399.100	Penambahan untuk belanja penyusunan Road Map Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Keberhasilan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat dari tercapainya Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan yaitu Tercapainya Target Pajak Daerah. Berikut adalah Target Perubahan Penerimaan Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025

Tabel 4.3. Target Perubahan Penerimaan Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2024

No	Jenis Penerimaan	TARGET		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	Pajak Reklame	2.650.000.000	2.650.000.000	-
2	Pajak Air Tanah	1.750.000.000	1.600.000.000	-150.000.000 (Berkurang)
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.000.000.000	3.800.000.000	-2.200.000.000 (Berkurang)
4	Pajak Bumi dan Bangunan	65.000.000.000	62.450.000.000	-2.550.000.000 (Berkurang)
5	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	37.000.000.000	26.500.000.000	-10.500.000.000 (Berkurang)
6	Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT)	91.600.000.000	86.190.000.000	-5.410.000.000 (Berkurang)
	PBJT Makanan dan/atau Minuman	8.850.000.000	7.600.000.000	-1.250.000.000 (Berkurang)
	PBJT Tenaga Listrik	76.850.000.000	71.900.000.000	-4.950.000.000 (Berkurang)
	PBJT Jasa Perhotelan	1.750.000.000	1.940.000.000	190.000.000 (Bertambah)
	PBJT Jasa Parkir	2.000.000.000	1.850.000.000	-150.000.000 (Berkurang)
	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	2.150.000.000	2.900.000.000	750.000.000 (Bertambah)
7	Opsen Pajak	20.000.000.000	36.500.000.000	16.500.000.000

	Kendaraan Bermotor (PKB)			(Bertambah)
8	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKN)	10.983.010.366	31.018.473.800	20.035.463.434 (Bertambah)
JUMLAH		**234.983.010.366**	**250.708.473.800**	**15.725.463.434,00**

BAB V
PENUTUP

Renja APBD-P Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Lampung Selatan tahun 2021-2026.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan pengelolaan penerimaan daerah yang diemban oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Oleh karena itu, diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Semoga Renja APBD-P Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Kepala Badan Pengelola Pajak
Dan Retribusi Daerah
Kabupaten Lampung Selatan

Dedi Basuan, SE.,M.Ling
Pembina Tingkat I
NIP 19630310 198411 1 002

Perubahan Rencana Kerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Lampung Selatan

Tahun 2025





BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kehadiran Allah SWT Karena dengan rahmat-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 telah selesai disusun. Renja ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan selama satu tahun. Dengan harapan agar program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan lebih terarah dan terukur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja ini disampaikan ucapkan terimakasih. Semoga pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renja ini, dapat mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat melalui terwujudnya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lampung Selatan.

Kalianda, 15 Juli 2025

KEPALA PELAKSANA,

ARISWANDI, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP.19750818 199803 1 006

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR iii

BAB I. PENDAHULUAN 5

1.1. Latar Belakang 5

1.2. Landasan Hukum 8

1.3. Maksud dan Tujuan 9

1.4. Sistematika Penulisan 10

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 12

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 12

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 23

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 24

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 36

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 37

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 37

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 38

3.3. Program dan Kegiatan Prioritas……... 38

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 44

BAB V. PENUTUP 47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja BPBD dan Pencapaian RENSTRA BPBD Kab. Lampung Selatan sampai dengan Tahun 2021.

Tabel 2.2 Pencapaian kinerja Pelayanan BPBD

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD BPBD Kab. Lampung Selatan Tahun 2025

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPBD Kab. Lampung Selatan Tahun 2025

Tabel 3.2 Matriks Rencana Kerja BPBD Kab. Lampung Selatan Tahun 2025 sumber dana APBD Kabupaten

Tabel 3.3 Matriks Rencana Kerja BPBD Kab. Lampung Selatan Tahun 2025 sumber dana APBD Provinsi

Tabel 3.4 Matriks Rencana Kerja BPBD Kab. Lampung Selatan Tahun 2025 sumber dana APBN

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 .

BAB I

PENDAHUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis PD (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. PD menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap PD wajib menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja BPBD Kabupaten Lampung Selatan

disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Lampung Selatan, Renstra BPBD Lampung Selatan, serta berpedoman pada Renja Kementerian BNPB dan Renja BPBD Provinsi Lampung.

Tahun 2021 merupakan tahun ke-5 perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Selatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021.

Renja BPBD Tahun 2021 merupakan pelaksanaan dari Renstra BPBD Tahun 2016-2021 yang mendukung visi Bupati

Keselarasan Visi dan Misi tersebut diatas, maka Visi dan Misi BPBD Kabupaten Lampung Selatan, adalah :

1. **Visi** : Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan yang Berintegritas, Maju dan Sejahtera dengan semangat Gotong Royong

2. **Misi** :
   a. Membangun Infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan
   b. Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang professional, transparan,efektif dan akuntabel

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penangulangan Bencana Daerah adalah sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah di bidang Penangulangan Bencana, yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik di bidang Penangulangan Bencana. Maka kontribusi Badan Peangulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam pembangunan daerah adalah pada pencapaian Misi ke-3

Misi antara lain **Misi 3 :** Membangun Infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian berkelanjutan

selanjutnya BPBD Kabupaten Lampung Selatan juga mengampu Misi ke 5

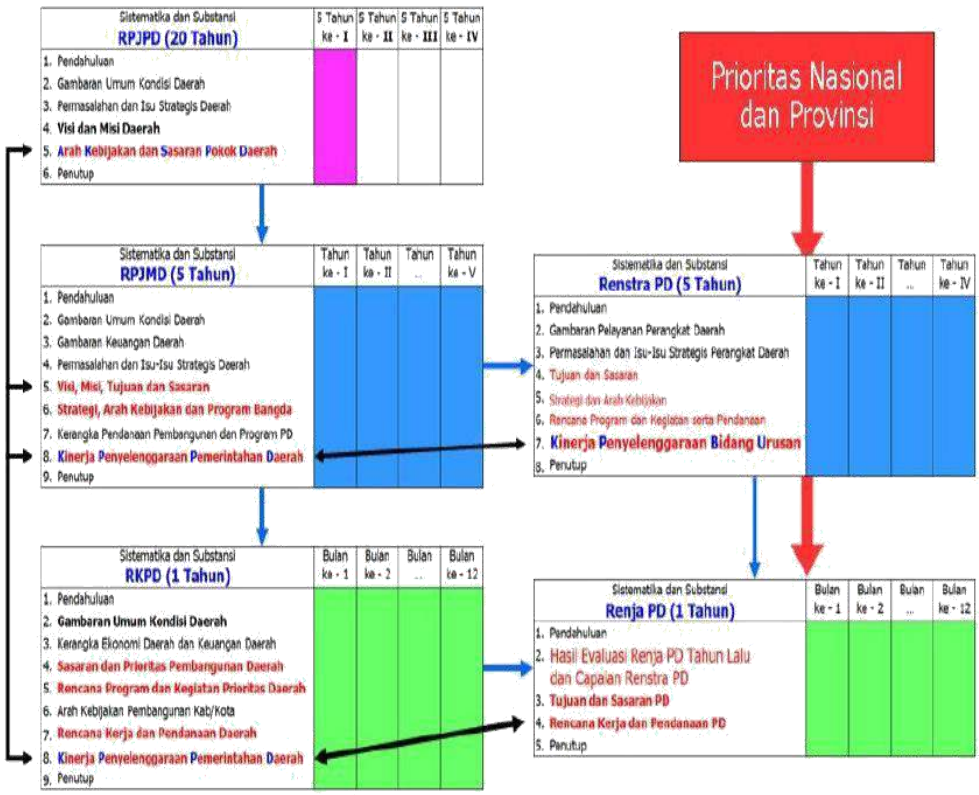
Misi 5: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah, Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Baik, Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan.

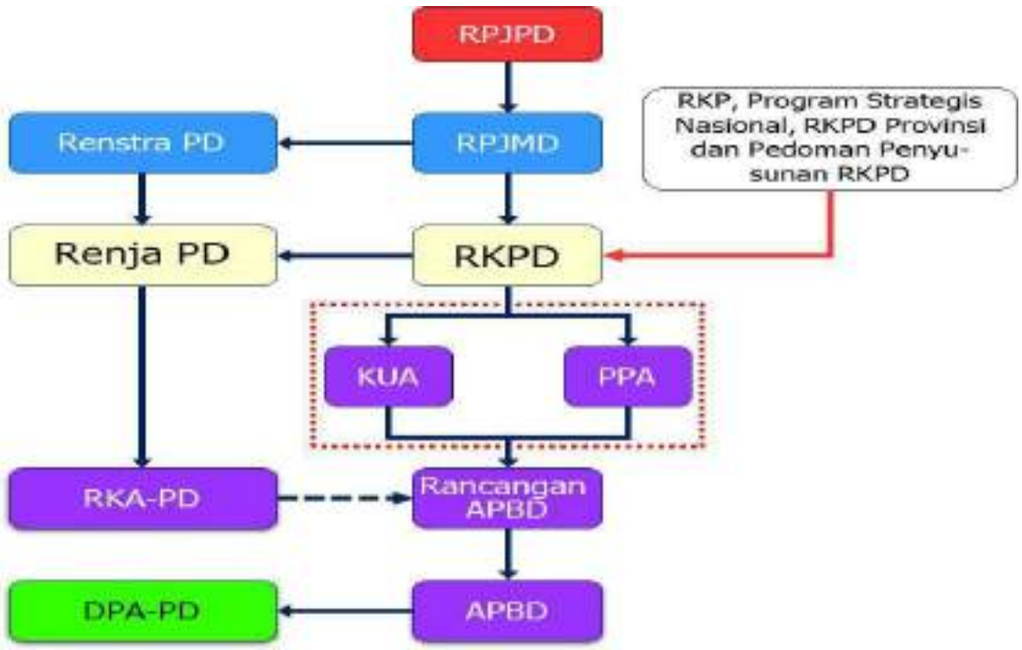
Agenda kerja merupakan serangkaian kegiatan-kegiatan agenda yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan kepada masyarakat saat pelaksanaan kampanye. Agenda kerja menggambarkan kegiatan konkret yang mudah dimengerti masyarakat dan bermanfaat serta memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Posisi penjabaran agenda kerja dalam RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 sebagai pedoman Perangkat Daerah untuk menuangkannya ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang mengampu agenda kerja tersebut.

Rancangan Renja PD menjadi dasar penyusunan Rancangan RKPD yang kemudian melalui tahapan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD. Perumusan Rancangan Akhir RKPD ini kemudian menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

yang disepakati Kepala Daerah dan DPRD yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun rencana anggaran. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1. Sedangkan tindak lanjut dokumen Renja PD hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2.



Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renja Perubahan PD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja BPBD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 -2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja BPBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah pada Tahun 2025. Tujuan penyusunan Renja BPBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi BPBD Kabupaten Lampung Selatan dalam melaksanakan agenda pembangunan di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai;
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana kerja di bidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan;
3. Mendukung koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antar antar pelaku pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan;
4. Menjamin penggunaan sumber daya Kabupaten Lampung Selatan secara efektif, efisien, berkeadilan, adil, transparan, akuntabel, partisipatif, keadilan sosial dan berkelanjutan, serta menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan.

Sedangkan, tujuan Penyusunan Rencana Stratejik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan ini, adalah untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas program dan kegiatan, antara lain :

a. Meningkatkan upaya-upaya Penanggulangan Bencana di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
b. Mendorong peran serta Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam mengembangkan upaya Penanggulangan Bencana;
c. Meningkatkan pemahaman semua pihak terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
d. Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja BPBD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN LALU (2023)

2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 didapat dari realisasi hasil kinerja tahunan dan/ atau realisasi APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah berperan strategis dalam penanggulangan bencana di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang bertujuan mengevaluasi Rencana Kerja BPBD Kabupaten Lampung Selatan.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah meliputi kegiatan:

a. Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan terdiri dari

   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan terdiri dari

   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Penyediaan Administrasi Pelaksnaan Tugas ASN
   - Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran

c. Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah Pada Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan terdiri dari

   - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
   - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan terdiri dari

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan terdiri dari

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan terdiri dari

- Pengadaan Mebel

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan terdiri dari

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan terdiri dari

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeiharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya

II. Program Penanggulangan Bencana

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan terdiri dari

- Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota
- Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan BencanaKabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub Kegiatan terdiri dari

- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Peralatan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana
- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- Pengutan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana Kontijensi

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sub Kegiatan terdiri dari

- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

Perubahan Renja BPBD Kabupaten Lampung Selatan dimaksud, merupakan salah satu instrument dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai upaya mewujudkan apa yang tertuang dalam Renstra BPBD Kabupaten Lampung Selatan, yaitu meliputi :

a. Pelayanan kepada masyarakat.
b. Pengurangan resiko bencana.
c. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana.

Perubahan Renja Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Lampung Selatan selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2025. Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dilaksanakan untuk:

a. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
b. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
c. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fahtor-faktor penyebab tersebut.

Jumlah anggaran BPBD Tahun 2023 : Rp. 8.174.736.000

Jumlah realisasi anggaran BPBD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 adalah sebesar Rp8.042.230.793, 91 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD BPBD Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2023 sampai dengan Tw IV Evaluasi Renja BPBD Kabupaten Lampung Selatan .

Nama Perangkat Daerah : Badan Penangulangan Bencana Daerah

Program Kegiatan	Indokator/Kinerja	Target		Capaian		Presentase Capaian (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Pelayanan**					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**8**	**Dokumen**	**8**	**Dokumen**	**100,00 %**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	100 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA P-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100 %
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Dokumen	2	Dokumen	100 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100.00 %**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	14	Bulan	100.00 %
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bulan	12	Bulan	100,00 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Dokumen	2	Dokumen	100 %
Administrasi Barang Milik Daerah	**Administrasi Barang Milik Daerah**	**2**	**Dokumen**	**2**	**Bulan**	**100.00 %**
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	100%

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Administrasi Kepegawaian**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100.00 %**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Pakaian Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	340	Stel	340	Stel	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pengiriman Peserta Diklat Singkat	4	Orang	4	Orang	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Administrasi Umum**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100,00 %**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat-alat listrik dan komponen listrik kantor	4	Paket	4	Paket	100,00 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Paket	4	Paket	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	4	Paket	4	Paket	100 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	12	Paket	12	Paket	100 %
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak dan Penggandaan	12	Paket	12	Paket	100 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Koran harian dan mingguan	12	Paket	12	Paket	100 %
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Makan Minum Rapat kantor dan Jamuan Tamu	12	Paket	12	Paket	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas luar dan dalam daerah	28	Kali	28	Kali	98,57%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Barang Milik Daerah**	**6**	**Unit**	**6**	**Unit**	**100%**
Pengadaan Mebel	Mebel kantor	6	Unit	6	Unit	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**12**	**Laporan**	**12**	**Laporan**	**75,00%**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Telepon, Internet, Air & Listrik Kantor	12	Laporan	12	Laporan	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**14**	**Unit**	**14**	**Unit**	**100,00%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	14	Unit	14	Unit	100,00%

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan kantor	12	Bulan	12	Bulan	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab gedung kantor	1	Unit	1	Unit	100,00%
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	**Presentase Kecepatan Respon kurang dari 24 Jam untuk setiap kasus darurat bencana**					
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		**100**	**%**	**100%**	**%**	**100%**
Penyusunan Kajian Resiko Bencana	Dokumen Kajian Resiko Bencana yang disyahkan	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Pemahaman Masyarakat Mengenai Pengurangan Resiko Bencana	100	Orang	100	Orang	100%
Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		**100**	**%**	**100%**	**%**	**100%**
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Sumber Daya Manusia di Bidang Manajemen Bencana	70	Orang	70	Orang	100%
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Informasi di Lokasi Titik Pantau Rawan Bencana	18	Lokasi	18	Lokasi	100%
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Sarana Prasarana Kebencanaan	10	Paket	10	Jenis	100%
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Desa Tangguh Bencana	4	Desa	4	Desa	100%
Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Data Kerusakan Pasca Bencana dan SDM yang terampil dalam menghitung kerugian Pasca bencana	17	Kec	17	Kec	100%
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)	Meningkatnya Pengetahuan Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanganan bencana	50	Orang	50	Orang	100%
Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen Rencana Kontijensi yang disyahkan	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan yang diberikan Kepada Korban Terdampak Bencan	1000	Paket	1000	Paket	100%
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang diselamatkan	10	Kejadian	10	Kejadian	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan analisis bahwa dari kegiatan Administrasi umum kenerja yang di laksanakan sudah hampir seluruh sub kegiatan mencapai 100 % akan tetapi dari tabel tersebut untuk kegiatan Bidang khususnya kegiatan Pada Program Penanggulangan Bencana dan Kegiatan yang mengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum terlaksana sehingga kegiatan Standar Pelayanan Minimal belum terlaksna secara optimal sehingga untuk kedepan perlu dianggarkan Sub Kegiatan yang mendukung SPM antara lain :

1. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
3. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD

Sesuai Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 BPBD Kabuapten Lampung Selatan Mengampu Standar Pelayanan Tekhnis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan bencana adalah *peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.*

Jenis bencana berdasarkan UU No. 24/2007 dibedakan menjadi bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial, berdasarkan penyebab kejadiannya. Penjelasan pengertian jenis tersebut ialah:

- Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempabumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkaan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
- Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas dan teror.

2.2.1. Data bencana di kabupaten lampung selatan

Berikut adalah data kejadian bencana di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015-2020

Tabel 1. Data kejadian bencana di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015 – 2020

No	Jenis Bencana	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kebakaran	35	14	2	-	-	-
2.	Banjir	4	4	13	28	8	15
3.	Puting Beliung	5	7	3	1	2	8
4.	Sambar Petir	-	-	2	-	-	1
5.	Tsunami	-	-	-	1	-	-
6.	Gelombang Pasang	2	3	2	1	-	-
7.	Orang Tenggelam	4	2	3	-	-	1
8.	Tanah Longsor	1	-	-	-	-	-
9.	Angin Kencang	1	3	10	1	1	8
10	Banjir ROB	-	-	-	-	-	3
11	Erupsi Gunung Anak Kraktau	-	-	-	1	-	1
12	Gempa Tektonik	-	-	-	1	-	1

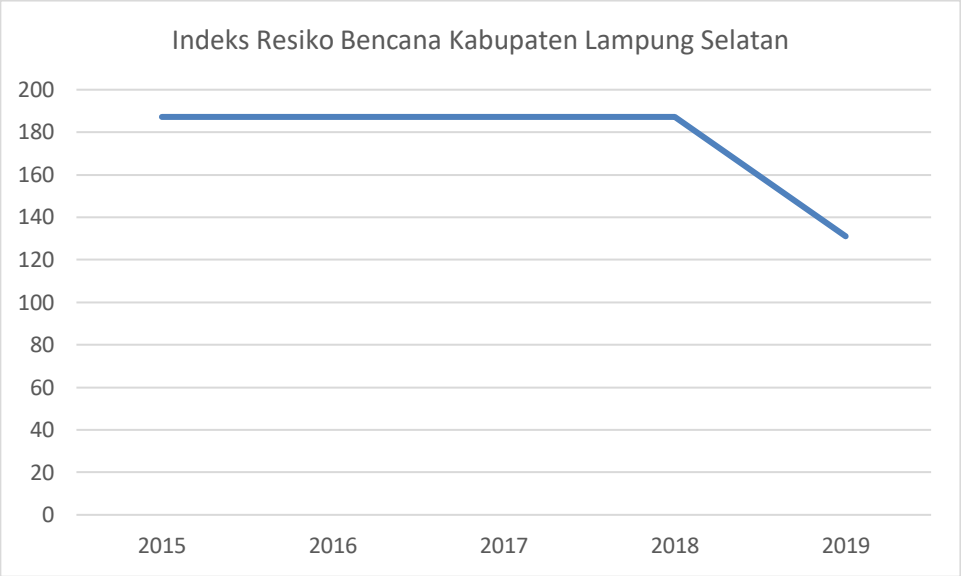
Sumber data : BPBD Lampung Selatan, 2020

Menurut Badan Nasional Penanggulanggan Bencana (BNPB), nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Lampung Selatan masuk dalam kategori tinggi. Berikut adalah Indeks Resiko Bencana Kabupaten Lampung Selatan 5 tahun terakhir.

Tabel 2. Nilai IRBI Kabupaten Lampung Selatan 2015-2020

Tahun	Nilai IRBI
2014	187,20
2015	187,20
2017	187,20
2018	187,20
2019	131,04
2020	187,20

Sumber : BNPB, 2020



Sebagaimana tertuang dalam UU 24/2007, bahwa pengertian Risiko bencana dimaknai potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Upaya pengurangan risiko bencana berupa :

1. Memperkecil ancaman kawasan;
2. Mengurangi kerentanan kawasan yang terancam;
3. Meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam.

2.2.2. Data Pelatihan Kebencanaan dan Diklat

Tabel 3. Jenis Pelatihan Kebencanaan /Diklat

Jenis Pelatihan	Jumlah
Pelatihan TRC di BNPB	5 Personil
Pelatihan Pusdalop oleh BPBD Provinsi	3 Personil
Pelatihan Pusdalop oleh BNPB	3 Personil
Pelatihan Penyelamatan oleh SAR	3 Personil
Pelatihan Logistik Oleh BNPB	2 Personil
Pelatihan Satgas Komunikasi	3 Personil

Berikut ini adalah kajian terhadap capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan indikator kinerja utama yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 521/018/IV.02/2023 tanggal 4 Januari 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU-PD) Badan Penagulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penangulangan Bencana Daerah meliputi :

- Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat di Desa Rawan Bencana
- Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi OPD	Target Capaian Kinerja Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat di Desa Rawan Bencana	4 Desa	6 Desa	8 Desa	10 Desa	12 Desa	7 Desa	8 Desa	17 Desa		
2	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	< 24 Jam	< 24 Jam	< 24 Jam	< 24 Jam	< 24 Jam	< 24 Jam	< 24 Jam	< 24 Jam		

Berdasarkan tabel diatas tentang pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 -2026, maka dapat dianalis bahwa pelaksanaan Time Respon Penanganan Bencana tahun 2021 telah tercapai akan tetapi ada beberapa faktor lainya yang belum mendukung pelayanan Penanganan Bencana di Kabupaten
disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Gedung Kantor BPBD Kabupaten Lampung Selatan yang belum Presentatif dan belum memadai untuk melaksanakan Pelayanan Kebencanaan ;
2. Belum tersedianya Gudang Logistik untuk penyimpanan Bufer Stock dalam melaksanakan pelayanan Kebencanaan ;
3. Belum Terbentuknya Tim Reaksi Cepat Kabupaten yang terdiri dari unsur dinas terkait ;
4. Belum Maksimalnya Fungsi PUSDALOP sebagai pusat informasi Kebencanaan ;
5. Terbatasnya dana penanganan Bencana khususnya Penyediaan Logistik Bagi Korban Bencana
6. Minim nya Sarana dan Prasarana Kebencanaan yang dipergunakan untuk turun ke lapangan dalam menangani bencana Khususnya Kendaraan Dinas Operasional, Eksavator mini dan lain-lain ;

7. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Desa Tangguh Bencana Masih Terbatas ;
8. Belum tersusunya dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana ;
9. Belum maksimalnya pencarian pertolongan korban bencana ;

2. 3 Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

dari data-data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa isu strategis Kebencanaan di Kabupaten Lampung Selatan Khususnya Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut :

a. Belum terintegrasinya dokumen RPB dengan RPJMD
b. Belum optimalnya Pusdalops pada BPBD dan Gudang Logistik
c. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Penanggulangan Bencana
d. Masih sedikitnya penduduk di daerah rawan bencana yang mendapat informasi dan edukasi penanggulangan bencana (tambahkan data, prosentase, jumlah), baru 6 desa yang masuk dalam desa tangguh bencana Bentukan Kabupaten dan 1 Desa Tangguh Bencana bentukan Provinsi.
e. Belum optimalnya early warning system, dan belum terintegrasinya jalur evakuasi dengan tempat evakuasi sementara. (tambahkan data jumlah jalur evakuasi yang ada)
f. Adanya letak geografis dan struktur geologis Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah rawanbencana alam.
g. Belum maksimalnya koordinasi antar satuan kerja.
h. Belum optimalnya pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana di kabupaten Lampung Selatan khususnya Kajian resiko bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana.
i. Belum adanya Tim TRC yang ideal baik kwalitas maupun kwantitas
j. Belum optimalnya pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Adapun faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut diatas, yaitu :

a. Sumber Daya Manusia dalam penyerapan ilmu pengetahuan dan kemajuan tekhnologi masih terbatas.
b. Kedisiplinan, loyalitas, semangat kerja, dan kerjasama para penyelenggara penanggulangan bencana masih perlu ditingkatkan.
c. Cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana cukup luas dan tidak sebanding dengan sarana prasarana yang ada.

2. 4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah, dilakukan penyelarasan program dan kegiatan kedalam nomenklatur permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Oleh sebab itu, Rancangan awal RKPD Tahun 2022 yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja PD Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan permendagri 90. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan

Nama Perangkat Daerah : Badan Penangulangan Bencana Daerah

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I.	**PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Lampung**	**Indeks Pelayanan**	**80 Poin**	**4.682.666.800**						
1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Kalianda**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pengangaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah**	**10 Dokumen**	**60.000.000**						

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kalianda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000						
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kalianda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuanan	1	10.000.000						
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kalianda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubhan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000						
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kalianda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000						
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kalianda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000						

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kalianda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	10.000.000						
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Kalianda**	**Administrasi Keuangan**	**12 Bulan**	**3.725.196..650**						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kalianda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.725.196.650						
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kalianda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	665.036.500						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kalianda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Bulan	16.321.600						
		Koordinasi dan	Kalianda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	12 Bulan	19.185.800						
		Penyusunan										

		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			Administrasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen	**35.304.600**						
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kalianda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	18.283.000						
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kalianda	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	17.021.600						
3.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Kalianda**	**Administrasi Kepegawaian**	**12 Bulan**	**190.000.000**						
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapa nya	Kalianda	Belanja Pakaian PDL, Kaos HKB dan Kaos Destana	4 Paket	189.440.000						
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kalianda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	4 Orang	20.000.000						

		Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Pendidikan dan Pelatihan								
4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Kalianda**	**Administrasi Umum**	**12 Bulan**	**370.851.550**						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kalianda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	6.781..000						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kalianda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Komputer 2 Unit Proyektor 1 AC 3 Unit Laptop 2 Unit	160.046.400						
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kalianda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Bulan	2.592.000						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kalianda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	30.000.000						
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kalianda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	24.627.150						

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kalianda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan	18.000.000						
		Penyediaan Bahan Material	Kalianda	Jumlah Paket Bahan/ Material yang disediakan	1 Paket	25.000.000						
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kalianda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	23.125.000						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta, Propinsi Lampung, Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	80.680.000						
5.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Kalianda**	**Barang Milik Daerah**	**165 Unit**	**20.038.000**						
		Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	20.038.000						

6.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Kalianda**	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**12 Bulan**	**74.400.000**						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kalianda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	74.400.000						
7.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Kalianda**	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**12 Bulan**	**377.948.000**						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kalianda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	377.948.000						

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kalianda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	8.400.000							
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kalianda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000							
II.	**PROGRAM PENANGULANGAN BENCANA**		**Lampung Selatan**	**Presentase Kecepatan Respon kurang dari 24 Jam untuk setiap kasus darurat bencan**	**17 Kecamatan Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan**	**2.346.687.300**							

8	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**	Sosilalisasi , Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE)	**Lampung Selatan** Kec Rajabasa	**Pemahaman Masyarakat Mengenai Pengurangan Resiko Bencana** Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	**17 Kecamatan dan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan** 150 Orang	**94.049.200** 94.049.200							
9.	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Lampung Selatan Kalianda	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	70 Orang	**1.056.869.350,-** 200.000.000							
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kalianda	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap	18 Lokasi	279.925.000							

				Bencana Kabupaten/Kota									
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kalianda	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	120 Unit	238.049.450							
		Pengutan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Desa Sidomulyo, Talang Baru, Sukabanjar, Way Muli, Rajabasa,Way Muli Timur	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan Kapasitas nya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		147.299.800							
		Penanganan Pasca Bencana	**17 Kecamatan**	**Data Kerusakan Pasca Bencana dan SDM yang terampil dalam menghitung kerugian Pasca Bencana**	**17 Data/Kec 60 Orang**	**370.274.650**							
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)	Kaliada	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	50 Orang	64.805.100							
		Gladi Kesiapsiagaan	Kaliada	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 Orang	126.790.000							
10.	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban**		Lampung Selatan	Jumlah korban bencana yang di Evakuasi dan		**825.494.100,-**							

	Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten /Kota	17 Kecamatn	diselamatkan SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	10 Dokumen	543.543.100							
		Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana camatan	17 Kecamatan	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	33.464.500							
		Penyediaan Lgistik Penyelamatan dan Evakuasi	17 Kecamatan		200 Orang	199.526.000							
		Aktivasi Sistem Komando	Kalianda		1 Laporan	48.960.000							
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				**370.274.650**							
		Penanganan Pasca Bencana	17 Kecamatan	Data Kerusakan Pasca Bencana dan SDM yang terampil dalam menghitung kerugian Pasca Bencana	17 Data/Kec 60 Orang	370.274.650							

Sumber data : Nama kegiatan berdasarkan draft rancangan awal RKPD 2025 dan data dari Renja BPBD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2023 (dengan penyesuaian permendagri 90 tahun 2019 dan permendagri 050 tahun 2020 tentang pemuthairan kodefikasi dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Upaya mewujudkan perlindungan atas bencana terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat khususnya dalam Penanggulangan Bencana, di akomodir dalam Program Penanggulangan Bencana Daerah dengan Kegiatan, yaitu, antara lain :

a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana pada Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Rp. 94.049.200,-

b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana pada Sub Kegiatan

   - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Rp. 200.000.000,-

   - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Untuk Pembinaan dan Pembentukan Desa Tangguh Bencana) Rp. 147.299.800,-

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Lampung Selatan meliputi kegiatan: Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana. Hal ini, selaras dengan Kebijakan Nasional yaitu Program Pemberdayaan Potensi Keamanan pada Urusan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dibidang Penanggulangan Bencana, sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Indikator Kinerja

Dalam hal ini, tidak terlepas dari tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan BPBD Kabupaten Lampung Selatan, yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan :
   a. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang nyaman, beradab dan bermartabat berlandaskan nilai agama dan budaya.
   b. Membangun tatakelola Pemerintahan yang efektif, efesien, akuntabel, partisipatif, taathukum, demokratis, responsip, dan transparan.
2. Sasaran:
   a. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan nyaman.
   b. Terwujudnya sumberdaya manusia/aparatur yang professional dan bermartabat.

Adapun Indikator Kinerja dimaksud sesuai tujuan dan sasaran tersebut diatas, adalah :

a. Jumlah kegiatan simulasi kebencanaan pada desa pilihan (rawan bencana) guna persiapan desa tangguh.
b. Fasilitasi pemulihan sarana dan prasarana publik, rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga pasca bencana.
c. Prosentase pemahaman tingkat penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Resnstra Tahun 2021-2026 dapat di gambarkan Tujuan dan Sasaran sebagai mana di jelaskan dalam tabel berikut :

Tabel .Tujuan dan Sasaran BPBD Berdasarkan Renstra

IO	TUJUAN	SASARAN	IKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	MISI III : Membangun Infrastruktur untuk meningkatkan konektifitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian berkelanjutan								
	Meningkatnya ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktifitas masyarakat dan konektifitas wilayah	Meningkatnya ketangguhan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana Poin)						
	MISI V : Mewujudkan kualitas Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang professional, transparan, efektif dan akuntabel.								
	Membangun Tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, partisipatif, taat hukum, renponsif dan transparan	1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi	1. Indeks Reformasi Birokrasi						
		Peningkatnya kualitas pelayanan publik.	2. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)						

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023, meliputi 2 Program dan 11 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan yang mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan 2021-2026, dan Renstra (Rencaan Stratejik) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2016-2021.

Selanjutnya, untuk lebih jelas dan rinci Rencana Kerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan MajuTahun 2026 Kabupaten Lampung Selatan pada Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam Urusan Wajib Trantibum Linmas maka Penanggulangan Bencana, sebagaimana tertera di bawah ini :

Tabel 7. Program dan Kegiatan Prioritas BPBD Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Sebelum perubahan Tahun 2025				Sesudah perubahan Tahun 2025		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.1.1	**PROGRAM PENANGULANGAN BENCANA**	Presentase Kecepatan Respon kurang dari 24 Jam untuk setiap kasus darurat bencana	**Lampung Selatan**	**17 Kecamatan** Masyarakat Lampung Selatan	**2.346.667.300**	**Dana Alokasi Umum (D A U);**	**17 Kecamatan** Masyarakat Lampung Selatan	**2.157.951.950**	**17 Kecamatan** Masyarakat Lampung Selatan	**3.454.450.000**
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	**Pemahamam Masyarakat Mengenai Pengurangan Resiko Bencana**	**Lampung Selatan**	**17 Kecamatan** Masyarakat Lampung Selatan **17 Kecamatan**	**94.049.200**	**Dana Alokasi Umum (D A U);**	**17 Kecamatan** Masyarakat Lampung Selatan **17 Kecamatan**	**44.660.400**	**17 Kecamatan** Masyarakat Lampung Selatan	**132.000.000**
	Sosialisasi Komunikasi , Informasi Dan Edukasi (KIE)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada	Kec.Rajabasa	180 Orang	94.049.200	Alokasi Umum (D A U);	180 Orang	44.660.400	150 Orang	132.000.000

		Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya								
	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang mungkin terjadi**	**Lampung Selatan**	**17 Kecamatan/ Masyarakat Di Kab.Lampung Selatan**	**1.056.869.350**	Dana Alokasi Umum (DAU)	**17 Kecamatan/ Masyarakat Di Kab.Lampung Selatan**	**1.465.538.400**	**17 Kecamatan/ Masyarakat Di Kab.Lampung Selatan**	**1.056.869.350**
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana `	Kalianda	100 Orang	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	100 Orang	668.000.000	100 Orang	200.000.000
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	17 Kecamatan	18 Dokumen	126.790.000	(Dana Alokasi Umum (DAU)	18 Dokumen	237.272.000	18 Dokumen	126.790.000
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Kalianda	50 Unit	238.049.450	Dana Alokasi Umum (DAU)	50 Unit	305.213.750	50 Unit	238.049.450
	Pengutan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kec Rajabasa, Kec Katibung, Kec Sidomulyo, Kec Ketapang	6 Desa	147.299.800	Dana Alokasi Umum (DAU)	6 Desa		6 Desa	147.299.800

		Bencana						151.199.800		
	Pengembangan Tim Reasksi Cepat	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kalianda	100 Orang	64.805.100	Dana Alokasi Umum (DAU)	100 Orang	59.603.900	100 Orang	64.805.100
	Gladi Kesiapsiagaan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Kalianda	310 Orang	126,790.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	310 Orang	44.2468.950	310 Orang	126,790.000
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Jumlah Korban Bencan yang dievakuasi dan diselamatkan,**	**Lampung Selatan**	**17 Kecamatan/ Masyarakat Di Kab.Lampung Selatan**	**825.494.100**	Dana Alokasi Umum (DAU)	**17 Kecamatan/ Masyarakat Di Kab.Lampung Selatan**		**17 Kecamatan/ Masyarakat Di Kab.Lampung Selatan**	**825.494.100**
								528.201.100		

	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kalianda	10 Dokumen	543.534.100	Dana Alokasi Umum (DAU)	10 Dokumen	324.002.100	10 Dokumen	543.534.100
	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	17 Kecamatan	15 Orang	33.464.500	Dana Alokasi Umum (DAU)	15 Orang	14.659.000	10 Orang	33.464.500
	Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	17 Kecamatan	700 Orang	199.526.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	700 Orang	180.333.000	100 Orang	199.526.000
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	17 Kecamatan	1 Laporan	48.960.500	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Laporan	9.207.000	1 Laporan	48.960.500
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				**370.274.650**					
	Koordinasi Penaganan Pasca Bencana	Data Kerusarusakan Pasca Bencana dan SDM yang terampil menghitung kerugian Pasca Bencana	17 Kecamatan	17 Data/Kec 60 Orang	370.274.650	Dana Alokasi Umum (DAU)	17 Data/Kec 60 Orang	119.552.050	17 Data/Kec 60 Orang	370.274.650

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan Program dan Kegiatan di BPBD Kabupaten Lampung Selatan didasarkan pada beberapa faktor, diantarannya pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah terutama Misi Ke-3 dan Misi Ke-5 dan Kebutuhan dimasa yang akan datang dalam upaya optimalisasi penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah, Rencana Kerja BPBD Tahun 2024 mencakup 2 Program dan terdiri dari 11 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan :

Perumusan program dan kegiatan di BPBD Kabupaten Lampung Selatan didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian visi dan misi kepala daerah (terutama visi ke-5) dan kebutuhan di masa yang akan datang dalam upaya optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan daerah. Rencana kerja BPBD Tahun 2025 mencakup 2 program yang terdiri dari 11 kegiatan dan 40 sub kegiatan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan dan Subkegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

c. Admnistrasi Barang Milik Daerah

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- Pengadaan Mebel

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penangulangan Bencana Daerah :

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana ;

- Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;

- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten Kota ;
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana ;
- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana ;
- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan ;
- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten Kota ;
- Gladi Kesiapsiagaan ;

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;

- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota ;
- Pencarian Pertolongan dan Evakuasi korban bencana .
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota .
- Aktivasi Sistem Komando .

d. Penataan Sistem Dasar Penanggulagan Bencana

- Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota;

BAB V.
PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun ke-1 periode Renstra BPBD Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi BPBD dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Rancangan Rencana ini selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi BPBD Kabupaten Lampung Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai BPBD Kabupaten Lampung Selatan serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PROVINSI LAMPUNG

No Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENCANA KERJA 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN		Catatan Penting		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	8	9	10
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**Lampung Selatan**	**80 Poin**	**6.022.248.050**	**80 Poin**	**6.391.631.450**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**80 Poin**	**5.607.122.700**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah**	**Kalianda**	**10 Dokumen**	**84.920.000**	**10 Dokumen**	**84.845.000**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah**	**10 Dokumen**	**60.000.000**
1	**05**	**01**	**2.01**	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kalianda	2 Dokumen	29.900.000	2 Dokumen	29.900.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000
1	**05**	**01**	**2.01**	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kalianda	1 Dokumen	16.020.000	1 Dokumen	15.020.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000
1	**05**	**01**	**2.01**	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kalianda	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	15.020.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000
1	**05**	**01**	**2.01**	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kalianda	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	9.925.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000
1	**05**	**01**	**2.01**	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kalianda	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000
1	**05**	**01**	**2.01**	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kalianda	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	10.000.000
1	**05**	**01**	**2.01**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan**	**Kalianda**	**12 Bulan**	**4.560.703.900**	**12 Bulan**	**3.991.917.700**	Administrasi Keuangan	**12 Bulan**	**4.425.740.550**
1	**05**	**01**	**2.02**	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kalianda	12 bulan	3.872.160.000	12 bulan	3.268.575.800	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	3.725.196.650
1	**05**	**01**	**2.02**	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kalianda	4 Dokumen	665.036.500	4 Dokumen	667.836.500	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	665.036.500

1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kalianda	2 Laporan	16.321.600	2 Laporan	16.321.600	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	16.321.600
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kalianda	2 Laporan	19.185.800	2 Laporan	19.185.800	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	19.185.800
1	05	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**									
							Kalianda		**35.375.450**		**35.375.400**			**36.304.600**
1	05	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kalianda	2 Laporan	18.283.000	2 Laporan	18.283.000	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	18.283.000
1	05	01	2.05	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kalianda	2 Laporan	17.021.600	2 Lapoan	17.021.600	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	17.021.600
1	05	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian**		**209.440.000**	**209.490.500**		**209.490.500**	**Administrasi Kepegawaian**	**12 bulan**	**209.440.000**
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Baju PDL, Kaos HKB dan Kaos Destana	Kalianda	4 Paket	189.402.500	4 Paket	189.402.500	Belanja Pakaian Batik, Kaos HKB dan Kaos Destana	Baju PDL, Kaos HKB dan Kaos Destana	189.440.000
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kalianda	2 Orang	20.000.000	2 Orang	20.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	20.000.000
1	05	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum**	**Kalianda**	**370.851.550**	**370.851.550**		**370.851.550**	**Administrasi Umum**	**12 bulan**	**370.851.550**
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kalianda	12 Paket	6.781.000	12 Paket	6.781.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan	6.781.000
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kalianda	12 Paket	134.747.050	12 Paket	134.747.050	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	160.046.400
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kalianda	12 Paket	2.592.000	12 Paket	2.592.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan	2.592.000
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kalianda	12 Paket	30.000.000	12 Paket	30.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	30.000.000

1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kalianda	12 Paket	24.627.150	12 Paket	**17.227.750**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	33.000.000
1`	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kalianda	12 Paket 1 Paket	18.000.000	1 2 Paket	18.0000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	19.800.000
1`	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kalianda		25.000.000	1 Paket	25.0000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		27.500.000
1`	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kalianda	12 Laporan	23.125.000	12 Laporan	19.925.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	38.500.000
1`	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta, Propinsi Lampung, Lampung Selatan	12 Laporan	126.746.000	12 Laporan	94.780.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	137.500.000
1`	05	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Barang Milik Daerah**	**Kalianda**	**165 unit**	**57.500.000**		**57.500.000**	**Barang Milik Daerah**	**165 unit**	**66.000.000**
1`	05	01	2.07	02	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kalianda	15 Unit	57.500.000	15 Unit		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2, Unit, 5 Unit,5 Unit	66.000.000
1`	05	01	2.09		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**Kalianda**	**12 Bulan**	**74.400.000**		**101.400.000`**	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**12 Bulan**	**79.200.000**
1`	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kalianda	12 bulan	74.400.000	12 bulan	101.400.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	79.200.000
1`	05	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**Kalianda**	**12 bulan**	**431.328.000**		**507.638.000**	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**12 bulan**	**411.323.000**
1`	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kalianda	12 bulan	372.928.0000	12 bulan	299.236.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan	361.185.000
1`	05	01	2.09	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kalianda	12 bulan	8.400.000	12 bulan	8.400.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan	22.638.000
1`	05	01	2.09	03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kalianda	1 gedung	50.000.000	1 gedung	200.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	27.500.000
1`	05	03			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Menurunnya Indeks Resiko Bencana**	**Lampung Selatan**	Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan	**2.742.861.700**		**2.157.951.950**	**Menurunnya Indeks Resiko Bencana**	**17 Kecamatan** Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan	**3.930.090.000**
1`	05	03			**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**	**Pemahaman Masyarakat Mengenai Pengurangan Resiko Bencana**	**Lampung Selatan**	**17 Kecamatan**	**94.049.200**		**44.660.400**		**17 Kecamatan**	**120.000.000**
1`	05	03	2.01	02	Sosialisasi , Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal	Lampung Selatan	100 Orang	94.049.200	100 Orang	44.660.400	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk	100 Orang	120.000.000

						di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya						yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya		
5	**1**	**2**	**1**		**Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang mungkin terjadi**	**Lampung Selatan**	**17 Kecamatan**				**Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang mungkin terjadi**	**17 Kecamatan**	**2.735.000.000**
1`	**05**	**03**	**2.02**	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kalianda	100 Orang	**1.858.928.750**	100 Orang		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 Orang	110.000.000
1`	**05**	**03**	**2.02**	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	17 kecamatan	18 Dokumen	311.593.000	18 Dokumen	237.272.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	70 Orang	330.000.000
1`	**05**	**03**	**2.02**	04	Penyediaan Peralatan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Kalianda	50 Unit	340.446.550	50 Unit	305.213.750	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	120 Unit	1.500.000.000
1`	**05**	**03**	**2.02**	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Desa Talang Baru, Suka Banjar,Way Muli, Rajabasa,Way Muli Timur	6 Kawasan	765.299.800	6 Kawasan	151.199.800	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4 Desa Binaan 2 Desa Bentukan	236.500..000
1`	**05**	**03**	**2.02**	07	Penanganan Pasca Bencana	Data Kerusakan Pasca Bencana dan SDM yang terampil dalam menghitung kerugian Pasca bencana	17 Kecamatan	17 Data/Kec 60 Orang	-	17 Data/Kec 60 Orang	-	Data Kerusakan Pasca Bencana dan SDM yang terampil dalam menghitung kerugian Pasca bencana	17 Data/Kec 60 Orang	330.000.000
1`	**05**	**03**	**2.02**	08	Pengembangan Tim Reaksi Cepat (TRC)	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kalianda	50 Orang	114.805.100	50 Orang	44.800.000	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya C)	50 Orang	77.000.000
1`	**05**	**03**	**2.02**	10	Gladi Kesiapsiagaan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Kalianda	100 Orang	126.790.000	100 Orang	44.000.000	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 Orang	165.000.000
5	**1**	**3**	**1**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Jumlah Korban Bencana yang dievakuasi dan diselamatkan**	**Lampung Selatan**	**33 SKPD**	**753.194.100**	**33 SKPD**	**528.261.1000**	**Jumlah Korban Bencana yang dievakuasi dan diselamatkan**	**33 SKPD**	**1.049.590.000**
1`	**05**	**03**	**2.02**	10	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Lampung Selatan	10 Dokumen	471.183.100	10 Dokumen	324.002.100	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	10 Dokumen	620.590.000
1`	**05**	**03**	**2.03**	10	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	**17 Kecamatan**	10 Orang	33.464.500	10 Orang	14.559.000	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	44.000.000
1`	**05**	**03**	**2.04**	10	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**17 Kecamatan**	100 Orang	199.526.000	100 Orang	150.333.600	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	275.000.000
1`	**05**	**03**	**2.05**	10	Aktivasi Sistem Komando	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	1 Laporan	48.960.000	1 Laporan	9.207.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	110.000.000
									9.005.134.750		**7.549.583.400**			

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025



BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmad, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ini merupakan tahapan penting dalam melaksanakan Rencana Stratejik (RENSTRA) yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan RENSTRA juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan memuat Pendahuluan, Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, Rencana Kerja dan Pendanaan serta Penutup.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Kalianda, Juli 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

TIRTA SAPUTRA, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750709 199902 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel.		iii
Bab I	Pendahuluan ...	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	3
	1.4. Sistematika Penulisan	4
Bab II	Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan	5
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II	5
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12
Bab III	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	21
Bab IV	Penutup	26

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan 8

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan 13

Tabel 3.1 Rencana Kerja Perubahan BKD Tahun 2025..... 22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis PD (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja Perubahan pada perangkat daerah terdiri atas beberapa tahapan antara lain yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal perubahan, penyusunan rancangan perubahan, perumusan rancangan akhir perubahan, dan penetapan perubahan Renja. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perubahan dengan berpedoman pada Evaluasi hasil Renja Triwulan II waktu berkenaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap PD wajib menyusun Renja Awal maupun Renja Perubahan sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perubahan ini disusun berdasarkan hasil evaluasi Renja Triwulan II waktu berkenaan untuk memastikan tujuan organisasi dalam indikator kinerja utama dapat tercapai dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengarui pada pelaksanaan rencana kerja di tahun berjalan ini.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adanya perubahan pada kegiatan maupun anggaran antara lain adalah faktor pendanaan, efektivitas pelaksanaan kegiatan, cakupan ketercapaian setiap sub kegiatan serta faktor lain yang tidak dapat diduga di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan.

I.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan disusun berlandaskan pada:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026;
- Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan adalah sebagai penyempurnaan dan penyesuaian atas pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA P-OPD) Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 adalah :

1. Mengevaluasi Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat sampai dengan Triwulan II pada tahun berkenaan.

2. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat
3. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistimatika penulisan dokumen Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta sistematikan penulisan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025

Bab II : Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD pada Triwulan II tahun berkenaan Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renja Awal OPD berdasarkan realisasi program, kegiatan dan Sub Kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun berjalan

Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan perubahan pada tahun 2025, indikator kinerja program/kegiatan, target capaian kinerja, kebutuhan dana/pagu tahun 2025 yang disajikan secara matrik.

Bab IV : Penutup

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

BAB II

HASIL RENCANA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II

Evaluasi bertujuan untuk menemukan penjelasan- penjelasan atas *outcome* yang diobservasi dan memahami logika-logika di dalam intervensi publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain dengan baik, sering diidentifikasikan sebagai salah satu bentuk dari evaluasi.

Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II baik yang memenuhi target dan tidak memenuhi target atau bahkan melebihi target kinerja serta faktor- faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja dan tentunya kebijakan/rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut.

Realisasi pelaksanaan APBD hingga Triwulan II anggaran Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 12.059.783.600 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 4.521.998.361 atau sebesar 37,50%. terdiri dari 2 program, 10 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dengan persentase realisasi anggaran dapat diuraikan masing-masing sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota:

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terealisasi 38,87%
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD terealisasi 77,19%
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD terealisasi 49,98%

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD terealisasi 84,87%
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD terealisasi 0%
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD terealisasi 14,84%

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi 50,38%
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN terealisasi 41,33%
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD terealisasi 13,29%

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terealisasi 52,58%
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi 0%
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga terealisasi 54,61%
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor terealisasi 23,53%
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan terealisasi 42,29%
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan terealisasi 83,08%
g. Fasilitasi Kunjungan Tamu terealisasi 0%
h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terealisasi 36,61%

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya terealisasi 100%

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terealisasi 30,33%

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terealisasi 36,06 %
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terealisasi 38,25%
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya terealisasi 36,67%
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terealisasi 50%

B. Program Kepegawaian Daerah

7. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN

a. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK terealisasi 23,28%
b. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian terealisasi 7,85%
c. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN terealisasi 17,10%
d. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian terealisasi 23,50%
e. Pengelolaan Data Kepegawaian terealisasi 47,30%

8. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

a. Pengelolaan Mutasi ASN terealisasi 10,15%
b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN terealisasi 11,19%
c. Pengelolaan Promosi ASN terealisasi 26,89%

9. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

a. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN terealisasi 16,31%
b. Pengelolaan Assessment Center terealisasi 22,86%
c. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat terealisasi 33,50%
d. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional terealisasi 10,08%

10. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur terealisasi 2,48%

b. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai terealisasi 9,40%
c. Pembinaan Disiplin ASN terealisasi 19,19%

Secara ringkas realisasi pelaksanaan APBD Tahun 2025 hingga triwulan II dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

TABEL 2.1. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		
			Target Capaian	Pagu Anggaran	Target Capaian	Pagu Anggaran	Target Capaian	Pagu Anggaran	Volume Satuan
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	**URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH**								
5.03	**KEPEGAWAIAN**								
5.03.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**75,94%**	**7.213.812.050**		**3.396.919.220**	**%**	**47,19%**	
2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Laporan Kinerja PD**							
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	23.790.700	2 Dokumen	9.246.600	100%	38,87%	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13.875.250	1 Dokumen	10.710.700	100%	77,19%	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	13.859.800	0 Dokumen	6.927.150	100%	49,98%	
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.155.900	1 Dokumen	8.619.800	100%	84,87%	

05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.914.000	0 Dokumen	0	100%	0 %	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	27.577.850	2 Laporan	4.093.900	100%	14,84%	
2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/Bulan	5.422.084.800	42 Orang	2.731.858.719	100%	50,38%	
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	558.339.300	0 Dokumen	230.742.650	100%	41,33%	
03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	21.067.000	1 Laporan	2.800.000	100%	13,29%	
2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**							
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.838.800	6 Paket	5.571.600	100%	54,61%	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	94.500.000	0 Paket	0	0%	0%	
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	10.202.400	6 Paket	5.571.600	100%	54,61%	

04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	89.360.400	6 Paket	21.026.500	100%	23,53%	
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	82.818.850	6 Paket	35.027.200	100%	42,29%	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	18.055.500	15 Dokumen	15.000.000	100%	83,08%	
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	6.362.700	6 Laporan	0	100%	0%	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	188.865.700	6 Laporan	69.135.427	100%	36,61%	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	8.769.000	1 Unit	8.769.000	100%	100%	
2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**							
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	183.081.900	6 Laporan	55.521.491	100%	30,33%	
2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**							
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.430.000	1 Unit	16.381.200	100%	36,06%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	220.950.000	5 unit	84.502.532	100%	38,25%	

06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	33.000.000	12 Unit	12.100.000	100%	36,67%	
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000	1 Unit	25.000.000	100%	50%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	10.000.000	1 unit	0	0%	0%	
5.03.2	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase ketersediaan data dan informasi kepegawaian**		**4.845.971.550**		**1.125.079.141**		**23,22%**	
2.01	**Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**							
02	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	555.817.550	0 Dokumen	129.384.270	60%	23,28%	
05	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	150.870.850	0 Dokumen	11.838.500	60%	7,85%	
08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	91.812.850	0 Lembaga	15.700.100	60%	17,10%	
10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	534.597.350	0 Dokumen	125.627.844	60%	23,50%	
11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	34.449.050	0 Dokumen	16.294.550	60%	47,30%	
2.02	**Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah ASN yang di mutasi dan yang mendapat promosi**							
01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	129.292.700	0 Dokumen	13.122.450	60%	10,15%	

02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	151.489.000	1 Dokumen	16.953.700	60%	11,19%	
03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	100 orang	114.315.150	50 orang	30.743.650	60%	26,89%	
2.03	**Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah ASN yang mengikuti diklat**							
01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	902.060.500	20 Orang	147.102.400	60%	16,31%	
02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	1.018.736.200	0 Dokumen	232.928.550	50%	22,86%	
05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	852.357.000	1 Dokumen	285.503.600	80%	33,50%	
14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	250 orang	86.463.750	80 orang	8.719.250	60%	10,08%	
2.04	**Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**							
01	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	171.243.500	0 Dokumen	4.247.800	60%	2,48%	
04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	95.839.800	0 Orang	9.009.000	60%	9,40%	
07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5 Orang	128.963.100	0 Orang	24.742.310	60%	19,19%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Tahun 2024, BKD telah melaksanakan 2 program, 10 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 1.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Indikator Kinerja Kunci											
1	Nilai indeks reformasi birokrasi bidang SDM dan aparatur - Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi - Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel, dan Bebas KKN - Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi - Promosi Jabatan dilakukan secara Terbuka - Penetapan Kinerja Individu - Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai - Pelaksanaan Evaluasi Jabatan - Sistem Informasi Kepegawaian			2.53	2.55	2.58	2.62	2.53	2.55	2.58	2.62	
	Indikator Kinerja PD											
1.	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah			11 Dok	11 Dok	11 Dok	11 Dok	11 Dok	11 Dok	11 Dok	11 Dok	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	Administrasi Keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Administrasi Kepegawaian			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Administrasi Umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.	Barang Milik Daerah			0 Unit	0 Unit	61 Unit	13 Unit	0 Unit	0 Unit	61 Unit	13 Unit	
6.	Jasa Penunjang Urusan Kantor			12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	
7.	Barang Milik Daerah yang dipelihara			38 Unit	32 Unit	38 Unit	48 Unit	31 Unit	32 Unit	38 Unit	48 Unit	
8.	Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			650 Org	650 Org	650 Org	650 Org	600 Org	630 Org	650 Org	650 Org	
9.	Jumlah ASN yang di mutasi dan yang mendapat promosi			327 Org	327 Org	327 Org	327 Org	300	327 Org	327 Org	327 Org	
10.	Jumlah ASN yang mengikuti diklat			300 Org	326 Org	326 Org	330 Org	300 Org	326 Org	326 Org	330 Org	
11.	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	

Adapun analisis kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung adalah menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang pelayanan Kepegawaian dan Diklat di Kabupaten Lampung Selatan yang dapat diuraikan pada masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Dilakukan pengurangan anggaran untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebesar **Rp. 14.543.800,-**.

b. Dilakukan pengurangan anggaran untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebesar **Rp. 3.164.550,-**.

c. Dilakukan pengurangan anggaran untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebesar **Rp. 6.932.650,-**.

d. Dilakukan pengurangan anggaran untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebesar **Rp. 1.536.100,-**.

e. Dilakukan pengurangan anggaran untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebesar **Rp. 5.763.500,-**.

f. Dilakukan pengurangan anggaran untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD sebesar **Rp. 14.483.950,-**

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Dilakukan penyesuaian gaji dan tunjangan pegawai pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar **Rp. 10.930.000,-**

b. Dilakukan pengurangan anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar **Rp. 11.877.000,-**

c. Dilakukan pengurangan anggaran untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD sebesar **Rp. 10.743.500,-**

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Dilakukan pengurangan anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar **Rp. 47.250.000,-**

b. Dilakukan pengurangan anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar **Rp. 37.172.700,-**

c. Dilakukan pengurangan anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar **Rp. 41.408.900,-**

d. Dilakukan pengurangan anggaran untuk sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu sebesar **Rp. 3.184.000,-**

e. Dilakukan pengurangan anggaran untuk Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar **Rp. 14.384.150,-.**

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Dilakukan penambahan anggaran untuk Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar **Rp. 25.000.000,-**

5. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Dilakukan pengurangan anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar **Rp. 47.442.900,-**

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Dilakukan penambahan anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar **Rp. 2.000.000,-**

B. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

a. Dilakukan pengurangan anggaran untuk Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK sebesar **Rp. 282.300.000,-.**

b. Dilakukan pengurangan anggaran untuk Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian sebesar **Rp. 69.110.300,-.**

c. Dilakukan pengurangan anggaran untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN sebesar **Rp. 53.673.000,-.**

d. Dilakukan pengurangan anggaran untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian sebesar **Rp. 171.459.900,-.**

e. Dilakukan pengurangan anggaran untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian sebesar **Rp. 17.429.500,-.**

2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

a. Dilakukan pengurangan anggaran untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN sebesar **Rp. 104.986.200,-.**

b. Dilakukan pengurangan anggaran untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN sebesar **Rp. 96.492.000,-.**

c. Dilakukan pengurangan anggaran untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN sebesar **Rp. 32.341.500,-.**

3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

a. Dilakukan penambahan anggaran untuk Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN sebesar **Rp. 216.502.150,-.**

b. Dilakukan penambahan anggaran untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center sebesar **Rp. 450.580.000,-.**

c. Dilakukan pengurangan anggaran untuk Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat sebesar **Rp. 537.075.000,-.**

d. Dilakukan pengurangan anggaran untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional sebesar **Rp. 31.410.000,-.**

4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

a. Dilakukan pengurangan anggaran untuk Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebesar **Rp. 110.484.350,-.**

b. Dilakukan pengurangan anggaran untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai sebesar **Rp. 71.461.600,-.**

c. Dilakukan pengurangan anggaran untuk Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN sebesar **Rp. 74.189.100,-.**

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Perubahan BKD Tahun 2025 mencakup 2 program dan terdiri dari 10 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Rumusan rencana kerja program dan kegiatan BKD Tahun 2025 dan sumber dana APBD Kabupaten secara detail sebagai berikut:

TABEL 3.1. RENCANA KERJA PERUBAHAN BKD TAHUN 2025

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	APBD 2025				Catatan Penting	Perubahan APBD 2025			Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
5					**UNSUR PENUNJANG PEMERINTAHAN**													
5	**3**				**KEPEGAWAIAN**								**12.173.488.500**				**10.942.340.500**	
5	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**7.155.179.850**				**6.909.362.150**	
5	**3**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**99.453.500**				**53.028.950**	
5	3	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kalianda	75,94%	3 Dokumen	10 Dokumen	23.790.700		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	9.246.900	
5	3	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kalianda	75,94%	1 Dokumen	10 Dokumen	13.875.250		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.710.700	
5	3	1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kalianda	75,94%	1 Dokumen	10 Dokumen	13.859.800		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	6.927.150	
5	3	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kalianda	75,94%	1 Dokumen	10 Dokumen	10.155.900		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.619.800	
5	3	1	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kalianda	75,94%	1 Dokumen	10 Dokumen	10.194.000		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.430.500	
5	3	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kalianda	75,94%	4 Laporan	10 Dokumen	27.577.850		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	13.093.900	

5	**3**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**6.001.491.100**				**5.967.940.600**	
5	3	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan A	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kalianda	75,94%	42 Orang	3 Dokumen	5.422.084.800		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang	5.411.154.800	
5	3	1	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kalianda	75,94%	1 Dokumen	3 Dokumen	558.339.300		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	546.462.300	
5	3	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kalianda	75,94%	2 Laporan	3 Dokumen	21.067.000		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	10.323.500	
5	**3**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**501.004.350**				**357.604.600**	
5	3	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)	Kalianda	75,94%	11 Paket	100,00%	10.838.800		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	10.838.800	
5	3	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)	Kalianda	75,94%	2 Paket	100,00%	94.500.000		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	47.250.000	
5	3	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)	Kalianda	75,94%	11 Paket	100,00%	10.202.400		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	10.202.400	
5	3	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)	Kalianda	75,94%	11 Paket	100,00%	89.360.400		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	52.187.700	
5	3	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)	Kalianda	75,94%	12 Paket	100,00%	82.818.850		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	41.409.950	
5	3	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)	Kalianda	75,94%	15 Dokumen	100,00%	18.055.500		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	18.055.500	

5	3	1	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)	Kalianda	75,94%	11 Laporan	100,00%	6.362.700		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	3.178.700	
5	3	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)	Kalianda	75,94%	12 Laporan	100,00%	188.865.700		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	174.481.550	
5	**3**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**8.769.000**				**33.769.000**	
5	3	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barang Milik Daerah	Kalianda	75,94%	6 Unit	6Unit	8.769.000		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	33.769.000	
5	**3**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang**								**183.081.900**				**135.639.000**	
5	3	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jasa Penunjang Urusan Kantor	Kalianda	75,94%	12 Laporan	12 Laporan	183.081.900		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	135.639.000	
5	**3**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**361.380.000**				**361.380.000**	
5	3	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kalianda	75,94%	1 Unit	60 Unit	45.430.000		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	45.430.000	
5	3	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kalianda	75,94%	5 Unit	60 Unit	222.950.000		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	222.950.000	
5	3	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kalianda	75,94%	43 Unit	60 Unit	33.000.000		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	33.000.000	
5	3	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kalianda	75,94%	2 Unit	60 Unit	50.000.000		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000	
5	3	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kalianda	75,94%	1 Unit	60 Unit	10.000.000		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	10.000.000	

5	**3**	**2**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**								**5.018.308.650**				**4.032.978.350**	
5	**3**	**2**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**								**1.367.547.650**				**773.574.950**	
5	3	2	2.01	02	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kalianda	73,45%	1 Dokumen	600 Orang	555.817.550		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	273.517.550	
5	3	2	2.01	05	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kalianda	73,45%	1 Dokumen	600 Orang	150.870.850		Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen	81.760.550	
5	3	2	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kalianda	73,45%	1 Lembaga	600 Orang	91.812.850		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	38.139.850	
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kalianda	73,45%	1 Dokumen	600 Orang	534.597.350		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	363.137.450	
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kalianda	73,45%	1 Dokumen	600 Orang	34.449.050		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	17.019.550	
5	**3**	**2**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**								**395.096.850**				**161.277.150**	
5	3	2	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Kalianda	73,45%	1 Dokumen	100 Orang	129.292.700		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	24.306.500	

5	3	2	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat AS	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Kalianda	73,45%	2 Dokumen	100 Orang	151.489.000		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	54.997.000	
5	3	2	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Kalianda	73,45%	1 Dokumen	100 Orang	114.315.150		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	81.973.650	
5	**3**	**2**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**								**2.859.617.750**				**2.958.214.900**	
5	3	2	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja AS	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Kalianda	73,45%	300 Orang	400 Orang	902.060.500		Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	1.118.562.650	
5	3	2	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Kalianda	73,45%	1 Dokumen	400 Orang	1.018.736.200		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	1.469.316.200	
5	3	2	2.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Kalianda	73,45%	1 Dokumen	400 Orang	852.357.300		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	315.282.300	
5	3	2	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Kalianda	73,45%	100 Orang	400 Orang	86.463.750		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	100 Orang	55.053.750	

5	**3**	**2**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**								**396.046.400**				**139.911.350**	
5	3	2	2.04	01	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kalianda	73,45%	1 Dokumen	3 Dokumen	171.243.500		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	60.759.150	
5	3	2	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kalianda	73,45%	100 Orang	3 Dokumen	95.839.800		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	24.378.200	
5	3	2	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kalianda	73,45%	10 Orang	3 Dokumen	128.963.100		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	10 Orang	54.774.000	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2025 yang tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD. Secara kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.



[TAHUN 2025]

[RENCANA KERJA PERUBAHAN]

[RSUD DR.H.BOB BAZAR,SKM]



[PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN]
[UPTD RSUD Dr.H.BOB BAZAR,SKM]
JL.LETTU ROHANI NO. 14B KALIANDA, TELP (0727) 322159.322160
KALIANDA - KODE POS 35519

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) RSUD Dr. H. Bob Bazar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM menyusun Rancangan Awal Renja Tahun 2025 yang berpedoman kepada Rencana Strategis RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Tahun 2021 - 2026 serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 – 2026.

Dalam penyusunan Rancangan Awal Renja RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Tahun 2025 ini, RSUD mencoba memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang dihadapi RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM serta Kabupaten Lampung Selatan pada umumnya. Untuk itu dengan tersusunya Renja RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Tahun 2025 ini diharapkan dapat mengoptimalkan Kinerja Aparatur Pemerintah dalam penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kepada semua pihak kami menghaturkan terima kasih atas kontribusinya dalam penyusunan renja perubahan RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ini. Semoga apa yang telah direncanakan dapat terimplementasikan dengan baik serta mendapatkan bimbingan dan ridho allah Swt, sehingga membuahkan hasil yang berdaya guna.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Kalianda, 8 juli 2025
Plt Direktur RSUD Dr H Bob Bazar SKM
Kabupaten Lampung Selatan



dr. DJOHARDI, M.H
Nip. 19811122 200902 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang……..... 1
1.2 Landasan hukum……..... 5
1.3 Maksud dan Tujuan..... 7
1.3.1 Maksud ……... 7
1.3.2 Tujuan…… 7
1.4 Sistematika Penulisan..... 7

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra…… 9
2.1.1 Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu dan perkiraan Capaian Tahun Berjalan…… 9
2.1.2 Capain Renstra Perangkat Daerah tahun lalu…….. 16
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD…… 19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi PD…….. 21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD……. 21

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
3.1 Telahaan terhadap kebijakan nasional …… 30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD …… 32
3.3 Program dan Kegiatan …… 36

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah 49

BAB V Penutup 61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM dan Pencapaian Renstra RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Kab. Lampung Selatan	10
Tabel 2.2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan UPTD RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan	17
Tabel 2.4.1	Review terhadap Rancangan awal RKPD UPTD RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM tahun 2025 Kab. Lampung Selatan	22
Tabel 3.3.1	Rencana program dan kegiatan prioritas UPTD RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan	37
Tabel 4.1	Rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 UPTD RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Kab.Lampung Selatan	50
Tabel 4.2.1	Sinkronisasi Prioritas Perangkat dengan Prioritas Daerah Tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan	56
Tabel 4.2.2	Sinkronisasi Prioritas Perangkat dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah….....	2
Gambar 1.2	Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD ….....	3
Gambar 1.3	Strategi RPJMN Kemenkes 2020-2024…….....	31

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

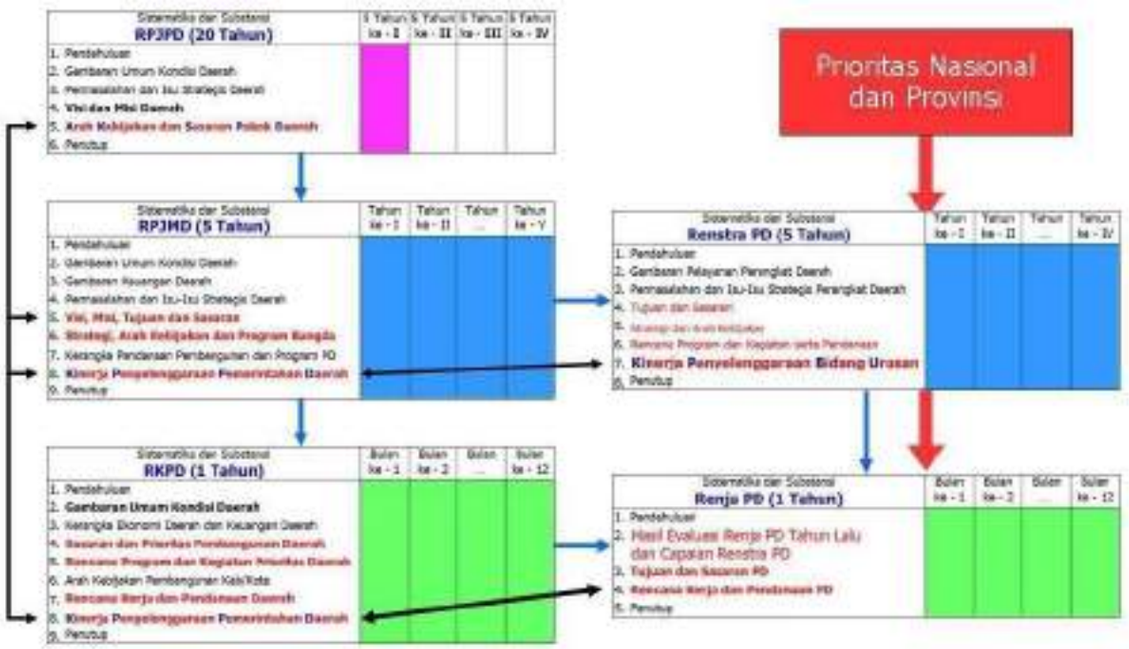
Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien dan efektif, yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang SMART, terpadu, dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Telah dipahami secara umum bahwa: *failing to plan isplanning to fail*; gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah adalah rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahannya untuk mewujudkan target RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Lihat gambar 1.1.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan kinerjaperangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Lihat gambar 1.2.

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan PembangunanDaerah

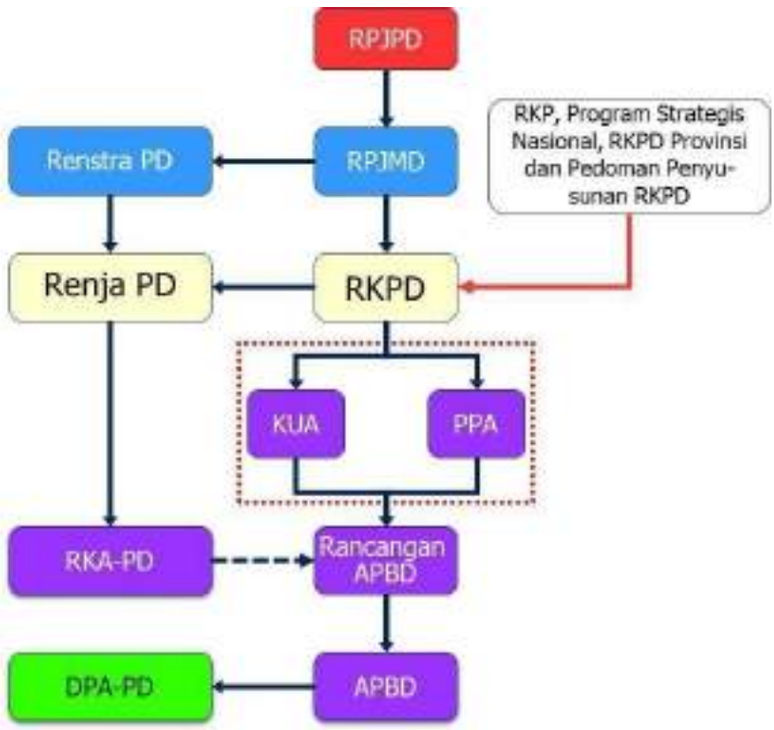


Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunanRenja PD adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja PD,
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahunberjalan,
3. Penyusunan Rancangan Renja PD berdasarkan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan RancanganAwal RKPD,
4. Pembahasan Rancangan Renja PD dalam Forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD,

6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah,paling lambat 1(satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1. Sedangkan tindak lanjut dokumen Renja PD hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2.



Gambar 1.2. Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja RSUD Dr.H.Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

a. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
b. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
d. Undang -undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah;
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang PerangkatDaerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dibah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-6889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
k. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ Tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca PemilihanKepala Daerah Serentak Tahun 2020;
l. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 -2024;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) KabupatenLampung Selatan Tahun 2005-2025;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatansebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
o. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
p. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
q. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta memuat program dan kegiatan serta indikator yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan sejalan dengan tujuan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 – 2026 dan Renstra RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 – 2026.

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2021-2026 melalui perencanaankinerja tahunan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ini adalah : menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasionil :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran RSUD Dr H Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra RSUD Dr H Bob Bazar,SKM dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2021-2026;
b. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan laporan kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja RSUD Dr H Bob Bazar SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, hasil review terhadap renja RKPD, serta penelaahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran Renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu program pembangunan daerah (program strategi daerah) sesuai dengan bidang urusan perangkat daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu program pembangunan daerah (program strategis daerah) dan program perangkat daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPJMD.

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Tahun 2023 dan Capaian Renstra RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM

Bagian ini menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Dr H Bob Bazar SKM Tahun 2023 dan perkiraan capaiannya di tahun 2024 serta capaian Renstra RSUD Dr H Bob Bazar SKM tahun 2024.

Tabel yang akan digunakan menjelaskan kedua hal tersebut adalah tabel 2.1 yang memuat rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra RSUD Dr H Bob Bazar SKM sampai dengan tahun 2023 Kabupaten Lampung Selatan. Tabel 2.1 tersebut ditempatkan pada subbab 2.1.1.

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (tahun 2023) dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (tahun 2024)

Hasil pelaksanaan Renja RSUD Dr H Bob Bazar SKM Tahun 2023 dan perkiraan capaiannya di tahun 2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.1.1 dibawah ini :

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
RSUD Dr H Bob Bazar SKM sampai dengan Triwulan II tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan

Nama Perangkat Daerah : RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Realisasi program dan kegiatan (renja Perangkat daerah triwulan II tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d triwulan II tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)*100
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan (poin)	80	80	80	80	80	80	80	80
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10	10	10	10	100%	7	27	270
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	2	2	2	100	3	7	350

RENJA PERUBAHAN RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Realisasi program dan kegiatan (renja Perangkat daerah triwulan II tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d triwulan II tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)*100
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen	1	1	1	1	100	0	3	200
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan	1	1	1	1	100	0	3	200
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	1	1	1	1	100	1	3	200
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	1	1	1	0	0	0	2	200
1	02	01	2.01	06	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	4	4	4	100	3	11	275
1	02	01	2.02		Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan	42	42	42	42	86.04%	12	126	228%
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	12	12	12	100	6	30	250
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	12	12	12	100	6	30	250

RENJA PERUBAHAN RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Realisasi program dan kegiatan (renja Perangkat daerah triwulan II tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d triwulan II tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)*100
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	1	1	1	100	0	0	200
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	17	17	17	17	100	0	0	200
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyelenggaraan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	1	1	1	100%	0	1	200
1	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1	1	100%	0	1	200
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12	12	12	12	100%	16	100	0
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	12	12	12	12	100%	6	2	0
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Kantor	24	24	24	24	100%	12	60	250
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening telepon, internet air dan listrik	12	12	12	12	100%	6	30	250
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan umum kantor	12	12	12	12	100%	6	3.0	250
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik Daerah yang dipelihara	28	28	28	28	100%	17	73	260

RENJA PERUBAHAN RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Realisasi program dan kegiatan (renja Perangkat daerah triwulan II tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d triwulan II tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)*100
	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3	3	3	3	100	2	8	266
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	25	25	25	25	100	15	65	260
1	02	01	2.10		Peningkatan pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD Dalam Satu Tahun	1	1	1	1	100	0.50	2.5	250
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	1	1	1	100	0.50	2.5	250
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata lama perawatan di Rumah Sakit (AvLOS= Average Length Of Stay)	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	226	272	167	167	100%	4	443	165
1	02	02	2.01	07	Pengembangan fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah fasilitas Kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana prasarana alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar	1	1	1	1	100%	0	2	200
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat Kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	60	145	1	1	100%	4	150	50

RENJA PERUBAHAN RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Realisasi program dan kegiatan (renja Perangkat daerah triwulan II tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d triwulan II tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)*100
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	165	126	165	165	100%	0	291	176
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100	100	42	42	100%	0	100	100%
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	150	0	50	50	100%	0	50	100%
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	40	50	50	100%	0	50	100%
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Sistem informasi kesehatan yang terintegrasi	1	1	1	0	0%	1	1	100%
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1	1	1	0	0%	1	1	100%
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Bidang Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi	85 %	85 %	85 %	85 %	82%	85%	85%	85%
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	Rasio ideal antara SDM Kesehatan dan unit Pelayanan Kesehatan	71	51	101	101	100%	90	161	227
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan kebutuhan Sumber daya Manusia kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	70	50	100	100	100	90	182	342

RENJA PERUBAHAN RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Realisasi program dan kegiatan (renja Perangkat daerah triwulan II tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d triwulan II tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)*100
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kesehatan	Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan	1	1	1	1	100	0	2	200
1	02	03	2.03		Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Komptensi Teknis SDM Kesehatan	240	240	70	70	100%	120	430	179
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi teknis Sumber Daya Manusia kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	240	240	70	70	100%	120	430	179

2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah (Triwulan II tahun 2025)

Dari tabel 2.1.1 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Rincian hasil pelaksanaan program/kegiatan triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Pada Rencana Kerja tahun anggaran 2025 realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran pada RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dan Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada sub kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
b. Realisasi Pelaksanaan program / kegiatan tahun 2025 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :
   - Program penunjang urusan pemerintah daerah :
     1. Program kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dengan capaian kinerja 52.71%
     2. Program kegiatan pelayanan administrasi keuangan telah diselesaikan tepat waktu dengan capaian kinerja 49.38%
     3. Program kegiatan adminisrasi umum perangkat daerah dengan capaian kinerja 50.00%
     4. Program kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan capaian kinerja 48.15 %
     5. Program kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah dengan capaian kinerja 4379 %
     6. Program kegiatan peningkatan pelayanan BLUD dengan capaian kinerja 43.41 %
   - Program peemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat
     1. Program kegiatan penyelenggaraan sistem informasi Kesehatan secara terintegrasi dengan capaian kinerja 99.33 %
   - Program peningkatan kapsitas sumber daya manusia Kesehatan
     1. Program kegiatan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan capaian kinerja 47.60 %
     2. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.21%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Dr. H. Bob Bazar,SKM

Berdasarkan RPJMD Kab. Lampung Selatan 2022-2026 Tugas dan fungsi RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan termuat dalam **misi 2** yakni "**Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial"**, yang salah satu sasarannya adalah meningkatnya kualitas derajat Kesehatan masyarakat. Berikut analisis kinerja pelayanan RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra. Analisis kinerja pelayanan sebagaimana tabel berikut :

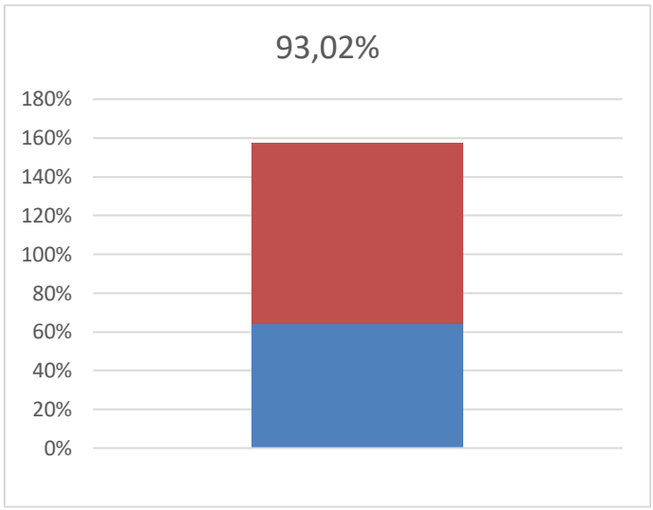
Tabel 2.2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Dr H Bob Bazar SKM
Kabupaten Lampung Selatan

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	TW II Tahun 2025	
1	Persentase penggunaan tempat tidur (BOR = Bed Ocupancy rate)	-	-	61%	62%	63%	64%	57,70%	84.49%	63%	93.02%	Realisasi BOR tahun 2025 sampai dengan triwulan II sudah mencapai target.
2	Angka Kematian <48 jam (GDR = Gross Death Rate)	-	-	<25 ‰	<20 ‰	<17 ‰	<14 ‰	43,38‰	37.3‰	<17 ‰	<36.87 ‰	Target GDR RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM tahun 2025 adalah <14‰ sedangkan realisasi sampai dengan triwulan pada tahun 2025 sebesar 36.87‰. Dalam hal ini tidak mencapai target yang ditentukan oleh RSUD. Namun sudah cukup memenuhi target pada standar yang ditentukan oleh (Depkes RI,2005, Kementerian Kesehatan 2011) < dari 45 per 1000 penderita. Yakni <45‰

3	Angka Kematian >48 jam (NDR = Net Death Rate)	-	-	< 9 ‰	< 8 ‰	< 6 ‰	< 4 ‰	11,39‰	9.93‰	< 6 ‰	< 9.78 ‰	Target NDR RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM tahun 2025 adalah < 4‰ sedangkan realisasi sampai dengan triwulan II pada tahun 2025 sebesar 9.78‰. Dalam hal ini tidak mencapai target yang ditentukan oleh RSUD. Namun sudah cukup memenuhi target pada standar yang ditentukan oleh (Depkes RI,2005, Kementerian Kesehatan 2011) < dari 25 per 1000 penderita. Yakni <25‰
4	Pelayanan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS	-	-	81%	82%	83%	84%	79%	82.25%	83%	84%	Pada tahun 2025 sampai dengan triwulan II dilakukan survey IKM pada pelayanan rawat inap jumlah responden 200 orang yang disesuaikan dengan jumlah kunjungan per unit sedangkan teknik pengumpulan data meliputi observasi dan kuisioner. Target IKM Tahun 2025 sebesar 84 % dengan realisasi pada tahun 2025 sampai dengan triwulan II telah mencapai target yakni sebesar 82.25 %. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan indeks kepuasan masyarakat : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit diseluruh lini; 2. Mengembangkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana rumah sakit; 3. Melakukan inovasi dan mengembangkan produk unggulan pelayanan RS melalui pelatihan-pelatihan baik internal maupun eksternal, studi banding.

Berdasarkan tabel 2.2.1 diatas dapat diambil kesimpulan serta langkah-langkah upaya yang diambil dalam mengatasi kinerja yang belum mencapai target berikut penjelasan dibawah ini :

a. **Persentase Angka Penggunaan Tempat Tidur (BOR = Bed Occupancy Rate)** adalah persentase penggunaan tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu, hal ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan dari tempat tidur rumah sakit. Target BOR RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2025 adalah sebesar 64 %, angka capaian pada tahun 2025 sampai dengan triwulan 2 yaitu sebesar 93.02%. Berikut grafik BOR RSUD terlampir dibawah ini :



Realisasi BOR tahun 2025 pada triwulan 2 sudah mencapai target dari yang ditentukan yakni 93.02%. Hal ini dikarenakan bertamambahnya SDM dan failitas layanan Kesehatan yaitu ruang perawatan syaraf.

b. **Angka Kematian < 48 jam (GDR = Gross Death Rate)** yaitu angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 Target GDR RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM tahun 2025 adalah <14‰ sedangkan realisasi sampai dengan triwulan 2 pada tahun 2025 sebesar 36.87‰. Dalam hal ini tidak mencapai target yang ditentukan oleh RSUD. Namun sudah cukup memenuhi target pada standar yang ditentukan oleh (Depkes RI,2005, Kementerian Kesehatan 2011) < dari 45 per 1000 penderita. Yakni <45‰. Upaya-upaya yang dilakukan rumah sakit dalam rangka meningkatkan capaian GDR sesuai target :

1. Implementasi Early Warning System (EWS) oleh pemberi pelayanan asuhan (PPA);
2. Pemberi pelayanan optimal.

c. **Angka Kematian > 48 jam (NDR = Net Death Rate)** yaitu angka kematian > 48 jam setelah Target NDR RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM tahun 2025 adalah < 4‰ sedangkan realisasi sampai dengan triwulan 2 pada tahun 2025 sebesar 9.78‰. Dalam hal ini tidak mencapai target yang ditentukan oleh RSUD. Namun sudah cukup memenuhi target pada standar yang

ditentukan oleh (Depkes RI,2005, Kementerian Kesehatan 2011) < dari 25 per 1000 penderita. Yakni <25‰ Upaya-upaya yang dilakukan rumah sakit dalam rangka meningkatkan capaian NDR yaitu:

1. Menerima pasien sesuai kemampuan rumah sakit;
2. Membina komunikasi efektif dengan rumah sakit rujukan.

d. **Pelayanan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Rumah Sakit** berisi tingkat kepuasan Pada Target IKM Tahun 2025 sebesar 84 % realisasi pada tahun 2025 sampai dengan triwulan 2 sudah

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM

a. Isu-isu strategis yang bersumber dari Internal

1. Pembangunan Gedung Cathlab, karena RSUD Bob Bazar sebagai layanan pengampu layanan KJSU KIA.
2. Pembangunan gedung Rawat Inap Syaraf, karena jumlah pasien dengan gangguan sistem saraf mengalami peningkatan yang cukup besar.

b. Isu-isu strategis yang bersumber dari Eksternal

1. Keterbatasan dana Pemerintah Pusat (APBN, DAK) dan dana Pemerintah Daerah (APBD) dalam mensubsidi Rumah Sakit.
2. Perubahan prilaku yang mengakibatkan perubahan pola penyakit
3. Keberadaan dalam persaingan industri kesehatan di Kabupaten Lampung selatan dan sekitarnya,termasuk semakin banyaknya dokter dan masyarakat yang membuka praktek mendirikan klinik masing-masing menyebabkan tingkat persaingan dalam industri kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan menjadi semakin ketat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah, dilakukan penyelarasan program dan kegiatan kedalam nomenklatur permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Oleh karena itu RKPD Tahun 2025 yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja PD Tahun 2025 pelu dilkaukan penyesuaian agar selaras dengan permendagri 90. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4.1
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton**	**Rata-rata lama perawatan di rumah sakit (AvLOS= Average Lenght Of Stay)**	**3 hari**	**18.039.307.700,00**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton**	**Rata-rata lama perawatan di rumah sakit (AvLOS= Average Lenght Of Stay)**	**3 hari**	**18.039.307.700,00**	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton**	**Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**	**181 unit**	17.998.816.050,00	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton**	**Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**	**181 unit**	17.998.816.050,00	
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6 unit	6.235.166.559,00	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6 unit	6.235.166.559,00	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat PenunjangMedik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 unit	11.643.649.491,00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat PenunjangMedik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 unit	11.643.649.491,00	

	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	165 Unit	120.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	165 Unit	120.000.000,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton**	**Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan**	**42 layanan**	**35.347.650,00**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	**Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan**	**42 layanan**	35.347.650,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30 orang	20.290.800,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30 orang	20.290.800,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30 orang	15.056.850,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30 orang	15.056.850,00	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton**	Sistem informasi kesehatan yang terintegrasi	**1 dok**	**5.144.000,00**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	**Sistem informasi kesehatan yang terintegrasi**	**1 dok**	**5.144.000,00**	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 dok	5.144.000,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 dok	5.144.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton**	**Persentase SDM Bidang Kesehatan yang memiliki kompetensi**	**90 %**	**24.541.300,00**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	**Persentase SDM Bidang Kesehatan yang memiliki kompetensi**	**90 %**	**24.541.300,00**	

	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton**	**Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan**	**83 %**	**10.978.500,00**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton**	**Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan**	**83 %**	**10.978.500,00**	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 orang	5.494.000,00	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 orang	5.494.000,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber DayaManusia Kesehatan	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 dok	5.484.500,00	Pembinaan dan Pengawasan Sumber DayaManusia Kesehatan	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 dok	5.484.500,00	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton**	**Peningkatan kompetensi teknis SDM Kesehatan**	**70 orang**	**13.562.800,00**	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton**	**Peningkatan kompetensi teknis SDM Kesehatan**	**70 orang**	**13.562.800,00**	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	70 orang	13.562.800,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	70 orang	13.562.800,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton**	**indeks Kepuasan Layanan**	**80 poin**	**107.202.457.712,33**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton**	**indeks Kepuasan Layanan**	**80 poin**	**107.202.457.712,33**	

	Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton**	**Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**10 dok**	**38.396.300,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton**	**Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**10 dok**	**38.396.300,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	12.997.500,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	12.997.500,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	5.374.300,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	5.374.300,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	4.891.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	4.891.500,00	

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	5.095.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	5.095.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	5.027.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	5.027.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	5.011.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	5.011.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton**	**Penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah**		**26.669.803.850,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton**	**Penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah**		**26.669.803.850,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	211 orang/bulan	22.528.864.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	211 orang/bulan	22.528.864.000,00	

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	4.130.969.850,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	4.130.969.850,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	4.959.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	4.959.500,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	17 laporan	5.010.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	17 laporan	5.010.500,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton**	**Penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**1 dok**	**5.002.500,00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton**	**Penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**1 dok**	**5.002.500,00**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BarangMilik Daerah pada SKPD	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dok	5.002.500,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BarangMilik Daerah pada SKPD	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dok	5.002.500,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**18.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton**	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**18.000.000**	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dok	18.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dok	18.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton**	**Jasa penunjang urusan kantor**	**24 laporan**	**171.600.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton**	**Jasa penunjang urusan kantor**	**24 laporan**	**171.600.000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	153.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	153.600.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	18.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	18.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton**	**Barang Milik Daerah yang Dipelihara**	**34 unit**	**131.520.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton**	**Barang Milik Daerah yang Dipelihara**	**34 unit**	**131.520.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	119.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	119.000.000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau BangunanLainnya	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	12.520.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau BangunanLainnya	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	12.520.000,00	
	Peningkatan pelayanan BLUD	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton**	**Pelayanan BLUD dalam satu tahun**	**12 bulan**	**80.168.135.062,33**	**Peningkatan pelayanan BLUD**	**Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton**	**Pelayanan BLUD dalam satu tahun**	**12 bulan**	**80.168.135.062,33**	
	Pendapatan dari Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 unit kerja	80.168.135.062,33	Pendapatan dari Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 unit kerja	80.168.135.062,33	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

A. Prioritas Pembangunan Nasional

RPJMN 2020 – 2024 dengan **Visi Pemerintah (Kabinet Indonesia Maju) yakni : 'Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong'**. Adapun Visi Kementerian Kesehatan Sesuai Edaran Menteri PPN/Bappenas No.b.899/M.PPN/Ses/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 desember 2019. **Visi Kementerian Kesehatan : 'Terwujudnya masyarakat Sehat, Produktif, mandiri dan Berkeadilan untuk Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong''.** Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kementerian Kesehatan menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia;
2. Memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan;
3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumberdaya kesehatan;
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Arah kebijakan RPJMN Bidang Kesehatan 2020-2024 yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunya angka kematian ibu, menurunnya prevelensi gizi kurang pada balita.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi RPJMN 2020 – 2024 adalah :

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak KB, dan kesehatan reproduksi;
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat;
3. Peningkatan pengendalian penyakit;
4. Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS);
5. Penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan.

Gambar 1.3
Strategi RPJMN 2020-2024



Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 - 2024, menetapkan 14 sasaran strategis yakni :

- Meningkatnya Ketersediaan Fasyankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu
- Meningkatnya perbaikan pengelolaan BPJS kesehatan
- Menurunnya kematian maternal dan neonatal
- Meningkatnya status gizi balita
- Meningkatnya prommosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- Meningkatnya advokasi kesehatan dan aaksi lintas sektor
- Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan pendekatan faktor risiko
- Meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
- Meningkatnya akses kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
- Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar
- Meningkatnya pembiayaan kesehatan
- Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah
- Meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten lampung Selatan Tahun 2021 – 2026, visi pembangunan jamngka menengah Kabupaten Lampung Selatan adalah"**TERWUJUDNYA MASYARAKAT LAMPUNG SELATAN YANG BERINTEGRASI, MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG** " .

Untuk mencapai Visi tersebut, diruuskan 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial;
3. Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan;
4. Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah;
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel;

Tujuan dan Sasaran Renstra RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan dan misi Bupati, Penjabaran lebih detail dari visi misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini tertuang dalam arah kebijakan umum yang terimplementasi dalam program pembangunan daerah. Tugas dan fungsi RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan termuat dalam **misi 2** yakni "**Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial".** yang salah satu sasarannya adalah Meningkatnya kualitas derajat Kesehatan masyarakat. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. Adapun sasaran yang ditetapkan RSUD Dr.H.Bob Bazar adalah:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sesuai Dengan Visi, dan Misi RPJMD Kab. Lampung Selatan 2021- 2026

NO	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	AWAL RPJMD	AKHIR PERIODE RPJMD	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
									2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan yang berintegrasi, Maju dan Sejahtera dengan Semangat Gotong Royong	Misi Kedua : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,26	71,00	Meningkatnya kualitas Derajat kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup (Tahun)	69,6	69,9	70,2	70,5	70,8	71
2	Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan yang berintegrasi, Maju dan Sejahtera dengan Semangat Gotong Royong	Misi Kelima : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparana, efektif dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	80,78	81	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada RSUD	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) (poin)	81	81	82	82	83	84

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Sesuai Dengan Visi, dan Misi RPJMD Kab. Lampung Selatan 2021 - 2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2021-2026)	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	SASARAN OPD (RSUD Dr.H.BOB BAZAR,SKM)		Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR SASARAN OPD (RSUD Dr.H.BOB BAZAR,SKM)	FORMULASI	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2021-2026)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan pelayanan kesehatan yang paripurna bermutu dan berstandar nasional	Indek Kepuasan Masyarakat pelayanan RS	80	85	1	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan	Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat Pemberi pelayanan yg terstandar Kualitas SDM	Peningkatan fasilitas kesehatan, pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan kesadaran kesehatan masyarakat dan penguatan sistem kesehatan Evaluasi & monitoring SPM, SOP,HBL secra berkala, akreditasi RS versi	Persentase penggunaan tempat tidur (BOR = Bed Occupancy Rate)	Jumlah hari perawatan / (total tempat tidur x satuan hari) x 100 %	60,00%	60,20%	61%	62%	63%	64%	65%	65%
								Angka Kematian ≤ 48 jam (GDR = Gross Death Rate)	(Jumlah pasien mati seluruhnya / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)) X 1000 permil	< 30‰	< 30‰	< 25‰	< 20‰	< 17‰	< 14‰	< 10‰	< 10‰
								Angka Kematian ≥ 48 jam (NDR = Net Death Rate)	(Jumlah pasien mati > 48 jam / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)) X 1000 permil	< 11‰	< 11‰	< 9‰	< 8‰	< 6‰	< 4‰	< 2‰	< 2‰
								Pelayanan IKM (Indeks Kepuasan masyarakat) Rumah Sakit	Nilai rata-rata IKM Rumah Sakit	80%	80%	81%	82%	83%	84%	85%	85%

						Sarana & prasarana	SNARS Pendidikan peltihan teknis, standar jumlah kualifikasi pendidikan dan kompetensi tenaga Pengadaan sarpras RS, Pemeliharaan Sarpras RS									

3.3 Program dan Kegiatan

Tabel T-C.33. dibawah ini berisi daftar program dan kegiatan, yaitu Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan bidang urusan RSUD Dr H Bob Bazar SKM Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025.

Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan Kabupaten Lampung Selatan adalah program strategis daerah yang dilaksankaan oleh RSUD Dr H Bob Bazar SKM sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2025.

Dasar pertimbangan penetapan program dan kegiatan prioritas ini ini adalah :

1. Pada institusi yang bergerak pada pelayanan kesehatan perlunya peningkatan layanan kesehatan dari segi pelayanan fasilitas sarana dan prasarana;
2. Pada institusi yang bergerak pada pelayanan kesehatan perlunya pelayanan yang dilakukan oleh tenaga berkompeten sehingga perlunya menitikberatkan pada program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan.

Jumlah Program dan Kegiatan Strategis yang akan dilaksanakan oleh RSUD Dr H Bob Bazar SKM di tahun 2025 berjumlah : 3 program dan 12 Kegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis ini adalah sebesar Rp. 125.266.306.712,33-. Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukan pada tabel T-C33. Dibawah ini.

Tabel T-C.3.3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Lampung Selatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.0.00.0.00.02.0000	**UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM**							**123.377.468.650,00**	**125.194.429.650,00**	**125.266.306.712,33**	**1.888.838.062,33**							**138.231.400.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**123.377.468.650,00**	**125.194.429.650,00**	**125.266.306.712,33**	**1.888.838.062,33**							**138.231.400.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**123.377.468.650,00**	**125.194.429.650,00**	**125.266.306.712,33**	**1.888.838.062,33**							**138.231.400.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan**				**80 poin**	**80 poin**	**107.273.655.000,00**	**107.081.266.000,00**	**107.202.457.712,33**	**-71.197.287,67**					**Aparatur RSUD Fasilitas Pelayanan**		**117.977.400.000,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 dokumen	10 dokumen	78.846.000,00	75.162.000,00	38.396.300,00	-40.449.700,00							70.000.000,00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	12.997.500,00	-12.002.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kaliand a, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi			11.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM

															Pelayanan Publik				
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.374.300,00	-4.625.700,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	4.891.500,00	-5.108.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			11.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.095.000,00	-4.905.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			11.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.027.000,00	-4.973.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan			11.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM

															Publik				
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				3 Laporan	3 Laporan	13.846.000,00	10.162.000,00	5.011.000,00	-8.835.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			15.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				18 dokumen	18 dokumen	26.866.689.000,00	26.679.984.000,00	26.669.803.850,00	-196.885.150,00							29.513.000.000,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				211 Orang/bulan	211 Orang/bulan	22.764.103.000,00	22.528.864.000,00	22.528.864.000,00	-235.239.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			25.000.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				12 Dokumen	12 Dokumen	4.082.586.000,00	4.131.120.000,00	4.130.969.850,00	48.383.850,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan			4.491.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM

															Perlindungan Sosial				
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	4.959.500,00	-5.040.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			11.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*				17 Laporan	17 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.010.500,00	-4.989.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			11.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1 dokumen	1 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.002.500,00	-4.997.500,00							11.000.000,00	
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.002.500,00	-4.997.500,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			11.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00							18.000.000,00	

	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			18.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Kantor				12 laporan	12 laporan	171.600.000,00	171.600.000,00	171.600.000,00	0,00							185.000.000,00	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	153.600.000,00	153.600.000,00	153.600.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			165.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			20.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang dipelihara				16 unit	16 unit	128.520.000,00	126.520.000,00	131.520.000,00	3.000.000,00							180.400.000,00	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				3 Unit	3 Unit	114.000.000,00	114.000.000,00	119.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			125.400.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM

	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				25 Unit	25 Unit	14.520.000,00	12.520.000,00	12.520.000,00	-2.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			55.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD Dalam Satu Tahun				12 bulan	12 bulan	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	80.168.135.062,33	168.135.062,33							88.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	80.168.135.062,33	168.135.062,33	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			88.000.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rata-rata lama perawatan di rumah sakit (AvLOS = Average Lenght Of Stay)**				**3 hari**	**3 hari**	**16.053.846.050,00**	**18.063.196.050,00**	**18.039.307.700,00**	**1.985.461.650,00**					**Aparatur RSUD Data dan informasi Fasilitas Pelayanan**		**20.200.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP				2457 unit	2457 unit	15.989.466.050,00	17.998.816.050,00	17.998.816.050,00	2.009.350.000,00							20.130.000.000,00	

	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar*				3 Unit	6 Unit	11.075.650.000,00	6.235.166.559,00	6.235.166.559,00	-4.840.483.441,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			8.000.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*				14 Unit	60 Unit	4.793.816.050,00	11.643.649.491,00	11.643.649.491,00	6.849.833.441,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempu	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			12.000.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM

														an, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	*Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center*				165 Unit	165 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			130.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan				42 layanan	42 layanan	53.880.000,00	53.880.000,00	35.347.650,00	-18.532.350,00							59.000.000,00	

	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*				150 Orang	150 Orang	31.884.000,00	31.884.000,00	20.290.800,00	-11.593.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			35.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*				100 Orang	100 Orang	21.996.000,00	21.996.000,00	15.056.850,00	-6.939.150,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempu	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			24.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM

														an, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Sistem informasi kesehatan yang terintegrasi				1 dokumen	1 dokumen	10.500.000,00	10.500.000,00	5.144.000,00	-5.356.000,00							11.000.000,00	
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Rata-rata lama perawatan di rumah sakit (AvLOS = Average Lenght Of Stay)**				**3 hari**	**3 hari**	**49.967.600,00**	**49.967.600,00**	**24.541.300,00**	**-25.426.300,00**					**Aparatur RSUD**		**54.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rasio ideal antara SDM kesehatan dan unit pelayanan kesehatan				1 dokumen	1 dokumen	21.967.600,00	21.967.600,00	10.978.500,00	-10.989.100,00							24.000.000,00	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)*				90 Orang	90 Orang	11.000.000,00	11.000.000,00	5.494.000,00	-5.506.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			12.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM

														(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	10.967.600,00	10.967.600,00	5.484.500,00	-5.483.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			12.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kompetensi teknis SDM Kesehatan				240 orang	240 orang	28.000.000,00	28.000.000,00	13.562.800,00	-14.437.200,00							30.000.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*				240 Orang	240 Orang	28.000.000,00	28.000.000,00	13.562.800,00	-14.437.200,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial			30.000.000,00	UPTD RSUD. HI. BOB BAZAR, SKM

															peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	J U M L A H								**123.377.468.650,00**	**125.194.429.650,00**	**125.266.306.712,33**	**1.888.838.062,33**							**138.231.400.000,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada subbab ini terdapat tabel 4.1. Rencana kerja pendanaan RSUD Dr H Bob Bazar SKM Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 adalah seperti yang ditunjukan pada contoh tabel T-C.33 ditambah penjelasan mengenai rencana program dan kegiatan perangkat daerah yang telah tertuang pada Bab 3, subbab3.3. beserta target output yang akan dicapai. Tabel tersebut berisi Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan program perangkat daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD RSUD Dr H Bob Bazar SKM dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan.

Jumlah Seluruh Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh RSUD Dr H Bob Bazar SKM di tahun 2025 berjumlah : 3 program dan 13 Kegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua Program dan Kegiatan ini anggaran sebelum perubahan sebesar 123.377.468.650,00 dan setelah perubahan sebesar Rp. 125.266.306.712,33

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan RSUD Dr H Bob Bazar SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Bertambah/Berkurang (9-7)	PAGU INDIKATIF (Rp)	KET
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.0.00.0.00.02.0000	**UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM**				**123.377.468.650,00**	**125.194.429.650,00**	**125.266.306.712,33**	**1.888.838.062,33**	**138.231.400.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**123.377.468.650,00**	**125.194.429.650,00**	**125.266.306.712,33**	**1.888.838.062,33**	**138.231.400.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**123.377.468.650,00**	**125.194.429.650,00**	**125.266.306.712,33**	**1.888.838.062,33**	**138.231.400.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan**	**80 poin**	**80 poin**	**107.273.655.000,00**	**107.081.266.000,00**	**107.202.457.712,33**	**-71.197.287,67**	**117.977.400.000,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	78.846.000,00	75.162.000,00	38.396.300,00	-40.449.700,00	70.000.000,00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	12.997.500,00	-12.002.500,00	11.000.000,00	
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.374.300,00	-4.625.700,00	11.000.000,00	

	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	4.891.500,00	-5.108.500,00	11.000.000,00	
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.095.000,00	-4.905.000,00	11.000.000,00	
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.027.000,00	-4.973.000,00	11.000.000,00	
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	3 Laporan	3 Laporan	13.846.000,00	10.162.000,00	5.011.000,00	-8.835.000,00	15.000.000,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18 dokumen	18 dokumen	26.866.689.000,00	26.679.984.000,00	26.669.803.850,00	-196.885.150,00	29.513.000.000,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	211 Orang/ bulan	211 Orang/ bulan	22.764.103.000,00	22.528.864.000,00	22.528.864.000,00	-235.239.000,00	25.000.000.000,00	
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	12 Dokumen	12 Dokumen	4.082.586.000,00	4.131.120.000,00	4.130.969.850,00	48.383.850,00	4.491.000.000,00	
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	4.959.500,00	-5.040.500,00	11.000.000,00	

	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	17 Laporan	17 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.010.500,00	-4.989.500,00	11.000.000,00	
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.002.500,00	-4.997.500,00	11.000.000,00	
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.002.500,00	-4.997.500,00	11.000.000,00	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Kantor	12 laporan	12 laporan	171.600.000,00	171.600.000,00	171.600.000,00	0,00	185.000.000,00	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	153.600.000,00	153.600.000,00	153.600.000,00	0,00	165.000.000,00	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	20.000.000,00	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang dipelihara	16 unit	16 unit	128.520.000,00	126.520.000,00	131.520.000,00	3.000.000,00	180.400.000,00	

	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	3 Unit	3 Unit	114.000.000,00	114.000.000,00	119.000.000,00	5.000.000,00	125.400.000,00	
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	25 Unit	25 Unit	14.520.000,00	12.520.000,00	12.520.000,00	-2.000.000,00	55.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD Dalam Satu Tahun	12 bulan	12 bulan	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	80.168.135.062,33	168.135.062,33	88.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	80.168.135.062,33	168.135.062,33	88.000.000.000,00	
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rata-rata lama perawatan di rumah sakit (AvLOS = Average Lenght Of Stay)**	**3 hari**	**3 hari**	**16.053.846.050,00**	**18.063.196.050,00**	**18.039.307.700,00**	**1.985.461.650,00**	**20.200.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	2457 unit	2457 unit	15.989.466.050,00	17.998.816.050,00	17.998.816.050,00	2.009.350.000,00	20.130.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar*	3 Unit	6 Unit	11.075.650.000,00	6.235.166.559,00	6.235.166.559,00	-4.840.483.441,00	8.000.000.000,00	

	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	14 Unit	60 Unit	4.793.816.050,00	11.643.649.491,00	11.643.649.491,00	6.849.833.441,00	12.000.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	*Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center*	165 Unit	165 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	130.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	42 layanan	42 layanan	53.880.000,00	53.880.000,00	35.347.650,00	-18.532.350,00	59.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	150 Orang	150 Orang	31.884.000,00	31.884.000,00	20.290.800,00	-11.593.200,00	35.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	100 Orang	100 Orang	21.996.000,00	21.996.000,00	15.056.850,00	-6.939.150,00	24.000.000,00	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Sistem informasi kesehatan yang terintegrasi	1 dokumen	1 dokumen	10.500.000,00	10.500.000,00	5.144.000,00	-5.356.000,00	11.000.000,00	
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Rata-rata lama perawatan di rumah sakit (AvLOS = Average Lenght Of Stay)**	**3 hari**	**3 hari**	**49.967.600,00**	**49.967.600,00**	**24.541.300,00**	**-25.426.300,00**	**54.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rasio ideal antara SDM kesehatan dan unit pelayanan kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	21.967.600,00	21.967.600,00	10.978.500,00	-10.989.100,00	24.000.000,00	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)*	90 Orang	90 Orang	11.000.000,00	11.000.000,00	5.494.000,00	-5.506.000,00	12.000.000,00	

	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	10.967.600,00	10.967.600,00	5.484.500,00	-5.483.100,00	12.000.000,00	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kompetensi teknis SDM Kesehatan	240 orang	240 orang	28.000.000,00	28.000.000,00	13.562.800,00	-14.437.200,00	30.000.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*	240 Orang	240 Orang	28.000.000,00	28.000.000,00	13.562.800,00	-14.437.200,00	30.000.000,00	
	J U M L A H					**123.377.468.650,00**	**125.194.429.650,00**	**125.266.306.712,33**	**1.888.838.062,33**	**138.231.400.000,00**	

4.2 SINKRONISASI PRIORITAS PERANGKAT DAERAH DENGAN PRIORITAS DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.2.1. Sinkronisasi Prioritas Perangkat dengan Prioritas Daerah Tahun 2025
Kabupaten Lampung Selatan

No	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum	Pagu Anggaran Sesudah	Ket
	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparana, efektif dan akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	12.997.500	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	5.374.300	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	4.891.500	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	5.095.000	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	5.027.000	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.162.000	5.011.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.528.864.000	23.142.477.800	

			Daerah				
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.131.120.000	4.130.969.850	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	5.002.500	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	5.002.500	
			Administrasi Barang milik Daerah Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	5.002.500	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000 153..600.000	18.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		153..600.000	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.000.000	18.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114.000.000	119.000.000	

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.520.000	12.520.000	
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	80.000.000.000	88.168.135.062	

Jumlah Program dan Kegiatan rutin yang akan dilaksanakan oleh RSUD Dr H Bob Bazar SKM di tahun 2024 berjumlah : 1 program dan 7 Kegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis ini sebelum perubahan sebesar Rp. 107,258,232,350, setelah perubahan sebesar Rp.115.816.071.512,33

Tabel 4.2.2. Sinkronisasi Prioritas Perangkat dengan Indikator Kinerja Utama
Tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan

No	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum	Pagu Anggaran Sesudah	Ket
	Persentase penggunaan tempat tidur (BOR = Bed Occupancy Rate)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.235.166.559	6.235.166.559	
	Angka Kematian ≤ 48 jam (GDR = Gross Death Rate)			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	11.643.649.491	11.643.649.491	
	Angka Kematian ≥ 48 jam (NDR = Net Death Rate)			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	120.000.000	120.000.000	
	Pelayanan IKM (Indeks Kepuasan masyarakat) Rumah Sakit		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	31.884.000	20.290.800	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	21.996.000	15.056.850	
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	10.500.000	5.144.000	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya	11.000.000	5.494.000	

		SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Manusia Kesehatan sesuai Standar			
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.967.600	5.484.500	
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.000.000	13.562.800	

Jumlah Program dan Kegiatan Strategis yang akan dilaksanakan oleh RSUD Dr H Bob Bazar SKM di tahun 2025 berjumlah : 2 program dan 5 Kegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis ini sebelum perubahan sebesar Rp. 18.063196050, setelah perubahan sebesar Rp. 18.039.307.700

BAB V
PENUTUP

Failing to plan is planning to fail; kegagalan kita dalam merencanakan kinerja penyelenggaraan urusna pemerintahan bidang Kesehatan sama dengan merencanakan kegagalan RSUD Dr H Bob Bazar SKM.

Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra RSUD Dr H Bob Bazar SKM dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2025. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja RSUD Dr H Bob Bazar SKM tahun 2025.

Renja PD harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran RKA RSUD Dr H Bob Bazar SKM Kabupaten Lampung Selatan untuk optimalisasi dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra RSUD Dr H Bob Bazar SKM dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025.

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra RSUD Dr H Bob Bazar SKM Kabupaten Lampung Selatan dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, **prosedur standar** pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan RSUD Dr H Bob Bazar SKM untuk *proving* (membuktikan) kinerja dan untuk *improving* (memperbaiki) kinerja.

Saat penjabaran Rancangan Awal Renja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan **perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan**. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya.

Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Pelajaran yang kita dapatkan dari pelaksanaan Rancangan Awal Renja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalitas pencapaian target tahunan Renstra RSUD Dr H Bob Bazar SKM dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja RSUD Dr H Bob Bazar SKM Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 ini. Semoga tuhan yang maha esa selalu meridhai semua langkah kita.

Kalianda, 10 juli 2025
Plt Direktur RSUD dr.H.Bob Bazar, SKM
Kabupaten Lampung Selatan



Dr.Djohardi, M.H
NIP. 19811122 200902 1 002

RENCANA KERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dapat terselesaikan. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, Renja ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Sekretariat Daerah dalam satu tahun anggaran yang memuat tujuan, sasaran, dan target capaian kinerja yang akan di capai pada tahun 2025. Oleh karenanya, dokumen ini akan dijadikan sebagai acuan di lingkungan Sekretariat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberi kejelasan kondisi aktual dan tingkat akselerasi pencapaian kinerja serta reformulasi strategi pada setiap unit kerja di Sekretariat Daerah yang disertai dengan kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah maupun masyarakat. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka seluruh aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan lembaga terkait berkewajiban untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025. Akhir kata, dokumen Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini semoga dapat menghasilkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan secara optimal serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

Kalianda, Agustus 2025
Sekretaris Daerah
Kabupaten Lampung Selatan

SUPRIYANTO, S.Sos. MM
NIP. 19690720 199101 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 3
DAFTAR TABEL 4
DAFTAR GAMBAR 5
BAB I. PENDAHULUAN 6
1.1. Latar Belakang 6
1.2. Landasan Hukum 9
1.3. Maksud dan Tujuan 11
1.4. Sistematika Penulisan 12
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 14
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 29
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 38
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 40
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 47
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 48
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 48
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 50
3.3. Program dan Kegiatan Prioritas 71
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 88
BAB V. PENUTUP 109

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Sasaran Daerah pada Rencana Kerja Sekretariat Tahun 2021..... 20

Tabel 2. Capaian Sasaran Sekretariat Daerah pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2021..... 20

Tabel 3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2021 Kabupaten Lampung Selatan..... 22

Tabel 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan..... 32

Tabel 5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kabupaten Lampung Selatan……. 41

Tabel 6. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Lampung Selatan….. 65

Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023..... 69

Tabel 8. Program dan Kegiatan Prioritas Sekretariat Daerah Tahun 2023 71

Tabel 9. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023…… 91

….

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.....	8
Gambar 1.2.	Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD……	8
Gambar 1.3.	Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2025	67

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah. Rencana Kerja Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 1 (satu) tahun. Renja Kerja memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Bagian pada Sekretariat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategi Sekretariat Daerah (Renstra Sekretariat Daerah), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tahapan penyusunan Renja Sekretariat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja Sekretariat Daerah;
2. Penyusunan Renja Sekretariat Daerah berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah, evaluasi hasil Renja Sekretariat Daerah tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
3. Penyusunan Rancangan Renja Sekretariat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD;
4. Pembahasan Rancangan Renja Sekretariat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Sekretariat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD;
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Sekretariat Daerah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Berdasarkan:

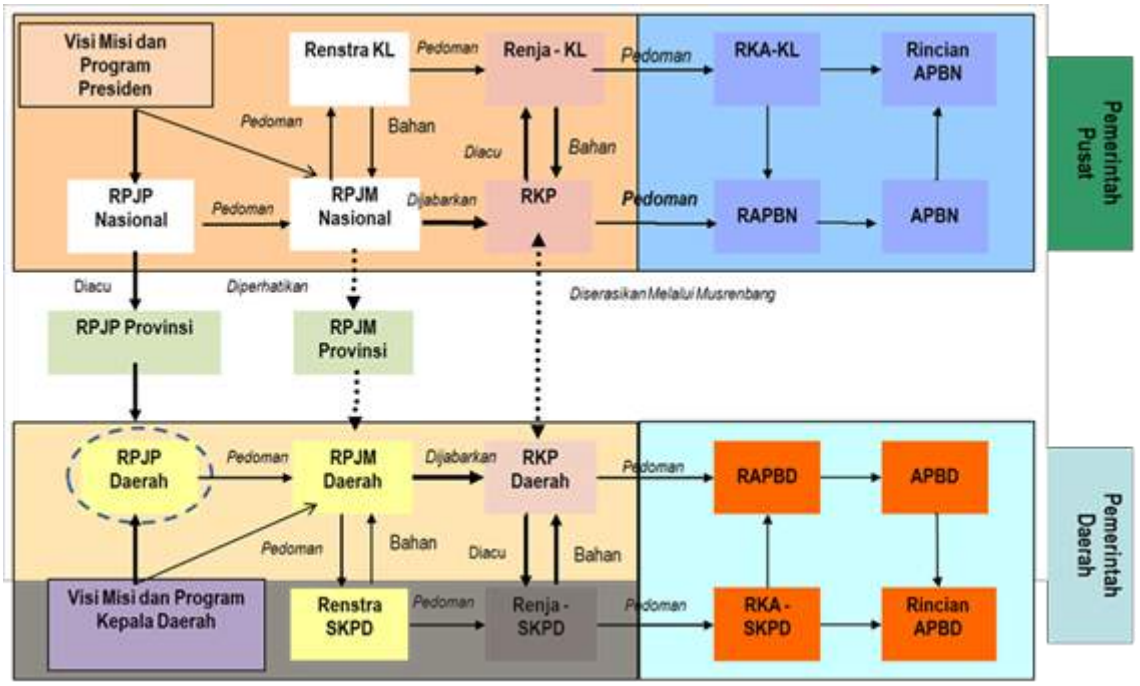
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode 1 (satu) tahun. Setiap PD wajib menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun ke-3 perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Selatan yang berpedoman pada Hasil Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Hasil Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Berjalan.

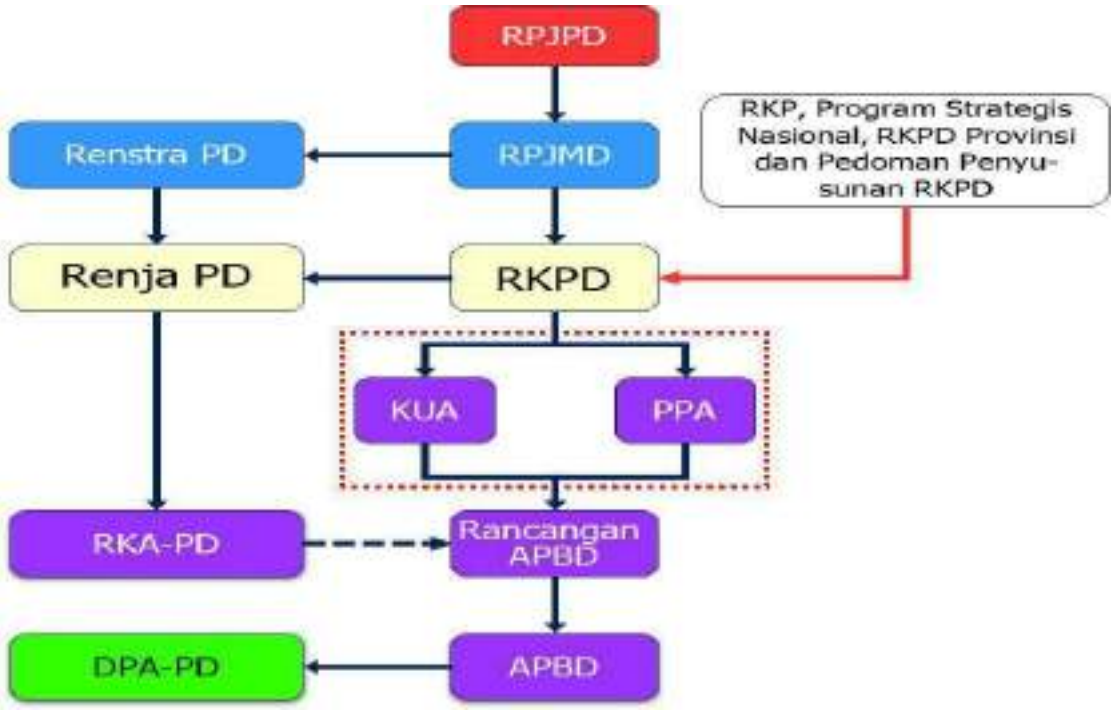
Renja Sekretariat Daerah menjadi dasar penyusunan RKPD yang kemudian melalui tahapan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD. Perumusan Rancangan Akhir RKPD ini kemudian menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Kepala Daerah dan DPRD yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun rencana anggaran.

Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan daerah memiliki keterkaitan dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional maupun provinsi. Gambar berikut menunjukkan keterkaitan antara dokumen RPJMD dan RPJPD serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat. Dengan keterkaitan tersebut diharapkan akan tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencananaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukankan pada gambar 1.1. Sedangkan tindak lanjut dokumen Renja PD hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukan pada gambar 1.2.



Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renja PD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Gambar 1.2. Tindak lanjut Renja dalam Penyusunan APBD

Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota harus berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJM Provinsi. Lalu, pada tahap selanjutnya RPJMD Kabupaten/Kota akan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai pedoman teknis operasional untuk memberikan arah kebijakan

pembangunan yang disertai indikasi program dan kegiatan untuk setiap bidang/fungsi pemerintahan dalam jangka waktu lima tahun. Selanjutnya RPJMD Kabupaten/Kota akan dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diacu oleh Perangkat Daerah untuk dijabarkan menjadi Rencana Tahunan SKPD yang disebut Rencana Kerja (Renja). Dokumen Renja ini akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam mengusulkan RKA Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dirangkum menjadi RAPBD. Dokumen ini akan ditindaklanjuti menjadi APBD dan akhirnya menjadi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA Perangkat Daerah. Dengan demikian, RPJMD merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang dan menjadi dasar rencana jangka pendek sampai ke penganggarannya. Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota juga harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memberi acuan mengenai struktur dan pola ruang terkait dengan rencana pelaksanaan program-program pembangunan, agar kebijakan dan sasaran dalam RPJMD selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota. Selain memperhatikan RTRW, penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini bertujuan agar dapat tercipta keselarasan antara kebijakan, rencana, dan program pembangunan dengan kaidah pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu mengelola potensi yang menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup di Kabupaten/Kota.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2025;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

13. Surat Keputusan Mendagri Nomor 900.1.15..5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ Tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 -2025;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3);

20. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 104).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Pembangunan Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam Pembangunan Daerah pada Tahun 2025.

1.3.2.Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ini adalah : Menyiapkan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan yang Operasionil ;

1. Sebagai pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Sekretariat Daerah dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2025;
2. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bagian-Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan laporan kinerja;
3. Menjamin penggunaan sumber daya Kabupaten Lampung Selatan secara efektif, efisien, berkeadilan, adil, transparan, akuntabel, partisipatif, keadilan sosial dan berkelanjutan, serta menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran Renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) sesuai dengan bidang urusan Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatn penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanan sertarencana tindak lanjut.

BAB II.
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, Sekretariat Daerah mendukung pencapaian sasaran daerah "Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi" dan "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP)" dengan indikator "Indeks Reformasi Birokrasi", "Nilai SAKIP", dan "Opini BPK". Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pada urusan pemerintahan.

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan selama tahun 2025. Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dilaksanakan untuk:

a. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
b. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
c. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2022 melaksanakan 3 Program, 20 Kegiatan dan terdiri dari 75 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
    c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
    d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
    e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
    f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
    b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
    c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD.
    d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
    e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
    f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
    g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
    h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
    a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
    b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
    a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
    b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
e. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
    a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
    b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
    c. Pengadaan Mebel.
    d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
    a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
    b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
    a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
    b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
    c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
    d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
    e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
    f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
9. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
    a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
    b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

c. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

10. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
    a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah.
    b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga wakil Kepala Daerah.
    c. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.

11. Penataan Organisasi;
    a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan.
    b. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana.
    c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
    d. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana.
    e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

12. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
    a. Fasilitasi Keprotokolan.
    b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan.
    c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan.

b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan :

1. Administrasi Tata Pemerintahan;
    a. Penataan Administrasi Pemerintahan.
    b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan.
    c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.

2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
    a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.
    b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial.
    c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.

3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
    a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah.
    b. Fasilitasi Bantuan Hukum.

c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.

4. Fasilitasi Kerjasama Daerah;

a. Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri.
b. Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri.
c. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.

c. Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;

a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD.
b. Pengedalian dan Distribusi Perekonomian.
c. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil.
d. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD.
e. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUMD.

2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan;

a. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan.
b. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan.
c. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;

a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.
b. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik.
c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam;

a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.

Pengukuran kinerja Sekretariat Daerah didasarkan pada sasaran-sasaran, dengan capaian sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.1.1 Rekafitulasi Evaluasi dan Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Percepatan Renstra PD Sekretariat daerah Kabupaten Lampung Selatan

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**84.177.386.039**		**9.028.548.960**		**23.088.960.522**		**15.102.340.718**		**29.511.743.169**		**76.731.593.369**	**130,16**	**91,15**		
		4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**70.615.228.289**		**7.968.825.023**		**21.578.580.341**		**12.049.508.937**		**22.307.022.819**		**63.903.937.120**	**140,18**	**90,5**	Sekretariat Daerah	
			Tata Kelola Pemerintah Bidang Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80		0		0		0		70		70		87,5			
				Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah (Poin)	80												0			
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			65.241.550		20.128.050		33.085.000		5.943.500		5.073.200		64.229.750	100	98,45		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di targetkan dalam 1 Tahun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1		1		0		1		3		100			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		1		1		0		1		3		100			
		4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			18.643.000		4.784.450		13.538.600		-		-		18.323.050	100	98,28		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1		1		0		1		3		100			
		4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			13.081.500		5.214.800		5.157.250		952.300		1.682.000		13.006.350	100	99,43		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			4.526.150		-		4.026.700		-		499.450		4.526.150	100	100		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			8.922.000		4.296.950		4.624.550		-		-		8.921.500	100	99,99		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			7.778.400		-		-		4.991.200		2.787.200		7.778.400	100	100		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12.290.500		5.831.850		5.737.900		-		104.550		11.674.300	100	94,99		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		1		1		0		1		3		100			
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.342.684.700		4.069.778.494		5.927.250.077		4.604.439.560		5.517.691.995		20.119.160.126	100	98,9		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya administrasi keuangan Daerah tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	150		150		150		150		150		150		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	17		0		0		17		0		17		100			
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2		0		0		1		1		2		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			17.384.857.000		4.011.390.294		4.721.610.327		3.896.208.510		4.619.911.745		17.249.120.876	100	99,22		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	150		150		150		150		150		150		100			
		4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			2.897.513.900		54.096.000		1.172.127.350		694.208.550		889.680.000		2.810.111.900	100	96,98		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
		4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			27.768.700		4.292.200		13.395.050		6.661.750		3.254.950		27.603.950	100	99,41		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			3.908.650		-		2.409.950		-		1.497.100		3.907.050	100	99,96		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			11.503.050		-		5.999.200		3.087.550		2.356.000		11.442.750	100	99,48		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			1.525.500		-		757.500		-		761.200		1.518.700	100	99,55		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			13.211.200		-		10.950.700		2.107.500		-		13.058.200	100	98,84		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	17		0		0		17		0		17		100			
		4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			2.396.700		-		-		2.165.700		231.000		2.396.700	100	100		
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2		0		0		1		1		2		100			
		4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			8.767.650		-		5.980.250		996.400		1.639.000		8.615.650	100	98,27		
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3		1		1		0		1		3		100			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3		1		1		0		1		3		100			
		4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			4.552.750		-		2.955.850		996.400		450.000		4.402.250	100	96,69		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksanaanya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3		1		1		0		1		3		100			
		4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			4.214.900		-		3.024.400		-		1.189.000		4.213.400	100	99,96		
			Terlaksanaanya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3		1		1		0		1		3		100			
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			11.944.033.053		916.539.737		2.089.767.822		1.932.786.082		6.010.467.110		10.949.560.751	112,29	91,67		
			Terlaksananaya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		0		6		3		3		12		100			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		0		1		2		1		4		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4		1		1		1		1		4		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		1		5		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		2		4		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	400		80		163		234		218		695		173,75			
		4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			119.856.000		-		59.805.000		29.930.000		25.950.000		115.685.000	100	96,52		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		0		6		3		3		12		100			
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.606.530.703		-		147.963.000		616.884.610		3.640.617.059		4.405.464.669	100	95,64		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		0		1		2		1		4		100			
		4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			190.584.800		36.041.400		12.860.000		47.048.070		92.365.200		188.314.670	100	98,81		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4		1		1		1		1		4		100			
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			94.992.550		5.991.250		58.091.600		9.843.500		16.590.350		90.516.700	100	95,29		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		1		5		3		3		12		100			
		4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			4.651.794.000		569.601.500		1.351.415.000		1.012.215.000		1.547.409.500		4.480.641.000	100	96,32		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		2		4		3		3		12		100			
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.280.275.000		304.905.587		459.633.222		216.864.902		687.535.001		1.668.938.712	173,75	73,19		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	400		80		163		234		218		695		173,75			
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			13.290.161.298		-		9.654.600.000		652.924.098		1.765.139.050		12.072.663.148	1000	90,84		
			Tersedianya Barang Milik Daerah yang ditargetkan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	1		0		19		0		0		19		1900			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Disediakan (Unit)																
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	19		0		0		0		19		19		100			
		4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			10.603.960.000		-		9.654.600.000		-		-		9.654.600.000	1900	91,05		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		19		0		0		19		1900			
		4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			2.686.201.298		-		-		652.924.098		1.765.139.050		2.418.063.148	100	90,02		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	19		0		0		0		19		19		100			
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.808.500.000		502.464.400		603.419.149		629.731.302		683.629.721		2.419.244.572	100	86,14		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.040.500.000		376.884.400		415.049.149		441.361.302		432.469.721		1.665.764.572	100	81,64		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			768.000.000		125.580.000		188.370.000		188.370.000		251.160.000		753.480.000	100	98,11		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.324.723.378		331.320.076		627.851.282		900.786.732		3.220.552.144		5.080.510.234	67,69	69,36		
			Tersedianya Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		10		0		0		0		10		100			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	160		0		0		0		40		40		25			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	330		0		5		0		146		151		45,76			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	11		0		0		0		11		11		100			
		4.01.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.209.770.000		50.316.304		69.013.983		96.332.539		111.803.601		327.466.427	100	27,07		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		10		0		0		0		10		100			
		4.01.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2.710.300.000		281.003.772		478.078.583		489.317.523		494.784.366		1.743.184.244	25	64,32		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	160		0		0		0		40		40		25			
		4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			211.350.000		-		19.040.163		-		133.123.637		152.163.800	45,76	72		
			Terlaksanaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	330		0		5		0		146		151		45,76			
		4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			3.193.303.378		-		61.718.553		315.136.670		2.480.840.540		2.857.695.763	100	89,49		
			Terlaksanaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	11		0		0		0		11		11		100			
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			3.064.561.360		199.133.164		199.734.596		365.330.681		1.263.413.947		2.027.612.388	100	66,16		
			Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2		2		2		2		2		2		100			
				Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	2		0		0		1		1		2		100			
				Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala	2		2		2		2		2		2		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)																
		4.01.01.2.11 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			192.311.360		49.133.164		49.734.596		37.673.037		37.673.037		174.213.834	100	90,59		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2		2		2		2		2		2		100			
		4.01.01.2.11 .0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2.272.250.000		-		-		177.657.644		1.075.740.910		1.253.398.554	100	55,16		
			Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	2		0		0		1		1		2		100			
		4.01.01.2.11 .0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			600.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		600.000.000	100	100		
			Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2		2		2		2		2		2		100			
		4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			5.502.739.500		734.293.284		1.112.659.100		1.461.952.993		1.854.343.296		5.163.248.673	100	93,83		
			Tersedianya paket Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12		3		3		3		3		12		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			3.640.639.350		493.849.284		744.067.000		1.029.578.650		1.277.762.698		3.545.257.632	100	97,38		
			Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12		3		3		3		3		12		100			
		4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			1.775.100.150		240.444.000		368.592.100		375.374.343		546.879.798		1.531.290.241	100	86,27		
			Terlaksanan ya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12		3		3		3		3		12		100			
		4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			87.000.000		-		-		57.000.000		29.700.800		86.700.800	100	99,66		
			Terlaksanan ya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			370.202.600		34.984.000		149.421.156		72.450.221		112.298.545		369.153.922	100	99,72		
			Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	5		1		1		2		1		5		100			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3		0		0		0		3		3		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				(Laporan)																
				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4		0		1		2		1		4		100			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	3		2		0		0		1		3		100			
		4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			97.688.000		11.998.350		40.835.600		31.578.060		13.248.875		97.660.885	100	99,97		
			Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	5		1		1		2		1		5		100			
		4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			49.693.900		8.812.500		23.139.456		12.462.861		5.217.908		49.632.725	100	99,88		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	3		0		0		0		3		3		100			
		4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			95.486.650		7.400.000		39.046.550		11.294.500		37.355.771		95.096.821	100	99,59		
			Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4		0		1		2		1		4		100			
		4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			73.893.100		-		-		17.114.800		56.475.991		73.590.791	100	99,59		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			53.440.950		6.773.150		46.399.550		-		-		53.172.700	100	99,5		
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	3		2		0		0		1		3		100			
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			5.893.613.200		1.160.183.818		1.174.811.909		1.422.167.368		1.872.774.811		5.629.937.906	107,81	95,53		
			Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	210		60		56		81		107		304		144,76			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	143		4		32		43		73		152		106,29			
				Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	210		4		32		43		73		152		72,38			
		4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan			4.731.177.800		991.956.702		764.376.709		1.196.345.199		1.608.403.608		4.561.082.218	144,76	96,4		
			Terlaksanaya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	210		60		56		81		107		304		144,76			
		4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			573.335.550		91.557.216		88.127.150		160.342.169		187.597.203		527.623.738	106,29	92,03		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksanaanya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	143		4		32		43		73		152		106,29			
		4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan			589.099.850		76.669.900		322.308.050		65.480.000		76.774.000		541.231.950	72,38	91,87		
			Terlaksanaanya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	210		4		32		43		73		152		72,38			
		4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**11.852.714.650**		**867.596.247**		**1.106.821.876**		**2.706.523.876**		**6.625.393.990**		11.306.335.989	**146**	**95,39**	Sekretariat Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Rakyat (%)	100												0			
				Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)													0			
				Prosentase Peningkatan Kesejahteraan Rakyat (%)	100												0			
				Prosentase Peningkatran Kesejahteraan Rakyat (%)	100												0			
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			550.311.250		59.465.168		264.008.227		80.115.519		107.896.844		511.485.758	133,33	92,94		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	2		0		0		2		0		2		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	8		4		6		6		0		16		200			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan			131.386.700		4.488.900		20.043.882		37.237.571		35.051.750		96.822.103	100	73,69		
			Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	12		3		3		3		3		12		100			
		4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			114.637.150		10.538.400		44.239.065		18.730.296		39.440.456		112.948.217	100	98,53		
			Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	2		0		0		2		0		2		100			
		4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			304.287.400		44.437.868		199.725.280		24.147.652		33.404.638		301.715.438	200	99,15		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	8		4		6		6		0		16		200			
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			10.164.259.700		606.829.374		639.190.500		2.064.319.997		6.346.445.600		9.656.785.471	94,44	95,01		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakkan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	36		6		3		13		10		32		88,89			
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			10.050.143.200		550.212.874		621.940.500		2.047.069.997		6.323.445.600		9.542.668.971	88,89	94,95		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	36		6		3		13		10		32		88,89			
		4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			114.116.500		56.616.500		17.250.000		17.250.000		23.000.000		114.116.500	100	100		
			Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			503.520.000		143.995.799		85.899.182		177.229.008		96.396.011		503.520.000	85,71	100		
			Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	600		244		67		145		144		600		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	7		0		2		2		0		4		57,14			
				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	600		244		67		145		144		600		100			
		4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			100.844.350		22.776.699		23.522.043		39.745.608		14.800.000		100.844.350	100	100		
			Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	600		244		67		145		144		600		100			
		4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum			273.870.150		94.360.200		40.966.689		77.447.250		61.096.011		273.870.150	57,14	100		
			Terlaksanannya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	7		0		2		2		0		4		57,14			
		4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			128.805.500		26.858.900		21.410.450		60.036.150		20.500.000		128.805.500	100	100		
			Terlaksanannya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	600		244		67		145		144		600		100			
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			634.623.700		57.305.906		117.723.967		384.859.352		74.655.535		634.544.760	253,33	99,99		
			Meningkatnya Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	15		26		48		10		10		94		626,67			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	3		1		0		0		0		1		33,33			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			619.641.150		54.931.906		113.629.544		379.628.996		71.415.535		619.605.981	626,67	99,99		
			Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	15		26		48		10		10		94		626,67			
		4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri			2.948.500		889.650		2.038.882		-		-		2.928.532	100	99,32		
			Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			12.034.050		1.484.350		2.055.541		5.230.356		3.240.000		12.010.247	33,33	99,8		
			Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	3		1		0		0		0		1		33,33			
		4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**1.709.443.100**		**192.127.690**		**403.558.305**		**346.307.905**		**579.326.360**		1.521.320.260	**82,86**	**89**	Sekretariat Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)													0			
				Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan (%)	100												0			
				Prosentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan (%)	100												0			
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			457.642.350		35.128.790		87.678.550		72.137.054		256.427.187		451.371.581	100	98,63		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan dibidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	13		3		3		3		4		13		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi	12		3		3		3		3		12		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Perekonomian (Laporan)																
				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
		4.01.03.2.01 .0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			342.589.400		15.430.040		34.704.850		58.322.054		228.220.437		336.677.381	100	98,27		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	13		3		3		3		4		13		100			
		4.01.03.2.01 .0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			63.737.450		17.058.850		32.168.400		2.160.000		12.200.000		63.587.250	100	99,76		
			Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		4.01.03.2.01 .0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			44.227.100		2.639.900		19.123.250		11.205.000		11.186.750		44.154.900	100	99,84		
			Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	12		3		3		3		3		12		100			
		4.01.03.2.01 .0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD			7.088.400		-		1.682.050		450.000		4.820.000		6.952.050	100	98,08		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksanaya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			336.970.200		28.281.550		105.273.000		54.228.200		96.436.950		284.219.700	100	84,35		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	8		2		2		2		2		8		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	8		2		2		2		2		8		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	8		2		2		2		2		8		100			
		4.01.03.2.02 .0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			177.858.150		10.385.950		72.127.900		27.940.700		37.082.150		147.536.700	100	82,95		
			Terlaksanaya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	8		2		2		2		2		8		100			
		4.01.03.2.02 .0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			102.215.750		7.995.900		21.289.650		13.597.900		45.507.300		88.390.750	100	86,47		
			Terlaksanaya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	8		2		2		2		2		8		100			
		4.01.03.2.02 .0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			56.896.300		9.899.700		11.855.450		12.689.600		13.847.500		48.292.250	100	84,88		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksanaya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	8		2		2		2		2		8		100			
		4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			604.443.950		94.047.250		145.497.014		136.038.537		123.632.640		499.215.441	94,87	82,59		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	13		3		3		3		3		12		92,31			
				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	13		3		3		3		3		12		92,31			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	20		20		0		0		0		20		100			
		4.01.03.2.03 .0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			102.380.500		8.184.250		19.278.250		33.926.888		40.868.698		102.258.086	92,31	99,88		
			Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	13		3		3		3		3		12		92,31			
		4.01.03.2.03 .0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			390.275.400		50.318.000		85.306.450		81.728.532		82.763.942		300.116.924	92,31	76,9		
			Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	13		3		3		3		3		12		92,31			
		4.01.03.2.03 .0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			111.788.050		35.545.000		40.912.314		20.383.117		-		96.840.431	100	86,63		
			Terlaksanaya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	20		20		0		0		0		20		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			310.386.600		34.670.100		65.109.741		83.904.114		102.829.583		286.513.538	30,83	92,31		
			Meningkatnya Kualitas Pemantauan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	8		1		0		0		0		1		12,5			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	5		1		0		0		1		2		40			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	5		0		1		0		1		2		40			
		4.01.03.2.04 .0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			68.580.750		16.189.250		17.817.826		16.413.012		18.097.476		68.517.564	12,5	99,91		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan,	8		1		0		0		0		1		12,5			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)																
		4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			63.310.650		5.030.650		12.978.312		5.140.963		16.999.972		40.149.897	40	63,42		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	5		1		0		0		1		2		40			
		4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			178.495.200		13.450.200		34.313.603		62.350.139		67.732.135		177.846.077	40	99,64		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	5		0		1		0		1		2		40			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Permukiman, Pertanahan																	
	JUMLAH					84.177.386.039		9.028.548.960		23.088.960.522		15.102.340.718		29.511.743.169		76.731.593.369				
	Rata-rata capaian kinerja (%)																130,16	91,15		
	Predikat kinerja																Sangat tinggi	Sangat tinggi		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA-SKPD berikutnya :																				

Jumlah anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2024 : Rp. 66.551596.100,00 dan Capaian Realisasi 2023 Rp. 59.196.913.327,52 dengan capaian 96,15%.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel 2.3. berikut.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi		Capaian Kinerja	Catatn Analisa
			TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	SEKRETARIAT DAERAH															
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	*Indeks Kepuasan Pelayanan*	80 poin													
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah*	10 Dokumen													
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	98,89%	Terpenuhi
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	99,89%	Terpenuhi
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Terpenuhi
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Terpenuhi
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Terpenuhi
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	Terpenuhi
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23 Dokumen													
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120/12 Orang/bulan	120/12 Orang/bulan	120/12 Orang/bulan	120/12 Orang/bulan	120/12 Orang/bulan	120/12 Orang/bulan	120/12Orang/	120/12Orang/	120/12Orang/	120/12Orang/	120/12Orang/	120/12Orang/	99,89%	Terpenuhi
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
		Jumlah Dokumen/ Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	95,62%	Terpenuhi
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Terpenuhi
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD															

NO	Susaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi		Capaian Kinerja	Catatn Analisa
			TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Administrasi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Terpenuhi
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koreksi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	Terpenuhi
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan															
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Terpenuhi
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koreksi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	100,00%	Terpenuhi
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prosyeksi Realisasi Anggaran															
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prosyeksi Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	Terpenuhi
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	6 laporan													
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD															
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	Terpenuhi
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD															
		Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	Terpenuhi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%												100%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	99,99%	Terpenuhi
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	98,48%	Terpenuhi
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	99,68%	Terpenuhi
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	94,71%	Terpenuhi
	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	99,22%	Terpenuhi
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi		Capaian Kinerja	Catatn Analisa
			TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	400 Laporan	400 Laporan	400 Laporan	400 Laporan	400 Laporan	400 Laporan	400 Laporan	400 Laporan	400 Laporan	400 Laporan	400 Laporan	86,21%	Terpenuhi
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah	20 Unit													
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	95,86%	Terpenuhi
	Pengadaan Mebel															
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	99,86%	Terpenuhi
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Kantor	24 Laporan													
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	82,62%	Terpenuhi
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	98,35%	Terpenuhi
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Dipelihara	341 Unit													
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	97,86%	Terpenuhi
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	160 Unit	160 Unit	160 Unit	160 Unit	160 Unit	160 Unit	160 Unit	160 Unit	160 Unit	160 Unit	160 Unit	160 Unit	91,16%	Terpenuhi
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	330 Unit	330 Unit	330 Unit	330 Unit	330 Unit	330 Unit	330 Unit	330 Unit	330 Unit	330 Unit	330 Unit	330 Unit	13,03%	Terpenuhi
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	97,49%	Terpenuhi
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pengelenggaraan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan													
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah															
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	90,86%	Terpenuhi
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah															
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	98,24%	Terpenuhi
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah															

NO	Susunan Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi		Capaian Kinerja	Catatan Analisa
			TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Orang yang Menerima Hasil Pemantauan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	100,00%	Terpenuhi
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	12 Paket													
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah															
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	98,89%	Terpenuhi
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah															
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	98,33%	Terpenuhi
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah															
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	Terpenuhi
	Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan													
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan															
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	99,93%	Terpenuhi
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana															
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	99,83%	Terpenuhi
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi															
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	99,00%	Terpenuhi
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana															
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	99,99%	Terpenuhi
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah															
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	85,35%	Terpenuhi
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jdi Pelaksanaan Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah daerah	877 Laporan													
	Fasilitasi Keprotokolan															
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	226 Laporan	226 Laporan	226 Laporan	226 Laporan	226 Laporan	226 Laporan	226 Laporan	226 Laporan	226 Laporan	226 Laporan	226 Laporan	226 Laporan	94,18%	Terpenuhi
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan															
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	125 Laporan	125 Laporan	125 Laporan	125 Laporan	125 Laporan	125 Laporan	125 Laporan	125 Laporan	125 Laporan	125 Laporan	125 Laporan	125 Laporan	94,00%	Terpenuhi
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan															
		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	226 Laporan	226 Laporan	226 Laporan	226 Laporan	226 Laporan	226 Laporan	226 Laporan	226 Laporan	226 Laporan	226 Laporan	226 Laporan	226 Laporan	100,00%	Terpenuhi
3	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Presentase Peningkatan Kesejahteraan Rakyat***	100 %													

SKT	Susunan Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi		Capaian Kinerja	Catatan Analisa
			TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang dikaji dan dievaluasi pemanfaatan Administrasi dan Kelembagaan	13 Dokumen												100,00%	Terpenuhi
	Penataan Administrasi Pemerintahan															
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Terpenuhi
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan															
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	Terpenuhi
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah															
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	Terpenuhi
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	20 Dokumen, 2 Dokumen													
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual															
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	97,80%	Terpenuhi
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial															
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	Terpenuhi
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Capaian Produk Hukum Daerah	28 Perda/Perkada													
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah															
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	100,00%	Terpenuhi
	Fasilitasi Bantuan Hukum															
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	7 Kasus	7 Kasus	7 Kasus	7 Kasus	7 Kasus	7 Kasus	7 Kasus	7 Kasus	7 Kasus	7 Kasus	7 Kasus	7 Kasus	100,21%	Terpenuhi
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum															
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Terdokumentasi	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	100,21%	Terpenuhi
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	81 Dokumen													
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri															

NO	Susunan Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi		Capaian Kinerja	Catatan Analisa
			TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	14 Dokumen	15 Dokumen	14 Dokumen	15 Dokumen	14 Dokumen	15 Dokumen	96,76%	Terpenuhi
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri															
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Terpenuhi
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama															
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	99,03%	Terpenuhi
3	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***Perekonomian dan Pembangunan***	100% Dokumen													
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100%													
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD															
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	92,95%	Terpenuhi
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian															
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	Terpenuhi
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil															
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	99,80%	Terpenuhi
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUD															
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	98,89%	Terpenuhi
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan	12 Dokumen													
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan															
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	97,29%	Terpenuhi
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan															
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	98,82%	Terpenuhi
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan															
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	97,21%	Terpenuhi
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	15 Dokumen, 20 Orang													
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa															
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	99,73%	Terpenuhi
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik															

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi		Capaian Kinerja	Catatan Analisa
			TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	95,44%	Terpenuhi
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa															
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	90,24%	Terpenuhi
	Tersedianya Kebijakan Sumber Daya Alam	Tersedianya Penerapan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup serta Energi dan Sumberdaya Mineral	3 Dokumen													
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan															
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	98,42%	Terpenuhi
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup															
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup,	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	100,00%	Terpenuhi
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air															
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	99,85%	Terpenuhi

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Tahun 2025, Sekretariat Daerah telah melaksanakan 3 Program, 20 Kegiatan dan 68 Sub Kegiatan dengan capaian indikator sebagai berikut :

Tabel 2.3 Analisis Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun						Capaian Kinerja	Capaian Hasil Kinerja
			TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SEKRETARIAT DAERAH									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Indeks Kepuasan Pelayanan*	80 poin							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah*	10 Dokumen							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	98,63%	Baik
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	99,88%	Baik
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Baik
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Baik
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Baik
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	Baik
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25 Dokumen							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150/12 Orang/bulan	150/12 Orang/bulan	150/12 Orang/bulan	150/12 Orang/bulan	150/12 Orang/bulan	150/12 Orang/bulan	99,89%	Baik

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun						Capaian Kinerja	Capaian Hasil Kinerja
			TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	93,42%	Baik
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Baik
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Baik
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	99,99%	Baik
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Baik
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	100,00%	Baik
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	Baik
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	6 laporan							
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	Baik
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	Baik
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	99,99%	Baik

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun						Capaian Kinerja	Capaian Hasil Kinerja
			TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	98,48%	Baik
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	99,68%	Baik
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	99,77%	Baik
	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	99,20%	Baik
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	400 Laporan	400 Laporan	400 Laporan	400 Laporan	400 Laporan	98,31%	Baik
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah	20 Unit							
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	95,86%	Baik
	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	99,26%	Baik
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Kantor	24 Laporan							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	82,62%	Baik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	98,30%	Baik
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Dipelihara	511 Unit							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	97,46%	Baik
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	160 Unit	160 Unit	160 Unit	160 Unit	160 Unit	160 Unit	91,16%	Baik

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun						Capaian Kinerja	Capaian Hasil Kinerja
			TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	330 Unit	330 Unit	330 Unit	330 Unit	330 Unit	330 Unit	73,93%	Baik
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	97,48%	Baik
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	90,88%	Baik
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	98,24%	Baik
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	2/12 Orang/Bulan	100,00%	Baik
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	25 Paket							
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah									
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	98,89%	Baik
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah									
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	98,35%	Baik
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah									
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	Baik
	Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 laporan							
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan									
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	99,93%	Baik
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana									
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	99,93%	Baik

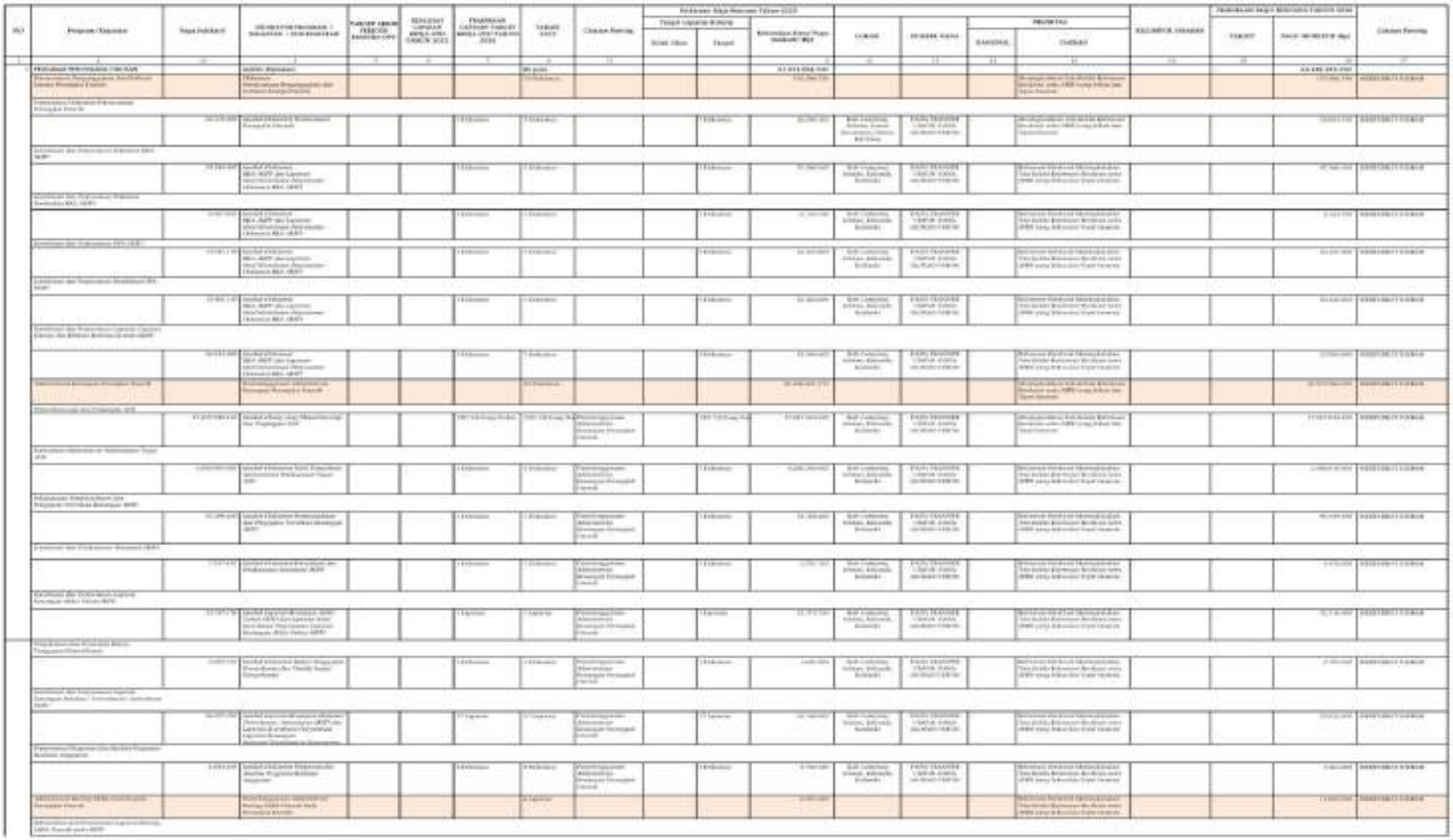
NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun						Capaian Kinerja	Capaian Hasil Kinerja
			TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi									
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	99,90%	Baik
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana									
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	99,99%	Baik
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah									
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	83,33%	Baik
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jml Pelaksanaan Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan	977 Laporan							
	Fasilitasi Keprotokolan									
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	226 Laporan	226 Laporan	226 Laporan	226 Laporan	226 Laporan	226 Laporan	94,80%	Baik
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan									
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	125 Laporan	125 Laporan	125 Laporan	125 Laporan	125 Laporan	125 Laporan	94,00%	Baik
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan									
		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	226 Laporan	226 Laporan	226 Laporan	226 Laporan	226 Laporan	226 Laporan	100,00%	Baik
2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Prosentase Peningkatan Kesejahteraan Rakyat***	100 %						99,13%	
	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dan dicleasikan permasalahan Administrasi dan Kelembagaan	15 Dokumen						99,50%	Baik
	Penataan Administrasi Pemerintahan									
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	99,92%	Baik
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan									
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	99,98%	Baik
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah									
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	99,90%	Baik

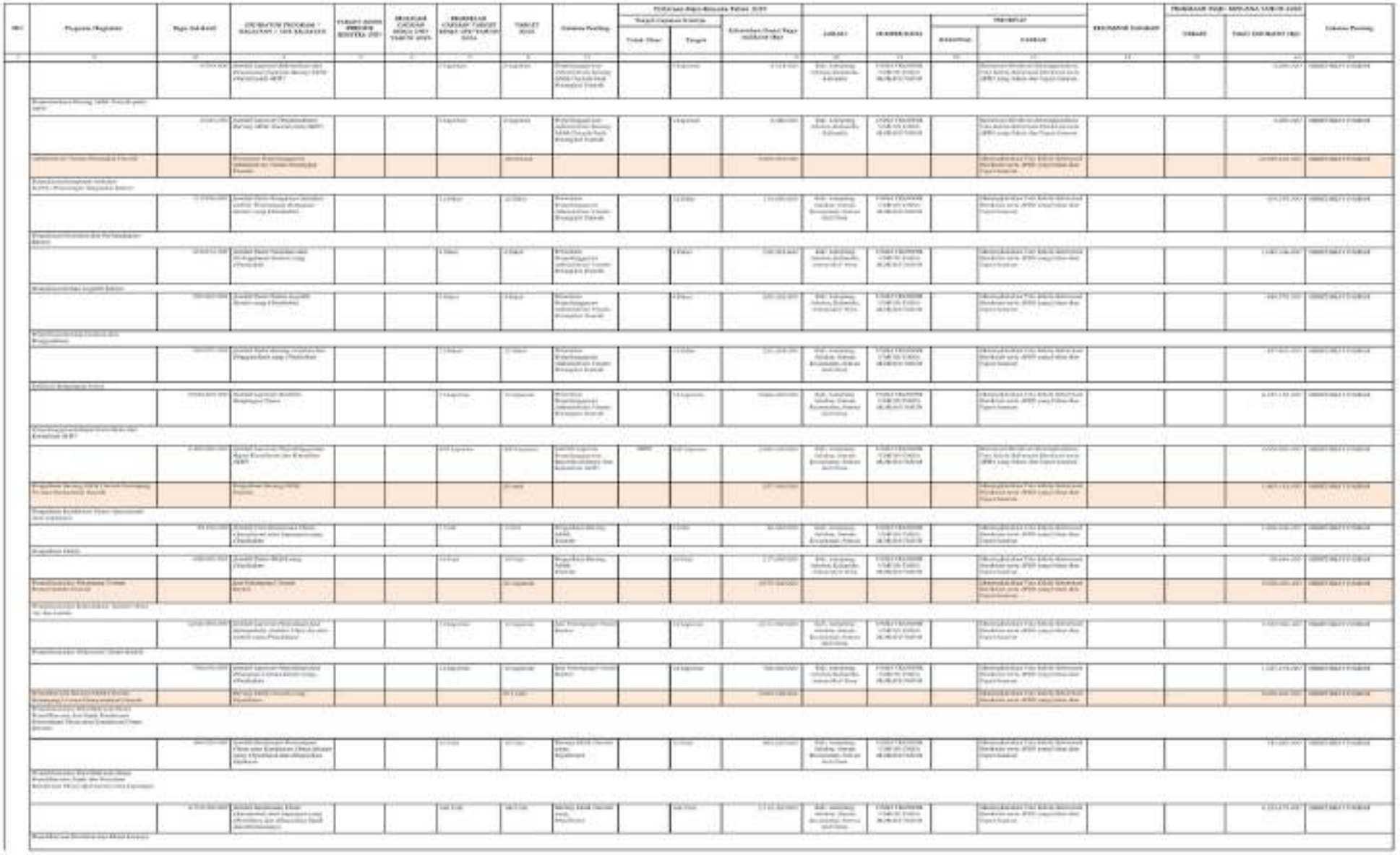
NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun						Capaian Kinerja	Capaian Hasil Kinerja
			TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	20 Dokumen, 2 Dokumen						98,86%	Baik
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual									
		Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	97,83%	Baik
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial									
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	Baik
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Capaian Produk Hukum Daerah	28 Perda/Perkada						98,24%	Baik
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah									
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	100,00%	Baik
	Fasilitasi Bantuan Hukum									
		Jumlah Kasus yang Menerapkan Fasilitasi Bantuan Hukum	7 Kasus	7 Kasus	7 Kasus	7 Kasus	7 Kasus	7 Kasus	98,21%	Baik
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum									
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	600 Dokumen	99,51%	Baik
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	81 Dokumen						98,80%	Baik
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri									
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	96,78%	Baik

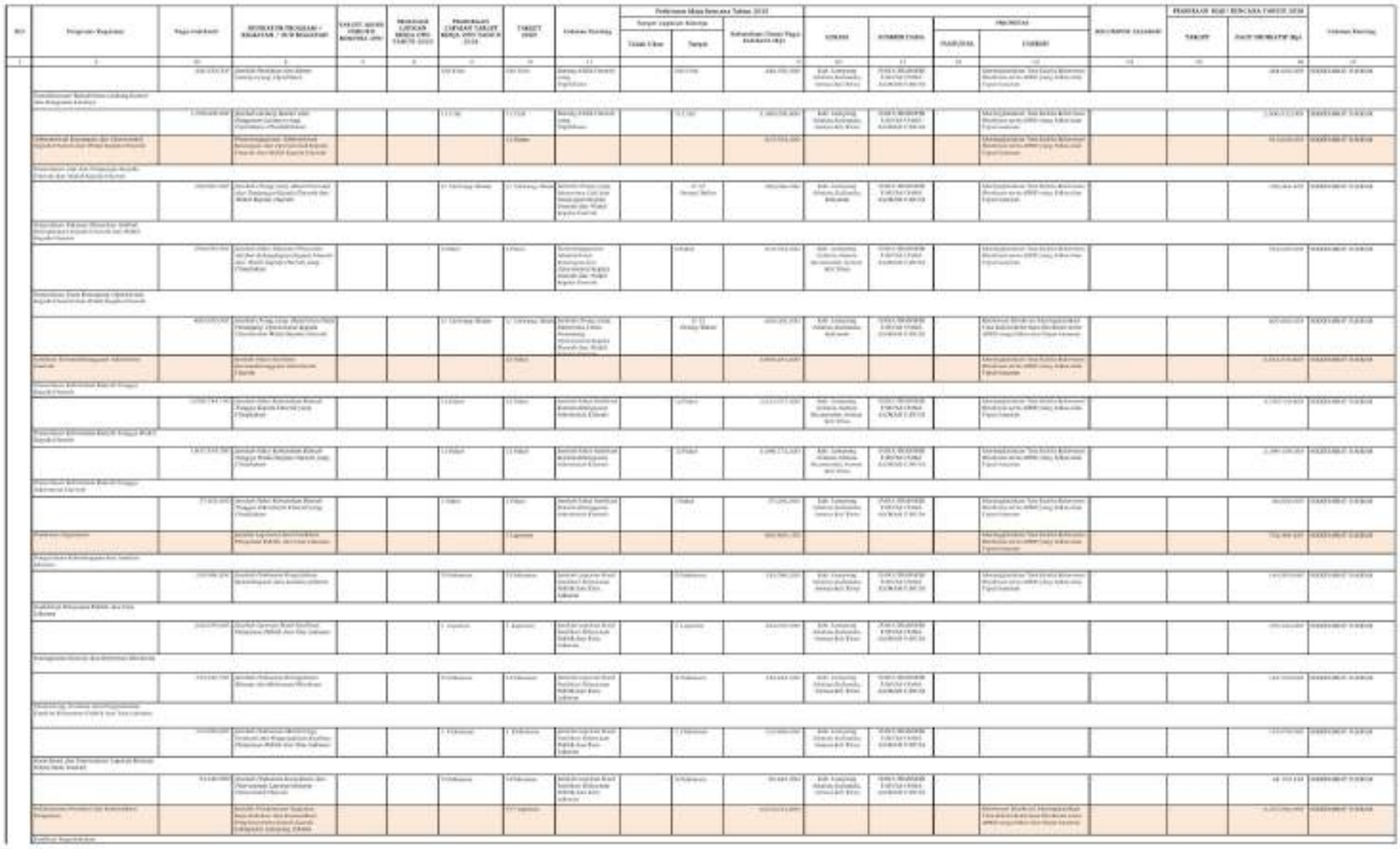
NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun						Capaian Kinerja	Capaian Hasil Kinerja
			TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri									
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Baik
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama									
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	99,63%	Baik
3	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***Perekonomian dan Pembangunan***	**100% Dokumen**						**98,94%**	**Baik**
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100%						82,43%	Baik
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,97%	Pelaksanaan kegiatan tidak dapat direalisasikan
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian									
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	Baik
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil									
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	99,85%	Baik
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	98,98%	Baik
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan	12 Dokumen						95,44%	Baik
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan									
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	97,29%	Baik
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan									
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	98,82%	Baik
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan									
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	90,21%	Baik
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	13 Dokumen, 20 Orang						99,31%	Baik

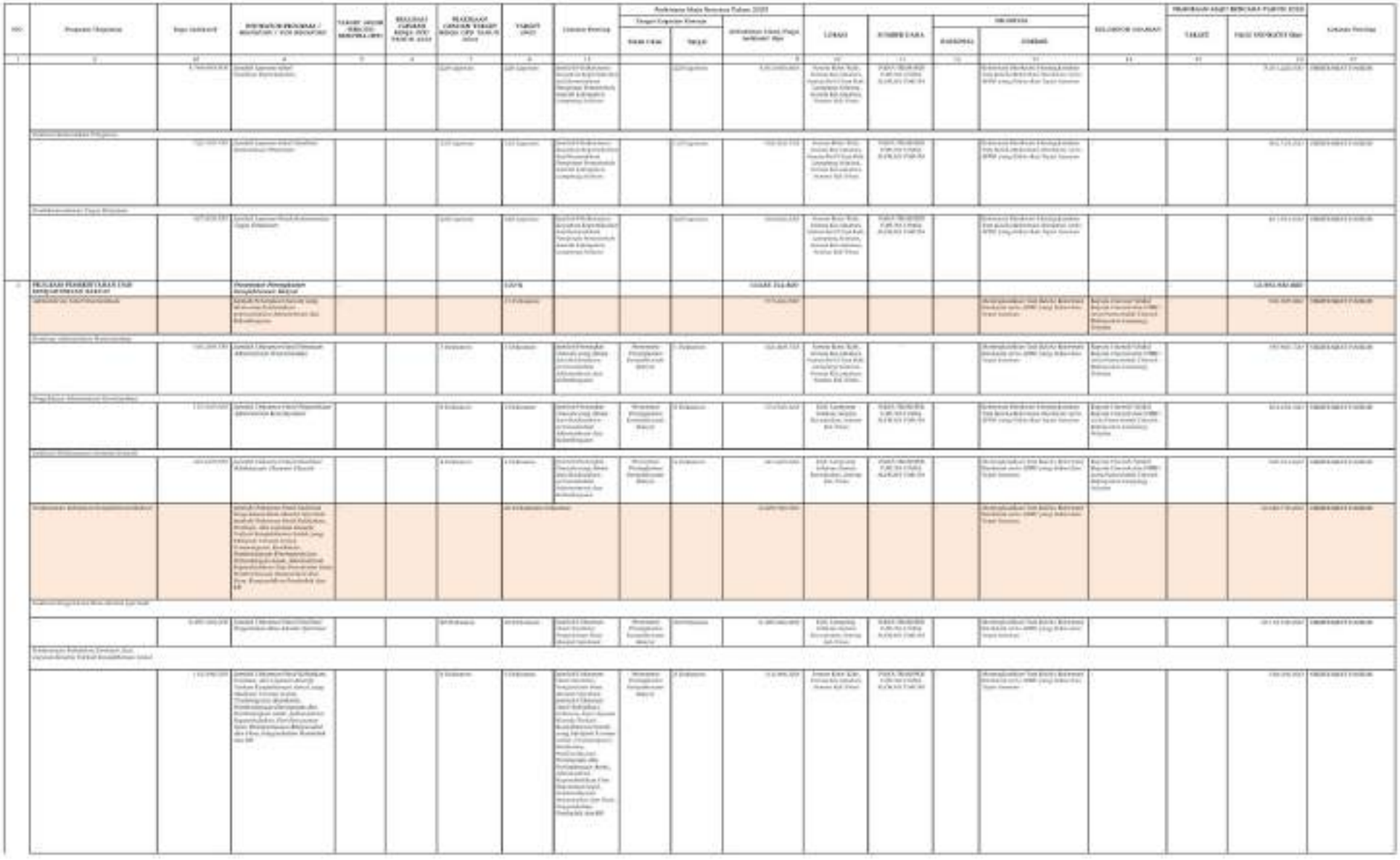
NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun						Capaian Kinerja	Capaian Hasil Kinerja
			TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	99,73%	Baik
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik									
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	99,44%	Baik
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	99,50%	Baik
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Pemantauan Penerapan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup serta Energi dan Air	3 Dokumen						99,79%	Baik
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan,	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	99,42%	Baik
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kawasan,	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	100,00%	Baik
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	99,95%	Baik

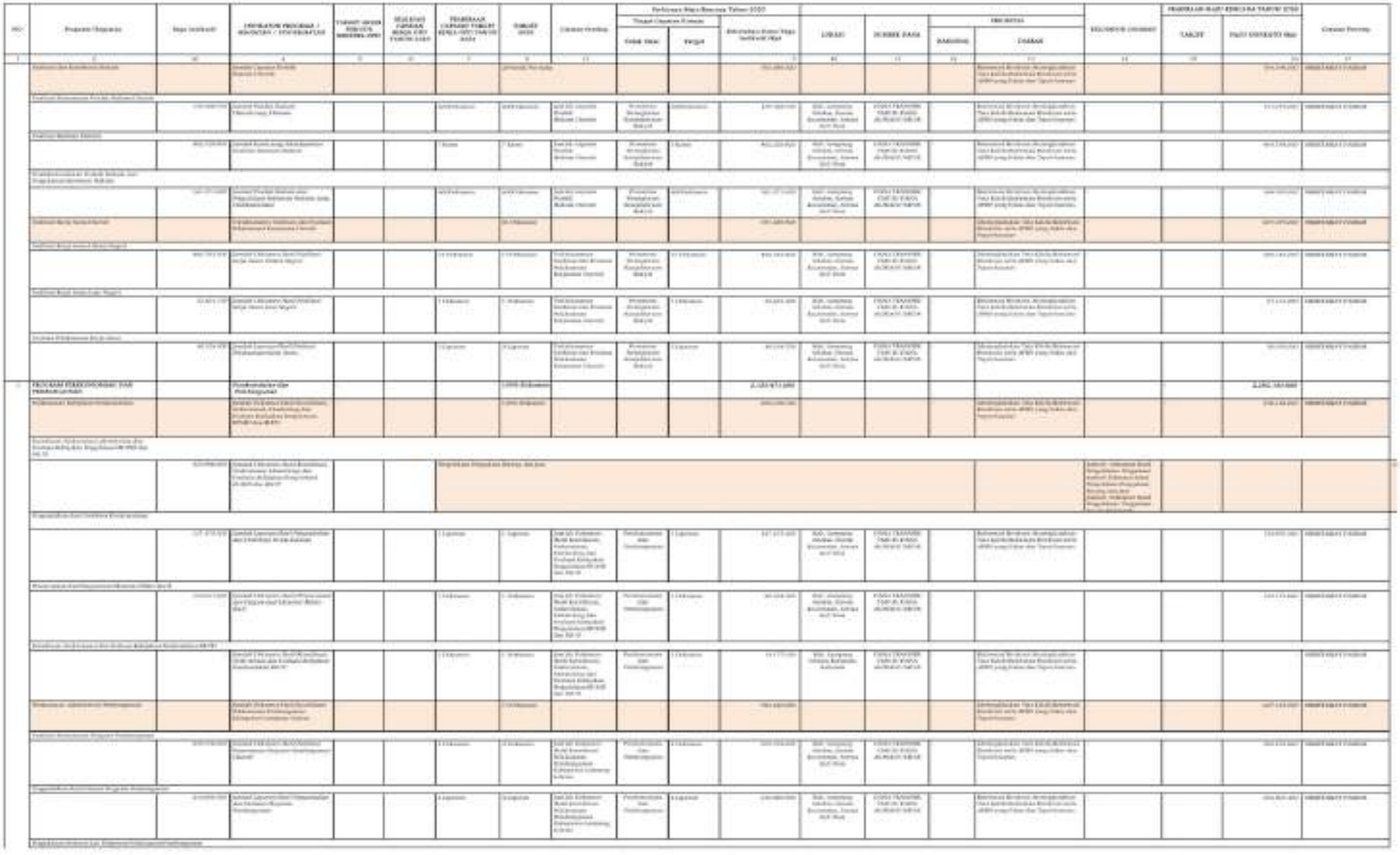
Tabel 4 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan RENJA PD dan Pencapaian RENSTRA PD Sampai dengan Tahun 2025 Sekretariat daerah Kabupaten Lampung Selatan

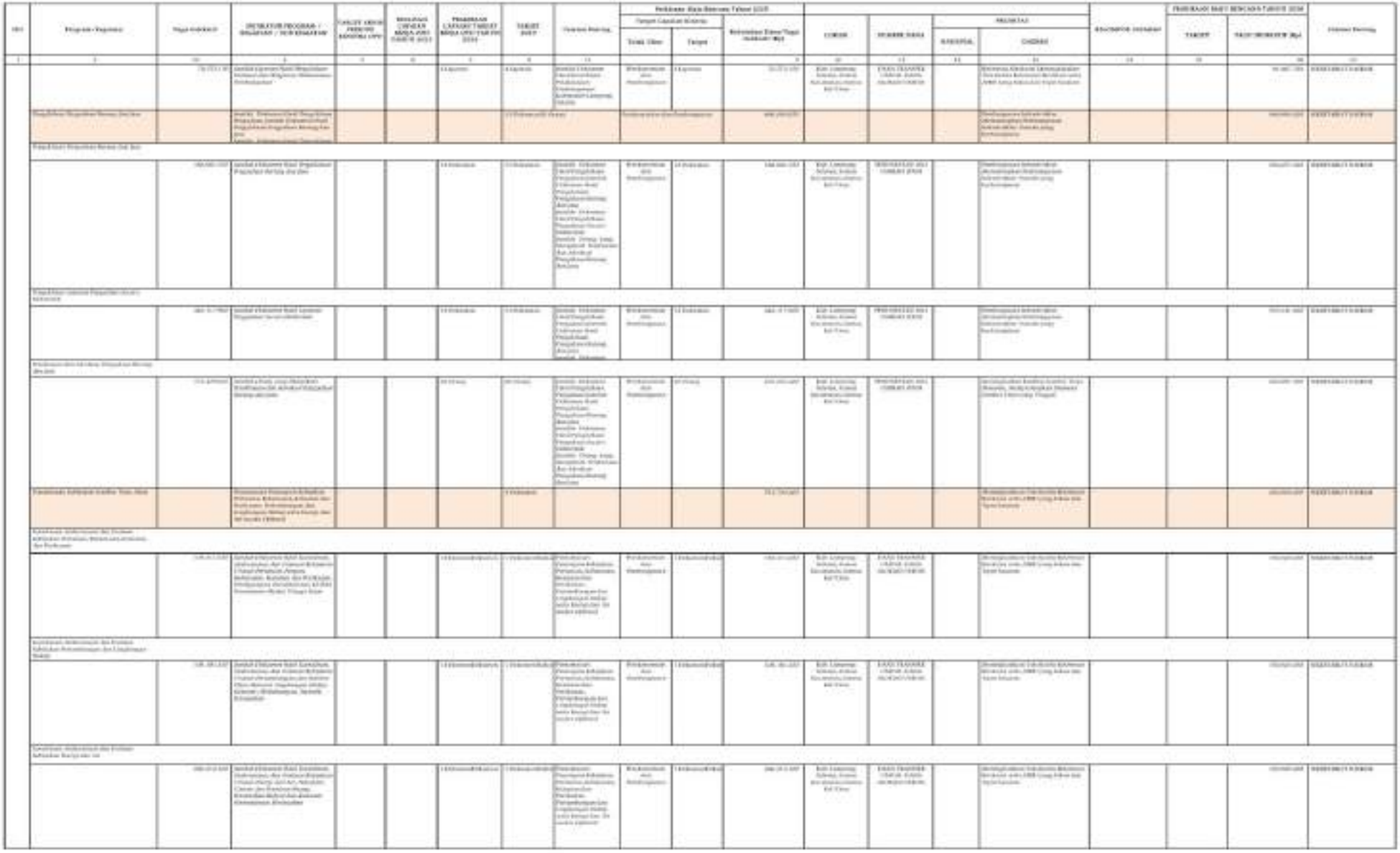












2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Sekretariat Daerah memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sekretariat Daerah merupakan lembaga yang bersifat lintas sektoral dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan. Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah (SETDA) yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan ekonomi, pemerintahan, ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SETDA Kabupaten Lampung Selatan menghadapi beberapa permasalahan yaitu :

1. Masih perlunya penyelesaian, penetapan, dan penegasan Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan terdapat 31 Desa dari 8 Kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang masil belum selesai dalam batas wilayah desa antara lain :
    1. Desa Semanak Kecamatan Bakauheni
    2. Desa Totoharjo Kecamatan bakauheni
    3. Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo
    4. Desa Sukamaju Kecamatan Sidomulyo
    5. Desa Siring Jaha Kecamatan Sidomulyo
    6. Desa Budi Daya Kecamatan Sidomulyo
    7. Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo
    8. Desa Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo
    9. Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo
    10. Desa Jondomg Kecamatan Kalianda
    11. Desa Kecapi Kecamatan Kalianda
    12. Desa Babulang Kecamatan Kalianda
    13. Desa Palembapang Kecamatan Kalianda
    14 Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda
    15. Desa Bulok Kecamatan Kalianda;
    16. Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda
    17. Desa Sukajaya Kecamatan Katibung
    18. Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung
    19. Desa Tanjung Agung Kecamatan Katibung
    20. Desa Neglasari Kecamatan Katibung
    21. Desa Lebung Sari Kecamatan Merbau Mataram

22. Desa Sinar Karya Kecamatan Merbau Mataram
23. Desa Panca Tunggal Kecamatan Merbau Mataram
24. Desa karang Sari Kecamatan Ketapang
25. Desa Sri Pendowo Kecamatan Ketapang
26. Desa Pandan Kecamatan Penengahan
27. Desa Sukabaru Kecamatan Penengahan
28. Desa Pisang Kecamatan Penengahan
29. Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan
30. Desa batu balak Kecamatan Rajabasa
31. Desa Hargo Pancuran Kecamatan Rajabasa

2. Kurang lengkapnya penyampaian data fisik konstruksi dari OPD sehingga kekurangan informasi dalam rangka pelaksanaan tugas monitoring pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah;
3. Penyesuaian Aplikasi SIPD dalam proses penyusunan dokumen perencanaan daerah.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta terhadap capaian program nasional.

Selain menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut, Sekretariat Daerah juga menghadapi tantangan di masa yang akan datang yang dapat menjadi penghambat maupun pendorong dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran daerah, yaitu:

1. Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya termasuk optimalisasi e-planning;
3. Perubahan peraturan yang sangat cepat sehingga memerlukan tingkat penyesuaian yang cepat dan akurat;
4. Masih rendahnya komitmen dari seluruh stakeholders dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Sekretariat Daerah mempunyai beberapa peluang yang akan membantu dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan tersebut, yaitu:

1. Memperkuat kelembagaan Sekretariat Daerah sebagai lembaga profesional;
2. Pemerintah Pusat sudah menyediakan aplikasi SIPD dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun 2025 sehingga memudahkan dalam monitoring, sinkronisasi dan evaluasi perencanaan;
3. Aplikasi SIPD juga menjamin keterpaduan antara dokumen perencanaan dan penganggaran;

4. Program prioritas Nasional dan Provinsi Lampung yang fokusnya di Lampung Selatan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dilakukan penyelarasan program dan kegiatan kedalam nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Oleh karena itu RKPD tahun 2025 yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja PD Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan Permendagri 90. Secara keselarasan.
Hasil telaahan terhadap RKPD dapat dilihat dalam tabel 5. yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.1 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		*Indeks Kepuasan Pelayanan*	80 poin	64.464.565.649	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		*Indeks Kepuasan Pelayanan*	80 poin	64.464.565.649
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah*	10 Dokumen	1.09.514.050	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah*	10 Dokumen	1.09.514.050
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	5 Dokumen	34.102.000		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	5 Dokumen	34.102.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	30.945.000		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	30.945.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	8.987.800		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	8.987.800
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	14.241.150		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	14.241.150
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD									
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	13.560.100		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	13.560.100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	5 Laporan	24.812.000		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	5 Laporan	24.812.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25 Dokumen	32.228.085.820	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25 Dokumen	32.228.085.820
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	1502/12 Orang/Bulan	17.047.048.820		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	1502/12 Orang/Bulan	17.047.048.820
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	3.060.960.900		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	3.060.960.900
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penggajian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penggajian/Verifikasi Keuangan SKPD*	1 Dokumen	34.889.400		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penggajian/Verifikasi Keuangan SKPD*	1 Dokumen	34.889.400

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi dan Penlaksanaan Akuntansi SKPD									
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	1 Dokumen	7.817.600		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	1 Dokumen	7.817.600
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	23.379.750		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	23.379.750
	Penyelelaian dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	1 Dokumen	3.065.100		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	1 Dokumen	3.065.100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan x/Semesteran SKPD*	17 Laporan	20.397.250		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan x/Semesteran SKPD*	17 Laporan	20.397.250
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran									
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran*	2 Dokumen	6.824.200		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran*	2 Dokumen	6.824.200
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	6 Laporan	17.414.850	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	6 Laporan	17.414.850
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	3 Laporan	8.769.900		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	3 Laporan	8.769.900
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD									
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD*	3 Laporan	8.644.950		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD*	3 Laporan	8.644.950
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	9.661.178.850	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	9.661.178.850
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	119.856.000		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	119.856.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	678.873.700		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	678.873.700
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	4 Paket	269.262.900		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	4 Paket	269.262.900
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Rapat Koordinasi dan Penggandaan yang Dilaksanakan*	12 Paket	223.377.200		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Rapat Koordinasi dan Penggandaan yang Dilaksanakan*	12 Paket	223.377.200
	Instilasi Kenyaman Tamu									
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Instilasi Kenyaman Tamu*	12 Laporan	5.868.405.000		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Instilasi Kenyaman Tamu*	12 Laporan	5.868.405.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	400 Laporan	2.485.200.000		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	400 Laporan	2.485.200.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah	20 unit	730.262.760	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah	20 unit	730.262.760
	Penggadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibutuhkan*	1 Unit	388.760.000		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibutuhkan*	1 Unit	388.760.000
	Pengadaan Mebel									
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Mebel yang Dibutuhkan*	10 Unit	698.005.760		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Mebel yang Dibutuhkan*	10 Unit	698.005.760
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Urusan Kantor	24 Laporan	2.808.360.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Urusan Kantor	24 Laporan	2.808.360.000
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibutuhkan*	12 Laporan	2.040.360.000		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibutuhkan*	12 Laporan	2.040.360.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibutuhkan*	12 Laporan	765.000.000		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibutuhkan*	12 Laporan	765.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah yang Dipelihara	511 unit	4.950.670.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah yang Dipelihara	511 unit	4.950.670.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	10 Unit	464.020.000		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	10 Unit	464.020.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan*	167 Unit	2.719.800.000		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan*	167 Unit	2.719.800.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	530 Unit	420.350.000		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	330 Unit	420.350.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	11 Unit	1.350.000.000		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	11 Unit	1.350.000.000
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	1.370.736.067	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	1.370.736.067
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	2/12 Orang/Bulan	382.067.060		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	2/12 Orang/Bulan	382.067.060
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*	2 Paket	394.039.500		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*	2 Paket	394.039.500
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	2/12 Orang/Bulan	600.000.000		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	2/12 Orang/Bulan	600.000.000
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	25 Paket	4.711.198.700	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	25 Paket	4.711.198.700
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah									
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan*	12 Paket	3.000.744.150		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan*	12 Paket	3.000.744.150
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah									
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*	12 Paket	1.447.454.550		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*	12 Paket	1.447.454.550
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah									
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan*	1 Paket	37.000.000		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan*	1 Paket	37.000.000
	Fasilitasi Organisasi		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	865.603.150	Fasilitasi Organisasi		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	865.603.150
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan									
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*	3 Dokumen	124.388.200		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*	3 Dokumen	124.388.200
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana									
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	1 Laporan	212.037.000		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	1 Laporan	212.037.000
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi									
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*	2 Dokumen	199.442.350		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*	2 Dokumen	199.442.350
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana									

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	1 Dokumen	110.898.650		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	1 Dokumen	110.898.650
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah									
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah*	3 Dokumen	53.440.950		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah*	3 Dokumen	53.440.950
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan	577 Laporan	3.919.279.800	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan	577 Laporan	3.919.279.800
	Fasilitasi Keprotokolan									
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan,	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan*	226 Laporan	4.768.685.800		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan,	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan*	226 Laporan	4.768.685.800
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan									
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan,	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan*	123 Laporan	722.765.750		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan,	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan*	123 Laporan	722.765.750
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan									
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan,	*Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan*	226 Laporan	427.928.250		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan,	*Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan*	226 Laporan	427.928.250
2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		***Presentase Peningkatan Kesejahteraan Rakyat***	100 %	10.685.764.000	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		***Presentase Peningkatan Kesejahteraan Rakyat***	100 %	10.685.764.000
	Administrasi Tata Pemerintahan		Jumlah Perangkat Daerah yang ditata dan ditetapkan pemanfaatan Administrasi dan Kelembagaan	13 Dokumen	775.424.800	Administrasi Tata Pemerintahan		Jumlah Perangkat Daerah yang ditata dan ditetapkan pemanfaatan Administrasi dan Kelembagaan	13 Dokumen	775.424.800
	Perumusan Administrasi Pemerintahan									
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan,	*Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Administrasi Pemerintahan*	1 Dokumen	165.269.750		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan,	*Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Administrasi Pemerintahan*	1 Dokumen	165.269.750
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan									
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan*	2 Dokumen	170.948.300		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan*	2 Dokumen	170.948.300
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah									
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*	4 Dokumen	441.609.850		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*	4 Dokumen	441.609.850

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	9	10	7	8	9	10	11
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	20 Dokumen 2 Dokumen	8.609.760.000	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	20 Dokumen 2 Dokumen	8.609.760.000
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual									
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*	20 Dokumen	8.493.364.000		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*	20 Dokumen	8.493.364.000
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial									
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial,*	2 Dokumen	116.996.500		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial,*	2 Dokumen	116.996.500
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Jumlah Capaian Produk Hukum Daerah	28 Produk/Pro kasi	703.089.500	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Jumlah Capaian Produk Hukum Daerah	28 Produk/Pro kasi	703.089.500
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah									
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun*	60Dokumen	139.368.700		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun*	60Dokumen	139.368.700
	Fasilitasi Bantuan Hukum									
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum*	7 Kasus	462.529.800		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum*	7 Kasus	462.529.800
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum									
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi*	60Dokumen	101.371.000		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi*	60Dokumen	101.371.000
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Terfasilitasinya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	01 Dokumen	117.489.100	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Terfasilitasinya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	01 Dokumen	117.489.100
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri									
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*	13 Dokumen	466.785.300		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*	13 Dokumen	466.785.300
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri									
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri*	1 Dokumen	22.611.130		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri*	1 Dokumen	22.611.130
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama									
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama*	5 Laporan	48.104.450		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama*	5 Laporan	48.104.450

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		*Perekonomian dan Pembangunan*	100% Dokumen	2.858.858.800	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		*Perekonomian dan Pembangunan*	100% Dokumen	2.858.858.800
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100% Dokumen	536.107.600	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100% Dokumen	536.107.600
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD									
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD*	1 Dokumen	303.098.800		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD*	1 Dokumen	303.098.800
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian									
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*	1 Laporan	127.473.300		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*	1 Laporan	127.473.300
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil									
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil*	1 Dokumen	102.631.400		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil*	1 Dokumen	102.631.400
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD									
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD*	1 Dokumen	-		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD*	1 Dokumen	-
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan	12 Dokumen	522.020.850	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	12 Dokumen	522.020.850
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan									
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah*	4 Dokumen	235.578.200		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah*	4 Dokumen	235.578.200
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan									
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan*	4 Laporan	210.669.300		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan*	4 Laporan	210.669.300
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan									
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan*	4 Laporan	76.573.150		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan*	4 Laporan	76.573.150
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	13 DOKUMEN 27 DOKUMEN 13 DOKUMEN 30 ORANG	807.408.850	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	13 DOKUMEN 27 DOKUMEN 13 DOKUMEN 30 ORANG	807.408.850
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	13 Dokumen	188.881.350		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	13 Dokumen	188.881.350
	Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik									
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik*	13 Dokumen	440.117.000		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik*	13 Dokumen	440.117.000
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa									
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa*	20 Orang	172.409.650		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa*	20 Orang	172.409.650
	Penyusunan Kebijakan Sumber Daya Alam		Penyusunan Penyiapan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup serta Energi dan	3 Dokumen	312.703.200	Penyusunan Kebijakan Sumber Daya Alam		Penyusunan Penyiapan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup serta Energi dan	3 Dokumen	312.703.200
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan									
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,*	1 Dokumen Dokumen	138.311.650		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,*	1 DokumenDokum	138.311.650
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup									
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup,*	1 Dokumen Dokumen	108.181.450		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup,*	1 DokumenDokum	108.181.450
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air									
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,*	1 Dokumen Dokumen	260.210.100		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,*	1 DokumenDokum	260.210.100

Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan yang merupakan forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat Kecamatan untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah di tingkat Desa. Hasil dari musrenbang Kecamatan akan diusulkan di tingkat Kabupaten.

Hasil Musrenbang dari 17 (tujuh belas) Kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan tersebut kemudian dimusyawarahkan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten. Usulan Program dan Kegiatan masyarakat Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan untuk Sekretariat Daerah khususnya kepada Bagian Bagian di lingkup Sekretariat Daerah kabupaten Lampung Selatan nampak pada table 6. berikut ini :

Tabel 6. Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Lampung Selatan

Sekretariat Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2025 dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", diwujudkan melalui sembilan Misi, yang dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi ;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja;
5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025; dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik. Sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan prioritas Reformasi Birokrasi yang akan mulai digarap sebagai upaya dukungan terhadap pencapaian prioritas program nasional. Salah satu program prioritas Nasional tersebut adalah Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik. Selain pelaksanaan reformasi birokrasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan juga akan meningkatkan peran pada kebijakan-kebijakan terkait pelayanan publik.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi RKP 2020, Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif lainnya perlu terus ditingkatkan kinerjanya. Maka, Rencana

Pembangunan Jangka MenengahNasional (RPJMN) 2020-2025 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045, ditargetkan juga bahwa pada 2036, Indonesia keluar dari Middle Income Trap (MIT).

Oleh karena itu, di Tahun 2020 – 2025 merupakan periode penting dalam melakukan Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju

Gambar 1.3. Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2025



Berdasarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN di atas, Sekretariat Daerah berperan dalam mendukung agenda pembangunan "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan". Dalam upaya mencapai agenda pembangunan revolusi mental, khususnya revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan, Sekretariat Daerah menyusun dokumen perencanaan daerah secara optimal, dimulai dari evaluasi dokumen perencanaan tahun sebelumnya, integrasi dengan dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah daerah hingga integrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional sesuai dengan sasaran Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026, visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Selatan adalah :

> "TERWUJUDNYA MASYARAKAT LAMPUNG SELATAN YANG BERINTEGRITAS, MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG".

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial;
3. Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan;
4. Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah;
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel.

Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan sehingga program kegiatan di Sekretariat Daerah mendukung misi ke-5, yaitu :

> "MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL".

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, tujuan dan sasaran rencana kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021-2026

No	SASARAN STRATGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						Penanggung Jawab
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan keuangan, akuntabilitas dan keprotokolan pimpinan daerah	Presentase administrasi keuangan pimpinan daerah	Prosen	Jumlah kebutuhan keuangan dan operasional pimpinan dearah dibagi target per-tahun dikali 100%	Bagian Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretaris Daerah
		Nilai SAKIP	Nilai	Penilaian oleh KEMENPAN RB berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Instansi Pemerintah	Bagian Perencanaan dan Keuangan	70	70	70	70	70	70	
					Bagian Organisasi	70	70	70	70	70	70	
		Prosentase laporan Hasil Fasilitasi keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Prosen	jumlah hasil fasilitasi dibagi target per-tahun dikali 100%	Bagian Protokol	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Meningatnya pelaksanaan pemerintahan daerah dan kewilayahan, kesejahteraan sosial dan kerukunan umat beragama,kerjasama serta kualitas produk hukum daerah	Prosentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan	Prosen	Jumlah Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan tahun (M)-Jumlah Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan tahun dibagi target per-tahun dikali 100%	Bagian Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Prosentase Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	Penilaian Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah berdasarkan penilaian KEMENDAGRI	Bagian Pemerintahan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	
		Persentase kesejahteraan tokoh agama, sosial dan masyarakat yang difasilitasi oleh pembinaan, pemberdayaan kerukunan umat beragama	Prosen	Jumlah tokoh agama, sosial dan masyarakat yang difasilitasi oleh pembinaan, pemberdayaan kerukunan umat beragama dibagi jumlah tokoh yang direncanakan dalam pembinaan pelayanan kerukunan umat beragama dikali 100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	Dokumen	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Ditetapkan yang sesuai dengan perundangundangan	Bagian Hukum	20 Perda	20 Perda	20 Perda	20 Perda	20 Perda	20 Perda	

No	SASARAN STRATGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						Penanggung Jawab
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Prosentase Produk Kerjasama Daerah yang terjalin	Prosen	Jumlah Produk Kerjasama Daerah dibagi target per-tahun dikali 100%	Bagian Kerjasama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Meningkatnya pelaksanaan Pembangunan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Bagian Perekonomian	100% Dokumen	100% Dokumen	100% Dokumen	100% Dokumen	100% Dokumen	100% Dokumen	
		Prosentase Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Prosen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD dibagi target per-tahun dikali 100% Jumlah Dokumen hasil Perencanaa dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Bagian Perekonomian	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
		Prosentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Prosen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dibagi target per-tahun dikali 100%	Bagian Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Prosentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Prosen	Jumlah Paket yang diklarg dibagi target per-tahun dikali 100%	Unit Layanan Pengadaan	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
		Optimalisasi Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosen	Jumlah kegiatan monitoring selama satu tahun dibagi target dikali 100%	Bagian Sumber Daya Alam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 8 : Rencana Program Kegiatan pada Tahun 2025 dan Perkiraan maju Tahun 2026 Sekretariat daerah Kabupaten Lampung Selatan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					Perkiraan Maju Rencana tahun 2026	
		Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SEKRETARIAT DAERAH							
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			68.464.565.645				76.949.080.780
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			68.464.565.645				76.949.080.780
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/PATEN/KOTA			51.389.961.149				61.686.857.900
4.01.01.2.21	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			129.934.050				155.588.750
4.01.01.2.21.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	34.102.000	Pajak Penerangan Jalan	-	5 Dokumen	26.004.100
4.01.01.2.21.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	1 Dokumen	50.000.000	Pajak Penerangan Jalan	-	1 Dokumen	61.500.000
4.01.01.2.21.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD							
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	1 Dokumen	5.567.900	Pajak Penerangan Jalan	-	1 Dokumen	6.123.700
4.01.01.2.21.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	1 Dokumen	18.047.150	Pajak Penerangan Jalan	-	1 Dokumen	22.457.865
4.01.01.2.21.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	1 Dokumen	13.500.500	Pajak Penerangan Jalan	-	1 Dokumen	22.442.000
4.01.01.2.21.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	5 Laporan	21.812.000	Pajak Penerangan Jalan	-	5 Laporan	25.994.300
4.01.01.2.22	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.236.297.420				20.372.969.320
4.01.01.2.22.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	180/12 Orang/bulan	17.047.303.420	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM		180/12 Orang/bulan	17.247.303.420
4.01.01.2.22.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	1 Dokumen	3.060.960.000	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	3.366.016.000
4.01.01.2.22.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD							
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	1 Dokumen	84.269.600	Pajak Penerangan Jalan	-	1 Dokumen	93.229.500
4.01.01.2.22.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	1 Dokumen	7.817.400	Pajak Penerangan Jalan	-	1 Dokumen	4.476.000
4.01.01.2.22.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	1 Laporan	23.039.750	Pajak Penerangan Jalan	-	1 Laporan	02.510.000
4.01.01.2.22.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	1 Dokumen	3.069.100	Pajak Penerangan Jalan	-	1 Dokumen	2.195.200
4.01.01.2.22.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	17 Laporan	26.207.250	Pajak Penerangan Jalan	-	17 Laporan	22.622.400
4.01.01.2.22.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Pengelolaan Realisasi Anggaran							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					Perkiraan Maju Rencana tahun 2026	
		Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	2 Dokumen	4.824.200	Pajak Penerangan Jalan	-	2 Dokumen	5.445.000
4.01.01.2.09	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			17.414.862				13.000.000
4.01.01.2.09.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	5 Laporan	8.749.900	Pajak Penerangan Jalan		5 Laporan	6.000.000
4.01.01.2.09.0006	Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	5 Laporan	8.664.962	Pajak Penerangan Jalan	-	5 Laporan	6.000.000
4.01.01.2.26	Administrasi Umum Perangkat Daerah			9.161.778.800				10.280.252.500
4.01.01.2.26.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	12 Paket	119.850.000	Rp.41Dan jasa Usaha	-	12 Paket	103.335.000
4.01.01.2.26.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	4 Paket	678.823.700	Pajak Penerangan Jalan	-	4 Paket	1.049.160.000
4.01.01.2.26.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	4 Paket	385.262.900	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		4 Paket	486.378.500
4.01.01.2.26.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	12 Paket	225.577.250	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	12 Paket	497.602.000
4.01.01.2.26.0006	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	12 Laporan	5.999.429.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	6.197.130.000
4.01.01.2.26.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	400 Laporan	2.400.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	400 Laporan	2.000.000.000
4.01.01.2.27	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			736.765.765				1.063.142.000
4.01.01.2.27.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	1 Unit	86.765.000	Pajak Penerangan Jalan	-	1 Unit	1.026.496.000
4.01.01.2.27.0009	Pengadaan Mebel							
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	19 Unit	650.000.765	Pajak Penerangan Jalan	-	19 Unit	36.646.000
4.01.01.2.99	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.800.300.000				3.038.000.400
4.01.01.2.99.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	12 Laporan	2.040.300.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	2.730.920.400
4.01.01.2.99.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	12 Laporan	760.000.000	Pajak Penerangan Jalan	-	12 Laporan	307.104.000
4.01.01.2.99	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.000.675.000				6.284.800.000
4.01.01.2.99.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	10 Unit	464.020.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Unit	741.982.900

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					Perkiraan Maju Rencana tahun 2026	
		Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1405 Unit	2.737.537.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1667 Unit	4.233.479.000
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	1351 Unit	626.700.000	Dijak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perkotaan		2397 Unit	484.824.000
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	11 Unit	1.330.000.000	Dijak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perkotaan		11 Unit	2.806.812.000
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1.370.750.000				1.700.895.000
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	2/12 Orang/Bulan	382.967.040	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2/12 Orang/Bulan	188.246.160
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	894.689.820	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Paket	912.420.000
X.XX.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	2/12 Orang/Bulan	400.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2/12 Orang/Bulan	600.000.000
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kesejahteraan Sekretariat Daerah			4.711.198.700				6.021.878.420
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	3.000.764.120	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Paket	4.126.736.420
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	1.647.434.580	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Paket	2.066.180.000
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	57.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	1 Paket	66.000.000
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			662.405.120				702.486.180
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	124.280.320	Dijak Penerangan Jalan	-	2 Dokumen	140.505.840
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	232.000.000	Dijak Penerangan Jalan	-	1 Laporan	276.442.000
4.01.01.2.13.0003	Penerapkan Reviu dan Reformasi Birokrasi							
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	139.442.350	Dijak Penerangan Jalan	-	2 Dokumen	167.330.820
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana							
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	110.898.420	Dijak Penerangan Jalan	-	1 Dokumen	130.078.380
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah							
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	53.442.000	Dijak Penerangan Jalan	-	3 Dokumen	64.129.140
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			3.810.279.820				4.318.764.200

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					Perkiraan Maju Rencana tahun 2026	
		Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan							
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230 Laporan	4.760.685.800	Pajak Penerangan Jalan	-	230 Laporan	5.001.220.000
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan							
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123 Laporan	722.765.750	Pajak Penerangan Jalan	-	123 Laporan	802.725.000
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan							
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220 Laporan	427.828.250	Pajak Penerangan Jalan	-	220 Laporan	441.810.000
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**10.683.704.000**				**12.892.920.880**
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			778.434.950				850.509.880
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan							
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	165.280.750	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perkotaan	-	1 Dokumen	185.823.700
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	170.545.200	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perkotaan		2 Dokumen	204.654.240
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	443.609.000	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perkotaan	-	4 Dokumen	539.931.260
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			8.603.360.300				10.240.736.000
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Dokumen	8.093.364.000	DAU yang dialokasikan penggunaannya Infang Kesehatan, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perkotaan	-	35 Dokumen	10.112.700.000
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial							
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	2 Dokumen	110.396.500	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perkotaan	-	2 Dokumen	128.036.000
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			765.089.800				784.396.000
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600 Dokumen	139.388.200	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perkotaan	-	600 Dokumen	161.690.000
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Kasus	462.529.800	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perkotaan	-	7 Kasus	464.784.000
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					Perkiraan Maju Rencana tahun 2026	
		Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600 Dokumen	161.371.000	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perkotaan	-	600 Dokumen	166.395.000
4.01.02.2.04	Kualitas Kerja Sama Daerah			337.488.100				627.270.000
4.01.02.2.04.0001	Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Dokumen	466.583.300	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perkotaan	-	13 Dokumen	940.143.000
4.01.02.2.04.0002	Kualitas Kerja Sama Luar Negeri							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	22.607.150	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perkotaan	-	1 Dokumen	27.121.000
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	48.109.450	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perkotaan	-	3 Laporan	50.018.000
4.01.05	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**2.578.858.500**				**2.635.562.360**
4.01.05.2.01	Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Perekonomian			346.103.400				645.326.720
4.01.05.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BUMN							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	305.998.500	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perkotaan	-	1 Dokumen	367.198.680
4.01.05.2.01.0002	Penggandaan dan Distribusi Perekonomian							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	127.475.300	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perkotaan	-	1 Laporan	152.970.360
4.01.05.2.01.0003	Pencacahan dan Pengawasan Buswil Miliar Kecil							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	102.631.400	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perkotaan	-	1 Dokumen	123.157.680
4.01.05.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan BUMD							
		Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	1 Dokumen	-	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perkotaan	-	1 Dokumen	-
4.01.05.2.02	Fasilitasi dan Koordinasi Administrasi Pembangunan			322.020.820				627.140.920
4.01.05.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	215.978.220	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perkotaan	-	4 Dokumen	292.433.040
4.01.05.2.02.0002	Penggandaan dan Evaluasi Program Pembangunan							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	215.669.200	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perkotaan	-	4 Laporan	222.825.400
4.01.05.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	76.373.120	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perkotaan	-	4 Laporan	91.882.760
4.01.05.2.05	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			807.436.850				969.950.650
4.01.05.2.05.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Dokumen	188.891.350	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perkotaan	-	13 Dokumen	226.637.620
4.01.05.2.05.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Dokumen	446.117.900	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perkotaan	-	13 Dokumen	535.341.080
4.01.05.2.05.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	172.427.600	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perkotaan	-	20 Orang	206.881.920
4.01.05.2.24	Perumusan Kebijakan Sumber Daya Alam			532.733.220				420.000.000
4.01.05.2.24.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025					Perkiraan Maju Rencana tahun 2026	
		Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen Dokumen	138.211.450	Pajak Rokok dan Bangunan Perkotaan dan Perkotaan	-	1 Dokumen Dokumen	130.000.000
4.01.05.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen Dokumen	108.181.450	Pajak Rokok dan Bangunan Perkotaan dan Perkotaan	-	1 Dokumen Dokumen	130.000.000
4.01.05.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air							
		Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen Dokumen	260.210.300	Pajak Rokok dan Bangunan Perkotaan dan Perkotaan	-	1 Dokumen Dokumen	120.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan didasarkan pada beberapa faktor kebutuhan di masa yang akan datang dalam upaya optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan daerah. Rencana kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 mencakup 3 Program, 20 Kegiatan dan terdiri dari 75 Sub kegiatan, yaitu:

1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan dan Subkegiatan :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      - Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      - Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Akhir tahun SKPD
      - Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
      - Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran

   c. Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
      - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   - Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   - Penyediaan bahan logistik kantor
   - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   - Fasilitasi kunjungan tamu
   - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pengadaan Mebel
   - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

i. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
   - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

j. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
   - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
   - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga wakil Kepala Daerah
   - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

k. Penataan Organisasi;
   - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
   - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
   - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
   - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

l. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
   - Fasilitasi Keprotokolan
   - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
   - Pendokumentasian Tugas Pimpinan

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dengan Kegiatan dan Subkegiatan :

a. Administrasi Tata Pemerintahan;
   - Penataan Administrasi Pemerintahan
   - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
   - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

b. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
   - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

c. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
- Fasilitasi Bantuan Hukum
- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

d. Fasilitasi Kerjasama Daerah;
- Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri
- Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri
- Evaluasi Pelaksanaan Kerja sama

3. Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan Kegiatan dan Subkegiatan :

a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
- Pengedalian dan Distribusi Perekonomian
- Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUMD

a. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan;
- Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
- Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
- Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

b. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

c. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam;
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Rumusan rencana kerja program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 untuk sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi Lampung .

Tabel 9 : Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Akhir Renstra Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
											Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	SEKRETARIAT DAERAH								76.949.092.780				78.815.877.090
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								76.949.092.780				30.829.411.092
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								76.949.092.780				30.829.411.092
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								36.906.541.430				88.116.055.232
4.01.01.2.01	Penyusunan, Pengelolaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					80 poin			150.000.150				150.000.150
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
		1 Dokumen	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		80 poin	3 Dokumen	12 Dokumen	26.059.100		3 Dokumen	80 poin	30.059.100
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
		1 Dokumen	3 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		80 poin	1 Dokumen	12 Dokumen	97.000.000		3 Dokumen	80 poin	97.000.000
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
		1 Dokumen	3 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		80 poin	1 Dokumen	12 Dokumen	8.333.750		3 Dokumen	80 poin	8.333.750
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												
		1 Dokumen	3 Dokumen	Jumlah Dokumen SKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		80 poin	1 Dokumen	12 Dokumen	22.637.800		3 Dokumen	80 poin	22.637.800
4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD												
		1 Dokumen	3 Dokumen	Jumlah Dokumen SKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		80 poin	1 Dokumen	12 Dokumen	22.192.200		3 Dokumen	80 poin	22.192.200
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
		1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen SKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		80 poin	1 Dokumen	12 Dokumen	22.931.800		3 Dokumen	80 poin	27.931.800
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								35.912.949.143				35.971.949.143
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
		1 Dokumen	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		60 poin	120/12 Orang/Bulan	12 Dokumen	17.047.949.420		3 Dokumen	60 poin	17.047.949.420
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
		3 Dokumen	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		80 poin	1 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000.000		3 Dokumen	80 poin	3.000.000.000
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Pemberhentian dan Pensiunan / Verifikasi Kenaikan Gaji												
		1 Dokumen	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemberhentian dan Pensiunan / Verifikasi Kenaikan Gaji		80 poin	1 Dokumen	12 Dokumen	93.529.500		3 Dokumen	80 poin	93.529.500
4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Administrasi SKPD												
		1 Dokumen	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Administrasi SKPD		80 poin	1 Dokumen	12 Dokumen	4.470.000		3 Dokumen	80 poin	4.470.000
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
		1 Dokumen	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		80 poin	1 Laporan	12 Dokumen	32.216.800		3 Dokumen	80 poin	32.216.800
4.01.01.2.02.0006	Penyediaan dan Pemenuhan Belum Tanggapan Pemeriksaan												
		1 Dokumen	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Belum Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		80 poin	1 Dokumen	12 Dokumen	2.195.200		3 Dokumen	80 poin	2.195.200

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
											Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.01.01.2.02.0005	Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Layanan Kesetaraan Sekretariat/ Pimpinan/ Sekretariat MPD												
		3 Dokumen	Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan Perangkat Daerah	Tersedia Layanan Kesetaraan Sekretariat/ Pimpinan/ Sekretariat MPD (Surat Laporan Kontribusi Penyusunan Laporan Keuangan Dokumen/Pimpinan/Sekretariat MPD)	-	365 pcs	12 Laporan	25 Dokumen	22.622.400		3 Dokumen	365 pcs	22.622.400
4.01.01.2.02.0009	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Program Realisasi Anggaran												
		3 Dokumen	Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan Perangkat Daerah	Tersedia Dokumen Pelaporan dan Analisa Program Realisasi Anggaran	-	365 pcs	2 Dokumen	25 Dokumen	3.465.000		3 Dokumen	365 pcs	3.465.000
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								12.000.000				12.000.000
4.01.01.2.03.0005	Melaksanakan Penatausahaan Layanan Barang Milik Daerah pada MPD												
		3 Dokumen	Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersedia Laporan Rekonsiliasi dan Penatausahaan Laporan Barang Milik Daerah pada MPD	-	365 pcs	3 Laporan	6 Laporan	6.000.000		3 Dokumen	365 pcs	6.000.000
4.01.01.2.03.0006	Pengamanan Barang Milik Daerah pada MPD												
		3 Dokumen	Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersedia Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah pada MPD	-	365 pcs	3 Laporan	6 Laporan	6.000.000		3 Dokumen	365 pcs	6.000.000
4.01.01.2.26	Administrasi Umum Perangkat Daerah								9.290.252.500				9.290.252.500
4.01.01.2.26.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
		3 Dokumen	Penyediaan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedia Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	365 pcs	12 Paket	100 Persen	103.555.500		3 Dokumen	365 pcs	103.555.500
4.01.01.2.26.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
		3 Dokumen	Penyediaan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedia Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	365 pcs	8 Paket	100 Persen	1.915.166.000		3 Dokumen	365 pcs	1.915.166.000
4.01.01.2.26.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
		3 Dokumen	Penyediaan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedia Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	365 pcs	4 Paket	100 Persen	486.210.500		3 Dokumen	365 pcs	486.210.500
4.01.01.2.26.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
		3 Dokumen	Penyediaan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedia Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	365 pcs	12 Paket	100 Persen	497.802.000		3 Dokumen	365 pcs	497.802.000
4.01.01.2.26.0006	Fasilitasi Kendaraan Dinas												
		3 Dokumen	Penyediaan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedia Layanan Fasilitasi Kendaraan Dinas	-	365 pcs	12 Layanan	100 Persen	6.137.130.500		3 Dokumen	365 pcs	6.137.130.500
4.01.01.2.27	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1.865.342.000				1.865.342.000
4.01.01.2.27.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
		3 Dokumen	Pengadaan Barang Milik Daerah	Tersedia Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	365 unit	3 Unit	20 unit	1.816.456.000		3 Dokumen	365 pcs	1.816.456.000
4.01.01.2.27.0003	Pengadaan Mebel												
		3 Dokumen	Pengadaan Barang Milik Daerah	Tersedia Paket Mebel yang Disediakan	-	365 pcs	10 Unit	10 unit	48.886.000		3 Dokumen	365 pcs	48.886.000
4.01.01.2.30	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3.258.232.400				3.258.232.400
4.01.01.2.30.0003	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
		3 Dokumen	Jasa Penunjang Urusan Kantor	Tersedia Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	365 pcs	12 Layanan	24 Layanan	3.150.926.400		3 Dokumen	365 pcs	3.150.926.400
4.01.01.2.30.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Rekanan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Output Kegiatan	Program	Rekanan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp
											Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3 Dokumen	Jasa Penunjang Urusan Kantor	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor yang Disediakan		60 poin	12 Layanan	12 Layanan	1.327.324.000		3 Dokumen	60 poin	1.327.324.000
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								6.296.665.000				6.296.665.000
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
		3 Dokumen	Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		60 poin	12 Unit	31 Unit	741.985.965		3 Dokumen	60 poin	741.985.965
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
		3 Dokumen	Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		60 poin	1651 Unit	31 Unit	4.208.219.000		3 Dokumen	60 poin	4.208.219.000
1.01.01.2.09.0096	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
		3 Dokumen	Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		60 poin	1651Unit	31 Unit	350.814.000		3 Dokumen	60 poin	350.814.000
1.01.01.2.09.2089	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
		3 Dokumen	Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		60 poin	15 Unit	31 Unit	1.896.512.000		3 Dokumen	60 poin	2.896.512.000
1.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								312.429.000				312.429.000
1.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah												
		3 Dokumen	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		60 poin	2 Paket	31 Paket	312.429.000		3 Dokumen	60 poin	312.429.000
1.01.01.2.12	Fasilitasi Kerawanan Sosial Kewilayahan Daerah								4.221.856.400				4.221.856.400
1.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah												
		3 Dokumen	Jumlah Paket Fasilitasi Kewilayahan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		60 poin	12 Paket	23 Paket	4.156.738.400		3 Dokumen	60 poin	4.156.738.400
1.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah												
		3 Dokumen	Jumlah Paket Fasilitasi Kewilayahan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		60 poin	12 Paket	23 Paket	2.095.135.000		3 Dokumen	60 poin	2.095.135.000
1.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah												
		3 Dokumen	Jumlah Paket Fasilitasi Kewilayahan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		60 poin	1 Paket	23 Paket	66.000.000		3 Dokumen	60 poin	66.000.000
1.01.01.2.13	Penataan Organisasi								791.480.640				
1.01.01.2.13.0001	Penyelenggaraan Koordinasi dan Analisis Jabatan												
		3 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Penyelesaian Koordinasi dan Analisis Jabatan		60 poin	3 Dokumen	1 Laporan	148.505.640		3 Dokumen	60 poin	
1.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana												
		3 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		60 poin	1 Laporan	1 Laporan	278.442.000		3 Dokumen	60 poin	
1.01.01.2.13.0003	Penyelarasan Kinerja dan Reformasi Birokrasi												
		3 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Penyelarasan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		60 poin	2 Dokumen	1 Laporan	167.592.953		3 Dokumen	60 poin	
1.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana												

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
											Teknik Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		85 poin	1 Dokumen	1 Laporan	150.950.000		1 Dokumen	85 poin	
4.05.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah												
		1 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		92 poin	2 Dokumen	1 Laporan	81.127.140		1 Dokumen	92 poin	
4.05.01.2.14	Fasilitasi Reformasi dan Komunikasi Pimpinan		Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Reformasi dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi						6.315.764.000				6.315.764.000
4.05.01.2.14.0001	Fasilitasi Reformasi												
		1 Dokumen	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Reformasi dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Reformasi		85 poin	220 Laporan	177 Laporan	3.151.220.000		1 Dokumen	85 poin	3.151.220.000
4.05.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan												
		1 Dokumen	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Reformasi dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		85 poin	220 Laporan	177 Laporan	802.720.000		1 Dokumen	85 poin	802.720.000
4.05.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan												
		1 Dokumen	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Reformasi dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		85 poin	226 Laporan	177 Laporan	461.819.000		1 Dokumen	85 poin	461.819.000
4.05.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								12.992.002.883				12.462.413.000
4.05.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan								892.304.000				
4.05.02.2.01.0001	Fasilitasi Administrasi Pemerintahan												
		Persentase Penanganan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Perangkat Daerah yang diberi dan difasilitasi pemanfaatan Administrasi dan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Administrasi Pemerintahan		120%	1 Dokumen	12 Dokumen	193.923.320		Persentase Penanganan Kesejahteraan Rakyat	120%	
4.05.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kesejahteraan												
		Persentase Penanganan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Perangkat Daerah yang diberi dan difasilitasi pemanfaatan Administrasi dan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kesejahteraan		130%	2 Dokumen	12 Dokumen	101.634.360		Persentase Penanganan Kesejahteraan Rakyat	130%	
4.05.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah												
		Persentase Penanganan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Perangkat Daerah yang diberi dan difasilitasi pemanfaatan Administrasi dan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		130%	4 Dokumen	12 Dokumen	529.937.220		Persentase Penanganan Kesejahteraan Rakyat	130%	
4.05.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								10.343.196.000				10.340.196.000
4.05.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Data Mental Spiritual												
		Persentase Penanganan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Data Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Ulasan Sosial, Transmigrasi, Koperasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Data Mental Spiritual		130%	27 Dokumen	27 Dokumen 2 Dokumen	10.113.705.000		Persentase Penanganan Kesejahteraan Rakyat	130%	10.113.530.000
4.05.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial												

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
											Tidak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Stabilisasi Pengelolaan Host Ahmiel Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Artikl yang Jabatgan Utama Asisi, Transmigrasi, Kesetaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Artikl yang Jabatgan Utama Asisi, Transmigrasi, Kesetaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		1.03%	2 Dokumen	07 Dokumen (3 Dokumen)	1.68.350.000		Persentase Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	1,03%	168.350.000
1.03.02.2.03	Pembinaan dan Koordinasi Ketahanan								784.340.000				784.340.000
1.03.02.2.03.0003	Fasilitasi Pemerintahan Produk Hukum Daerah												
		Persentase Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disosia		1.03%	6(X) Dokumen	28 Perda/Perkada	131.010.000		Persentase Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	1,03%	131.210.000
1.03.02.2.03.0005	Fasilitasi Bantuan Hukum												
		Persentase Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Produk Hukum Daerah	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		1.03%	1 Kasus	28 Perda/Perkada	464.784.000		Persentase Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	1,03%	464.784.000
1.03.02.2.03.0006	Penyelenggaraan Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum												
		Persentase Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Dikoleksi/arsip		1.03%	6(X) Dokumen	28 Perda/Perkada	168.959.000		Persentase Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	1,03%	168.959.000
1.03.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah								4.37.279.000				437.279.000
1.03.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri												
		Persentase Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Terfasilitasinya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		1.03%	13 Dokumen	361 Dokumen	3621.143.000		Persentase Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	1,03%	3641.143.000
1.03.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri												
		Persentase Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Terfasilitasinya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		1.03%	1 Dokumen	81 Dokumen	37.321.000		Persentase Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	1,03%	37.321.000
1.03.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama												
		Persentase Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Terfasilitasinya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		1.03%	3 Laporan	81 Dokumen	50.218.000		Persentase Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	1,03%	50.218.000
1.03.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								2.458.362.360				1.067.148.000
1.03.03.2.21	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								1.03.336.720				
1.03.03.2.21.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan BUMD dan BLUD												
		Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan BUMD dan BLUD		1.03 % Dokumen	1 Dokumen	1(X)% Dokumen	367.158.360		Perekonomian dan Pembangunan	1.03 % Dokumen	-
1.03.03.2.21.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian												
		Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan BUMD dan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		1.03 % Dokumen	1 Laporan	1.03% Dokumen	132.912.360		Perekonomian dan Pembangunan	1.03 % Dokumen	-
1.03.03.2.21.0003	Pembinaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil												
		Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		1.03 % Dokumen	1 Dokumen	1.03% Dokumen	128.339.480		Perekonomian dan Pembangunan	1.03 % Dokumen	-
1.03.03.2.21.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian BUMD												

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kerangka Acuan/Pagu Indikatif Dpr
											Tolak Ukur	Target	
1	2	5	6	7	8	7	8	9	12	11	12	13	14
		Pendokumentasian dan Pemberitaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan [illegible] dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaporan dan Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan BLUD		100 % Dokumen	1 Dokumen	100% Dokumen			Pendokumentasian dan Pemberitaan	100 % Dokumen	
1.03.05.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan								627.143.020				627.143.020
1.03.05.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan												
		Pendokumentasian dan Pemberitaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	-	100 % Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	282.433.840		Pendokumentasian dan Pemberitaan	100 % Dokumen	282.433.840
1.03.05.2.02.0002	Penyusunan dan atau Evaluasi Program Pembangunan												
		Pendokumentasian dan Pemberitaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		100 % Dokumen	4 Laporan	12 Dokumen	232.823.440		Pendokumentasian dan Pemberitaan	100 % Dokumen	232.823.440
1.03.05.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan												
		Pendokumentasian dan Pemberitaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		100 % Dokumen	4 Laporan	12 Dokumen	91.887.580		Pendokumentasian dan Pemberitaan	100 % Dokumen	91.887.580
1.03.05.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								968.897.625				
1.03.05.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa												
		Pendokumentasian dan Pemberitaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Orang yang Menyelesaikan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		100 % Dokumen	13 Dokumen	13 DOKUMEN 27 DOKUMEN 13 DOKUMEN 25 ORANG	320.631.620		Pendokumentasian dan Pemberitaan	100 % Dokumen	
1.03.05.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik												
		Pendokumentasian dan Pemberitaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Orang yang Menyelesaikan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		100 % Dokumen	13 Dokumen	13 DOKUMEN 27 DOKUMEN 13 DOKUMEN 25 ORANG	535.141.667		Pendokumentasian dan Pemberitaan	100 % Dokumen	
1.03.05.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa												
		Pendokumentasian dan Pemberitaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Orang yang Menyelesaikan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Menyelesaikan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	100 % Dokumen	20 Orang	13 DOKUMEN 27 DOKUMEN 13 DOKUMEN 25 ORANG	320.891.720		Pendokumentasian dan Pemberitaan	100 % Dokumen	-
1.03.05.2.04	Pendokumentasian Kebijakan Sekretariat Dewan (Sekwan)								660.000.000				420.000.000
1.03.05.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perumusan, Kebijakannya, Kebijakan, dan Perdakannya												

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
											Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pembinaan dan Pembangunan	Pemantauan Penerapan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perkembangan dan Lingkungan Hidup serta Energi dan Air secara Optimal	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, BUMN, Pemanfaatan Modal, Tenaga Kerja		1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen		150.000.000		Pembinaan dan Pembangunan	1 Dokumen Dokumen	150.000.000
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Lingkungan Hidup												
		Pembinaan dan Pembangunan	Pemantauan Penerapan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perkembangan dan Lingkungan Hidup serta Energi dan Air secara Optimal	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Perkembangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perkebunan, Kelautan, Perikanan		1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen		150.000.000		Pembinaan dan Pembangunan	1 Dokumen Dokumen	109.181.450
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air												
		Pembinaan dan Pembangunan	Pemantauan Penerapan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perkembangan dan Lingkungan Hidup serta Energi dan Air secara Optimal	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perumahan		1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen		150.000.000		Pembinaan dan Pembangunan	1 Dokumen Dokumen	150.000.000
X	SUM URUSAN												2.798.268.102
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX												2.798.268.102
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.798.268.109				2.798.268.102
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								2.000.000.000				2.000.000.000
X.XX.01.2.06.0019	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
		Indeks Kepuasan Pelayanan	Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		420 Laporan	320 Perusa		2.000.000.000		Indeks Kepuasan Pelayanan	420 Laporan	2.000.000.000
X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								798.268.109				798.268.102
X.XX.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah												
		Indeks Kepuasan Pelayanan	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 / 12 Orang/Bulan	12 Bulan		180.246.120		Indeks Kepuasan Pelayanan	2 / 12 Orang/Bulan	180.246.120
X.XX.01.2.11.0002	Penyediaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah												
		Indeks Kepuasan Pelayanan	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 / 12 Orang/Bulan	12 Bulan		600.000.000		Indeks Kepuasan Pelayanan	2 / 12 Orang/Bulan	600.000.000

BAB V.
PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi Perencanaan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Rencana Kerja ini selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah serta sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja program/kegiatan Tahun 2025.

RENCANA KERJA PERUBAHAN

(RENJA PERUBAHAN)

KECAMATAN TANJUNG BINTANG

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan. Rencana Kerja (Renja) PerubahanAnggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Kantor Kecamatan Tanjung Bintang.

Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Lampug Selatan. Dengan demikian rencana kerja perubahan Kantor Kecamatan Tanjung Bintang merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Lampung Selatan, dan RKPD dan Renstra 2025-2029.

Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 Kantor Kecamatan Tanjung Bintang sampai dengan bulan Juni 2024 atau di TW II, renja kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2025.

Akhir kata, dokumen Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Bintang Tahun 2025 ini semoga dapat menghasilkan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan secara optimal serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

Tanjung Bintang, Juli 2025

Camat Tanjung Bintang

HERI BURNOMO, S.K.M

NIP. 19700710 199703 1 004

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Daftar Gambar iv

Daftar Tabel v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum. 3

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematikan Penulisan 6

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Tahun berjalan sampai dengan Triwulan II 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sampai Tahun berjalan sampai dengan Triwulan II..... 15

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 15

BAB III PERUBAHAAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Rencana Kerja..... 18

3.2. Perubahaan Pendanaan 19

3.3. Matriks Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan..... 20

BAB IV PENUTUP

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Sampai Triwulan II Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan..... 9

Tabel 2.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan 15

Tabel 3.3.1. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

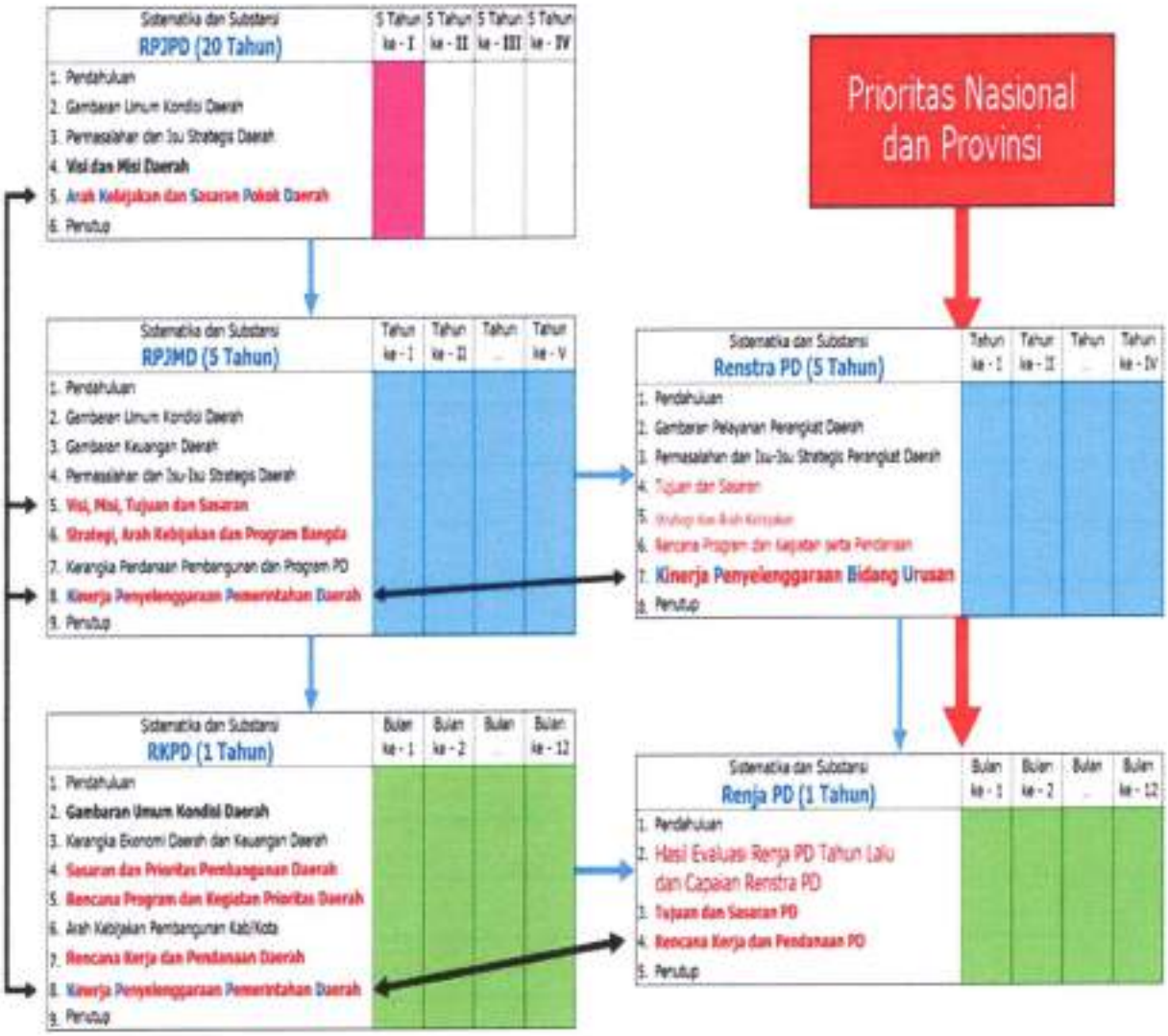
Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien dan efektif, yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang smart, terpadu, dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Telah dipahami secara umum bahwa : *failing to plan is planning to fail*; gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah adalah rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahannya untuk mewujudkan target RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Lihat gambar 1.1.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Lihat gambar 1.2.

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW. II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

1. Kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ke dalam perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

3. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

Keterkaitan Renja OPD dengan Renstra OPD, dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD OPD) setiap tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran maka Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Bintang Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKP) Kecamatan Tanjung Bintang Tahun 2025 serta menjadi dasar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Bintang tahun 2025 antara lain :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
d. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dibah

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
k. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ Tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
l. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 -2025;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);
o. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3);
p. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 30 Tahun

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tanjung Bintang Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Kantor Kecamatan Tanjung Bintang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Program dan Kegiatan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

Rencana Kerja Perubahan ini didasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 dan Rencana Strategis kecamatan Tanjung Bintang Tahun 2025-2030, yang merupakan cerminan dari visi dan misi Pemerintah Daerah kabupaten Lamnpung Selatan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah untuk :

a. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD
b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan
e. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan yang lebih profesional
f. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Triwulan II tahun berjalan, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, , serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPJMD.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2025

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat salah satunya berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabillitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Bintang ini menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Tanjung Bintang selama Tahun 2025 tahun berjalan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tanjung Bintang Triwulan II Tahun 2025 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Bintang dan Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin dan kegiatan lainnya, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir Tahun Anggaran 2025.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025 Kecamatan Tanjung Bintang, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Kecamatan Tanjung Bintang untuk Tahun Anggaran 2025 melaksanakan 4 Program 11 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.486.395.000,- Capaian target kinerja dan keuangan Kecamatan Tanjung Bintang selama Triwulan II masih belum

Tabel 2.1.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai Triwulan II Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022 s/d 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
								I		II		III		IV					
1	2	3	4	6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya keamanan dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat desa / kelurahan yang diberdayakan**	100 %	494.567.380	100 %	180.484.980	12,00 %	18.377.100	30,60 %	33.724.680	0 %	0	0 %	0	%	48.101.780	0 %	543.969.080
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	18 desa	321.861.380	18 desa	92.348.480	18 desa	18.377.100	0 desa	26.956.380	0 desa	0	0 desa	0	18 desa	42.333.300	18 desa	364.194.680
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 lembaga	207.339.800	18 lembaga	11.151.600	18 lembaga	11.151.800	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	18 lembaga	11.151.600	18 lembaga	218.491.400
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 laporan	114.551.600	8 laporan	81.196.800	1 laporan	4.225.520	1 laporan	26.956.200	0 laporan	0	0 laporan	0	3 laporan	31.181.720	10 laporan	148.733.200
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan**	57 lembaga	172.996.000	0 lembaga	88.586.600	0 lembaga	0	0 lembaga	6.768.480	0 lembaga	0	0 lembaga	0	11 lembaga	6.768.480	68 lembaga	179.764.480
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 laporan	172.996.000	3 laporan	88.586.600	0 laporan	0	1 laporan	6.768.480	0 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	6.768.480	0 laporan	179.764.480

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**132.930.700**	**100**	**%**	**143.073.850**	**20,00**	**%**	**75.205.200**	**20,00**	**%**	**3.000.000**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0**	**%**	**75.205.200**	**0**	**%**	**210.895.900**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	88	laporan	132.930.700	5	laporan	143.073.850	1	laporan	75.205.200	1	laporan	3.000.000	0	laporan	0	0	laporan	0	0	laporan	75.205.200	86	laporan	210.895.900
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	laporan	37.585.100	2	laporan	18.476.950	0	laporan	0	0	laporan	0	0	laporan	0	0	laporan	0		laporan	0	2	laporan	37.585.100
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	laporan	95.018.800	3	laporan	124.594.900	1	laporan	75.205.200	1	laporan	3.000.000	0	laporan	0	0	laporan	0	3	laporan	75.205.200	6	laporan	173.220.800
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina**	**100**	**%**	**99.804.788**	**100**	**%**	**33.644.788**	**0,00**	**%**	**0**	**20,00**	**%**	**6.728.988**	**##**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0**	**%**	**6.728.988**	**0**	**%**	**106.533.700**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**9**	**dokumen**	**99.804.788**	**9**	**dokumen**	**33.644.788**	**0**	**dokumen**	**0**	**1**	**dokumen**	**6.728.988**	**0**	**dokumen**	**0**	**0**	**dokumen**	**0**	**4**	**dokumen**	**6.728.988**	**13**	**dokumen**	**106.533.700**
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	dokumen	12.978.950	1	dokumen	6.728.950	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	1	dokumen	0	2	dokumen	12.978.950
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	dokumen	22.895.950	1	dokumen	6.728.950	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	1	dokumen	0	3	dokumen	22.895.950

		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2	dokumen	33.695.950	1	dokumen	6.739.950	0	dokumen	0	1	dokumen	6.726.950	0	dokumen	0	0	dokumen	0	1	dokumen	6.726.950	3	dokumen	20.634.900
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2	dokumen	20.516.950	1	dokumen	6.739.950	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	1	dokumen	0	3	dokumen	20.516.950
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2	dokumen	20.516.950	1	dokumen	6.739.950	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0		dokumen	0	2	dokumen	20.516.950
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik di kecamatan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**82**	**poin**	**6.408.706.021**	**83**	**poin**	**2.014.946.402**	**0**	**poin**	**412.883.688**	**0**	**poin**	**989.062.841**	**0**	**poin**	**0**	**0**	**poin**	**0**	**3**	**poin**	**982.067.330**	**0**	**poin**	**6.402.764.221**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**24**	**dokumen**	**46.439.940**	**5**	**dokumen**	**41.697.980**	**3**	**dokumen**	**6.571.350**	**2**	**dokumen**	**11.765.800**	**0**	**dokumen**	**0**	**2**	**dokumen**	**0**	**7**	**dokumen**	**18.340.350**	**31**	**dokumen**	**64.780.890**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokumen	10.454.700	3	dokumen	18.584.750	0	dokumen	0	1	dokumen	4.588.150	0	dokumen	0	1	dokumen	0	3	dokumen	4.588.150	8	dokumen	15.042.900
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	dokumen	4.788.650	1	dokumen	7.180.650	0	dokumen	0	1	dokumen	7.180.650	0	dokumen	0	0	dokumen	0	1	dokumen	7.180.650	4	dokumen	11.976.300
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	dokumen	4.788.650	1	dokumen	7.180.650	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	3	dokumen	4.788.650
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	dokumen	5.570.650	1	dokumen	2.180.650	1	dokumen	2.180.650	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	1	dokumen	2.180.650	4	dokumen	7.951.300

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	dokumen	4.795.650	1	dokumen	2.180.650	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	1	dokumen	0	1	dokumen	0	4	dokumen	4.795.650
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ichtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ichtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	laporan	15.927.600	2	laporan	4.390.600	2	laporan	4.390.600	0	laporan	0	0	laporan	0	2	laporan	0	2	laporan	4.390.600	8	laporan	30.319.200
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**90**	**dokumen**	**4.631.178.271**	**28**	**dokumen**	**1.897.172.202**	**7**	**dokumen**	**274.826.669**	**6**	**dokumen**	**419.119.571**	**0**	**dokumen**	**0**	**0**	**dokumen**	**0**	**13**	**dokumen**	**793.946.860**	**93**	**dokumen**	**8.425.124.651**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	orang/bulan	3.932.344.271	12	orang/bulan	1.292.939.802	3	orang/bulan	326.696.969	3	orang/bulan	382.269.371	0	orang/bulan	0	3	orang/bulan	0	3	orang/bulan	888.995.930	3	orang/bulan	4.621.310.001
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36	dokumen	668.367.900	12	dokumen	260.175.100	3	dokumen	45.950.000	3	dokumen	56.652.000	0	dokumen	0	3	dokumen	0	9	dokumen	102.800.000	45	dokumen	791.167.900
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	laporan	5.670.650	1	laporan	2.180.650	1	laporan	2.180.650	0	laporan	0	0	laporan	0	0	laporan	0	1	laporan	2.180.650	4	laporan	7.851.300
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	5	laporan	4.795.650	1	laporan	2.180.650	0	laporan	0	0	laporan	0	0	laporan	0	0	laporan	0	2	laporan	0	5	laporan	4.795.650

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100,00**	**%**	**32.065.000**	**100**	**%**	**15.501.000**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0**	**###**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**32.065.000**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	paket	32.065.000	1	paket	15.501.000	0	paket	0	0	paket	0	0	paket	0	0	paket	0	4	paket	32.065.000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**98,38**	**%**	**373.174.660**	**100**	**%**	**195.437.540**	**19,33**	**%**	**14.691.300**	**40,62**	**%**	**62.449.330**	**###**	**%**	**0**	**###**	**%**	**0**	**76,10**	**%**	**87.406.820**	**76,10**	**%**	**476.076.220**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	paket	25.414.800	5	paket	10.177.500	1	paket	1.500.000	2	paket	1.936.600	0	paket	0	1	paket	0	4	paket	3.436.600	15	paket	31.853.400
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	paket	75.667.000	5	paket	76.129.000	0	paket	0	4	paket	45.827.270	0	paket	0	4	paket	0	8	paket	45.827.270	12	paket	121.494.270
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	paket	21.312.500	5	paket	8.515.400	1	paket	1.247.600	2	paket	2.993.900	0	paket	0	1	paket	0	4	paket	4.241.500	16	paket	25.554.100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23	paket	68.453.400	10	paket	35.342.200	2	paket	4.392.700	3	paket	7.158.800	0	paket	0	2	paket	0	7	paket	11.441.500	30	paket	79.894.900
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	23	paket	36.151.900	10	paket	11.758.860	2	paket	1.920.800	3	paket	5.630.860	0	paket	0	2	paket	0	7	paket	9.551.660	30	paket	41.703.560
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	dok	28.200.000	12	dok	9.000.000	2	dok	1.500.000	4	dok	2.200.000	0	dok	0	3	dok	0	9	dok	3.700.000	45	dok	31.900.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	28	laporan	84.225.000	4	laporan	7.425.000	2	laporan	2.250.000	2	laporan	2.250.000	0	laporan	0	0	laporan	0	4	laporan	4.500.000	32	laporan	88.725.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	laporan	30.750.000	33	laporan	47.550.000	3	laporan	2.250.000	10	laporan	16.460.000	0	laporan	0	3	laporan	0	14	laporan	18.710.000	59	laporan	49.460.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**9**	**unit**	**29.816.700**	**5**	**unit**	**9.741.300**	**0**	**unit**	**0**	**0**	**unit**	**0**	**0**	**unit**	**0**	**0**	**unit**	**0**	**0**	**unit**	**0**	**9**	**unit**	**29.816.700**
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9	unit	29.816.700	5	unit	9.741.300	0	unit	0	0	unit	0	0	unit	0	0	unit	0	0	unit	0	9	unit	29.816.700

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**36**	**laporan**	**147.706.078**	**12**	**laporan**	**67.600.000**	**3**	**laporan**	**13.114.500**	**3**	**laporan**	**15.346.821**	**0**	**laporan**	**0**	**3**	**laporan**	**0**	**9**	**laporan**	**26.461.321**	**48**	**laporan**	**176.220.291**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	laporan	147.706.078	12	laporan	67.600.000	3	laporan	13.114.500	3	laporan	15.346.821	0	laporan	0	3	laporan	0	9	laporan	26.461.321	48	laporan	176.220.291
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang Dipelihara**	**40**	**unit**	**169.471.409**	**31**	**unit**	**127.790.000**	**2**	**unit**	**3.500.000**	**5**	**unit**	**60.408.729**	**0**	**unit**	**0**	**0**	**unit**	**0**	**3**	**unit**	**43.906.729**	**30**	**unit**	**353.386.159**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	unit	116.571.409	2	unit	43.790.000	2	unit	3.500.000	0	unit	13.908.729	0	unit	0	0	unit	0		unit	17.408.729	0	unit	153.980.159
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	unit	17.900.000	16	unit	9.000.000	0	unit	0	3	unit	1.500.000	0	unit	0	0	unit	0		unit	1.500.000	30	unit	19.400.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	unit	15.000.000	1	unit	25.000.000	0	unit	0	1	unit	15.000.000	0	unit	0	0	unit	0		unit	15.000.000	0	unit	30.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	unit	0	1	unit	25.000.000	0	unit	0		unit			unit			unit			unit			unit	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	unit	10.000.000	1	unit	25.000.000	0	unit	0	1	unit	10.000.000	0	unit	0	0	unit	0		unit	10.000.000	0	unit	20.000.000
TOTAL ANGGARAN SEMUA PROGRAM						**6.147.969.671**			**2.382.063.000**	**0**		**503.548.989**			**512.547.241**			**0**			**0**			**1.116.093.390**			**7.264.062.671**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjung Bintang

Kecamatan Tanjung Bintang pada tahun anggaran 2025 telah melaksanakan 4 Program, 11 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan, dengan capaian indikator sebagai berikut :

Tabel 2.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	72	73	74	75	72	73	74	75	
B	**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH**									
1.	Indeks Kepuasan Pelayanan	81	82	83	84	81	82	83	84	
2.	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kedudukan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Tanjung Bintang didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan

pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Ketidak sesuaian dan kuantitas penempatannya yang belum sesuai dengan bidang keahlian;
2. Terbatasnya peralatan pendukung yang tersedia;
3. Kurangnya koordinasi dengan *stakeholders* dalam penyusunan program pembangunan tahunan sehingga tidak tepat waktu;
4. Masih kurangnya peran pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan;
5. Terbatasnya data yang valid dan berkualitas;
6. Penyesuaian Aplikasi SIPDRi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan daerah.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan SDGs. Masih adanya program dan kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah

Selain menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut, Kecamatan Tanjung Bintang juga menghadapi tantangan di masa yang akan datang yang dapat menjadi penghambat maupun pendorong dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran daerah, yaitu:

1. Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya termasuk optimalisasi SIPDRi;
3. Perubahan peraturan yang sangat cepat sehingga memerlukan tingkat penyesuaian yang cepat dan akurat;
4. Masih rendahnya komitmen dari seluruh *stakeholders* dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah

Kecamatan Tanjung Bintang mempunyai beberapa peluang yang akan membantu dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan tersebut, yaitu:

1. Pemerintah Pusat sudah menyediakan aplikasi SIPDRi dalam penyusunan dokumen perencanaan Tahun 2025 sehingga memudahkan dalam monitoring, sinkronisasi dan evaluasi perencanaan;
2. Aplikasi SIPDRi juga menjamin keterpaduan antara dokumen perencanaan dan penganggaran;

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Bintang Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025, dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II, perubahan kebijakan pemerintah daerah, serta dinamika kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan rencana kerja dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2025. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi kegiatan yang telah berjalan, kegiatan yang memerlukan penyesuaian target maupun anggaran, serta kebutuhan kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Selain hasil evaluasi, perubahan rencana kerja juga memperhatikan perkembangan kondisi sosial, ekonomi, pemerintahan, dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Tanjung Bintang. Dengan demikian, perubahan Renja diharapkan mampu memberikan arah yang lebih tepat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada sisa Tahun Anggaran 2025, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

3.1 Perubahan Rencana Kerja

Perubahan rencana kerja Kecamatan Tanjung Bintang Tahun 2025 mencakup penyesuaian terhadap program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, indikator kinerja, lokasi pelaksanaan, kelompok sasaran, serta kebutuhan pendanaan. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai

dengan triwulan II Tahun 2025 dan memperhatikan prioritas pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, Kecamatan Tanjung Bintang terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap perubahan yang dilakukan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah serta meningkatkan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Perubahan rencana kerja Tahun 2025 antara lain meliputi:

1. Penyesuaian target kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan II Tahun 2025;
2. Penyesuaian volume dan indikator keluaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaksanaan di lapangan;
3. Penyesuaian lokasi dan kelompok sasaran kegiatan berdasarkan prioritas pelayanan dan kebutuhan masyarakat;
4. Penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan pada sisa Tahun Anggaran 2025;
5. Penyesuaian alokasi pendanaan berdasarkan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan dan kemampuan keuangan daerah; dan
6. Penajaman kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Tanjung Bintang.

3.2 Perubahan Pendanaan

Perubahan pendanaan dalam Renja Kecamatan Tanjung Bintang Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyesuaian rencana kerja. Perubahan alokasi anggaran dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, kebutuhan riil perangkat daerah, pencapaian target kinerja, serta kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Penyesuaian pendanaan diarahkan agar penggunaan anggaran dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, transpar-

an, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap alokasi anggaran diupayakan untuk mendukung pencapaian target kinerja dan memberikan manfaat yang optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

3.3 Matriks Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan

Perubahan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Tanjung Bintang Tahun 2025 selanjutnya dituangkan dalam matriks perubahan Renja yang memuat program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, lokasi, sumber pendanaan, serta pagu anggaran sebelum dan sesudah perubahan.

Matriks tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan adanya keterkaitan antara perubahan rencana kerja dengan kebutuhan pendanaan. Selain itu, matriks perubahan juga menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada sisa Tahun Anggaran 2025 serta dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah.

Dengan adanya perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025, Kecamatan Tanjung Bintang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, memperkuat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta memberikan pelayanan publik yang semakin baik.

Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi instrumen untuk menjaga kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan daerah, sehingga seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 tetap terarah pada pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Selatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Tanjung Bintang.

Tabel 3.3.1. Rencana Program dan kegiatan Perubahan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
Kecamatan Tanjung Bintang KAB. LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.0.00.0.00.02.0000	**Kecamatan Tanjung Bintang**				**2.399.650.000,00**	**2.409.045.000,00**	**2.486.395.000,00**	**86.745.000,00**			
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.399.650.000,00**	**2.409.045.000,00**	**2.486.395.000,00**	**86.745.000,00**			
	7.01	**KECAMATAN**				**2.399.650.000,00**	**2.409.045.000,00**	**2.486.395.000,00**	**86.745.000,00**			
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**84 poin 84 Poin**	**84 poin 84 Poin**	**2.051.679.000,00**	**2.032.606.000,00**	**2.119.271.600,00**	**67.592.600,00**			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dok	9 Dok	41.697.950,00	41.697.950,00	41.697.950,00	0,00			
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dok Perencanaan Perangkat Daerah*	3 Dok	3 Dok	18.584.750,00	18.584.750,00	18.584.750,00	0,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	*Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD*	1 Dok	1 Dok	7.180.650,00	7.180.650,00	7.180.650,00	0,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dok Perubahan RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD*	1 Dok	1 Dok	7.180.650,00	7.180.650,00	7.180.650,00	0,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD*	1 Dok	1 Dok	2.180.650,00	2.180.650,00	2.180.650,00	0,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dok Perubahan DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA-SKPD*	1 Dok	1 Dok	2.180.650,00	2.180.650,00	2.180.650,00	0,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	2 Lap	2 Lap	4.390.600,00	4.390.600,00	4.390.600,00	0,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang

	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dok	12 Dok	1.691.408.400,00	1.650.003.400,00	1.661.503.400,00	-29.905.000,00			
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	12 Org / bln	12 Org / bln	1.456.372.000,00	1.396.967.000,00	1.396.967.000,00	-59.405.000,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dok Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	12 Dok	12 Dok	230.675.100,00	248.675.100,00	260.175.100,00	29.500.000,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Lap	1 Lap	2.180.650,00	2.180.650,00	2.180.650,00	0,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	*Jumlah Lap Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD*	2 Lap	2 Lap	2.180.650,00	2.180.650,00	2.180.650,00	0,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	15.557.500,00	15.501.000,00	15.501.000,00	-56.500,00			
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	1 Paket	1 Paket	15.557.500,00	15.501.000,00	15.501.000,00	-56.500,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	152.475.150,00	174.863.650,00	195.437.950,00	42.962.800,00			
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	6 Paket	6 Paket	10.177.500,00	10.177.500,00	10.177.500,00	0,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	45.899.000,00	45.899.000,00	76.129.000,00	30.230.000,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	6 Paket	6 Paket	8.015.400,00	8.015.400,00	8.015.400,00	0,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	10 Paket	10 Paket	25.342.200,00	25.342.200,00	25.342.200,00	0,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	10 Paket	10 Paket	11.291.050,00	11.347.550,00	11.798.850,00	507.800,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dok	12 Dok	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Lap	4 Lap	4.500.000,00	4.500.000,00	7.425.000,00	2.925.000,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	23 Lap	33 Lap	38.250.000,00	60.582.000,00	47.550.000,00	9.300.000,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Mebel	3 Unit	3 Unit	5.150.000,00	5.150.000,00	9.741.300,00	4.591.300,00			

	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	5 Unit	7 Unit	5.150.000,00	5.150.000,00	9.741.300,00	4.591.300,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Lap	12 Lap	67.600.000,00	67.600.000,00	67.600.000,00	0,00			
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Lap	12 Lap	67.600.000,00	67.600.000,00	67.600.000,00	0,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	77.790.000,00	77.790.000,00	127.790.000,00	50.000.000,00			
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	2 Unit	2 Unit	43.790.000,00	43.790.000,00	43.790.000,00	0,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	18 Unit	18 Unit	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi*	-	1 Unit	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat miskin yang diberdayakan**	**100 %**	**100 %**	**237.102.400,00**	**265.570.400,00**	**190.404.800,00**	**- 46.697.600,00**			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah kecamatan	16 Desa	16 Desa	139.046.000,00	167.514.000,00	92.348.400,00	- 46.697.600,00			
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	16 Lem masy	16 Lem masy	86.317.200,00	86.317.200,00	11.151.600,00	- 75.165.600,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	6 Lap	6 Lap	52.728.800,00	81.196.800,00	81.196.800,00	28.468.000,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3 Lap	3 Lap	98.056.400,00	98.056.400,00	98.056.400,00	0,00			
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Lap Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	3 Lap	3 Lap	98.056.400,00	98.056.400,00	98.056.400,00	0,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang

3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100 %**	**100 %**	**77.223.850,00**	**77.223.850,00**	**143.073.850,00**	**65.850.000,00**			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7 Lap	7 Lap	77.223.850,00	77.223.850,00	143.073.850,00	65.850.000,00			
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Lap Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	2 Lap	2 Lap	18.478.950,00	18.478.950,00	18.478.950,00	0,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Lap Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	5 Lap	5 Lap	58.744.900,00	58.744.900,00	124.594.900,00	65.850.000,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina**	**100 %**	**100 %**	**33.644.750,00**	**33.644.750,00**	**33.644.750,00**	**0,00**			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dok Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5 Dok	5 Dok	33.644.750,00	33.644.750,00	33.644.750,00	0,00			
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dok yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	1 Dok	1 Dok	6.728.950,00	6.728.950,00	6.728.950,00	0,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dok yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	1 Dok	1 Dok	6.728.950,00	6.728.950,00	6.728.950,00	0,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	*Jumlah Dok Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*	1 Dok	1 Dok	6.728.950,00	6.728.950,00	6.728.950,00	0,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dok Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	1 Dok	1 Dok	6.728.950,00	6.728.950,00	6.728.950,00	0,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	*Jumlah Dok Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa*	1 Dok	1 Dok	6.728.950,00	6.728.950,00	6.728.950,00	0,00	Tanjung Bintang	Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung Bintang
	JUMLAH					**2.399.650.000,00**	**2.409.045.000,00**	**2.486.395.000,00**	**86.745.000,00**			

BAB IV
PENUTUP

Failing to plan is planning to fail; kegagalan kita dalam merencanakan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Unsur Kewilayahan sama dengan merencanakan kegagalan Kecamatan Tanjung Bintang.

Renja Perubahan PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Tanjung Bintang dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2025. Renja Perubahaan PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Kecamatan Tanjung Bintang 2025.

Renja Perubahaan PD ini harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahaan (RKA-P) Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Tanjung Bintang dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2025.

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Kecamatan Tanjung Bintang untuk *proving* (membuktikan) kinerja dan untuk *improving* (memperbaiki) kinerja.

Saat penjabaran Renja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya.

Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Pelajaran yang kita dapatkan dari pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalitas pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Tanjung Bintang dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2025.

Demikian Renja Perubahaan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu meridhai semua langkah kita. Aamiin ... Aamiin.

Tanjung Bintang, Juli 2025

Camat Tanjung Bintang



HERI PURNOMO, S.K.M

NIP. 19700710 199703 1 004

RENCANA KERJA PERUBAHAN



KECAMATAN PENENGAHAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya akhirnya Rencana Kerja Perubahan RKPD Kecamatan Penengahan Tahun 2025 telah terselesaikan. maksud disusunnya dokumen ini adalah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Renja Perubahan RKPD Kecamatan Penengahan Tahun 2024 bertujuan secara umum sebagai penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Kecamatan Penengahan Tahun 2021-2026 yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen Renja Perubahan RKPD Kecamatan Penengahan Tahun 2025 masih banyak keterbatasan dikarenakan bersifat rancangan awal sehingga dibutuhkan masukan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dokumen ini.

Akhirnya, semoga dokumen Renja Perubahan RKPD Kecamatan Penengahan Tahun 2025 dapat menjadi pedoman awal bagi penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran serta menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Penengahan, 11 Juli 2025

CAMAT PENENGAHAN,

ZAELANI S, STP. M.H
Pembina
NIP. 19850203 200602 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul..... i

Kata Pengantar..... ii

Daftar Isi..... iii

Daftar Gambar..... iv

Daftar Tabel v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematikan Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 15

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 16

BAB III TUJUAN DANSASARANPERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 22

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 23

3.3. Program dan Kegiatan Prioritas..... 24

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah 2

Gambar 1.2. Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD 3

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.1. Anggaran dan Realiasa Tahun Anggaran 2022 ……..... 9

Tabel 2.1.2. Indikator Kinerja Utama Kec. Penengahan Tahun 2021 – 2026 ... 18

Tabel 2.1.3. Capaian IKU Kecamatan Penengahan dan Proyeksi Untuk Tahun 2023 – 2025..... 18

Tabel 2.2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan Tahun 2023..... 20

Tabel 2.4.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Penengahan Tahun 2023..... 23

Tabel 2.4.1 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan PenengahanTahun 2025..... 26

Tabel 2.5.1 Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Penengahan Tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan 33

Tabel 3.3.1 Rencana Program dan Kegiatan Penengahan Tahun 2025..... 40

Tabel 4. Penambahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan T.A 2025..... 41

Tabel 4.1 Penambahan Sub Kegiatan Tahun Anggaran2025..... 41

Tabel 4.2 Perbandingan Anggaran Rencana Kerja Kecamatan Penengahan Tahun 2023 dengan Tahun 2025..... 42

BAB I
PENDAHULUAN

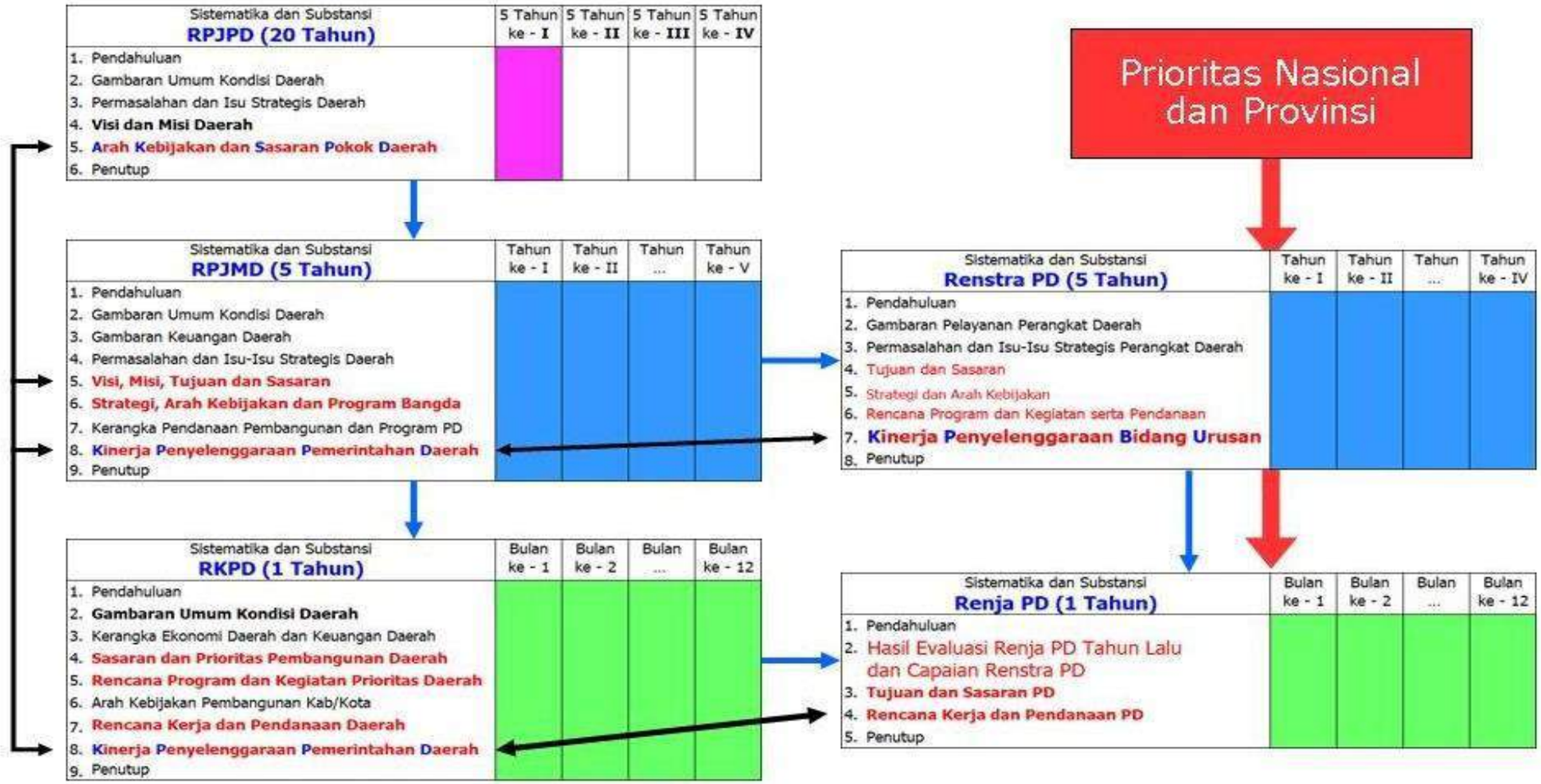
1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

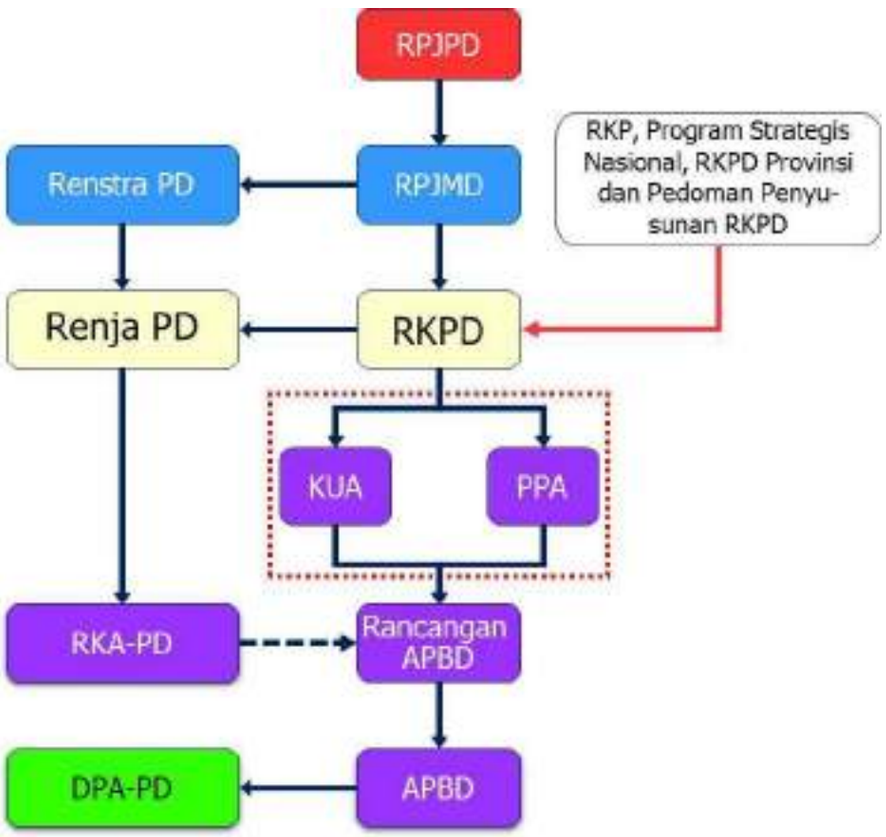
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Penengahan adalah dokumen perencanaan kinerja Kecamatan Penengahan untuk periode1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Penengahan untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Lihat gambar 1.2.

Gambar 1.1.Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Penengahan adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Penengahan untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Lihat gambar 1.2.

Gambar 1.2. Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD



Renja Perubahan Kecamatan Penengahan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan Renja Kecamatan Penengahan adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Penengahan;
2. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Penengahan berpedoman pada Renstra Kecamatan Penengahan, evaluasi hasil Renja Kecamatan Penengahan tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Kecamatan Penengahan tahun berjalan;
3. Penyusunan Rancangan Renja Perubahan Kecamatan Penengahan berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Kecamatan Penengahan dan Rancangan Awal

Kecamatan Penengahan;

4. Pembahasan Rancangan Renja Perubahan Kecamatan Penengahan dalam Forum Kecamatan Penengahan/ lintas Kecamatan Penengahan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
5. Perumusan Renja Perubahan Kecamatan Penengahan berdasarkan Perkada tentang Renja Kerja ;
6. Verifikasi Renja Perubahan Kecamatan Penengahan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Keterkaitan Dokumen Renja Perubahan Kecamatan Penengahan dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1. Sedangkan tindak lanjut dokumen Renja Kecamatan Penengaha hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2 diatas.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Penengahan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis Kecamatan Penengahan Tahun 2021-2026 yang mendukung Visi Bupati *yaitu* ***"Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan yang Berintegritas, Maju dan Sejahtera dengan Semangat Gotong Royong"*** dan Misi Bupati ke-5 ***"Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional, Transparan, Efektif dan Akuntabel"***.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Renja Perubahan Kecamatan Penengahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2020-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 -2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025; Lembar Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026(Lembar Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 104).
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

Maksud Dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 ini adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah pada Tahun 2025.

1.2.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Kecamatan PenengahanKabupaten Lampung Selatan tahun 2025 ini adalah:

a. Memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan agenda pembangunan di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai;
b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kerja di bidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan;
c. Mendukung koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antarpelaku pembangunan di Kabupaten

Lampung Selatan;

d. Menjamin penggunaan sumber daya Kabupaten Lampung Selatan secara efektif, efisien, berkeadilan, adil, transparan, akuntabel, partisipatif, keadilan sosial dan berkelanjutan, serta menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Peruabahn Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematikan Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan Prioritas

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KINERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Rancangan Renja Perubahan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2025.

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Kecamatan Penengahan, dilaksanakan untuk mengetahui :

a. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
b. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
c. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
c. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel. 2.3 Anggaran dan Realiasa Tahun Anggaran 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Kinerja (%)
		DPA	APBD-P		
	KECAMATAN				
06 .01 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KAB/KOTA				
06 .01 .01 . 01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD**				
06 .01 .01 .01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	2.128.000,00	2.128.000,00	2.128.000,00	100%
06 .01 .01 .01 . 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.513.900,00	1.513.900,00	1.513.900,00	100%
06 .01 .01 .01 . 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKP	2.224.200,00	2.224.200,00	2.224.200,00	100%
06 .01 .01 .01 . 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.047.400,00	1.047.400,00	1.047.400,00	100%
06 .01 .01 .01 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKP	1.544.800,00	1.544.800,00	1.544.800,00	00%
06 .01 .01 .01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinjerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.393.900,00	4.393.900,00	4.393.900,00	100%
06 .01 .01 . 02	**Administrasi Keuangan PD**				
06 .01 .01 .02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.188.038.050,00	1.130.106.000,00	1.097.525.335,00	97,11%
06 .01 .01 .02 . 02	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	266.010.000,00	290.110.000,00	290.110.000,00	100%
06 .01 .01 .02 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKP	2.480.500,00	2.480.500,00	2.480.500,00	100,00%
06 .01 .01 .02 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.121.500,00	2.121.500,00	2.121.500,00	100,00%
06 .01 .01 . 05	**Administrasi Kepegawaian PD**				
06 .01 .01 . 05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.595.600,00	20.595.600,00	20.595.600,00	100,00%
06 .01 .01 . 06	**Administrasi Umum PD**				
06 .01 .01 .06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.563.200,00	4.563.200,00	4.563.200,00	100,00%
06 .01 .01 .06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.208.200,00	30.868.200,00	30.868.200,00	100,00%
06 .01 .01 .06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.495.500,00	8.495.500,00	8.474.800,00	99,75%

06 .01 .01 .06 . 04	Penyediaan Bahan Logistic Kantor	18.665.500,00	18.665.500,00	18.446.700,00	98,82%
06 .01 .01 .06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.582.600,00	3.582.600,00	3.582.600,00	100,00%
06 .01 .01 .06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – udngan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00%
06 .01 .01 .06 . 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.850.000,00	32.850.000,00	32.850.000,00	100,00%
06 .01 .01 .06 . 09	Penyelnggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.860.000,00	2.860.000,00	1.210.000,00	42,30%
06 .01 .01 . 06	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda**				
06 .01 .01 .06 . 05	Pengadaan Mebel	9.260.000,00	9.260.000,00	9.260.000,00	100%
06 .01 .01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda**				
06 .01 .01 .08 . 02	Penyediaan Jasa Komunnikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.400.000,00	36.400.000,00	23,857,870,00	65,54%
06 .01 .01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda**				
06 .01 .01 .09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.620.000,00	38.620.000,00	38.562.520,00	99,85%
06 .01 .01 .09 . 06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	6.500.000,00	86,66%
06 .01 .01 .09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
06 .01 .01 .09 . 010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100%
06 .01 . 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				
06 .01 .03 . 01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				
06 .01 .03 .01 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan	79.914.200,00	79.914.200,00	79.914.200,00	100%
06 .01 .03 .01 . 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.469.600,00	21.469.600,00	21.469.600,00	100%
06 .01 .03 . 03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				
06 .01 .03 .03 . 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	21.142.400,00	21.142.400,00	21.142.400,00	100%
06 .01 . 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				
06 .01 .04 . 01	**Koordinasi Upya Penyelenggaraan Ketenterraman Dan**				

	Ketertiban				
06 .01 .04 .01 . 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	68.268.200,00	42.938.200,00	42.938.200,00	100,00%
06.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				
06.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Des**				
06.01.06.2.01.05	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11.225.200,00	11.064.900,00	11.064.900,00	100%
06.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamata				

Dari uraian tabel diatas diperoleh informasi bahwa pelaksanaan realisasi anggaran di Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, ada beberapa kegiatan yang belum mencapai target, adapun kegiatan yang tidak tercapai targetnya adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 2.860.000,- terealisasi sebesar 42,30% atau sejumlah Rp. 1.210.000,- tidak dapat dilaksanakan semua, dikarenakan tidak terealisasi anggaranya;

Total Anggaran di Kecamatan Penengahan untuk tahun 2023 sebesar Rp. 1.867.090.300,00 dengan Realisasi Anggaran Rp. 1.819.020.525,00 dan capaian kinerja 97.42%.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Secara umum Renja Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capain yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Dalam rangka mencapai sasaran Daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2025 melaksanakan 4 (empat) program dan 11 (sebelas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**, dengan kegiatan :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

c. Adiministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**, dengan kegiatan :
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
3. **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum,** dengan kegiatan :
   a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** dengan kegiatan :
   a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2023 dan perkiraan capaian di tahun 2024 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.3.

Berdasarkan tabel tersebut, tingkat realisasi target program dan kegiatan pada tahun 2023 rata-rata mencapai angka 100%, yang berarti bahwa Kecamatan Penengahan telah berhasil merealisasikan target program dan kegiatan yang tertuang dalam renstra tahun 2021 - 2026.

Hasil pelaksanaan Renja Perangkat dapat dilihat dari tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Adapun target IKU Kecamatan Penengahan 2021 - 2026 disajikan pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.1. Indikator Kinerja Utama Kec. Penengahan Tahun 2021 – 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	6	8
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik di kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	80	81	82	84	85

Formulasi pengukuran terhadap target adalah:

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN/ PENGUKURAN
Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	Survey tingkat kepuasaan masyarakat terhadap layanan aparatur kecamatan yang minimal dilaksanakan 1 tahun sekali

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, maka hasil capaian IKU Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dan proyeksi untuk Tahun 2022-2023 ditunjukan pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.1.2. Capaian IKU Kecamatan Penengahandan Proyeksi Untuk Tahun 2022 - 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target IKU				Realisasi Capaian		Proyeksi	
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	6	8	9
Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	80	80	81	82	60	65	84	85

Sedangkan, hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021 dan perkiraan capaian di tahun 2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.1.3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Selatan

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA-SKPD
KECAMATAN PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2025

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K%	Rp%		
		7.01	**KECAMATAN**			**2.002.980.900**		**467.187.831**		**456.153.227**		**265.723.041**		**747.995.598**		1.937.059.697	**79,78**	**96,71**		
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.734.884.150**		**362.467.331**		**428.238.827**		**225.711.991**		**670.264.798**		1.686.682.947	**80,56**	**97,22**	Kecamatan Penengahan	
			Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	81		0		0		0		75		75		92,59			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			29.403.600		16.767.300		1.440.000		3.728.500		7.069.000		29.004.800	100	98,64		
			Tercapainya dokumen yang ditargetkan dalam satu tahun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		2		0		0		0		2		100			
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			3.728.500		-		-		3.728.500		-		3.728.500	100	100		

	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			3.832.500		-		-		-		3.832.500		3.832.500	100	100		
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			3.442.100		3.442.100		-		-		-		3.442.100	100	100		
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			3.400.300		-		-		-		3.001.500		3.001.500	100	88,27		
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4.019.400		2.579.400		1.440.000		-		-		4.019.400	100	100		
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		2		0		0		0		2		100			
	Tersedianya dokumen perencanaan yang ditargetkan dalam satu tahun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3		0		0		0		3		100			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.980.800		10.745.800		-		-		235.000		10.980.800	100	100		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3		0		0		0		3		100			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.430.868.150		321.860.531		369.173.227		202.689.141		501.958.560		1.395.681.459	100	97,54		
	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		12		12		12		12		12		100			
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		3		3		3		3		12		100			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0		0		0		1		100			
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2		0		0		0		2		2		100			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.068.479.000		256.737.831		285.973.227		141.789.141		338.975.310		1.023.475.509	100	95,79		

	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		12		12		12		12		12		100			
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			359.558.200		63.733.600		83.200.000		60.900.000		161.541.400		369.375.000	100	102,73		
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		3		3		3		3		12		100			
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1.389.100		1.389.100		-		-		-		1.389.100	100	100		
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0		0		0		1		100			
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			1.441.850		-		-		-		1.441.850		1.441.850	100	100		
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2		0		0		0		2		2		100			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			8.910.000		-		-		-		8.909.991		8.909.991	100	100		
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			8.910.000		-		-		-		8.909.991		8.909.991	100	100		
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			91.362.400		10.342.900		18.050.700		7.018.400		55.713.600		91.125.600	41,67	99,74		
	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		0		1		100			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		0		4		0		0		0		0			
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		0		0		0			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		0		0		0			
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		2		4		4		2		12		100			
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		0		4		0		0		4		33,33			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		2		4		4		2		12		100			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.679.200		866.500		1.050.200		804.500		2.721.200		5.442.400	100	95,83		
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		0		1		100			

7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			36.500.000		-		-		-		36.500.000		36.500.000	0	100		
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		0		4		0		0		0		0			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			4.195.400		721.600		432.400		1.032.100		2.009.300		4.195.400	0	100		
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		0		0		0			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12.466.800		3.156.200		2.880.200		1.420.500		5.009.900		12.466.800	0	100		
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		0		0		0			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.811.000		838.600		937.900		741.300		1.293.200		3.811.000	0	100		
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		0		0		0			
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			6.000.000		1.000.000		1.500.000		1.000.000		2.500.000		6.000.000	100	100		
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		2		4		4		2		12		100			
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			4.500.000		-		4.500.000		-		-		4.500.000	33,33	100		
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		0		4		0		0		4		33,33			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			18.210.000		3.760.000		6.750.000		2.020.000		5.680.000		18.210.000	100	100		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		2		4		4		2		12		100			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12.500.000		-		-		-		12.499.988		12.499.988	100	100		
	Tersedianya Barang Milik Daerah yang di targetkan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	25		0		0		0		25		25		100			
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			12.500.000		-		-		-		12.499.988		12.499.988	100	100		
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	25		0		0		0		25		25		100			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			36.400.000		5.346.600		5.894.900		4.627.350		9.184.889		25.053.739	100	68,83		
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			36.400.000		5.346.600		5.894.900		4.627.350		9.184.889		25.053.739	100	68,83		
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			125.440.000		8.150.000		33.680.000		7.648.600		74.928.770		124.407.370	100	99,18		
	Tersedianya barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		0		0		0		2		100			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16		0		0		0		16		16		100			

			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0		1		100			
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			43.240.000		8.150.000		8.800.000		7.648.600		17.955.770		42.554.370	100	98,41		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		0		0		0		2		100			
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			7.200.000		-		-		-		7.200.000		7.200.000	100	100		
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16		0		0		0		16		16		100			
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			75.000.000		-		24.880.000		-		49.773.000		74.653.000	100	99,54		
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0		1		100			
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**136.051.900**		**30.020.500**		**13.500.000**		**18.000.000**		**56.811.400**		118.331.900	**53,33**	**86,98**	Kecamatan Penengahan	
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase masyarakat/ kelurahan yang diberdayakan (%) (%)	100		0		0		0		100		100		100			
		Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan (%)			0		0		0		100		100		0			
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			99.632.500		30.020.500		13.500.000		18.000.000		20.392.000		81.912.500	30	82,21		
	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	16		16		0		0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		0		2		1		0		3		60			
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			29.328.500		20.428.500		-		-		-		20.428.500	0	69,65		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	16		16		0		0		0		0		0			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			70.304.000		9.592.000		13.500.000		18.000.000		20.392.000		61.484.000	60	87,45		
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		0		2		1		0		3		60			
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			36.419.400		-		-		-		36.419.400		36.419.400	100	100		
	Diberdayakannya Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2		0		0		0		2		2		100			
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			36.419.400		-		-		-		36.419.400		36.419.400	100	100		

	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2		0		0		0		2		2		100			
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**121.725.850**		**74.700.000**		**14.414.400**		**22.011.050**		**10.600.400**		121.725.850	**100**	**100**	Kecamatan Penengahan	
	Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan sadar hukum	Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%) (%)	100												0			
		Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum (%)			0		0		0		100		100		0			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			121.725.850		74.700.000		14.414.400		22.011.050		10.600.400		121.725.850	100	100		
	Terlaksananya koordinasi dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2		0		0		1		1		2		100			
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	3		0		3		0		0		3		100			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			13.866.500		-		-		13.866.500		-		13.866.500	100	100		
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2		0		0		1		1		2		100			
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			107.859.350		74.700.000		14.414.400		8.144.550		10.600.400		107.859.350	100	100		
	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	3		0		3		0		0		3		100			
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**10.319.000**		**-**		**-**		**-**		**10.319.000**		10.319.000	**100**	**100**	Kecamatan Penengahan	
	Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%) (%)	100		0		0		0		100		100		100			
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			10.319.000		-		-		-		10.319.000		10.319.000	100	100		
	Terlaksananya Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			10.319.000		-		-		-		10.319.000		10.319.000	100	100		
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
	JUMLAH			**2.002.980.900**		**467.187.831**		**456.153.227**		**265.723.041**		**747.995.598**		**1.937.059.697**				
	Rata-rata capaian kinerja (%)														**79,78**	**96,71**		

		Predikat kinerja															**Tinggi**	**Sangat tinggi**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA-SKPD berikutnya	:

K o d e	**Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)**	**Target Kinerja Capaian Program(Renstra)**	**Realisasi Target Kinerjas.d Thn 2020(n-3)2022**	**Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun n-2**			**Target Program dan Kegiatan Tahun n-12024**	**Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022**	
					Target Renja (n-2)2023	**Realisasi Renja(n-2)2023**	**Tingkat Realisasi(%)**		**Realisasi Capaian Program & Kegiatan n-1**	**Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra**
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11
6.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan**	**100%**	**-**	**100%**	**93%**	**93%**	**100%**	**100%**	**33,33%**
6.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah kecamatan	22 Desa	-	22 Desa	22 Desa	93%	22 Desa	22 Desa	33,33%
6.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan	Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0 Laporan	-	-	-	-	3 Lembaga	3 Lembaga	31,41%
6.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**33,33%**
6.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	-	3 Laporan	2 Laporan	99%	3 Laporan	4 Laporann	22,22%
6.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**16,66%**
6.01.06.2.05	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 Laporan	-	-	-	-	1 Dok	1 Dok	8,20%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Penengahan pada tahun anggaran 2023 telah melaksanakan 4 Program dan 10 Kegiatan, dengan capaian indikator sebagai berikut :

Tabel 2.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi 2022	Catatan Analisis
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021		
1	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
A	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	68	69	60	61	68	69	68,65	61	
B	**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH**									
1.	Indeks Kepuasan Pelayanan	69	69	80	80	80	80	80	80	
2.	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahanyang diberdayakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Persentase kegiatan koordinasi denganpihak terkait dalam upaya peningkatanketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina	-	-	-	100%	-	-	-	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuannya, OPD Kecamatan Penengahan telah melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD, beberapa program kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Sebagai OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan, ruang lingkup tugas Kecamatan Penengahan mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pendampingan peningkatan kesejahteraan rakyat dan perekonomian, fasilitasi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Ruang lingkup tugas ini turut mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Salah satu fokus pembangunan Kabupaten Lampung Selatan adalah peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan upaya membangun keseimbangan yang lebih proporsional antara kepentingan ekonomi dan keseimbangan sosial serta lingkungan pelayanan dasar dan ketahanan ekonomi lokal dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Penengahan dalam kaitan dengan pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut:

- Aspek kajian kelembagaan Kecamatan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain mengamanatkan bahwa dari sisi budgeting alokasi anggaran Kecamatan berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dimasukkan dalam anggaran Kecamatan. Dalam upaya untuk mengamankan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terkait dengan kedudukan Kecamatan Penengahan , maka dibutuhkan komitmen dan dukungan kebijakan dan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kepada Kecamatan Penengahan, sehingga pembangunan di wilayah Kecamatan Penengahan tetap berjalan dengan pesat dan tidak ketinggalan dengan Kecamatan yang lainnya;

- Aspek kajian dari sumber daya manusia Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi OPD bisa terwujud. Kemudian faktor yang mempengaruhi secara intern antara lain yaitu motivasi kerja dan kapasitas SDM pegawai Kecamatan Penengahan. Dalam upaya untuk memperkuat kapasitas dan menjaga motivasi kerja maka diperlukan adanya pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan. Sementara dari sisi ekstern meliputi tuntutan untuk selalu memperbaiki kinerja, dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern atau pengawasan melekat belum berjalan secara optimal;
- Aspek kajian dari sarana dan prasarana Kondisi sarana dan prasarana penunjang yang terbatas namun tetap dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan masyarakat, sehingga dengan kondisi tersebut aparatur Kecamatan Penengahan harus dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, tanpa mengganggu proses pelayanan masyarakat. Keterbatasan kondisi sarana dan prasarana ini antara lain mencakup kondisi gedung perkantoran yang perlu untuk direhabilitasi sehingga mencapai standar kelayakan untuk pelayanan, serta ketersediaan alat perkantoran yang memadai untuk menunjang kinerja dalam pelayanan masyarakat;
- Aspek kajian dari jumlah anggaran Kondisi sosiologis masyarakat Kecamatan Penengahan yang bernuansa perdesaan dengan berbagai kompleksitas dan dinamika yang ada tentu membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan yang berjalan selama ini tentu belum mampu menyentuh semua kebutuhan masyarakat. Dengan kondisi ini maka diharapkan adanya dukungan kebijakan anggaran yang memadai untuk menampung kebutuhan masyarakat Untuk program dan kegiatan pembangunan yang belum tertampung dalam struktur anggaran Kecamatan, diharapkan dapat tercover oleh OPD terkait untuk diimplementasikan di wilayah Kecamatan Penengahan;

- Aspek kajian ekonomi masyarakat, kondisi perekonomian masyarkat Kecamatan Penengahan tidak terlepas dari keadaan geografisnya. Potensi yang dimiliki Kecamatan Penengahan khususnya dibidang pertanian, perikanan dan juga pariwisatanya. Selama ini masih dikelola secara sederhana, belum ditangani secara profesionaldan juga belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi yang ada belum dipromosikan secara optimal, maka perlu diadakan promosi produk-produk unggulan dan potensi Kecamatan Penengahan melalui wadah kegiatan berupa Pameran Pembangunan Tingkat Kecamatan Penengahan.

Dari beberapa aspek kajian permasalahan yang dihadapi Kecamatan Penengahan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa tantangan yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi peluang. Beberapa tantangan dan peluang yang ada antara lain:

- Posisi Kecamatan Penengahan yang berada di wilayah perdesaan yang merupakan pusat pertanian sehingga sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Lampung Selatan maka ketersediaan sarana dan prasarana fisik yang memadai mutlak dibutuhkan untuk menopang aktifitas warga yang berkarakteristik perdesaan;
- Kecamatan Penengahan sebagai pusat aktifitas perekonomian daerah yang menjadi parameter dinamika ekonomi Kabupaten Lampung Selatan. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maka diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian warga yang berbanding lurus dengan pengurangan angka kemiskinan;
- Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka telah dilakukan penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Daerah, termasuk kedudukan kelembagaan Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan SOTK baru maka kedudukan kelembagaan Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kota diterapkan, maka diharapkan tidak terjadi ‘degradasi’ dalam kaitan kebijakan dan alokasi anggaran, Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat memberikan dukungan dan pendampingan

terhadap kinerja Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat berjalan lebih optimal;

- Banyaknya produk unggulan dan potensi di Kecamatan Penengahan perlu di tangai dengan serius, salah satunya dengan promosi melalui pameran pembangunan dan juga perlunya pendampingan bagi para pelaku usaha agar dapat berkembang dan bersaing serta bisa memanfataakan media social sebagai media promosi dan informasi.

Mencermati perkembangan kontemporer dalam masyarakat Kecamatan Penengahan, dapat dipetakan isu-isu penting yang perlu ditindak lanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- Perlu adanya upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rencana strategis sehingga diperoleh output yang lebihaspiratif;
- Dalam usaha mendukung pengentasan kemiskinan, maka dibutuhkan pendampingan kepada keluarga miskin secara lebih intensif, terutama dengan mengoptimalkan keberadaan kader kemiskinan;
- Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir yang dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu sebagai modal database dalam menyusun perencanaan pembangunan. Untuk mencapai hal ini maka dibutuhkan personil yang dinamis dalam melakukan collecting data, rekapitulasi data dan penyusunan data base;
- Pemerataan pembangunan fisik untuk meminimalisir disparitas kondisi wilayah pinggiran dengan wilayah lainya, sekaligus membuka lapangan pekerjaan dengan memberdayakan warga setempat;
- Perlu adanya kegiatan promosi dan pameran produk-produk unggulan dan potensi Kecamatan Penengahan yang pada akhirnya dapat memberikan informasi seluas-luasnya tentang potensi yang ada di Kecamatan Penengahan.

Tabel 2.4.1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Penengahan Tahun 2025

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	6	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**80 Poin**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**80 Poin**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 Dokumen**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 Dokumen**	**0**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.640.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.640.500	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.398.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.398.500	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.324.700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.324.700	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.038.750	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.038.750	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.456.700	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.456.700	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	1.525.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	1.525.300	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Peneyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu**	**100%**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Peneyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu**	**100%**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang	1.300.864.300	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang	1.300.864.300	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	6	8	9
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugs ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	301.258.200	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugs ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	301.258.200	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.389.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.389.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16 Laporan	1.441.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16 Laporan	1.441.700	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Peneyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peneyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	**100%**	**9.720.000**	**Pengadaan Paakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	**100%**	**9.720.000**	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Peneyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Peneyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.680.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.680.500	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.800.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.800.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.196.250	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.196.250	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.091.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.091.200	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.372.800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.372.800	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.500.000	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	6	8	9
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	20.640.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**5 Unit**	**12.661.600**	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	13.372.400	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	12.661.600	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36.400,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36.400,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah Yang Dipelihara**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Barang Milik Daerah Yang Dipelihara**			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	43.240.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	38.860.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	7.200.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	6,900,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana PendukungGedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan Yang Diberdayakan**	**100%**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan Yang Diberdayakan**	**100%**		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yangdilakukanpemberdayaandi wilayah kecamatan**	**22 Desa**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah desa yangdilakukanpemberdayaandi wilayah kecamatan**	**22 Desa**		

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	6	8	9
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16 Lembaga	76.032.350	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16 Lembaga	76.032.350	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	49.850.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	49.850.000	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kec. Yang Diberdayakan**	**16 Lembaga**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kec. Yang Diberdayakan**	**1`6 Lembaga**		
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	50.287.250	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	50.287.250	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Koordinasi Dengan Pihak Terkait Dalam Upaya peningkatan Ketenteraman danKetertiban Umum**	**100%**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Dengan Pihak Terkait Dalam Upaya peningkatan Ketenteraman danKetertiban Umum**	**100%**		
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	**Jumlah Koordinasi DenganPihak Terkait Dalam UpayaPeningkatan Ketenteramandan Ketertiban Umum**	**3 Kegiatan**		**Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**	**Jumlah Koordinasi DenganPihak Terkait Dalam UpayaPeningkatan Ketenteramandan Ketertiban Umum**	**3 Kegiatan**		
Sinergitas dengan Kepolisian NKRI ,TNI,dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	16.745.700	Sinergitas dengan Kepolisian NKRI ,TNI,dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	16.745.700	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	70.948.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 laporan	70.948.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina**	**100%**		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina**	**100%**	**22,099,000**	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa**	**4 Kali**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa**	**4 Kali**		
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	11,049,500	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	11,049,500	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	6	8	9
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen		
J U M L A H			**2.101.823.250**	**J U M L A H**			**2.101.823.250**	

Keterangan:

= Program

= Kegiatan

= Sub Kegiatan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka pelaksanaan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diwajibkan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Setiap penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa, Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD yang menitik beratkan pada sinkronisasi rencana kerja antar SKPD dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat agara tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam Visi dan Misi Daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan.

Kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan *bottom up* dengan perencanaan *top down* sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya didalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi seperti ini Pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil-hasil pembangunan partisipatif yang telah diatur dalam Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP).

Tahapan Musrenbang dapat diskriptifkan fungsi dan perencanaan serta kerangka waktu masing-masing tahapan musrenbang :

1. Musyawarah Dusun tingkat Dusun adalah tahapan penggalian usulan program/kegiatan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat. Pada tahap ini dibuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam rangka berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan;

2. Musrenbang tingkat Desa adalah tahapan penentuan prioritas usulan program/kegiatan dari masing-masing Dusun serta pengklasifikasian usulan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
3. Musrenbang tingkat Kecamatan adalah tahapan pemantapan usulan program/kegiatan yang akana disampaikan pada forum SKPD. Pada tahap ini peranan SKPD sangat besar dalam membantu masyarakat memformulasikan usulan program/kegaiatan mereka;
4. Forum SKPD adalah tahapan sinkronisasi usulan program/kegiatan SKPD dengan usulan masyarakat hasil usulan Musrenbang Kecamatan. Pada tahap ini usulan-usulan program/kegaiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD sesuai misi dalam RPJMD;
5. Musrenbang tingkat Kabupaten adalah puncak dari pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten ini adalah tahapan finalisasi usulan program/kegiatan dari masyarakat yang akan diimplementasikan oleh masing-masing SKPD terkait.

Secara garis besar usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang ditampung Kecamatan Penengahan pada tahun 2025 di bagi beberapa bidang, antara lain :

1. Bidang Penguatan SDM di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Penumbuhan Wira Usaha Baru ada 8 program/kegiatan yang diusulkan;
2. Bidang Penguatan Usaha Mikro berbasis Potensi Unggulan ada 1 program/kegiatan yang diusulkan;
3. Peningkatan Infrastruktur ada 24 program/kegiatan yang diusulkan.

Table 2.5.1.Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Lampung Selatan

Kecamatan Penengahan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indicator Kerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pendidikan				
1	Peningkatan Jalan sampai dengan Hotmix Ruas Pasuruan,Kelaten dan Gandri	Kelaten-Ganri	Meningkatnya Kontruksi Jalan Menghubungkan tiga Kecamatan Akses Pertanian,pendidikan,dan Pengembangan Permukiman	P.1.750 M L. 4 M	Rusak berat
2					
3					Kurangnya ruangan untuk belajar
	Kesehatan				
1	Rehab Rumah Paramedis				Dikarenakan sudah sangat tidak layak untuk digunakan
2	Rehab Rumah Paramedis				Rusak parah
3	Penambahan kuota BPJS PBI				Masih banyak warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS PBI,
4	Penambahan kuota BPJS PBI				Masyarakat tidak mempunyai BPJS PBI sehingga masyarakat kesulitan untuk berobat
5	Pengadaan PMT Bayi Kurang Gizi				Masyarakat yang tidak mampu membeli makanan yang bergizi
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Rehabilitasi Jalan	Desa Gandri Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, Kab. Lampung Selatan			Rusaknya akses Ruas Jalan Pasuruan - Gandri untuk Lalulintas Warga Ke Kecamatan dan Kabupaten. (Rehabilitasi Peningkatan Jalan Ruas Pasuruan-Gandri Dengan Ukuran 1700 Meter dan Luas 6 Meter.)
2	Rekonstruksi Jalan			3,500 M	Jalan Onderlagh banyak batu-batu yang berpindah posisi akibat terbawa arus air hujan sehingga rusak
3	Rekonstruksi Jalan			1,000 M	Jalan Onderlagh banyak batu-batu yang berpindah posisi akibat terbawa arus air hujan sehingga rusak
4	Rekonstruksi Jalan			Panjang 1.500 M Lebar 4 M	Jalan rusak parah, jalan berlubang ,becek sulit dilalui kendaraan roda empat sering terjadi kecelakaan
5	Rekonstruksi Jalan			Panjang 1.600 M Lebar 6 M	Jalan rusak berat jika pada saat musim penghujan, kondisi jalan sangat becak
6	Rekonstruksi Jalan			Panjang 1.600 M	Jalan rusak berat jika pada saat musim penghujan, kondisi

				Lebar 6 M	jalan sangat becak
6	Rekonstruksi Jalan			Panjang 1.500 M Lebar 3 M	Jalan Rusak parah,jalan berlobang,becek sulit dilaui kendaraan roda dua dan empat sering terjadi kecelakaan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja PD tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Penengahan Tahun 2025 hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional tahun 2025 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" dengan 6 (tujuh) arah arah kebijakan, yaitu :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penganggutran yang disertai peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas;
6. Ekonomi Hijau;
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Prioritas Pembangunan Nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari StrategiPembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2020-2025 dalam upaya melaksanakanAgenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita.

Terkait dengan kebijakan Nasional Kecamatan PenengahanKabupaten Lampung Selatan selaku Lembaga Teknis Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam Prioritas Nasional Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana, pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal;
2. Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah (Kabupaten/Kota di 33 Provinsi) untuk mendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mendukung penerapan SPM;
3. Percepatan dan pencapaian target Millennium Development Goal's (MDG's);
4. Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan;
5. Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Misi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, yaitu:

Tujuan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan adalah:meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Adapun yang menjadi sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan;
2. Meningkatnya Keamanan,Ketentraman dan Ketertiban Serta Pemberdayaan Masayarakat Desa/Kelurahan;

3.3. Program dan Kegiatan Prioritas

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa kegiatan yang terkandung didalamnya guna mencapai tujuan tertentu.

Program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Penengahan maka dapat disimpulkan bahwa fungsi utama Pemerintah Daerah khususnya Kecamatan Penengahan adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama Kecamatan Penengahan agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat Kecamatan Penengahan.

Pendekatan Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong Pemerintah Daerah khususnya Kecamatan Penengahan melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik.

Sehungan dengan hal tersebut diatas yang merupakan bahan pertimbangan di dalam menyusun/merumuskan program dan kegiatan Kecamatan Penengahan pada tahun 2025 yang merupakan salah satu bentuk dukungan nyata terhadap Visi Bupati *yaitu "Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan yang Berintegritas,*

Maju dan Sejahtera dengan Semangat Gotong Royong" dan Misi Bupati ke-5 *"Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional, Transparan, Efektif dan Akuntabel".*

Adapun total kebutuhan dana untuk pelaksanaan Program dan kegiatan Strategis ini adalah sebesar Rp. 2.101.823.250,00,- nilai total untuk tiap sumber pendanaan seperti yang ditunjukan pada Tabel 3.3.1 dibawah.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kab. Lampung Selatan

Tahun 2025

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Penengahan

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Penengahan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah (terutama Visi ke-5) dan kebutuhan di masa yang akan datang dalam upaya optimalisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah.

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Penengahan Tahun 2025 sebagai solusi dan menjawab isu-isu penting yang ada di wilayah Kecamatan Penengahan diperkirakan membutuhkan dana sebesarRp. 2.101.823.250,- yang akan digunakan untuk mendanai 4 Program dan 11 Kegiatan, sebagai berikut :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**, dengan kegiatan:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**, dengan kegiatan:
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
   b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
3. **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**, dengan kegiatan:
   a. Koordinasi Upaya Penyeleggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

4. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**, dengan kegiatan:

   a. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Selain itu penambahan anggaran juga terjadi pada Sub Kegiatan lainnya baik yang menunjang Operasional Kantor maupun Penyelenggaran Pemerintah Daerah, hal ini dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Perbandingan Anggaran Rencana Kerja Kecamatan PenengahanKab. Lampung Selatan Tahun 2023 dengan Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN		SELISIH
	2023	2024	
1	2	3	4
KECAMATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KAB/KOTA			
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD			
Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	2.128.000	1.640.500	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.513.900	1.398.500	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	2.224.200	1.324.700	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.047.400	1.038.750	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.544.800	1.456.700	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinjerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.393.900	1.525.300	
Administrasi Keuangan PD			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.130.106.000	1.300.864.200	
Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	290.110.000	301.258.200	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.480.500	1.389.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.121.500	1.441.700	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.595.600	9.720.000	
Administrasi Umum PD			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.563.200	5.680.500	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.878.200	19.800.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.495.500	4.196.250	
Penyediaan Bahan Logistic Kantor	18.665.500	13.091.200	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.582.700	7.372.800	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peruuan	3.600.000	6.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.850.000	4.500.000	
Penyelnggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.860.000	20.640.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda			
Pengadaan Mebel	9.270.000	13.372.400	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda			
Penyediaan Jasa Komunnikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	36.400.000,00	36.400.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda			-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	38.620.000,00	43.240.000	

Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	7.500.000,00	7.200.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	20.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	25.000.000		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan	79.914.200	76.032.350	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**21.479.700**	49.850.000	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	21.142.400	50.2876.250	
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Koordinasi Upya Penyelenggaraan Ketenterraman Dan Ketertiban			
Sinergitas dengan Kepolisian NKRI,TNI dan Instansi Verytikal di wilayah Kecamatan		16.745.700	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	42.928.200	70.948.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan			
Fasilitasi Tata Administrasi Pemerintahan Desa	11.074.9001		
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Kepala Desa		13.409.250	
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamata			

BAB V
PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2024 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Penengahan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Renja Awal Kecamatan Penengahan Tahun 2025 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Penengahan itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Penengahan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Awal Kecamatan Penengahan Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Perencanaan Kabupaten Lampung Selatan sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran 2025.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Awal Kecamatan Penengahan Tahun 2025 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Demikian Renja Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu meridhai semua langkah kita. Aamiin

Penengahan, 15 Desember 2023

CAMAT PENENGAHAN,



JAELANI S, STP. M.H
Pembina
NIP. 19850203 200602 1 001

RENCANA KERJA

PERUBAHAN

KECAMATAN PALAS

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Gambar iii
Daftar Tabel iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 4
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.3.1. Maksud 6
1.3.2. Tujuan 6
1.4. Sistematikan Penulisan 8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 15
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 18
2.5. Penelahaan Usulan Program Kegiatan Masyarakat 26

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 35
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 36
3.3. Program dan Kegiatan Prioritas 37

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP 58

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2

Gambar 1.2. Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD 3

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan Tahun 2023 10

Tabel 2.1.2. Anggaran dan Realiasasi Tahun Anggaran 2023 12

Tabel 2.1.3. Indikator Kinerja Utama Kec. Palas Tahun 2021 – 2026 12

Tabel 2.1.4. Capaian IKU Kecamatan Palas dan Proyeksi Untuk Tahun 2023 – 2024 13

Tabel 2.4.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Palas Tahun 2023 14

Tabel 2.4.1 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Palas Tahun 2024 19

Tabel 2.5.1 Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Palas Kabupaten Lampung Selatan 28

Tabel 3.3.1 Rencana Program dan Kegiatan Palas Tahun 2025 38

Tabel 4. Penambahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan T.A 2025 48

Tabel 4.1 Penambahan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025 52

Tabel 4.2 Perbandingan Anggaran Rencana Kerja Kecamatan Palas Tahun 2023 dengan Tahun 2024 56

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Kecamatan Palas merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Palas untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Palas dalam 1 (satu) tahun anggaran yang memuat tujuan, sasaran, dan target capaian kinerja yang akan di capai pada tahun 2025. Oleh karenanya, dokumen ini akan dijadikan sebagai acuan bagi aparatur di lingkungan Kecamatan Palas dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025.

Disamping itu, melalui *review* hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, dokumen ini diharapkan memperjelas kondisi aktual dan tingkat akselerasi pencapaian kinerja serta reformulasi strategi pada setiap unit kerja di Kecamatan Palas yang disertai dengan kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah maupun masyarakat. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka seluruh aparatur Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan dan lembaga terkait berkewajiban untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025.

Akhir kata, dokumen Rencana Kerja Kecamatan Palas Tahun 2025 ini semoga dapat menghasilkan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan secara optimal serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

Palas, 20 Desember 2024

CAMAT PALAS,

SURHAYANAH., S.Pd
Penata TK.I / III.d
NIP. 19751107 201001 2 005

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

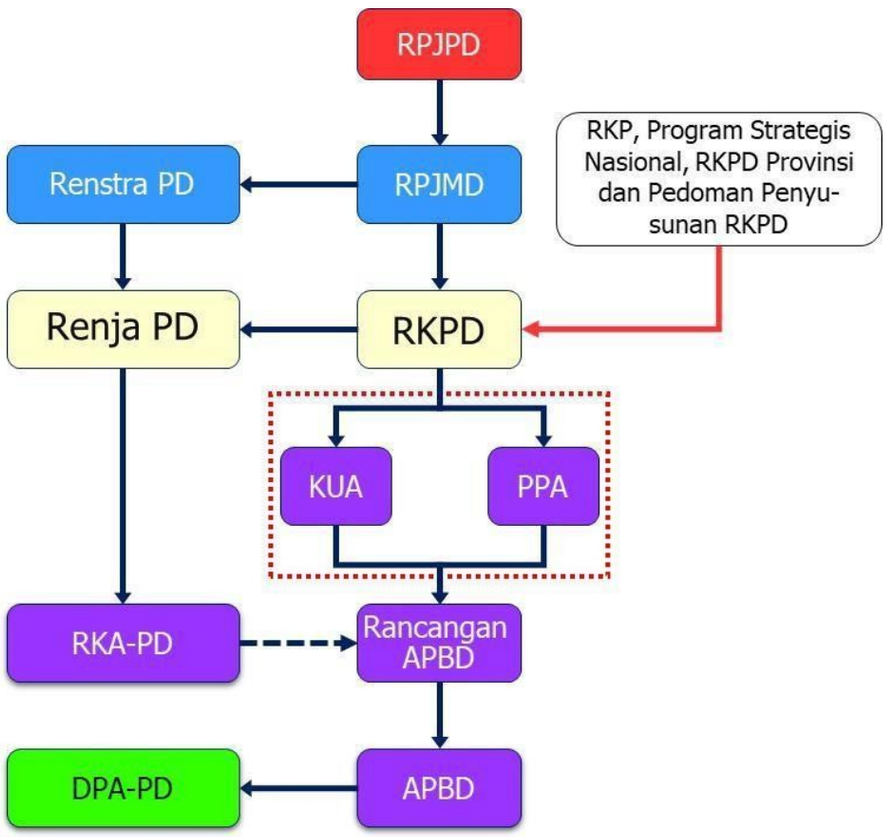
Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien dan efektif, yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang smart, terpadu, dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Telah dipahami secara umum bahwa: *failing to plan is planning to fail*; gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah adalah rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahannya untuk mewujudkan target RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Lihat gambar 1.1.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Lihat gambar 1.2.

Gambar 1.2. Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD



Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja PD;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
3. Penyusunan Rancangan Renja PD berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD;
4. Pembahasan Rancangan Renja PD dalam Forum Perangkat

Daerah/ lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD;
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1. Sedangkan tindak lanjut dokumen Renja PD hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2 diatas.

Rencana Kerja Kecamatan Palas Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis Kecamatan Palas Tahun 2021-2026 yang mendukung Visi Bupati *yaitu* ***"Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan yang Berintegritas, Maju dan Sejahtera dengan Semangat Gotong Royong"*** dan Misi Bupati ke-
5 ***"Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional, Transparan, Efektif dan Akuntabel"***.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Palas Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional

Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 -2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025; Lembar Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun

2020

(Lembar Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 104).

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan rancangan awal renja Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 ini adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah pada Tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 ini adalah:

a. Memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan agenda pembangunan di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai;
b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kerja di bidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan;
c. Mendukung koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antar pelaku pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan;

d. Menjamin penggunaan sumber daya Kabupaten Lampung Selatan secara efektif, efisien, berkeadilan, adil, transparan, akuntabel, partisipatif, keadilan sosial dan berkelanjutan, serta menjaga kesinambungan pembangunan d i Kabupaten Lampung Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematikan Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan Prioritas

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Renja Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2025.

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Kecamatan Palas, dilaksanakan untuk mengetahui :

a. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
b. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
c. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
c. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Secara umum Renja Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capain yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.1.1.

Table T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Lampung Selatan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Palas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Peerintah daerahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun Lalu (tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7.01	**KECAMATAN**									
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**480**	**-**	**72**	**72**	**99,20%**	**73**	**73**	**32,92%**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62 Dokumen	-	9 Dokumen	9 Dokumen	99,36%	9 Dokumen	9 Dokumen	80%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	100%	-	100%	100%	99,31%	100%	100%	80%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peneyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	-	100%	94,69%	96,95%	100%	100%	20,00%
7.01.01.2.07	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah	43 Unit	-	7 Unit	7 Unit	100%	11 Unit	11 Unit	20,93%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Peerintah daerahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun Lalu (tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Kantor	72 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	33,33%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem Daerah	Barang Milik Daerah yang dipelihara	92 Unit	-	15 Unit	15 Unit	99,75%	6 Unit	6 Unit	23,91%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan**	**100%**	**-**	**100%**	**93%**	**100%**	**100%**	**100%**	**33,33%**
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah kecamatan	50 Desa	-	10 Desa	10 Desa	100%	10 Desa	20 Desa	33,33%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Yang Diberdayakan	30 Lembaga	-	100%	100%	100%	3 Lembaga	3 Lembaga	31,41%
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase perda/ perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar**	**100%**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**33,33%**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Dengan Pihak Terkait Dalam Upaya Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	3 Kegiatan	4 Kegiatan	22,22%
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina**	**100%**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**16,67%**
7.01.06.2.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Des	Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	10 Kali	-	100%	100%	100%	2 Kali	2 Kali	8,20%

		Pemerintahan Desa								
7.01.06.2.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10 Kali	-	100%	100%	100%	2 Kali	2 Kali	8,20%

Dari uraian tabel diatas diperoleh informasi bahwa pelaksanaan realisasi anggaran di Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, ada beberapa kegiatan yang belum mencapai target, adapun kegiatan yang tidak tercapai targetnya adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD terealisasi sebesar 93,85% dikarenakan ada belanja Alat Tulis Kantor (ATK) yang tidak dibelanjakan;
- Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan terealisasi sebesar 99,67% tidak dapat dilaksanakan semua, dikarenakan ada kelebihan penghitungan;
- Kegiatan Penyediaan Bahan Logistic Kantor terealisasi sebesar 87,08% tidak dapat dilaksanakan semua, dikarenakan ada belanja Kertas Cover dan belanja Benda Pos yang tidak dibelanjakan;
- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan terealisasi sebesar 92,51% tidak dapat dilaksanakan semua, dikarenakan belanja Foto Copy yang tidak dibelanjakan;
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terealisasi sebesar 99.62% tidak dapat dilaksanakan semua, dikarenakan ada kelebihan anggaran pembayaran pajak Kendaraan Dinas;
- Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat terealisasi sebesar 99,99% tidak dapat dilaksanakan semua, dikarenakan belanja Alat Tulis Kantor (ATK) yang tidak di belanjakan.

Total Anggaran di Kecamatan Palas untuk tahun 2023 sudah terealisasi sebesar 99,28% dan yang tidak terealisasi sebesar 0,72%

Hasil pelaksanaan Renja Perangkat dapat dilihat dari tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Adapun target IKU Kecamatan Palas 2021 - 2026 disajikan pada tabel 2.1.2 berikut :

Tabel 2.1.2. Indikator Kinerja Utama Kec. Palas Tahun 2021 – 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik di kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	71	72	73	74	75

Formulasi pengukuran terhadap target adalah:

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN/ PENGUKURAN
Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	Survey tingkat kepuasaan masyarakat terhadap layanan aparatur kecamatan yang minimal dilaksanakan 1 tahun sekali

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, maka hasil capaian IKU Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan dan proyeksi untuk Tahun 2022-2023 ditunjukan pada tabel 2.1.3 berikut:

Tabel 2.1.3. Capaian IKU Kecamatan Palas dan Proyeksi Untuk Tahun 2022 - 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA		Target IKU			Realisasi Capaian		Proyeksi	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023
1		3	4	5	6	7	8	9
Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)		69	70	71	69	70	71	72

Sedangkan, hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022 dan perkiraan capaian di tahun 2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.3 berikut :

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Palas pada tahun anggaran 2023 telah melaksanakan 4 Program dan 10 Kegiatan, dengan capaian indikator sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.

Tabel T-C 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**											
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)			68	69	70	74	72	-	-	-	
B	**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH**											
1.	Indeks Kepuasan Pelayanan			65	66	67	68	65	-	-	-	
2.	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	
3.	Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	
4.	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina			-	-	-	100%	100%	-	-	-	

2.1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuannya, OPD Kecamatan Palas telah melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD, beberapa program kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Sebagai OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan, ruang lingkup tugas Kecamatan Palas mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pendampingan peningkatan kesejahteraan rakyat dan perekonomian, fasilitasi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Ruang lingkup tugas ini turut mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Salah satu fokus pembangunan Kabupaten Lampung Selatan adalah peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan upaya membangun keseimbangan yang lebih proporsional antara kepentingan ekonomi dan keseimbangan sosial serta lingkungan pelayanan dasar dan ketahanan ekonomi lokal dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Palas dalam kaitan dengan pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut:

- Aspek kajian kelembagaan Kecamatan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain mengamanatkan bahwa dari sisi budgeting alokasi anggaran Kecamatan berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dimasukkan dalam anggaran Kecamatan. Dalam upaya untuk mengamankan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terkait dengan kedudukan Kecamatan Palas , maka dibutuhkan komitmen dan dukungan kebijakan dan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kepada Kecamatan Palas, sehingga pembangunan di wilayah Kecamatan Palas tetap berjalan dengan pesat dan tidak ketinggalan dengan Kecamatan yang lainnya;

- Aspek kajian dari sumber daya manusia Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi OPD bisa terwujud. Kemudian faktor yang mempengaruhi secara intern antara lain yaitu motivasi kerja dan kapasitas SDM pegawai Kecamatan Palas. Dalam upaya untuk memperkuat kapasitas dan menjaga motivasi kerja maka diperlukan adanya pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan. Sementara dari sisi ekstern meliputi tuntutan untuk selalu memperbaiki kinerja, dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern atau pengawasan melekat belum berjalan secara optimal;
- Aspek kajian dari sarana dan prasarana Kondisi sarana dan prasarana penunjang yang terbatas namun tetap dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan masyarakat, sehingga dengan kondisi tersebut aparatur Kecamatan Sragi harus dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, tanpa mengganggu proses pelayanan masyarakat. Keterbatasan kondisi sarana dan prasarana ini antara lain mencakup kondisi gedung perkantoran yang perlu untuk direhabilitasi sehingga mencapai standar kelayakan untuk pelayanan, serta ketersediaan alat perkantoran yang memadai untuk menunjang kinerja dalam pelayanan masyarakat;
- Aspek kajian dari jumlah anggaran Kondisi sosiologis masyarakat Kecamatan Palas yang bernuansa perdesaan dengan berbagai kompleksitas dan dinamika yang ada tentu membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan yang berjalan selama ini tentu belum mampu menyentuh semua kebutuhan masyarakat. Dengan kondisi ini maka diharapkan adanya dukungan kebijakan anggaran yang memadai untuk menampung kebutuhan masyarakat Untuk program dan kegiatan pembangunan yang belum tertampung dalam struktur anggaran Kecamatan, diharapkan dapat tercover oleh OPD terkait untuk diimplementasikan di wilayah Kecamatan Palas;
- Aspek kajian ekonomi masyarakat, kondisi perekonomian masyarkat Kecamatan Palas tidak terlepas dari keadaan geografisnya. Potensi yang dimiliki Kecamatan Palas khususnya dibidang pertanian, perikanan dan juga pariwisatanya. Selama ini masih dikelola secara sederhana, belum ditangani secara profesional dan juga belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi yang ada belum dipromosikan secara optimal, maka perlu diadakan promosi produk-produk unggulan dan potensi Kecamatan Palas melalui wadah kegiatan berupa Pameran Pembangunan Tingkat Kecamatan Palas.

Dari beberapa aspek kajian permasalahan yang dihadapi Kecamatan Palas sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa tantangan yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi peluang. Beberapa tantangan dan peluang yang ada antara lain:

- Posisi Kecamatan Palas yang berada di wilayah perdesaan yang merupakan pusat pertanian sehingga sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Lampung Selatan maka ketersediaan sarana dan prasarana fisik yang memadai mutlak dibutuhkan untuk menopang aktifitas warga yang berkarakteristik perdesaan;
- Kecamatan Palas sebagai pusat aktifitas perekonomian daerah yang menjadi parameter dinamika ekonomi Kabupaten Lampung Selatan. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maka diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian warga yang berbanding lurus dengan pengurangan angka kemiskinan;
- Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka telah dilakukan penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Daerah, termasuk kedudukan kelembagaan Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan SOTK baru maka kedudukan kelembagaan Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kota diterapkan, maka diharapkan tidak terjadi „degradasi" dalam kaitan kebijakan dan alokasi anggaran, Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat memberikan dukungan dan pendampingan terhadap kinerja Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat berjalan lebih optimal;
- Banyaknya produk unggulan dan potensi di Kecamatan Palas perlu di tangai dengan serius, salah satunya dengan promosi melalui pameran pembangunan dan juga perlunya pendampingan bagi para pelaku usaha agar dapat berkembang dan bersaing serta bisa memanfaatkan media sosial sebagai media promosi dan informasi.

Mencermati perkembangan kontemporer dalam masyarakat Kecamatan Palas, dapat dipetakan isu-isu penting yang perlu ditindak lanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- Perlu adanya upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan *stakeholder* terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rencana strategis sehingga diperoleh *output* yang lebih aspiratif;
- Dalam usaha mendukung pengentasan kemiskinan, maka dibutuhkan pendampingan kepada keluarga miskin secara lebih intensif, terutama dengan mengoptimalkan keberadaan kader kemiskinan;

- Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir yang dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu sebagai modal database dalam menyusun perencanaan pembangunan. Untuk mencapai hal ini maka dibutuhkan personil yang dinamis dalam melakukan collecting data, rekapitulasi data dan penyusunan data base;
- Pemerataan pembangunan fisik untuk meminimalisir disparitas kondisi wilayah pinggiran dengan wilayah lainya, sekaligus membuka lapangan pekerjaan dengan memberdayakan warga setempat;
- Perlu adanya kegiatan promosi dan pameran produk-produk unggulan dan potensi Kecamatan Palas yang pada akhirnya dapat memberikan informasi seluas-luasnya tentang potensi yang ada di Kecamatan Palas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah, dilakukan penyelarasan program dan kegiatan kedalam nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Oleh sebab itu, rancangan awal RKPD Tahun 2025 yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja PD Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan Permendagri 90, terdapat 5 program, 12 kegiatan,
36 sub kegiatan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Table T-C 31

Tabel 2.4.1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Palas Tahun 2025

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA-SKPD
KECAMATAN PALAS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2025

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01	**KECAMATAN**			**1.615.781.400**		**399.771.689**		**353.856.619**		**326.213.451**		**416.818.263**		1.496.660.022	**89,47**	**92,63**		
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.433.475.400**		**291.785.189**		**329.072.619**		**306.510.051**		**386.986.163**		1.314.354.022	**96**	**91,69**	Kecamatan Palas	
			Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)	2												0			
				Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	83		0		0		0		72		72		86,75			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			32.490.850		600.000		1.020.000		8.028.500		22.842.350		32.490.850	100	100		
			Tersedianya dokumen perencanaan yang ditargetkan dalam satu tahun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1		1		0		1		3		100			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			

7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			11.025.600		600.000		1.020.000		4.475.600		4.930.000		11.025.600	100	100		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1		1		0		1		3		100			
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			5.840.900		-		-		-		5.840.900		5.840.900	100	100		
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			5.840.900		-		-		-		5.840.900		5.840.900	100	100		
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			3.552.900		-		-		3.552.900		-		3.552.900	100	100		
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			3.552.900		-		-		-		3.552.900		3.552.900	100	100		
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2.677.650		-		-		-		2.677.650		2.677.650	100	100		
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.186.845.250		268.366.889		291.306.619		222.720.651		286.560.313		1.068.954.472	100	90,07		
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		12		12		12		12		12		100			
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0		0		0		1		100			
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2		0		0		0		2		2		100			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			929.445.600		228.821.689		242.956.619		159.413.451		209.163.063		840.354.822	100	90,41		
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		12		12		12		12		12		100			
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			255.701.400		38.800.000		48.350.000		63.307.200		76.444.200		226.901.400	100	88,74		
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			

7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			745.200		745.200		-		-		-		745.200	100	100		
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0		0		0		1		100			
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			953.050		-		-		-		953.050		953.050	100	100		
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2		0		0		0		2		2		100			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			53.019.300		2.718.300		8.026.000		18.460.900		22.583.500		51.788.700	100	97,68		
	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10		2		3		3		2		10		100			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.804.200		-		-		1.086.200		718.000		1.804.200	100	100		
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.505.000		-		-		3.505.000		-		3.505.000	100	100		
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			3.031.400		-		-		1.187.000		1.844.400		3.031.400	100	100		
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			8.167.500		1.918.300		676.000		1.882.700		3.690.500		8.167.500	100	100		
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.551.200		-		-		-		3.551.200		3.551.200	100	100		
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.800.000		800.000		1.200.000		1.200.000		1.600.000		4.800.000	100	100		

	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			20.400.000		-		6.150.000		9.600.000		4.650.000		20.400.000	100	100		
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			7.760.000		-		-		-		6.529.400		6.529.400	100	84,14		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10		2		3		3		2		10		100			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.150.000		-		-		-		3.150.000		3.150.000	100	100		
	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			3.150.000		-		-		-		3.150.000		3.150.000	100	100		
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			58.000.000		12.000.000		8.000.000		26.000.000		12.000.000		58.000.000	100	100		
	Jasa Penunjang Urusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			58.000.000		12.000.000		8.000.000		26.000.000		12.000.000		58.000.000	100	100		
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			99.970.000		8.100.000		20.720.000		31.300.000		39.850.000		99.970.000	80	100		
	Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		0		0		0		2		2		100			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		0		0		5		5		10		100			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0		0		0			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		0		0		3		3		100			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			37.970.000		8.100.000		10.720.000		10.800.000		8.350.000		37.970.000	100	100		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		0		0		0		2		2		100			
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.000.000		-		-		500.000		1.500.000		2.000.000	100	100		
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		0		0		5		5		10		100			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			10.000.000		-		10.000.000		-		-		10.000.000	0	100		

	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0		0		0			
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			45.000.000		-		-		20.000.000		25.000.000		45.000.000	100	100		
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		0		0		3		3		100			
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.000.000		-		-		-		5.000.000		5.000.000	100	100		
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**66.187.900**		**34.936.500**		**-**		**11.184.800**		**20.066.600**		66.187.900	**66,67**	**100**	Kecamatan Palas	
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan (%)	100		0		0		0		100		100		100			
		Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan (%)			0		0		0		100		100		0			
		Persentase Masyarakat Desa / Kelurahan yang diberdayakan (%)	100		0		0		0		100		100		100			
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			49.670.100		34.936.500		-		5.116.800		9.616.800		49.670.100	50	100		
	Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	16		16		0		0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			34.936.500		34.936.500		-		-		-		34.936.500	0	100		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	16		16		0		0		0		0		0			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			14.733.600		-		-		5.116.800		9.616.800		14.733.600	100	100		
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			16.517.800		-		-		6.068.000		10.449.800		16.517.800	100	100		
	Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			16.517.800		-		-		6.068.000		10.449.800		16.517.800	100	100		
	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**104.400.300**		**73.050.000**		**24.784.000**		**6.566.300**		**-**		104.400.300	**100**	**100**	Kecamatan Palas	
	Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan sadar hukum	Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100		0		0		0		100		100		100			

7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			104.400.300		73.050.000		24.784.000		6.566.300		-		104.400.300	100	100		
	Jumlah laporan Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		0		0		1		0		1		100			
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	3		3		0		0		0		3		100			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			4.273.700		-		-		4.273.700		-		4.273.700	100	100		
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		0		0		1		0		1		100			
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			100.126.600		73.050.000		24.784.000		2.292.600		-		100.126.600	100	100		
	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	3		3		0		0		0		3		100			
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**11.717.800**		**-**		**-**		**1.952.300**		**9.765.500**		11.717.800	**75**	**100**	Kecamatan Palas	
	Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%) (%)	100		0		0		0		100		100		100			
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			11.717.800		-		-		1.952.300		9.765.500		11.717.800	75	100		
	Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			-		-		-		-		-		-	0	0		

	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			1.952.300		-		-		1.952.300		-		1.952.300	100	100		
	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			1.974.900		-		-		-		1.974.900		1.974.900	100	100		
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan			900.800		-		-		-		900.800		900.800	100	100		
	Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			926.800		-		-		-		926.800		926.800	100	100		
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			-		-		-		-		-		-	0	0		
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	1		0		0		0		0		0		0			
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			2.981.500		-		-		-		2.981.500		2.981.500	100	100		
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			2.981.500		-		-		-		2.981.500		2.981.500	100	100		
	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
	JUMLAH			**1,615,781,400**		**399,771,689**		**353.856.619**		**326.213.451**		**416.818.263**		**1,496,660,022**				
	Rata-rata capaian kinerja (%)														**89,47**	**92,63**		
	Predikat kinerja														**Tinggi**	**Sangat tinggi**		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA-SKPD berikutnya	:

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka pelaksanaan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diwajibkan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Setiap penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa, Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD yang menitik beratkan pada sinkronisasi rencana kerja antar SKPD dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat agara tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam Visi dan Misi Daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan.

Kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan *bottom up* dengan perencanaan *top down* sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya didalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi seperti ini Pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil-hasil pembangunan partisipatif yang telah diatur dalam Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP).

Tahapan Musrenbang dapat diskriptifkan fungsi dan perencanaan serta kerangka waktu masing-masing tahapan musrenbang :

Musyawarah Dusun tingkat Dusun adalah tahapan penggalian usulan program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahap ini dibuka ruang seluas- luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam rangka berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan;

1. Musrenbang tingkat Desa adalah tahapan penentuan prioritas usulan program/kegiatan dari masing-masing Dusun serta pengklasifikasian usulan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

2. Musrenbang tingkat Kecamatan adalah tahapan pemantapan usulan program/kegiatan yang akan disampaikan pada forum SKPD. Pada tahap ini peranan SKPD sangat besar dalam membantu masyarakat memformulasikan usulan program/kegiatan mereka;
3. Forum SKPD adalah tahapan sinkronisasi usulan program/kegiatan SKPD dengan usulan masyarakat hasil usulan Musrenbang Kecamatan. Pada tahap ini usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD sesuai misi dalam RPJMD;
4. Musrenbang tingkat Kabupaten adalah puncak dari pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten ini adalah tahapan finalisasi usulan program/kegiatan dari masyarakat yang akan diimplementasikan oleh masing-masing SKPD terkait.

Secara garis besar usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang ditampung Kecamatan Palas pada tahun 2024 di bagi beberapa bidang, antara lain :

1. Bidang Penguatan SDM di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Penumbuhan Wira Usaha Baru ada 29 program/kegiatan yang diusulkan;
2. Bidang Penguatan Usaha Mikro berbasis Potensi Unggulan ada 4 program/kegiatan yang diusulkan;
3. Peningkatan Infrastruktur ada 28 program/kegiatan yang diusulkan.

Table T-C. 32

Table 2.5.1. Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indicator Kerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Infrastruktur				
1	Jembatan	Dusun 2 RT 3 RW 2 Desa Palas Aji	Meningkatnya Kontruksi Jalan Jembatan	25 x 4 M	Jalan tidak standar dan menyulitkan lalu lintas kendaraan.
2	Jalan Pertanian	Dusun 1, 2 Desa Palas aji	Meningkatnya Kontruksi Jalan	1.000 M	Jalan tidak standar hanya 1.000 M sempit dan menyulitkan lalu lintas kendaraan.
3	Jalan Lingkungan	Dusun 1,2,3,4, Desa Palas Aji	Meningkatnya Kontruksi Jalan	800 M	Jalan masih ada yang berlubang dan menyulitkan lalu lintas kendaraan.
4	PENINGKATAN ONDERLAHG KE HOTMIX	Dusun Solo RT 003/RW 003Desa Tanjung Sari	Meningkatnya Kontruksi Jalan	3 M x 1.000 M	Jalan tidak standar hanya 1.000 M sempit dan menyulitkan lalu lintas kendaraan.
5	PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA	Desa Tanjung sari	Meningkatnya Kontruksi Jalan	5 Titik	Jembatan Desa Sudah Banyak Lubang dan membahayakan pengunan Jalan
6	Peningkatan Kontruksi Jalan lapen – hotmix	Dusun 01 RT/RW 001/001 Desa Pematang Baru.	Meningkatnya Kontruksi Jalan dari lapen ke hotmit	2000 M x 4 M	Jalan rusak parah.
7	Peningkatan Kontruksin Jalan Onderlagh-Hotmix	Dusun 05 RT/RW 010/005 Desa Pematang Baru	Meningkatnya Kontruksi Jalan dusun 5 Lebung Galih – Margajasa dari onderlagh ke hotmit	1000 M x 3 M	Jalan rusak parah.
8	Peningkatan Kontruksi Jalan Tanah – Onderlagh	Dusun 04 RT/RW 008/004 Desa Pematang Baru	Meningkatnya Kontruksi Jalan dari tanah ke onderlagh	2000 M x 3 M	Jalan masih tanah dan menyulitkan lalu lintas kendaraan masyarakat.
9	Peningkatan Sarana & Prasarana Jalan Usaha Tani Dusun Jl, Mat Sa'im II (Dua)	Dusun Sumbermakmur RT/RW 003/002 & Dusun Sumberrezeki Rt/Rw, 009&010/005 Desa Bumiasih	Meningkatnya Kontruksi Jalan	3 M x 1.025 M	Jalan tidak standar hanya 1.000 M sempit dan menyulitkan lalu lintas kendaraan. Muat Hasil Bumi
10	Peningkatan Sarana Jembatan Penghubung Antar Desa Jalan Usaha Tani Dusun Wargomulyo Tembus Desa Tanjung Jaya	Dusun Wargomulyo RT/RW, 006/003 Desa Bumiasih	Meningkatnya Pra Sarana Operasional Angkutan Hasil Bumi	3 M x 5 M	Jembatan Tidak layak, hanya menggunakan Kayu seadanya sehingga menyulitkan lalu lintas kendaraan. Angkutan Hasil bumi
11	Perbaikan Saluran Irigasi (Serasi)	Dusun Wargomulyo RT/RW, 006/003 Desa Bumiasih	Memudahkan Pengaturan Debet Air	2 M x 8 Km	Minimnya Perawatan Saluran Pembuangan Curah Air Hujan sehingga Sering terjadi Banjir, sehingga Banyak tanaman padi yang terendam banjir menjadi tanaman padi warga gagal panen
12	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Dusun 1,2,3 dan 4 Desa Pulau Jaya	Meningkatnya Kontruksi Jalan	3 M x 11650 M	Jalan Berlubang menyulitkan lalu lintas kendaraan.

13	Pembangunan Drainase	Dusun 1.RT 1/RW 01Desa Pulau Jaya	Meningkatnya Kelancaran Genangan Air	500 M	Selokan Tidak Lancar Menagkibatkan Penyumbatan air yang dapat menyebabkan kebanjiaran rumah warga.
14	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dusun 1 dan 2.Desa Pulau Jaya	Meningkatnya Kontruksi Jalan	3 x 1050 M	Jalan rusak dan terjadi penurunan tanah sehingga di musim penghujan jalan dilintasi air dan terendam sehingga kerusakan semakin berambah .
15	Peningkatan Jalan Usaha Tani Penghubung antara Desa Bumiasr - Desa Trimomukti. (Rabat Beton)	Dusun Tepus Mulya RT.00/ RW.002 Desa Bumiasri.	Meningkatnya Kontruksi Jalan	3 M x 1.000 M	Jalan tidak standar hanya 1.000 M Jalan masih tanah, sering terkena Banjir dan menyulitkan lalu lintas kendaraan.
16	Peningkatan Jalan Kabupaten. (Rabat Beton + Talud/ Drainase)	Dusun Tepus Mulya RT.002/ RW.002 Desa Bumiasri.	Meningkatnya Kontruksi Jalan	3 M x 300 M	Saluran Air tidak lancar hingga Jalan sering tergenang Air dan menimbulkan Banjir.Serta menyulitkan lalu lintas kendaraan.
17	Peningkatan Pengerasan Jalan Desa dari Onderlagh sampai Hotmix	Dusun Banjar Sari s.d. Dusun Mekar Jaya Desa Bumirestu	Meningkatnya Kontruksi Jalan	3 M x 2.200 M	Jalan tidak standar karena masih Onderlagh dan menyulitkan lalu lintas kendaraan.
18	Peningkatan Pengerasan Jalan Desa dari Onderlagh sampai Hotmix	Dusun Waybuha RT 021-023 RW 006 Desa Bumirestu	Meningkatnya Kontruksi Jalan	3 M x 1.200 M	Jalan tidak standar karena masih Onderlagh dan menyulitkan lalu lintas kendaraan.
19	PENINGKATAN PEMBANGUNAN JALAN SAMPAI DENGAN HOTMIX	Jalan Tamansari (RW 005 – RW 004 Desa Sukamulya	Meningkatnya Kontruksi Jalan	3 M x 1.000 M	Jalan rusak berat hingga terganggunya aktifitas masyarakat
20	PEMBANGUNAN DRAENASE	Jalan Raya Kuningan Dusun 005, 008 Sd Dusun 002 Desa Sukamulya	Mengatasi Banjir dan genangan air	L 0,5, T 0,5 M x 2.000 M	Saluran air tidak berfungsi dan tidak memenuhi syarat
21	PEMBANGUNAN RABAT BETON (jalan Butok)	Dusun Sukaraja II RT.003/RW.002Desa Sukaraja	Meningkatnya Kontruksi Jalan	3 M x 870 M	Kondisi masih jalan tanah menyulitkan lalu lintas kendaraan. Dan hasil pertanian
22	PEMBANGUNAN RABAT BETON (jalan Ketair)	Dusun Purwodadi RT.003/RW.007Desa Sukaraja	Meningkatnya Kontruksi Jalan	3 M x 600 M	Kondisi jalan Onderlagh yang sudah rusak menyulitkan lalu lintas hasil pertanian
23	PEMBANGUNAN RABAT BETON (JALAN PELABUH)	Dusun Pelabuh RT.002/RW.004 Desa Sukaraja	Meningkatnya Kontruksi Jalan	3 M x 1.225 M	Jalan masih onderlagh sempit dan menyulitkan lalu lintas kendaraan.
24	PERBAIKAN SIRING IRIGASI SAWAH KENAHAT	Dusun Sukamaju dan Purwodadi RW.006 dan RW.007 Desa Sukaraja	Berfungsinya Saluran Irigasi Persawahan, dan Meningkatnya hasil Pertanian	2000M	Kondisi saat ini sudah rusak parah sehingga saluran tidak berpungsi
25	PERBAIKAN JALAN RAYA SUKARAJA - TANJUNGSARI	Dusun Srimulyo dan Dusun Pelabuh Desa Sukaraja arah ke Desa Tanjung Sari	Melancarkan lalu lintas kendaraan (jalan penghubung Antar Desa	2000M	Konisi jalan Hotmix Berlubang (Rusak Parah)
26	Jalan Banjar Sari II	Dusun Banjar Sari I RT/RW. 001/007 Desa Bangunan	Meningkatnya Kontruksi Jalan	3 M x 700 M	Jalan Kabupaten Sudah Rusak Parah dan Belum ada Pembangunan sejak Tahun 2010.
27	Jalan Magelang	Dusun Tanjung Rejo 2 RT/RW. 001/002 Desa Bangunan	Meningkatnya Kontruksi Jalan dari Oundelagh ke Hotmix	3 M x 1.100 M	Jalan Masih Onderlagh
28	Jalan Cendana	Dusun Cita Jaya RT/RW.001/005 Desa Bangunan	Meningkatnya Kontruksi Jalan	1.000 M x 3 M	Jalan Masih Onderlagh
29	HOTMIK Jalan Penghubung antar desa	Dusun 3 Bali darma RT/RW002/003 Desa Bali agung	Meningkatnya Kontruksi Jalan	3 M x 1.500 M	Jalan masih onderlagh sempit dan menyulitkan lalu lintas kendaraan.
30	HOTMIK Jalan Penghubung antar desa	Dusun 1 Tanjung tirto RT/RW001/001Desa bali agung	Meningkatnya Kontruksi Jalan	3 M x 1800 M	Jalan masih onderlagh sempit dan menyulitkan lalu lintas kendaraan.

31	TPT jalan penghubung	Dusun 1 Tanjung tirto RT/RW.01/01Desa Bali Agung	Meningkatnya Kontruksi Jalan	225 M x 4 M	Jalan rawan Amblor tergerus air
32	Rabat Beton dari Dusun Malang (Madiun) sampai dengan tembusan Way panji	Dusun Malang RT 028 RW 005 Desa Bumidaya	Meningkatnya Kontruksi Jalan	3 M x 1.050 M	Jalan tidak Standar hanya 1.050 M sempit dan menyulitkan lalu lintas kendaraan
33	Rabat Beton dari Dusun Semarang (Bumidaya) sampai tembusan Desa Bumi Asih	Dusun Semarang RT 002 RW 001 Desa Bumidaya	Meningkatnya Kontruksi Jalan	3 M x 650 M	Jalan masih tanah dan sempit sehingga menyulitkan lalu lintas kendaraan
34	Rabat Beton dari Dusun Purworejo (Bumidaya) sampai tembusan Desa Kalirejo	Dusun Purworejo RT 030 RW 007 Desa Bumidaya	Meningkatnya Kontruksi Jalan pertanian	3,5 M x 650 M	Jalan nya masih Tanah sehingga menyulitkan pengangkutan hasil tani
35	Drainase jalan poros	Dusun Bandan Purwa sampai dengan dusun harapan mulya desa bandan hurip	Meningkatnya konstruksi Saluran Air (SPAL Lancar)	0,6 M x 1 M x 3.000 M	Terhambatnya air hujan karena Drainase yang kecil
36	Jembatan Tersier 6	Dusun Harapan Mulya RT 008 RW 002 Desa Bandan Hurip	Meningkatnya Transportasi jalan	1 unit	Terhambatnya akses jalan karena Drainase yang kecil
37	Rekonstruksi Jalan (Cor Rabat Beton Jln.Poros Palas Jaya-Pulau Tengah)	Dusun 004, dan Dusun 005 Desa Palas Jaya	Meningkatkan Kontruksi Jalan	400 x 4 M	Belum Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Cor Rabat Beton Jln.Poros Palas Jaya-Pulau Tengah
38	Rekonstruksi Jalan (Cor Rabat Beton Jln.Dusun Wonosari Palas Jaya)	Dusun 003 Desa Palas Jaya	Meningkatkan Kontruksi Jalan	200 x 3 M	Jalan sudah Rusak dan Menyulitkan lalu lintas kendaraan
39	Rabat beton jalan utama desa (Jln Sapuan)	Dusun 02 RT 03 / RW 02 Desa Pulau tengah	Meningkatnya Kontruksi Jalan	4 M x 1.500 Mx 0.40 M	Jalan Rusak berat ,be5rlubang menyulitkan lalu lintas kendaraan.
40	Talud Jalan Utama Desa	Dusun 01 dan 02 RT 01Sampai RT 03/RW1 Dan RW 2Desa Pulau Tengah.	Meningkatnya Kontruksi Jalan	2 M x 1.00 MX 0,6 M	Jalan rawan longsor dan menutup Saluran irigasi.
41	Drainase Kali Talang Selawe	Dusun Talang Panjang RT 002 RW 001 Desa Kalirejo	Meningkatnya Saluran Air	12 M x 2.500 M	Sangat membutuhkan Drainase untuk memperlancar saluran air di Area persawahan
42	Peningkatan Jalan s/d Hotmik	Dusun Karang Jaya RT 001 RW 003 Desa Kalirejo	Meningkatnya Konstruksi jalan	3 M x 1.700 M	Jalan tidak standar hanya 1.700 M sempit dan menyulitkan lalu lintas kendaraan
43	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan	Dusun Tanjung Jaya RT/RW 09/03 Tembus Dusun Tanjung Rasa RT/RW 19/05 Desa Tanjung Jaya	Meningkatnya Kontruksi Jalan (Hotmix)	3 M x 4.000 M	Terhambatnya Transportasi kendaraan Karena Jalan Rusak Berat.
44	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan	Dusun Trans 74 RT/RW 007/008 Tembus Dusun Temu Rejo RT/RW 15 RW 09 Desa Tanjung Jaya	Meningkatnya Kontruksi Jalan (Hotmix)	3 M x 3.000 M	Terhambatnya Transportasi kendaraan Karena Jalan Rusak Berat.
	Ekonomi				
1	Los UMKM/Pasar UMKM	Dusun 3 RT 6 RW 3 Desa Palas Aji	Tersedianya Los Pasar UMKM	1 Unit	Ada UMKM yang belum dapat Pembinaan
2	Embung Desa	Dusun 4 RT 8 RW 4 Desa Palas Aji	Terlaksananya Pembinaan UKM, pertanian	1 Unit	Fasilitas air pertanian belum mencukupi
3	PENGGANDAAN BANTUAN TERNAK KAMBING	Desa Tanjung Sari	Tersedianya bantuan ternak kambing	9 Kelompok	Bantuan kelompok ternak desa

4	BANTUAN MESIN MOLEN	Desa Tanjung Sari	Meningkatkan Pengelolaan Pertanian	1 Unit	Ada kelompok yang membutuhkan Penggadaan Mesin Molen
5	Pengadaan BPJS PBI	Desa Pematang Baru	Peningkatan Kuota BPJS PBI	10 Kelompok	Ada kelompok yang belum dapat bantuan
6	Pembinaan Kelompok UMKM dan Kelompok Tani	Desa Pematang Baru	Terlaksananya Pembinaan UKM dan kelompok pertanian	10 Unit	Ada UMKM yg belum mendapat pembinaan
7	Pelatihan Keterampilan dan Innovasi UMKM	Desa Bumiasih Kecamatan Palas	Terlaksananya Pembinaan UKM, pertanian	3 Kelompok	UMKM Desa belum mendapat pembinaan
8	Pengembangan Pasar Desa	Desa Bumiasih Kecamatan Palas	Peningkatan Marketing Hasil UMKM Desa	1 Unit	Pemberdayaan UMKM
9	Pembinaan Teknologi Tepat Guna	Desa Pulau Jaya	Terlaksananya Pembinaan kelompok Pertanian dan Peternakan	1 Kelompok	Ada kelompok yang belum dapat bantuan
10	Pembinaan UMKM	Desa Pulau Jaya	Terlaksananya Pembinaan UKM,	1 Unit	Ada UMKM yg belum mendapat pembinaan
11	Program Peningkatan Ekonomi Pertanian melalui Penyuluhan dan Bantuan Perranian.	Desa Bumiasri	Tedapat Kelompok Tani	7 Kelompok	Ada kelompok yang belum dapat bantuan
12	Program Pembinaan dan Ketahanan Pangan melalui Program Peternakan, Bantuan Ternak Sapi dan Kambing.	Desa Bumiasri	Terlaksananya Pembinaan UKM, Peternakan.	1 kegiatan	Ada Kelompok UMKM yg belum mendapat pembinaan dan ingin mendapatkan Bantuan Ternak.
13	Bantuan bibit tanaman/bibit ikan/hewan ternak/ pakan dan alat-alat peternakan	Desa Bumirestu	Tersedianya bibit tanaman, hewan dan ikan	3 Kelompok	Ada kelompok yang belum dapat bantuan
14	Penyertaan Modal bagi pelaku kelompok UMKM/Koperasi	Desa Bumirestu	Terlaksananya Pembinaan UKM, Pertanian	1 Unit	Ada UMKM yg belum mendapat pembinaan
15	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA WISATA DESA	Desa Sukamulya	Untuk Meningkatkan Keindahan sarana wisata desa	1 unit	Masih banyak kekurangan dalam hal asesoris dan sarana lainnya
16	BANTUAN TERNAK SAPI	Desa Sukamulya	Untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat	50 ekor	Untuk Kelompok Ternak
17	Pengembangan Kelompok UMKM (Produksi Gula Merah)	Desa Sukaraja	Peningkatan Produksi	1 Kelompok	Ada kelompok yang belum dapat bantuan
18	Pembinaan Kelompok UKM Perikanan	Desa Sukaraja	Terlaksananya Pembinaan UKM, perikanan	1 Unit	Ada Kelompok UKM yg belum mendapat pembinaan
19	Bantuan Alat Pertanian (Hand Tracktor, Combaind, Bibit, Pupuk)	Desa Bangunan	Terlaksananya Ketahanan Pangan	19 Kelompok	Ada kelompok yang belum dapat bantuan
20	Bantuan Kelompok Perikanan (Bibit, Pakan, Alat Pembuat Pakan Dll)	Desa Bangunan	Terlaksananya Pembinaan UKM, Perikanan	1 Unit	Meningkatkan Perekonomian Kelompok Perikanan.
21	Desa Siaga Kesehatan	Desa Bali Agung	Tersedianya Kuota BPJS PBI	107 warga	Warga Desa yang belum dapat bantuan kesehatan gratis

22	Penguatan Ketahanan Pangan	Desa Bali Agung	Terlaksananya Pembinaan UMKM dan bantuan pertanian,perkebunan	30 kelompok	Ada UMKM yg belum mendapat pembinaan dan 30 klp membutuhkan bantuan bibit padi dan jagung serta ikan
23	Bantuan Sapi	Desa Bumi Daya	Tersedianya Sapi untk kelompok Sapi	1 kelompok	Ada kelompok yang belum dapat bantuan
24	Pembangunan/Rehab Pasar Desa	Desa Bumi Daya	Meningkatkan Fasilitas Pasar Desa	Masyarakat	Terdapat bangunan pasar desa yang rusak
25	Agribisnis untuk di K3 desa Bumidaya	Desa Bumi Daya	Terbantunya Fasilitas di K3	1 paket	Masih kurangnya tanaman perikanan yang dibutuhkan di K3
26	Budidaya Udang Vaname	Desa Bandan hurip	Meningkatkan fasilitas dalam bidang usaha Budidaya Udang Vaname	1 kelompok	Ada kelompok yang belum dapat bantuan
27	Bantuan Jaringan Listrik (Sibelisasi) jalan usaha tani	Desa bandan hurip	Pemasnagan jaringan listrik ke areal pertanian dengan cara program sibelisasi	2000 m	Belum ada jaringan listrik ke areal pertanian
28	Normalisasi Saluran Primer dan Sekunder	Wilayah Pertanian Desa Palas Jaya	Melancarkan Saluran Debit Air,dan Meningkatkan Hasil Pertanian	2000 x 4 M	Belum Maksimalnya Saluran Primer dan Sekunder di wilayah Perairan areal Irigasi Desa Palas Jaya
29	Pengadaan Motor Roda Tiga	Pemerintah Desa Palas Jaya	Tersedianya Kendaraan Pengangkut Sampah	2 Unit	Belum adanya kendaraan Roda Tiga Pengangkut Sampah
30	Bantuan ternak kambing ,itik	Desa Pulau Tengah	Meningkatnya pendapatan warga desa	5 Kelompok	Ada kelompok yang belum dapat bantuan
31	Bantuan alat pertanian (Traktor,Mesin Tanam)	Desa Pulau Tengah	Meningkatnya usaha pertanian	10 Unit	Sedikitnya peralatan pertanian terutama mesin tanam.
32	Kursi Roda	Desa Kalirejo	Tersedianya Kuota BPJS PBI	2 Kursi Roda dan Tongkat 2 unit	Sangat membutuhkan Kursi Roda dan Tongkat
33	Alat Pembuatan Keripik	Desa Kalirejo	Terlaksananya Pembinaan UKM, Pertanian	2 unit	Ada UMKM yang belum mendapat pembinaan
34	Jaminan Kesehatan Masyarakat	Desa Tanjung Jaya	Tersedianya Kuota BPJS PBI	1 Kelompok	Ada kelompok yang belum dapat bantuan
35	Bantuan Alat Panen Padi	Desa Tanjung Jaya	Bantuan Alat pertanian (Combine)	1 Unit	Kurangnya Alat untuk memanen hasil pertanian
	Social Pemerintah				
1	Taman Bermain TK	RT 5 RW 3 Desa Palas Aji	Terpenuhinya ATK TK	7 Unit	Operasional TK belum mencukupi
2	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Dusun 1,2,3,4, Desa Palas Aji	Terbangunnya RTLH Untuk Warga Miskin	19 Unit	RTLH Masih Banyak
3	PENGGADAAN BANTUAN APE PAUD	Desa Tanjung Sari	Terpenuhinya APE PAUD	1 paket	APE PAUD belum mencukupi
4	PEMBANGUNAN BEDAH RUMAH	Desa Tanjung Sari	Terbangunya RTLH untuk warga miskin	10 Unit	Rumah Tidak lyak Huni masih banyak

5	Bantuan Operasional Sekolah PAUD	Desa Pematang Baru	Terpenuhinya ATK PAUD	1 paket	Operasional PAUD belum mencukupi
6	Bantuan RTLH	Desa Pematang Baru	Terbangunya RTLH untuk warga miskin	30 Unit	Rumah Tidak layak Huni masih banyak
7	Pembinaan Karang Taruna Desa	Desa Bumiasih Kecamatan Palas	Meningkatkan Partisipasi ketrampilan pemuda desa	1 paket	Kegiatan Karang Taruna Desa Masih perlu banyak bimbingan terkait kepemudaan
8	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Bumiasih Kecamatan Palas	Terbangunya RTLH untuk warga miskin	15 Unit	Rumah Tidak lyak Huni masih banyak
9	Tempat Bermain dan Alat peraga Paud	Desa Pulau Jaya	Terpenuhinya ATK PAUD	1 paket	Operasional PAUD belum mencukupi
10	Rumah Tidak layak Huni	Desa Pulau Jaya	Terbangunya RTLH untuk warga miskin	8 Unit	Rumah Tidak lyak Huni masih banyak
11	Program Bantuan Meubeler Gedung PAUD	Desa Bumiasri	Terpenuhinya Meubeler PAUD	1 paket	Operasional PAUD belum mencukupi
12	Program RRLH	Desa Bumiasri	Terbangunya RTLH untuk warga miskin	60 Unit	Rumah Tidak lyak Huni masih banyak
13	Pengadaan Vitamin untuk Balita Ibu Hamil dan Pengadaan Alat Kesehatan	Desa Bumirestu	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat/Pencegahan Stunting	50 orang	Obat-obatan dan Alat Kesehatan di Desa belum mencukupi
14	Bedah Rumah	Desa Bumirestu	Terbangunya RTLH untuk warga miskin	30 Unit	Rumah Tidak lyak Huni masih banyak
15	BANTUAN BEDAH RUMAH	Desa Sukamulya	Terbangunya RTLH untuk warga miskin	85 Unit	Rumah Tidak lyak Huni masih banyak
16	PELATIHAN KETERAMPILAN UNTUK ANAK PUTUS SEKOLAH	Desa Sukamulya	Menigkatkan SDM	24 orang	Terdapat anak putus sekolah
17	Oprasional Sekolah PAUD	Desa Sukaraja (Insan Kamil)	Terpenuhinya ATK PAUD	1 paket	Operasional PAUD belum mencukupi
18	Pembangunan Bedah Rumah RTLH	Desa Sukaraja	Terbangunya RTLH untuk warga miskin	36 Unit	Rumah Tidak layak Huni masih banyak
19	Pembuatan BPJS Kesehatan (1.000 Kartu)	Desa Bangunan	Tersedianya Kuota BPJS PBI	1.000	Masih Banyak Warga yang belum mendapatkan PBI
20	Pembangunan RTLH	Desa Bangunan	Terbangunya RTLH untuk warga miskin	60 Unit	Rumah Tidak lyak Huni masih banyak
21	Dukungan Terciptanya Generasi Emas	Desa Bali Agung	- Terpenuhinya ATK PAUD - Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Kurang mampu	2 paket 22 siswa	-Operasional PAUD belum mencukupi - Bea sisiwa bagi siswa kurang mampu dan putus sekolah
22	Dukungan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Bali Agung	Terbangunya RTLH untuk warga miskin	40 Unit	Rumah Tidak lyak Huni masih banyak
23	Bantuan Kursi Roda	Desa Bumidaya	Terbantunya unk warga yang membutuhkan Kursi Roda	10 unit	Belum adanya bantuan kursi roda untuk warga yang membutuhkan
24	Bantuan Dukungan Pendidikan bagi yatim piatu	Desa Bumidaya	Terpenuhinya atribut Sekolah unk yatim piatu	10 Paket	Adnya yatim piatu yang membutuhkan
25	Bantuan Kursi Roda	Desa Bandan Hurip	Terpenuhinya kebutuhan bagi warga	10 unit	Terdapat beberapa Lansia yang sulit dalam berjalan

			Disabilitas		
26	Alat Pengadaan APE PAUD	Desa Bandan Hurip	Menibgkatkan daya pikir anak-anak PAUD dan mengurangi Penggunaan Gadget	1 Paket	Masih kurangnya alat permainan di Sekolah PAUD
27	Pembangunan Rumah Layak Huni	Desa Palas Jaya	Terbangunya RTLH untuk Warga Miskin	7 unit	Masih adanya Rumah Tidak Layak Huni yang belum terbangun
28	Pengadaan Mobil Siaga Kesehatan	Desa Palas Jaya	Memperlancar Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	Belum adanya Mobil Siaga Kesehatan Masyarakat
29	Pengadaan sarana /prasarana pendidikan PAUD (Alat bermain anak)	Desa Pulau Tengah	Terpenuhinya alat permainan anak PAUD	1 paket	Alat bermain PAUD belum mencukupi
30	Pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH)	Desa Pulau Tengah	Terbangunya RTLH untuk warga miskin	10Unit	Rumah Tidak lyak Huni masih banyak
31	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)	Desa Kalirejo	Terpenuhinya ATK PAUD	1 paket	Operasional PAUD belum mencukupi
32	Program Bedah Rumah	Desa Kalirejo	Terbangunnya RTLH untuk warga miskin	32 unit	RTLH masih banyak
33	Pengadaan Alat Permainan Edukasi luar (APE) PAUD	Desa Tanjung Jaya	Terpenuhinya APE PAUD	1 paket	Masih Kurangnya APE Luar PAUD
34	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Desa Tanjung Jaya	Terbangunya RTLH untuk warga miskin	20 Unit	Rumah Tidak lyak Huni masih banyak

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja PD tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Palas Tahun 2025 hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional tahun 2025 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” dengan 7 (tujuh) arah arah kebijakan, yaitu :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas;
6. Ekonomi Hijau;
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Prioritas Pembangunan Nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2020-2024 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita. Terkait dengan kebijakan Nasional Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan selaku Lembaga Teknis Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam Prioritas Nasional Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana, pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal;
2. Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah (Kabupaten/Kota di 33 Provinsi) untuk mendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mendukung penerapan SPM;
3. Percepatan dan pencapaian target Millennium Development Goal"s (MDG"s);
4. Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang- undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan;
5. Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Misi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, yaitu:

Tujuan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan adalah: meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Adapun yang menjadi sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan;
2. Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Serta Pemberdayaan Masayarakat Desa/Kelurahan;

3.3. Program dan Kegiatan Prioritas

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa kegiatan yang terkandung didalamnya guna mencapai tujuan tertentu.

Program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Palas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi utama Pemerintah Daerah khususnya Kecamatan Palas adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama Kecamatan Palas agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat Kecamatan Palas.

Pendekatan Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong Pemerintah Daerah khususnya Kecamatan Palas melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas yang merupakan bahan pertimbangan di dalam menyusun/merumuskan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Palas pada tahun 2025 yang merupakan salah satu bentuk dukungan nyata terhadap Visi Bupati *yaitu "Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan yang Berintegritas, Maju dan Sejahtera dengan Semangat Gotong Royong"* dan Misi Bupati ke-5 *"Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional, Transparan, Efektif dan Akuntabel".*

Adapun total kebutuhan dana untuk pelaksanaan Program dan kegiatan Strategis ini adalah sebesar Rp. 644.657.900,00,- nilai total untuk tiap sumber pendanaan seperti yang ditunjukan pada Tabel 3.3.1 dibawah.

Table T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Lampung Selatan

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Palas
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Palas

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Kecamatan Palas								**342.429..400,00**					**709.123.690,00**
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								**342.429..400,00**					**709.123.690,00**
7	**01**				**KECAMATAN**								**342.429.40000**					**709.123.690,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**185.335.200,00**					**327.668.385,00**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**32.490.850,00**					**13.633.400,00**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Persen	3 Dokumen	11 Dokumen	11.025.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.270.100,00
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-Kab. Lampung Selatan, Palas	80 Persen	1 Dokumen	11 Dokumen	5.840.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.508.150,00
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-Kab. Lampung Selatan, Palas	80 Persen	1 Dokumen	11 Dokumen	5.840.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen	1.518.900,00

																RKA-SKPD		
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-Kab. Lampung Selatan, Palas	80 Persen	1 Dokumen	11 Dokumen	3.552.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.518.900,00
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
						Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-Kab. Lampung Selatan, Palas	80 Persen	1 Dokumen	11 Dokumen	3.552.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.518.900,00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Indeks Kepuasan Pelayanan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-Kab. Lampung Selatan, Palas	80 Persen	5 Laporan	11 Dokumen	2.677.650,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1.553.650,00
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1.330.535.250,00**					**3.717.010,00**
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penyelenggaraan administrasi	-Kab. Lampung Selatan, Palas	100 %	1 Laporan	100 %	745.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	745.200,00

							dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	keuangan perangkat daerah tepat waktu						Umum		Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	-Kab. Lampung Selatan, Palas	100 %	18 Laporan	100 %	953.050,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	953.050,00
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**40.026.100,00**					**169.242.375,00**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-Kab. Lampung Selatan, Palas	100 %	4 Paket	100 %	1.804.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.345.000,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-Kab. Lampung Selatan, Palas	100 %	6 Paket	100 %	3.505.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	6 Paket	2.952.500,00

7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-Kab. Lampung Selatan, Palas	100 %	4 Paket	100 %	3.031.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2.605.200,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Administrasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-Kab. Lampung Selatan, Palas	100 %	4 Paket	100 %	7.739.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	8.048.500,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-Kab. Lampung Selatan, Palas	100 %	4 Paket	100 %	3.551.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.698.800,00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-Kab. Lampung Selatan, Palas	100 %	2 Dokumen	100 %	4.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.800.000,00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-Kab. Lampung Selatan, Palas	100 %	12 Laporan	100 %	18.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	24.000.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-Kab. Lampung Selatan, Palas	100 %	60 Laporan	100 %	1.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	1.100.000,00
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**3.150.000,00**					1.720.000,00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel													

						Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Unit	-Kab. Lampung Selatan, Palas	52 Unit	2 Unit	52 Unit	3.150.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	52 Unit	1.720.000,00
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**58.000.000,00**					48.000.000,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jasa Penunjang Urusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-Kab. Lampung Selatan, Palas	100 %	12 Laporan	12 Bulan	58.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48.000.000,00
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**49.970.000,00**					**73.469.000,00**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-Kab. Lampung Selatan, Palas	100 %	2 Unit	13 Unit	37.970.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	37.970.000,00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-Kab. Lampung Selatan, Palas	100 %	8 Unit	13 Unit	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	1.500.000,00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-Kab. Lampung Selatan, Palas	100 %	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00

7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**112.097.90000**					**215.877.200,00**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**100.070.100,00**					**140.717.390,00**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
						Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang dilakukan Pemberdayaan di wilayah Kecamatan	-Kab. Lampung Selatan, Palas	100 %	6 Lembaga Kemasyarakatan	10 Desa	82.336.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	82.125.450,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pemberdayaan di wilayah Kecamatan	-Kab. Lampung Selatan, Palas	100 %	1 Laporan	10 Desa	17.733.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	47.458.000,00
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**12.027.800,00**					**75.159.810,00**
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													
						Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang diberdayakan	- Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	2 Lembaga	12.027.800,,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	12.027.800,00
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**29.550.300,00**					**89.363.065,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**29.550.300,00**					**89.363.065,00**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
						Terlaksanya Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Dengan Pihak Terkait Dalam Upaya Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-Kab. Lampung Selatan, Palas	100 %	1 Laporan	1 Kegiatan	4.273.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4.273.700,00

7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
						Terlaksanya Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi Dengan Pihak Terkait Dalam Upaya Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	100 %	5 Laporan	1 Kegiatan	25.276.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Laporan	25.276.600,00 0
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**18.596.000,00**					18.596.000,00
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**18.596.000,00**					18.596.000,00
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa													
						Terlaksananya Monitoring, Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-Kab. Lampung Selatan, Palas	100 %	1 Dokumen	1 Kali	1.990.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	3.912.800,00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
						Terlaksananya Monitoring, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	- Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Kali	1.952.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	3.974.400,00

7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa												
						Terlaksananya Monitoring, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	- Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Kali	1.974.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	5.350.500,00
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan												
						Terlaksananya Monitoring, Fasilitasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Kali	1.900.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	9.574.500,00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa												
						Terlaksananya Monitoring, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	- Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Kali	1.926.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	5.350.500,00
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa												
						Terlaksananya Monitoring, Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	- Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Kali	2.888.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Laporan	9.574.500,00

7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa												
						Terlaksananya Monitoring, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa n Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	- Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Kali	2.981.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa n Aset Desa	1 Dokumen	5.350.500,00
7	01	06	2.01	05	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa												
						Terlaksananya Monitoring, Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Hasil Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen Monitoring, Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	- Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Kali	2.981.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	9.574.500,00
												TOTAL	**342.429.400,00**				**709.123.690,00**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah (terutama Visi ke-5) dan kebutuhan di masa yang akan datang dalam upaya optimalisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah.

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Palas Tahun 2025 sebagai solusi dan menjawab isu-isu penting yang ada di wilayah Kecamatan Palas diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp. 1.677.921.400,00,- yang akan digunakan untuk mendanai 5 Program dan 12 Kegiatan, sebagai berikut :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**, dengan kegiatan :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK,** dengan kegiatan :
   a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
3. **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**, dengan kegiatan :
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
   b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
4. **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**
   a. **UMUM**, dengan kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**, dengan kegiatan :
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Selain itu penambahan anggaran juga terjadi pada Sub Kegiatan lainnya baik yang menunjang Operasional Kantor maupun Penyelenggaran Pemerintah Daerah, hal ini dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.

Sinkronisasi Prioritas Perangkat Daerah dengan Prioritas Daerah Tahun 2025 Kabupaten Lampung Selatan

No	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
07.01.01.		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA**			**Dana Alokasi Umum**	**1.517.677.200**	
07.01.01.01.			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Dana Alokasi Umum**	**32.490.850**	
07.01.01.2.01.0001				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum	11.025.600	
07.01.01.2.01.0002				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum	5.840.900	
07.01.01.2.01.0003				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum	5.840.900	
07.01.01.2.01.0004				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Alokasi Umum	3.552.900	
07.01.01.2.01.0005				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Alokasi Umum	3.552.900	
07.01.01.2.01.0006				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum	2.677.650	
07.01.01.2.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Dana Alokasi Umum**	**1.330.535.250**	
07.01.01.2.02.0001				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum	1.066.435600	
07.01.01.2.02.0002				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugs ASN	Dana Alokasi Umum	262.401.400	
07.01.01.2.02.0005				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum	745.200	
07.01.01.2.02.0007				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Alokasi Umum	953.050	

07.01.01.2.06.			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Dana Alokasi Umum**	**40.026.100**	
07.01.01.2.06.0001				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum	1.804.200	
07.01.01.2.06.0002				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum	3.505.000	
07.01.01.2.06.0003				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Alokasi Umum	3.031.400	
07.01.01.2.06.0004				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum	7.739.300	
07.01.01.2.06.0005				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum	3.551.200	
07.01.01.2.06.0006				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Alokasi Umum	4.800.000	
07.01.01.2.06.0008				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum	18.000.000	
07.01.01.2.06.0009				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum	1.100.000	
07.01.01.2.07.			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Dana Alokasi Umum**	**3.150.000**	
07.01.01.2.07.0005				Pengadaan Mebel	Dana Alokasi Umum	3.150.000	
07.01.01.2.08.			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Dana Alokasi Umum**	**58.000.000**	
07.01.01.2.08.0002				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum	58.000.000	
07.01.01.2.09.			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Dana Alokasi Umum**	**49.970.000**	
07.01.01.2.09.0001				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum	37.970.000	
07.01.01.2.09.0006				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum	2.000.000	
07.01.01.2.09.0009				Pemeliharaan/Rehabilitasi	Dana Alokasi	10.000.000	

				Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Umum		
7.01.03		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**Dana Alokasi Umum**	**112.097.900**	
7.01.03.2.01			**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Dana Alokasi Umum**	**100.070.100**	
7.01.03.2.01.0001				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dana Alokasi Umum	82.336.500	
7.01.03.2.01.0002				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dana Alokasi Umum	17.733.600	
7.01.03.2.03.			**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Dana Alokasi Umum**	**12.027.800**	
7.01.03.2.03.0004				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Dana Alokasi Umum	12.027.800	
7.01.04		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**Dana Alokasi Umum**	**29.550.300**	
7.01.04.2.01			**Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**		**Dana Alokasi Umum**	**29.550.300**	
7.01.04.2.01.0001				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dana Alokasi Umum	4.273.700	

7.01.04.2.01.0002				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Dana Alokasi Umum	25.276.600	
7.01.06		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN**			**Dana Alokasi Umum**	**18.596.000**	
7.01.06.2.01			**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Dana Alokasi Umum**	**18.596.000**	
7.01.06.2.01.0001				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dana Alokasi Umum	1.990.200	
7.01.06.2.01.0002				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum	1.952.300	
7.01.06.2.01.0003				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dana Alokasi Umum	1.974.900	
7.01.06.2.01.0004				Fasilitas Penerapan dan Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan	Dana Alokasi Umum	1.900800	
7.01.06.2.01.0005				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dana Alokasi Umum	1.926.800	
7.01.06.2.01.0006				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dana Alokasi Umum	2.888.000	
7.01.06.2.01.0007				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dana Alokasi Umum	2.981.500	
7.01.06.2.01.0008				Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dana Alokasi Umum	2.981.500	
JUMLAH						**1.677.921.400**	

Tabel 4.1

Sinkronisasi Prioritas Perangkat Daerah dengan Indikator Kerja Utama Tahun 2025 Kabupaten

Lampung Selatan

No	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
07.01.01.	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA**			**Dana Alokasi Umum**	**1.517.677.200**	
07.01.01.01.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Dana Alokasi Umum**	**32.490.850**	
07.01.01.2.01.0001	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum	11.025.600	
07.01.01.2.01.0002	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum	5.840.900	
07.01.01.2.01.0003	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum	5.840.900	
07.01.01.2.01.0004	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Alokasi Umum	3.552.900	
07.01.01.2.01.0005	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Alokasi Umum	3.552.900	
07.01.01.2.01.0006	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum	2.677.650	
07.01.01.2.02	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Dana Alokasi Umum**	**1.240.798.150**	
07.01.01.2.02.0001	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum	985.896.000	
07.01.01.2.02.0002	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugs ASN	Dana Alokasi Umum	251.693.050	

07.01.01.2.02.0005	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum	1.702.500	
07.01.01.2.02.0007	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Alokasi Umum	1.506.600	
07.01.01.2.06.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Dana Alokasi Umum**	**40.026.100**	
07.01.01.2.06.0001	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.804.200	1.804.200	
07.01.01.2.06.0002	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.505.000	3.505.000	
07.01.01.2.06.0003	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.031.400	3.031.400	
07.01.01.2.06.0004	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.739.300	7.739.300	
07.01.01.2.06.0005	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.551.200	3.551.200	
07.01.01.2.06.0006	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000	4.800.000	
07.01.01.2.06.0008	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.000.000	18.000.000	
07.01.01.2.06.0009	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.100.000	1100.000	
07.01.01.2.07.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Dana Alokasi Umum**	**3.150.000**	
07.01.01.2.07.0005	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Pengadaan Mebel	Dana Alokasi Umum	3.150.000	
07.01.01.2.08.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Dana Alokasi Umum**	**58.000.000**	
07.01.01.2.08.0002	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum	58.000.000	
07.01.01.2.09.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Dana Alokasi Umum**	**49.970.000**	
07.01.01.2.09.0001	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Dana Alokasi Umum	37.970.000	

				Dinas Jabatan			
07.01.01.2.09.0006	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum	2.000.000	
07.01.01.2.09.0009	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum	10.000.000	
7.01.03	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**Dana Alokasi Umum**	**112.097.900**	
7.01.03.2.01	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Dana Alokasi Umum**	**100.070.100**	
7.01.03.2.01.0001	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dana Alokasi Umum	82.336.500	
7.01.03.2.01.0002	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dana Alokasi Umum	17.733.600	
7.01.03.2.03.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Dana Alokasi Umum**	**12.027.800**	
7.01.03.2.03.0004	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Dana Alokasi Umum	12.027.800	
7.01.04	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**Dana Alokasi Umum**	**29.550.300**	
7.01.04.2.01	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		**Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**		**Dana Alokasi Umum**	**29.550.300**	

7.01.04.2.01.0001	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dana Alokasi Umum	4.273.700	
7.01.04.2.01.0002	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Dana Alokasi Umum	25.276.600	
7.01.06	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN**			**Dana Alokasi Umum**	**18.596.000**	
7.01.06.2.01	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Dana Alokasi Umum**	**18.596.000**	
7.01.06.2.01.0001	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dana Alokasi Umum	1.990.200	
7.01.06.2.01.0002	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum	1.952.300	
7.01.06.2.01.0003	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dana Alokasi Umum	1.974.900	
7.01.06.2.01.0004	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Fasilitasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan perundang-undangan	Dana Alokasi Umum	1.900.800	
7.01.06.2.01.0005	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dana Alokasi Umum	1.926.800	
7.01.06.2.01.0006	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dana Alokasi Umum	2.888.000	
7.01.06.2.01.0007	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dana Alokasi Umum	2.981.500	
7.01.06.2.01.0008	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhengtian Perangkat Desa	Dana Alokasi Umum	2.981.500	
JUMLAH						**1.677.921.400**	

Tabel 4.2.1. Perbandingan Anggaran Rencana Kerja Kecamatan Palas Kab. Lampung Selatan Tahun 2024 dengan Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN		SELISIH
	2024	2025	
1	2	3	4
KECAMATAN	**1.560.851.550**	**1.677.921.400**	**-117.069.850**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KAB/KOTA	**1.386.009.200**	**1.511.022.200**	**-44.863.250**
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	**6.888.300**	**32.490.850**	**-5.505.700**
Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	1.113.600	11.025.600	-9.912.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	804.800	5.840.900	-5.036.100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	804.800	5.840.900	-5.036.100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	804.800	3.552.900	-2.748.100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	804.800	3.552.900	-2.748.100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinjerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	872.300	2.677.650	-1.805.350
			0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.321.891.500**	**1.240.798.150**	**81.093.350**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	958.850.000	1.066.435.600	-107.585.600
Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	244.401.400	262.401.400	-18.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	799.700	745.200	54.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1.453.100	953.050	500.050
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**67.457.400**	**40.026.100**	**27.431.300**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.804.200	1.804.200	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.560.000	3.505.000	24.055.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.170.100	3.301.400	-131.300
Penyediaan Bahan Logistic Kantor	9.811.900	7.739.300	2.072.600
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.551.200	3.551.200	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peruuan	4.800.000	4.800.000	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.750.000	18,000.000	-2.550.000
Penyelnggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.100.000	1.100.000	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	**782.500**	**3.150.000**	**-2.367.500**
Pengadaan Mebel	782.500	3.150.000	-2.367.500
			0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	**58.000.000**	**58.000.000**	0
Penyediaan Jasa Komunnikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	58.000.000	58.000.000	0
			0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	**48.970.000**	**49.970.000**	**-1.000.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.970.000	37970.000	0
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	1.000.000,00	2.000.000	-1.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000	0

			0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**111.897.050**	**112.097.900**	**200.850**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**93.753.150**	**100.070.100**	**-6.316.950**
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan	82.125.450	82.336.500	-211.050
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.627.700	17.733.600	-6.105.900
			0
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**18.143.900**	**12.027.800**	**-113.750**
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	18.143.900	12.027.800	-113.750
			0
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**41.026.000**	**29.550.300**	**15.776.650**
Koordinasi Upya Penyelenggaraan Ketenterraman Dan Ketertiban	**41.026.000**	**29.550.300**	**15.776.650**
Sinergitas denganKepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan	8.288.000	4.273.700	4.014.300
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	32.738.000	25.276.600	7.461.400
			0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**21.919.300**	**18.054.400**	**3.864.900**
Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan	**21.919.300**	**18.054.400**	**3.864.900**
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.686.100	1.990.200	-304.100
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.686.100	1.952.300	-266.200
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.686.100	1.974.900	-288.000
Fasilitasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan perundang-undangan	1.686.100	1.900.800	-214.700
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.686.100	1.926.800	-240.700
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.686.100	2.888.000	-1.201.900
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.686.100	2.981.500	-1.295.400
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhengtian Perangkat Desa	1.686.100	2.981.500	-1.295.400
Jumlah	**1.560.851.550**	**1.677.921.400**	**-117.069.850**

BAB V
PENUTUP

5.1. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Palas dan mengacu pada DPA dengan Alokasi Anggaran sesuai dengan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan.

5.2. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana tindaklanjut program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Palas pada tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2027 menetapkan 5 program dan 12 kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Palas tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2027 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam 1 (satu) tahun kedepan.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Palas tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2027 yang telah kami susun berdasarkan perubahan Renstra, isu – isu strategis dan catatan penting serta program dan kegiatan prioritas, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun secara umum rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Palas tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Palas, 20 Desember 2024

CAMAT PALAS,

SURHAYANAH., S.Pd
Penata TK.I /III.d
NIP. 19751107 201001 2005

RENCANA KERJA
PERUBAHAN

KECAMATAN KETAPANG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ketapang merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Ketapang untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Ketapang dalam 1 (satu) tahun anggaran yang memuat tujuan, sasaran, dan target capaian kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025. Oleh karenanya, dokumen ini akan dijadikan sebagai acuan bagi aparatur di lingkungan Kecamatan Ketapang dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025.

.Disamping itu, melalui review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, dokumen ini diharapkan memperjelas kondisi aktual dan tingkat akselerasi pencapaian kinerja serta reformulasi strategi pada setiap unit kerja di Kecamatan Ketapang yang disertai dengan kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah maupun masyarakat. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka seluruh aparatur Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dan lembaga terkait berkewajiban untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025.

Akhir kata, dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ketapang Tahun 2025 ini semoga dapat menghasilkan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan secara optimal serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

Ketapang, 7 Juli 2025

Camat Ketapang

Rendy Eko Supriyanto, S.STP

Pembina

NIP . 19831017 200212 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 2

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.3.1 Maksud 4

1.3.2 Tujuan 5

I.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .. 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu 7

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan 7

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 10

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 11

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 12

BAB III TUJUAN DANSASARANPERANGKAT DAERAH 20

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 20

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 21

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas 21

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ….27

BAB V PENUTUP 35

Lampiran

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1.	Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah …….....	2
Gambar 1.2.	Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD …….....	3

Daftar Tabel

Tabel 2.1.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan Tahun 2024 …….....	8
Tabel 2.2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ketapang Tahun 2023 ...	10
Tabel 2.4.1	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Ketapang Tahun 2025	13
Tabel 3.3.1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.....	23
Tabel 4.1	Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju tahun 2026 Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.....	28

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

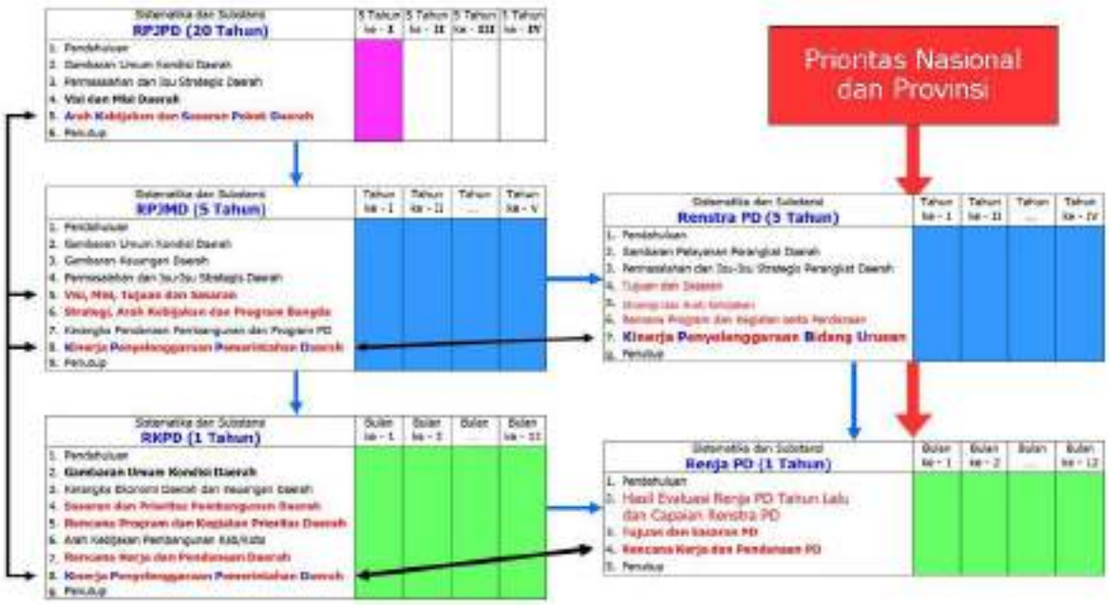
Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan yang merinci program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di suatu kecamatan dalam periode tertentu. Rencana ini bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat kecamatan dan mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau dokumen perencanaan daerah lainnya.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasional, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah adalah Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahannya untuk mewujudkan target RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Lihat Gambar 1.1.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Lihat gambar 1.2

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

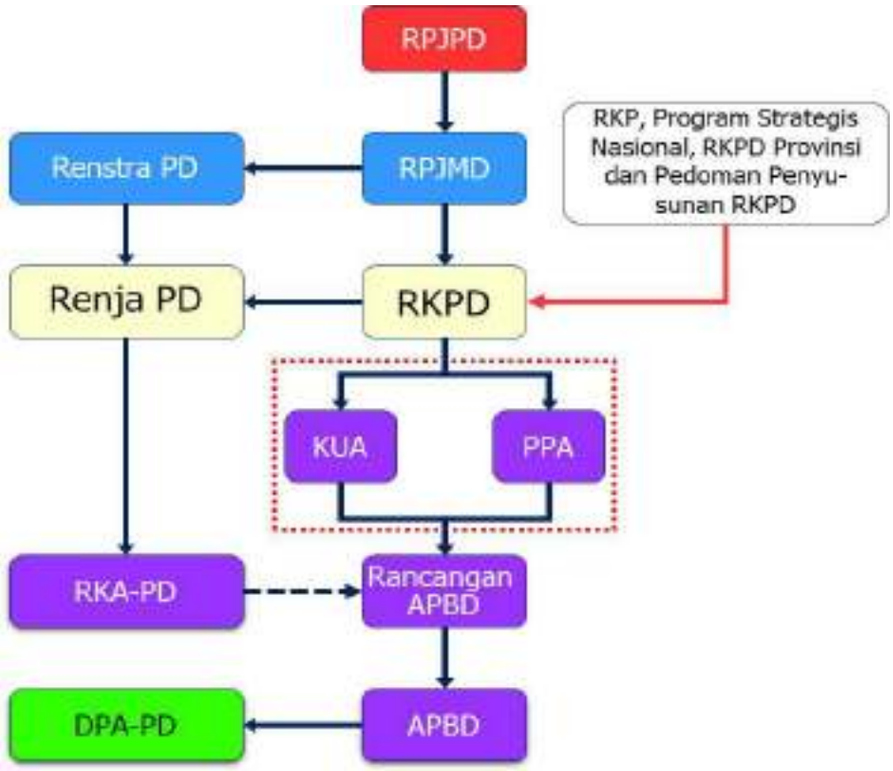


Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja PD;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
3. Penyusunan Rancangan Renja PD berdasarkan berdasarkan surat edaran KepalaDaerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD;
4. Pembahasan Rancangan Renja PD dalam Forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman targetkinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD;
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan PembangunanDaerah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1. Sedangkan tindak lanjut dokumen Renja PD hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2

Gambar 1.2. Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ketapang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentnag Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

k. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ Tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah PascaPemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;

l. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 -2024;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran DaerahKabupaten Lampung Selatan Tahun 2013 Nomor 04, Tambaha n LembaranDaerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04);

n. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);

o. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3);

p. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 104);

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 ini adalah : menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasionil :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2025 ;

b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang <sebutkan nama urusan yang diampu> dan laporan kinerja

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematikan Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Hasil Review Terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan Prioritas

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah)

4.2. Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran renstra PD dan RPJMD

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Secara umum Renja Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capain yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2023 melaksanakan 4 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**, dengan kegiatan :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**, dengan kegiatan :
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
3. **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum,** dengan kegiatan:
   a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengwasan Pemerintahan Desa

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan 2024

Hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Ketapang tahun 2023 dan perkiraan capaiannya di tahun 2024 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.1. di bawah ini.

Tabel T-C.29

TABEL 2.1.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan s/d Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Ketapang | Tahun Anggaran: 2025 (Renja Perubahan)

No	Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025 (K)	Target 2025 (Rp)	Realisasi s/d 2025 (K)	Realisasi s/d 2025 (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Unit Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5×100	10=8/6×100	11	12
	7.01	**KECAMATAN**			**1.898.412.762**		**1.715.726.702**	**77,36**	**90,38**	Kecamatan Ketapang	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan (poin)**	**80**	**1.633.367.762**	**72**	**1.542.920.602**	**86,65**	**94,46**	**Kecamatan Ketapang**	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan**	**4 Dok**	**32.913.900**	**4 Dok**	**31.517.400**	**88,89**	**95,76**	**Kecamatan Ketapang**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	15.024.500	4 Dok	14.878.000	100	99,02	Kecamatan Ketapang	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	5.915.000	1 Dok	5.915.000	100	100	Kecamatan Ketapang	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	4.658.000	1 Dok	4.658.000	100	100	Kecamatan Ketapang	

No	Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025 (K)	Target 2025 (Rp)	Realisasi s/d 2025 (K)	Realisasi s/d 2025 (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Unit Penanggung Jawab	Ket
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1.658.300	1 Dok	1.658.300	100	100	Kecamatan Ketapang	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	2.013.200	1 Dok	2.013.200	100	100	Kecamatan Ketapang	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	3 Lap	3.644.900	1 Lap	2.394.900	33,33	65,71	Kecamatan Ketapang	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang Menerima Gaji**	**14 Org/bln**	**1.266.313.612**	**14 Org/bln**	**1.239.199.902**	**87,50**	**97,86**	**Kecamatan Ketapang**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Org/bln	1.069.411.412	14 Org/bln	1.049.797.702	100	98,17	Kecamatan Ketapang	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	1 Dok	192.600.000	1 Dok	185.100.000	100	96,11	Kecamatan Ketapang	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Lap	1.648.200	1 Lap	1.648.200	100	100	Kecamatan Ketapang	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 Lap	2.654.000	1 Lap	2.654.000	50	100	Kecamatan Ketapang	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas**	**1 Paket**	**8.150.000**	**1 Paket**	**8.150.000**	**100**	**100**	**Kecamatan Ketapang**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	8.150.000	1 Paket	8.150.000	100	100	Kecamatan Ketapang	

No	Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025 (K)	Target 2025 (Rp)	Realisasi s/d 2025 (K)	Realisasi s/d 2025 (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Unit Penanggung Jawab	Ket
		Kelengkapannya									
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik**	**3 Paket**	**125.950.250**	**2 Paket**	**116.331.700**	**84,83**	**92,36**	**Kecamatan Ketapang**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik	3 Paket	3.378.000	2 Paket	1.323.000	66,67	39,17	Kecamatan Ketapang	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	35.999.000	2 Paket	35.999.000	100	100	Kecamatan Ketapang	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	4 Paket	3.487.600	4 Paket	3.357.600	100	96,27	Kecamatan Ketapang	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	7 Paket	14.025.000	5 Paket	12.129.700	71,43	86,49	Kecamatan Ketapang	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	6.710.650	1 Paket	5.487.400	100	81,77	Kecamatan Ketapang	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	12 Dok	9.000.000	12 Dok	9.000.000	100	100	Kecamatan Ketapang	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Lap	38.250.000	8 Lap	37.215.000	80	97,29	Kecamatan Ketapang	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	76 Lap	15.100.000	46 Lap	11.820.000	60,53	78,28	Kecamatan Ketapang	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik**	**Jumlah Paket Mebel**	**2 Unit**	**7.520.000**	**2 Unit**	**7.520.000**	**100**	**100**	**Kecamatan**	

No	Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025 (K)	Target 2025 (Rp)	Realisasi s/d 2025 (K)	Realisasi s/d 2025 (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Unit Penanggung Jawab	Ket
		Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**Ketapang**	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	7.520.000	2 Unit	7.520.000	100	100	Kecamatan Ketapang	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi**	**12 Lap**	**32.800.000**	**12 Lap**	**26.047.300**	**100**	**79,41**	**Kecamatan Ketapang**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi	12 Lap	32.800.000	12 Lap	26.047.300	100	79,41	Kecamatan Ketapang	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara**	**1 Unit**	**159.720.000**	**1 Unit**	**114.154.300**	**78,18**	**71,47**	**Kecamatan Ketapang**	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara	1 Unit	38.220.000	1 Unit	34.554.300	100	90,41	Kecamatan Ketapang	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	6.500.000	10 Unit	4.600.000	90,91	70,77	Kecamatan Ketapang	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	100	100	Kecamatan Ketapang	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2 Unit	40.000.000	0 Unit	0	0	0	Kecamatan Ketapang	

No	Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025 (K)	Target 2025 (Rp)	Realisasi s/d 2025 (K)	Realisasi s/d 2025 (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Unit Penanggung Jawab	Ket
		Bangunan Lainnya									
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	100	100	Kecamatan Ketapang	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat desa/kelurahan yang diberdayakan**	**100%**	**119.997.150**	**100%**	**57.924.150**	**63,33**	**48,27**	**Kecamatan Ketapang**	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi**	**17 Lembaga**	**72.002.650**	**17 Lembaga**	**34.250.350**	**70**	**47,57**	**Kecamatan Ketapang**	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi	17 Lembaga	11.546.000	17 Lembaga	11.546.000	100	100	Kecamatan Ketapang	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas	10 Lap	60.456.650	4 Lap	22.704.350	40	37,55	Kecamatan Ketapang	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha**	**2 Lap**	**47.994.500**	**1 Lap**	**23.673.800**	**50**	**49,33**	**Kecamatan Ketapang**	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Lap	47.994.500	1 Lap	23.673.800	50	49,33	Kecamatan Ketapang	

No	Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025 (K)	Target 2025 (Rp)	Realisasi s/d 2025 (K)	Realisasi s/d 2025 (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Unit Penanggung Jawab	Ket
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait**	**100%**	**138.315.350**	**100%**	**114.881.950**	**55**	**83,06**	**Kecamatan Ketapang**	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan Hasil Sinergitas**	**2 Lap**	**138.315.350**	**1 Lap**	**114.881.950**	**55**	**83,06**	**Kecamatan Ketapang**	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	2 Lap	12.905.050	1 Lap	12.005.050	50	93,03	Kecamatan Ketapang	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi	5 Lap	125.410.300	3 Lap	102.876.900	60	82,03	Kecamatan Ketapang	
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina**	**100%**	**6.732.500**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**Kecamatan Ketapang**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	1 Dok	**6.732.500**	0 Dok	**0**	**0**	**0**	Kecamatan Ketapang	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	1 Dok	3.219.750	0 Dok	0	0	0	Kecamatan Ketapang	
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	1 Lap	3.512.750	0 Lap	0	0	0	Kecamatan Ketapang	

No	Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025 (K)	Target 2025 (Rp)	Realisasi s/d 2025 (K)	Realisasi s/d 2025 (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Unit Penanggung Jawab	Ket
		JUMLAH			**1.898.412.762**		**1.715.726.702**	**77,36**	**90,38**		
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)						**77,36**	**90,38**		
		Predikat Kinerja						**Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025

Capaian hasil pelaksanaan Renstra Kecamatan Ketapang hingga tahun lalu tahun 2025 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.1 di atas pada subbab 2.1.1.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja pelayanan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan IKK (Indikator Kinerja Kunci) Kecamatan Ketapang hingga tahun berjalan Tahun 2024 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ketapang
Kabupaten Lampung Selatan

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**											
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)			68	69	70	71	68	69	71	72	
B	**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH**											
1.	Indeks Kepuasan Pelayanan			79	79	80	80	80	80	80	80	
2.	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Persentase kegiatan koordinasi denganpihak terkait dalam upaya peningkatanketentraman dan ketertiban umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Persentase jumlah pemerintahan desayang dibina			-	-	-	100%	-	-	100%	100%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Kedudukan Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan dan merujuk kepada kreteria penentuan isu strategis sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 maka dapat di identifikasi beberapa isu penting yang perlu untuk segera diatasi sebagai berikut :

1. Kualitas dan kuantitas pelayanan publik dirasakan masih kurang optimal termasuk didalamnya adalah kurangnya jumlah sarana dan prasarana pendukung kinerja yang ada dikantor kecamatan dan bahkan sering kali mejadi kendala bagi upaya peningkatan pelayanan itu sendiri;
2. Upaya-upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan masih dirasakan kurang, baik dari sisi kualitas dan kuantitasnya, sementara sumber daya dan faktor pendukung untuk tujuan peningkatan pemberdayaan masyarakat ini masih banyak yang belum tersentuh atau belum termanfaatkan secara maksimal;
3. Proses perencanaan pembangunan di kecamatan secarakualitas dan kuantitas juga dinilai masih belum sesuai harapan, baik dari segi antusias dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan serta masih banyaknya aspirasi masyarakat yang belum terakomodir, sehingga sering kali menimbulkan opini di masyarakat bahwa pemerintah daerah kabupaten belum secara serius untuk memperhatikan dan merealisasikan apa yang menjadi keinginan/ kepentingan masyarakatnya.
4. Fungsi pembinaan dan pengawasan yang diampu kecamatan terhadap desa/ kelurahan selama ini masih dirasakan kurang maksimal. Keterbatasan anggaran pada kecamatan dianggap sebagai salah satu penyebab yang perlu segera dicarikan solusinya.

   Meskipun dalam APBDes sudah dianggarkan mengenai upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, namun masih perlu dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

   Perubahan dan pergantian yang sering terjadi pada susunan organisasi pemerintahan desa dan kelembagaan desa menjadi permasalahan yang juga menyebabkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

pemberdayaan dan pelayanan masyarakat di desa menjadi kurang maksimal. Urusan dan permasalahan di desa yang sangat kompleks dan bervariatif, perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah yang dalam hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab pihak kecamatan untuk terus melakukan pembinaan dan fasilitasi serta pengawasan kepada desa.

Empat isu penting tersebut diatas menjadi tantangandan segera dilakukan penanganan dengan mengiplemantasikan program dan kegiatan yang disusun dan diselenggarakan kecamatan melalui penyusunan rencana kinerja yang diharapkan menjadi solusi untuk menjawab isu-isu penting yang selama ini ada.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah. Maka untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah, dilakukan penyelarasan program dan kegiatan kedalamnomenklatur permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Oleh sebab itu, Rancangan awal RKPD Tahun 2024 yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja PD Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan permendagri 90. Terdapat 4 program, 10 kegiatan, 28 sub kegiatan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.31

Tabel 2.4.1 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Ketapang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**		**Indeks Kepuasan Pelayanan (poin)**	**82 Poin**	**1,964,288,924**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**		**Indeks Kepuasan Pelayanan (poin)**	**80 Poin**	**1,455,854,818**	
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11 Dokumen**	**12,977,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11 Dokumen**	**11,892,200**	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Ketapang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2,701,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Ketapang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1,996,500	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Ketapang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,429,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Ketapang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,292,400	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Ketapang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,214,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Ketapang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,286,100	

4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Ketapang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,721,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Ketapang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,658,600	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Ketapang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,094,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Ketapang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,013,300	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Ketapang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	3,818,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Ketapang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	3,645,300	
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu**	**100%**	**1,693,552,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu**	**100%**	**1,154,203,618**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kecamatan Ketapang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang / Bulan	1,495,550,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kecamatan Ketapang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang / Bulan	968,800,468	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Ketapang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	193,482,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Ketapang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	181,100,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Ketapang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,721,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Ketapang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,648,700	

4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Ketapang	Jumlah Laopran Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	2 Laporan	2,799,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Ketapang	Jumlah Laopran Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	2 Laporan	2,654,450	
1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**-**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**7,500,000**	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Ketapang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Ketapang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	7,500,000	
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**141,801,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**149,669,000**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Ketapang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,431,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Ketapang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,379,500	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Ketapang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	43,609,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Ketapang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	31,661,000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Ketapang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4,134,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Ketapang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3,391,700	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Ketapang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	14,950,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Ketapang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,126,100	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Ketapang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8,148,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Ketapang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6,710,700	

6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Ketapang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6,945,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Ketapang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9,000,000	
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Ketapang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	29 Laporan	59,384,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Ketapang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	29 Laporan	75,900,000	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Ketapang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	2,200,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Ketapang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	6,500,000	
1.5	**Kegiatan Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**1 Unit**	**36,036,924**	**Kegiatan Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**2 Unit**	**4,370,000**	
1	Pengadaan Mebel	Kecamatan Ketapang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	101 Unit	36,036,924	Pengadaan Mebel	Kecamatan Ketapang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	4,370,000	
1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**23,564,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**32,800,000**	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Ketapang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	23,564,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Ketapang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32,800,000	
1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**56,358,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**95,420,000**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Ketapang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	40,358,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Ketapang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	40,720,000	

2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Ketapang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Ketapang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	4,700,000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Ketapang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitas	3 Unit	15,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Ketapang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitas	1 Unit	50,000,000	
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase masyarakat desa / kelurahan yang diberdayakan**	**100%**	**125,781,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase masyarakat desa / kelurahan yang diberdayakan**	**100%**	**134,926,700**	
2.1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah kecamatan**	**17 Desa**	**101,426,000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah kecamatan**	**17 Desa**	**92,103,400**	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Ketapang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17 Lembaga	101,426,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Ketapang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17 Lembaga	77,710,500	
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ketapang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ketapang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17 Lembaga	14,392,900	
2.2	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang diberdayakan**	**2 Kegiatan**	**24,355,000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang diberdayakan**	**2 Kegiatan**	**42,823,300**	
1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Ketapang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Kegiatan	24,355,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Ketapang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Kegiatan	42,823,300	

3	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**168,658,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**81,595,150**	
3.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Jumlah Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**4 Kegiatan**	**168,658,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Jumlah Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**3 Kegiatan**	**81,595,150**	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Ketapang	Kecamatan Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Ketapang	Kecamatan Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	12,905,050	
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Ketapang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	168,658,000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Ketapang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	68,690,100	
4	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina**	**100%**	**30,682,000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina**	**100%**	**10,127,950**	
4.1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Monitoring, Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**2 Kali**	**30,682,000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Monitoring, Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**3 Kali**	**10,127,950**	
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Ketapang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	15,341,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Ketapang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	7,744,500	

2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	1 Dokumen	15,341,000	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ketapang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	2,383,450	
					2,289,409,924					**1,682,504,618**	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT,RW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja PD tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Ketapang Tahun 2025 hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tema Pembangunan Nasional yang direncanakan akan ditetapkan dalam RKP tahun 2025 adalah **"Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas"** yang dijabarkan menjadi 5 prioritas nasional di tahun 2023, yaitu :

1. Pembangunan manusia;
2. Penguatan konektivitas;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi;
4. Pemantapan ketahanan energy, pangan dan sumber daya air;
5. Stabilitas keamanan nasional.

Prioritas pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2020-2024 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita.

Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan selaku Lembaga Teknis Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas nasional Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan mengayomi;
2. Mewujudkan SDM daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat yang sejahtera;

3. Mewujudakn penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik;

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Ketapang Dalam rangka mewujudkan misi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, yaitu:

Tujuan Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan adalah:meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabeldalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Adapun yang menjadi sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan;
2. Meningkatnya Keamanan, Ketentraman Dan Ketertiban Serta Pemberdayaan Masayarakat Desa/Kelurahan;

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa kegiatan yang terkandung didalamnya guna mencapai tujuan tertentu.

Program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**, dengan kegiatan:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**, dengan kegiatan:
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
   b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

3. **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**, dengan kegiatan:
   a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
4. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ketapang di tahun 2025 adalah sebanyak : 4 Program dan 11 Kegiatan Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.682.504.618. Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada **Tabel 3.3.1**. di bawah

Tabel 3.3.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025

Program Dan Kegiatan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ketapang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN KETAPANG						**1,682,504,618.00**							**1,873,266,520.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1,682,504,618.00**							**1,873,266,520.00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1,682,504,618.00**							**1,873,266,520.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**-**			**80 poin**	**1,455,854,818.00**						**-**	**1,628,078,720.00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tercapainya dokumen yang ditargetkan dalam satu tahun*	-			11 Dokumen	11,892,200.00			-	-	Aparatur Kecamatan	-	13,081,420.00	KEC. KETAPANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1,996,500.00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Kecamatan		2,196,150.00	KEC. KETAPANG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1,292,400.00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Kecamatan		1,421,640.00	KEC. KETAPANG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan				1 Dokumen	1,286,100.00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	-	Aparatur Kecamatan		1,414,710.00	KEC. KETAPANG

			RKA-SKPD						Kel/Desa	UMUM					
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1,658,600.00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Kecamatan		1,824,460.00	KEC. KETAPANG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2,013,300.00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Kecamatan		2,214,630.00	KEC. KETAPANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	3,645,300.00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Kecamatan		4,009,830.00	KEC. KETAPANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Dokumen	1,154,203,618.00			-	-	Aparatur Kecamatan	-	1,301,248,980.00	KEC. KETAPANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	968,800,468.00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Kecamatan		1,097,305,515.00	KEC. KETAPANG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	181,100,000.00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Kecamatan		199,210,000.00	KEC. KETAPANG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,648,700.00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Kecamatan		1,813,570.00	KEC. KETAPANG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	2,654,450.00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Kecamatan		2,919,895.00	KEC. KETAPANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			1 Paket	7,500,000.00			-	-	-	-	8,250,000.00	KEC. KETAPANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	7,500,000.00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8,250,000.00	KEC. KETAPANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	149,669,000.00			-	-	Aparatur Kecamatan, Masyarakat	-	164,649,320.00	KEC. KETAPANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,379,500.00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Kecamatan, Masyarakat		3,730,870.00	KEC. KETAPANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	31,661,000.00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Kecamatan, Masyarakat		34,827,100.00	KEC. KETAPANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3,391,700.00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Kecamatan, Masyarakat		3,730,870.00	KEC. KETAPANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	13,126,100.00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Kecamatan, Masyarakat		14,438,710.00	KEC. KETAPANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6,710,700.00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Kecamatan, Masyarakat		7,381,770.00	KEC. KETAPANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	9,000,000.00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Kecamatan, Masyarakat		9,900,000.00	KEC. KETAPANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				29 Laporan	75,900,000.00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Kecamatan, Masyarakat		83,490,000.00	KEC. KETAPANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	6,500,000.00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Kecamatan, Masyarakat		7,150,000.00	KEC. KETAPANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah yang di targetkan*	-			1 Unit	4,370,000.00			-	-	Aparatur Kecamatan	-	4,807,000.00	KEC. KETAPANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	4,370,000.00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Kecamatan		4,807,000.00	KEC. KETAPANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kantor*	-			12 Laporan	32,800,000.00			-	-	Aparatur Kecamatan	-	36,080,000.00	KEC. KETAPANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	32,800,000.00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Kecamatan		36,080,000.00	KEC. KETAPANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya barang milik daerah yang dipelihara*	-			16 Unit	95,420,000.00			-	-	Aparatur Kecamatan	-	99,962,000.00	KEC. KETAPANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	40,720,000.00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Kecamatan		44,792,000.00	KEC. KETAPANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	4,700,000.00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Kecamatan		5,170,000.00	KEC. KETAPANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	50,000,000.00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Kecamatan		50,000,000.00	KEC. KETAPANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan***	**-**			**100 Persen**	**134,926,700.00**						**-**	**144,293,850.00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya koordinasi pemberdayaan desa*	-			2 Laporan	92,103,400.00			-	-	Masyarakat	-	97,188,850.00	KEC. KETAPANG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				17 Lembaga Kemasyarak atan	77,710,500.00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat		85,481,550.00	KEC. KETAPANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	14,392,900.00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat		11,707,300.00	KEC. KETAPANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Diberdayakannya Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	-			1 Laporan	42,823,300.00			-	-	Masyarakat	-	47,105,000.00	KEC. KETAPANG
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	42,823,300.00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat		47,105,000.00	KEC. KETAPANG
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Jumlah laporan Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	**-**			**100 Persen**	**81,595,150.00**						**-**	**89,754,000.00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Terlaksananya koordinasi dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	-			2 Laporan	81,595,150.00			-	-	Masyarakat	-	89,754,000.00	KEC. KETAPANG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	12,905,050.00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat		14,195,000.00	KEC. KETAPANG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	68,690,100.00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat		75,559,000.00	KEC. KETAPANG
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	**-**			**100 Persen**	**10,127,950.00**						**-**	**11,139,950.00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa1*	-			1 Dokumen	10,127,950.00			-	-	Masyarakat	-	11,139,950.00	KEC. KETAPANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	2,383,450.00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat		2,621,000.00	KE KETAPANG
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	7,744,500.00	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat		8,518,950.00	KEC. KETAPANG
	J U M L A H							**1,682,504,618.00**							**1,873,266,520.00**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan didasarkan pada beberapa faktor, di antaranya pencapaian visi dan misi kepala daerah (terutama visi ke-5) dan kebutuhan di masa yang akan datang dalam upaya optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan daerah.

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 adalah seperti yang ditunjukkan pada **Tabel 4.1** di bawah ini. Tabel 4.1 menyajikan **Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026** yang memuat target kinerja dan anggaran Tahun 2025, realisasi capaian kinerja dan anggaran s/d Triwulan IV Tahun 2025, tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2025, serta prakiraan maju Tahun 2026. Tabel ini berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD Kecamatan Ketapang dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan Tabel 4.1, jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ketapang di Tahun 2025 adalah sebanyak **4 (empat) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan**. Total target kinerja dan anggaran Tahun 2025 adalah sebesar **Rp1.898.412.762**, dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran s/d Triwulan IV Tahun 2025 sebesar **Rp1.715.726.702** atau mencapai **77,36%** untuk kinerja (predikat **Tinggi**) dan **90,38%** untuk anggaran (predikat **Sangat Tinggi**). Adapun prakiraan maju Tahun 2026 adalah sebesar **Rp1.873.266.520**.

Dalam Renja Perubahan Tahun 2025 ini, total kebutuhan dana untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah sebesar **Rp1.682.504.618**, yang merupakan hasil penyesuaian/efisiensi dari target awal Tahun 2025. Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1 di bawah.

TABEL 4.1 — RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

No	Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Kinerja	Indikator	Target 2025 (K)	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (K)	Realisasi 2025 (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Prakiraan Maju 2026 (Rp)	Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5×100	10=8/6×100	11	12
	7.01	**KECAMATAN**			**1.898.412.762**		**1.715.726.702**	**77,36**	**90,38**	**1.873.266.520**	**Kecamatan Ketapang**
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan (poin)**	**80**	**1.633.367.762**	**72**	**1.542.920.602**	**86,65**	**94,46**	**1.628.078.720**	**Kecamatan Ketapang**
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	32.913.900	4 Dok	31.517.400	88,89	95,76	13.081.420	Kecamatan Ketapang
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	15.024.500	4 Dok	14.878.000	100	99,02	2.196.150	Kecamatan Ketapang
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	5.915.000	1 Dok	5.915.000	100	100	1.421.640	Kecamatan Ketapang
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	4.658.000	1 Dok	4.658.000	100	100	1.414.710	Kecamatan Ketapang
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1.658.300	1 Dok	1.658.300	100	100	1.824.460	Kecamatan Ketapang

No	Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Kinerja	Indikator	Target 2025 (K)	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (K)	Realisasi 2025 (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Prakiraan Maju 2026 (Rp)	Unit SKPD Penanggungjawab
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	2.013.200	1 Dok	2.013.200	100	100	2.214.630	Kecamatan Ketapang
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Lap	3.644.900	1 Lap	2.394.900	33,33	65,71	4.009.830	Kecamatan Ketapang
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Org/bln	1.266.313.612	14 Org/bln	1.239.199.902	87,50	97,86	1.301.248.980	Kecamatan Ketapang
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Org/bln	1.069.411.412	14 Org/bln	1.049.797.702	100	98,17	1.097.305.515	Kecamatan Ketapang
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	192.600.000	1 Dok	185.100.000	100	96,11	199.210.000	Kecamatan Ketapang
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1.648.200	1 Lap	1.648.200	100	100	1.813.570	Kecamatan Ketapang
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Lap	2.654.000	1 Lap	2.654.000	50	100	2.919.895	Kecamatan Ketapang
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	8.150.000	1 Paket	8.150.000	100	100	8.250.000	Kecamatan Ketapang

No	Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Kinerja	Indikator	Target 2025 (K)	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (K)	Realisasi 2025 (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Prakiraan Maju 2026 (Rp)	Unit SKPD Penanggungjawab
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	8.150.000	1 Paket	8.150.000	100	100	8.250.000	Kecamatan Ketapang
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket	125.950.250	2 Paket	116.331.700	84,83	92,36	164.649.320	Kecamatan Ketapang
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket	3.378.000	2 Paket	1.323.000	66,67	39,17	3.730.870	Kecamatan Ketapang
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	35.999.000	2 Paket	35.999.000	100	100	34.827.100	Kecamatan Ketapang
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	4 Paket	3.487.600	4 Paket	3.357.600	100	96,27	3.730.870	Kecamatan Ketapang
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	7 Paket	14.025.000	5 Paket	12.129.700	71,43	86,49	14.438.710	Kecamatan Ketapang
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	6.710.650	1 Paket	5.487.400	100	81,77	7.381.770	Kecamatan Ketapang
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dok	9.000.000	12 Dok	9.000.000	100	100	9.900.000	Kecamatan Ketapang

No	Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Kinerja	Indikator	Target 2025 (K)	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (K)	Realisasi 2025 (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Prakiraan Maju 2026 (Rp)	Unit SKPD Penanggungjawab
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Lap	38.250.000	8 Lap	37.215.000	80	97,29	83.490.000	Kecamatan Ketapang
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76 Lap	15.100.000	46 Lap	11.820.000	60,53	78,28	7.150.000	Kecamatan Ketapang
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	7.520.000	2 Unit	7.520.000	100	100	4.807.000	Kecamatan Ketapang
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	7.520.000	2 Unit	7.520.000	100	100	4.807.000	Kecamatan Ketapang
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Lap	32.800.000	12 Lap	26.047.300	100	79,41	36.080.000	Kecamatan Ketapang
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Lap	32.800.000	12 Lap	26.047.300	100	79,41	36.080.000	Kecamatan Ketapang
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	159.720.000	1 Unit	114.154.300	78,18	71,47	99.962.000	Kecamatan Ketapang
	7.01.01.2.09.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan	1 Unit	38.220.000	1 Unit	34.554.300	100	90,41	44.792.000	Kecamatan

No	Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Kinerja	Indikator	Target 2025 (K)	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (K)	Realisasi 2025 (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Prakiraan Maju 2026 (Rp)	Unit SKPD Penanggungjawab
	001	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								Ketapang
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	6.500.000	10 Unit	4.600.000	90,91	70,77	5.170.000	Kecamatan Ketapang
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	100	100	50.000.000	Kecamatan Ketapang
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	40.000.000	0 Unit	0	0	0	0	Kecamatan Ketapang
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	100	100	0	Kecamatan Ketapang
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat desa/kelurahan yang diberdayakan**	**100%**	**119.997.150**	**100%**	**57.924.150**	**63,33**	**48,27**	**144.293.850**	**Kecamatan Ketapang**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	17 Lemba	72.002.650	17 Lemba	34.250.350	70	47,57	97.188.850	Kecamatan Ketapang

No	Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Kinerja	Indikator	Target 2025 (K)	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (K)	Realisasi 2025 (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Prakiraan Maju 2026 (Rp)	Unit SKPD Penanggungjawab
			Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	ga		ga					
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17 Lembaga	11.546.000	17 Lembaga	11.546.000	100	100	85.481.550	Kecamatan Ketapang
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Lap	60.456.650	4 Lap	22.704.350	40	37,55	11.707.300	Kecamatan Ketapang
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Lap	47.994.500	1 Lap	23.673.800	50	49,33	47.105.000	Kecamatan Ketapang
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Lap	47.994.500	1 Lap	23.673.800	50	49,33	47.105.000	Kecamatan Ketapang
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**138.315.350**	**100%**	**114.881.950**	**55**	**83,06**	**89.754.000**	**Kecamatan Ketapang**

No	Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Kinerja	Indikator	Target 2025 (K)	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (K)	Realisasi 2025 (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Prakiraan Maju 2026 (Rp)	Unit SKPD Penanggungjawab
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Lap	138.315.350	1 Lap	114.881.950	55	83,06	89.754.000	Kecamatan Ketapang
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Lap	12.905.050	1 Lap	12.005.050	50	93,03	14.195.000	Kecamatan Ketapang
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Lap	125.410.300	3 Lap	102.876.900	60	82,03	75.559.000	Kecamatan Ketapang
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina**	**100%**	**6.732.500**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**11.139.950**	**Kecamatan Ketapang**
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dok	6.732.500	0 Dok	0	0	0	11.139.950	Kecamatan Ketapang
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dok	3.219.750	0 Dok	0	0	0	2.621.000	Kecamatan Ketapang

No	Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Kinerja	Indikator	Target 2025 (K)	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (K)	Realisasi 2025 (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Prakiraan Maju 2026 (Rp)	Unit SKPD Penanggungjawab
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Lap	3.512.750	0 Lap	0	0	0	8.518.950	Kecamatan Ketapang
		JUMLAH			**1.898.412.762**		**1.715.726.702**	**77,36**	**90,38**	**1.873.266.520**	

BAB V
PENUTUP

Failing to plan is planning to fail; kegagalan kita dalam merencanakan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kewilayahan sama dengan merencanakan kegagalan Kecamatan Ketapang.

Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Ketapang dan RPJMD Kabupaten lampung Selatan di tahun 2025. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Kecamatan Ketapang tahun 2025.

Renja PD ini harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Ketapang dan RPJMD Kabupaten lampung Selatan di tahun 2025.

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Kecamatan Ketapang untuk *proving* (membuktikan) kinerja dan untuk *improving* (memperbaiki) kinerja.

Saat penjabaran Renja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya.

Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan Upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Pelajaran yang kita dapatkan dari pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalitas pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Ketapang dan RPJMD Lampung Selatan di tahun 2025.

Demikian Renja Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Tal 2025 ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu meridhai semua langkah kita. Aamiin … Aamiin..

Ketapang, 7 juli 2025

Camat Ketapang



Rendy Eko Supriyanto,S.STP
NIP. 19831017 200212 1 002

RENCANAA KERJA PERUBAHAN

(RENJA)

KECAMATAN MERBAU MATARAM

TAHUN 2025

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Sebagaimana diketahui, Kecamatan Merbau Mataram merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan Program Pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan, mencermati hal tersebut dan berpedoman pada salah satu capaian Visi Kabupaten Lampung Selatan diperlukan suatu Program yang matang agar sarana program bisa tercapai secara efektif dan efesien yang dirumuskan pada suatu acuan program kerja yang jelas dan terarah. Dengan sendirinya Visi Bupati Lampung Selatan periode 2025 yaitu

"*Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan yang Berintegritas, Maju dan Sejahtera dengan Semangat Gotong Royong*".

Acuan program tersebut telah kami susun menjadi suatu rangkaian Program - program selama lima tahun dari tahun 2021 sampai dengan 2026, sehingga menjadi suatu Rencanaa Kerja pembangunan di Kecamatan Merbau Mataram. Renja tersebut mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Dokumen Renja ini merumuskan Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan, dan langkah-langkah capaian kegiatan, disusun guna mendukung Visi Kabupaten dan Visi Bupati dalam membangun Lampung Selatan lima tahun kedepan.

Namun demikian, perencanaan merupakan suatu proses dinamis yang harus disesuaikan dengan sumber daya organisasi sebagai konsekuensi logis dari perubahan lingkungan organisasi. Artinya, guna mempertegas arah kebijakan Pemerintah Kecamatan Merbau Mataram sebagai upaya mengantisipasi kebutuhan dan upaya penyelarasan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan, arah perencanan pembangunan di wilayah Kecamatan Merbau Mataram merujuk kepada RPJMD Kabupaten Lampung Selatan yang bertujuan

menunjang komitmen Pemerintah Kecamatan Merbau Mataram dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Lampung Selatan.

Akhirnya, besar harapan Kami Renja ini dapat berguna sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan pada Kecamatan Merbau Mataram menuju Masyarakat yang sejahtera.

Merbau Mataram, 7 Juli 2025
CAMAT MERBAU MATARAM,

JHONI IRZAL, S.Sos
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19790517 200003 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi iii
Daftar Tabel v
Daftar Gambar vi
BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan..... 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 8
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 35
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 41
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD..... 49
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU KERJA PERANGKAT DAERAH 51
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 51
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih . 51
3.3 Telaahan Renja K/L 54
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Kerja 57
3.5 Penentuan Isu-Isu Kerja..... 57
BAB IV TUJUAN dan SASARAN..... 59
4.1 Tujuan dan Sasaran 59
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 64
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTAPENDANAAN66
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 74
BAB VIII PENUTUP 76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1Rincian Aparatur Kecamatan Merbau Mataram 36
Tabel 2.2.2Pegawai Kecamatan Merbau Mataram berdasarkan Pangkat/ Golongan 36
Tabel 2.2.3Susunan Kepegawaian Kecamatan Merbau Mataram Berdasarkan Tingkat Pendidikan 37
Tabel 2.2.4Jumlah SDM Pada Kecamatan Merbau Mataram menurut Jenis Kelamin 37
Tabel 2.2.5Sarana dan Prasaran Kantor Kecamatan Merbau Mataram 37
Tabel 2.2.6Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan Merbau Mataram 38
Tabel 2.2.7Data Sarana / Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Merbau Mataram 40
Tabel 2.2.8 Fasilitas Tempat Ibadah di Kecamatan Merbau Mataram 40
Tabel 2.3.1Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan Tahun (2016-2020) 42
Tabel 2.3.2Analisis Realisasi Anggaran Kecamatan Merbau Mataram Saat Ini (2016-2020) 45
Tabel 2.3.3Analisis Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Merbau Mataram tahun (2016– 2020)..... 45
Tabel 3.1 Renja Kemendragi 2020-2025 dan Renja Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan 2025 56
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sesuai Dengan Visi DanMisi RPJMDKabupaten Lampung Selatan Tahun 20252026 61
Tabel 4.2Indikator Sasaran Sesuai Dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten LampungSelatan Tahun 2021 – 2026 62
Tabel 6.1Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan 70
Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 ... 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Perencanaan Pembangun Daerah..... 3

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan 34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-undangn Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melahirkan paradegma baru perencanaan pembangunan yang lebihmem berikan keleluasaan dan kewenangan kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Sedangkan pengertian Renja Perangkat Daerah merupakan suatu proses yang beroreantasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang adaatau yang mungkin timbul.

Oleh karena itu Kecamatan Merbau Mataram sebagai salah Satu Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan merupakan pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang kecamatan dan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 07 tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan Se Kabupaten Lampung Selatan. Dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka Kecamatan Merbau Mataram menyusun Renja 2025. Sebagai salah satu instrument kebijakan, Renja memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan karena akan memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan yang akan dilalui sekarang maupun yang akan datang.

Seiring dengan penyusunan RPJMD Kabupaten lampung Selatan tahun 2025, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Merbau Mataram menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) SKPD. Rencana Kerja SKPD Kecamatan Merbau Mataram merupakan dokumen perencanaan SKPD (Kecamatan Merbau Mataram) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, dan indikator kinerja SKPD (Kecamatan Merbau Mataram) yang bersifat indikatif yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD (Kecamatan Merbau Mataram) serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Selatan. Proses penyusunan dan penetapan Renja Kecamatan Merbau Mataram sebagai proses yang sejalan dengan penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan.

Selanjutnya dalam konteks pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan di atas dan Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan Nasional yang meliputi : Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap menjamin terciptanya keterpaduan dan kelanjutan pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu maupun antar fungsi pemerintahan.

SistemPerencanaan Pembangunan Nasional adalahsuatukesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk meningkatkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan

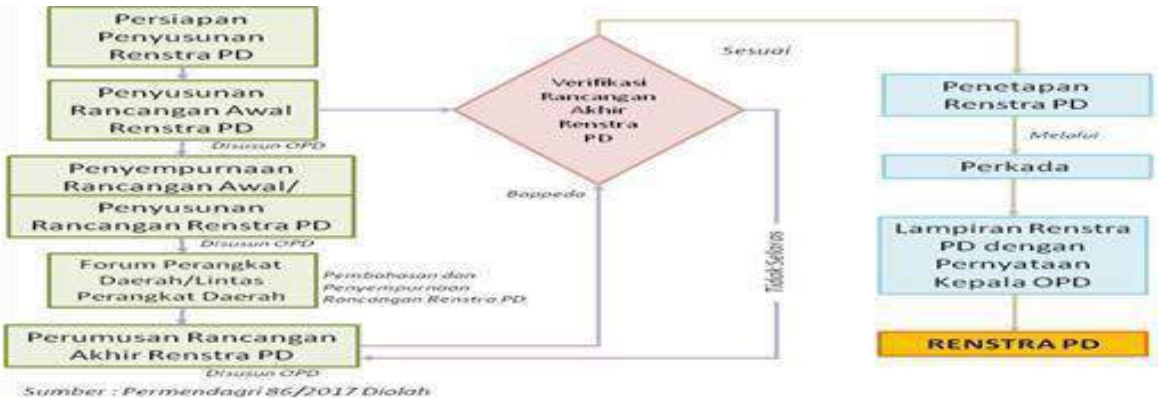
tahunan yang dilaksanakan oleh unsurpenyelenggara Negara dan masayarakat di tingkatpusat dan daerah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan jangka menengah, pemerintah Kabupaten Lampung Selatandan seluruh komponen pelaku pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan mengemban amanat untuk menyusun, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Nasional dan Propinsi Lampung. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuatvisi, misi, dan program prioritas Bupati serta memuat strategi pembangunan daerah, kebijakanumum dan program pembangunan daerah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifatindikatf yang penyusunannyaberpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Selatan.

RencanaKerja (Renja) KecamatanMerbau MataramTahun 2021-2026 diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Merbau Mataram dalam periodeTahun 2025.

Tahapan penyusunan rancangan Renja Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1 Alur PerencanaanPembangun Daerah



1.2.Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja KecamatanMerbau Mataram Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
11. PeraturanPresidenNomor 39 Tahun 2019 tentangsatu data Indonesia
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2010

TentangRencanaKerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
15. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
16. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2025
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

21. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan Kecamatan Dan Kelurahan Se-Kabupaten Lampung Selatan
22. PeraturanBupati Lampung Selatan No 4Tahun 2021 TentangRencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJM) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.
23. Surat Edaran Bupati Lampung Selatan No 13 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rancangan Kerja Perangkat Daerah Renja PD Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Merbau MataramTahun 2025adalah :

1. Untuk mensinkronkan antara RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dengan Renja Kecamatan Merbau Mataram Tahun 2025
2. Tersedianya dokumen perencanaan yang memuat program kerja yang jelas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Merbau Mataram yang akan dijadikan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya.
3. Untuk memudahkan dalam penetapan dan pengukuran kinerja Kecamatan Merbau Mataram setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Merbau Mataram ini adalah :

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Kecamatan Merbau Mataram untuk mengakomodir visi, misi, program sasaran Kepala Daerah yang telah ditetapkan dan disinergikan dengan visi dan misi Kecamatan Merbau Mataram

2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025
3. Renja merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi.

1.4. SistematikaPenulisan

Sistematika Penulisan Renja Kecamatan Merbau Mataram adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latarbelakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematikapenulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III.PERMASALAHAN DANISU-ISU KERJA PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaah Renja K/L dan Renja Perangkat Daerah Propinsi
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Kerja
- 3.5. Penentuanisu-isuKerja

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V.STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI. PERENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII.PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatam Merbau Mataram merujuk kepada Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan Kecamatan Dan Kelurahan Se-Kabupaten Lampung Selatan.

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya, yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, kecamatan mempunyai fungsi :

a) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b) Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c) Pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan peraturan perundang – undangan;
d) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
f) Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa/ Kelurahan;
g) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang

lingkuptugasnya;
h) Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan;
i) Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Derah melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan peraturan Bupati Lampung Selatan Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati yang menangani sebagian otonomi Daerah, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan melaksanakan pembinaan terhadap aparatur Kecamatan agar pelaksanaan tugas dapat bekerja sama dan berhasil. Guna melaksanakan koordinasi dibidang pelaksanaan pengendalian kegiatan pemerintahan dan ketertiban umum, ekonomi pembangunan, sosial kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, tata ruang dan informasi pemerintah, juga organisasi lainnya demi kelancaran tugas di Kecamatan.

1.1.1. Tugas dan Fungsi

Dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 69 tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu, dipimpin oleh camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris daerah, secara umum yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan pemerintahan dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 69 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Lampung Selatan, dengan ketentuan di dalamnya sebagai berikut:

1. Camat

Tugas pokok Camat adalah memimpin Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Camat, melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan, melaksanakan pembinaan terhadap aparatur Kecamatan agar pelaksanaan tugas dapat berdaya-guna dan berhasil-guna, melaksanakan kerja sama dan koordinasi dibidang pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan, sosial, kesejahteraan masyarakat, ketenagakerjaan dan informasi komunikasi, pertanahan dan tata ruang dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Kecamatan.

Rincian tugas Camat adalah sebagai berikut :

a. menyusun program dan kebijakan teknis dibidang pemerintahan ketenteraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, ketenagakerjaan dan informasi komunikasi, pertanahan dan tata ruang diwilayah kerjanya dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi camat;
b. memimpin, membina, mengoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan teknis dibidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, ketenagakerjaan dan informasi komunikasi, pertanahan dan tata ruang diwilayah kerjanya agar sesuai perencanaan yang telah ditentukan;
c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Dinas Instansi terkait sebagai koordinator kecamatan dalam bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, ketenagakerjaan dan informasi komunikasi, pertanahan dan tata ruang diwilayah kerjanya agar terjadi kesamaan persepsi dan kesatuan langkah dan gerak dalam melaksanakan kegiatan;
d. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Kecamatan, Kelurahan dan Desa sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
e. menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi pengoordinasian kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

f. memberikan rekomendasi penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat struktural yang ada dilingkungan kecamatan;
g. melaksanakan tugas sebagai koordinator kolektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diwilayah kerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
h. melegalisasi Surat Keterangan Tanah (SKT) dilingkungan wilayah kerjanya;
i. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan kebijakan yang akan diambil dibidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, ketenagakerjaan dan informasi komunikasi, pertanahan dan tata ruang diwilayah kerjanya;
j. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban dan sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;
k. membagi habis tugas kedinasan dibidang teknis dan administrasi pada bawahan, agar setiap aparatur yang berada dilingkungan kecamatan mempunyai dan

memahami beban tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;

l. memberi petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

m. menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari bawahan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugasnya Camat dibantu oleh unsur-unsur Kecamatan :

2. Sekretariat Kecamatan

Tugas Pokok Sekretaris adalah membantu Camat dalam melakukan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Kecamatan yang meliputi pengelolaan urusan umum, rumah-tangga, surat-menyurat, kepegawaian, melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan, serta mengelola administrasi urusan keuangan pengelolaan perlengkapan dan aset Kecamatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rincian tugasSekretaris adalah sebagai berikut ;

a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Seksi dalam rangka penyusunan program kerja Kecamatan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan, serta program dan rencana kerja Sekretariat untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;

b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas pengelolaan urusan

administrasi kantor hubungan kemasyarakatan, kepegawaian, perlengkapan perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan agar dapat berjalan sesuai dengan program dan rencana kerja yang telah disusun;

c. mengelola urusan umum, rumah-tangga, administrasi surat-menyurat dan kearsipan;

d. membina bawahan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian kantor;

e. merumuskan program dan rencana kerja bekerja sama dengan unit kerja terkait, melaksanakan evaluasi dan merumuskan laporan kegiatan pada Kecamatan dan laporan kegiatan ketatausahaan kantor;

f. mengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran Kecamatan, pembukuan pertanggungjawaban serta penyusunan keuangan kantor;

g. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Kecamatan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ketatausahaan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas Sekretaris;

h. merumuskan kegiatan operasional dan program-program kerja Sekretariat yang akan ditetapkan sebagai pedoman kerja:

i. membagihabistugasSekretariatkepadabawahan, agar setiapaparatur yang adamemahamitugas dan pertanggungjawaban masing-masing;

j. menerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kerja selanjutnya;

k. membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;

l. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut;

m. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

n. membuat laporan kepada Camat sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kerja Kecamatan lebih lanjut; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekteratariat Kecamatan dibantu oleh :

- Sub Bagian Umum

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, hubungan kemasyarakatan, dokumentasi, dan ketertiban dalam lingkungan dinas, ketatalaksanaan dan urusan rumah-tangga, serta pengelolaan administrasi perlengkapan, peralatan dan asset.

Rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut;

a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan Sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas SubBagian Umum dan Kepegawaian dan Menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. melaksanakan penataan administarsisurat menyurat untuk mempermudah proses lebihlanjut;

d. memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersangkutan urusan kedinasan;

e. melaksanakan tugas rumah tangga Kecamatan yang meliputi pelayanan angkutan dan akomodasi, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta perjalanan dinas;

f. menyiapkan dan memantau penyediaan tempat dan perlengkapannya untuk keperluan pelaksanaan rapat dan pertemuan kecamatan lainnya;

g. melakukan bahan penyusunan jadwal acara dan administrasi kegiatan camat;

h. membina kegiatan keolahragaan, ketertiban, ehumasan dan ketata laksanaan lingkungan kecamatan;

i. melaksanakan penelaahan dan pelayanan kepustakaan kantor;

j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, menyusun serta menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian;

k. melaksanakan pengajuan program dan pembinaan serta peningkatan SDM;

l. menyiapkan bahan dalam rangka menyelesaikan masalah kepegawaian yang meliputi usulan kenaikan pangkat, usulan mutasi jabatan, penyelesaian kenaikan gaji berkala, proses pemberian surat cuti,

proses usulan pensiun serta pemberian sanksi atas pelanggaran peraturan kepegawaian;

m. memproses usulan pengangkatan dan pemberhentian para pejabat pengelola barang lingkup Kecamatan;

n. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan sistem, metode dan prosedur kerja serta pendayagunaan aparatur;

o. menginventarisasi, permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang kehumasan dan layanan informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik;

p. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) di lingkungan sub Bagian Umum dan Kepegawaian agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil guna;

q. membagi habis tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing;

r. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan pelaksanaan kegiatan,

evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan dinas, serta dibidang penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggungjawaban dinas.

Rincian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut :

a. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan bagian tata usaha dalam rangka penyusunan program kerja SubBagian Perencanaandan Keuangan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas SubBagian perencanaan dan Keuangan serta Menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;
c. melaksanakan pengumpulan data rutin dan pembangunan kecamatan;
d. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data bahan peyusunan rencana pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan sistem metode dan prosedur kerja serta pendayagunaan aparatur;
e. mengolah, menganalisa dan menyajikan data rutin dan pembangunan kecamatan;
f. menyusun data statistikkecamatan;
g. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan rencana kegiatan rutin kecamatan;
h. menyiapkan bahan kerja sama teknik untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan;

i. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kecamatan;

j. memantau dan mengevaluasi semua pelaksanaan kegiatan pembangunan Kecamatan menyusun laporan–laporan pelaksanaan rencana dan program rutin dan pembangunan kecamatansupaya sesuai dengan rencana yang telah disusun;

k. melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;

l. melaksanakan analisis, interprestasi laporan pengawasan fungsional untuk penyelesaian tindak lanjut kegiatan rutin dan pembangunan;

m. mengumpulkan petunjuk teknis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta mengumpulkan bahan penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kecamatan;

n. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana perubahan anggaran;

o. melakukan administrasi pembukuan serta sistematis dan kronologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memudahkan kontrol terhadap penggunaan keuangan kecamatan;

p. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja kantor rutin maupun Pembangunan;

q. memproses usul pengangkatan atau pemberhentian para pejabat pengelola anggaran lingkup Kecamatan;

r. melaksanakan pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan perbendaharaan;

s. menyelengarakan pembukuan, penghitungan dan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;

t. memberikan bimbingan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;

u. menyelenggarakan penataan dokumen keuangan dan penyusunan laporan realisasi anggaran;

v. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub Bagian Perencanaan adan Keuangan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;

w. membagi habis tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing;

x. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; dan

y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan.

3. Seksi Pemerintahan

Tugas pokokKepala Seksi Pemerintahan adalah membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

Rincian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

a. melakukan koordinasi dengan seluruh Seksi dan Sekretariat Kecamatan dalam rangka penyusunan

program kerja Kecamatan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kecamatan, serta rencana kerja pada Seksi Pemerintahan untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi Pemerintahan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan satuan kerja perangkat daerah dan intansi vertikal.

d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan kepada Bupati;

e. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

f. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;

g. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, perangkat desa dan/atau kelurahan;

h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan kepada bupati;

i. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), penyelenggaraan pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) diwilayah kerjanya;

j. memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar desa dan penyelesaian perselisihan desa;
k. melaksanakan kegiatan administrasi Kecamatan;
l. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan Fungsional Umum dilingkungan Seksi Pemerintahan, agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;
m. membagi habis tugas Seksi Pemerintahan kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
n. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Camat sebagai pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut;
o. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut;
p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemerintahan kepada camat sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kerja Kecamatan lebih lanjut; dan
q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas pokokKepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Rincian tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut :

a. melakukan koordinasi dengan seluruh Seksi dan Sekretariat Kecamatan dalam rangka penyusunan program kerja Kecamatan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kecamatan, serta rencana kerja pada Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas;
b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;
c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kerja kecamatan;
d. menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kerja kecamatan;
e. menyiapkan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat di wilayah kecamatan;
f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaran pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ditingkat Kecamatan kepada bupati;
g. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat/ LINMAS di wilayah kerjanya;

h. menyiapkan bahan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
i. menyiapkan bahan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang penegakkan peraturan perundang-undangan;
j. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan Fungsional Umum dilingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;
k. membagi habis tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
l. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Camat sebagai pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut;
m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut;
n. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum kepada Camat sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kerja Kecamatan lebih lanjut; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Tugas pokok Seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakkan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Rincian tugas Seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah sebagai berikut :

a. melakukan koordinasi dengan seluruh Seksi dan Sekretariat Kecamatan dalam rangka penyusunan program kerja Kecamatan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kecamatan, serta rencana kerja pada Seksi Ekonomi dan Pembangunan untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas;
b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;
c. memfasilitasi dan mengoordinasikan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perekonomian desa dan/ atau kelurahan diwilayah kerjanya;
d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa izin dan dapat menggangu serta membahayakan lingkungan hidup;
f. menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, lingkungan hidup, pertambangan, kepariwisataan,

perkoperasian, usaha kecil menengah dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan;

g. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;

h. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desak/elurahan dan kecamatan;

i. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh sub unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan;

j. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan baik yang dilakukan oleh sub unit kerja pemerintah maupun swasta;

k. melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

l. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah keja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;

m. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan Fungsional Umum dilingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan, agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;

n. membagi habis tugas Seksi Ekonomi dan Pembangunan kepada aparatur Jabatan Fungsional

Umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;

o. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Camat sebagai pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut;

p. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut;

q. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan kepada Camat sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kerja Kecamatan lebih lanjut; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

6. Seksi Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan dan Informasi Komunikasi

Tugas pokokSeksi Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan dan Informasi Komunikasi adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan masyarakat, Ketenagakerjaan dan Informasi Komunikasi.

Rincian tugas Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan dan Informasi Komunikasi adalah sebagai berikut :

a. melakukan koordinasi dengan seluruh Seksi dan Sekretariat Kecamatan dalam rangka penyusunan program kerja Kecamatan sebagai pedoman

penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kecamatan, serta rencana kerja pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan dan Informasi Komunikasi untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan dan Informasi Komunikasi dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial diwilayahnya;

d. menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta menyiapkan bahan pembinaan Lembaga Adat dan suku terasing;

e. menyiapkan bahan koordinasi pencegahan dan penaggulangan bencana alam dan pengungsi serta penanggulangan masalah sosial;

f. memberikan fasilitas penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar serta menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;

g. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;

h. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;

i. menyiapkan bahan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;

j. memfasilitasi penyuluhan program wajib belajar serta fasilitasi pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Sekolah Dasar Negeri/Sederajat;

k. memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;

l. menyiapkan bahan pembinaan hubungan masyarakat guna memperjelas kebijakan pimpinan pemerintah daerah, serta menyiapkan bahan pembinaan terhadap pers dan penerbitan serta media elektronik;

m. menyiapkan bahan pembinaan penerangan umum, produksi, informasi dan promosi daerah;

n. melaksanakan pelayanan informasi dari pemerintah, masyarakat dan kajian isu publik utama yang diolah dan disajikan melalui media pers dan penerbitan/elektronik serta memantau/monitoring berita, opini yang disajikan media pers dan penerbitan elektronik;

o. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan pihak swasta serta melaporkan dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

p. menyiapkan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, serta melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di Kecamatan;

q. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Kesejahteraan

Masyarakat, Ketenagakerjaan dan Informasi Komunikasi ditingkat Kecamatan kepada Bupati;

r. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan Fungsional Umum dilingkungan Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan dan Informasi Komunikasi, agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;
s. membagi habis tugas Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan dan Informasi Komunikasi kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
t. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Camat sebagai pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut;
u. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut;
v. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan dan Informasi Komunikasi kepada Camat sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kerja Kecamatan lebih lanjut; dan
w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

7. Seksi Pertanahan dan Tata Ruang

Tugas pokok Kepala Seksi Pertanahan dan Tata Ruang adalah membantu camat dalam menyiapkan bahan

perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan dan tata ruang.

Rincian tugas Seksi Pertanahan dan Tata Ruang adalah sebagai berikut :

a. melakukan koordinasi dengan seluruh Seksi dan Sekretariat Kecamatan dalam rangka penyusunan program kerja Kecamatan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kecamatan, serta rencana kerja pada Seksi Pertanahan dan Tata Ruang untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas;
b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi Pertanahan dan Tata Ruang dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;
c. menginventarisasidan melaksanakan bahan pengawasan atas tanah-tanah Negara dan tanah aset Pemerintah Daerah diwilayah kerjanya;
d. melaksanakan pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi Kelurahan;
f. melaksanakan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan

tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul diwilayah kerjanya;

g. menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan tata ruang diwilayah kerjanya sesuai dengan Tata Ruang Kecamatan dan Tata Ruang Kabupaten;

h. membantu camat dalam melaksanakan tugas sebagai koordinator kolektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diwilayah kerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

i. menyiapkan bahan penyuluhan, monitorning, evaluasi dan pelaporan tentang PBB perkotaan dan pedesaan;

j. melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dilimpahkan oleh Perangkat Daerah (SKPD)/instansi vertikal terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku;

k. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan Fungsional Umum dilingkungan Seksi Pertanahan dan Tata Ruang, agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;

l. membagi habis tugas Seksi Pertanahan dan Tata Ruang kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;

m. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Camat sebagai pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut;

n. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut;

o. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pertanahan dan Tata Ruang kepada Camat sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kerja Kecamatan lebih lanjut; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

b. Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan.

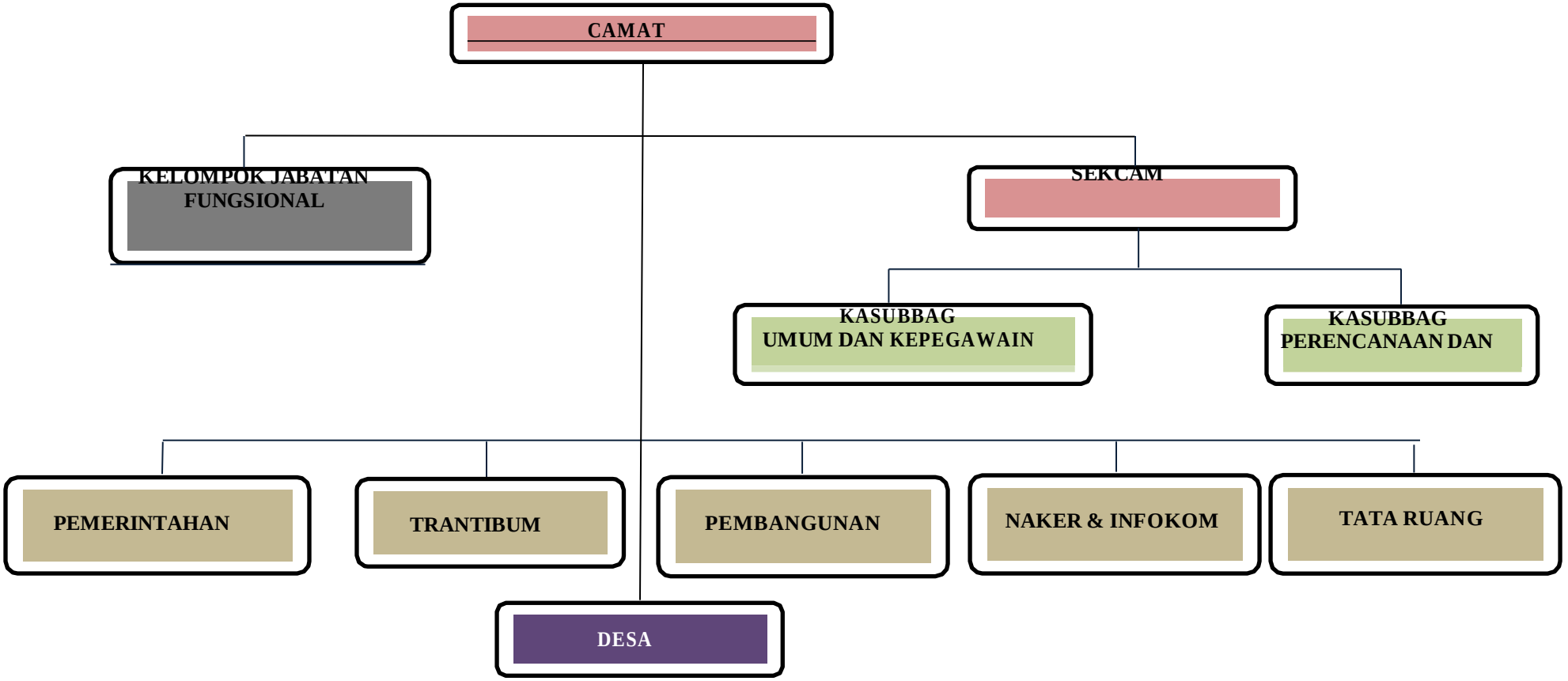
c. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

d. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2.1.2. Struktur Organisasi

Organisasi Kecamatan Merbau Mataram terdiri dari satu camat, satu sekretaris, dan lima seksi, serta dua subbagian dibawah sekretariat. Adapun bagan struktur oraganisasi Kecamatan Merbau Mataram adalah sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MERBAU MATARAM TAHUN 2021



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten lampung Selatan

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kecamatan Merbau Mataram merupakan salah satu dari tujuh belas kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, Sedangkan secara Administrasi Kecamatan Merbau Mataram terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2006, tanggal 16 Juni Tahun 2006 merupakan pemekaran dari Kecamatan Katibung dan pada tanggal 31 Juli 2017 di resmikan oleh Bupati Lampung Selatandengan membawahi Lima Belas desa dengan jumlah penduduk sekitar 54.535 jiwa dan luas wilayah 174.86 KM^2. batas-batas wilayah Kecamatan Merbau Mataram adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Lampung Timur
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Katibung
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Bandar Lampung

Kecamatan Merbau Mataram terbagi menjadi 15 desa yaitu:

1. Desa Suban
2. Desa Merbau Mataram
3. Desa Tanjung Baru
4. Desa Baru Ranji
5. Desa Triharjo
6. Desa Panca Tunggal
7. Desa Talang Jawa
8. Desa Batu Agung
9. Desa Lebung Sari
10. Desa Puji Rahayu
11. Desa Sinar Karya
12. Desa Tanjung Harapan
13. Desa Karang Jaya
14. Desa Mekar Jaya
15. Desa Karang Raja

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Kecamatan Merbau Mataram memiliki 9 orang personil ASN/PNS yang menduduki jabatan struktural sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Rincian Aparatur Kecamatan Merbau Mataram

NO	JABATAN	JUMLAH
1	2	3
1.	C a m a t	1 Orang
2.	Sekretaris Kecamatan	1 Orang
3.	Seksi Pemerintahan	1 Orang
4.	Seksi Ketentraman dan Tibum	1 Orang
5.	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	1 Orang
6.	Seksi Kessoskesmasnaker dan Infokom	1 Orang
7.	Seksi Pertanahan dan Tata Ruang	1 Orang
8.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Orang
9.	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1 Orang
Jumlah		9 Orang

Gambaran kepegawaian pada Kecamatan Merbau Mataram berdasarkan pangkat dan golongan, sebagai berikut :

Tabel 2.2.2 Pegawai Kecamatan Merbau Mataram berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT	GOL/R	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Pembina Tk. I	-	-
2.	Pembina	IV/a	1 orang
3.	Penata Tk. I	III/d	4 orang
4.	Penata	III/c	4 orang
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	-
6.	Penata Muda	III/a	2 orang
7.	Pengatur Tingkat I	II/d	2 orang

8.	Pengatur	II/c	-
9.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	3 orang
10.	Pengatur Muda	II/a	-
11.	Juru Tk. I	I/d	1 orang
12.	Thls	-	12 orang
13.	Jumlah		29 orang

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikannya, jumlah pegawai pada Kecamatan Merbau Mataram, sebagai berikut :

Tabel 2.2.3. Susunan Kepegawaian Kecamatan Merbau Mataram Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)		
		PNS	THLS	HONDIS
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Sekolah Dasar	-	-	-
2	SLTP	1	-	-
3	SMA	7	8	-
4	Diploma 3	-	-	
5	Sarjana	8	4	-
6	PascaSarjana	1	1	-
Jumlah		17	12	-

Secara keseluruhan jumlah SDM pada Kecamatan Merbau Mataram adalah 29 Orang, yang berdasarkan jenis kelamin disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.4. Jumlah SDM Pada Kecamatan Merbau Mataram MenurutJenisKelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	2	3
1.	Laki-laki	20 Orang
2.	Perempuan	9 Orang
Jumlah		29 Orang

2.2.2. Aset/ Barang Milik Daerah

Kecamatan Merbau Mataram dilimpahkan Barang Milik Daerah berupa peralatan dan perlengkapan kantor sebagai sarana dan prasarana aparatur kecamatan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun Sarana dan Prasarana di Kecamatan Merbau Mataram dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel.2.2.5.Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Merbau Mataram

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Sarana		
1	Meja ½ Biro	1 0Bh	Baik
2	Filling Cabinet Brother	6 Bh	Baik
3	LemariBesi Brother	8 Bh	Baik
4	KursiTamu	2 Stel	Baik
5	Sound System	1 Unit	Baik
6	Mobil Dinas	1 Unit	Baik
7	Sepeda Motor	5 Unit	Baik
8	Perangkat Computer	4 Unit	Baik
9	Printer	4 Unit	Baik
10	Laptop	5 Unit	Baik
11	SSB	1 Unit	Baik
12	KursiPlastik	100 Buah	Baik
13	MesinPotongrumput	1 Unit	Baik
14	KursiKerjaDirektur	9 Buah	Baik
15	Mejakerjakayu	7 Buah	Baik
16	Kipas Angin	8 Unit	Baik
17	Jenset	1 Unit	Baik
18	Alat Rekam E – KTP	1 Paket	Baik
19	AC	4 Unit	Baik
20	Kursi Staff	20 Bh	Baik

21	Prasarana		
22	- Gedung Kantor	1 lokal	Baik
23	- Rumah Dinas	1 lokal	Baik

2.2.3. Fasilitas Pendidikan

Pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan diantaranyaadalah Pendidikan, maka dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan adalah pemerataan layanan pendidikan. Adapun Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan Merbau Mataram dapat kita lihat pada tabelberikut ini.

Tabel 2.2.6 Sarana dan PrasaranaPendidikan diKecamatan Merbau Mataram

NO.	URAIAN	JUMLAH LEMBAGA
1.	PAUD/TK	26
2.	SD/MI	20
3.	SMP / SLTP	11
4.	SMK	3
5.	SMA	3

2.2.4. Fasilitas Kesehatan

Kesehatan merupakanprioritasdalam pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan.Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, pemerintah harus memperhatikan layanan kesehatan disamping pendidikan. Maka dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan juga memperhatikan pemerataan layanan kesehatan. Pada tabel berikut ini adalah data fasilitas/sarana kesehatan di Kecamatan Merbau Mataram.

Tabel 2.2.7. Data Fasilitas/Sarana KesehatanKecamatan Merbau Mataram

NO.	SARANA KESEHATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	PUSKESMAS	2	Di Desa Merbau Mataram dan Desa Talang Jawa
2.	PUSTU	5	Di Desa Baru Ranji,Panca Tunggal,Batu Agung,TanjungHarapan,Mekar Jaya
3.	PUSKESDES	15	Ada di 15 Desa

2.2.5. FasilitasPeribadatan

Fasilitas ibadah yang ada di wilayah KecamatanMerbau Mataram, sebagaiberikut :

Tabel 2.2.8. Fasilitas Tempat Ibadah Di Wilayah Kec. Merbau Mataram

No	Sarana Tempat Ibadah	Jumlah (Unit)	Kondisi
1	*2*	*3*	*4*
1	Masjid	31	Baik
2	Mushola	87	Baik
3	Gereja	7	Baik
4	Wihara	1	-
5	Pure	1	-

Penduduk merupakan obyek pembangunan sekaligus juga subyek pembangunan. Oleh karena itu data kependudukan sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Jumlah penduduk Kecamatan Merbau Mataram adalah sebanyak 25.050jiwa yang terdiri dari :

1. Penduduk laki – laki : 27.448Jiwa
2. Penduduk perempuan : 27.084 iwa

dengan jumlah kepala keluarga : 54.532Jiwa

2.3. Kinerja PelayananPerangkat Daerah

Tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tergambarkan dalam akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah, yakni tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/ target Renja perangkat daerah periode sebelumnya dan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah.

Adapun rincian sasaran Kerja, indikator kinerja, dan target kinerja KecamatanMerbau Mataram Tahun 2025adalah sebagai berikut:

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA-SKPD

KECAMATAN MERBAU MATARAM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2025

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K%	Rp%		
		7.01	**KECAMATAN**			**2.231.758.200**		**520.506.308**		**509.159.617**		**396.093.102**		**524.598.013**		1.950.357.040	**125,86**	**87,39**		
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.829.006.650**		**466.872.508**		**431.809.617**		**347.151.102**		**412.628.663**		1.658.461.890	**137,07**	**90,68**	Kecamatan Merbau Mataram	
			Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	74												0			
				Indeks Kepuasan Pelayanan (Poin)	80		0		0		0		80		80		100			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			38.135.200		13.095.750		-		6.774.400		18.265.050		38.135.200	108,33	100		
			Tersedianya dokumen perencanaan yang ditargetkan dalam satu tahun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1		0		1		1		3		100			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		0		0		0		3		3		150			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			17.295.500		4.528.000		-		-		12.767.500		17.295.500	100	100		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		1		0		1		1		3		100			
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			6.783.850		6.783.850		-		-		-		6.783.850	100	100		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			

		7.01.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			6.774.400		-		-		6.774.400		-		6.774.400	100	100		
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		7.01.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1.783.900		1.783.900		-		-		-		1.783.900	100	100		
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100			
		7.01.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			1.622.450		-		-		-		1.622.450		1.622.450	100	100		
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		7.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3.875.100		-		-		-		3.875.100		3.875.100	150	100		
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		0		0		0		3		3		150			
		7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.412.675.250		319.951.308		374.659.617		291.093.102		281.260.363		1.266.964.390	350	89,69		
				Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		12		12		12		12		12		100			
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		3		3		3		3		12		1200			
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.109.324.000		274.851.308		307.159.617		222.843.102		197.118.013		1.001.972.040	100	90,32		
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		12		12		12		12		12		100			
		7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			299.282.500		45.100.000		67.500.000		68.250.000		83.032.500		263.882.500	1200	88,17		
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		3		3		3		3		12		1200			
		7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2.303.500		-		-		-		-		-	0	0		
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			

		7.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			1.765.250		-		-		-		1.109.850		1.109.850	100	62,87		
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			24.285.000		24.285.000		-		-		-		24.285.000	100	100		
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2		2		0		0		0		2		100			
		7.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			24.285.000		24.285.000		-		-		-		24.285.000	100	100		
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2		2		0		0		0		2		100			
		7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			180.286.700		70.220.500		23.803.100		30.961.700		43.447.100		168.432.400	100	93,42		
				Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0		1		100			
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		6		0		0		0		6		100			
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2		0		0		0		2		2		100			
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.665.000		-		2.665.000		-		-		2.665.000	100	100		
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0		1		100			
		7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			59.270.000		59.270.000		-		-		-		59.270.000	100	100		
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		6		0		0		0		6		100			
		7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.224.000		1.050.500		1.122.600		2.942.100		1.442.000		6.557.200	100	90,77		
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			16.220.200		-		580.000		3.619.600		11.783.100		15.982.700	100	98,54		
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			7.137.500		1.200.000		1.360.500		-		4.577.000		7.137.500	100	100		

				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			6.000.000		1.500.000		1.500.000		1.000.000		2.000.000		6.000.000	100	100		
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu			25.710.000		-		9.375.000		11.250.000		5.085.000		25.710.000	100	100		
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2		0		0		0		2		2		100			
		7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			56.060.000		7.200.000		7.200.000		12.150.000		18.560.000		45.110.000	100	80,47		
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			32.664.500		-		-		-		32.380.000		32.380.000	100	99,13		
				Tersedianya Barang Milik Daerah yang di targetkan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			32.664.500		-		-		-		32.380.000		32.380.000	100	99,13		
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			42.400.000		7.519.950		12.313.271		7.521.900		7.676.150		35.031.271	100	82,62		
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			42.400.000		7.519.950		12.313.271		7.521.900		7.676.150		35.031.271	100	82,62		
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			98.560.000		31.800.000		21.033.629		10.800.000		29.600.000		93.233.629	69,2	94,6		
				Tersedianya barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		0		0		0		5		5		100			
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8		0		5		0		0		5		62,5			
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0		0		0		1		100			
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		0		0		0		1		1		14,29			
		7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			49.560.000		6.800.000		17.033.629		10.800.000		9.600.000		44.233.629	100	89,25		
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		0		0		0		5		5		100			

		7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.000.000		-		4.000.000		-		-		4.000.000	62,5	100		
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8		0		5		0		0		5		62,5			
		7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			25.000.000		25.000.000		-		-		-		25.000.000	100	100		
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0		0		0		1		100			
		7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			20.000.000		-		-		-		20.000.000		20.000.000	14,29	100		
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		0		0		0		1		1		14,29			
		7.01.03		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**239.092.600**		**24.383.800**		**30.900.000**		**35.392.000**		**43.394.400**		134.070.200	**75**	**56,07**	Kecamatan Merbau Mataram	
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan (%)			0		0		0		100		100		0			
					persentase masyarakat miskin yang diberdayakan (%)	100		0		0		0		100		100		100			
		7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			172.308.600		24.383.800		30.900.000		35.392.000		6.034.000		96.709.800	62,5	56,13		
				Terlaksananya koordinasi pemberdayaan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	15		15		0		0		0		15		100			
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	8		0		0		0		2		2		25			
		7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			32.783.800		24.383.800		8.400.000		-		-		32.783.800	100	100		
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	15		15		0		0		0		15		100			
		7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			139.524.800		-		22.500.000		35.392.000		6.034.000		63.926.000	25	45,82		
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	8		0		0		0		2		2		25			
		7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			66.784.000		-		-		-		37.360.400		37.360.400	100	55,94		
				Diberdayakannya Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2		0		0		0		2		2		100			
		7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			66.784.000		-		-		-		37.360.400		37.360.400	100	55,94		
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2		0		0		0		2		2		100			
		7.01.04		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**150.184.000**		**29.250.000**		**46.450.000**		**8.250.000**		**60.400.000**		144.350.000	**50**	**96,12**	Kecamatan Merbau Mataram	

				Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan sadar hukum	Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100		0		0		0		100		100		100			
		7.01.04.2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		150.184.000		29.250.000		46.450.000		8.250.000		60.400.000		144.350.000	50	96,12		
				O1.2.1 Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan sadar hukum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	4		1		1		0		0		2		50			
		7.01.04.2.01.0002			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		150.184.000		29.250.000		46.450.000		8.250.000		60.400.000		144.350.000	50	96,12		
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	4		1		1		0		0		2		50			
		7.01.06		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**13.474.950**		**-**		**-**		**5.300.000**		**8.174.950**		13.474.950	**100**	**100**	Kecamatan Merbau Mataram	
				Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%) (%)			0		0		0		100		100		0			
					Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Desa)	15		0		0		1		1		2		13,33			
		7.01.06.2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		13.474.950		-		-		5.300.000		8.174.950		13.474.950	100	100		
				Terlaksananya Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		7.01.06.2.01.0002			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		5.475.000		-		-		5.300.000		175.000		5.475.000	100	100		
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1		0		0		1		0		1		100			
		7.01.06.2.01.0007			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		7.999.950		-		-		-		7.999.950		7.999.950	100	100		
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
					JUMLAH		**2.231.758.200**		**520.506.308**		**509.159.617**		**396.093.102**		**524.598.013**		**1.950.357.040**				
					Rata-rata capaian kinerja (%)													**125,86**	**87,39**		
					Predikat kinerja													**Sangat tinggi**	**Tinggi**		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA-SKPD berikutnya	:	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kita memasuki era kemajuan Teknologi yang semakin cepat sehingga perangkat Daerah dalam hal ini Kecamatan Merbau Mataram dituntut mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi terutama dibidang Teknologi Informasi, pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi memunculkan peluang inovasi untuk mempercepat pelayanan sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan, hal harus didukung oleh SDM yang tepat dan mumpuni. Dengan pelayanan secara digital/online pelayanan kepada masyarakat diharapkan bisa lebih cepat, tepat dan efesien.

Tantangan :

1. Masih rendahnya taraf hidup dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat;
2. Letak di sebelah utara yang berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Jarak yang jauh dari ibukota kabupaten;
3. Penyelenggaraanpemerintahan yang berbasiselektronik (e-government) menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan tekhnologi informasi;
4. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan kurangnya akses masyarakat terhadap informasi (masyarakat kurang tertarik membaca atau melihat berita/ informasi dari media cetak maupun televisi);
5. Regulasi dan peraturan perundang-undangan yang sering mengalami perubahan;

Peluang yang bisa dikembangkan di Kecamatan Merbau Mataram :

1. Kecamatan Merbau Mataram adalah wilayah pertanian dan Perkebunan dengan luas lahan potensial mencapai 3.552 ha dengan lahan sawah 1.818,54 ha dan perkebunan 1.733,6 ha, dapat di kembangkan menjadi lumbung padi.

2. Kecamatan Merbau MatarammempuyaiProduk UMKM Keripik Pisang, Kelanting dll yang perlu di kembangkan sebagaiproduk Unggulan.
3. Berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan dan kemajuan teknologi dan informasi;
4. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mempermudah penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat dan akses informasi layanan publik.
5. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU KERJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan dan Tugas Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan kecamatan maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih banyaknya masyarakat di Kecamatan Merbau Mataram yang beranggapan bahwa pemberdayaan itu berarti program pemberian bantuan dari pemerintah, seperti PKH, BSM dan sejenisnya terlebih lagi dengan adanya pandemi covid-19.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelayanan yang diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dalam hal ini dikarenakan terkendala oleh anggaran yang ada, sehingga pengalokasian anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik belum bisa terfasilitasi secara optimal
3. Masih kurang optimal kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemerdayaan masyarakat sesuai dengan target sasaran kecamatan dan belum optimalnya program dan kegiatan setiap kasi yang ada di kecamatan
4. Masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di tingkat desa;
5. Masih rendahnya tingkat disiplin dan kapasitas aparatur desa dan kecamatan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. V i s i

Visi Kabupaten Lampung Selatan periode 2025 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan yang Berintegritas, Maju dan Sejahtera dengan Semangat Gotong Royo**ng”**

Lebih lanjut penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut:
Masyarakat Berintegritas: Masyarakat yang memiliki sikap konsistensi atau keteguhan yang tidak bisa tergoyahkan dalam menjunjung nilai-nilai keyakinan dan prinsip;
Masyarakat Maju: ditandai dengan meningkatnya: kualitas sumberdaya manusia, pendapatan rata-rata masyarakat, ketersediaan infrastruktur, kehidupan demokrasi, serta keamanan dan ketertiban;
Masyarakat Sejahtera: masyarakat yang terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, kemampuan pendayagunaan segenap sumberdaya alam, ketersediaan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, yang dimanfaatkan dan dikelola secara bijaksana. Kebutuhan rohani ditunjukkan oleh kondisi masyarakat yang memahami, menyadari dan melaksanakan ajaran agama masing-masing;
Semangat Gotong Royong: pelaksanaan nilai-nilai kehidupan sehari-hari harus dilandasi semangat saling hormat-menghormati, toleransi, tolong-menolong, bermusyawarah untuk mufakat, serta solidaritas sosial.

3.2.2. M i s i

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dengan kata lain sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik dan atau rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan visi, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah, yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi disusun dengan terlebih dahulu mengindentifikasi isu – isu Kerja, faktor – faktor lingkungan Kerja yangmempengaruhi, baik internal maupun eksternal, berupa variabel kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah, termasuk didalamnya melakukan evaluasi interaksi antar dan antara berbagai faktor tersebut, untuk kemudian menetapkan Misi daerah sebagaimana diuraikan dibawah ini. Sebab pada dasarnya Misi ditetapkan untuk memperjelas jalan atau langkah, yang akan dilakukan dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan.

Adapun Misi yang diampu kecamatan guna mewujudkan Visi, sebagai berikut:

Misi 5 :**”** Meningkatkankualitastatakelolapemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel **“**

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah, Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Baik, Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan.

3.2.3. Agenda Kerja Bupati dan Wakil Bupati

Agenda kerja merupakan serangkaian kegiatan- kegiatan agenda yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan kepada masyarakat

saat pelaksanaan kampanye. Agenda kerja menggambarkan kegiatan konkret yang mudah dimengerti masyarakat dan bermanfaat serta memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Posisi penjabaran agenda kerja dalam RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 sebagai pedoman Perangkat Daerah untuk menuangkannya ke dalam Rencanaa Kerja Perangkat Daerah yang mengampu agenda kerja tersebut.

Adapun agenda kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 yangterkait dengan tugas dan fungsi kecamatan, sebagai berikut:

Misi 5 : **“**Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel **“**

1. PengembanganKoperasi dan UMKM
2. Peningkatankesejahteraanpetani dan nelayan
3. Peningkatankapasitas SDM birokrasiuntuk mendukungpelayananpublik
4. Penataan wilayah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan

3.3.Telaahan Renja K/L

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencanaa Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah ”Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik Menegakan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”. Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu menetapkan kebijaksanaan nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, sertamembangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusatdaerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukungpengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

BerdasarkanhasiltelaahanRenjaKecamatanMerbau MataramadaRenja K/L yang terkaitdalamvisi misi tujuan sasaran kecamatan Merbau Mataram bahwa kecamatan selaras dengan pemerintah dalam penyusunan Renja di sajikandalam table 3.1 berikut :

Tabel 3.1. Renja Kementrian Dalam Negeri 2020-2025 dan RenjaKec. Merbau MataramKab. Lampung Selatan 2021-2026

RENTSRA	VI	MIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKAT
1	*2*	*3*	*4*	*5*	
KecamatanMerbau Mataram	Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan yang Berintegritas, Maju dan Sejahtera dengan Semangat Gotong Royong	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayan publlik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan di kecamatan yang bersih, akuntabel, efektif, dan profesional	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan kualitas pelayanan publik	IndeksKepua san Masya
				Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat desa/	Presentasepenyelesaia
KementrianDalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalammemperkuatpenyelenggaraanpemerintahandalam negeri, untukmewujudkanVisi dan MisiPresiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan	Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokr

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan HidupKerja

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah danKajian Lingkungan Hidup Kerja Sebagai modal dasar Kecamatan Merbau Mataram dalam mendukung Visi dan Mis iKabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Kerja bahwa wilayah Kecamatan Merbau Mataram secara topografis sebagaian besarb entuk permukaan tanahnya adalah dataran sedang dengan ketinggian dari permukaanl autk urang dari 100M. Adapun penduduknya sebagaian besar bermata pencaharian sebagai petani tanam padi dan palawija. Hal ini sesuai dengan kondisi wilayahnya yang merupakan wilayah dataran sedang terdiri dari sumber daya alam yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia, sehingga perluadanya pelestarian alam, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan pertanian.

BerdasarkanPasal 9 ayat 7 poin b Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011- 2031, Kecamatan Merbau Mataram termasuk dalam Pusat Pelayanan Lokal yang mempunyai fungsi sebagai pusat kegiatan pertanian dan Perkebunan. Oleh karena itu perlu adanya bantuan dari pemerintah baik untuk pengembangan pertanian, Perkebunan maupun infrastruktur akses jalan yang memadai.

3.5 Penentuan isu-isu Kerja

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional.

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunanyang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Isu-isu Kerja tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Merbau Mataram di masa sekarang dan yang akan datang.

Berdasarkan kepada tantangan yang dihadapi dan peluang yang ada serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan, isu-isu Kerja di wilayah Kecamatan Merbau Mataramsebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi yang terpadu antar Instansi di wilayah kecamatan dan OPD terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.
2. Kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
3. Infrastruktur dasar dan pelayanan publik
4. Pembinaan kehidupan dan kerukunan umat beragama
5. Dukungan pergerakan Masyarakat oleh lintas sector dalam upaya pencapaian Herd immunity penurunan kasus covid -19 dengan peningkatan cakupan vaksinasi covid-19 sampai tahun 2026.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran Kerja yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu Kerja.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* Program Perangkat Daerah. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu Kerja yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi Kabupaten Lampung Selatan tersebut, maka sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Merbau Mataram melaksanakan *Misi ke-5(Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel)*

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 maka ditetapkanlah Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah (PD) dalam hal ini Kecamatan Merbau Mataram adalah sebagai berikut :

TujuanKecamatanMerbauMataram :

a. MeningkatkanTata kelola pemerintahan kecamatan yang bersih, akuntabel, efektif, dan professional

Sasaran Kecamatan Merbau Mataram:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan kualitas pelayanan publik Kecamatan
2. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban serta pemberdayaan masayarakat desa/kelurahan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Merbau Mataram tahun 2021- 2026 yang selaras dengan Visi Misi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel
4.1. Sedangkan Indikator Sasaran Kecamatan Merbau Mataram yang sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada Tabel 4.2. berikut ini :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sesuai Dengan Visi, dan Misi RPJMD Kab. Lampung Selatan 2021- 2026

NO	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	AWAL RPJMD	AKHIR PERIODE RPJMD	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
									2021	2022	2023	2025	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan yang Berintegritas, Maju dan Sejahtera dengan Semangat Gotong Royong	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayan publlik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel	Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Partisipatif, Taat Hukum, Demokratis, Responsif, dan Transparan	Indeks Reformasi Birokrasi (poin)	70	74	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (poin)	70	71	72	73	73	74

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Merbau Mataram Tahun 2025

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	SASARAN OPD (MERBAU MATARAM)		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR SASARAN OPD	FORMULASI	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
													2021	2022	2023	2025	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
MeningkatkanTata kelola pemerintahan kecamatan yang bersih, akuntabel, efektif, dan professional	IndeksKepuasan Masyarakat (poin)	81	84	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan kualitas pelayanan publik Kecamatan	1	Pendekatan dan tranfer informasi tentang makna pemberdayaan masyarakat terlebih dalam masa pandemi Covid-19	1	Fasilitasi guna pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui pembinaan UMKM pada masa pandemi Covid - 19	IndeksKepuasan Masyarakat (poin)	Survey tingkat kepuasaan masyarakat terhadap layanan aparatur kecamatan yang minimal dilaksanakan 1 tahun sekali	80	81	82	82	83	83	84	84
						2	Koordinasi dan fasilitasi Masyarakatdalam promosi produknya	2	Mengikutsertakan UMKM dalam ajang promosi Produk di tingkat Kabupaten										
						3	Koordinasi dengan Pem-Des tentang pentingnya peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan.	3	Musrenbang Kec dengan suasana dan kondisi yang menarik minat masyarakat, yaitu dengan menampilkan potensi desa, baik dibidang seni, produk/ hasil desa dan lain-lain										

				2	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban serta pemberdayaan masayarakat desa/kelurahan	1	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dan rekomendasi terhadap aparatur desa dan kecamatan dalam pelaksanaan tugas yang diberikan atasannya	1	Gotong royong gunapeningkatankeamanan dan ketertibanumum, seperti : membentukkelompokrondamalam/ siskamling, membentuksatgasdarikalangan pemuda di setiap RT, penyediaanalattelekomunikasi di setiapdesasertapendekatankeagamaan pada kelompokkeagamaan.	Presentase penyelesaian pengaduan masyarakat (persen)	Jumlah pengaduan yang dilaporkan dibagi dengan jumlah pengaduan yang diselesaikan x 100%	100	100	100	100	100	100	100	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1. Strategi

Strategi Kecamatan Merbau Mataram pada dasarnya merupakan derivate dari upaya pencapaian visi dan misi Kecamatan Merbau Mataram dan penjabaran atas tugas pokok oleh Kecamatan Merbau Mataram. Fokus strategi yang dimaksudantara lain adalah:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana layanan publik
2. Meningkatnya sistem dan tata kelola perencanaan pembangunan
3. Pemberdayaan masyarakat dan aparatur
4. Pengembangan potensi lokal
5. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dan kerukunan hidup beragama.
6. Membangun kemitraan kerjasama dengan stakeholders.

1.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk menjalankan strategi di atas, kebijakan yang ditempuh PD Kecamatan Merbau Mataram adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan model layanan berbasis Teknologi
2. Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan desa
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penerapan nilai-nilai keagamaan
4. Skala prioritas program dan kegiatan pembangunan

5. Fasilitasi pengembangan produk lokal
6. Penerapan tata kepemerintahan dan budaya kerja yang baik, serta pengembangan kapasitas kelembagaan, aparatur dan kemitraan.

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang ditetapkan di tingkat satuan kerja dalam menunjang pencapaian sasaran di tingkat Kabupaten. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah ini merupakan implementasi/penjabaran dari program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja adalah ukurank uantitatif dan/atauk ualitatif yang Menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebihj elasnya, indicator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaiant ujuano rganisasi yang diwujudkan dalamu kuran-ukuran tertentu, yang dilakukan oleh kelompok sasaran.Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik internal maupun eksternal Kecamatan Merbau Mataram. Untuk mencapai itu diperlukan suatu pendanaan yang lebih kita kenal dengan istilah pendanaan indikatif.

Program dan kegiatan yang telahditetapkan oleh KecamatanMerbau Mataram untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang

Hendak dicapai dalam kurunwaktu 5 (lima) tahun kedepan adalah program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Merbau Mataram. Rincian Program sesuai cascading dapatdilihat pada table T-C.27 sebagaimanaterlampir pada lampiran. Untuk 5 (lima) tahunkedepan, Program pada KecamatanMerbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan menjadisebanyak 4 (empat) program dengan rincian sebagai berikut: Berikut ini merupakan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan selama 5 (lima) tahun, yaitutahun 2025 :

II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Kegiatan:

2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasiKinerjaSKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan :

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

7) Fasilitasi Kunjungan Tamu

8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan :

1) Pengadaan Mebel

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan:

1) Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan Sub Kegiatan :

1) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

III. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan :

1) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

IV. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan :
   1) FasilitasiAdminitrasi Tata PemerintahanDesa
   2) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
   3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa
   4) Fasilitasi Penyelenggaraaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   5) Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
   6) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
   7) KoordinasiPendampinganDesa di Wilayah

Tabel 6.1 RENCANA PROGRAM,KEGIATANDAN PENDANAAN KECAMATAN MERBAU MATARAMKABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanan														Unit Kerja PD penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2025		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renja PD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan kualitas pelayanan publik Kecamatan	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (poin)	60	80	1,825,664,800	80	1,930,663,000	80	1,971,854,300	80	2,021,934,730	80	2,076,913,203	80	2,129,538,853	80	11,956,568,886	KecMerbau Mataram	Lam Sel
Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban serta pemberdayaan masayarakat desa / kelurahan	01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah Laporan Kinerja Perangkat Daerah	11 dok	12 dok	22,766,000	11 dok	23,050,000	11 dok	23,050,000	11 dok	23,050,000	11 dok	23,050,000	12 dok	23,250,000	68 Dok	138,216,000	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
	01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DokumenPerencanaanPerangkat Daerah	2 dok	3 dok	5,534,000	2 dok	5,550,000	2 dok	5,550,000	2 dok	5,550,000	2 dok	5,550,000	3 dok	5,750,000	14 dok	33,484,000	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
	01.02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1 dok	3,303,000	1 dok	3,350,000	1 dok	3,350,000	1 dok	3,350,000	1 dok	3,350,000	1 dok	3,350,000	6 dok	20,053,000	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
	01.02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen RKA P-SKPD	1 dok	1 dok	3,303,000	1 dok	3,350,000	1 dok	3,350,000	1 dok	3,350,000	1 dok	3,350,000	1 dok	3,350,000	6 dok	20,053,000	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
	01.02.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	1 dok	1 dok	3,303,000	1 dok	3,350,000	1 dok	3,350,000	1 dok	3,350,000	1 dok	3,350,000	1 dok	3,350,000	6 dok	20,053,000	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
	01.02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPPA-SKPD	1 dok	1 dok	3,303,000	1 dok	3,350,000	1 dok	3,350,000	1 dok	3,350,000	1 dok	3,350,000	1 dok	3,350,000	6 dok	20,053,000	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
	01.02.01.06	Koordinasi dan penyusuan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	5 dok	5 dok	4,020,000	5 dok	4,100,000	5 dok	4,100,000	5 dok	4,100,000	5 dok	4,100,000	5 dok	4,100,000	30 dok	24,520,000	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
	01.02.02	AdministrasiKeuanganPerangkat Daerah	AdministrasiKeuangan	100%	100%	1,492,210,000	100%	1,518,500,000	100%	1,533,500,000	100%	1,548,600,000	100%	1,563,750,000	100%	1,578,900,000	100%	9,235,460,000	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
	01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 bln	14 bln	1,300,000,000	14 bln	1,320,000,000	14 bln	1,330,000,000	14 bln	1,340,000,000	14 bln	1,350,000,000	14 bln	1,360,000,000	84 bln	8,000,000,000	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
	01.02.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bln	12 bln	184,100,000	12 bln	190,000,000	12 bln	195,000,000	12 bln	200,000,000	12 bln	205,000,000	12 bln	210,000,000	72 bln	1,184,100,000	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram

01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 dok	1 dok	5,000,000	1 dok	5,000,000	1 dok	5,000,000	1 dok	5,000,000	1 dok	5,000,000	1 dok	5,000,000	6 dok	30,000,000	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
01.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	16 dok	16 dok	3,110,000	16 dok	3,500,000	16 dok	3,500,000	16 dok	3,600,000	16 dok	3,750,000	16 dok	3,900,000	96 dok	21,360,000	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
	AdministrasiKepegawaianPerangkat Daerah	AdministrasiKepegawaian																	
01.02.05			100%	100%	6,625,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	81,625,000	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Pakaian Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30 stel	30 stel	6,625,000	60 stel	15,000,000	60 stel	15,000,000	60 stel	15,000,000	60 stel	15,000,000	60 stel	15,000,000	360 stel	81,625,000	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
	AdministrasiUmumPerangkat Daerah	AdministrasiUmum																	
01.02.06			100%	100%	160,533,800	100%	230,013,000	100%	250,834,300	100%	275,917,730	100%	303,509,503	100%	333,860,453				
01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat-alat listrik dan komponen listrik kantor	12 bln	12 bln	3,444,500	12 bln	3,800,000	12 bln	4,200,000	12 bln	4,620,000	12 bln	5,082,000	12 bln	5,590,200	100%	1,554,668,786	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														72 bln	26,736,700	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
			13 unit	13 unit	62,375,000	15 unit	100,900,000	17 unit	110,990,000	17 unit	122,089,000	19 unit	134,297,900	20 unit	147,727,690	103 unit	678,379,590	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
	PenyediaanPeralatanRumahTangga	PeralatanRumahTangga																	
01.02.06.03							7,313,000	12 bln	8,044,300	12 bln	8,848,730	12 bln	9,733,603	12 bln	10,706,963	72 bln	48,412,896	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
01.02.06.04	PenyediaanBahanLogistik Kantor	Alat Tulis Kantor	12 bln	12 bln	3,766,300	12 bln	14,000,000	12 bln	15,500,000	12 bln	17,050,000	12 bln	18,755,000	12 bln	20,630,500	72 bln	99,253,500	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
			12 bln	12 bln	13,318,000	12 bln													
01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak dan Penggandaan	12 bln	12 bln	7,430,000	12 bln	8,000,000	12 bln	9,000,000	12 bln	9,900,000	12 bln	10,890,000	12 bln	11,979,000	72 bln	57,199,000	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	koranharian dan mingguan	12 bln	12 bln	4,800,000	12 bln	6,000,000	12 bln	6,600,000	12 bln	7,260,000	12 bln	7,986,000	12 bln	8,784,600	72 bln	41,430,600	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
01.02.06.06	FasilitasiKunjunganTamu	makan minum rapat dan tamu	30 kali	30 kali	51,000,000	30 kali	75,000,000	30 kali	80,000,000	30 kali	88,000,000	30 kali	96,800,000	30 kali	106,480,000	180 kali	497,280,000	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
01.02.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	perjalanan dinas luar dan dalam daerah	24 kali	24 kali	14,400,000	36 kali	15,000,000	36 kali	16,500,000	36 kali	18,150,000	36 kali	19,965,000	36 kali	21,961,500	204 kali	105,976,500	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
01.02.06.09																			
01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah	18 unit	18 unit	23,310,000	18 unit	37,000,000	18 unit	40,700,000	18 unit	44,770,000	18 unit	49,247,000	18 unit	54,171,700	95 unit	249,198,700	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
01.02.07.05	PengadaanMebel	Meja dan kursikantor	18 unit	18 unit		56 unit	37,000,000	18 unit	40,700,000	19 unit	44,770,000	20 unit	49,247,000	20 unit	54,171,700	95 unit	249,198,700	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jasa PenunjangUrusan Kantor																	
01.02.08	Pemerintahan Daerah		12 bln	12 bln	19,200,000	12 bln	31,400,000	12 bln	32,000,000	12 bln	33,500,000	12 bln	35,000,000	12 bln	37,000,000	72 bln	188,100,000	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Internet, Air & Listrik Kantor	12 bln	12 bln	19,200,000	12 bln	31,400,000	12 bln	32,000,000	12 bln	33,500,000	12 bln	35,000,000	12 bln	37,000,000	24 bln	188,100,000	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	PemeliharaanBarang																	
01.02.09	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		18 unit	18 unit	101,020,000	20 unit	75,700,000	22 unit	76,770,000	22 unit	81,097,000	25 unit	87,356,700	25 unit	87,356,700	132 unit	509,300,400	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
01.02.09.02	Penyediaanjasapemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan	Pembayaran jasa pajak dan servis kendaraan dinas																KecMerbau	Merbau
	PajakKendaraanperorangan Dinas ataukendaraan Dinas Jabatan		3 unit	3 unit	69,520,000	3 unit	43,200,000	3 unit	43,270,000	3 unit	47,597,000	3 unit	52,356,700	3 unit	52,356,700	18 unit	308,300,400	Mataram	Mataram

01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komputer, Laptop,AC, mesinrumput, alatpemadam, sound system	13 Unit	13 Unit	6,500,000	15 Unit	7,500,000	17 Unit	8,500,000	17 Unit	8,500,000	20 Unit	10,000,000	20 Unit	10,000,000	102 unit	51,000,000	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
01.02.09.09	Pemeliharaan Rehabiliasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor dan rumah dinas camat	2 Unit	2 Unit	25,000,000	2 Unit	25,000,000	2 Unit	25,000,000	2 Unit	25,000,000	2 Unit	25,000,000	2 Unit	25,000,000	12 unit	150,000,000	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa Yang diberdayakan dan berkembang	70%	70%	155,100,000	70%	195,420,000	70%	191,487,000	70%	210,635,700	70%	226,199,270	70%	248,819,197	70%	1,227,661,167	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
03.02.01	KoordinasiKegiatanPemberdayaanDesa	KegiatanPemberdayaanDesa	2 Keg	2 Keg	[illegible]	2 Keg	[illegible]	2 Keg	[illegible]	2 Keg	[illegible]	2 Keg	[illegible]	2 Keg	[illegible]	12 keg	[illegible]	KecMerbau [illegible]	Merbau [illegible]
03.02.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	Musrenbangtingkatkecamatan	1 Keg	1 Keg	50,000,000	1 Keg	65,000,000	1 Keg	50,000,000	1 Keg	55,000,000	1 Keg	55,000,000	1 Keg	60,500,000	6 keg	335,500,000	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
03.02.01.03	Peningkatan efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	LombaDesa	1 Keg	1 Keg	26,000,000	1 Keg	28,500,000	1 Keg	29,375,000	1 Keg	32,312,500	1 Keg	35,543,750	1 Keg	39,098,125	6 keg	190,829,375	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
03.02.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang diberdayakan (Lembaga)	3 Keg	3 Keg	79,100,000	3 Keg	101,920,000	3 Keg	112,112,000	3 Keg	123,323,200	3 Keg	135,655,520	3 Keg	149,221,072	18 Keg	701,331,792	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
03.02.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pembinaan UMKM dan Pameran promosi Kabupaten, semarak Merbau Mataram	3 Keg	3 Keg	79,100,000	3 Keg	101,920,000	3 Keg	112,112,000	3 Keg	123,323,200	3 Keg	135,655,520	3 Keg	149,221,072	18 Keg	701,331,792	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	90,000,000	100%	101,220,000	100%	111,342,000	100%	122,476,200	100%	134,723,820	100%	148,196,202	100%	707,958,222	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
04.02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Keg	4 Keg	90,000,000	3 Keg	101,220,000	3 Keg	111,342,000	3 Keg	122,476,200	3 Keg	134,723,820	3 Keg	148,196,202	19 Keg	707,958,222	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
04.02.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Linmas , MTQ , Safari Ramadhan dan Pengajian Akbar	1 Keg	4 Keg	90,000,000	3 Keg	101,220,000	3 Keg	111,342,000	3 Keg	122,476,200	3 Keg	134,723,820	3 Keg	148,196,202	19 Keg	707,958,222	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah aparat desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100%	-	-	100%	40,000,000	100%	77,000,000	100%	84,500,000	100%	91,000,000	100%	97,000,000	100%	389,500,000	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
06.02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	4 kali	40,000,000	7 kali	77,000,000	7 kali	84,500,000	7 kali	91,000,000	7 kali	97,000,000	32 kali	389,500,000	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram

	06.02.01.02	FasilitasiAdminitrasiPemerintahDesa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	1 kali	10,000,000	1 kali	11,500,000	1 kali	12,500,000	1 kali	13,000,000	1 kali	14,000,000	5 Keg	61,000,000	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
	06.02.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	-	-	1 Kali	10,000,000	1 Kali	11,000,000	1 Kali	12,000,000	1 Kali	13,000,000	4 Keg	46,000,000	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
	06.02.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-	-	-	-	-	1 kali	11,500,000	1 kali	12,500,000	1 kali	13,500,000	1 kali	14,000,000	4 Keg	51,500,000	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
	06.02.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	1 kali	10,000,000	1 kali	11,500,000	1 kali	12,500,000	1 kali	13,500,000	1 kali	15,000,000	5 Keg	62,500,000	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
	06.02.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	-	-	1 kali	10,000,000	1 kali	11,000,000	1 kali	12,000,000	1 kali	13,000,000	1 kali	14,000,000	5 Keg	60,000,000	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
	06.02.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Perberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-	-	-	1 kali	10,000,000	1 kali	11,500,000	1 kali	12,500,000	1 kali	13,000,000	4 Keg	47,000,000	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
	06.02.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-	-	-	1 kali	10,000,000	1 kali	11,500,000	1 kali	12,500,000	1 kali	13,500,000	1 kali	14,000,000	5 Keg	61,500,000	KecMerbau Mataram	Merbau Mataram
			JUMLAH		**2,070,764,800**			**2,267,303,000**		**2,351,683,300**		**2,439,546,630**		**2,528,836,293**		**2,623,554,252**		**14,281,688,275**		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kecamatan Merbau Mataram merupakan salah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang mengampu tugas bidang urusan kecamatan. Tingkat keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan bidang urusan yang diampu suatu perangkat daerah termasuk Kecamatan Merbau Mataram di ukur dengan indikator kinerja.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan perangkat daerah, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja perangkat daerah kedepan baik pengaruh dari luar maupun dari dalam perangkat daerah itu sendiri.

Secara rinci indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum Kecamatan Merbau Mataram yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 7.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 2020	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2026
			2021	2022	2023	2025	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	IndeksKepuasan Masyarakat (IKM)	80	81	82	82	83	83	84	84
2	Presentase penyelesaian pengaduan masyarakat (persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah aparat desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 merupakan penjabaran darivisi, misi dan program Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan selama 5 (lima) tahun mendatang, dengan memperhatikan tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

Rencana Kerja Kecamatan Merbau Mataram Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Merbau Mataram dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Merbau Mataram sebaga ikoordinator (fasilitator) wilayah Berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Lampung Selatan sebagai satuan kerja lintas sector dengan sebaik-baiknya;
2. Rencanaa Kerja Kecamatan Merbau Mataram merupakan acuan dan pedoman dalampenyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Merbau Mataram;
3 Rencanaa Kerja Kecamatan Merbau Mataram merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahun Kecamatan Merbau Mataram;
4. KecamatanMerbau Mataram berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencanaa Kerja Kecamatan Merbau Mataram dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam PD, disamping sangat tergantung dari peran masyarakat dan dunia usaha

beserta aparatur pemerintah, diperlukan pula sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran serta disiplin para penyelenggara pembangunan di segala bidang. Hal ini dapat dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan program kegiatan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kitas emua dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

Merbau Mataram,3 Januari 2025

CAMAT MERBAU MATARAM



JHONI IRZAL, S>Sos
Pembina TK.I /IV.b
NIP. 19700710 199703 1 004

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KECAMATAN MERBAU MATARAM

Alamat Jalan Pejuang 45 No 1, Merbau Mataram Kode Pos 35452

KEPUTUSAN CAMAT MERBAU MATARAM

NOMOR :C/ 032.a / VII.13 / 2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANAA KERJA (RENJA) KECAMATAN MERBAU MATARAM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

CAMAT MERBAU MATARAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Kecamatan Merbau Mataram sesuai arah kebijakan dan visi-misi Kepala Daerah maka perlu disusun Rencanaa Kerja (Renja) Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Padamu Negeri.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Sesuaikan dengan keseragaman dasar hokum dengan kriteria Perangkat Daerah masing-masing (dasar hukum terbaru)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MERBAU MATARAM TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN MERBAU MATARAM TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencanaa Kerja (Renja) Tahun 2025 yang terdiri dari unsur Kecamatan Merbau Mataram dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun agenda Kerja Tim Penyusunan Renja Tahun 2025;
b. Menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indicator program, kegiatan periode sebelumnya;
c. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
d. Menyajikan data *time series* selama lima tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani Perangkat Daerah;
e. Melakukan pembahasan identifikasi isu Kerja yang berkembang dimasyarakat
f. Melakukan pembahasan, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Kecamatan Merbau Mataram;
g. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Merbau Mataram;
h. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan, kewenangan Bupati kepada Camat;
i. Menyusun dan mengkompilasi data dalam Renja Kecamatan Merbau Mataram.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merbau Mataram pada tanggal 3 Januari 2025
CAMAT MERBAU MATARAM,



JHONI IRZAL, S.Sos
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19790517 200003 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT MERBAU MATARAM
NOMOR : B / 032.a /VII.13 /2021
TANGGAL : 1 Maret 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RENCANAA KERJA (RENJA) KECAMATAN MERBAU MATARAM TAHUN 2025.

Ketua : CamatMerbau Mataram

Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Merbau Mataram

Anggota : 1. Kasi Ekobang
2. Kasi Pemerintahan
3. Kasi Kessos , Naker dan Infokom
4. Kasi Trantibum
5. Kasi Pertanahan dan Penata Ruang
6. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
7. Kasubbag Umum

Merbau Mataram, 3 Januari 2025
CAMAT MERBAU MATARAM,

JHONI IRZAL, S.Sos
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19790517 200003 1 002